



PERATURAN BUPATI
LIMA PULUH KOTA NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH



BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

6. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah 2026 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2026 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappelitbangda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun berdasarkan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.
- (3) Rancangan KUA dan PPAS disampaikan Bupati kepada dewan perwakilan rakyat daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika yang terdiri atas:
 - a. bab I memuat pendahuluan;
 - b. bab II memuat gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. bab III memuat kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;

- d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Bupati melalui kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2026;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2026.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Bappelitbangda menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 setiap satu kali 3 (tiga) bulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Bappelitbangda kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) RKPD Tahun 2026 dapat diubah apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



undangkan di Sarilamak
da tanggal 12 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH
BUPATEN LIMA PULUH KOTA

HERMAN AZMAR
KOTA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SIKUN 2025 NOMOR 18

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GRAFIK		xiii
DAFTAR GAMBAR		xvii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	I-6
1.3	Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4	Maksud dan Tujuan	I-9
1.5	Sistematika Dokumen RKPD	I-9
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.1	Gambaran Kondisi Umum Daerah	II-1
	2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-49
	2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-49
	2.2.2 Kesehatan untuk Semua	II-58
	2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata	II-63
	2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif	II-68
	2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	II-69
	2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif	II-72
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-75
	2.3.1 Daya Saing Sumber Daya	II-75
	2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	II-77
	2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau	II-86
	2.3.4 Transformasi Digital	II-87
	2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-88
	2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-92
	2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro	II-96
2.4	Aspek Pelayanan Umum	II-102
	2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	II-102
	2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh & Demokrasi Substansial	II-107
	2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-109
	2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-110
2.5	Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-161

	2.5.1 Evaluasi RKPD Sampai dengan Akhir Tahun 2024	II-379
2.6	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-399
	2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Daerah	II-399
2.7	Isu Strategis	II-430
	2.7.1 Isu Strategis Nasional	II-430
	2.7.2 Isu Strategis Provinsi	II-430
	2.7.3 Isu Strategis Daerah	II-431
2.8	Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024	II-432
2.9	Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2030	II-436
	2.9.1 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-437
	2.9.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar	II-466
	2.9.3 Capaian Indikator Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	II-467
	2.9.4 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB/SDGs	II-468
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-1
3.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
	3.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026	III-1
	3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	III-2
	3.1.3 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	III-4
3.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-7
	3.2.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-8
	3.2.2 Neraca Daerah	III-14
	3.2.3 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	III-16
	3.2.4 Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2026	III-23
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-1
	4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-1
	4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV-2
	4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-5
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2026	IV-7
	4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026	IV-8
	4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV-16

	4.2.3 Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten	IV-20
	4.2.4 Lima Puluh Kota-The Central of Agro	IV-35
	4.2.5 Prioritas Pembangunan Kabupeten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-38
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	V-1
	5.1 Kerangka Pendanaan Tahun 2026	V-1
	5.2 Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2026	V-2
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VI-1
	6.1 Indikator Kinerja Makro	VI-1
	6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	VI-1
	6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	VI-4
BAB VII	PENUTUP	VII-1

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-3
Tabel 2.2	Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-3
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-5
Tabel 2.4	Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai	II-5
Tabel 2.5	Kategori Curah Hujan Menurut BMKG	II-6
Tabel 2.6	Jumlah Curah Hujan per Bulan Tahun 2022	II-7
Tabel 2.7	Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023	II-7
Tabel 2.8	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.9	Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-10
Tabel 2.10	Sebaran Lahan dan Produksi Jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-10
Tabel 2.11	Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-11
Tabel 2.12	Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-12
Tabel 2.13	Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-12
Tabel 2.14	Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-13
Tabel 2.15	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-14
Tabel 2.16	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-14
Tabel 2.17	Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.18	Indeks Daya Dukung per Kecamatan	II-16
Tabel 2.19	Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.20	Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.21	Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-19
Tabel 2.22	Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-20
Tabel 2.23	umlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-20
Tabel 2.24	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-20
Tabel 2.25	Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-21
Tabel 2.26	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-22
Tabel 2.27	Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-26
Tabel 2.28	Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-27
Tabel 2.29	Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-27

Tabel 2.30	Luas Penggunaan Sawah Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Hektar) Tahun 2023	II-28
Tabel 2.31	Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2030	II-28
Tabel 2.32	Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021	II-30
Tabel 2.33	Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-32
Tabel 2.34	Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-33
Tabel 2.35	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-33
Tabel 2.36	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-34
Tabel 2.37	Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-35
Tabel 2.38	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-36
Tabel 2.39	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-37
Tabel 2.40	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2024	II-37
Tabel 2.41	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2022 - 2024	II-38
Tabel 2.42	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024	II-39
Tabel 2.43	Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-42
Tabel 2.44	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-44
Tabel 2.45	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2024	II-46
Tabel 2.46	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-47
Tabel 2.47	Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2024	II-48
Tabel 2.48	Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2024	II-48
Tabel 2.49	Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Tahun 2020 – 2024 (Rupiah/kapita/bulan)	II-50
Tabel 2.50	Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (ribu jiwa)	II-51
Tabel 2.51	Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-58
Tabel 2.52	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM	II-60
Tabel 2.53	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)	II-60
Tabel 2.54	Jumlah Kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-61
Tabel 2.55	Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-62
Tabel 2.56	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021–2024	II-64
Tabel 2.57	Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2024	II-64
Tabel 2.58	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2024	II-65

Tabel 2.59	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2024	II-65
Tabel 2.60	Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-65
Tabel 2.61	Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-67
Tabel 2.62	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 (%)	II-68
Tabel 2.63	Warisan Budaya Tak Benda (WbtB) Kabupaten Lima Puluh Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	II-70
Tabel 2.64	Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024	II-71
Tabel 2.65	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-72
Tabel 2.66	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-73
Tabel 2.67	Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2022	II-74
Tabel 2.68	Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-75
Tabel 2.69	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.70	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota	II-76
Tabel 2.71	Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-79
Tabel 2.72	Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023	II-79
Tabel 2.73	Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023	II-80
Tabel 2.74	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-84
Tabel 2.75	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-85
Tabel 2.76	Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2023	II-87
Tabel 2.77	Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 s/d Mei 2024	II-89
Tabel 2.78	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-91
Tabel 2.79	Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-92
Tabel 2.80	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-93
Tabel 2.81	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.82	Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-95
Tabel 2.83	Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023	II-97
Tabel 2.84	Perkembangan Nilai Transaksi Saham Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-98
Tabel 2.85	Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023	II-99

Tabel 2.86	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-103
Tabel 2.87	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024 Berdasarkan Penilaian Ombudsman	II-104
Tabel 2.88	Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB	II-104
Tabel 2.89	Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023	II-106
Tabel 2.90	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023	II-106
Tabel 2.91	Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2022	II-107
Tabel 2.92	Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023	II-108
Tabel 2.93	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-109
Tabel 2.94	Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-110
Tabel 2.95	Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-113
Tabel 2.96	Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-114
Tabel 2.97	Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-114
Tabel 2.98	Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-114
Tabel 2.99	Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-115
Tabel 2.100	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024	II-115
Tabel 2.101	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024	II-116
Tabel 2.102	Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022	II-116
Tabel 2.103	Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.104	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM	II-117
Tabel 2.105	Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2023	II-118
Tabel 2.106	Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-119
Tabel 2.107	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-120
Tabel 2.108	Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2020 - 2024	II-121
Tabel 2.109	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024	II-123
Tabel 2.110	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota	II-128
Tabel 2.111	Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-129
Tabel 2.112	Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-130

Tabel 2.113	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024	II-130
Tabel 2.113.a	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran	II-131
Tabel 2.114	Data Wilayah Managemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-131
Tabel 2.115	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-132
Tabel 2.116	Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota 2024	II-132
Tabel 2.117	Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-133
Tabel 2.118	Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-134
Tabel 2.119	Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.120	Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-135
Tabel 2.121	Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-136
Tabel 2.122	Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-136
Tabel 2.123	Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.124	Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-138
Tabel 2.125	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2024	II-139
Tabel 2.126	Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	II-140
Tabel 2.127	Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-140
Tabel 2.128	Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.129	Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-142
Tabel 2.130	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-143
Tabel 2.131	Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-143
Tabel 2.132	Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-144
Tabel 2.133	Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024	II-144
Tabel 2.134	Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.135	Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-145
Tabel 2.136	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-145
Tabel 2.137	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-146
Tabel 2.138	Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-147

Tabel 2.139	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Tahun 2024 dalam milyar	II-147
Tabel 2.140	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-147
Tabel 2.141	Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-148
Tabel 2.142	Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-149
Tabel 2.143	PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB Tahun 2023	II-149
Tabel 2.144	Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-150
Tabel 2.145	Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-150
Tabel 2.146	Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024	II-151
Tabel 2.147	Nilai Produksi Menurut Jenis Industri di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024	II-151
Tabel 2.148	Hasil Evaluasi SAKIP	II-152
Tabel 2.149	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.150	Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.151	Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.152	Data Target dan Penerimaan Zakat Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2018-2022	II-153
Tabel 2.153	Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2023	II-154
Tabel 2.154	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-154
Tabel 2.155	APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023	II-155
Tabel 2.156	Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-155
Tabel 2.157	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan (Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-156
Tabel 2.158	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023	II-157
Tabel 2.159	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-157
Tabel 2.160	Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	II-158
Tabel 2.161	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota	II-159
Tabel 2.162	Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-159
Tabel 2.163	Evaluasi Pelaksanaan Program	II-163
Tabel 2.164	Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2024	II-380
Tabel 2.165	Kriteria Penilaian dan Interval Nilai Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD	II-382
Tabel 2.166	Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan Bidang Urusan pada Perubahan RKPD 2024	II-383

Tabel 2.167	Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026	II-392
Tabel 2.168	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan	II-405
Tabel 2.169	Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan	II-405
Tabel 2.170	Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)	II-409
Tabel 2.171	Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-433
Tabel 2.172	Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-434
Tabel 2.173	Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-435
Tabel 2.174	Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-435
Tabel 2.175	Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-435
Tabel 2.176	Capaian Indikator SPM Urusan Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-436
Tabel 2.177	Indikator Khusus yang Bukan Menjadi Kewenangan Kabupaten	II-438
Tabel 2.178	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota	II-439
Tabel 2.179	Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-440
Tabel 2.180	Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target	II-441
Tabel 2.181	Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)	II-451
Tabel 2.182	Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data	II-461
Tabel 2.183	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Sosial	II-466
Tabel 2.184	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Ekonomi	II-466
Tabel 2.185	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan	II-467
Tabel 2.186	Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola	II-467
Tabel 2.187	Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM	II-468
Tabel 2.188	Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs	II-468
Tabel 3.1	Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	III-3
Tabel 3.2	Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	III-7
Tabel 3.3	Efektifitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (%)	III-11
Tabel 3.4	Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020-2024	III-11
Tabel 3.5	Perkembangan Realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2020-2024 (Rp juta)	III-12
Tabel 3.6	Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020-2024 (Rp juta)	III-12
Tabel 3.7	Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024 (Rp juta)	III-13
Tabel 3.8	Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2024 (Rp. Juta)	III-13
Tabel 3.9	Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2020-2024 (Rp juta)	III-15

Tabel 3.10	Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	III-15
Tabel 3.11	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2027	III-18
Tabel 3.12	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2027	III-21
Tabel 3.13	Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2023-2027	III-22
Tabel 3.14	Kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	III-23
Tabel 3.15	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2026	III-24
Tabel 4.1	Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	IV-3
Tabel 4.2	Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah	IV-5
Tabel 4.3	Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026	IV-7
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029	IV-8
Tabel 4.5	Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026	IV-16
Tabel 4.6	Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	IV-36
Tabel 4.7	Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	IV-36
Tabel 4.8	Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	IV-37
Tabel 4.9	Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	IV-37
Tabel 4.10	Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-38
Tabel 4.11	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	IV-39
Tabel 4.12	Program- Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju 2027	IV-41
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026	V-1
Tabel 5.2	Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026	V-2
Tabel 5.3	Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2026	V-5
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2027	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2027	VI-2
Tabel 6.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Sasaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2027	VI-3
Tabel 6.4	Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2027	VI-4

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 2.1	Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (KM ²)	II-2
Grafik 2.2	Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-15
Grafik 2.3	Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-17
Grafik 2.4	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-34
Grafik 2.5	Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-36
Grafik 2.6	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024	II-38
Grafik 2.7	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2024	II-44
Grafik 2.8	Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024	II-47
Grafik 2.9	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)	II-50
Grafik 2.10	Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-51
Grafik 2.11	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-52
Grafik 2.12	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-52
Grafik 2.13	Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 (%)	II-53
Grafik 2.14	PDRB per Kapita (ADHB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)	II-54
Grafik 2.15	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (juta rupiah)	II-54
Grafik 2.16	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)	II-55
Grafik 2.17	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024 (%)	II-55
Grafik 2.18	Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-56
Grafik 2.19	Gini Rasio Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-57
Grafik 2.20	Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Poin)	II-57
Grafik 2.21	Indek Pembangunan Manusia (IPM) menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2024 (poin)	II-58
Grafik 2.22	Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)	II-59
Grafik 2.23	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-59

Grafik 2.24	Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM (%)	II-60
Grafik 2.25	Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2023 berdasarkan Hasil Survei	II-61
Grafik 2.26	Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-62
Grafik 2.27	Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 – 2024 (%)	II-63
Grafik 2.28	Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh dengan Provinsi Tahun 2019-2023	II-63
Grafik 2.29	Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024	II-66
Grafik 2.30	Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Propinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2020 - 2024 (Tahun)	II-66
Grafik 2.31	Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-69
Grafik 2.32	Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022- 2023	II-73
Grafik 2.33	Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020 - 2024	II-74
Grafik 2.34	Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tahu 2022	II-75
Grafik 2.35	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat	II-77
Grafik 2.36	Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-77
Grafik 2.37	Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-78
Grafik 2.38	Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-81
Grafik 2.39	Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-81
Grafik 2.40	Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2023	II-82
Grafik 2.41	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-83
Grafik 2.42	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024	II-84
Grafik 2.43	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-86
Grafik 2.44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-87

Grafik 2.45	Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2023	II-88
Grafik 2.46	Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng	II-89
Grafik 2.47	Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras	II-90
Grafik 2.48	Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting	II-90
Grafik 2.49	Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	II-91
Grafik 2.50	Perbandingan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-92
Grafik 2.51	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-93
Grafik 2.52	Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-95
Grafik 2.53	Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-99
Grafik 2.54	Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 – 2023 (%)	II-97
Grafik 2.55	Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019– 2023 (%)	II-99
Grafik 2.56	Perkembangan Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-100
Grafik 2.57	Perkembangan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024 (%)	II-101
Grafik 2.58	Perbandingan Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023	II-102
Grafik 2.59	Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-103
Grafik 2.60	Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional Tahun 2022 - 2023	II-105
Grafik 2.61	Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023	II-106
Grafik 2.62	Perbandingan Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2023	II-107
Grafik 2.63	Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022	II-108
Grafik 2.64	APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-111
Grafik 2.65	Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-111
Grafik 2.66	Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-112
Grafik 2.67	Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-112
Grafik 2.68	Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024	II-113

Grafik 2.69	Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2024 berdasarkan Hasil Survei	II-118
Grafik 2.70	Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-119
Grafik 2.71	Angka Kematian Balita dari Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-120
Grafik 2.72	Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024	II-121
Grafik 2.73	Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024	II-122
Grafik 2.74	Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024	II-123
Grafik 2.75	Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 – 2024	II-125
Grafik 2.76	Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 – 2024	II-125
Grafik 2.77	Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024	II-125
Grafik 2.78	Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024	II-126
Grafik 2.79	Persentase Daerah Irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024	II-127
Grafik 2.80	Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024	II-129
Grafik 2.81	Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-138
Grafik 2.82	Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024	II-141
Grafik 2.83	Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024	II-148
Grafik 2.84	Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-158
Grafik 2.85	Capaian SPM Seluruh Bidang Kab/Kota Se-Sumatera Barat 2024	II-433
Grafik 2.86	Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan	II-438
Grafik 2.87	Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-441
Grafik 2.88	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-451
Grafik 2.89	Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-461
Grafik 2.90	Indikator TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Pilar	II-466
Grafik 3.1	Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (dalam Juta Rupiah)	III-8
Grafik 3.2	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (Rp Juta)	III-9
Grafik 3.3	Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (%)	III-10

Grafik 3.4	Realisasi Pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (Rp. Juta)	III-14
Grafik 4.1	Capaian IP SPM Seluruh Indonesia Tahun 2024	IV-20
Grafik 4.2	Hasil Capaian IP SPM Seluruh Kabupaten Kota Provinsi Sumataera Barat Tahun 2024	IV-20
Grafik 4.3	Persentase realisasi Capaian SPM Tahun 2024	IV-21

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1.1	Keterkaitan antar Dokumen Perencanaan	I-2
Gambar 1.2	Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026	I-3
Gambar 1.3	Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026	I-4
Gambar 1.4	Keterkaitan Antar Dokumen	I-8
Gambar 2.1	Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-2
Gambar 2.2	Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota	II-4
Gambar 2.3	Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-6
Gambar 2.4	Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluhh Kota dalam Perspektif Makro	II-23
Gambar 2.5	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka <i>Basic Infrastructure Improvement</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-24
Gambar 2.6	Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka <i>Complite – Experience Tourism</i> di Kabupaten Lima Puluh Kota	II-24
Gambar 2.7	Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota	II-26
Gambar 2.8	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota	II-29
Gambar 2.9	Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana	II-40
Gambar 2.10	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional	II-440

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Periode 2025-2045 menandai dimulainya perubahan besar dalam pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pemerintah Pusat sampai Pemerintah Daerah baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah menyusun rencana jangka panjang daerah dimana *common goal* nya adalah mencapai Indonesia Emas 2045. Dalam rangka pencapaian kondisi Indonesia emas tersebut maka perencanaan jangka panjang tentu harus di *breakdown* menjadi perencanaan yang memiliki durasi lebih pendek baik untuk periode lima tahunan maupun periode satu tahunan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan tegas menyatakan bahwa perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan prosesnya dilakukan secara berjenjang dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yaitu tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

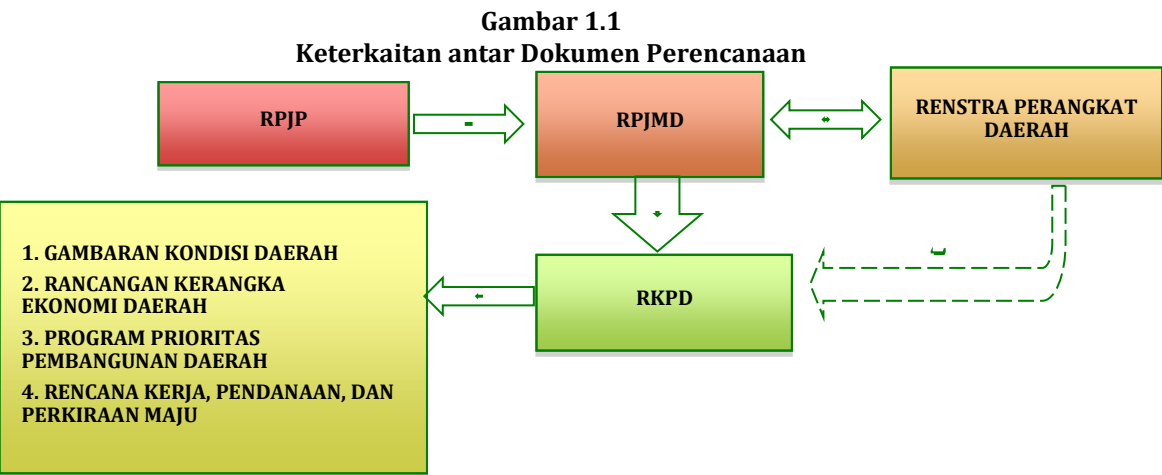
Sebagai payung hukum utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengharuskan pola penyelenggaraan pemerintahan menerapkan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri dimana tujuan akhirnya memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat. Untuk itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut juga membuka ruang bagi Pemerintah Daerah dalam berinovasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan publik. Pasal 386 dalam undang-undang tersebut yang menyatakan bahwa "dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi". Inovasi yang dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berpedoman pada prinsip sebagai berikut: peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Selain itu, adanya Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menunjukkan komitmen Pemerintah terhadap riset dan Inovasi di Indonesia. Pada tahun 2024 nilai indeks inovasi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 45,72 (inovatif), inovasi ini merupakan suatu upaya yang bisa dilakukan untuk melakukan suatu proses dengan mengenalkan dan menerapkan produk atau prosedur yang baru, dimana tujuannya adalah dalam rangka efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga bisa memberikan hasil yang optimal. Mengingat cakupan inovasi yang luas, dimana tidak hanya di tatanan pelaksanaan, inovasi memungkinkan juga diterapkan di ranah perencanaan, pengawasan, dan pelaporan kegiatan, sehingga bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

RKPD Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berada pada masa transisi dari penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026 tahun ke 5 dan RPJPD Tahun 2025-2045 periode pertama serta RPJMD Tahun 2025-2029 tahun kedua. Substansi standarnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017, diantaranya memuat gambaran umum kondisi Daerah, kerangka ekonomi dan keuangan Daerah, sasaran dan prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan. Di samping substansi standar sebagaimana tersebut di atas, RKPD Tahun 2026 ini juga berisi hal-hal yang dianggap menjadi isu-isu dominan yang berkembang di masyarakat ataupun arahan prioritas dari Pemerintah Pusat, seperti: prevalensi stunting, pengarusutamaan gender, Standar Pelayanan Minimal, dan hal yang terkait dengan inovasi daerah, serta beberapa hal lain.

RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk tahun 2026, yang disusun sebagai implementasi RPJMD Tahun 2025-2029, dimana dalam penyusunannya harus menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang tertuang dalam RPJMD. Di samping itu, RKPD Tahun 2026 ini juga harus mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 (RKPD Provinsi 2026), Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (RKP 2026), dan Program Strategis Nasional. Mempedomani

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 (RKPD Provinsi 2026) dimaksudkan untuk menyelaraskan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kabupaten dengan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Provinsi. Sementara itu, terkait dengan mempedomani RKP 2026 dan program strategis nasional bermakna penyelarasan prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan tahunan daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah yang tertuang dalam RKP dan program strategis nasional Tahun 2026.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan dokumen-dokumen perencanaan yang telah ada, keterkaitan ini tidak hanya terhadap Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, tetapi juga berkait dengan RPJPD Tahun 2025-2045. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, dimana periode perencanaannya ini mengikuti periode RPJMD, yaitu 2025-2029. Sebagai implementasi dari Renstra Perangkat Daerah ini, masing-masing Perangkat Daerah akan Menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah ini menjadi substansi dari RKPD yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan. Keterkaitan antar dokumen perencanaan sebagaimana tersebut di atas sebagaimana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Dokumen RKPD Tahun 2026 mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai berikut:

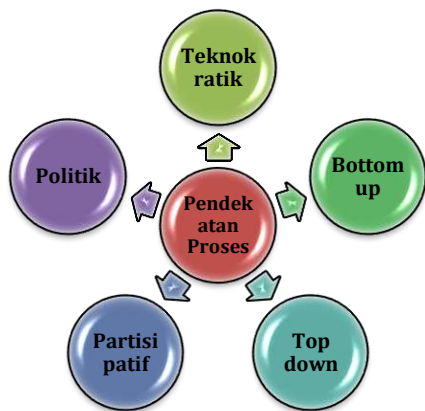
1. Secara substansial memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan perangkat daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam satu tahun;
2. Secara normatif menjadi dasar penyusunan rancangan kebijakan umum APBD (KUA) dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD);
3. Secara operasional memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam rencana kerja (Renja) perangkat daerah; dan
4. Secara faktual menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Penyusunan RKPD menggunakan pendekatan proses dan pendekatan substansi, yang diuraikan sebagaimana berikut:

a. Pendekatan Proses

Pendekatan proses terdiri atas pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, *top down* dan *bottom up*. Pendekatan ini dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 1.2
Pendekatan Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026



Pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat dalam hal menerima masukan dan saran terhadap RKPD. Pendekatan politik dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang tercermin dalam program, kegiatan dan sub kegiatan dalam dokumen RKPD.

Pendekatan *top down* dilakukan dengan mengacu pada arah kebijakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2045 dan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2045. Pendekatan *bottom up* dilakukan dengan memperhatikan usulan dari nagari dan kecamatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) nagari dan Kecamatan yang dihadiri oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

b. Pendekatan Substansi

Pendekatan substansi ini merupakan pendekatan dengan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Pendekatan tematik merupakan pendekatan terhadap tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan pendekatan holistik adalah penjabaran tematik dari tema pembangunan ke dalam perencanaan dan penganggaran yang terpadu mulai dari hulu sampai ke hilir berupa rangkaian kegiatan. Pendekatan integratif merupakan upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Pemerintah Daerah dilihat dari peran Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya pendekatan spasial adalah kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsi lokasi harus berkaitan satu sama lain dan adanya keterkaitan antara wilayah.

Berkenaan dengan tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2026, dengan mempedomani Permendagri Nomor 86 tahun 2017, secara ringkas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 1.3
Proses Penyusunan RKPD Tahun 2026



Uraian dari rangkaian proses penyusunan RKPD tersebut disampaikan dengan tahapan sebagaimana berikut:

1. **Persiapan Penyusunan RKPD**

Persiapan penyusunan RKPD terdiri dari Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD; Orientasi mengenai RKPD; Penyusunan agenda kerja tim penyusun; Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD. Tahapan persiapan penyusunan ini dititikberatkan kepada menyiapkan semua kebutuhan dalam proses penyusunan dokumen, baik berupa sumber daya manusianya, maupun data dan informasi, bahkan juga terhadap persiapan pengetahuan sumber daya manusianya itu sendiri.

2. **Penyusunan Rancangan Awal RKPD**

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana yaitu pada bulan Desember 2024. Rancangan awal RKPD kabupaten disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten, RKPD provinsi, RKP, dan program strategis nasional, serta pedoman penyusunan RKPD.

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Rancangan awal RKPD berisi substansi yang mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
- c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
- d. penelaahan rancangan awal renja Perangkat Daerah;
- e. perumusan permasalahan Pembangunan Daerah;
- f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
- g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
- h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada rkp dan program strategis nasional;
- i. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.;
- j. perumusan program prioritas pembangunan Daerah; dan
- k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.

3. **Pelaksanaan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD**

Forum ini adalah membahas rancangan awal RKPD bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan rancangan awal.

Forum konsultasi publik rancangan awal RKPD merupakan proses untuk membahas rancangan awal tersebut dengan melibatkan DPRD dan para pemangku kepentingan. Masukan dan saran tersebut dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbangda dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan pemangku kepentingan yang hadir pada konsultasi publik. Masukan dan saran tersebut menjadi masukan terhadap

penyempurnaan rancangan awal RKPD.

4. Musrenbang RKPD di Kecamatan

Musrenbang RKPD di kecamatan dilaksanakan setelah forum konsultasi publik rancangan awal RKPD Tahun 2026. Musrenbang RKPD di kecamatan merupakan musyawarah perencanaan pembangunan Daerah berupa forum pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah tahunan di Kecamatan. Pelaksanaan Musrenbang ini dilaksanakan paling lambat minggu kedua bulan Februari. Forum ini merupakan lanjutan dari Musrenbang di tingkat Desa/Nagari dimana nagari menyampaikan prioritas rencana pembangunan masing-masing nagari ke tingkat kecamatan untuk di Musrenbangkan. Musrenbang RKPD di kecamatan bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud mencakup : a.) Usulan rencana kegiatan pembangunan desa/nagari yang tertuang dalam daftar usulan desa/nagari yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan harus sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan, b.) Kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan desa/nagari, c.) Pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.

Kegiatan prioritas pembangunan Daerah di wilayah kecamatan mengacu pada rencana program dalam rancangan RKPD kabupaten. Hasil Musrenbang RKPD di kecamatan dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD. Berita acara kesepakatan tersebut dijadikan sebagai bahan pembahasan dalam Musrenbang tingkat kabupaten dan masukan penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten.

5. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappelitbangda. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renja Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah.

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah untuk RKPD Tahun 2026 dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dibawah koordinasi kepala Perangkat Daerah. Adapun peserta dari forum ini adalah Perangkat daerah dan unsur stakeholder terkait lainnya. Hasil forum ini sebagai bahan masukan dan penyempurnaan Renja Perangkat Daerah tahun 2026.

6. Penyusunan Rancangan RKPD

Penyusunan rancangan merupakan tahapan yang dilakukan setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah. Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD yang didasarkan kepada: a.) Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan b.) Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis nasional. Rancangan RKPD ini sebagai bahan untuk Musrenbang RKPD Kabupaten.

Rancangan RKPD disajikan dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut : a.) pendahuluan; b.) gambaran umum kondisi daerah; c.) kerangka ekonomi dan keuangan daerah; d.) sasaran dan prioritas pembangunan daerah; e.) rencana kerja dan pendanaan daerah; f.) kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan g.) penutup.

Rancangan RKPD tahun 2026 disampaikan oleh Kepala Bappelitbangda ke Bupati Lima Puluh Kota untuk mendapat persetujuan sebagai bahan Musrenbang RKPD Tahun 2026. Setelah memperoleh persetujuan dari Bupati, maka dilaksanakanlah Musrenbang RKPD Tahun 2026.

7. Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kabupaten

Musrenbang ini dilaksanakan oleh Bappelitbangda dengan peserta antara lain Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan. Musrenbang RKPD kabupaten dilaksanakan paling lambat pada minggu keempat bulan Maret.

Musrenbang RKPD kabupaten bertujuan untuk membahas rancangan RKPD kabupaten. Pembahasan Rancangan RKPD tersebut, dilaksanakan dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyesuaian program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi dan klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten dengan program dan kegiatan nagari yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan. Hasil Musrenbang RKPD kabupaten dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RKPD kabupaten.

8. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

Rancangan akhir RKPD merupakan penyempurnaan rancangan RKPD berdasarkan hasil musrenbang RKPD Kabupaten. Rancangan akhir ini selanjutnya dilakukan pembahasan dengan Perangkat Daerah untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

9. Penetapan RKPD

Penetapan RKPD merupakan rumusan rancangan akhir RKPD yang dijadikan menjadi suatu kebijakan Kepala Daerah dalam bentuk Peraturan Bupati dan ditetapkan paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, dan dokumen RKPD tersebut menjadi acuan dalam penyusunan APBD.

Sebagai upaya memudahkan penyusunan dan pendekatan perencanaan tahun 2026, maka diterapkan sistem informasi melalui *Sistem Informasi Pembangunan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI)*. Sistem ini menerjemahkan proses penyusunan RKPD dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Penggunaan aplikasi dimulai dari tingkat nagari, kecamatan, DPRD dan Perangkat Daerah dimana masing-masing unsur tersebut mempunyai akun masing-masing terhadap penerapan aplikasi SIPD tersebut. Masing-masing dari unsur tersebut mempunyai operator masing-masing yang dilatih dan dibimbing oleh Perangkat Daerah terkait.

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Beberapa landasan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 ini diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180)
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
20. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Kinerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Melaksanakan Program Strategis Nasional Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 127);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1);
27. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 39).

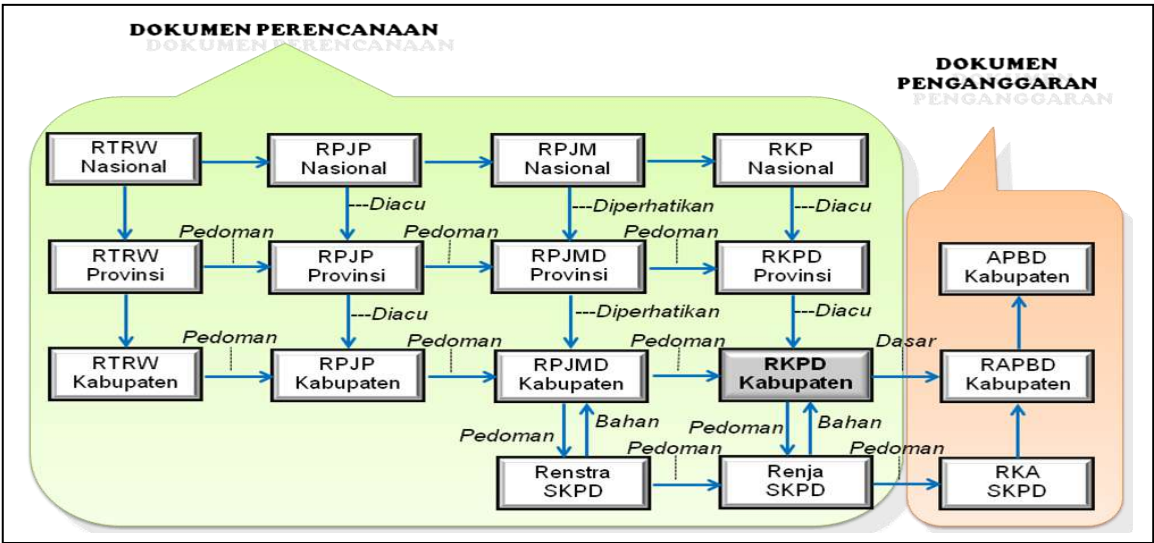
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

RKPD tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan yang mempunyai keterkaitan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut adalah dokumen RTRW, RPJPD, RPJMD, KUA, PPAS dan APBD. Keterkaitan dan hubungan dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran dimaksud adalah:

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mempedomani RTRW, RPJPD, dan RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota disusun dengan mengacu kepada RKPD dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta mengacu juga kepada RKP dan RPJM Nasional.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan masukan dari Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya disusun dengan memperhatikan usulan-usulan dari Musrenbang RKPD di setiap tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Nagari, Kecamatan, Kabupaten).
4. RKPD yang telah ditetapkan menjadi pedoman dalam penyempurnaan penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah.
5. RKPD Tahun 2026 yang telah ditetapkan selanjutnya juga menjadi dasar dalam keseluruhan proses penyusunan APBD Tahun 2026, termasuk dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2026.

Gambar di bawah ini menunjukkan alur keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik dokumen jangka panjang, jangka menengah, tahunan serta dokumen pelaksanaan anggaran.

Gambar 1.4
Keterkaitan Antar Dokumen



Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dengan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2045.

RKPD Kabupaten Lima Puluh Tahun 2026 merupakan penjabaran periode pertama RPJPD yakni periode 2025-2045. RKPD berisikan prioritas program dan kegiatan berdasarkan sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahap pertama yang telah disesuaikan dengan RPJPD Provinsi Sumatera Barat dan RPJPN.

2. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan RKP Nasional Tahun 2026, dan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dimana dijelaskan bahwa SPPN satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen perencanaan, diantaranya pada penyusunan RKP, dan RKPD yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dimana pada penyusunan dokumen perencanaan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, dan atas-bawah dan bawah-atas.

3. Hubungan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Renja PD

RKPD sebagai pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen tahunan PD yang berisikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berkenaan dan mengacu pada Renstra PD.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan daerah, sinergitas dan sinkronisasi pembangunan. RKPD dijadikan pedoman perumusan penyempurnaan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Adapun tujuan dari penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah.
2. Sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

RKPD Tahun 2026 disusun dengan mengikuti sistematika, sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dokumen RKPD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Memuat (1) Kondisi Umum Kondisi Daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing Daerah; (2) Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD; (3) Permasalahan pembangunan daerah yang meliputi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan fungsi perangkat daerah.

Bab III Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah dan kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah tahun 2026.

Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan; dan prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2026.

Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Memuat Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah berpedoman pada RPJMD.

Bab VII Penutup

Merupakan penegasan bahwa RKPD menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menjabarkan rencana kerja melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Gambaran Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

A. Wilayah Administrasi

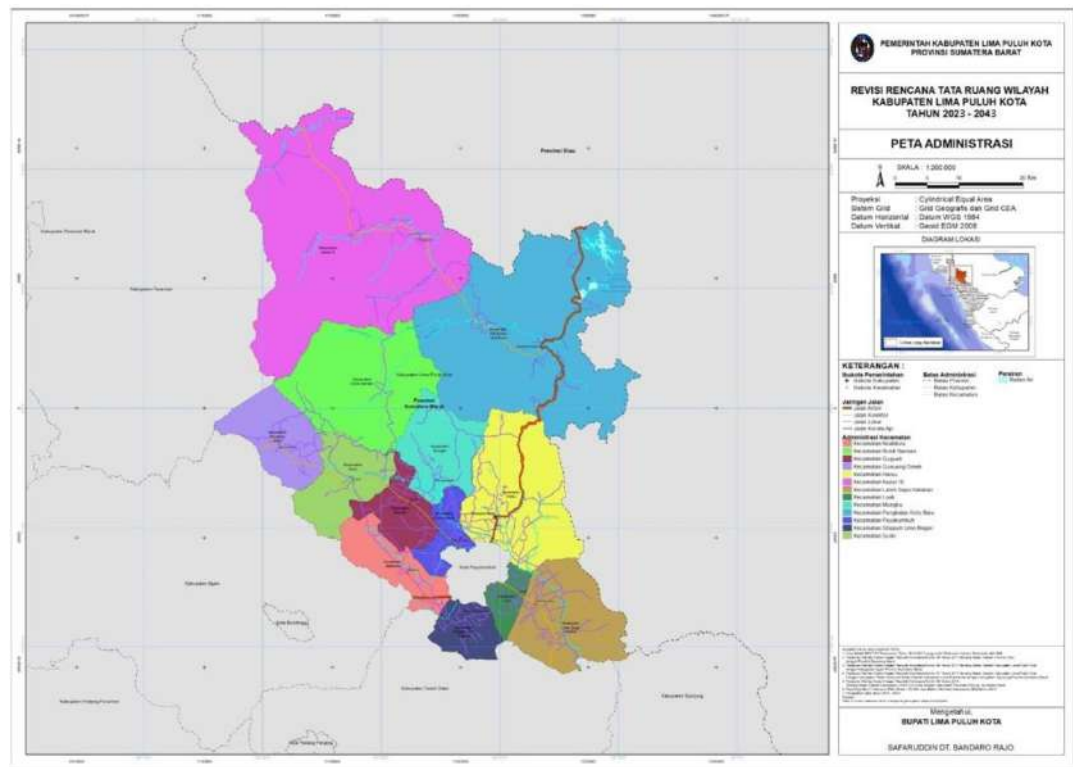
Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0°25'28,71"LU-0°22'14,52"LS dan antara 100°15'44,10"BT-100°50'47,80"BT. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, luas daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 327.340 Ha. Kabupaten Lima Puluh Kota berbatasan langsung dengan 4 Kabupaten, 1 kota dan 1 Provinsi, yaitu: Kabupaten Agam, 2 Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pasaman, Kota Payakumbuh serta Provinsi Riau (Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), dengan rincian:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
- Bagian Tengah berbatasan dengan Kota Payakumbuh

Dengan posisi yang merupakan gerbang masuk darat untuk ke Provinsi Riau maupun sebaliknya, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki posisi yang sangat strategis dan bisa dikembangkan secara maksimal, terutama sektor pariwisata, karena Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki alam yang indah dan banyak potensi objek wisata yang dapat dikembangkan. Dari sektor pertanian yang terdiri dari kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan, memiliki akses yang tidak sulit dijangkau sehingga bisa menjadi *supplier* bagi Provinsi tetangga. Hal ini sangat menguntungkan bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya dalam segi pemasaran hasil bumi.

Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, secara administratif dibagi menjadi 13 kecamatan, 79 Nagari, dan 425 Jorong, dimana Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar berikut:

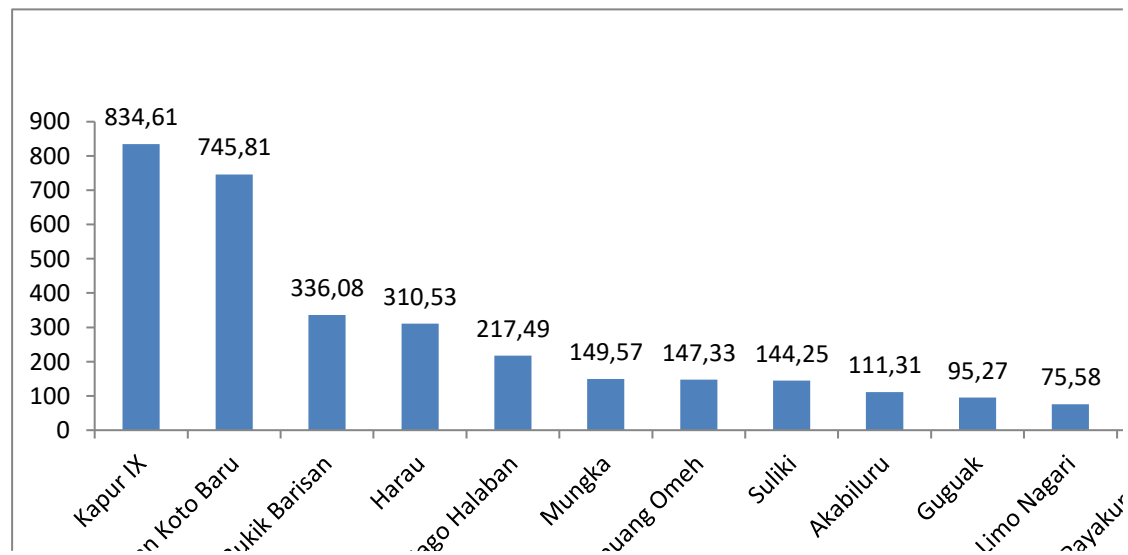
Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Jika ditinjau dari luasan wilayah dari masing-masing kecamatan, maka dari 13 kecamatan yang ada tersebut, kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Kapur IX dengan luas 834,61 Km² atau 25,50 % dari total luas wilayah kabupaten. Sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Luak dengan luas 45,98 Km² atau 1,40 % dari luas kabupaten. secara lebih detail luas dari masing-masing kecamatan dapat dilihat pada grafik berikut:

Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota (Km²)



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

B. Topografi

Secara topografi, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki jenis ketinggian yang bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 meter hingga 2.261 meter. Kecamatan Gunuang Omeh merupakan kecamatan paling tinggi dari permukaan laut dengan ketinggian 837 mdpl, sedangkan Kecamatan Pangkalan Koto Baru merupakan yang paling rendah, dengan ketinggian 118 mdpl. Di Kabupaten Lima Puluh Kota

terdapat tiga buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago, Gunung Bungsu dan Gunung Sanggul dan dialiri oleh 17 buah sungai dengan rincian sebagai berikut. Nama gunung beserta lokasi dan tingginya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 1
Nama Gunung, Lokasi, dan Tingginya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Nama Gunung	Lokasi	Tinggi
1	Gunuang Sago	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	2.261 m
2	Gunung Bungsu	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka	1.253 m
3	Gunung Sanggul	Kecamatan Harau	1.495 m

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan klasifikasi lereng dan luas menurut kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023, dibagi menjadi 4 (empat) klasifikasi lereng, yaitu 0-5%, 5-15%, 15-40% dan >40%, dimana rincian dari klasifikasi lereng tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 2
Klasifikasi Lereng dan Luas Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Klasifikasi Lereng dan Luas (Ha)				Jumlah
		0-5 %	5-15%	15-40%	> 40%	
1	Gunuang Omeh	2.661,18	3.600,42	3.913,50	5.478,90	15.654,00
2	Suliki	3.902,79	0,00	896,00	4.792,90	9.591,69
3	Bukik Barisan	5.001,40	6.767,60	7.355,00	10.297,00	29.421,00
4	Guguak	1.999,00	2.048,00	2.655,00	3.716,49	10.418,49
5	Mungka	2.387,16	0,00	3.082,00	2.931,60	8.400,76
6	Payakumbuh	686,00	0,00	5.228,00	1.690,99	7.604,99
7	Akabiluru	1.508,16	2.262,24	2.356,50	3.299,10	9.426,00
8	Luak	956,00	1.424,00	2.443,00	2.158,80	6.981,80
9	Situjuah Limo Nagari	1.186,00	0,00	5.217,00	1.737,00	8.140,00
10	Lareh Sago Halaban	6.317,60	0,00	10.041,00	4.657,00	21.015,60
11	Harau	7.085,60	1.422,00	10.420,00	14.588,00	33.515,60
12	Pangkalan Koto Baru	11.392,96	27.039,00	39.570,00	24.922,10	102.924,06
13	Kapur IX	11.573,77	17.360,64	18.084,00	25.317,60	72.336,01
Jumlah		56.657,62	61.923,90	111.261,00	105.587,48	335.430,00

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

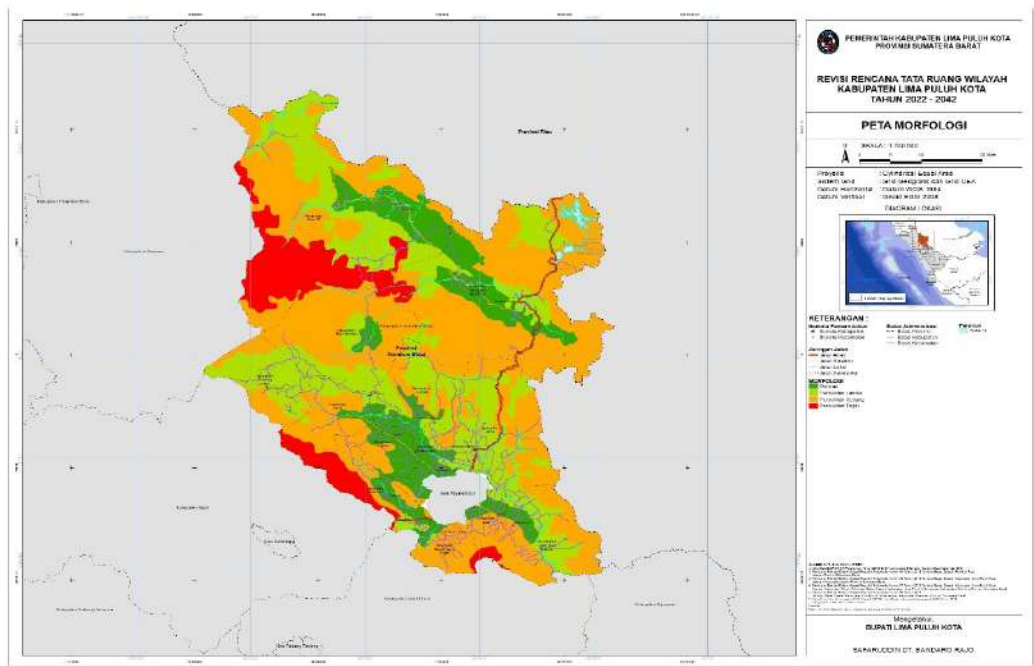
C. Geologi

Ditinjau dari segi geomorfologi regional, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada rangkaian perbukitan yang dikenal dengan “Bukit Barisan” dan merupakan bagian dari “*Volcanic Arc*” tatanan atau kerangka tektonik lempeng daerah Sumatera. Struktur Geologi regional sangat dipengaruhi oleh tatanan geologi Sumatera. Dari struktur geologi, daerah ini termasuk ke dalam daerah cekungan Payakumbuh, yang memiliki struktur sesar atau patahan berupa struktur *faulating system* (sistem sesar bongkah). Sesar yang berkembang di daerah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Sesar Normal Kelok Sembilan-Solok Bio Bio, selain itu juga terdapat Sesar Normal

lainnya yaitu Sesar Normal Batu Balang, Sesar Normal Bukik Bulek Banja Laweh, Sesar Normal Koto Alam, Sesar Normal Bukik Bapanasan, Sesar Geser Taratak dan Sesar Geser Suliki.

Struktur perlipatan terdapat di sekitar daerah Gunung Malintang, berupa struktur Sinklin ke arah tenggara. Struktur geologi lainnya adalah kekar (*joint*) yaitu berupa Kekar Silang (*shear joint*) dan kekar Tarik (*tension joint*). Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada pada Busur Magmatik Sunda-Banda berumur Miosen-Pleistosen, yang dikenal paling panjang, membujur dari utara Pulau Sumatera, terus ke Pulau Jawa sampai ke sebelah Timur Nusa Tenggara. Gambaran geologi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 2
Peta Morfologi Kabupaten Lima Puluh Kota



Akibat pengaruh pembatas alamiah terutama topografi dan morfologi daerah yang berada di jalur perbukitan Bukit Barisan yang memberikan pengaruh terhadap kemiringan lahan yang cukup tinggi, kondisi hidrologi dengan curah hujan dengan intensitas tinggi serta kualitas fisika kimia tanah, maka Kabupaten Lima Puluh Kota sangat rentan terhadap gerakan tanah. Struktur geologi yang berupa patahan juga berakibat rentannya wilayah ini dari bahaya gerakan tanah.

D. Hidrologi

Hidrologi berasal dari kata *hydro* (air) dan *logika* (ilmu), yang bermakna Cabang Ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi dan kualitas air di seluruh bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air, namun pada dokumen ini yang akan dibahas adalah hanya kondisi air tanah dangkal/permukaan (*freatik*). Salah satu air tanah dangkal/permukaan tersebut adalah air sungai. Untuk hal ini diadopsi dari rencana sistem jaringan sumber daya air yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air (SDA) mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai. Satuan Wilayah Sungai (WS) yang berada di Kabupaten Lima Puluh teakreditasiKota adalah termasuk ke dalam WS Indragiri dan WS Kuantan dengan status pengelolaannya sebagai WS Strategis Nasional. WS lintas kabupaten yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Sungai Batang Lampasi, Sungai Batang Tabik, Sungai Batang Agam dan Sungai Batang Talawi. Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 4 (empat) DAS yakni DAS Kampar, DAS Indragiri, DAS Rokan dan DAS Masang Kiri. Luas empat DAS tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	Kampar Kanan	194.604,7
2	Indragiri	127.282,97
3	Rokan	366,75
4	Masang Kiri	5.002,55

Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Dari 4 (empat) DAS tersebut dapat dijelaskan bahwa WS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari Sub Daerah Aliran Sungai (sub DAS) Mahat yang bermuara ke DAS Kampar dan Sub DAS Sinamar yang bermuara ke DAS Indragiri. Sub DAS Mahat antara lain terdiri atas: Batang Mahat, Batang Kampar, Batang Kapur, Batang Paiti, Batang Mongan, Batang Mangilang, Batang Rompayan, Batang Samo dan Batang Nenan, adapun Sub DAS Sinamar antara lain terdiri atas: Batang Sinamar, Batang Agam, Batang Lampasi, Batang Pinago, Batang Mungo, Batang Coran, Batang Liki, Batang Sanipan dan Batang Namang.

Terkait dengan sungai, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik yang tertuang dalam Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka tahun 2025 bahwa wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 17 sungai. Nama sungai, lokasi dan panjang sungai tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

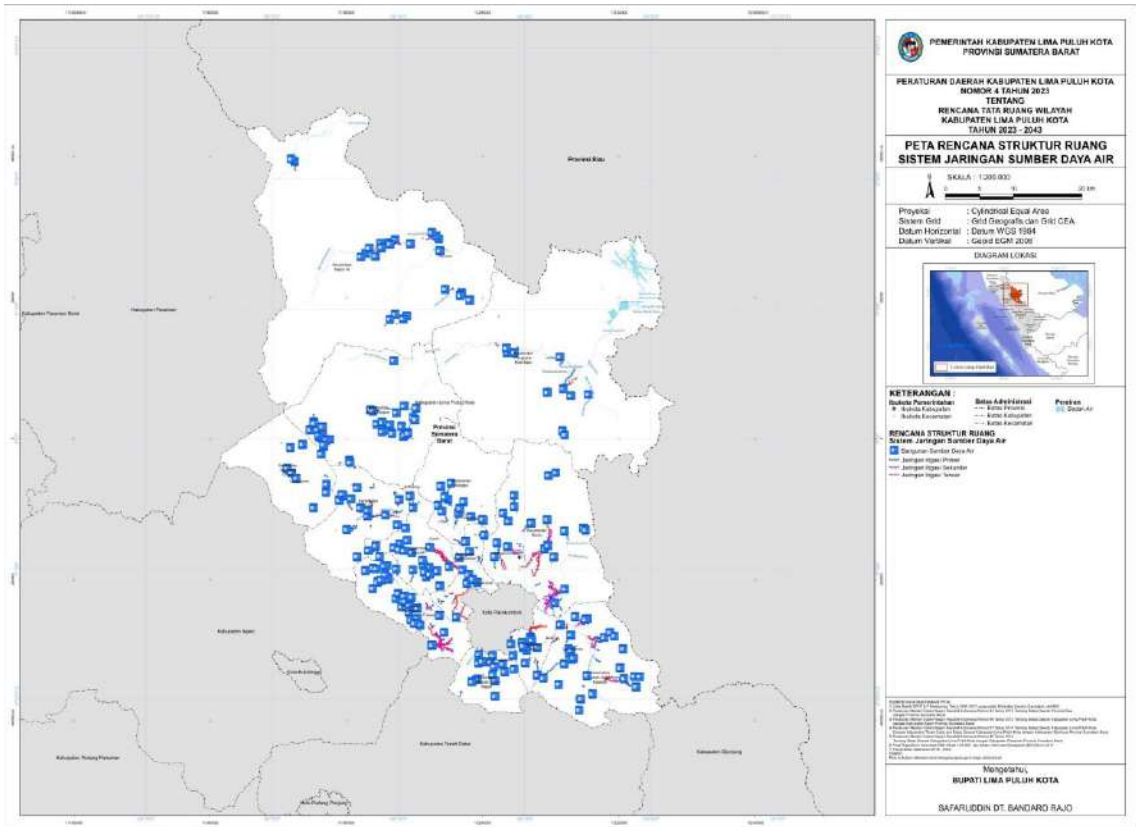
Tabel 2. 4
Nama, Lokasi, dan Panjang Sungai

No	Nama Sungai	Lokasi	Panjang (KM)
1	Batang Sinamar	Gunung Omeh, Suliki, Guguak, Mungka, Payakumbuh, Harau, Luak, Lareh Sago Halaban	96,13
2	Batang Liki	Suliki, Gunung Omeh	6,37
3	Batang Mahat	Bukik Barisan, Pangkalan Koto Baru	76,22
4	Batang Lampasi	Akabiluru, Payakumbuh	50,37
5	Batang Agam	Akabiluru, Situjuah Limo Nagari, Harau	28,58
6	Batang Kapur	Kapur IX	25,23
7	Batang Mongan	Kapur IX	72,00
8	Batang Paiti	Kapur IX	21,56
9	Batang Mangilang	Pangkalan Koto Baru	10,23
10	Batang Namang	Guguak, Payakumbuh	8,52
11	Batang Mungo	Harau	18,41
12	Batang Sanipan	Harau	19,41
13	Batang Nenan	Bukik Barisan	5,00
14	Batang Kampar	Kapur IX	18,80
15	Batang Harau	Harau	16,80
16	Batang Samo	Pangkalan Koto Baru	63,40
17	Batang Buluah Kasok	Harau	15,58

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jaringan sumber daya air di Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 3
Peta Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

E. Klimatologi

Curah Hujan (dengan satuan mm) adalah ketinggian air hujan yang terkumpul dalam penakar hujan pada tempat yang datar, tidak menyerap, tidak meresap dan tidak mengalir. Unsur hujan 1 (satu) milimeter artinya dalam luasan satu meter persegi pada tempat yang datar tertampung air hujan setinggi satu milimeter atau tertampung air hujan sebanyak satu liter. Kategori curah hujan menurut BMKG adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 5
Kategori Curah Hujan Menurut BMKG

No	Curah Hujan (mm)	Kategori
1	0 – 100	Rendah
2	100-300	Menengah
3	300-500	Tinggi
4	> 500	Sangat Tinggi

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan tahunan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi Kelas II Padang Pariaman, di 5 titik pengamatan, yakni Suliki, Guguak, Luhak, Pangkalan dan Tanjung Pati. Curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi di titik pengamatan Pangkalan dan Muaro Paiti dengan curah hujan rata-rata tahunan paling tinggi sebesar 274,17 mm di Pangkalan dan paling rendah 139,67 mm di Suliki. Curah hujan rata- rata tahun 2022 di Kabupaten Lima Puluh Kota tergambar dari tabel berikut ini.

Tabel 2. 6
Jumlah Curah Hujan per Bulan Tahun 2022

No	Titik Pengamatan	Jumlah Curah Hujan per bulan (mm)												Total	Rata-rata
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des		
1	Suliki	87	112	95	218	92	284	95	165	139	158	169	62	1676	139,67
2	Guguak	196	165	96	313	38	268	65	217	196	280	109	146	2089	174,08
3	Luhak	134	196	98	333	90	199	110	143	114	261	133	163	1974	164,50
4	Pangkalan	262	249	249	340	123	199	161	544	198	428	249	288	3290	274,17
5	Tanjung Pati	126	265	219	217	122	237	48	261	97	370	143	160	2265	188,75

Sumber: BMKG Stasiun Kelas II Padang Pariaman, 2023

Data curah hujan bulanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 berdasarkan hasil pemantauan Stasiun Klimatologi BMKG Padang Pariaman di 5 titik pengamatan, termasuk dalam kategori rendah sampai tinggi. Puncak tertinggi curah hujan rata-rata bulanan terjadi pada bulan Oktober, dengan rincian: di titik pengamatan Suliki (158 mm), Guguak (280 mm), Luhak (261 mm), Pangkalan (428 mm) dan Tanjung Pati (370 mm). Terendah pada bulan Mei, dengan rincian di titik pengamatan Suliki (92 mm), Guguak (38 mm), Luhak (90 mm), Pangkalan (123 mm) dan Tanjung Pati (122 mm).

F. Penggunaan Lahan

Kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, dan kawasan lindung lainnya. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya antara lain kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, dan kawasan resapan air. Kawasan perlindungan setempat antara lain sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air. Kawasan suaka alam dan cagar budaya antara lain kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, cagar alam, dan suaka margasatwa, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Sementara itu yang dikatakan sebagai kawasan rawan bencana alam antara lain kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan tanah longsor, dan kawasan rawan gelombang pasang, serta kawasan rawan banjir. Dan kawasan lindung lainnya seperti taman burung, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah, kawasan pengungsian satwa, dan terumbu karang. Kawasan budidaya adalah kawasan peruntukkan hutan produksi, kawasan peruntukkan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukkan perikanan, kawasan peruntukkan pertambangan, kawasan peruntukkan permukiman, kawasan peruntukkan industri, kawasan peruntukkan pariwisata, kawasan tempat beribadah, kawasan pendidikan, dan kawasan pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan kriteria kawasan sebagaimana di atas, maka untuk wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota akan dikelompokkan penggunaan lahan ke dalam 4 jenis penggunaan lahan, yaitu: (1) hutan lindung; (2) hutan suaka alam dan wisata (3) hutan produksi; (4) areal penggunaan lain. Adapun rincian dari guna lahan berdasarkan 4 jenis kelompok guna lahan sebagaimana dimaksud di atas, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 7
Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023

No	Jenis Penggunaan Lahan	2023	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
1	Hutan Lindung*	114.667	34,19
2	Hutan Suaka Alam & Wisata*	20.673	6,16
3	Hutan Produksi*	32.805	9,78
	a. Hutan Produksi Tetap	4.962	1,48
	b. Hutan Produksi Terbatas	20.127	6,00
	c. Hutan Dapat dikonversi	7.716	2,30

No	Jenis Penggunaan Lahan	2023	
		Luas Lahan (Ha)	Persentase (%)
4	Areal Penggunaan Lain	167.285	49,87
	I. Lahan Basah	25.591	7,63
	a. Sawah Irigasi Produktif	14.090	4,20
	b. Sawah Irigasi tak Produktif	6.641	1,98
	c. Sawah Non Irigasi	1.555	0,46
	d. Rawa	171	0,05
	e. Kolam/Tebat/Embung	1.320	0,39
	f. Waduk/Danau	1.814	0,54
	II. Lahan Kering	141.694	42,24
	a. Perkebunan	40.250	12,00
	b. Permukiman/Pekarangan	9.140	2,72
	c. Industri	171	0,05
	d. Pertambangan	395	0,12
	e. Lahan Terlantar/Semak Belukar	54.825	16,34
	f. Penggunaan Lain	36.913	11,00
	Jumlah	335.430	100

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Guna lahan terbesar Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah Lahan Terlantar/Semak Belukar 54.825 Ha (32,77%) dan penggunaan lahan yang terkecil adalah Rawa dan Industri dengan luas yang sama 171 Ha (0,10%).

2.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, beberapa kawasan peruntukan budidaya antara lain kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan permukiman, dan kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan pertanian ini meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan yang kesemuanya itu menyebar di kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan permukiman terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Kawasan pariwisata tersebar di kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan tanaman pangan kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan. Kawasan budi daya pertanian berlahan basah merupakan kawasan yang ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Luas kawasan tanaman pangan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota direncanakan lebih kurang seluas 44.339 ha berada di seluruh kecamatan. Adapun proporsi Kawasan Tanaman Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 13,5% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari. Hamparan sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan. Tanaman yang termasuk dalam kelompok hortikultura meliputi tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman hias. Perwilayahan hortikultura adalah penetapan wilayah untuk pengembangan usaha hortikultura dengan memperhatikan kondisi biofisik dan potensi wilayah yang ada. Pengembangan kawasan hortikultura akan tersebar di setiap kecamatan di Kabupaten Lima puluh Kota dengan luas kawasan lebih kurang 12.960 Ha. Adapun proporsi Kawasan Hortikultura di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Kawasan perkebunan merupakan kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan. Kawasan perkebunan yang direncanakan memiliki luas 68.773 Ha, kawasan peruntukan perkebunan bisa dikembangkan di seluruh kecamatan. Perkebunan rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri dari tanaman gambir, coklat, kopi, karet, kelapa dan lainnya. Perkembangan produksi beberapa jenis komoditas perkebunan rakyat cukup bervariasi. Adapun proporsi

Kawasan Perkebunan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 21,0% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat Balai Pembibitan Ternak Unggul Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Padang Mangateh seluas 212 Ha yang berfungsi sebagai tempat pusat penghasil sapi bibit unggul nasional. Pengelolaan BPTU-HPT menjadi wewenang pemerintah pusat. BPTU-HPT Padang Mangateh terletak pada dua kecamatan yaitu Kecamatan Luak dan Kecamatan Lareh Sago Halaban. Adapun proporsi Kawasan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,1% dari luasan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota mendorong adanya kerja sama antar nagari yang memiliki potensi unggulan yang sama yang berada di dalam satu kawasan yang disebut dengan kawasan perdesaan.

A. Sektor Pertanian

Hasil pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dihasilkan antara lain padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, cabe, bawang merah, tomat, kacang panjang, timun, buncis, kangkung, bayam, manggis dan jeruk. Dari penggunaan lahan, karakteristik pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota memunculkan aneka potensi komoditas yang dipengaruhi oleh kebutuhan akan bahan pokok, kesesuaian iklim, ketinggian tempat, pilihan komoditas petani dan tingkat harga serta kemampuan skill pelaku usaha bidang pertanian. Dilihat dari sisi letak dan ketinggian Kabupaten Lima Puluh Kota, salah satu komoditas yang dijadikan sebagai produk unggulan daerah adalah jeruk, satu yang telah diberi label adalah Jesigo (Jeruk Siam Gunung Omeh) yang terdapat di Kecamatan Gunung Omeh dan sekitarnya.

Bila dikaji lebih lanjut, dari perspektif perencanaan pembangunan maka komoditas yang berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dibagi atas komoditas utama yang merupakan komoditas yang digarap oleh masyarakat petani dan komoditas pendukung, dimana nilai, luasan dan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan petani relatif kecil dibanding komoditas utama. Komoditas utama punya dampak terhadap kebutuhan pokok dan skala nilai ekonomi, yang ini terdiri atas subsektor tanaman pangan antara lain padi dan jagung dan subsektor hortikultura, yang komoditas utamanya adalah jeruk, cabe, manggis, serta subsektor perkebunan dengan komoditas utamanya berupa gambir, kakao dan sawit. Perkembangan luas panen dan produksi komoditas pertanian tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 8
Produksi Komoditas Pertanian
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.791	134.375	52.351	232.018,75	50.577	228.015,60	50.839	228.523	44.915,20	185.283,10
2	Jagung	6.678	39.290	6.220	43.351,01	6.884	50.277,78	8.614	63.180	7.646,10	56.276,82
3	Jeruk	965,27	58.193	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332,00
4	Cabe Besar	789	19.819	1.045	8.814,1	1.048,75	10.498,28	909,95	9.469,57	825,70	9.080,00
5	Manggis	974,45	20.981	1.210,79	29.815,3	1.239,31	26.818,4	188,40	816	179,41	670,6

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa produksi atas 5 jenis komoditas di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir cenderung berfluktuasi. Untuk produksi padi, sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 9
Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No .	Kecamatan	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.096,00	2.041,00	7.739,00	3,79
2	Suliki	2.568,00	2.336,00	10.284,00	4,40
3	Bukik Barisan	3.868,00	4.119,00	14.552,00	3,53
4	Guguak	4.857,00	4.853,00	18.698,00	3,85
5	Mungka	1.953,00	2.015,00	8.680,70	4,31
6	Payakumbuh	4.746,00	4.752,00	20.574,00	4,33
7	Akabiluru	4.193,00	4.160,00	18.154,00	4,36
8	Luak	3.150,00	3.425,00	14.726,00	4,30
9	Situjuah Limo Nagari	4.015,00	3.731,00	15.577,00	4,18
10	Lareh Sago Halaban	4.521,00	4.609,00	20.125,00	4,37
11	Harau	7.200,00	7.964,00	33.319,00	4,18
12	Pangkalan	610,90	610,90	1.993,60	3,25
13	Kapur IX	576,60	299,30	860,80	2,88
Jumlah		44.354,50	44.915,20	185.283,10	4,13

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari sisi produktivitas komoditas padi tahun 2024, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,13 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk salah satunya akses petani terhadap pupuk serta permodalan. Untuk sebaran komoditas jagung terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dilihat dari sebaran lahan dan produksi jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota, luas panen paling luas serta produksi terbanyak terdapat di Kecamatan Guguak, namun produktivitas tertinggi yaitu pada Kecamatan Lareh Sago Halaban (8,69 ton/Ha) dan Guguak (7,74 ton/ha) sedangkan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 7,36 ton/Ha. Sebaran lahan dan produktivitas jagung di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2. 10
Sebaran Lahan dan Produksi Jagung
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Kecamatan	Tanam (Ha)	Panen Tua (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ton/Ha)	Panen Muda
1	Gunuang Omeh	111,00	66,00	319,27	4,84	-
2	Suliki	177,00	190,00	1.454,30	7,65	-
3	Bukik Barisan	162,00	140,00	772,80	5,52	-
4	Guguak	1.513,00	1.510,00	11.681,00	7,74	12
5	Mungka	748,00	753,00	5.100,90	6,77	-
6	Payakumbuh	776,00	703,00	5437,10	7,73	92
7	Akabiluru	220,00	205,00	1.464,60	7,14	40
8	Luak	890,00	951,50	6.541,90	6,88	-
9	Situjuah Limo Nagari	684,00	645,50	4.814,80	7,46	-
10	Lareh Sago Halaban	787,00	1.123,00	9.761,80	8,69	-
11	Harau	1.460,00	1.244,00	8.743,60	7,03	53
12	Pangkalan Koto Baru	10,60	12,10	30,25	2,50	-
13	Kapur IX	69,00	103,00	154,50	1,50	-
Kab. Lima Puluh Kota		7.607,6	7.646,1	56.276,82	7,36	197

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dengan begitu beragamnya tingkat produktivitas komoditas ini, kiranya peluang untuk meningkatkan produksi jagung ini dapat dilakukan tidak hanya dari sisi perluasan lahan tapi juga bisa dari sisi optimalisasi produktivitas. Peningkatan produksi jagung adalah hal mesti untuk dilakukan, mengingat saat ini kebutuhan jagung untuk peternak ayam di Kabupaten Lima Puluh Kota saja masih belum terpenuhi. Beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas pertanian baik terhadap padi maupun jagung antara lain rendahnya akselerasi pemanfaatan

inovasi teknologi maupun inovasi non teknologi untuk peningkatan produksi pertanian menyebabkan rendahnya hasil produksi pertanian.

Hal lain yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian adalah peningkatan dan penataan jaringan irigasi yang belum optimal sehingga pengairan terhadap pertanian masih banyak tergantung kepada sumber air yang ada dan tadah hujan. Disamping itu, masih rendahnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga lainnya yang terkait dengan pengembangan pertanian untuk peningkatan produksi pertanian.

B. Sektor Perkebunan

Kegiatan ekonomi dari sektor pertanian lainnya di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sub sektor perkebunan dan tanaman bahan makanan. Beberapa komoditas perkebunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat diuraikan sebagaimana berikut. Pada tahun 2024, produksi perkebunan gambir adalah sebesar 19.321,33 ton. Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penghasil gambir terbesar di Indonesia. Luas perkebunan gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 17.410,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 579,00 Ha, produktif seluas 16.815,50 Ha serta rusak seluas 16 Ha. Luas dan produksi gambir perkebunan rakyat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 11
Luas dan Produksi Gambir Perkebunan Rakyat
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	374	0	374	494
2	Akabiluru	0	0	0	0	0
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	8	120	2	130	169,60
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	160	670	5	835	207,70
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	145	770	9	924	641,02
9	Suliki	10	147	0	157	61,84
10	Bukik Barisan	40	2.627,50	0	2 667,50	4.198
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	212	7.631	0	7.843	9.149,17
13	Pangkalan Koto Baru	4	4.476	0	4.480	4.400
Jumlah 2024		579,00	16.815,50	16,00	17.410,50	19.321,33
2023		558,50	16.708	72	17.338,50	16.780,94
2022		615,5	16.692	228	17.535,5	7.776,42
2021		624,5	16.623	300	17.547,5	7.836,14
2020		618	15.764	320	16.702	7.827

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kandungan yang terdapat di dalam tanaman gambir antara lain zat katekin dan tanin, yang mana kandungan ini digunakan sebagai bahan baku industri farmasi, kosmetik, penyamak kulit dan industri batik. Gambir bersama dengan karet, semen, dan kayu lapis termasuk dalam 10 komoditas utama ekspor Sumatera Barat, Kebutuhan gambir tidak hanya di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Gambir yang diekspor, pengirimannya melalui Medan, sedangkan untuk pasaran dalam negeri dikirim ke Jakarta. Untuk produksi perkebunan kakao, pada Tahun 2024 adalah sebesar 1.016,62 ton, naik dibandingkan tahun 2023 dengan produksi sebesar 844,95 ton. Luas perkebunan kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 4.068,50 Ha dengan kondisi belum produktif seluas 528,25 Ha, produktif seluas 2.692,75 Ha serta rusak seluas 847,50 Ha. Luas dan produksi Kakao pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 12
Luas dan Produksi Kakao di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	10,00	390,00	42,50	442,50	87,35
2	Akabiluru	8,00	720,00	441,00	1.169,00	334,00
3	Luak	15,25	36,75	0,00	52,00	20,88
4	Lareh Sago Halaban	83,00	50,00	2,00	135,00	18,97
5	Situjuah Limo Nagari	37,00	150,00	98,00	285,00	138,31
6	Harau	50,00	45,00	8,00	103,00	32,72
7	Guguak	25,00	362,0	4,00	391,00	165,80
8	Mungka	38,00	80,00	0	118,00	22,75
9	Suliki	105,00	186,00	25,00	316,00	14,78
10	Bukik Barisan	35,00	526,00	0,00	561,00	104,07
11	Gunuang Omeh	27,00	18,00	0,00	45,00	14,85
12	Kapur IX	92,00	46,00	0	138,00	11,04
13	Pangkalan Koto Baru	3,00	85,00	227,00	313,00	51,10
Jumlah 2024		528,25	2.692,75	847,50	4.068,50	1.016,62
2023		565,75	3.144,00	400,00	4.109,75	844,95
2022		630	3.292	605	4.527	1.590,41
2021		738	3.099	2.272	6.109	1.774
2020		728	3.352	2.805	6.885	1.767

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Komoditas perkebunan yang lain adalah kelapa sawit. Perkebunan rakyat terhadap kelapa sawit terdapat di Kecamatan Akabiluru, Lareh Sago Halaban, Harau, Bukik Barisan, Kapur IX dan Pangkalan Koto Baru. Luas areal kelapa sawit mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 218,25 Ha bertambah menjadi 3.640,25 Ha di tahun 2024. Dari segi produksi, terjadi peningkatan dari 6.354,12 ton di tahun 2023 menjadi 7.501,73 ton di tahun 2024. Sedangkan wujud produksi kelapa sawit masih berupa Tandan Buah Segar (tbs). Luas areal dan produksi kelapa sawit perkebunan rakyat pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 13
Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Perkebunan Rakyat di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
1	Payakumbuh	0	0	0	0	0
2	Akabiluru	2	4	0,25	6,25	3,25
3	Luak	0	0	0	0	0
4	Lareh Sago Halaban	6	15	0	21	8,95
5	Situjuah Limo Nagari	0	0	0	0	0
6	Harau	0	52	2	54	41,85
7	Guguak	0	0	0	0	0
8	Mungka	0	0	0	0	0
9	Suliki	0	0	0	0	0
10	Bukik Barisan	0	6	0	6	2,64
11	Gunuang Omeh	0	0	0	0	0
12	Kapur IX	222	544	0	766	1.232,48
13	Pangkalan Koto Baru	246	2.498	43	2.787	6.212,56
Jumlah 2024		476	3.119	45,25	3.640,25	7.501,73

No	Kecamatan	Luas (Ha)				Produksi (ton)
		Belum Produktif	Produktif	Rusak	Jumlah	
	2023	612	2.760	50	3.422	6.354,12
	2022	541	2.759	47	3.347	9.375,37
	2021	198	2.738	76	3.012	8.725,86
	2020	181	2.724	57	2.962	7.714

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

C. **Sektor Peternakan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani, lokasi kawasan peternakan dapat berupa satu hamparan dan atau hamparan parsial yang terhubung secara fungsional melalui aksesibilitas jaringan infrastruktur dan kelembagaan. Kawasan Peternakan harus didukung dengan ketersediaan lahan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan pakan ternak serta dapat dikembangkan dengan pola integrasi ternak-perkebunan, ternak-tanaman pangan dan atau ternak-hortikultura. Kawasan peternakan merupakan gabungan dari sentra usaha peternakan yang memenuhi batas minimal skala ekonomi dan manajemen usaha peternakan.

Kawasan peternakan dapat berupa kawasan yang secara historis telah eksis atau lokasi baru yang memiliki sumber daya alam yang sesuai kebutuhan agroekositem untuk budidaya peternakan serta dilengkapi dengan prasarana dan sarana pengembangan ternak secara memadai. Batasan minimal populasi ternak dalam kawasan peternakan tergantung pada dukungan prasarana dan sarana kawasan tersebut. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 524-978-2016 tanggal 18 Agustus 2016 Tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Peternakan di Provinsi Sumatera Barat, komoditas peternakan Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan dengan komoditas sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 14
Kawasan Pengembangan Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Komoditas	Titik Sentra Kawasan
1.	Sapi Potong / Klaster Tri Arga	Kec. Luak
		Kec. Guguak
		Kec. Situjuah Limo Nagari
		Kec. Gunung Omeh
2.	Sapi Potong / Sapi Simental	Kec. Luak
		Kec. Lareh Sago Halaban
		Kec. Gunung Omeh
3.	Kambing	Kec. Harau
		Kec. Situjuah Limo Nagari
4.	Ayam Buras	Kec. Gunung Omeh
		Kec. Situjuah Limo Nagari
5.	Ternak – Kakao	Kec. Guguak
		Kec. Suliki
		Kec. Harau

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab.Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jenis peternakan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda, kambing, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, ayam buras, itik dan puyuh. Komiditi yang mengalami peningkatan jumlah produksi adalah daging kerbau, daging kambing, daging ayam buras, daging ayam ras pedaging, telur ayam ras petelur, telur burung puyuh dan susu kerbau. Komoditas yang mengalami penurunan adalah daging sapi potong, daging ayam ras petelur, daging itik, daging burung puyuh, telur itik dan susu sapi perah. Perkembangan jumlah produksi daging, telur dan susu tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 15
Jumlah Produksi Komoditas Peternakan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No.	Komoditas	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi Potong	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12
2	Daging Kerbau	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76
3	Daging Kambing	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25
4	Daging Ayam Buras	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00
6	Daging Ayam Ras Pedaging	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00
7	Daging Itik	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00
8	Daging Burung Puyuh	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00
9	Telur Ayam Buras	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30
10	Telur Ayam Ras Petelur	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30
11	Telur Itik	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60
12	Telur Burung Puyuh	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70
13	Susu Sapi Perah	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,00
14	Susu Kerbau	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Terhadap produksi ternak pada tahun 2024, semua komoditas mengalami penambahan populasi adalah sapi, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras pedaging, itik dan burung puyuh. Jumlah populasi ternak selama kurun waktu 5 (lima) tahun di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 16
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

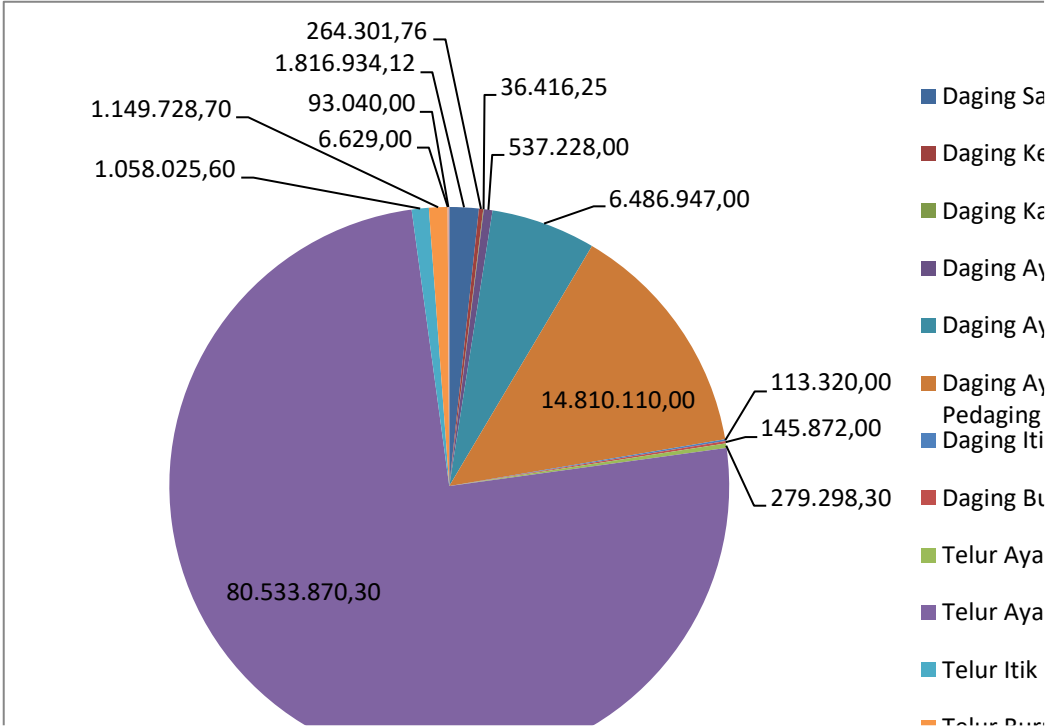
No	Komoditas	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	45.071	48.451	51.030	52.561	54.681
2	Kerbau	9.992	8.843	9.040	9.042	9.304
3	Kuda	98	117	106	106	108
4	Kambing	29.379	30.342	31.752	33.592	34.900
5	Ayam Buras	385.790	405.016	413.643	427.139	436.063
6	Ayam Ras Petelur	7.748.600	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014
7	Ayam Ras Pedaging	12.848.250	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705
8	Itik	145.232	142.959	139.950	189.895	192.719

No	Komoditas	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
9	Burung Puyuh	680.038	623.810	635.018	635.018	663.050

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Produksi komoditas peternakan pada tahun 2024 didominasi oleh peternakan ayam. Produksi komoditas tersebut dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 2
Produksi Komoditas Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik di atas, dari produksi ternak yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, produksi telur ayam ras petelur adalah yang terbanyak pada tahun 2024 yaitu 80.533.870,30 kg, diikuti dengan produksi daging ayam ras pedaging sebanyak 14.810.110,00 kg. Penyakit hewan menular strategis merupakan salah satu ancaman dalam peningkatan produksi ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengendalian dan penanggulangan PHMS yang menjadi prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah penyakit Rabies dan Avian Influenza. Tindakan pengendalian dan PHMS yang dilaksanakan berupa komunikasi Informasi dan Edukasi ke peternak, vaksinasi, pengendalian vektor dan pengawasan lalu lintas. Salah satu kasus yang perlu menjadi perhatian yaitu kasus rabies dimana kasus rabies di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebesar 305 kasus, meningkat menjadi dua kali lipat atau lebih banyak 153 kasus dibandingkan tahun 2023. Adapun kasus PHMS di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 17
Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis PHMS	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Rabies	95 kasus, positif rabies 18 Ekor	95 Kasus, Positif rabies 14 Ekor	98 Kasus, positif rabies 5 ekor	152 kasus, 26 pemeriksaan laboratorium dan 24 positif lab	305 Kasus Gigitan, 19 Pemeriksaan Laboratorium, 18 Positif Laboratorium
2.	Septicemia Epizootica	-	-	-	1 kasus positif	

No	Jenis PHMS	2020	2021	2022	2023	2024
3.	Jembrana	-	-	-	-	
4.	Avian Influenza	-	-	3 Kasus	5 kasus	

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kawasan peternakan harus didukung oleh ketersediaan padang penggembalaan dan atau ketersediaan hijauan makanan ternak. Penempatan ternak harus mempertimbangkan keseimbangan daya dukung diantara aspek ketersediaan hijauan pakan ternak dan limbah dari hasil peternakan tersebut. Adapun daya dukung wilayah terhadap kawasan peternakan tersebut adalah kemampuan wilayah untuk menampung sejumlah ternak secara optimal yang sifatnya sangat spesifik antar agroekosistem. Daya dukung wilayah terhadap peternakan tradisional adalah kemampuan wilayah untuk menghasilkan hijauan yang dapat mencukupi bagi kebutuhan sejumlah ternak, baik dalam bentuk segar maupun kering tanpa melalui pengolahan dan tambahan khusus. Untuk mengetahui keseimbangan ketersediaan potensi hijauan lahan dan kebutuhan daya tampung ternak diperlukan Indeks Daya Dukung (IDD). IDD adalah angka yang menunjukkan status nilai daya dukung hijauan pakan pada satu wilayah (Thahar dkk, 1991) sedangkan daya dukung potensial adalah kemampuan lahan untuk menghasilkan hijauan pakan berupa peluang-peluang pengembangan budidaya dan pengolahannya. Berdasarkan data Master Plan Pembangunan Peternakan tahun 2005-2025 telah dilakukan penghitungan terhadap IDD per kecamatan. Indeks Daya Dukung per kecamatan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 18
Indeks Daya Dukung per Kecamatan

No	Kecamatan	IDD	Total Persediaan Pakan (BKC ton/th)	Total Kebutuhan (BKC ton/th)	Kemampuan Wilayah (ST)	Populasi Ruminansia (ST)	Kapasitas Ruminansia (ST)
1	Payakumbuh	2,6	7.988,0	3.088,7	3.503,5	2.616,8	886,7
2	Akabiluru	2,7	9.837,6	3.581,6	4.314,7	2.862	1.452,7
3	Luak	0,4	7.051,3	16.481,9	3,092,7	7.216,5	4.123,8
4	Lareh Sago Halaban	1,1	13.734,5	12.356,5	6.023,9	8.974,5	2.950,6
6	Harau	2,4	17.250,0	7.159,3	7.568,8	5.025,8	2.543
5	Situjuah Limo Nagari	2,2	6.310,2	2.876,6	2.767,6	4.001,3	1.233,7
7	Guguak	1,9	13.792,4	7.353,6	6.049,3	3273	2.776,3
8	Mungka	3,0	6.244,3	2.079,4	2.738,7	1.067,3	1.665,4
9	Suliki	2,6	8.961,4	3.431,2	3.930,5	1.073,3	2.857,2
10	Bukik Barisan	2,2	13.806,9	6.328,3	6055,7	2.784	3.271,7
11	Gunuang Omeh	5,2	8.472,4	1.635,3	3.716,0	732,8	2.983,2
12	Kapur IX	9,4	15.927,4	1.701,6	6.985,7	840	6145,7
13	Pangkalan Koto Baru	7,5	11.305,7	1.502,0	4.958.7	975,8	3982,9
Total		2,7	140.682,10	69.576,00	53.654,40	41.443,10	17,173,40

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada data di atas memperlihatkan kemampuan lahan dalam memproduksi hijauan pakan ternak alami di Kabupaten Lima Puluh Kota yang dapat mendukung populasi sebesar 53.654,40 ST, dengan status aman dengan IDD nya mencapai nilai 2,7. Secara keseluruhan Kabupaten Lima Puluh Kota masih mampu menambah kapasitas sebesar 17.173,40 ST. Dari 13 Kecamatan terdapat 3 kecamatan dengan indek daya dukung dibawah 2 yaitu pada kecamatan Luak (0.4), kecamatan Lareh Sago halaban (1.1) dan Kecamatan Guguak (1,9).

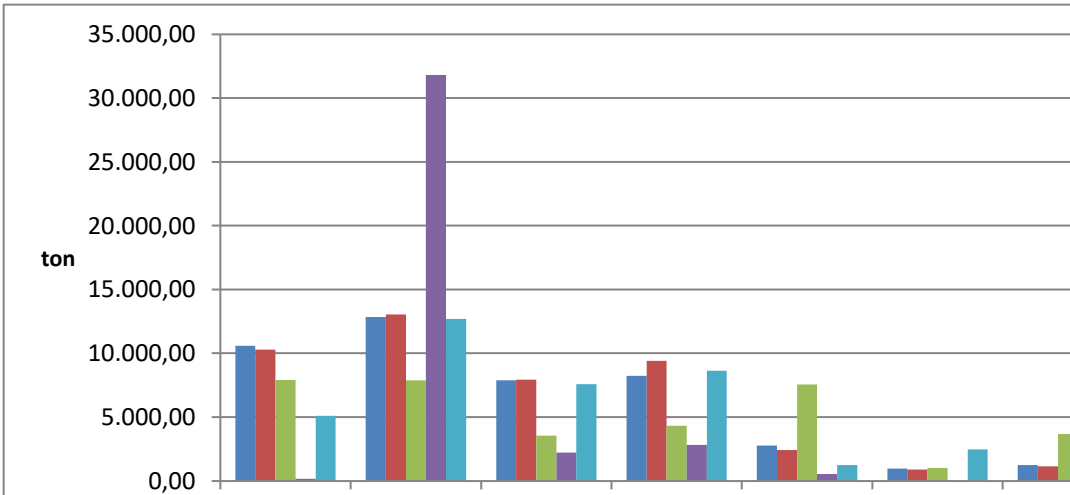
D. Sektor Perikanan

Perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota dibedakan menjadi 4 (empat) kegiatan yaitu budidaya, penangkapan di perairan umum, konservasi dan pengolahan hasil perikanan/pasca panen.

- a. Kegiatan budidaya dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan pembesaran dan kegiatan pembenihan, Pada saat ini kegiatan budidaya sudah didukung oleh 598 kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN).
 - 1) Seluruh wilayah di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi untuk usaha budidaya pembesaran ikan. Pada tahun 2024 tercatat produksi budidaya pembesaran yang terdiri dari :
 - ✓ Pada tahun 2024, budidaya ikan di kolam tercatat sebesar 39.611,15 ton, jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar 37.536,30 ton, maka terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu 2.074,85 ton. Produksi yang paling banyak terdapat di Kecamatan Harau yaitu 9.612,33 ton selama tahun 2024 , sementara produksi yang paling kecil terdapat di Kecamatan Gunung Omeh yang hanya sebesar 739,61 ton.
 - ✓ Untuk budidaya sawah, produksi tahun 2024 adalah sebesar 28,60 ton dengan produksi rata-rata adalah 19,07 ton/ha. Budidaya sawah ini hanya ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Akabiluru, Situjuah Limo Nagari dan Lareh Sago Halaban. Produksi yang paling tinggi terdapat di Kecamatan Situjuah Limo Nagari yaitu 11,00 ton, sedangkan produksi yang paling rendah terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban sebanyak 8,30 ton.
- b. Kegiatan Pembenihan atau usaha pembenihan berpotensi untuk dikembangkan di Kecamatan Payakumbuh, Luak, Lareh Sago Halaban, Situjuah Limo Nagari, Harau, Guguak, Mungka, Suliki, Gunuang Omeh, serta BBI Tarantang. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 78.790.850 ekor bibit ikan yang dihasilkan oleh UPR yang terdiri dari bibit ikan Mas (5.567.300), Gurami (19.902.000), Nila (17.444.950), Lele (35.784.600) dan Nilem (92.000). Penangkapan di Perairan Umum, dengan potensi perairan umum yang cukup luas di Kabupaten Lima Puluh Kota dilaksanakan di waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Koto Panjang di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, sungai dan genangan air lainnya yang dilaksanakan oleh nelayan. Produksi penangkapan ikan di perairan umum pada tahun 2023 tercatat sebesar 3.545,96 ton yang terdiri dari ikan Tabilangan (381,47 ton), Kapiék (353,75 ton), Baung (581,64 ton) dan lainnya (2.229,10 ton).

Perkembangan produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 2. 3
Perkembangan Produksi Komoditas Ikan Budidaya
di Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Komoditas ikan budidaya yang tinggi jumlah produksinya adalah ikan Nila, menjadi unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2013 dan pada tahun 2024 meningkat cukup tinggi. Produksi komoditas perikanan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik di atas. Secara nilai angka, perkembangan produksi ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19. Sejak tahun 2020 sampai saat ini, jumlah produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota masih didominasi oleh perikanan budidaya kolam.

Pada tahun 2024 produksi perikanan budidaya kolam sebesar 39.611,15 ton. Berikutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari penangkapan ikan perairan umum. Pada tahun 2024 produksi penangkapan ikan perairan umum mengalami peningkatan, dari 3.545,95 pada tahun 2023 menjadi 4.141,75 pada tahun 2024. Selanjutnya produksi perikanan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari perikanan budidaya sawah. Produksi perikanan budidaya sawah cenderung mengalami penurunan, dari 70,15 ton pada tahun 2023 menjadi 28,60 ton pada tahun 2024. Terhadap produksi komoditas ikan budidaya selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.20. Potensi Perikanan yang tersebar di 13 kecamatan, sudah dimanfaatkan oleh masyarakat baik secara berkelompok maupun perorangan baik untuk usaha budidaya pembesaran, pembenihan, penangkapan di perairan umum dan pengolahan/pasca panen dan pemasaran.

Pada saat ini kegiatan perikanan ini sudah didukung oleh 746 kelompok kelembagaan perikanan yang terdiri dari 627 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 30 Kelompok Pengolahan dan Pemasaran (Poklahsar), 15 Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan 74 Kelompok Pengawas Perikanan (Pokmaswas). Jumlah kelembagaan perikanan pada tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.19

Tabel 2. 19
Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis Produksi Komoditas Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan mas	11.017,95	10.582,59	7.905,11	7.905,11	5.105,10
2	Ikan nila	13.594,77	12.847,67	7.878,07	7.878,07	12.679,65
3	Ikan gurame	6.831,05	7.880,60	3.556,73	3.556,73	7.590,60
4	Ikan lele	6.907,40	8.239,31	4.320,71	4.320,71	8.627,50
5	Ikan patin	2.759,14	2.765,41	7.551,87	7.551,87	1.252
6	Ikan nilem	2.064,10	953,39	1.017,22	1.017,22	2.469,60
7	Ikan lainnya	1.238,50	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1.886,70
Jumlah		44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	39.611,15

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 20
Produksi Komoditas Ikan Budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Produksi Perikanan	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Perikanan budidaya sawah (ton)	187	168,95	127,50	70,15	28,60
2	Perikanan Budidaya kolam (ton)	43.996,27	44.610,25	35.897,40	37.536,30	38.331,75
3	Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum (ton)	3.412,02	2.829,12	3.296,24	3.545,95	4.141,75

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 21
Data Kelembagaan Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Kelembagaan				Jumlah Total
		Pokdakan	Poklahsar	KUB	Pokmaswas	
1	Harau	87	7	0	15	109
2	Akabiluru	53	1	0	6	60
3	Luak	51	2	0	0	53
4	Lareh Sago Halaban	66	0	0	4	70
5	Payakumbuh	53	4	0	3	60
6	Pangkalan Koto Baru	37	7	12	4	60
7	Kapur IX	54	0	3	13	70
8	Situjuah Limo Nagari	25	2	0	3	30
9	Bukik Barisan	35	0	0	7	42
10	Guguak	61	4	0	2	67
11	Suliki	29	1	0	8	38
12	Gunuang Omeh	20	1	0	3	24
13	Mungka	56	1	0	6	63
	Jumlah	627	30	15	74	746

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

E. Sektor Perindustrian

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Sektor industri mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Selama periode 2020-2024, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah peningkatan aktivitas produksi dan pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang bergeser ke sektor industri. Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada Tabel 2.22. Dari sisi jumlah industri formal, unit usaha dan nilai produksi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 mengalami fluktuatif. Perkembangan sektor perindustrian di Kabupaten Lima Puluh Kota digambarkan dengan jelas pada Tabel 2.23.

Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, maka diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spinner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan Industri Kecil Menengah (IKM) dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Dan memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.
3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2. 22
Perkembangan Kontribusi Lapangan Usaha Industri
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,36	6,49	6,47	6,51	6,66

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 23
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	937	1.270	267	917	238
2	Industri Sandang dan Kulit	100	281	80	39	11
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	5.892	6.010	38	52	12
4	Industri Logam dan Elektronika	48	77	36	38	36
5	Industri Kerajinan	203	223	15	11	7
Jumlah		7.616	7.180	7.861	436	304

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2. 24
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Produksi (Rp.000)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338	45.752.233
2	Industri Sandang dan Kulit	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400	4.838
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800	5.384.011
4	Industri Logam dan Elektronika	7.485,515	11.545,515	1.899.500	1.829.800	1.818.650
5	Industri Kerajinan	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000	614.500	2.220
Jumlah		371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838	52.961.952

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

F. Sektor Pariwisata

Pengembangan pariwisata daerah sebagai sumber penghasil devisa di luar sektor migas diharapkan mampu menarik kehadiran wisatawan domestik maupun asing yang pada akhirnya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama peningkatan ekonomi masyarakat. Pengeluaran dan belanja wisatawan akan menambah penghasilan penduduk setempat. Keuntungan lainnya adalah dibangunnya infrastruktur menuju lokasi wisata seperti akses jalan, ketersediaan transportasi dan akomodasi dengan tetap memperhatikan aspek sosial ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Di samping itu semakin terbukanya wawasan masyarakat tentang dunia luar karena interaksi langsung dengan wisatawan. Pembangunan sektor pariwisata juga akan memberikan dampak positif seperti terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat dan generasi muda. Secara geografis, sektor pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota diuntungkan oleh aspek strategis yaitu terletak di pinggir jalan Negara Padang–Pekanbaru, iklim yang sejuk dan potensi alam yang indah. Begitu banyak destinasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mayoritasnya adalah destinasi wisata alam dan *geopark*, destinasi wisata buatan, destinasi wisata budaya dan sejarah serta destinasi wisata minat khusus yang tersebar di 13 kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Potensi ini merupakan anugerah dari Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa untuk dikelola dengan sebaik-baiknya oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota demi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2016-2032, kawasan peruntukan pariwisata diklasifikasikan menjadi kawasan utama pariwisata, kawasan

strategis pariwisata dan kawasan potensial pariwisata. Kawasan utama pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih belum optimal, terdapat di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Harau dan Kecamatan Guguak. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah mulai berkembang, terdapat di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Luak, Mungka, Payakumbuh, Pangkalan Koto Baru, Suliki, Bukik Barisan dan Akabiluru.

Kawasan potensial adalah kawasan yang dari sudut destinasi, industri dan kelembagaan pariwisata sudah berkembang namun masih bersifat potensi, terdapat di Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kapur IX , Gunuang Omeh dan Situjuah Limo Nagari. Terkait daya tarik wisata, di Kabupaten Lima Puluh Kota terdapat 202 daya tarik wisata yang tersebar di 13 Kecamatan yang terdiri dari wisata alam, budaya dan hasil buatan manusia. Daya tarik wisata alam sebanyak 104, daya tarik wisata budaya sebanyak 84 dan 14 daya tarik wisata hasil buatan manusia. Uraian atas 202 daya tarik wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 25
Daya Tarik Wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Kecamatan	Alam	Budaya	Hasil Buatan Manusia	Jumlah
1	Harau	17	8	6	31
2	Lareh Sago Halaban	17	7	1	25
3	Luak	19	6	1	26
4	Kapur IX	10	2	1	13
5	Pangkalan Koto Baru	6	6	1	13
6	Mungka	3	3	-	6
7	Payakumbuh	5	18	3	26
8	Gunuang Omeh	8	11	-	19
9	Suliki	4	-	-	4
10	Bukik Barisan	5	3	-	8
11	Akabiluru	-	2	-	2
12	Situjuah Limo Nagari	8	8	1	17
13	Guguak	2	10	-	12
Jumlah		104	84	14	202

Sumber: Perda Kab. Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2016 tentang RIPK

Untuk melihat perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota, kita mempunyai 5 destinasi unggulan yang paling ramai dikunjungi wisatawan baik mancanegara maupun nusantara atau domestik yaitu Lembah Harau, Kapalo Banda Taram, Batang Tabik, Rumah Gadang Sungai Beringin dan Home Stay Echo. Data kunjungan wisata selama kurun waktu lima tahun dapat dilihat pada Tabel 2.26. Peningkatan kunjungan wisatawan masih didominasi oleh wisatawan nusantara atau domestik, sedangkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sangat dipengaruhi oleh faktor keamanan negara. Perkembangan kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota belum menunjukkan hal yang signifikan hal ini masih kurangnya kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah, masih belum optimalnya promosi pariwisata, peningkatan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi serta pengembangan daerah tujuan wisata yang belum optimal dan daya inovasi untuk pengembangan pariwisata yang rendah.

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, didapatkan bahwa kunjungan wisata ke Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren positif, namun hal ini bukan berarti sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak perlu untuk ditenahi. Bahkan sebaliknya, penguatan/peningkatan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus semakin intensif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal-hal yang perlu ditingkatkan tersebut, antara lain adalah :

1. Menjadikan kawasan Lembah Harau sebagai kawasan Geopark;
2. Menumbuhkan objek-objek wisata baru melalui potensi nagari;
3. Meningkatkan kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pariwisata daerah;
4. Mengoptimalkan promosi pariwisata;

- 5. Meningkatkan sarana dan prasarana wisata daerah yang betul-betul berkualitas dan berdaya ungkit tinggi;
- 6. Mengembangkan daerah tujuan wisata yang belum optimal; dan
- 7. Melakukan inovasi untuk pengembangan pariwisata daerah.

Tabel 2. 26
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
		Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
1.	Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	-	281.366	388	208.727
2.	Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	42	266.748	56	200.440
3.	Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
4.	Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
	Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.226	444	500.678

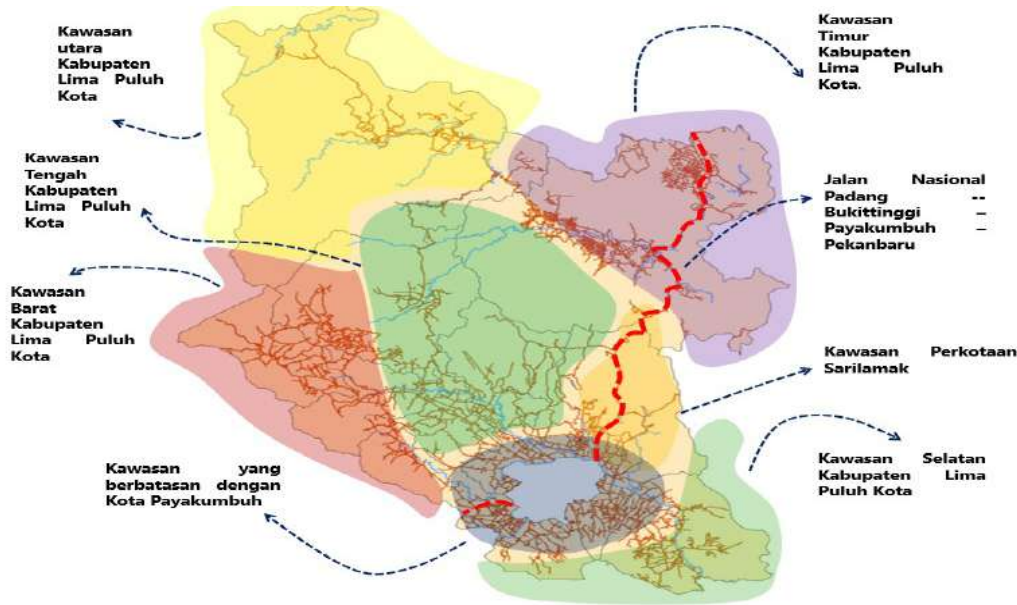
Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

G. Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro

Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam perspektif makro dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

- 1. **Kawasan utara Kabupaten Lima Puluh Kota** yang sangat berisiko terjadi tanah longsor dan terdapat lahan kritis – dipreservasi sebagai kawasan lindung.
- 2. **Kawasan Tengah Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Agroindustri pengolahan komoditas tanaman gambir dan padi.
- 3. **Kawasan Barat Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi Kawasan Pariwisata yang mendukung Kawasan Bersejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
- 4. **Kawasan yang berbatasan dengan Kota Payakumbuh** berpotensi untuk menjadi kawasan pengembangan perdagangan dan jasa untuk mendukung fungsi Kawasan Perkotaan Payakumbuh.
- 5. **Kawasan Timur Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam (Lembah Harau) serta menjadi koridor pengembangan antara Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
- 6. **Kawasan Perkotaan Sarilamak** sebagai pusat pemerintahan dari Kabupaten Lima Puluh Kota, berpotensi untuk menjadi kawasan pertumbuhan baru serta Center of Excellence Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi di agroindustri.
- 7. **Kawasan Selatan Kabupaten Lima Puluh Kota** berpotensi untuk menjadi kawasan Pariwisata Alam dan kawasan pengembangan *livestock farming*.

Gambar 2. 4
 Rencana Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Perspektif Makro



H. **Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif: *Basic Infrastructure Improvement* dan *Complete Experience Tourism* di Kabupaten Lima Puluh Kota**

Indikasi proyek infrastruktur transformatif dalam kerangka *basic infrastructure improvement* di Kabupaten Lima Puluh Kota dijelaskan dalam beberapa poin berikut:

1. Peningkatan *multi infrastructure backbone* di Kabupaten Lima Puluh Kota:
 - i. Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Ruas Payakumbuh – Pangkalan.
 - ii. Preservasi jaringan jalan nasional dan jalan provinsi.
 - iii. Reaktivasi jalur kereta api Padang panjang – Bukittinggi – Payakumbuh.
2. Pengembangan Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak:
 - i. Revitalisasi Pasar Sarilamak.
 - ii. Pembangunan RSUD Prioritas di Sarilamak.
 - iii. Pengembangan Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai *center of excellence* yang berfokus pada sektor agroindustri.
3. Pengembangan Daerah Irigasi:
 - i. Revitalisasi dan penambahan jaringan irigasi di kawasan agrikultur dan agroindustri.
4. Penataan Kawasan Kelok Sembilan.
5. Normalisasi Sungai Batang Agam.

Gambar 2. 5
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Basic Infrastructure Improvement di Kabupaten Lima Puluh Kota



Pengembangan pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota harus ditingkatkan menuju mass-tourism, yang diharapkan menyediakan sebuah pengalaman kepariwisataan yang komplit (*complete-experience tourism*). Pengembangan kepariwisataan mesti melihat aspek-aspek 6A yaitu Atraksi, Aksesibilitas, Amenitas, *Ancillary*, Aktivitas, dan *Available Package*. Keenam aspek ini merupakan kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, media dan akademisi. Lima kawasan yang menjadi fokus dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain:

1. Kawasan Agrowisata Padang Mangateh.
2. Kawasan Pariwisata Sejarah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).
3. Kawasan Pariwisata Alam Lembah Harau.
4. Kawasan Pariwisata Alam Kapalo Banda Taram.
5. Kawasan Pariwisata Budaya Saribu Gonjong.

Gambar 2. 6
Indikasi Proyek Infrastruktur Transformatif dalam Kerangka Complete-Experience Tourism di Kabupaten Lima Puluh Kota



Rancangan membagi pengembangan wilayah berdasarkan potensi geografis dan ekonomi, seperti pengembangan agroindustri di kawasan tengah, pariwisata di kawasan barat, dan pertanian di kawasan timur. Pengelompokan ini baik karena mempertimbangkan keunggulan kompetitif masing-masing wilayah, serta potensi alam yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Pengembangan pariwisata, khususnya *complete-experience tourism*, yang mencakup atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan aktivitas, adalah langkah positif. Namun, pengembangan pariwisata massal bisa berisiko terhadap lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan keseimbangan antara peningkatan kunjungan wisatawan dan pelestarian lingkungan.

Pengembangan jalan tol, preservasi jaringan jalan nasional, dan reaktivasi jalur kereta api merupakan langkah penting untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah. Namun, masih perlu kajian bagaimana proyek-proyek ini dapat terealisasi secara efisien dan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi serta mobilitas penduduk. Pusat pertumbuhan harus memiliki konektivitas yang baik dengan wilayah Perdesaan untuk memastikan bahwa manfaat ekonomi juga dapat dirasakan oleh desa-desa di sekitar. Pengembangan jalan penghubung antara pusat pertumbuhan dan desa perlu diperhatikan agar perekonomian di desa bisa terintegrasi dengan pusat-pusat ekonomi.

Pengembangan agroindustri dan pertanian berpotensi mendongkrak perekonomian daerah. Namun, perlu dipastikan bahwa pengembangan ini dilakukan secara berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung lingkungan serta teknologi modern agar hasilnya lebih efisien dan produktif. Dokumen rancangan juga memperhatikan kawasan rawan bencana di bagian utara, terutama risiko tanah longsor. Penekanan pada pelestarian lahan kritis dan pencegahan bencana sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas lingkungan dan keselamatan penduduk. Namun, masih dibutuhkan detail lebih lanjut mengenai strategi mitigasi bencana yang akan diterapkan di daerah-daerah berisiko. Meskipun dokumen sudah mengidentifikasi kawasan rawan bencana, disarankan untuk membuat rencana mitigasi bencana yang lebih spesifik, terutama untuk daerah yang rentan terhadap tanah longsor dan banjir. Ini termasuk pembuatan *early warning system*, pelatihan mitigasi bagi masyarakat, serta perencanaan evakuasi yang baik.

Pengembangan *Center of Excellence* seperti Politeknik Negeri Payakumbuh sebagai pusat riset dan inovasi dalam bidang agroindustri adalah langkah yang sangat strategis. Ini bisa menjadi penggerak utama dalam memperkuat daya saing ekonomi daerah dan memberikan nilai tambah bagi produk lokal. Selain infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan, pengembangan infrastruktur digital juga sangat penting untuk mendukung pertumbuhan wilayah. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi dan pendidikan seperti *Center of Excellence* memerlukan infrastruktur telekomunikasi yang handal untuk mempercepat inovasi dan pendidikan berbasis teknologi. Ini juga bisa mendukung pengembangan pariwisata melalui promosi digital dan sistem reservasi online.

Meskipun fokus pada pembangunan wilayah secara makro sudah baik, perlu ada lebih banyak keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan wilayah. Partisipasi ini bisa mendorong rasa kepemilikan dan tanggung jawab dari masyarakat terhadap pembangunan daerahnya, serta mengurangi potensi konflik sosial yang mungkin muncul akibat perubahan yang cepat.

2.1.1.3 Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup

A. Daya Dukung Air

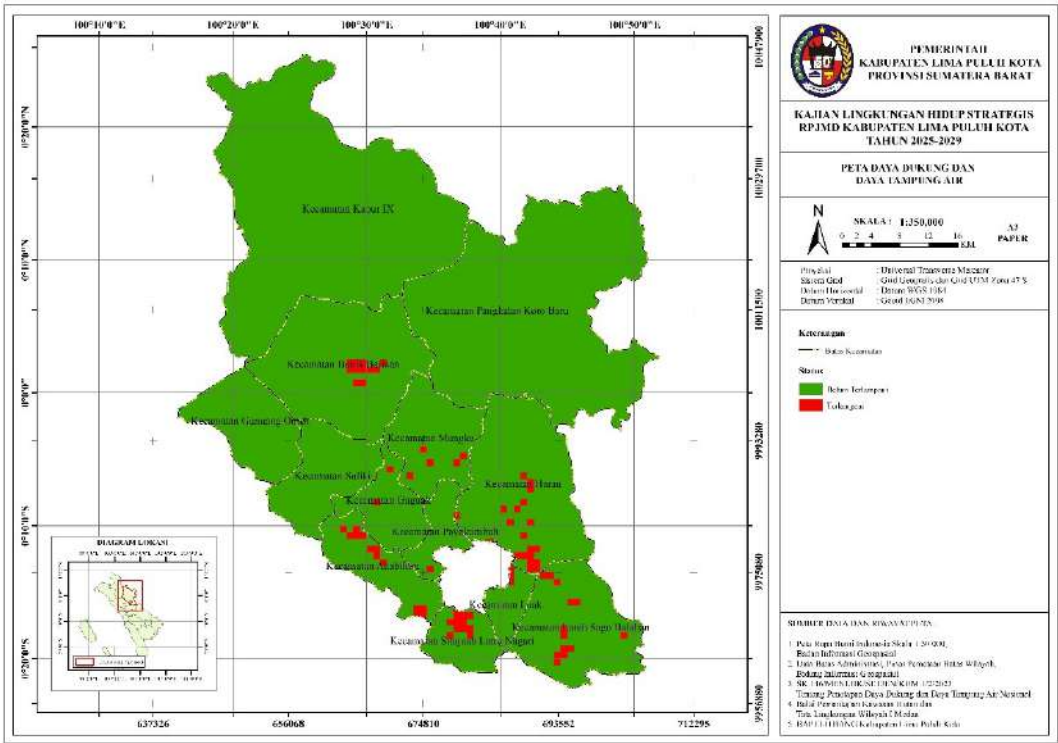
Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 146/MENKLHK/Setjend/Kum.1/2/2023 tentang Daya Dukung Air Nasional menunjukkan sebagian besar daya dukung air di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada status belum terlampaui lebih kurang 97,9% atau sekitar 320.741 Ha dan sisanya sudah terlampaui sekitar 6.600 Ha.

Tabel 2. 27
Daya Dukung Air di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
1	Kecamatan Akabiluru	10.062	1.067	11.130
2	Kecamatan Bukik Barisan	32.663	940	33.604
3	Kecamatan Guguak	9.357	171	9.528
4	Kecamatan Gunung Omeh	14.729		14.729
5	Kecamatan Harau	29.423	1.636	31.058
6	Kecamatan Kapur IX	83.448		83.448
7	Kecamatan Lareh Sago Halaban	20.649	1.111	21.760
8	Kecamatan Luak	4.430	168	4.598
9	Kecamatan Mungka	14.530	427	14.957
10	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	74.588		74.588
11	Kecamatan Payakumbuh	5.851	108	5.959
12	Kecamatan Situjuh Limo Nagari	6.587	971	7.558
13	Kecamatan Suliki	14.423		14.422
	Kabupaten Lima Puluh Kota	320.741	6.600	327.340

Sumber : SK/146 Tahun 2023

Gambar 2. 7
Daya Dukung Air Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber : SK/146 Tahun 2023

Tabel 2. 28
Proyeksi Status Air Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kecamatan	Ketersediaan (m3)	2026		
			Proyeksi Penduduk (Jiwa)	Kebutuhan Air Untuk Hidup Layak (m3)	DD Air
1	Akabiluru	170.620.837,82	30.087,20	48.139.520,71	3,54
2	Bukik Barisan	374.131.013,13	23.091,67	36.946.665,94	10,13
3	Guguak	159.760.339,55	36.467,35	58.347.753,08	2,74
4	Gunuang Omeh	172.981.817,00	14.737,25	23.579.594,07	7,34
5	Harau	395.278.421,49	60.318,80	96.510.078,83	4,10
6	Kapur IX	964.571.795,46	28.162,26	45.059.619,34	21,41
7	Lareh Sago Halaban	288.640.741,83	40.252,78	64.404.453,38	4,48
8	Luak	96.381.858,02	29.358,16	46.973.055,83	2,05
9	Mungka	206.184.620,22	27.818,33	44.509.330,50	4,63
10	Pangkalan Koto Baru	922.569.348,10	29.545,89	47.273.421,90	19,52
11	Payakumbuh	121.494.254,32	39.975,55	63.960.874,25	1,90
12	Situjuah Limo Nagari	121.658.563,08	24.799,42	39.679.073,33	3,07
13	Suliki	169.775.768,33	15.022,72	24.036.354,92	7,06
	LIMA PULUH KOTA	3.994.273.610,02	399.522,87	639.236.599,85	6,25

Sumber : Analisis Tim Pembuat,2024

Berdasarkan tabel di atas daya dukung air Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 berdasarkan kecamatan masih dalam status surplus, namun terus mengalami penurunan, sehingga diperlukan upaya dalam menjaga ketersediaan air di Kabupaten Lima Puluh Kota, seperti pada Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Luak. Secara umum Kabupaten Lima Puluh Kota daya dukung air masih belum terlampaui, sedangkan disisi lain ada beberapa daerah yang sudah terlampaui yang dihitung berdasarkan kebutuhan air, lahan dan domestik yang dibandingkan dengan ketersediaan air. Proyeksi ini dihitung hanya membandingkan kebutuhan air domestik dengan ketersediaan air. Hal ini karena kebutuhan air lahan pada tahun 2030 tidak dapat diprediksikan.

B. Daya Dukung Pangan

Luas panen padi pada tahun 2024 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan luas panen tahun 2023 yaitu 28.198,69 ha menjadi 44.283,20 ha. Namun produksi padi secara keseluruhan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami kenaikan, yakni dari 132.075,54 ton tahun 2023 menjadi 185.283,10 ton tahun 2024. Produktivitas Padi per hektar pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu, yakni dari 46,48 kuintal/ha menjadi 41,25 kuintal/ha.

Tabel 2. 29
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Produktivitas (ku/ha)
2020	30.791	134.375	43,64
2021	28.119,14	123.703,37	43,99
2022	27.572,68	124.134,56	45,02
2023	28.198,69	132.075.54	46,48
2024	44.915,20	185.283,10	41,25

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota

Tabel 2. 30
Luas Penggunaan Sawah Menurut Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota (Hektar) Tahun 2023

No	Kecamatan	Realisasi Dalam Satu Tahun					Jumlah
		Ditanami Padi			Tidak ditanami padi		
		Satu kali	Dua Kali	≥ Tiga Kali	Ditanami tanaman lainnya	Tidak ditanami apapun	
1	Payakumbuh	455	740	273	264	0	1.732,00
2	Akabiluru	253	0	1.257	30	0	1.540,00
3	Luak	288	808	250	60	0	1.406,00
4	Lareh Sago Halaban	183	940	582	919,9	0	2.624,90
5	Situjuah Limo Nagari	0	508	1.009	218	0	1.735,00
6	Harau	15	1.227	2.210	50	0	3.502,00
7	Guguak	115	764	788	50	0	1.717,00
8	Mungka	2	251	426,2	70	12	761,20
9	Suliki	132,5	439	398	0	0	969,50
10	Bukik Barisan	273	1.097,30	60	155	0	1.585,30
11	Gunuang Omeh	30	139,1	607	0,3	0	776,40
12	Kapur IX	129	333,1	0	5	0	467,10
13	Pangkalan Koto Baru	0	305,9	0	0	0	305,90
	Jumlah	1.875,50	7.552,40	7.860,20	1.822,20	12	19.122,30

Sumber : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, 2024

Tabel 2. 31
Estimasi Produksi dan Konsumsi Beras di Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2030

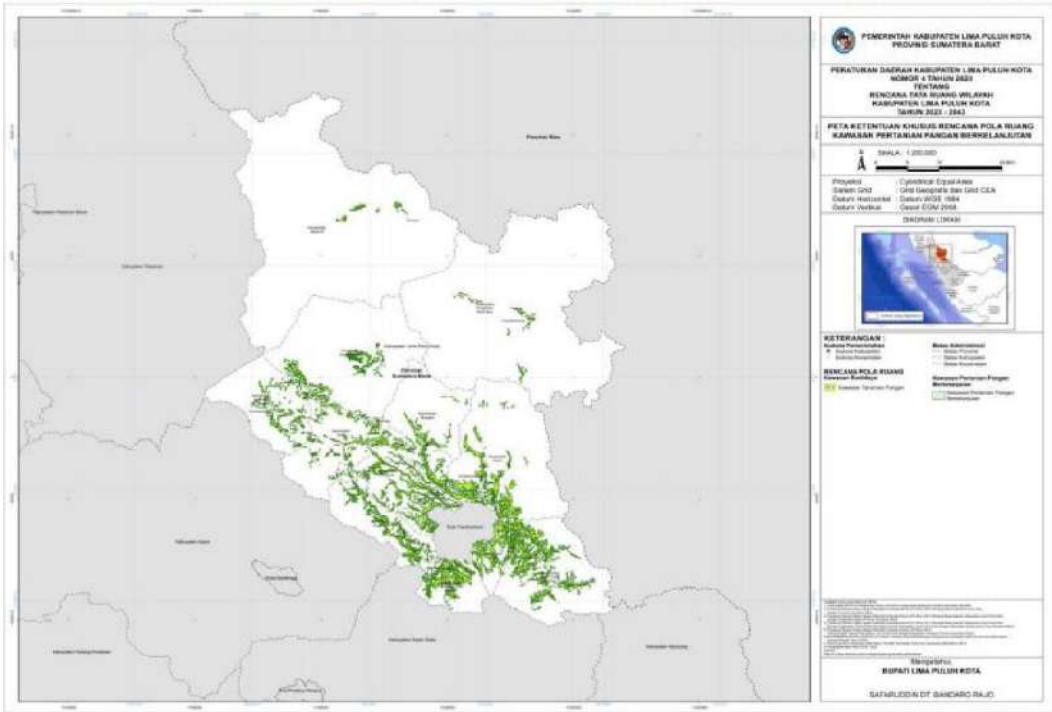
		persen/tahun		Kwintal/ha	kg/kapita/minggu	kali/tahun	
Asumsi Awal		0.92		46.46	1.60	1.33	
Perubahan Asumsi			0.82%	50.00	1.20	2.00	
Estimasi	Tahun	BAU (luas sawah menurun)	LSD (Kepmen ATR No. 589/2021)	LSD + LPP Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun	LSD + LPP Turun + Produktivitas Naik + Konsumsi Turun + Kali Tanam Naik
Estimasi Luas Sawah (ha)	2025	19,863.90	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
	2030	19,070.28	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38	19,271.38
Estimasi Konsumsi Beras (ton)	2022	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72	29,454.72
	2025	30,837.28	30,837.28	30,682.33	30,682.33	30,682.33	30,682.33
	2030	32,284.73	32,284.73	31,961.11	31,961.11	31,961.11	31,961.11
Selisih Estimasi Produksi dengan estimasi Konsumsi Beras (ton)	2025	20,905.60	19,362.17	19,517.11	23,342.04	31,012.62	57,928.05
	2030	17,390.87	17,914.71	18,238.34	22,063.26	30,053.54	56,968.96

Sumber : Analisis,2023

Berdasarkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota diperoleh estimasi luas lahan sawah hingga tahun 2030 semakin berkurang dengan angka 19.070,28 Ha, sedangkan estimasi konsumsi beras diperkirakan setiap tahunnya meningkat. Dapat disimpulkan estimasi produksi dan konsumsi beras di Kabupaten Lima Puluh Kota hingga tahun 2030 masih surplus, namun tetap diperlukan upaya tambahan dalam mempertahankan sektor pertanian.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kabupaten Tahun 2023-2043, kawasan pertanian meliputi kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, kawasan perkebunan dan kawasan peternakan. Kawasan tanaman pangan dengan luas lebih kurang 44.339 Ha berada di seluruh kecamatan, kawasan tanaman pangan yang dimaksud ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 18.259 Ha berada di seluruh kecamatan.

Gambar 2. 8
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) Kabupaten Lima Puluh Kota



C. Jasa Lingkungan

Jasa ekosistem daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 20 jasa ekosistem yang terbagi pada 4 kategori jasa ekosistem yaitu jasa ekosistem penyediaan, jasa ekosistem pengaturan, jasa ekosistem budaya dan jasa ekosistem pendukung. Berdasarkan jasa penyediaan, kategori sangat tinggi berada pada jasa penyediaan serat, bahan bakar, SD Genetik. Sedangkan jasa pengaturan kategori sangat tinggi terdapat pada jasa pengaturan Iklim, Tata Aliran Air dan Banjir, Perlindungan Bencana, Pemurnian Air, Kualitas Udara, Penyerbukan Alami, Pengendalian Hama.

Jasa Budaya, kategori sangat tinggi berada pada jasa budaya rekreasi dan estetika. Selanjutnya jasa pendukung kategori sangat tinggi berada pada jasa pendukung Pembentukan Tanah, Siklus Hara, Produksi Primer, Biodiversitas.

Tabel 2. 32
Jasa Lingkungan Kabupaten Lima Puluh Kota, 2021

No	Jasa Penyediaan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pangan	P1	3,73%	5,29%	8,78%	55,78%	26,43%	100,00%
2	Air Bersih	P2	1,21%	46,93%	9,44%	40,04%	2,39%	100,00%
3	Serat	P3	53,39%	7,89%	20,15%	6,10%	12,46%	100,00%
4	Bahan Bakar	P4	51,74%	10,86%	21,18%	8,64%	7,57%	100,00%
5	SD Genetik	P5	41,94%	24,67%	25,75%	5,66%	1,98%	100,00%
No	Jasa Pengaturan	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Iklim	R1	41,91%	17,52%	23,13%	13,64%	3,80%	100,00%
2	Tata Aliran Air dan Banjir	R2	41,78%	7,70%	9,41%	27,51%	13,61%	100,00%
3	Perlindungan Bencana	R3	41,91%	15,46%	29,07%	13,00%	0,56%	100,00%
4	Pemurnian Air	R4	40,94%	6,82%	31,13%	16,44%	4,68%	100,00%
5	Penguraian Limbah	R5	4,75%	5,47%	43,74%	13,21%	32,84%	100,00%
6	Kualitas Udara	R6	67,94%	0,00%	16,12%	12,19%	3,76%	100,00%
7	Penyerbukan Alami	R7	42,83%	14,39%	32,82%	3,96%	5,99%	100,00%
8	Pengendalian Hama	R8	44,63%	30,40%	5,98%	15,69%	3,30%	100,00%
No	Jasa Budaya	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH

1	Tempat Tinggal	C1	5,19%	7,09%	3,77%	25,46%	58,49%	100,00%
2	Rekreasi	C2	45,68%	6,33%	13,13%	4,07%	30,79%	100,00%
3	Estetika (Alam)	C3	45,68%	2,96%	9,43%	0,98%	40,95%	100,00%
No	Jasa Pendukung	Kode	Persentase Luas DDDTLH					
			1. SANGAT TINGGI	2. TINGGI	3. SEDANG	4. RENDAH	5. SANGAT RENDAH	JUMLAH
1	Pembentukan Tanah	S1	46,98%	11,84%	3,82%	17,83%	19,53%	100,00%
2	Siklus Hara	S2	42,22%	8,05%	12,73%	15,36%	21,64%	100,00%
3	Produksi Primer	S3	55,02%	0,00%	23,17%	13,04%	8,77%	100,00%
4	Biodiversitas	S4	44,38%	13,46%	15,83%	25,19%	1,14%	100,00%

Sumber : DDDTLH, 2021

2.1.1.4 Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Ketersediaan energi, air dan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini cukup memadai dan belum pernah terjadi kelangkaan, kekurangan atau kehabisan tiga jenis kebutuhan masyarakat ini. Untuk air bersih dan pangan bahkan Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kelebihan dan menyumbang untuk daerah sekitarnya. Untuk melihat kondisi berketahanan energi, air dan kemandirian pangan dapat dianalisa beberapa indikator berikut:

A. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung maupun tidak langsung. Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Berikut disajikan konsumsi listrik per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel 2.34.

Tabel 2. 33
Konsumsi Listrik Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Jumlah Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	185	178	250	245	275

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Pada tahun 2020, konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 185 kWh. Angka ini menandai *baseline* awal dalam periode yang dianalisis, mencerminkan kondisi awal konsumsi listrik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2021, terjadi sedikit penurunan konsumsi listrik per kapita menjadi 178 kWh. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk efisiensi energi yang lebih baik, perubahan dalam pola konsumsi energi akibat penyesuaian ekonomi atau sosial, atau bahkan dampak dari kebijakan penghematan energi. Tahun 2022 menandai lonjakan signifikan dalam konsumsi listrik per kapita, yang mencapai 250 kWh. Kenaikan ini sebesar 72 kWh dari tahun sebelumnya bisa didistribusikan pada beberapa faktor utama, seperti peningkatan jumlah rumah tangga yang terhubung ke jaringan listrik, peningkatan penggunaan peralatan listrik, dan mungkin adanya program pemerintah yang berhasil meningkatkan akses dan konsumsi energi listrik.

Pada tahun 2023, konsumsi listrik per kapita sedikit menurun menjadi 245 kWh. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini masih jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan stabilitas pada tingkat konsumsi yang lebih tinggi pasca peningkatan drastis di tahun 2022. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan konsumsi listrik per kapita sebesar 30 kWh, yang menunjukkan adanya perkembangan ekonomi di tengah masyarakat. Secara keseluruhan, tren konsumsi listrik per kapita di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan, meskipun dengan beberapa fluktuasi. Peningkatan ini mencerminkan perkembangan ekonomi dan sosial di wilayah tersebut, termasuk peningkatan standar hidup dan aksesibilitas energi bagi masyarakat. Data ini memberikan gambaran tentang bagaimana konsumsi energi berkembang dan memberikan wawasan bagi perencanaan energi di masa mendatang.

B. Kapasitas Air Baku

Air baku merupakan komponen penting dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat. Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan berbagai tantangan geografis dan demografis, memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan ketersediaan air baku yang memadai untuk kebutuhan domestik, pertanian, dan industri. Pada tahun 2024, data menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 14 sumber air baku utama dengan total potensi mencapai 8,1955m³/detik. Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan,

industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya. Berikut ini tabel Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 (lihat tabel 2.34).

Tabel 2. 34
Data Kapasitas Air Baku Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Nama Air Baku	Kecamatan	Nagari	Potensi Air Baku (m ³ /dt)
1.	Batu Malanca	Harau	Harau	0,28
2.	Ulu Sungan	Harau	Solok Bio-bio	0,23
3.	Batang Kawek	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,49
4.	Batang Agam	Akabiluru	Batu Hampa	1,4875
5.	Batang Simonok	Kapur IX	Muaro Paiti	0,235
6.	Batang Sopan	Kapur IX	Sialang	0,48
7.	Batang Gosan	Suliki	Suliki	2,495
8.	Sungai Kunali	Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	0,5
9.	Lubuak Sati	Harau	Harau	0,198
10.	Batang Harau	Harau	Sarilamak	0,5
11.	Maek Kuning	Bukik Barisan	Baruah Gunuang	0,2
12.	Batang Manggilang	Pangkalan Koto Baru	-	0,2
13.	Batang Sinamar	Gunuang Omeh, Guguak, Payakumbuh, Lareh Sago Halaban, Harau	-	0,5
14.	Ampalu	Lareh Sago Halaban	-	0,4

Sumber: Bappelitbangda, PUPR, PDAM, Data Diolah Tahun 2025

C. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Penyediaan air minum jaringan perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dikelola oleh BUMD dimana untuk cakupan pelayanan PDAM Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat sedikit, belum mencakup 50% wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan capaian indikator Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di Kabupaten Lima Puluh Kota dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif. Berikut ini tabel data capaian akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota:

Tabel 2. 35
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lima Puluh Kota	5,65	8,83	4,50	6,64	3,56

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Grafik 2. 4
Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum
Jaringan Perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tahun 2020 capaian air minum perpipaan Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 5,65 %, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 8,83% dan pada tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 4,50% dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 6,64%, dan pada tahun 2024 mengalami penurunan kembali sebesar 3,56%.

Kondisi capaian yang tidak stabil ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum.

D. Indeks Ketahanan Pangan

Tujuan pembangunan pangan pada dasarnya merupakan bagian dari ketahanan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi ke IX tahun 2008 merekomendasikan perlunya mengoptimalkan bahan pangan lokal dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat guna meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan menurunnya angka prevalensi stunting. Hal ini dilakukan dengan jalan mempertimbangkan keseimbangan gizi yang didukung oleh cita rasa, daya cerna, daya terima masyarakat, kualitas dan kemampuan daya beli masyarakat.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari indikator yang digunakan untuk menghasilkan nilai komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Penilaian menggunakan IKP memiliki peran strategis untuk mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi di suatu wilayah (kabupaten/kota) dan memberikan gambaran peringkat pencapaian pangan wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP juga menjadi salah satu alat dalam menentukan prioritas daerah dan intervensi program. Nilai Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 36
Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Ketahanan Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	80,42	80,66	80,32	80,64	82,59

Sumber: Dinas Pangan, Tahun 2025

Tabel ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan di Kabupaten Lima Puluh pada tahun 2020 sampai 2024 dalam kondisi stabil yang dirata-ratakan di angka 80%, dimana angka setiap tahunnya terus meningkat.

E. **Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan**

Ketidakcukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah kondisi seseorang yang secara regular mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. *Undernourishment* berbeda dengan *malnutrition* dan *undernutrition*, dimana *malnutrition* dan *undernutrition* adalah *outcome* terkait status gizi. Walaupun *undernourishment* adalah kondisi individu, namun karena pertimbangan konsep dan data yang tersedia, indikator ini hanya dapat diaplikasikan untuk mengestimasi pada level suatu populasi atau kelompok individu, bukan pada level individu itu sendiri, sehingga indikator ini tidak tepat digunakan untuk mengidentifikasi individu mana dari populasi tersebut yang mengalami *undernourished* (ketidakcukupan konsumsi pangan).

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)* adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara regular mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Indikator PoU ini digunakan untuk memonitor tren atau perubahan pola ketidakcukupan konsumsi energi dari makanan dalam suatu populasi secara berkala dari waktu ke waktu. Indikator ini dapat menggambarkan perubahan dalam ketersediaan makanan dan kemampuan rumah tangga untuk mengakses makanan tersebut, pada tingkat sosial ekonomi yang berbeda, serta pada tingkat nasional dan sub-nasional. Selain itu, bisa juga untuk mengetahui Situasi Pangan dan Gizi suatu wilayah. Capaian PoU konsumsi pangan untuk lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.37.

Tabel 2. 37
Capaian Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	6,12	6,36	7,24	6,85	6,85

Sumber : Dinas Pangan Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian prevalensi ketidakcukupan pangan Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berada pada angka 6.12. Kejadian Covid-19 pada tahun 2020 berpengaruh pada perekonomian masyarakat pada tahun 2021 dan 2022 yang menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga capaian prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 naik 0,24 dan pada tahun 2022 naik cukup signifikan menjadi 7,24. Pada tahun 2023 dan tahun 2024 perekonomian masyarakat kembali membaik sehingga Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota kembali turun pada 2023 dan 2024 menjadi 6,85.

2.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup sangat ditentukan oleh perilaku dan aktivitas kegiatan manusia. Lingkungan hidup yang sehat dan terjaga akan menjamin kesehatan penduduk dan aktivitas sehari-hari. Kualitas lingkungan hidup dapat dilihat dari beberapa indikator, diantaranya:

A. **Indeks Tutupan Lahan**

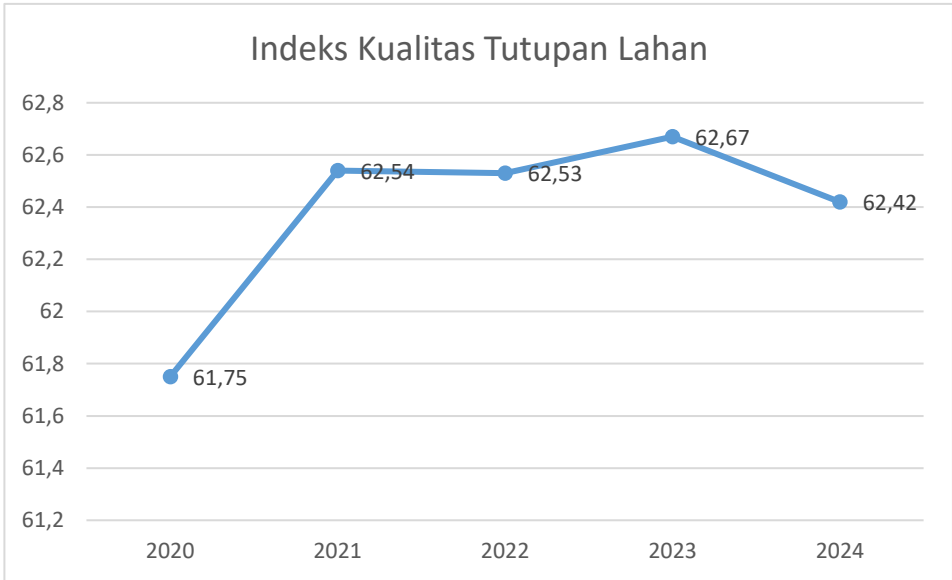
Indeks Tutupan Lahan (ITL) adalah suatu nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan kondisi tutupan hutan dan vegetasi non-hutan. Indeks ini digunakan untuk mengukur kualitas lahan dan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan serta pengambilan kebijakan terkait lingkungan hidup. Selain itu, tutupan lahan yang baik dapat membantu mengurangi risiko bencana alam seperti banjir dan longsor. Monitoring indeks ini membantu dalam identifikasi area yang memerlukan intervensi untuk pengelolaan risiko bencana. Untuk melihat indeks tutupan lahan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 2. 38
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tutupan Lahan (ITL)	61,75	62,54	62,53	62,67	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Grafik 2. 5
Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2019, nilai capaian indeks tutupan lahan Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 62,51, namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan pada nilai indeks tersebut, yaitu menjadi 61,75. Memasuki tahun 2021, nilai indeks tutupan lahan mengalami peningkatan kembali menjadi 62,54, dan sedikit mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 62,53. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana nilai capaian indeks tutupan lahan naik menjadi 66,19.

Secara umum, meskipun terdapat beberapa fluktuasi, tren nilai indeks tutupan lahan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil dari tahun 2018 hingga 2022, dengan peningkatan yang cukup berarti pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan dan pengelolaan tutupan lahan yang lebih baik di tahun-tahun terakhir.

B. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang memberi gambaran kondisi lingkungan hidup di sebuah wilayah pada waktu tertentu. Saat ini di Kabupaten Lima Puluh Kota, IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas AIR (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Penurunan IKLH pada tahun 2023 ini disebabkan karena terjadinya penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU). Pada tahun 2022 nilai IKA Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 55,63 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 50,92.

Penurunan nilai IKA ini disebabkan oleh pencemaran air oleh kegiatan tambang, limbah industri dibuang ke sungai tanpa proses disterilkan lebih dahulu, sehingga mencemari aliran sungai. Demikian juga halnya dengan nilai IKU Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2022 berada pada angka 92,00 sementara pada tahun 2023 turun menjadi 90,24. Penurunan nilai IKU ini disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor yang sejalan dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Lima Puluh Kota. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai

instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter-parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Kinerja IKLH Kabupaten Lima Puluh Kota dan komponen IKLH selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.41 di bawah ini:

Tabel 2. 39
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Komponen IKLH
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indeks	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	70,51	71,87	71,63	74,88
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	52,5	52,5	53,33	56,52	61,92
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,39	91,53	92,63	90,24	93,65
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,75	62,54	62,53	62,47	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

C. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

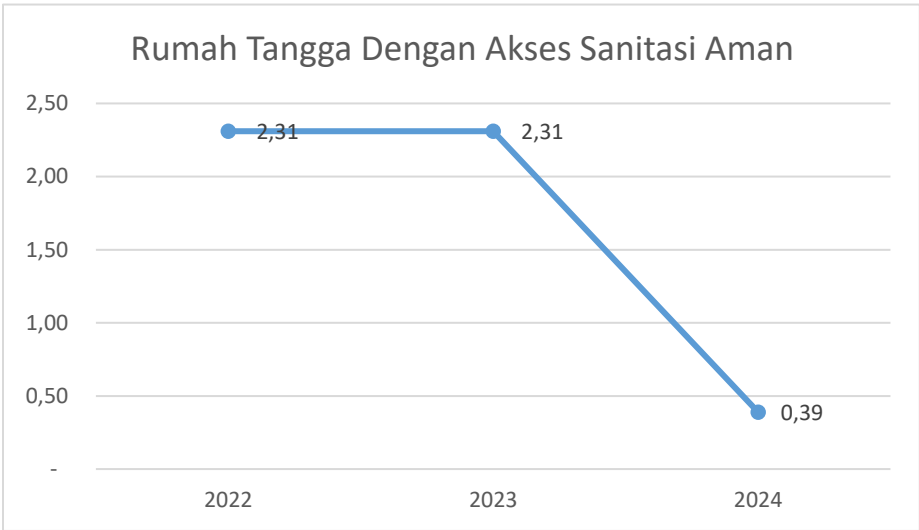
Akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Akses aman adalah ketika rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Selain itu, akses terhadap sanitasi aman merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Sanitasi yang aman mencakup fasilitas kebersihan yang memadai dan layak, serta pengolahan limbah yang efektif, yang bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat.

Tabel 2. 40
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	2,31%	2,31%	0,39

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024,
Data diolah dan Dinkes Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Grafik 2. 6
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024



Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah dan Dinkes Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Pada tahun 2022 dan 2023, data capaian indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 2,31%. Data ini menunjukkan bahwa tidak ada perubahan dalam persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2022 ke tahun 2023. Ini menunjukkan kondisi yang statis, di mana upaya yang dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi aman belum memberikan hasil yang signifikan dalam kurun waktu satu tahun. Selain itu, data capaian rumah tangga dengan akses sanitasi aman tersebut menunjukkan perlunya evaluasi dan perbaikan strategi sehingga peningkatan akses sanitasi aman dapat tercapai, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada Tahun 2025 Dinas Kesehatan mencoba untuk mendata akses sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mana akses sanitasi aman mengalami penurunan yang signifikan sebesar 0,39 % dari tahun 2023. Penyebab penurunan akses sanitasi aman ini adalah sampai saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

D. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Pengelolaan sampah yang efektif merupakan salah satu indikator penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Pengelolaan sampah yang baik tidak hanya membantu mengurangi pencemaran lingkungan, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu bagian penting dari pengelolaan sampah ini adalah seberapa banyak timbulan sampah yang mampu diolah di fasilitas pengolahan sampah.

Tabel 2. 41
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2022 - 2024

No	Indikator	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	19,72%	22,06%	18,58%

Sumber: Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional Tahun 2025

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 2 tahun terakhir. Berdasarkan Tabel di atas, data menunjukkan bahwa persentase timbulan sampah yang diolah di fasilitas pengolahan sampah meningkat dari 19,72% pada tahun 2022 menjadi 22,06% pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 2,34% dalam pengolahan sampah dalam kurun waktu satu tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam mengolah sampah memberikan

hasil yang nyata. Namun, pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 18,58% disebabkan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Payakumbuh berhenti beroperasi sehingga sampah-sampah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak terolah secara optimal. Dalam upaya pengelolaan sampah ini diperlukan strategi-strategi untuk mencapai pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mencapai target pengolahan sampah yang lebih tinggi di masa mendatang.

E. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2. 42
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024

No	Indikator	Tahun			
		2021	2022	2023	2024
1	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	12,84%	12,74%	11,70%	6,23%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah yang merupakan imperatif hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2021, capaian tercatat sebesar 12,84%, sedikit menurun menjadi 12,74% pada tahun 2022, dan terus menurun pada tahun 2023 sebesar 11,70% hingga mencapai 6,23% pada tahun 2024.

Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengelolaan layanan pengumpulan sampah di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mungkin berkontribusi terhadap penurunan ini termasuk keterbatasan infrastruktur pengelolaan sampah, kurangnya sumber daya untuk operasional yang optimal, serta tantangan dalam memastikan akses layanan pengumpulan sampah yang merata bagi seluruh rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk mengatasi penurunan ini dan meningkatkan proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah, perlu adanya langkah-langkah strategis yang mencakup peningkatan kapasitas infrastruktur pengelolaan sampah, alokasi sumber daya yang memadai, peningkatan efisiensi operasional layanan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik.

Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta dan pengembangan program berbasis komunitas dapat menjadi solusi untuk meningkatkan cakupan layanan pengumpulan sampah. Dengan komitmen yang kuat dan strategi yang tepat, diharapkan capaian indikator proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat meningkat di masa mendatang, mendukung lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi seluruh masyarakat.

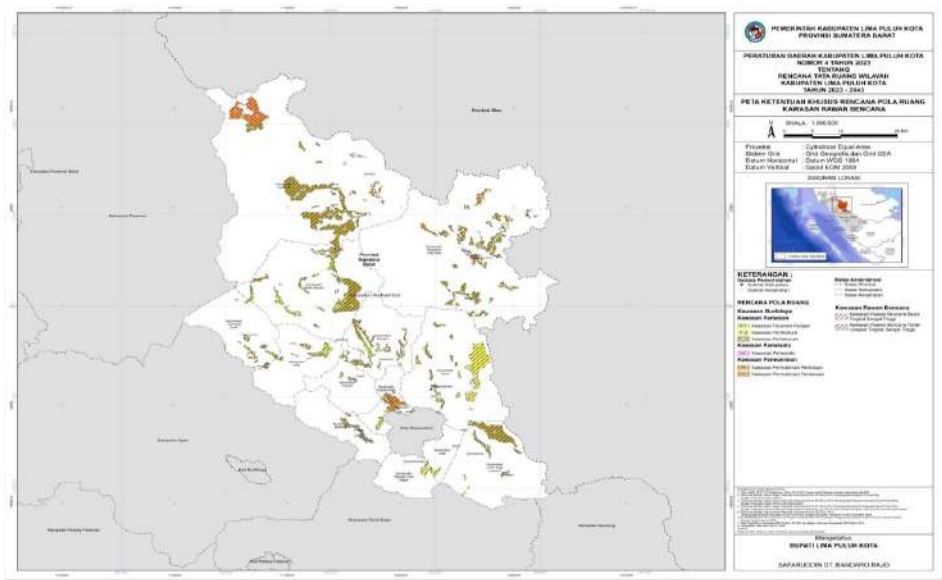
2.1.1.6 Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023-2043, kawasan rawan bencana yaitu kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Tujuan menetapkan kawasan rawan bencana adalah melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun secara tidak langsung oleh

perbuatan manusia. Sehingga perlu dilakukan hal berikut ini: (1)Penetapan kawasan rawan bencana banjir; (2) Rehabilitasi lahan dan konservasi tanah pada kawasan rawan bencana; dan (3)Pengaturan lahan daerah hulu.

Arahan penetapan kawasan rawan bencana dilakukan, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Lebih meningkatkan upaya penetapan kawasan bahaya I, bahaya II dan bahaya III bagi daerah-daerah yang sering terkena bencana alam; (2) Melakukan upaya-upaya perbaikan lingkungan serta prasarana bagi daerah yang mengalami bencana; dan (3) Lebih memantapkan kawasan-kawasan yang sering menimbulkan bencana (seperti erosi, longsor, gempa dan lain-lain) dengan membatasi kegiatan budidaya dan mengembangkan kawasan berfungsi lindung. Berikut disajikan peta ketentuan khusus rencana pola ruang kawasan rawan bencana (lihat Gambar2.8) Kabupaten Lima Puluh Kota.

Gambar 2.9
Peta Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana



Sumber: RTRW 2023-2043 Kabupaten Lima Puluh Kota

Ada beberapa bencana alam dan non alam yang berpotensi terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota, diantaranya adalah sebagai berikut :

A. Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan publikasi ilmiah “*The Sumatra fault system, Indonesia*” Januari 2001 oleh Danny Hilman Natawidjaja dan Kerry Sieh dari California Technology University menunjukkan Kabupaten Lima Puluh Kota dilewati sesar aktif. Analisis geomorfologi citra Landsat yang di-overlay peta sesar aktif dari Caltech tersebut menunjukkan sesar aktif tersebut memotong di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Suliki, Gunuang Omeh, Harau dan Bukik Barisan. Penentuan detail lapangan lokasi sesar aktif antara lain: 1) Jika daerah tersebut telah mengalami gempa maka lokasi-lokasi yang menunjukkan sesar aktif tersebut merupakan tempat dimana sesar aktif itu berada, 2) Jika daerah tersebut belum mengalami gempa maka catatan lokasi retakan akibat gempa dulu dan pelaksanaan pekerjaan galian parit penelitian geologi perlu dilakukan.

B. Bahaya Gerakan Tanah/Longsor

Dari sudut tinjauan fisiografis, wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada kawasan pegunungan Bukit Barisan yang merupakan pegunungan patahan dengan dua jalur lembah (basin), masing-masing Basin Batang Sinamar yang bermuara ke Sungai Batang Hari di Provinsi Jambi dan Basin Batang Kampar yang bermuara ke Sungai Kampar di Provinsi Riau. Dalam kawasan ini sering dijumpai alur-alur dan mata air, yang pada umumnya berada di lembah-lembah dekat sungai, Kawasan dengan kondisi seperti di atas, pada umumnya merupakan kawasan yang subur, sehingga banyak dimanfaatkan untuk kawasan budidaya terutama pertanian dan permukiman. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan tingkat kerentanan kawasan terhadap longsor, mengakibatkan masyarakat kurang siap dalam

mengantisipasi bencana, sehingga dampak yang ditimbulkan apabila terjadi bencana longsor, akan menjadi lebih besar.

Tanah longsor merupakan pergerakan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran ke arah yang lebih rendah. Ada 6 (enam) jenis tanah longsor, yaitu longsor translasi, longsor rotasi, pergerakan blok, runtuh batu, rayapan tanah, dan aliran bahan rombakan. Faktor-faktor penyebab tanah longsor adalah hujan, lereng terjal, tanah yang kurang padat dan tebal, batuan yang tidak kompak, jenis penggunaan lahan, getaran, beban tambahan, erosi, material timbunan pada tebing, bekas longsor lama, adanya bidang diskontinuitas dan penggundulan hutan.

Gejala umum tanah longsor di antaranya adalah munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing, munculnya mata air baru secara tiba-tiba dan tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Peristiwa tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya terdapat pada daerah dengan kondisi geologi yang tidak stabil dan seringkali dipicu oleh terjadinya hujan deras yang melebihi titik tertinggi. Tanah longsor biasanya menyebabkan terganggunya fungsi infrastruktur umum seperti jalan, yang biasanya terjadi pada jalan yang pada sisi kiri dan kanannya terdapat areal perkebunan rakyat.

Di jalur Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi, daerah rawan longsor adalah di Jorong Ikan banyak dan Jorong Sungai Mangkirai pada Kenagarian Pandam Gadang, apabila tidak cepat ditanggulangi dapat membuat Nagari Koto Tinggi terisolir. Pada jalur Payakumbuh-Suliki-Baruah Gunuang, jalur jalan yang rawan longsor adalah di Jorong Lancaran Kenagarian Tanjung Bungo, Pada Jalur Payakumbuh-Maek longsor sering terjadi pada Bukit Simun, dan pada jalur Payakumbuh-Mungka-Simpang Kapuak longsor sering terjadi di badan jalan di Mungka. Sedangkan jalur Pangkalan-Kapur IX, longsor dapat terjadi di Kenagarian Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru serta Nagari Koto Bangun dan di Nagari Galugur di Kecamatan Kapur IX.

Sementara pada jalur Payakumbuh-Pekanbaru daerah yang rawan longsor terdapat lebih kurang pada 50 titik. Setiap tahunnya longsor terjadi di sepanjang jalan negara dari Nagari Sarilamak Kecamatan Harau sampai di Kenagarian Tanjung Pauah Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Penyebab longsor sepanjang ruas jalan Sumatera Barat-Riau adalah curah hujan yang tinggi pada saat kejadian, kemiringan yang terjal akibat dari pelebaran jalan yang menyebabkan material mudah bergerak. Adanya bidang yang lemah berupa kontak bantuan yang bersifat sarang dengan bantuan dasar yang kedap air dan berfungsi sebagai bidang gelincir, adanya penambangan batu alam disekitar lokasi longsor yang menyebabkan vegetasi terbuka serta daya ikat akar tanaman tidak ada.

C. Bahaya Banjir

Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Banjir diakibatkan oleh volume air di suatu badan air seperti sungai atau danau yang meluap atau melimpah dari bendungan. Banjir juga dapat terjadi di sungai, ketika alirannya melebihi kapasitas saluran air, terutama di kelokan sungai, Banjir sering mengakibatkan kerusakan rumah dan pertokoan yang dibangun di dataran banjir sungai alami.

D. Bahaya Angin Puting Beliung

Puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km/jam yang bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Orang awam menyebut angin puting beliung adalah angin Lesus, di daerah Sumatera disebut Angin Bohorok dan masih ada sebutan lainnya. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota angin puting beliung disebut juga dengan "Angin Limbubu". Angin jenis lain dengan ukuran lebih besar yang ada di Amerika yaitu Tornado mempunyai kecepatan sampai 320 km/jam dan berdiameter 500 meter. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore hari pada musim pancaroba. Angin ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya, karena dengan pusarannya benda yang terlewat terangkat dan terlempar.

Dalam pemetaan bahaya angin ribut dilakukan terhadap jumlah kejadian yang pernah ada, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kerawanan. Kawasan yang dikatakan sebagai kawasan yang tidak rawan bahaya adalah kawasan yang belum pernah ada kejadian bencana angin ribut, dalam hal ini ada di Kecamatan Kapur IX, Luak, Gunuang Omeh dan Mungka. Kawasan

yang rawan bahaya adalah kawasan yang pernah terjadi satu peristiwa kejadian angin ribut selama tiga tahun terakhir.

E. **Bahaya Kebakaran**

Kebakaran adalah peristiwa terbakarnya sesuatu, baik rumah, hutan dan lainnya. Kebakaran dapat membahayakan nyawa manusia, bangunan dan ekologi. Kebakaran ini dapat terjadi baik secara tidak sengaja maupun di sengaja. Kebakaran hutan adalah peristiwa terbakarnya vegetasi yang dapat memusnahkan rumah dan atau sumber daya pertanian. Penyebab kebakaran hutan antara lain sambaran petir pada hutan yang kering pada musim kemarau yang panjang, kecerobohan manusia (seperti membuang puntung rokok secara sembarangan dan lupa mematikan api di perkemahan), tindakan yang disengaja (pembersihan lahan pertanian, pembukaan lahan baru atau tindakan vandalisme) dan kebakaran bawah tanah (*ground fire*) pada daerah tanah gambut pada saat musim kemarau.

Dampak yang ditimbulkan dari kebakaran hutan antara lain menyebarkan emisi gas karbondioksida ke atmosfer, musnahnya satwa dan rusaknya habitat, menyebabkan banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau, musnahnya bahan baku industri perkayuan, meubel/furniture, meningkatnya jumlah penderita penyakit infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) dan kanker paru-paru serta asap yang ditimbulkan menyebabkan gangguan di berbagai segi kehidupan masyarakat. Data bencana alam yang terjadi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.43 di bawah ini:

Tabel 2. 43
Data Bencana Alam di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
1.	Jor. Koto Batu Balabuah II Nagari Sungai Naniang Kec. Bukik Barisan	Longsor
2.	Nagari Mungo Kec. Luak	Angin Kencang
3.	Nagari Ampalu Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
4.	Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
5.	Nagari Situjuah Banda Dalam Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Longsor
6.	Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru	Longsor
7.	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru	Longsor
8.	Nagari Pandam Gadang Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
9.	Nagari Harau Kecamatan Harau	Longsor
10.	Nagari Koto Alam Kec. Pangkalan Koto Baru	Longsor
11.	Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban	Angin Kencang
12.	Nagari Bukik Sikumpa Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
13.	Nagari Batu Payuang Kecamatan Lareh Sago Halaban	Longsor
14.	Nagari Sungai Talang Kecamatan Guguak	Longsor
15.	Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru	Longsor
16.	Nagari Maek Kecamatan Bukik Barisan	Longsor
17.	Nagari Gunung Malintang Kecamatan Pangkalan Koto Baru	Longsor
18.	Nagari Sungai Antuan Kec. Mungka	Angin Kencang
19.	Nagari Sarik Laweh Kec. Akabiluru	Longsor
20.	Nagari Halaban Kec. Lareh Sago Halaban	Angin Kencang
21.	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Angin Kencang

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
22.	Nagari Sarilamak Kec. Harau	Longsor
23.	Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru	Longsor
24.	Nagari Tungkar Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
25.	Nagari Pandam Gadang Kec. Gunuang Omeh	Longsor
26.	Nagari Batu Hampar Kec. Akabiluru	Longsor
27.	Nagari Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
28.	Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
29.	Nagari Kurai Kec. Suliki	Longsor
30.	Nagari Banda Dalam Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
31.	Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
32.	Nagari Situjuah Batua Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
33.	Nagari Kurai Kec. Suliki	Longsor
34.	Nagari Sarik Laweh Kec. Akabiluru	Angin Kencang
35.	Nagari Tungka Kec. Situjuah Limo Nagari	Banjir
36.	Nagari Harau, Kec, Harau	Angin Kencang
37.	Nagari Tarantang, Kec, Harau	Banjir
38.	Nagari Sarilamak, Kec, Harau	Banjir
39.	Nagari Harau, Kec, Harau	Banjir
40.	Nagari Taram, Kec, Harau	Banjir
41.	Nagari Lubuak Batingkok, Kec, Harau	Banjir
42.	Nagari Solok Bio-Bio, Kec, Harau	Banjir
43.	Nagari Mungo, Kec, Luak	Banjir
44.	Nagari Andaleh, Kec, Luak	Banjir
45.	Nagari Bukik Sikumpa, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
46.	Nagari Sitanang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
47.	Nagari Balai Panjang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
48.	Nagari Tg. Gadang, Kec, Lareh Sago Halaban	Banjir
49.	Nagari VII Koto Talago, Kec, Guguak	Banjir
50.	Nagari Kubang, Kec, Guguak	Banjir
51.	Nagari Suayan, Kec, Akabiluru	Longsor
52.	Nagari Maek, Kec, Bukik Barisan	Longsor
53.	Nagari Situjuah Batua, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
54.	Nagari Situjuah Banda Dalam, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
55.	Nagari Situjuah Tungka, Kec, Situjuah Limo Nagari	Longsor
56.	Nagari Koto Lamo, Kec, Kapur IX	Longsor
57.	Nagari Pauh Sangik, Kec, Akabiluru	Longsor
58.	Nagari Sungai Naniang, Kecamatan Bukik Barisan	Longsor
59.	Kecamatan Gunuang Omeh	Longsor
60.	Nagari Gurun, Kecamatan Harau	Longsor
61.	Nagari Koto Lamo, Kec, Kapur IX	Longsor
62.	Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru	Banjir
63.	Nagari Limbanang, Kec. Suliki	Karhutla
64.	Nagari Bukik Limbuku, Kec. Harau	Karhutla
65.	Nagari Gurun, Kec. Harau	Karhutla
66.	Nagari Situjuah Gadang, Kecamatan Situjuah Limo Nagari	Banjir Bandang
67.	Nagari Pandam gadang, Kecamatan Gunung Omeh	Angin Kencang
68.	Nagari Andaleh, Kecamatan Luak	Angin Kencang
69.	Nagari Simpang Kapuak, Kec. Mungka	Banjir
70.	Nagari Pangkalan, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir
71.	Nagari Tarantang, Kec. Harau	Banjir

No.	Lokasi Kecamatan/Nagari	Jenis Bencana
72.	Nagari Sarilamak, Kec. Harau	Banjir
73.	Nagari Sungai Kamuyang, Kec. Luak	Longsor
74.	Nagari Kurai, Kec. Suliki	Longsor
75.	Nagari Sungai antuan, Kec. Mungka	Banjir
76.	Nagari Sariak Laweh, Kec. Akabiluru	Banjir
77.	Nagari Koto Lamo, Kec. Kapur IX	Longsor
78.	Nagari Gunung Malintang, Kec. Pangkalan Koto Baru	Banjir

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025

Berdasarkan tabel di atas bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh banjir dan longsor, dalam menghitung potensi dampak negatif suatu bencana menggunakan pendekatan indeks risiko bencana dan resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim dapat dilihat dari indikator berikut:

a. Indeks Risiko Bencana

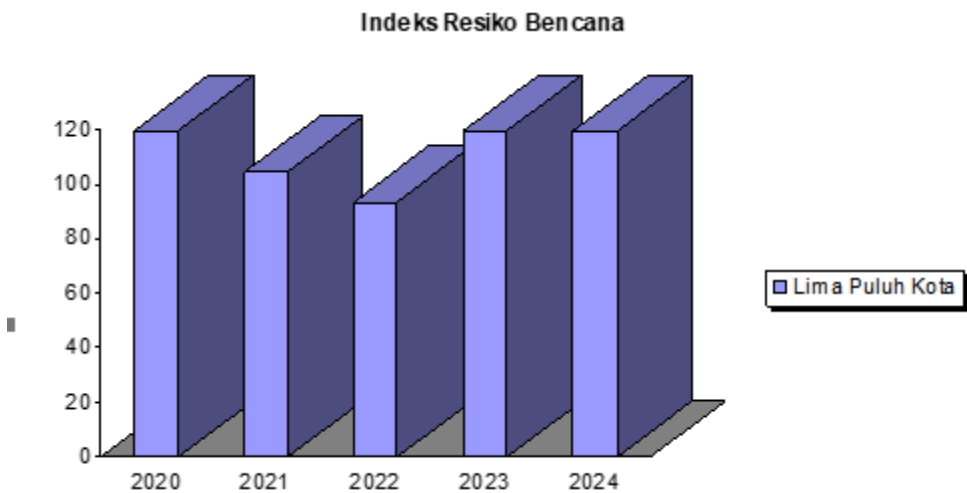
Indeks Risiko Bencana (IRB) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Semakin kecil nilai indeks risiko bencana, diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan (lihat tabel 2.44 dan Grafik 2.7).

Tabel 2. 44
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Indeks Risiko Bencana (IRB)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Lima Puluh Kota	119,2	104,18	93,20	119,20	119,20

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025

Grafik 2. 7
Indeks Risiko Bencana Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2024



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, 2025

Data di Kabupaten Lima Puluh kota menunjukkan fluktuasi dalam nilai IRB dari tahun 2020 hingga 2024. Penurunan dan kenaikan indeks ini mencerminkan dinamika dalam kesiapsiagaan, mitigasi, dan respon terhadap bencana di daerah tersebut. Pada tahun 2020, IRB Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 119,2. Nilai ini mencerminkan tingginya tingkat risiko bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, yang mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi

geografis, infrastruktur yang rentan dan kesiapsiagaan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Pada tahun 2021, terjadi penurunan signifikan dalam IRB menjadi 104,18. Penurunan ini mencerminkan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang lebih baik, termasuk pembangunan infrastruktur yang lebih tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini, dan pelatihan kebencanaan untuk masyarakat. Tren penurunan berlanjut pada tahun 2022 dengan IRB mencapai 93,20. Ini menunjukkan bahwa program-program penanggulangan bencana yang diterapkan oleh pemerintah daerah semakin efektif, dan kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam upaya mitigasi bencana meningkat.

Namun, pada tahun 2023 dan tahun 2024, IRB kembali meningkat menjadi 119,20. Kenaikan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terjadinya bencana besar, perubahan kondisi lingkungan, atau kurangnya keberlanjutan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Data capaian indikator "Indeks Risiko Bencana" di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan fluktuasi yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2024. Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 dan 2022 menunjukkan penurunan dan peningkatan kembali pada tahun 2023 dan tahun 2024 menekankan perlunya evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian strategi penanggulangan bencana. Dengan komitmen yang kuat dan pendekatan yang berkelanjutan, Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengelola risiko bencana dengan lebih efektif, meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana, dan melindungi kesejahteraan masyarakat.

b. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah mengatur penanggulangan bencana menjadi urusan wajib daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana di daerah. Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. Kewenangan dari pemerintah daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan terkait dengan kebencanaan dapat dilaksanakan secara lintas sektor, melalui pelaksanaan rencana kerja masing-masing unit OPD dan penganggaran daerah yang disusun berdasarkan koordinasi Bappeda di tataran daerah. Pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam program kegiatan lintas sektor ini diharapkan dapat berlangsung lebih baik dengan adanya instrumen kebijakan ini. Dengan memperhatikan hal tersebut diatas, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana memberikan Layanan Asistensi Teknis Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.

2.1.1.7 Demografi

A. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan kecepatan perubahan penduduk di suatu daerah. Pengetahuan mengenai hal ini akan dapat membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan dan program pembangunan, khususnya mengenai penyediaan perumahan, pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya yang secara keseluruhan mempengaruhi pola permukiman penduduk dan struktur tata ruang daerah. Selain itu, pengetahuan mengenai jumlah dan laju pertumbuhan penduduk dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam menentukan target pemasukan melalui pajak di masa yang akan datang. Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401,09 ribu jiwa, dengan rincian 201,14 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 199,96 ribu jiwa penduduk perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah laki-laki sedikit lebih banyak dari jumlah perempuan.

B. Laju Pertumbuhan Penduduk

Dalam proses pembangunan, penduduk mempunyai peranan yang sangat penting dan selalu mendapat perhatian, karena penduduk merupakan modal dasar pembangunan. Disamping itu juga dapat menimbulkan masalah yang dapat menghambat pembangunan. Masalah kependudukan yang terdapat di daerah bukan hanya menyangkut masalah kelahiran, kematian dan migrasi, tetapi menyangkut pula masalah sosial budaya yang dapat menghambat usaha peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu pemerintah tidak saja menyerahkan pada upaya pengendalian penduduk tapi juga pada upaya peningkatan sumber daya manusia. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, pada Pasal 8 dijelaskan bahwa sensus penduduk dilaksanakan paling sekurang-kurangnya sekali dalam sepuluh tahun. Dalam pelaksanaannya, sensus penduduk menggunakan dua tahap, yaitu pencacahan lengkap dan pencacahan sampel. Informasi yang lebih lengkap dikumpulkan dalam pencacahan sampel. Pendekatan *de jure* dan *de facto* diterapkan untuk mencakup semua orang dalam area pencacahan. Mereka yang mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de jure*, dimana mereka dicatat sesuai dengan tempat tinggal mereka secara formal, sedangkan mereka yang yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap didekati dengan pendekatan *de facto* dan dicatat dimana mereka berada. Semua anggota kedutaan besar dan keluarganya tidak tercakup dalam sensus.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk merupakan indikator yang menunjukkan tentang komposisi, distribusi dan perubahan penduduk di suatu daerah. Perkembangan penduduk telah menuntut pemerintah untuk melengkapi berbagai sarana dan prasarana pendukung, baik perumahan, pendidikan, transportasi maupun sarana dan prasarana umum lainnya. Pertumbuhan penduduk yang terkendali diperlukan agar tercipta keluarga yang berkualitas dengan memperhatikan kesehatan Pasangan Usia Subur (PUS) dan tumbuh kembang anak yang dilahirkan. Sejak tahun 2020-2024 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berfluktuasi hingga mencapai angka 0,93 di tahun 2024 (lihat tabel 2.45).

Tabel 2. 45
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota 2020-2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk	0,93	0,55	0,71	1,21	0,93

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu kebijakan yang harus direncanakan dan dijalankan sehingga modal pembangunan ini dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien sehingga tidak menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang pesat harus diimbangi oleh kenaikan produksi agar dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh angka kelahiran yang tinggi akan dapat memperbesar jumlah penduduk usia muda yang membutuhkan kehidupan layak dan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai.

C. Rasio Penduduk

Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan karakteristik tertentu seperti karakteristik demografi, sosial, ekonomi dan budaya. Struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang disajikan berikut ini didasarkan pada kelompok umur dan jenis kelamin (lihat tabel 2.46)

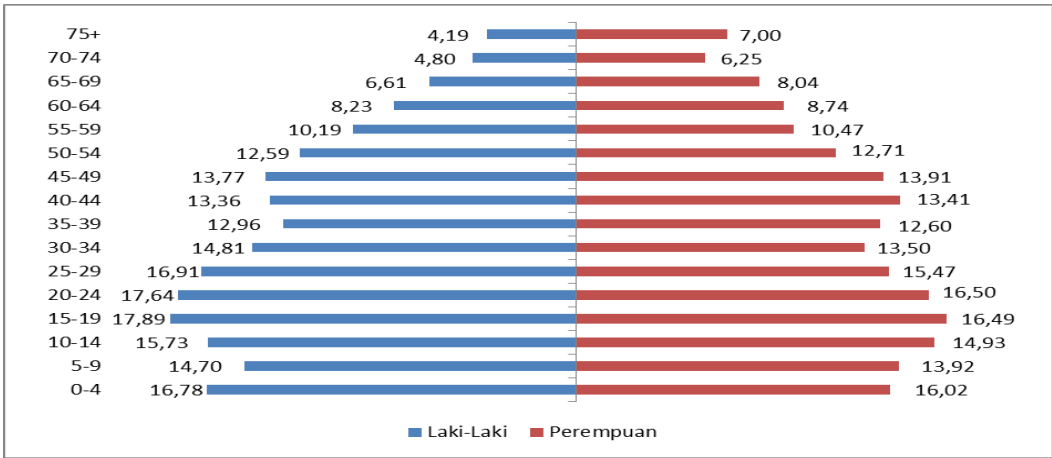
Tabel 2. 46
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan
Jenis Kelamin Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		
	Laki-laki (ribu jiwa)	Perempuan (ribu jiwa)	Jumlah (ribu jiwa)
0-4	16,78	16,02	32,81
5-9	14,70	13,92	28,62
10-14	15,73	14,93	30,66
15-19	17,89	16,49	34,37
20-24	17,64	16,50	34,14
25-29	16,91	15,47	32,37
30-34	14,81	13,50	28,30
35-39	12,96	12,60	25,56
40-44	13,36	13,41	26,77
45-49	13,77	13,91	27,68
50-54	12,59	12,71	25,30
55-59	10,19	10,47	20,66
60-64	8,23	8,74	16,97
65-69	6,61	8,04	14,66
70-74	4,80	6,25	11,05
75+	4,19	7,00	11,19
Jumlah	201,14	199,95	401,09

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 sebanyak 401,09 ribu jiwa, dengan rincian 201,14 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 199,96 ribu jiwa penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin sebesar 100,59 persen. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 digambarkan dengan piramida penduduk di bawah ini (lihat Grafik 2.8).

Grafik 2. 8
Piramida Penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Karakteristik penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat melalui piramida penduduk di atas. Piramida penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan piramida penduduk muda, dimana angka kelahiran tinggi dan angka kematian rendah. Kelompok umur

dengan jumlah penduduk paling banyak adalah kelompok umur 15-19 tahun yaitu 34,37 ribu jiwa, sedangkan kelompok umur dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah kelompok umur 70-74 tahun yaitu 11,05 ribu jiwa. Dari uraian mengenai kependudukan ini dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh usia muda atau usia sekolah.

D. **Kepadatan Penduduk**

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 yang bersumber dari BPS adalah 123 jiwa per km2. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.47 di bawah ini:

Tabel 2. 47
Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas (Km ²)	Kepadaran per Km ²
1	Payakumbuh	39.747	59,59	667
2	Akabiluru	30.089	111,31	270
3	Luak	29.452	45,98	641
4	Lareh Sago Halaban	40.368	217,49	186
5	Situjuah Limo Nagari	24.708	75,58	327
6	Harau	59.678	310,53	192
7	Guguak	36.903	95,27	387
8	Mungka	28.036	149,57	187
9	Suliki	15.243	144,25	106
10	Bukik Barisan	23.420	336,08	70
11	Gunuang Omeh	14.753	147,33	100
12	Kapur IX	28.665	834,61	34
13	Pangkalan Koto Baru	30.024	745,81	40
Jumlah / Rata-rata		401.086	3.273,40	123

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, kecamatan-kecamatan yang memiliki tingkat kepadatan penduduk tinggi yaitu: Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Luak, Kecamatan Guguak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari dan Kecamatan Akabiluru. Sedangkan ada 5 kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah yaitu Kecamatan Kapur IX, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Suiki. Hal ini dipengaruhi karena dari 5 kecamatan tersebut sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan, daerah perbatasan yang aksesibilitas serta infrastrukturnya masih rendah. Karakteristik penduduk yang paling berpengaruh terhadap tingkah laku sosial ekonomi penduduk adalah umur, atau sering juga disebut komposisi penduduk menurut umur. Cara lain yang dapat digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur adalah dengan piramida penduduk. Komposisi penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan kelompok umur dari 0-4 tahun sampai 75 tahun lebih. Jumlah dan sebaran penduduk menurut kecamatan dan rata-rata jumlah penduduk nagari tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.48 di bawah ini :

Tabel 2. 48
Jumlah dan Sebaran Penduduk Menurut Kecamatan dan Rata-rata Jumlah Penduduk Nagari Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
1	Payakumbuh	7	39.747	20.003	19.744	5.678
2	Akabiluru	7	30.089	15.144	14.945	4.298
3	Luak	4	29.452	14.542	14.928	7.363
4	Lareh Sago Halaban	8	40.368	20.340	20.028	5.046
5	Situjuah Limo Nagari	5	24.708	12.400	12.308	4.941
6	Harau	11	59.678	30.152	29.526	5.425

No	Kecamatan	Jumlah Nagari	Jumlah Penduduk	Laki-Laki	Perempuan	Rata-rata penduduk/ Nagari
7	Guguak	5	36.903	18.375	18.528	7.380
8	Mungka	5	28.036	13.884	14.152	5.607
9	Suliki	6	15.243	7.546	7.697	2.540
10	Bukik Barisan	5	23.420	11.585	11.835	4.684
11	Gunuang Omeh	3	14.753	7.370	7.383	4.917
12	Kapur IX	7	28.665	14.441	14.224	4.095
13	Pangkalan Koto Baru	6	30.024	15.375	14.649	5.004
	Jumlah	79	401.086	201.139	199.947	5.077

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, untuk kondisi tahun 2024 diperoleh informasi bahwa jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Harau (59.678 jiwa) dan paling sedikit di Kecamatan Gunuang Omeh (14.753 jiwa). Sedangkan untuk rata-rata penduduk/nagari, rata-rata jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Guguak (7.380 jiwa) dan yang paling sedikit di Kecamatan Suliki (2.540 jiwa). Penyebaran penduduk yang tidak merata ini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan letak kecamatan dan nagari dari pusat perlintasan. Hal ini yang juga ikut mempengaruhi adalah potensi dan geografis satu kecamatan dan nagari.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

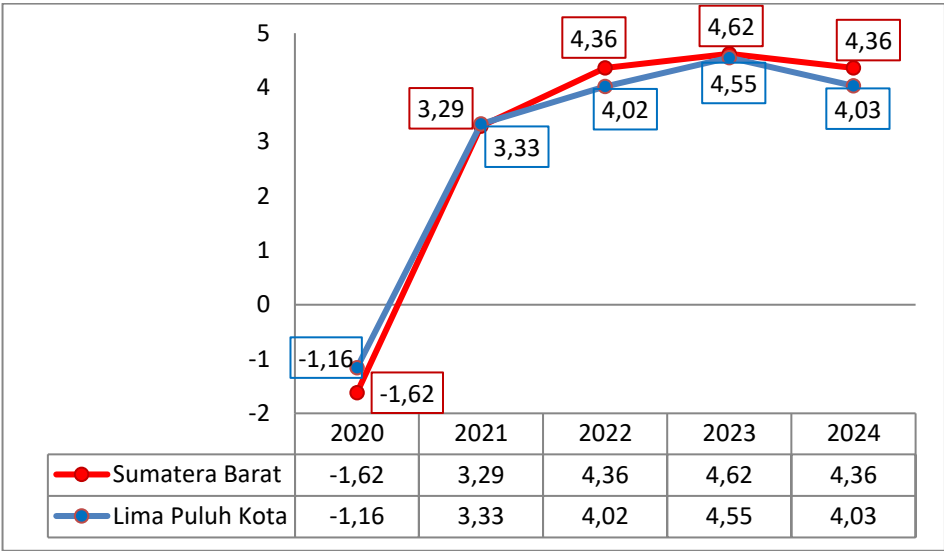
Analisis terhadap kesejahteraan ekonomi dapat dilihat pada laju pertumbuhan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita, indeks gini rasio, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka dan indeks pembangunan manusia selama lima tahun terakhir.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di daerah dapat dilihat dari indikator pertumbuhan ekonomi, karena pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diambil oleh pemerintah, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi, Pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020 berada pada titik terendah yaitu -1,16% akibat dampak dari pandemi covid 19. Pada tahun 2021 setelah meredanya pandemi covid 19 dan pembatasan aktivitas masyarakat tidak berlaku lagi maka perlahan-lahan perekonomian masyarakat pun menggeliat. Hal ini berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang mulai menunjukkan tren positif naik menjadi 3,33%. Pada tahun 2024 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sebesar 0,52% dari tahun 2023 yang sebelumnya 4,55% menjadi 4,03%, Oleh sebab itu, diperlukan arah kebijakan pembangunan ekonomi lima tahun mendatang melalui penguatan pondasi ekonomi, terutama sektor-sektor yang menjadi potensi unggulan daerah yang berbasis Iptek dan Inovasi. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 berada di bawah angka pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang terlihat dari grafik di bawah

Grafik 2. 9
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2.2.1.2 Tingkat Kemiskinan

A. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah global yaitu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, maupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita perhari.

Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di Perdesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Gambaran garis kemiskinan di Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49
Perbandingan Garis Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Provinsi Tahun 2020 – 2024 (Rupiah/kapita/bulan)

Wilayah	Garis Kemiskinan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	451.295	475.123	504.670	553.068	582.794
Sumatera Barat	544.315	568.703	610.941	667.925	708.416

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Semenjak tahun 2020-2024, Garis Kemiskinan selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Kenaikan ini dipengaruhi oleh inflasi yang terjadi di Sumatera Barat. Meningkatnya garis kemiskinan berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan jumlah

penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

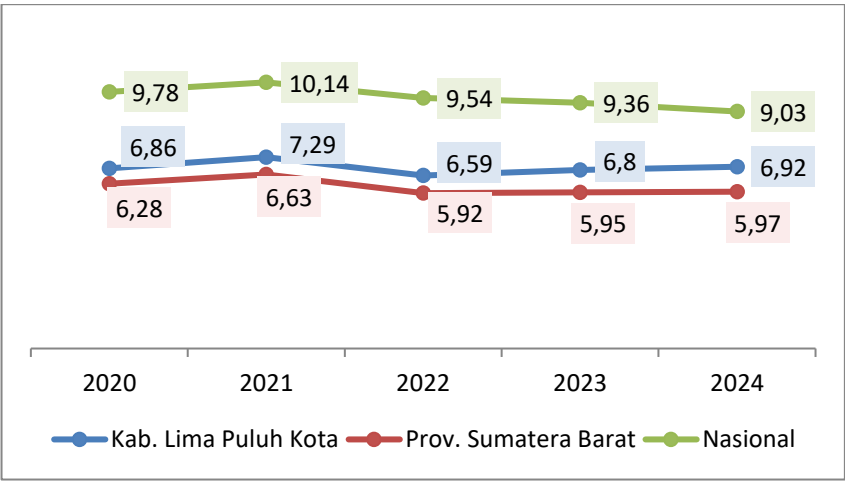
Tabel 2. 50
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (ribu jiwa)

Wilayah	Jumlah Penduduk Miskin				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	26,43	28,51	26,00	27,02	27,72
Sumatera Barat	344,23	370,67	335,21	340,37	345,73
Nasional	26.424,02	27.542,77	26.161,16	25.898,55	25.219,20

Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas jumlah Penduduk miskin Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah sebanyak 27.720 jiwa, meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebanyak 26.430 jiwa. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Angka kemiskinan tertinggi yaitu pada tahun 2021 sebesar 7,29% sebagai salah satu dampak kejadian covid-19. Perkembangan angka kemiskinan pada tahun 2020 sebesar 6,86% mengalami kenaikan 0,06% menjadi 6,92% tahun 2024.. Hal ini berbanding terbalik dengan angka kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang cenderung mengalami penurunan dari tahun 2020 – 2024. Angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota juga berada diatas angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan program-program yang berpihak pada masyarakat miskin yang bertujuan untuk menurunkan beban pengeluaran maupun meningkatkan daya beli masyarakat. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota dan perbandingan dengan angka kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2.10
Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024

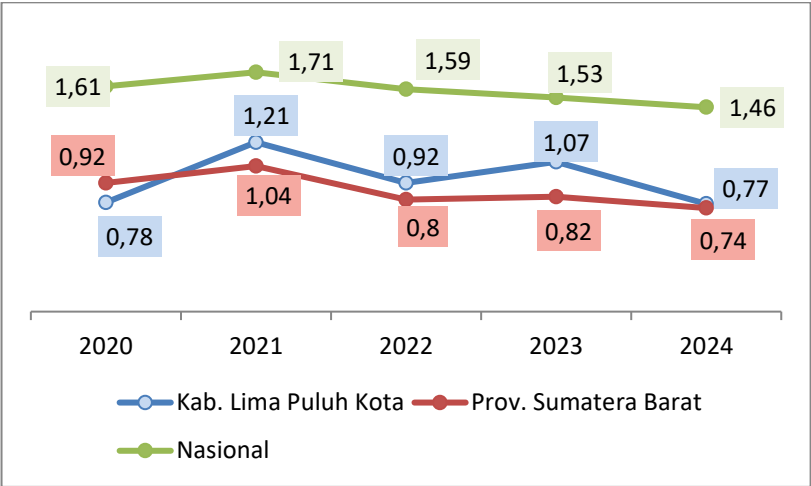


Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Selain pengendalian jumlah atau persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Indeks kedalaman Kemiskinan (P1) tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 0,77 lebih tinggi dari Provinsi yang P1 nya 0,74 dan lebih

rendah dari Nasional yang P1 nya adalah 1,46. Disini dapat dilihat bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi dan lebih pendek dibandingkan dengan Nasional. Di Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu dilakukan usaha yang lebih optimal agar masyarakat miskin dapat berkurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut ini:

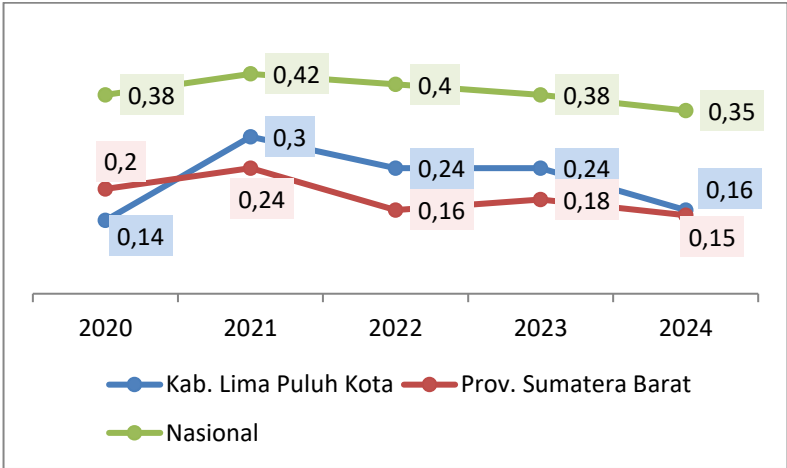
Grafik 2.11
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2024, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,16, lebih rendah dari P2 Nasional sebesar 0,35 dan lebih besar dari Provinsi sebesar 0,15. Dari sini dapat dilihat bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik daripada Nasional tapi tidak lebih baik dari Provinsi. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.12
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024



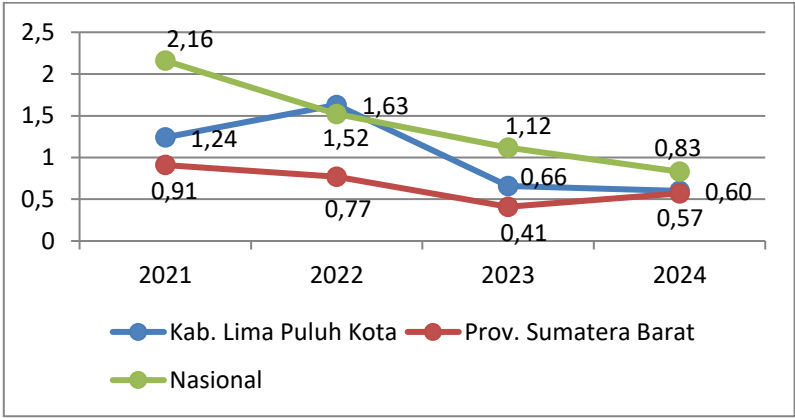
Sumber: BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

B. Kemiskinan Ekstrem

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tetapi juga akses pada layanan social (PBB, 1996). Berdasarkan Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,99 PPP (Purchasing Power Parity).

Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem, pemerintah pusat telah menetapkan dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Berdasarkan Edaran Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024 perihal Pemberitahuan Hasil Perhitungan Estimasi Angka Kemiskinan Ekstrem Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan, hal tersebut dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.13
Angka Kemiskinan Ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 (%)



(Sumber : Satuan Tugas Pengelola Data P3KE)

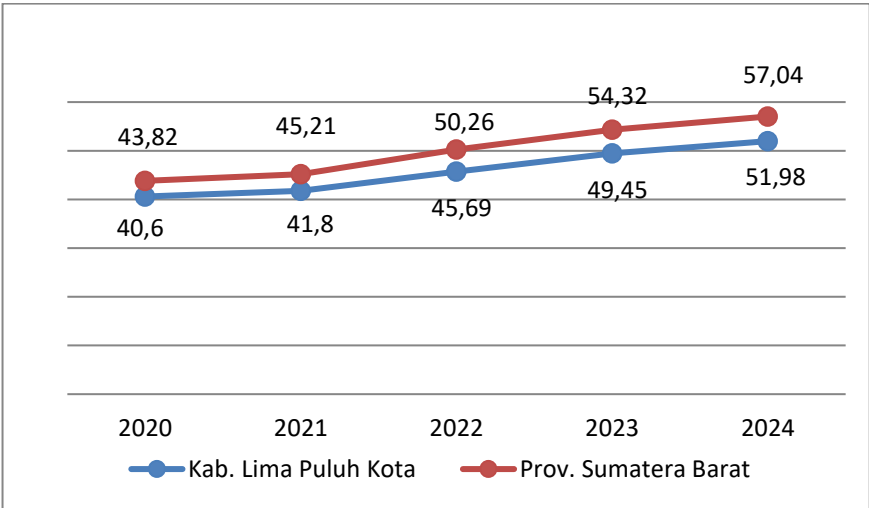
Dari grafik di atas terlihat bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami peningkatan pada tahun 2022 menjadi 1,63% dibanding tahun 2021 yang hanya sebesar 1,24%. Namun, setelah dilakukan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan pada tahun 2022, angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami penurunan ke angka 0,60% pada tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2021-2024 lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem Provinsi Sumatera Barat tapi berada diposisi lebih rendah dari kemiskinan ekstrem nasional kecuali pada tahun 2022.

2.2.1.3 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi pada seluruh lapangan usaha terhadap jumlah penduduk. PDRB per kapita digunakan untuk melihat sebaran/peta kekuatan ekonomi antar sektor dan untuk mengetahui berapa besar pendapatan perkapita penduduk pada suatu wilayah dan waktu tertentu yang disajikan dalam bentuk PDRB perkapita. Besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Untuk menghitung PDRB per kapita atas dasar harga berlaku, digunakan data PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha dan jumlah penduduk pada tahun bersangkutan, yang artinya menggambarkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Dalam perhitungannya, PDRB per kapita ADHB mengabaikan inflasi. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 terakhir terus mengalami peningkatan. Hal ini mencerminkan peningkatan pendapatan rata-rata dan kesejahteraan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir seperti dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

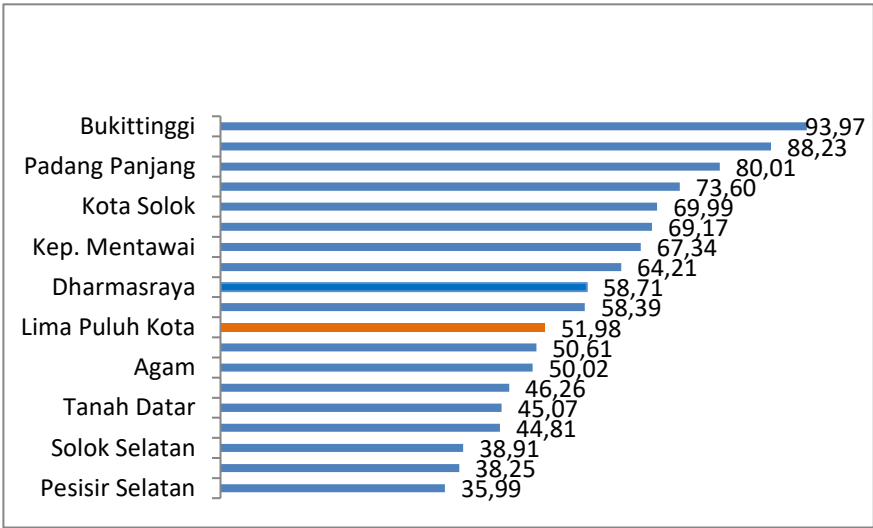
Grafik 2.14
PDRB per Kapita (ADHB)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 (juta rupiah)



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Sedangkan dilihat dari perbandingan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat maka PDRB per kapita Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 berada pada posisi ke 11 (sebelas) dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota di Provisi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.15
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 (juta rupiah)

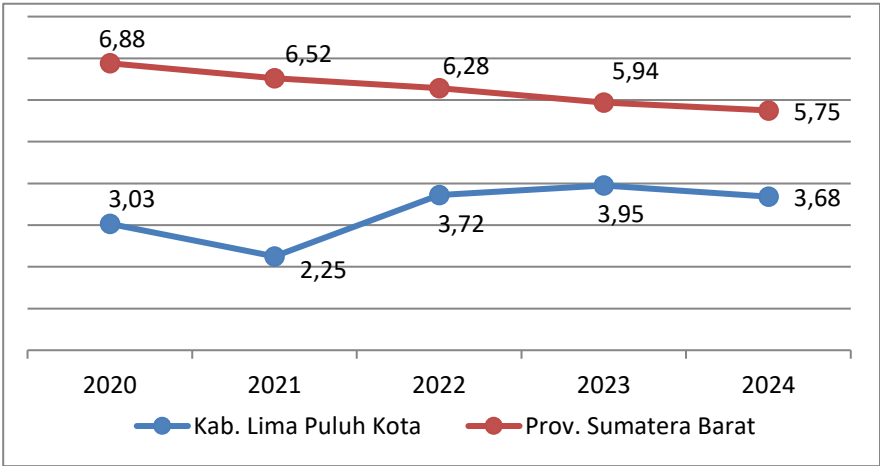


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan, mereka yang mempersiapkan usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin dapat pekerjaan, dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Selama kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2020-2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebesar 3,03% yang dimungkinkan sebagai dampak dari kebijakan pembatasan sosial selama pandemi Covid 19. Pada tahun 2021 TPT turun menjadi 2,25% tapi terus mengalami kenaikan hingga 3,68% pada tahun 2024. Apabila dibandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selalu berada pada posisi dibawah TPT Provinsi Sumatera Barat, seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

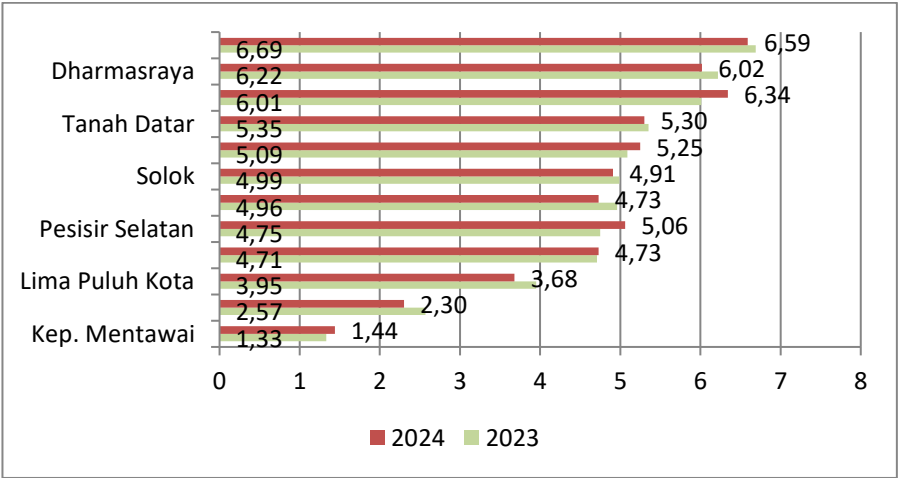
Grafik 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 (%)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Barat, jika dibandingkan dengan TPT Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2023-2024 selalu berada pada posisi 3 terendah. Hal ini mengindikasikan bahwa tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota terserap dengan cukup baik oleh pasar kerja dan pasokan tenaga kerja termanfaatkan dengan cukup baik dibandingkan dengan Kabupaten lain di Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah:

Grafik 2.17
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurut Kabupaten Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 - 2024 (%)



Sumber BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2.2.1.5 Gini Ratio

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarnya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi. Gini ratio adalah salah satu ukuran ketimpangan pendapatan penduduk secara menyeluruh. Gini Ratio didasarkan pada kurva Lorenz yang merupakan kurva 2 dimensi antara distribusi penduduk (persentase kumulatif penduduk) dan distribusi pengeluaran perkapita (persentase kumulatif pengeluaran perkapita).

Nilai Gini ratio berkisar antara 0 dan 1. Jika $G < 0,3$ berarti memiliki ketimpangan yang rendah, $0,3 < G < 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang sedang dan jika $G > 0,5$ berarti memiliki ketimpangan yang tinggi. Selain itu tingkat pemerataan menurut Bank Dunia yang dilihat dari sebaran atau distribusi pendapatan pada kelompok penduduk dapat dibagi menjadi 3 yaitu :

- 1. 40 % Terendah : kelompok kurang beruntung

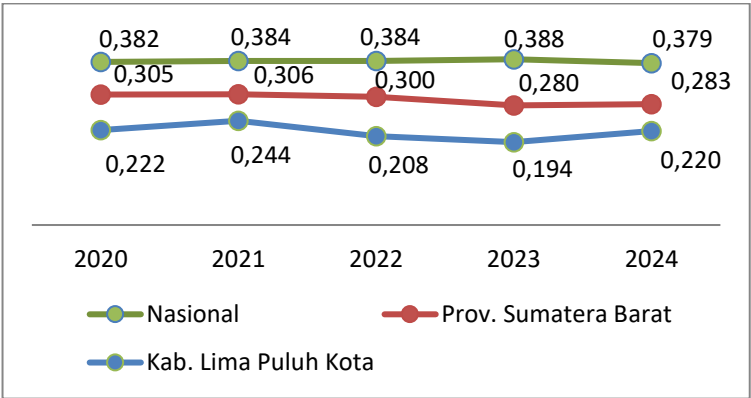
2. 40 % Menengah : kelompok menengah
3. 20 % Teratas : kelompok kaya

Ketimpangan pendapatan diukur dengan menghitung kategori ketimpangan yang ditentukan dengan menggunakan kriteria seperti berikut :

1. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk kurang dari 12% dikategorikan ketimpangan pendapatan tinggi.
2. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk antara 12-17 % dikategorikan ketimpangan pendapatan sedang/menengah.
3. Jika proporsi jumlah pendapatan dari penduduk yang masuk kategori 40% terendah terhadap total pendapatan seluruh penduduk lebih dari 17% dikategorikan ketimpangan pendapatan rendah.

Dalam rentang tahun 2020-2024, Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota turun sebesar 0,002. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota 5 tahun terakhir (2020-2024) berada pada posisi rendah dibandingkan dengan 19 Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tersebut adalah yang paling merata di Sumatera Barat. Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 tercatat sebesar 0,220. Dengan nilai 0,220 berarti bahwa ketimpangan distribusi pendapatan relatif rendah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi, Nasional, Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun selalu lebih kecil. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan perbandingan dengan gini ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

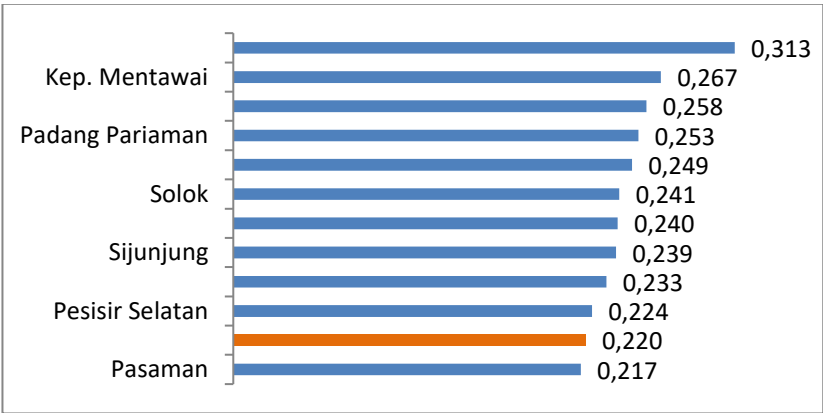
Grafik 2. 18
Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat, BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kondisi Gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota lebih baik dibandingkan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2024 dimana gini ratio Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi kedua terendah di Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Pasaman. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota cukup rendah seperti terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 19
Gini Rasio Menurut Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

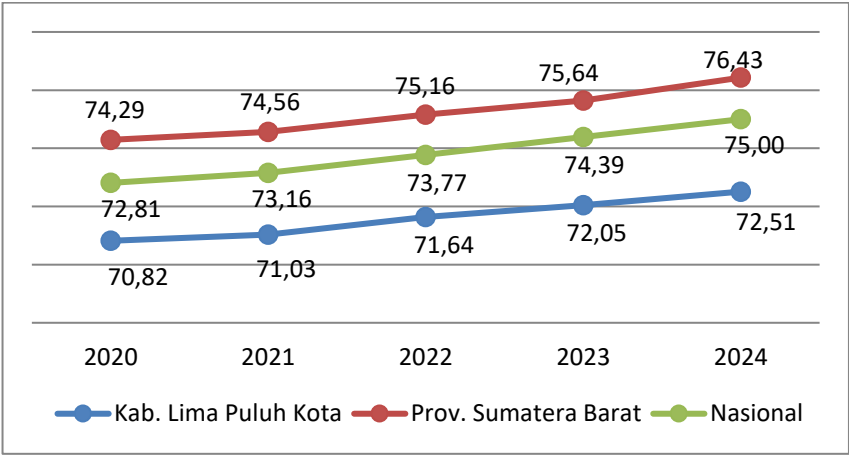


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 masih berada pada posisi **sedang** (60-79), yaitu berada pada angka 70,82 sampai dengan 72,51. Untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 72,51 naik 0,46 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan kondisi tahun 2020 ketika IPM mengalami perlambatan. Adapun perbandingan nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 20
Perbandingan Nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Poin)

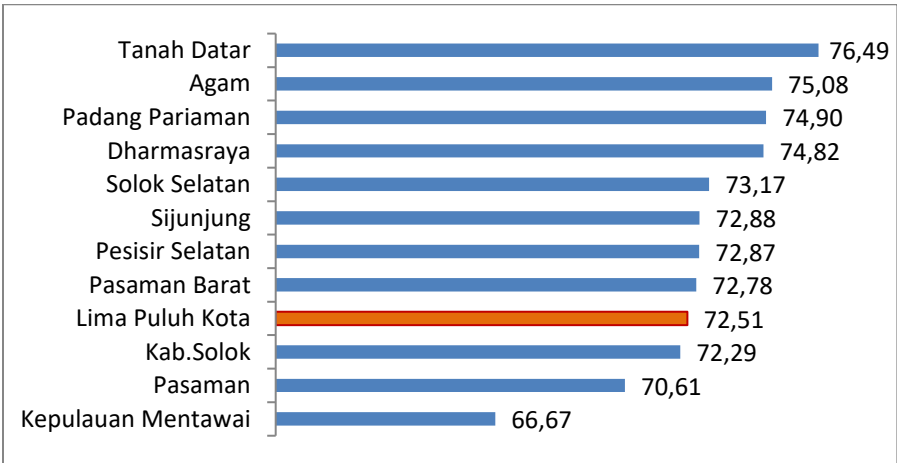


Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 selalu berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini menjadi perhatian bagi daerah agar bisa meningkatkan nilai IPM. Untuk tahun 2024, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang tertuang dalam RPJMD tahun 2021-2026 adalah 70,98. Bila dibandingkan dengan capaian IPM tahun 2024 sebesar 72,51 maka target tersebut sudah tercapai. Nilai Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yaitu: Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS), dimensi kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) dan dimensi ekonomi yaitu pengeluaran per kapita. Perbandingan IPM Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada posisi ke 4 terendah yaitu 72,51 poin. Rendahnya capaian nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi

perhatian serius dari pemerintah daerah dalam merumuskan arah pembangunan lima tahun kedepan.

Grafik 2. 21
Indek Pembangunan Manusia (IPM)
menurut Kabupaten di Provinsi Sumbar Tahun 2024 (poin)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2.2.2 Kesehatan untuk Semua

Perkembangan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota kurun waktu lima tahun terakhir dilihat dari; 1) usia harapan hidup, 2) prevalensi stunting, 3) cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis 4) angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis dan 5) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

2.2.2.1 Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Usia Harapan Hidup menggunakan pendekatan tak langsung (indirect estimation). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup yaitu jumlah rata-rata anak yang dilahirkan hidup (live births) dan jumlah rata-rata yang masih hidup (still living children) per wanita usia (15 – 49) tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (175 negara di dunia). Semakin sejahtera dan terpenuhi akses kesehatan penduduk, angka Angka harapan Hidup (AHH) akan semakin tinggi. Perkembangan Angka Harapan Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

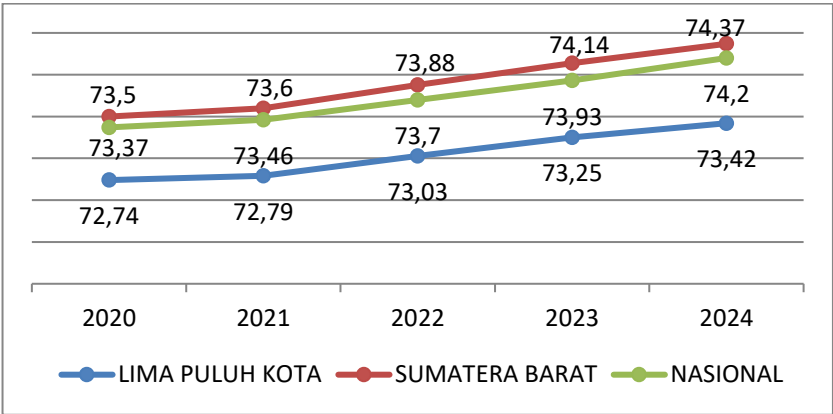
Tabel 2. 51
Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Angka Harapan Hidup Saat Lahir (AHH) (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	72,74	72,79	73,03	73,25	73,42

Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada komponen usia angka harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 20 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP. Usia Harapan Hidup selama lima tahun terakhir (2020-2024) secara umum mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Angka Harapan Hidup nasional, maka Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah. Perbandingan Angka Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Angka Harapan Hidup Provinsi dan nasional disajikan pada grafik di bawah:

Grafik 2. 22
Usia Harapan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 (Tahun)



Sumber BPS RI; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

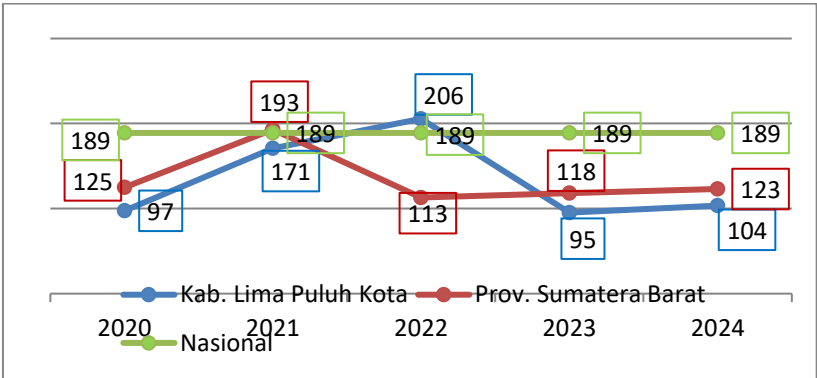
Dari grafik di atas, tidak ada peningkatan terhadap angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota secara signifikan. Hal ini dipengaruhi oleh masih banyaknya kasus kematian ibu, bayi dan balita, tingginya angka prevalensi stunting dan permasalahan gizi lainnya, rendahnya cakupan imunisasi dasar lengkap, pemberian ASI eksklusif yang belum optimal, rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta kesadaran masyarakat terhadap pola hidup bersih sehat.

2.2.2.2 Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)

Kematian Ibu adalah kematian perempuan selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan, bencana, cedera atau bunuh diri. Angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung fluktuatif. Angka kematian ibu tertinggi pada tahun 2022 yaitu sebanyak 206 orang.

Sementara pada tahun 2024 sebanyak 5 orang dari jumlah kelahiran sebanyak 4.824 kelahiran hidup (103/100.000 KH). Artinya terdapat 103 ibu meninggal dalam 100.000 jumlah kelahiran. Bila dibandingkan dengan angka kematian ibu tingkat provinsi dan nasional, maka angka kematian ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota jauh lebih rendah. Angka kematian ibu dalam lima tahun dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 23
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024



Sumber: Profil kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

2.2.2.3 Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari

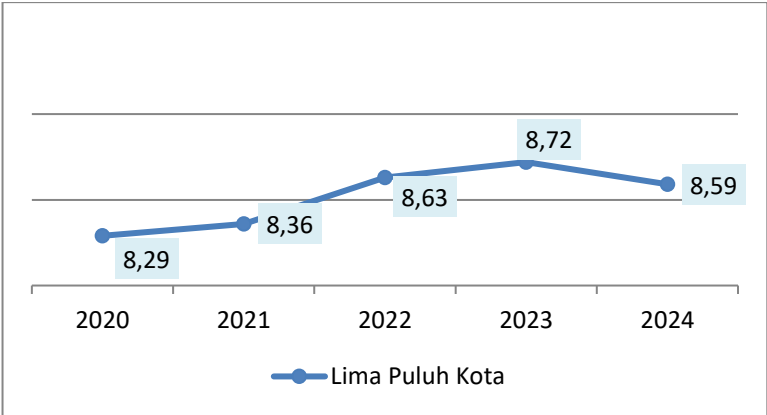
WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 berdasarkan e-PPGBM seperti tabel dan grafik dibawah ini:

Tabel 2. 52
Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Lima Puluh Kota	8,29	8,36	8,63	8,72	8,59	8,59

Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Grafik 2. 24
Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM (%)



Sumber: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2019 persentase balita stunting di kabupaten lima puluh kota mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2023 angka e-PPGBM nya sebesar 8,72% dengan jumlah anak sebanyak 2.004 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini:

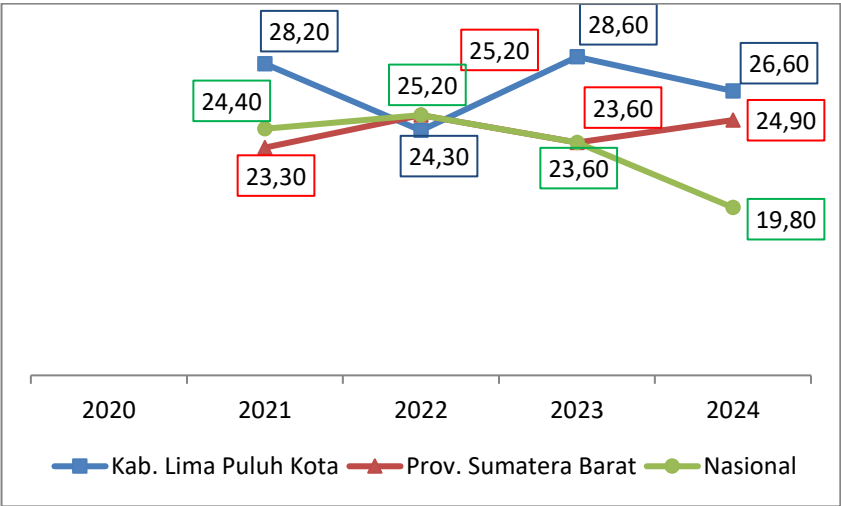
Tabel 2. 53
Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024 (%)

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	-	28,2	24,3	28,6	26,6

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Berdasarkan hasil survei SSGI (2019-2022) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sampai tahun 2022 namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Pada tahun 2023 naik menjadi 28,6% dan mengalami penurunan lagi sebesar 2% di tahun 2024 menjadi 26,6%. Pada tahun 2020 tidak diadakan survei sehingga data tidak tersedia. Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional ditampilkan pada grafik 2.25 berikut.

Grafik 2. 25
Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2023 berdasarkan Hasil Survei



Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2023 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota naik menjadi 28,6% dimana pada tahun sebelumnya berhasil turun pada 24,3%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.

2.2.2.4 Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) (%)

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet orang yang telah terinfeksi basil TB. Salah satu indikator yang digunakan dalam pengendalian TB adalah *Case Detection Rate* (CDR), yaitu proporsi jumlah pasien baru BTA positif yang ditemukan dan diobati terhadap jumlah pasien baru BTA positif yang diperkirakan ada dalam wilayah tersebut. Untuk mengukur keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=*Success Rate*) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. *Success Rate* dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut.

Tabel 2. 54
Jumlah Kasus TB di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Jumlah kasus TB				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	310	333	451	553	589

Sumber: Profil Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Penemuan kasus Tuberkulosis tahun 2024 sebanyak 589 orang yang terdiri dari 362 orang laki-laki dan 227 orang perempuan. Sehingga Treatment Coverage Tuberkulosis Tahun 2024 41,0% dan mengalami peningkatan dibandingkan Tahun 2023 yaitu 39,1%. Kasus TB paling banyak ditemukan di Puskesmas Pangkalan yaitu 48 kasus Tuberkulosis. Sedangkan kasus anak yang ditemukan sebanyak 99 kasus TB. Penemuan kasus TB Anak paling tinggi di Puskesmas Pangkalan yaitu 12 orang TB anak. Cakupan Trend jumlah kasus TB seluruhnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun tahun 2023 (553 kasus), mengalami peningkatan pada tahun 2024 (589 kasus) dengan penderita laki-laki 362 orang (61,5%) dan perempuan 227 orang (38,5%).

Pada tahun 2024 sebanyak 276 kasus TB Terkonfirmasi bakteriologis. Dari 276 kasus yang terkonfirmasi bakteriologis, sebanyak 164 kasus dievaluasi sembuh dengan persentase angka kesembuhan 59,4% masih jauh dibawah target yaitu 90%. sedangkan untuk pengobatan lengkap

sebanyak 264 kasus TB. Untuk angka keberhasilan pengobatan TB (*Success Rate*) diperoleh capaian 77,1% (428 kasus TB). Angka ini masih dibawah target yang ditetapkan yaitu 95%. Sedangkan kematian tahun 2024 sebanyak 38 kasus.

2.2.2.5 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis

Pengukuran keberhasilan pengobatan TB digunakan Angka Keberhasilan pengobatan (SR=Success Rate) yang mengindikasikan persentase pasien baru TB paru BTA positif yang menyelesaikan pengobatan, baik yang sembuh maupun yang menjalani pengobatan lengkap di antara pasien baru TB paru BTA positif yang tercatat. Success Rate dapat membantu dalam mengetahui kecenderungan meningkat atau menurunnya penemuan pasien pada wilayah tersebut. Angka keberhasilan pengobatan (Success Rate) merupakan indikator yang digunakan untuk mengevaluasi pengobatan tuberkulosis. Angka keberhasilan pengobatan yaitu jumlah semua kasus tuberkulosis yang sembuh dan pengobatan lengkap di antara semua kasus TB yang diobati dan dilaporkan. Adapun angka Keberhasilan Pengobatan (*Success Rate*) Tuberkulosis Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 disajikan pada tabel sebagai berikut.

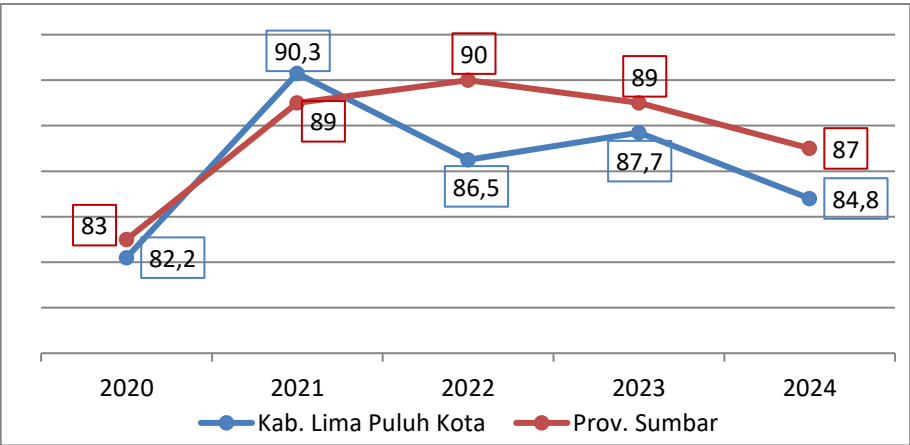
Tabel 2. 55
Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Lima Puluh Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Success Rate TB	82,2%	90,3%	86,5%	87,7%	84,8%
Jumlah kasus TB	420 kasus	280 kasus	288 kasus	355 kasus	471 kasus

Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jika dibandingkan dengan angka provinsi, keberhasilan pengobatan TB Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung lebih rendah kecuali pada tahun 2021. Target nasional pada tahun 2020-2024 sebesar 90% yang berarti selama 5 tahun terakhir angka keberhasilan pengobatan TB tidak mencapai target nasional kecuali pada tahun 2021.

Grafik 2. 26
Perbandingan Angka Keberhasilan Pengobatan (Success Rate) Tuberkulosis
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

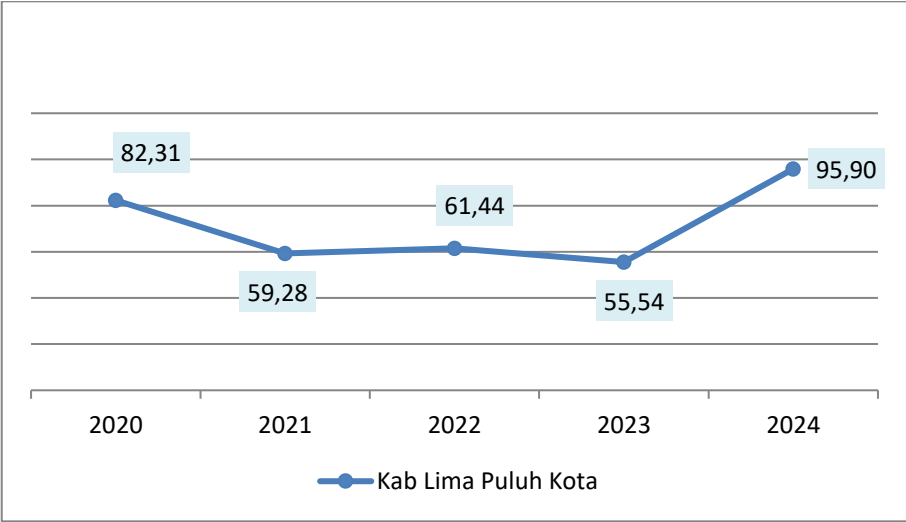


Sumber: Buku Profil Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.2.2.6 Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

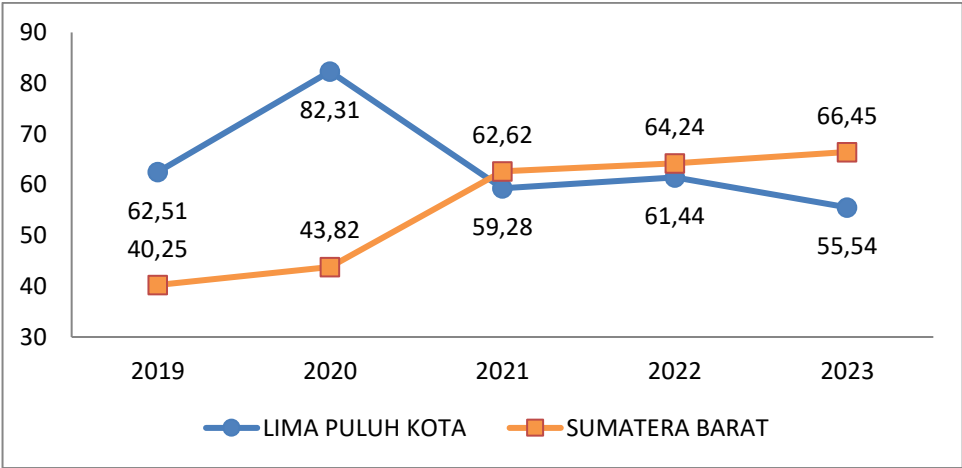
Grafik 2. 27
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2023.

Grafik 2. 28
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Lima Puluh dengan Provinsi Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik 2.25 di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se-Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.2.3.1 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional Untuk Literasi Membaca

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi peserta didik. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka. Dengan kemampuan

literasi dan numerasi yang baik, siswa akan lebih siap menghadapi perkembangan zaman di abad 21 yang relatif cepat dan dinamis. Selain itu, siswa akan dapat berpikir secara rasional, sistematis dan kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Kemampuan literasi dan numerasi pada satuan pendidikan setidaknya memiliki angka minimum 75%, dimana diukur dengan Asesmen Nasional.

Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: (1) Perlu intervensi khusus; (2) Dasar; (3) Cakap; dan (4) Mahir.

Satuan Pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional di kemampuan literasi lebih tinggi daripada kemampuan numerasi. Kemampuan literasi dan numerasi yang diukur pada melalui Asesmen Nasional tahun 2021 dan hasilnya disajikan dalam Rapor Pendidikan tahun 2022. Dilihat dari platform rapor pendidikan, pada tahun 2021-2024 persentase literasi di atas 40% sedangkan persentase numerasi di bawah 40%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa peserta didik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum cakap pada literasi dan numerasi karena persentasenya di bawah 75%. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum hanya dapat ditampilkan selama 4 tahun terakhir. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi literasi dan numerasi tahun 2021-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 56
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021-2024

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Literasi
2021	33,62%
2022	39,05%
2023	54,32%
2024	57,73%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

Kemampuan literasi tingkat SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2024 dijelaskan pada Tabel berikut:

Tabel 2. 57
Rata Rata Kemampuan Literasi SD dan SMP
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2024

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan			
		2021	2022	2023	2024
1	Rata Rata Kemampuan Literasi SD	53,01%	54,43 %	59,94%	63,13%
2	Rata Rata Literasi SMP Kemampuan	63,09%	64,26%	70,12%	70,04%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2025

Rata rata literasi SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, literasi SD sebesar 63,13%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SD belum mencapai kompetensi minimum. Rata rata literasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 70,04%, artinya tingkat Literasi pada jenjang pendidikan SMP belum mencapai kompetensi minimum.

2.2.3.2 Persentase satuan pendidikan yang mencapai SKM pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi Membaca

Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada kompetensi numerasi tahun 2021-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 58
Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2024

Asesmen Tahun	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional pada Numerasi
2021	2,14%
2022	10,95%
2023	33,69%
2024	52,23%

Sumber: Lampiran Surat Mendikdasmen nomor 1422/MDM.A/PR.07.05/2025

Tabel 2. 59
Rata Rata Kemampuan Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Berdasarkan Asesmen Nasional Tahun 2021-2024

No	Uraian	Capaian di Rapor Pendidikan			
		2021	2022	2023	2024
1	Rata Rata Kemampuan Numerasi SD	35,78%	39,62%	45,48%	55,56%
2	Rata Rata Kemampuan Numerasi SMP	53,92%	53,82%	61,49%	61,88%

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2025

Rata rata numerasi SD maupun SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, numerasi SD sebesar 55,56% artinya tingkat Numerasi pada jenjang pendidikan SD belum mencapai kompetensi minimum. Rata rata numerasi SMP di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 61,88%, artinya tingkat numerasi pada jenjang pendidikan SMP belum mencapai kompetensi minimum.

2.2.3.3 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 8,13 tahun, yang artinya secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas hanya menjalani pendidikan selama 8,13 tahun atau dengan kata lain belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun.

Selama 5 tahun terakhir, RLS Kabupaten Lima Puluh Kota tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Hal ini dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, kemampuan fiskal daerah yang masih rendah, sulitnya akses ke lokasi sekolah, rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan serta tingkat ketersediaan ruang kelas. Angka rata-rata lama sekolah tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

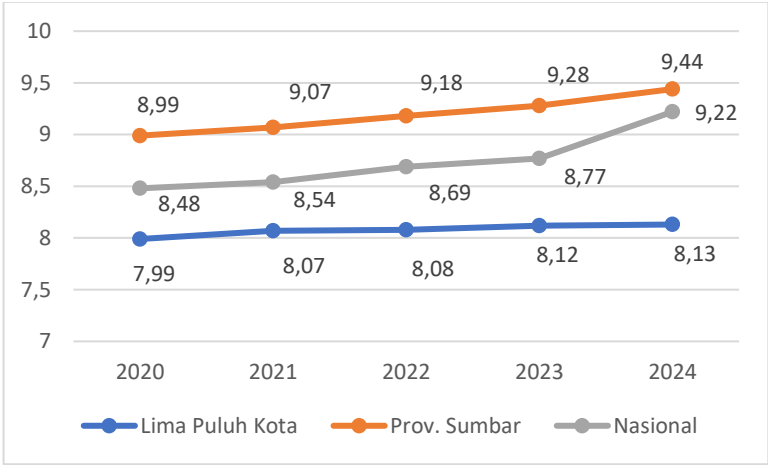
Tabel 2. 60
Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08	8,12	8,13

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 mengalami tren yang positif, tidak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi, kenaikan yang dialami tidak begitu signifikan, rata-rata kenaikannya hanya 0,035 setiap tahunnya. Adapun perbandingan angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 29
Perbandingan Nilai Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-
2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

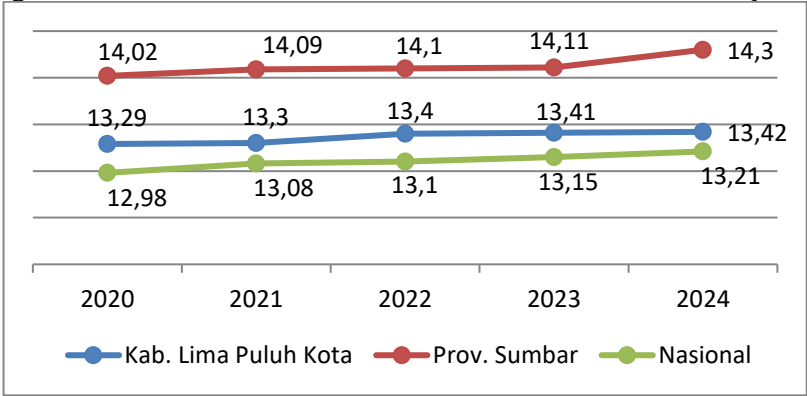
Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka RLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka RLS dimana setidaknya mencapai 9 (sembilan) tahun.

2.2.3.4 Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan Lama Sekolah diasumsikan bahwa peluang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat itu dan dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Pada tahun 2024 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,42 tahun yang artinya penduduk yang berumur 7 tahun ke atas diharapkan merasakan sekolah selama 13 tahun atau hanya sampai pada strata diploma 2.

Hal ini mengakibatkan rendahnya daya saing SDM Kabupaten Lima Puluh Kota bila dibandingkan dengan daerah yang lain. Jika dilihat dari target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota, target Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2023 adalah 13,35 tahun, sedangkan realisasi capaian nya adalah 13,42 sehingga sudah tercapai. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2020-2024 cenderung mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2020 memiliki angka sebesar 13,29 dan di tahun 2024 sebesar 13,42. Artinya, dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun perbandingan nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 30
Perbandingan Nilai HLS Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat & Nasional Tahun 2020 - 2024 (Tahun)



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa angka HLS Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu berada di bawah angka Provinsi Sumatera Barat, namun selalu berada di atas angka nasional. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang meningkatkan angka HLS dimana setidaknya angka harapan lama sekolah mencapai 14 (empat belas) tahun.

2.2.3.5 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi berperan penting dalam mendorong pertumbuhan, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Penduduk dengan lulusan pendidikan tinggi merupakan penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi, yaitu Diploma I-IV, S1, S2 dan S3. Penduduk lulusan pendidikan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki trend yang positif, dimana pada tahun 2020-2024 terus mengalami kenaikan. Bahkan di tahun 2023, penduduk lulusan pendidikan tinggi naik sebanyak 1.359 orang, yaitu dari 26.845 orang menjadi 28.204 orang.

Namun, jumlah penduduk berpendidikan tinggi yang banyak ini bisa menjadi tantangan jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor yang sesuai dengan minat para pencari kerja yang berpendidikan tinggi. Jika data penduduk lulusan pendidikan tinggi disandingkan dengan data jumlah penduduk yang berusia 15 Tahun ke atas, maka akan diperoleh data proporsi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan tinggi. Jumlah dan proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang menyelesaikan pendidikan tinggi tahun 2020-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 61
Jumlah dan Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Menyelesaikan Pendidikan Tinggi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Jumlah Penduduk yang lulus/berijazah Pendidikan Tinggi	Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
2020	22.223	291.253	7,63
2021	23.414	294.339	7,95
2022	25.456	297.879	8,55
2023	26.845	304.534	8,82
2024	28.204	309.020	9,13

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data Diolah

2.2.3.6 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah (SMA sederajat) atau pendidikan tinggi (Diploma I-IV, S1, S2, S3). Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Sedangkan bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas),

Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka 69,02% di tahun 2023 pada indikator ini. Hal ini menggambarkan bahwa pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota tergolong rendah. Sehingga target di tahun 2045 setidaknya mendapatkan angka 75% pada indikator ini.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

Perlindungan sosial kepada masyarakat merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan yang dilihat dari jaminan sosial ketenagakerjaan serta perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas

2.2.4.1 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan perbandingan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan terhadap jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun. Meningkatnya cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan diiringi dengan meningkatnya jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima puluh Kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 62
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2023 (%)

Tahun	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (usia 15-65 Tahun)	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
2020	4.957	200.122	2,48%
2021	5.343	200.853	2,66%
2022	5.964	208.815	2,86%
2023	6.928	212.991	3,25%
2024	21,416	221,277	9,68%

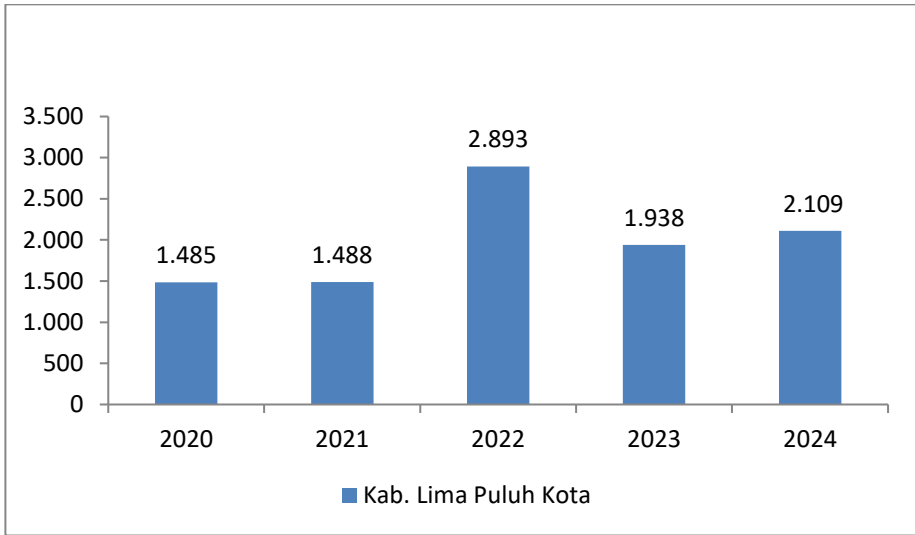
Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kabupaten Lima Puluh Kota lima tahun terakhir selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dimana hal tersebut juga diiringi dengan peningkatan jumlah peserta BPJS Ketenagakerjaan dan jumlah semesta penduduk bekerja usia 15-65 tahun setiap tahunnya. Pada tahun 2024, persentase cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 9,68% dari total peserta BPJS ketenagakerjaan sebanyak 21,416 orang dan semesta penduduk bekerja sebanyak 221,227 orang.

2.2.4.2 Persentase Disabilitas di Sektor Formal

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan /atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Jumlah penyandang disabilitas Kabupaten Lima Puluh kota dalam lima tahun terakhir ditampilkan pada grafik berikut:

Grafik 2. 31
Jumlah Penyandang Disabilitas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dalam lima tahun terakhir, jumlah penyandang disabilitas tertinggi di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2022 yaitu 2.893 jiwa dan terendah pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.485 jiwa. Tahun 2023, jumlah penyandang disabilitas turun menjadi 1.938 jiwa, dimana jumlah ini merupakan jumlah seluruh penyandang disabilitas di luar anak dengan kedisabilitasan, sehingga bila diasumsikan bahwa jumlah di atas merupakan penyandang disabilitas usia kerja artinya ada sebesar 0,6% penduduk usia kerja dengan status disabilitas.

Secara spesifik kabupaten lima puluh kota belum menghitung berapa penyandang disabilitas yang bekerja baik disektor formal maupun informal. Namun berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2023 terdapat 3 orang pekerja disabilitas di sektor formal dan 1 orang pekerja disabilitas di sektor informal.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

2.2.5.1 Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Salah satu indikator *proxy* dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan adalah Perbandingan antara cagar budaya yang dilestarikan dengan cagar budaya yang ada. Pada tahun 2023 jumlah cagar budaya yang ada sebanyak 79, dimana cagar budaya inilah yang akan dilestarikan setelah adanya regulasi terkait cagar budaya tersebut. Cagar Budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada, namun pendataan terhadap benda cagar budaya dan situs yang ada, sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun Kabupaten Lima Puluh Kota belum memiliki Cagar Budaya yang ditetapkan secara resmi, langkah awal pelestarian telah dilakukan melalui kegiatan pendataan dan identifikasi terhadap objek-objek yang berpotensi ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Proses pelestarian ini mencakup inventarisasi, kajian teknis, dan pengusulan penetapan melalui Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Upaya ini menunjukkan komitmen daerah dalam menyelaraskan pembangunan kebudayaan dengan kebijakan nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan

adanya regulasi dan perencanaan yang jelas, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat segera menetapkan Cagar Budaya yang sah dan terdaftar dalam Register Nasional Cagar Budaya, sehingga indikator Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan dapat diukur secara lebih akurat dan mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Kebudayaan.

2.2.5.2 Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Dilestarikan

Selain persentase cagar budaya yang dilestarikan, *proxy* indikator Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan. Menurut Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013, Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, terdapat 5 warisan budaya tak benda di Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia (WBTbI) sebagai berikut.

Tabel 2. 63
Warisan Budaya Takbenda (Wbthb) Kabupaten Lima Puluh Kota
yang telah Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia (WBTbI)

No.	Warisan Budaya Takbenda	Tahun Penetapan	Domain
1.	Tenun Kubang	2021	Keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional
2.	Bakajang	2022	Adat istiadat, masyarakat, ritual, dan perayaan-perayaan
3.	Sijobang	2022	Seni Pertunjukan
4.	Anyaman Mansiang	2023	Kemahiran dan Kerajinan Tradisional
5.	Sampelong	2023	Seni Pertunjukan

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Keberhasilan penetapan lima unsur Warisan Budaya Takbenda dari Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai WBTb Indonesia menunjukkan adanya komitmen pelestarian budaya oleh pemerintah daerah. Kelima warisan budaya tersebut mencakup berbagai domain seperti seni pertunjukan, kemahiran kerajinan tradisional, serta adat istiadat masyarakat. Penetapan ini merupakan bagian dari proses pelestarian yang mencakup inventarisasi, dokumentasi, pengakuan formal, dan pewarisan melalui berbagai bentuk kegiatan budaya di masyarakat. Dengan telah ditetapkannya kelima WBTb tersebut, maka persentase warisan budaya tak benda yang dilestarikan untuk tahun 2025 dapat dihitung berdasarkan jumlah objek budaya tak benda yang telah ditetapkan dibandingkan total potensi WBTb yang teridentifikasi di daerah. Pelestarian WBTb tidak hanya berfungsi sebagai upaya perlindungan budaya lokal, namun juga menjadi indikator penting dalam peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan, khususnya pada dimensi ekspresi budaya.

2.2.5.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Indeks ABS-SBK merupakan instrumen untuk mengukur sejauh mana penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara’ Syara’ Basandi Kitabullah. Indeks ABS-SBK terdiri dari Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan, Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan, Indeks Keuangan Sosial, Indeks Sumber Daya Manusia Adat dan Budaya, serta Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya. Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan terdiri dari Kriteria Indeks pendidikan Al-Qur’an, Indeks peran satuan pendidikan (formal/nonformal), indeks pembinaan keagamaan masyarakat, indeks Pendidikan TPQ/MDA/TPA didikan subuh dan Pembinaan remaja masjid, serta indeks perguruan tinggi keagamaan.

Indeks Sumber Daya Manusia Keagamaan ini dihitung dari Peningkatan jumlah penghafal Al-Qur’an, adanya MTQ Nagari, adanya PKBM di Nagari, Peningkatan aktivitas kegiatan remaja masjid, adanya kegiatan didikan subuh, adanya peringatan hari besar islam, Jumlah guru tetap TPQ/MDA/TPA, jumlah TPQ/MDA/TPA yang punya kurikulum standar kemenag, jumlah guru TPQ/MDA/TPA terlatih, adanya perguruan tinggi keagamaan, peningkatan jumlah kurban,

jumlah calon jemaah haji, adanya wirid pengajian, adanya majelis taklim dan adanya kelompok pengajian.

Indeks Infrastruktur dan Kelembagaan Keagamaan terdiri dari kriteria Indeks Kelembagaan Masjid/Surau/TPQ, Indeks digitalisasi manajemen masjid dan indeks sarana dan prasarana keagamaan. Indeks ini dihitung dari persentase masjid/surau yang memiliki kepengurusan lengkap, jumlah masjid nagari yang memiliki data secara digital, adanya lembaga pendidikan agama, diantaranya rumah tahfidz, jumlah masjid dengan akses air bersih, jumlah masjid dengan sanitasi baik, jumlah akses jalan menuju masjid dengan kondisi baik dan jumlah pustaka masjid dan adanya pustaka masjid. Indeks Keuangan sosial terdiri dari kriteria Indeks penghimpunan dana sosial keagamaan dalam pemberdayaan sosial ekonomi dan sosial keagamaan dan indeks perlindungan sosial ekonomi terhadap wanita, anak-anak dan keluarga miskin. Indeks Keuangan sosial dihitung dari jumlah ZIS, Jumlah pemberdayaan sosial ekonomi di masjid nagari melalui UPZ, Koperasi Syariah, BMT, jumlah perceraian di nagari, jumlah KDRT dan kekerasan pada anak, jumlah anak putus sekolah, jumlah santunan untuk fakir miskin dan anak yatim di masjid nagari serta jumlah keluarga miskin di nagari.

Indeks Sumber Daya Manusia Adat Dan Budaya terdiri dari kriteria indeks forum perantau dalam partisipasi kegiatan keagamaan, sosial budaya, pelestarian adat dan pendidikan nagari, Indeks semangat musyawarah masyarakat nagari, indeks peran dan kapasitas ninik mamak dan imam khatib dalam pembinaan adat, seni budaya dan olahraga yang sesuai dengan ABS-SBK, Indeks partisipasi dan gotong royong masyarakat dalam nagari untuk mencapai lingkungan yang bersih, indeks pembinaan adat dan budaya di masyarakat, indeks penyakit masyarakat di Nagari dan indeks pelanggaran terhadap peraturan nagari. Indeks ini dihitung dari jumlah forum perantau yang dilaksanakan, jumlah perantau yang berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan, sosbud, pelestarian adat dan pendidikan nagari, jumlah pelaksanaan musyawarah masyarakat nagari, persentase kelengkapan niniak mamak semua suku, jumlah program peningkatan kapasitas ninik mamak, jumlah peningkatan kapasitas imam khatib, jumlah pembinaan atas seni budaya yang sesuai ABS-SBK, jumlah gotong royong masyarakat dalam nagari yang dilaksanakan untuk mencapai lingkungan yang bersih, adanya pembinaan terhadap adat dan budaya di masyarakat, jumlah kasus narkoba nagari, minuman keras nagari, kasus asusila, judi dan kriminalitas nagari dan jumlah pelanggaran terhadap peraturan nagari.

Indeks Kelembagaan Adat dan Budaya terdiri dari kriteria indeks peran dan fungsi kerapatan adat nagari dan bundo kanduang, indeks peran dan fungsi organisasi masyarakat keagamaan nagari, indeks fungsi organisasi pemuda dan indeks penguatan regulasi. Indeks kelembagaan adat dan budaya ini dihitung dari indikator jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi KAN dan bundo Kandang, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran dan fungsi ormas keagamaan nagari, jumlah program dan pelatihan peningkatan peran fungsi organisasi pemuda dan adanya perda/pernag. Berikut ditampilkan capaian indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024.

Tabel 2. 64
Indeks ABS-SBK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024

Tahun	Indeks ABS-ABK
2021	NA
2022	1,76
2023	1,84
2024	1,95

Sumber: Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Perhitungan Indeks ABS-SBK baru dimulai pada Tahun 2022. Nilai Indeks ABS-SBK terdiri dari 3 kategori yaitu rendah (0,00-1,00), sedang (>1,00-2,00) dan tinggi (>2,00-3,00). Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2024 Nilai Indeks ABS-SBK sudah mencapai nilai 1,95 artinya Indeks Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada kategori sedang.

2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan gender dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Indeks Pembangunan Keluarga

Keluarga tidak dapat berdiri sendiri karena sangat tergantung dengan lingkungan dan juga mempengaruhi lingkungan di sekitarnya (lingkungan mikro, meso, makro). Fungsi utama keluarga antara lain sebagai perantara masyarakat luas. Di dalam keluargalah seorang anak memperoleh pertama kali hubungan antar pribadi. Peran tingkah laku yang dipelajari anak di dalam keluarga merupakan contoh peran tingkah laku yang diperlukan dalam masyarakat. Dengan demikian keluarga berfungsi sebagai saluran penerus kebudayaan suatu masyarakat. Tujuan Pembangunan Keluarga diarahkan pada pencapaian keluarga berkualitas, berketahanan dan sejahtera lahir batin sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Indikator pembangunan keluarga terdiri atas 3 dimensi yaitu kemandirian, ketentraman dan kebahagiaan keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga serta menggambarkan peran dan fungsi keluarga. iBangga memiliki 11 indikator yang terdiri atas:

- a. Dimensi Ketentraman
 - Kegiatan Ibadah
 - Legalitas Keluarga
 - Jaminan Kesehatan
 - Keharmonisan Keluarga
- b. Dimensi Kemandirian
 - Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - Jaminan Keuangan
 - Keberlangsungan Pendidikan
 - Kesehatan Keluarga
 - Akses Media Online
- c. Dimensi Kebahagiaan
 - Interaksi Keluarga
 - Interaksi Sosial

iBangga merupakan data strategis sebagai ukuran kinerja pemerintah dan dapat menentukan peringkat atau level pembangunan keluarga suatu wilayah. Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kategori sebagai berikut:

- a. Nilai <40, Status Pembangunan Keluarga Rentan
- b. Nilai 40-70, Status Pembangunan Keluarga Berkembang
- c. Nilai >70, Status Pembangunan Keluarga Tangguh

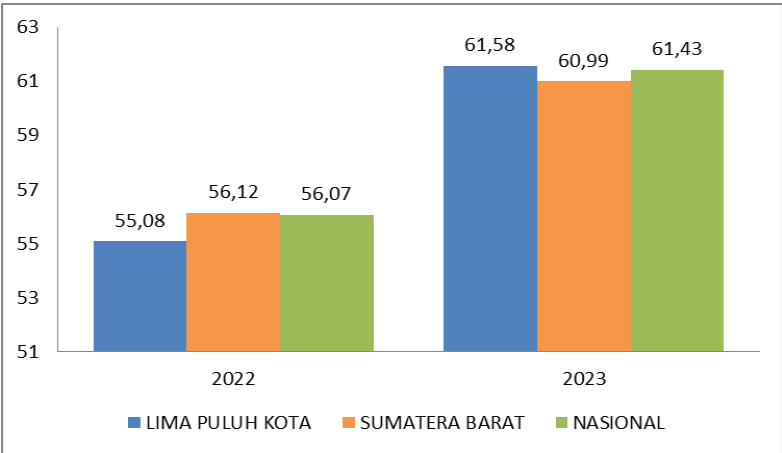
Tabel 2. 65
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

Wilayah	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Tahun)		
	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	55,08	61,58	59,50

Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2024

iBangga merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Karena keterbatasan ketersediaan data dan indikator ini bersifat imperatif, data Indeks Pembangunan Keluarga hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu turun dari 61,58 (2023) menjadi 59,50 (2024), artinya secara umum keluarga di Indonesia berada pada kategori keluarga berkembang. Perbandingan iBangga Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 32
Perbandingan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2022- 2023



Sumber: PK22; PK23 BKKBN Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat bahwa Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan iBangga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Jika dibandingkan dengan target Nasional tahun 2023 sebesar 59,00, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 104,37% dengan kategori sangat baik.

2.2.6.2 Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan. Ketimpangan gender di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir secara konsisten menurun. Sejak tahun 2019 hingga 2023, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) berkurang sebesar 0,102 poin, rata-rata turun 0,02 poin per tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender semakin menyempit atau kesetaraan yang semakin membaik.

Tabel 2. 66
Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh KotaTahun 2020-2024

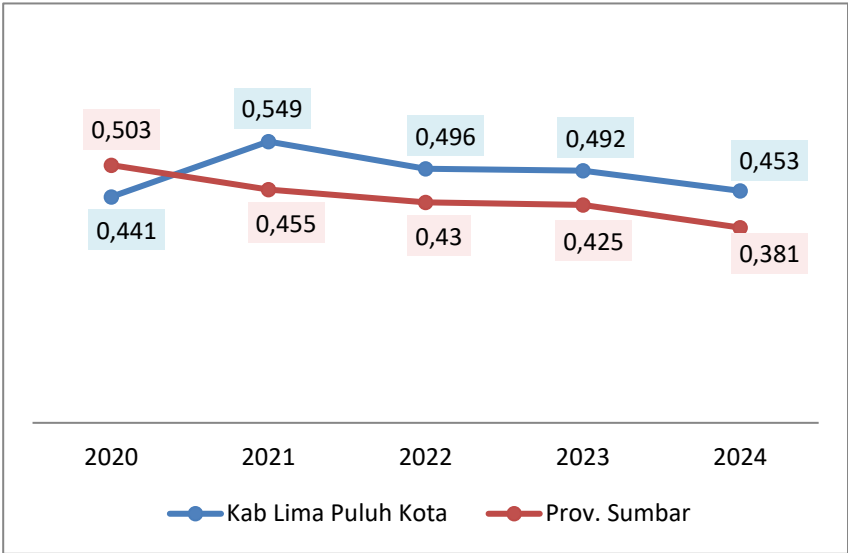
Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 ketimpangan gender Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin 0,441, lebih rendah dari poin IKG Provinsi Sumatera Barat, hal ini disebabkan oleh adanya penurunan perkembangan dimensi pemberdayaan. Pada Tahun 2021, IKG Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada poin tertinggi yaitu 0,549 jauh diatas poin IKG Provinsi Sumatera Barat yang hanya 0,455. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan gender di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin membesar atau dengan kata lain kondisi kesetaraan yang semakin kurang baik. Namun pada tahun 2022 IKG Kabupaten Lima Puluh Kota mulai mengalami penurunan hingga tahun 2024 berada pada poin 0,453.

Perkembangan IKG Kabupaten Lima Puluh Kota cenderung berada diatas IKG Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukan bahwa belum optimalnya kinerja Pemerintah Daerah dalam pengarusutamaan gender dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat seperti yang terlihat pada grafik dibawah:

Grafik 2. 33
Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2.2.6.3 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat IPKA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan risiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas. Indikator yang termasuk dalam IPKA adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi. Hasil IPKA menjadi indikator yang sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan terhadap perlindungan khusus anak dan sebagai indikator yang dapat menilai keberhasilan pembangunan.

Analisis IPKA didasarkan pada capaian Klaster perlindungan khusus anak atas lima indikator utama penyusun IPKA. Kelima indikator tersebut adalah: (1) Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja; (2) Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet; (3) Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas); (4) Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan; dan (5) Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlantar.

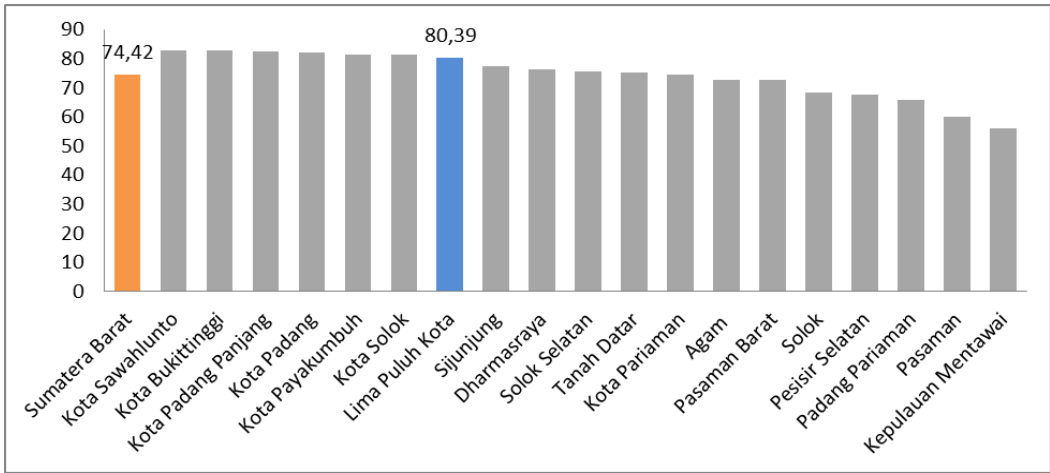
Tabel 2. 67
Hasil Capaian IPA, IPHA dan IPKA Tahun 2022

Kab	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan	Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya	Klaster V Perlindungan an Khusus	IPA	IPHA	IPKA
Lima Puluh Kota	53,68	79,28	72,32	34,74	80,39	65,13	60,78	80,39

Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, tahun 2022 capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai 80,39%. Jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di Sumatera Barat, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada ranking ke-7 tertinggi dalam pencapaian IPKA dan capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 lebih tinggi dari capaian Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan grafik di bawah ini:

Grafik 2. 34
Perbandingan Capaian IPKA Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Tahun 2022



Sumber: Kemen PPPA Indeks Perlindungan Anak Tahun 2022

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

2.3.1 Daya Saing Sumber Daya

2.3.1.1 Angka Ketergantungan

Komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun, dan 65 tahun ke atas atau kelompok usia produktif dan non produktif. BPS merepresentasikan angka ketergantungan (rasio ketergantungan) dengan memunculkan Angka Beban Tanggungan (ABT). Angka Beban Tanggungan (ABT) merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara penduduk usia tidak produktif (di bawah 15 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan usia produktif (antara 15 sampai 64 tahun) dikalikan 100. Semakin besar ABT, maka semakin besar pula beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perkembangan Angka Beban Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. 68
Rasio Ketergantungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No.	Kelompok Umur	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penduduk Usia 0-14 Tahun	92.272	91.295	90.496	91.893	92.090
2.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 Tahun	259.325	260.893	262.824	268.894	272.120
3.	Jumlah Penduduk Usia 65+ Tahun	31.928	33.446	35.055	35.640	36.900
4.	% ABT	47,89	47,81	47,77	47,43	47,40

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa Angka Beban Tanggungan (ABT) di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020, ABT tercatat sebesar 47,89, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 48 penduduk usia non-produktif. Angka ini terus mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 47,40 pada tahun 2024. Penurunan ABT ini mengindikasikan adanya perbaikan struktur demografi, di mana proporsi penduduk usia produktif meningkat dibandingkan penduduk usia non-produktif.

Nilai 47,40% pada tahun 2024 menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban sekitar 47 orang usia non-produktif, baik anak-anak maupun lansia. Angka ini mencerminkan bahwa struktur penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota masih cukup ideal, karena beban ketergantungan berada di bawah 50%. Dengan demikian, daerah ini memiliki peluang demografis yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, peluang ini hanya dapat dimanfaatkan secara optimal apabila penduduk usia

produktif diberikan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan lapangan kerja yang memadai.

2.3.1.2 Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan

Peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pergeseran pola pengeluaran masyarakat dari lebih banyak pengeluaran untuk makanan ke arah pengeluaran untuk bukan makanan. Hal ini disebabkan karena pengeluaran untuk makanan relatif stabil setiap bulannya, sehingga peningkatan pendapatan cenderung untuk meningkatkan pengeluaran untuk bukan makanan atau ditabung. Sehingga pola pengeluaran dapat dilihat sebagai salah satu indikator yang mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dan perubahan komposisinya sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Namun demikian, peningkatan pola pengeluaran untuk bukan makanan tidak selalu dapat menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk, karena hal tersebut hanya dilihat secara nilai nominalnya saja, tanpa melihat adanya kenaikan harga (inflasi). Di Kabupaten Lima Puluh Kota, pola pengeluaran untuk makanan lebih besar dari bukan makanan, artinya uang yang dicari/didapat/diperoleh oleh penduduk sebagian besar masih dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari yaitu membeli kebutuhan pokok makanan.

Tabel 2. 69
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita per Bulan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Golongan Pengeluaran Tahun 2020-2024

Golongan Pengeluaran	Pengeluaran (Rp)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Makanan	615.574	660.544	762.244	760.234	823.601
Bukan Makanan	433.468	508.419	463.533	557.469	563.613
Total	1.049.042	1.168.963	1.225.777	1.317.702	1.387.214

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat pengeluaran rata-rata untuk makanan pada tahun 2024 sebesar Rp823.601. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp760.234. Sedangkan pengeluaran bukan makanan pada tahun 2024 sebesar Rp563.613, hal ini mengalami kenaikan dari tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp557.469. Secara total, rata-rata pengeluaran makanan rata-rata pengeluaran makanan dan bukan makanan per kapita per bulan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengalami kenaikan.

2.3.1.3 Produktivitas Total Daerah (Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja)

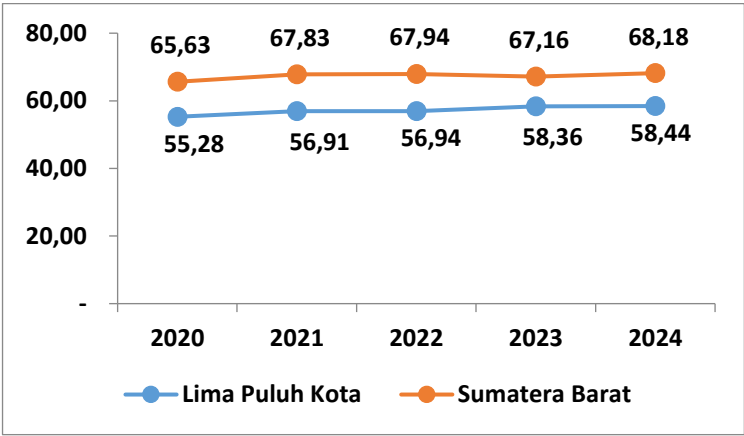
Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rentang 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.70
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun	Jumlah Orang yang Bekerja	Produktivitas Tenaga Kerja
2020	200.122	Rp55.277.864
2021	200.853	Rp56.911.315
2022	208.815	Rp56.940.984
2023	212.991	Rp58.363.161
2024	221.277	Rp58.442.586

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data Diolah

Grafik 2. 35
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat



Sumber: BPS Tahun 2025, Data Diolah

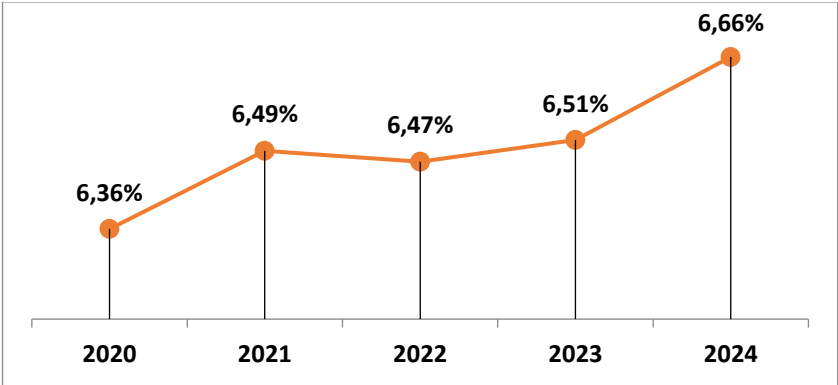
Dari grafik di atas, terlihat tingkat produktivitas tenaga kerja Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan tetapi masih lebih rendah dari angka Provinsi Sumatera Barat.

2.3.2 IPTEK, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

2.3.2.1 Rasio PDRB Industri Pengolahan

Sektor industri merupakan salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota, terlebih sejak ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2042. Industri pengolahan merupakan salah satu penunjang perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Meskipun bukan merupakan pembentuk terbesar PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, akan tetapi sektor industri pengolahan memiliki kontribusi yang cukup besar dibanding beberapa sektor lain. Perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 36
Perkembangan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



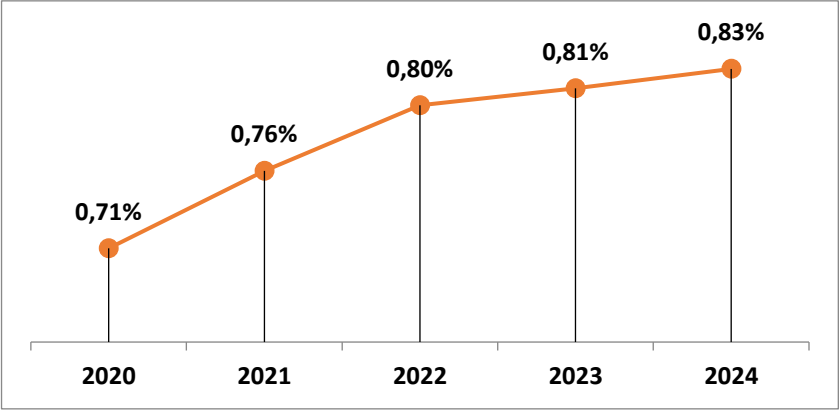
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor industri pengolahan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Selama 5 tahun terakhir, kontribusi terbesar sektor industri pengolahan mencapai puncak pada tahun 2024 dengan kontribusi sebesar 6,66% dari total PDRB ADHB atau sekitar Rp1.387.670.000.000 dari total PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar Rp20.850.620.000.000. Kontribusi sektor industri pengolahan yang sempat menurun pada tahun-tahun tertentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah penurunan aktivitas produksi, terjadinya pelemahan nilai rupiah yang menyebabkan naiknya biaya produksi, termasuk pergeseran atau adanya sektor pertumbuhan yang menggeser kontribusi sektor industri.

2.3.2.2 Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum

Kategori ini mencakup penyediaan akomodasi penginapan jangka pendek untuk pengunjung dan pelancong lainnya serta penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera. Jumlah dan jenis layanan tambahan yang disediakan dalam kategori ini sangat bervariasi. Tidak termasuk penyediaan akomodasi jangka panjang seperti tempat tinggal utama, penyiapan makanan atau minuman bukan untuk dikonsumsi segera atau yang dijual melalui kegiatan perdagangan besar dan eceran. Perkembangan kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum selama satu dekade dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 37
Perkembangan Kontribusi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa kontribusi sektor industri penyediaan akomodasi dan makan minum memiliki tren positif pada kurun tahun 2020-2024 akan tetapi mengalami penurunan pada tahun sebelumnya, yaitu dari tahun 2019 ke tahun 2020. Hal ini merupakan imbas pandemi Covid. Pembatasan interaksi fisik sejak pandemi mengakibatkan pembatasan jumlah kunjungan hotel dan restoran. Meskipun demikian, kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat kembali pada tahun 2021-2023. Peningkatan ini disebabkan beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pelaku usaha yang berfokus untuk bisa bertahan menghadapi pandemi, diantaranya adalah penyediaan layanan *take away* yang dilakukan beberapa restoran. Pada tahun 2024 kontribusi akomodasi makan minum terhadap PDRB mencapai 0,83%.

2.3.2.3 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan Orang)

Jumlah tamu wisatawan mancanegara di daerah (Kabupaten) tertentu maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Wisatawan yang datang berkunjung biasanya menginap di homestay yang ada di sekitar objek wisata. Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang datang berkunjung ke Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 adalah sebanyak 42 wisatawan mancanegara dan pada tahun 2024 sebanyak 444 wisatawan mancanegara. Berdasarkan data kunjungan wisatawan mancanegara ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat siklus penurunan wisatawan mancanegara, salah satu faktor berkurangnya kunjungan wisatawan mancanegara adalah pandemi covid 19 yang mana sampai saat ini masih dirasakan dampaknya secara langsung. Faktor lainnya adalah kurangnya atau belum adanya fasilitas pendukung bagi wisatawan mancanegara tersebut dalam hal ini dimaksudkan fasilitas akomodasi yang representatif bagi tamu asing tersebut sebagai salah satu syarat dasar yang harus dipenuhi guna menarik wisatawan mancanegara tersebut dapat berkunjung ke daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Terdapat banyak objek wisata yang dapat dieksplorasi dan dipromosikan Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih kurang dalam pemenuhan fasilitas akomodasi yang nampak sudah mulai tumbuh dan diakomodir di beberapa kawasan wisata unggulan di daerah lain. Untuk mengatasi masalah ini diharapkan dalam beberapa tahun mendatang pemerintah daerah melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi perizinan dan permodalan yang mempermudah pembangunan fasilitas akomodasi tamu asing, meningkatkan pengawasan dan

penegakan hukum, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial. Data kunjungan wisata Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 71
Data Kunjungan Wisata Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Destinasi Wisata	2020		2021		2022		2023		2024	
	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus
Lembah Harau	602	379.325	-	237.241	105	270.737	42	281.336	388	208.727
Kapalo Banda	10	130.894	-	279.981	-	233.196	-	266.748	56	200.440
Batang Tabik	25	135.634	-	252.032	-	218.335	-	50.244	-	51.378
Rumah Gadang S.Beringin	42	8.443	-	9.447	-	27.311	-	31.868	-	40.133
Home Stay Echo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	679	654.296	-	778.701	105	749.579	42	630.196	444	500.678

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025,

2.3.2.4 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor termasuk: (1) Fesyen; (2) Kuliner; (3) Kriya; (4) Film, Animasi dan Video; (5) Pengembang Permainan; (6) Aplikasi; (7) Musik; (8) Seni Pertunjukan; (9) Fotografi; (10) Desain Komunikasi Visual; (11) Televisi dan Radio; (12) Seni Rupa; (13) Desain Produk; (14) Periklanan; (15) Penerbitan; (16) Arsitektur; dan (17) Desain Interior. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDB nasional.

Indonesia merupakan pangsa yang sangat besar untuk konten-konten industri kreatif digital, di mana menurut data We Are Social jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 202,6 juta jiwa atau 73,7% dari populasi dan 98,5% dari jumlah tersebut menonton video online. Saat ini terdapat sekitar lebih dari 8,2 juta jumlah usaha kreatif di Indonesia yang didominasi oleh usaha kuliner, fashion, dan kriya. Selain itu, terdapat 4 subsektor ekonomi kreatif dengan pertumbuhan tercepat yaitu film, animasi, dan video, seni pertunjukan, dan desain komunikasi visual. Pertumbuhan yang pesat di sektor ini didukung oleh semakin tingginya adopsi teknologi digital di masyarakat. Berdasarkan publikasi Kemenparekraf, tercatat pada tahun 2019 subsektor ekonomi kreatif menyumbangkan Rp1.153,4 Triliun PDB atau 7,3% terhadap total PDB Nasional, 15,2% tenaga kerja, dan 11,9% ekspor.

2.3.2.5 Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama. Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Perkembangan jumlah UKM Non Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 72
Jumlah UKM Non Pertanian Di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2023

Tahun	Jumlah			
	2021	2022	2023	2024
UKM Non Pertanian	8.121	8.165	8.292	8.527
Jumlah UKM	8.271	8.315	8.444	8.650
Proporsi	98,186%	98,196%	98,200%	98,578%

Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Hal ini berbanding lurus dengan bertambahnya jumlah UKM non pertanian setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan total UKM, proporsi UKM Non Pertanian terhadap seluruh UKM tetap sangat dominan, yakni sekitar 98% setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar aktivitas ekonomi kecil di Lima Puluh Kota berfokus di luar sektor pertanian, seperti kuliner, kerajinan, perdagangan ritel, dan jasa transportasi lokal.

Pertumbuhan jumlah UKM non pertanian ini mencerminkan peningkatan dinamika sektor informal dan semi-formal yang bersifat urban, serta menunjukkan kecenderungan masyarakat untuk mengembangkan usaha di sektor-sektor yang lebih responsif terhadap permintaan pasar lokal maupun pariwisata. Stabilitasnya proporsi di atas 98% juga dapat mengindikasikan terjadinya stagnasi di sektor UKM berbasis pertanian, atau justru menunjukkan pergeseran struktur ekonomi lokal menuju sektor non-pertanian yang lebih cepat bertumbuh. Di sisi lain, dominasi UKM non pertanian menandakan potensi besar untuk mendorong transformasi ekonomi daerah menuju diversifikasi sektor, namun juga perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, dan pendampingan usaha agar tidak terjebak dalam jebakan usaha kecil yang stagnan. Dengan kata lain, angka yang tinggi perlu diiringi dengan kualitas dan keberlanjutan usaha yang lebih baik.

2.3.2.6 Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Industri kecil dan menengah (IKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel (2.53) berikut ini.

Tabel 2. 73
Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2023

	Tahun		
	2021	2022	2023
Jumlah Unit IKM	446	882	1.939

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

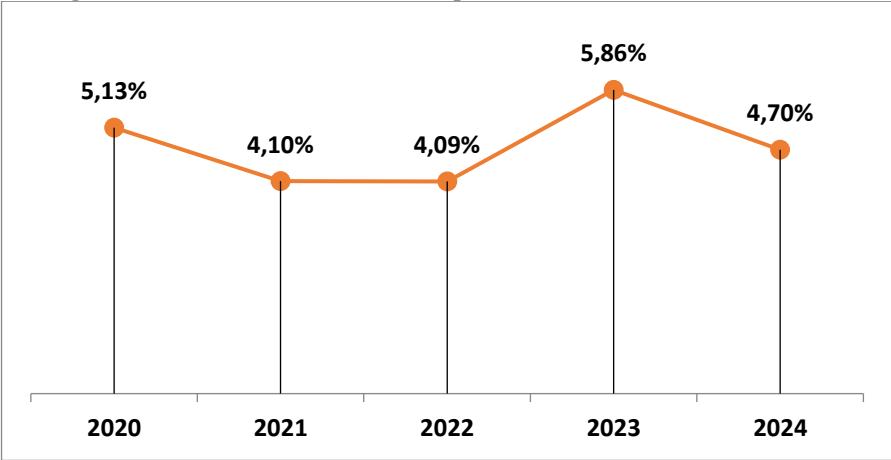
Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data jumlah industri kecil dan menengah hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Pada tabel di atas terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah Industri Kecil dan Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021 sebanyak 446 IKM sedangkan pada tahun 2023 bertambah menjadi 1.939 IKM. Berdasarkan data diatas, setiap tahunnya terjadi peningkatan unit IKM, namun pada tahun 2023 jumlah IKM bertambah secara signifikan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong industrialisasi skala kecil dan menengah melalui berbagai program strategis. Perkembangan IKM ini menunjukkan adanya transformasi ekonomi dari sektor informal ke sektor industri produktif yang berorientasi pada nilai tambah. Kabupaten Lima Puluh Kota secara bertahap telah mengoptimalkan potensi unggulan. Ke depan, tantangan utama adalah memastikan keberlanjutan dan daya saing IKM melalui inovasi produk, peningkatan kualitas, sertifikasi, dan perluasan akses pasar baik domestik maupun ekspor.

2.3.2.7 Rasio Kewirausahaan

Kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (usia 15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Rasio Kewirausahaan digunakan untuk mengukur tingkat aktivitas kewirausahaan di suatu wilayah. Perkembangan

rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 38
Perkembangan Rasio Kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



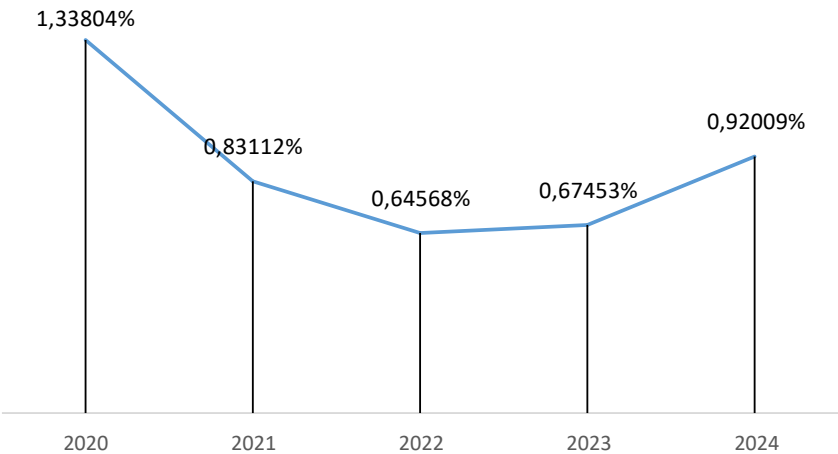
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas dapat diketahui bahwa rasio kewirausahaan Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 5,86%. Hal ini berarti pengusaha yang dibantu buruh tetap pada tahun 2023 meningkat seiring dengan perkembangan jumlah angkatan kerja. Peningkatan rasio kewirausahaan mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Akan tetapi pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 4,70%.

2.3.2.8 Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2. 39
Perkembangan Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Selama periode 2020 hingga 2024, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi serta proses pemulihan ekonomi koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2020, rasio mencapai titik tertinggi sebesar 1,33804%, mencerminkan masih kuatnya peran koperasi dalam ekonomi lokal. Namun, dampak pandemi yang semakin meluas di tahun-tahun berikutnya menyebabkan penurunan tajam, hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,64568%. Penurunan ini disebabkan oleh terganggunya aktivitas ekonomi koperasi, lemahnya adaptasi terhadap digitalisasi, terbatasnya akses pembiayaan, serta meningkatnya persaingan dari sektor usaha lain yang lebih adaptif.

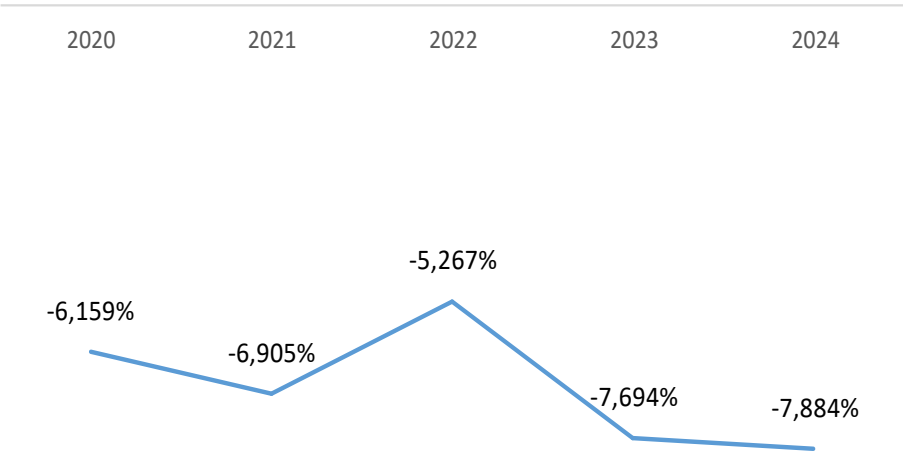
Memasuki tahun 2023 dan 2024, rasio menunjukkan tren pemulihan, masing-masing naik menjadi 0,67453% dan 0,92009%. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas koperasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, serta adopsi teknologi digital. Selain itu, peningkatan partisipasi anggota, dukungan pembiayaan, serta kolaborasi koperasi dengan UMKM dan sektor pertanian turut mendorong pertumbuhan volume usaha koperasi yang lebih berkelanjutan. Meskipun belum kembali ke posisi awal 2020, tren ini mengindikasikan kebangkitan koperasi sebagai bagian penting dari pemulihan ekonomi daerah.

Sebagai kesimpulan, fluktuasi rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB selama 2020–2024 mencerminkan ketahanan, tantangan, serta upaya transformasi koperasi dalam menghadapi krisis dan perubahan ekonomi. Meskipun sempat melemah, tren peningkatan di dua tahun terakhir menandakan potensi besar koperasi untuk kembali berperan sebagai pilar ekonomi rakyat, selama didukung oleh kebijakan yang tepat, digitalisasi, dan penguatan kelembagaan koperasi itu sendiri.

2.3.2.9 Return on Assets (ROA) BUMD (%)

Return of Assets (ROA) merupakan instrumen dalam melihat seberapa besar manfaat kepemilikan terhadap suatu aset terhadap pendapatan suatu unit usaha. Nilai ROA didapatkan dari formula hasil persentase keuntungan bersih dibagi dengan rata-rata total aset yang dimiliki. Dengan kata lain persentase RoA bisa menggambarkan seberapa sehat suatu Perusahaan sehingga para investor bisa menilai apakah perusahaan tersebut bisa dikembangkan atau menerima investasi dalam pengembangan usaha atau tidak. Perkembangan Return On Assets (RoA) Kabupaten Lima Puluh Kota disajikan pada grafik di bawah ini.

Grafik 2. 40
Perkembangan Return On Assets (RoA)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



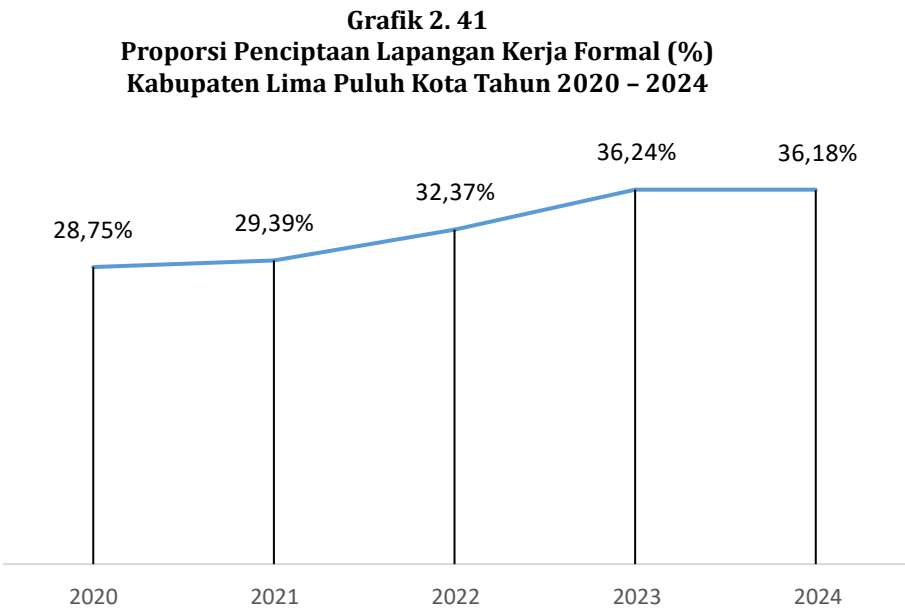
Sumber: PDAM Tirta Luak Nan Bungsu Tahun 2024

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang konsisten dalam beroperasi adalah PDAM Tirta Luak Nan Bungsu. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi Return on Assets (RoA) perusahaan tersebut selalu berada pada angka negatif, yang mengindikasikan bahwa aset yang dimiliki belum mampu memberikan nilai manfaat positif bagi kondisi keuangan perusahaan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu berfluktuasi cukup signifikan. Pada tahun 2020, RoA tercatat sebesar -6,159%, dan menurun menjadi -6,905% di tahun 2021, seiring dengan puncak pandemi COVID-19 yang berdampak terhadap melemahnya daya beli dan meningkatnya tunggakan pelanggan air minum.

Tahun 2022, seiring dengan relaksasi pembatasan mobilitas dan mulai pulihnya aktivitas ekonomi serta pergeseran perilaku transaksi ke arah digital, RoA membaik menjadi -5,267%. Namun pada tahun 2023, terjadi penurunan kembali menjadi -7,694%, yang mengindikasikan adanya tekanan keuangan baru, kemungkinan disebabkan oleh peningkatan biaya operasional atau penurunan efisiensi layanan. Pada tahun 2024, RoA PDAM Tirta Luak Nan Bungsu kembali mengalami penurunan, tercatat sebesar -7,884%, yang merupakan angka terendah dalam lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan pada tahun 2022, tantangan struktural dan efisiensi operasional masih menjadi kendala utama dalam kinerja keuangan perusahaan.

2.3.2.10 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai. Secara sederhana, proporsi penciptaan lapangan kerja formal adalah perbandingan jumlah lapangan kerja formal yang diciptakan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Sebagai salah satu indikator dalam mengukur perekonomian suatu daerah, proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal menunjukkan seberapa dominan pekerja yang memiliki status pekerjaan utama sebagai pekerja formal. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi suatu daerah dalam menciptakan lapangan kerja formal. Perkembangan proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Grafik di atas menunjukkan bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan selama periode 2020 hingga 2023, dari 28,75% pada tahun 2020 menjadi 36,24% pada tahun 2023. Kenaikan ini mencerminkan upaya yang berhasil dalam mendorong pertumbuhan sektor formal serta kebijakan pemerintah yang mendukung penciptaan lapangan kerja formal. Pemulihan ekonomi pasca pandemi juga memperluas kapasitas serapan tenaga kerja di sektor formal.

Namun, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan proporsi menjadi 36,18%, yang meskipun kecil, menandakan adanya stagnasi dalam pertumbuhan sektor formal. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perlambatan investasi sektor padat karya, meningkatnya preferensi pelaku usaha terhadap tenaga kerja fleksibel/informal, serta kendala dalam keberlanjutan program pelatihan kerja. Selain itu, digitalisasi dan otomatisasi di beberapa sektor usaha juga berpotensi menekan penciptaan kerja formal baru, karena perusahaan lebih memilih efisiensi teknologi dibanding menambah jumlah pekerja tetap. Fenomena ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah daerah untuk lebih fokus pada penciptaan kerja layak yang berkelanjutan serta memperluas skema insentif bagi sektor formal.

2.3.2.11 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan

Partisipasi angkatan kerja (TPAK) Perempuan adalah perbandingan antara angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas. Akan tetapi tidak semua penduduk usia kerja terlibat dalam kegiatan ekonomi karena sebagian penduduk usia kerja merupakan siswa sekolah, mengurus rumah tangga, maupun sementara tidak bekerja karena alasan-alasan tertentu. Jadi cukup banyak alasan yang mempengaruhi TPAK.

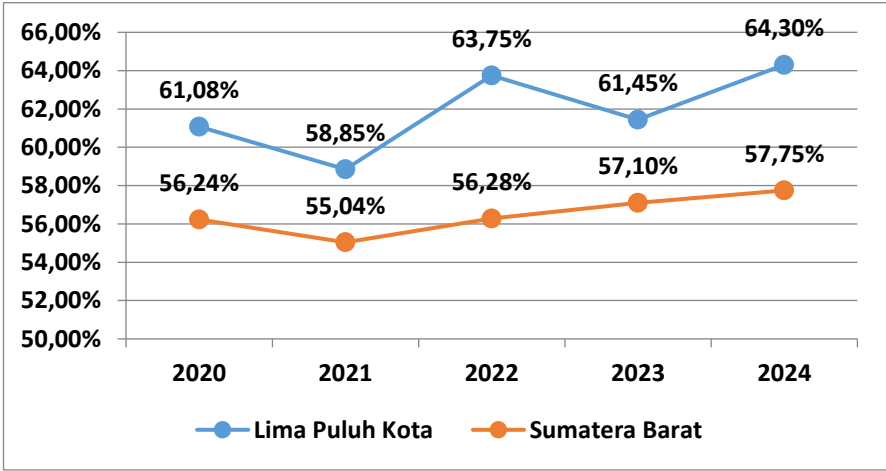
Persentase angkatan kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu tahun 2020-2024 mengalami naik turun tetapi kenaikannya belum terlalu signifikan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 74
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan
2020	61,08
2021	58,85
2022	63,75
2023	61,45
2024	64,30

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Grafik 2. 42
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik di atas, terlihat tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kabupaten Lima Puluh Kota lebih berada di atas angka partisipasi angkatan kerja perempuan Provinsi Sumatera Barat.

2.3.2.12 Indeks Inovasi Daerah

Inovasi sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 yang merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip peningkatan efisiensi, perbaikan efektivitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak menimbulkan konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai kepatutan, dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan diri sendiri. Untuk menjalankan prinsip-prinsip Inovasi Daerah tersebut, peran Organisasi Perangkat Daerah dibutuhkan guna menerapkan solusi-solusi kreativitas terhadap masalah dan peluang yang ada di suatu wilayah, mengenai bentuk inovasi daerah sebagaimana tercantum pada pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

- 1. Inovasi tata Kelola pemerintah daerah merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintah Daerah, yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen atau pengelolaan unsur manajemen.
- 2. Inovasi pelayanan publik merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik.
- 3. Inovasi daerah lainnya merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Perwujudan komitmen inovasi ini telah diwujudkan melalui gerakan “Satu Perangkat Daerah Lima Inovasi” yang telah dicanangkan sejak tahun 2019 dan hal tersebut masih dilanjutkan sampai saat ini. Dalam kurun waktu 6 tahun (2019 – 2024) sejak pencanangan gerakan tersebut telah membuat peningkatan jumlah inovasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dan membaiknya nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana untuk tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota sudah masuk sebagai daerah Inovatif (dengan nilai 45,72) setelah tahun-tahun sebelumnya berada pada kategori daerah kurang inovatif. Hal ini merupakan sebuah prestasi bagi Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya Bappelitbangda walaupun berada pada kondisi keterbatasan khususnya untuk unit kelitbangan yang terbatas baik dari segi pendanaan maupun Sumber Daya Manusia (SDM) kelitbangan yang belum mumpuni, sementara tantangan kelitbangan ke depan semakin besar. Untuk itu beberapa hal yang dapat dilakukan saat ini dalam menjawab tantangan kelitbangan ke depan yaitu melakukan kerja sama dengan institusi lain seperti perguruan tinggi. Dengan adanya kerja sama ini diharapkan selain dapat menciptakan proses *transfer knowledge*, juga menghasilkan produk kelitbangan yang dapat menjawab tantangan yang ada (lihat tabel).

Tabel 2. 75
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Keterangan
2020	197	Kurang Inovatif
2021	28,81	Kurang Inovatif
2022	47,47	Inovatif
2023	37,84	Inovatif
2024	45,72	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Berdasarkan data Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya dinamika nilai dan kategori yang mencerminkan perubahan baik dalam aspek metodologis maupun capaian kinerja inovasi daerah. Pada tahun 2020, nilai indeks sebesar 197 menempatkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam kategori "Kurang Inovatif". Nilai ini mengikuti sistem penilaian lama dari Kementerian Dalam Negeri yang menggunakan skala 0–1000. Namun, sejak tahun 2021, terjadi perubahan signifikan pada sistem pengukuran, di mana skala nilai disederhanakan menjadi rentang 0–100. Penyesuaian ini menyebabkan nilai indeks tahun 2021 turun menjadi 28,81, yang masih masuk kategori "Kurang Inovatif".

Perubahan skala ini bukan mencerminkan penurunan drastis kinerja inovasi, melainkan hasil dari penyempurnaan metodologi oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN). Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman publik terhadap hasil evaluasi,

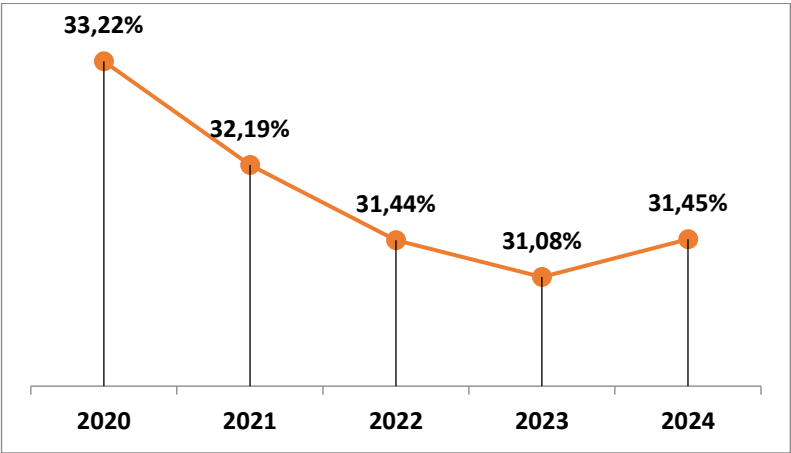
menyelaraskan dengan standar indeks nasional dan internasional, serta meningkatkan akuntabilitas penilaian. Seiring waktu, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren positif. Nilai indeks meningkat menjadi 47,47 pada tahun 2022 dan bertahan di kategori "Inovatif" hingga tahun 2024, meskipun belum mencapai kategori "Sangat Inovatif" (≥ 75). Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mulai mampu mengembangkan ekosistem inovasi dan memperkuat tata kelola pelayanan publik berbasis inovasi. Secara umum, tren tersebut mencerminkan komitmen dan progres daerah dalam memperbaiki kinerja inovasinya dari tahun ke tahun.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau

2.3.3.1 Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)

Sektor pertanian kehutanan dan perikanan merupakan salah satu penggerak utama dalam pengembangan ekonomi rakyat di daerah. Kontribusi output sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan produk domestik regional bruto (PDRB) dalam pertumbuhan ekonomi tidak bisadianggap tidak penting dalam perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Banyak potensi yang dapat disumbangkan oleh sektor pertanian terhadap perekonomian suatu daerah, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, sumber pendapatan penduduk Perdesaan dan lain-lain. Perkembangan rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik 2.43 berikut.

Grafik 2.43
Perkembangan Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



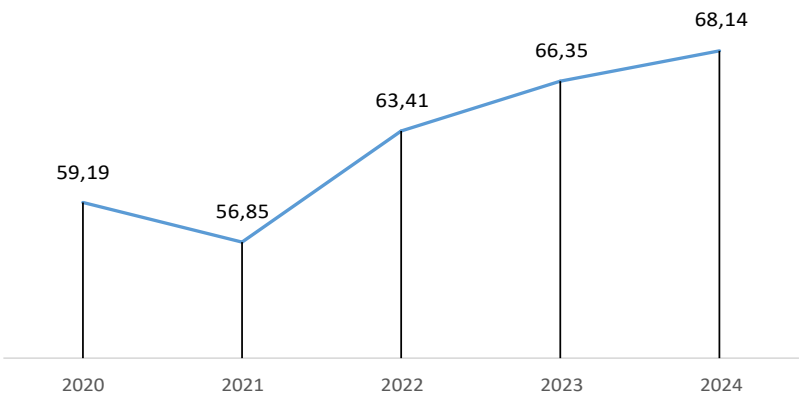
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa rasio PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami penurunan. Penurunan ini diakibatkan oleh pergeseran struktur ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota yang bergeser dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ke sektor lain.

2.3.3.2 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan rasio antara produk berupa barang dan jasa dengan tenaga kerja yang digunakan, baik individu maupun kelompok dalam satuan waktu tertentu yang merupakan besaran kontribusi tenaga kerja dalam pembentukan nilai tambah suatu produk dalam proses kegiatan pertanian, kehutanan dan perikanan. Semakin besar tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencerminkan adanya pemanfaatan sumber daya alam yang tetap menjaga lingkungan hidup secara berkelanjutan. Perkembangan tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 44
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/Orang) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025, Data diolah

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir. Setelah sempat mengalami penurunan dari 59,19 juta/orang pada tahun 2020 menjadi 56,85 juta/orang di tahun 2021, produktivitas kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 68,14 juta/orang pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2021 kemungkinan dipengaruhi oleh gangguan aktivitas produksi akibat pandemi COVID-19 serta keterbatasan akses petani terhadap input produksi. Namun pemulihan cepat di tahun-tahun berikutnya mencerminkan keberhasilan intervensi pemerintah daerah dan lembaga teknis dalam meningkatkan efisiensi usaha tani dan perikanan.

2.3.4 Transformasi Digital
2.3.4.1 Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Masyarakat Digital adalah sekumpulan individu yang menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-harinya, di mana semua aktivitas yang dijalankan secara elektronik dan tanpa kertas (*paperless*) menjadi suatu hal yang biasa. Indeks Digital Masyarakat Indonesia atau Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. Survei IMDI ini dimulai dari tahun 2022, dimana memiliki 4 pilar, yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan dan pekerjaan.

Sehubungan dengan keterbatasan ketersediaan data, data Indeks Masyarakat Digital Indonesia Kabupaten Lima Puluh Kota hanya dapat ditampilkan selama 3 tahun terakhir. Dari mulai pertama kali dilakukan survei IMDI, Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan angka yang relatif baik dan meningkat dari tahun sebelumnya. Nilai IMDI tahun 2022-2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

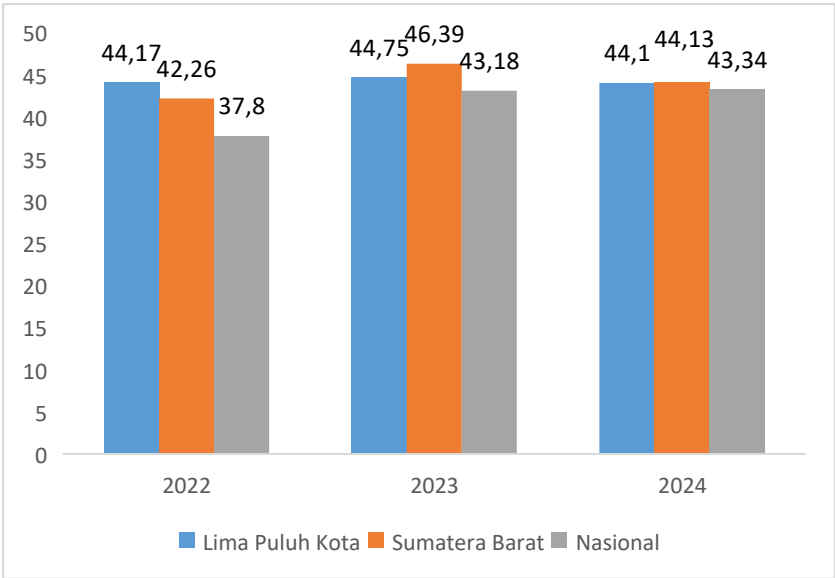
Tabel 2. 76
Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022 - 2023

Tahun	Nilai IMDI
2022	44,17
2023	44,75
2024	44,10

Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2024

Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dalam 3 tahun terakhir mengalami peningkatan sebesar 0,07poin. Namun peningkatan tersebut tidak begitu signifikan. Nilai IMDI Provinsi Sumatera Barat dan Nasional juga mengalami peningkatan. Adapun perbandingan nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 45
Perbandingan Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2022 - 2023



Sumber: Puslitbang Aptika IKP Kominfo Tahun 2025

Pada tahun 2023, nilai IMDI Kabupaten meningkat menjadi 44,75, meskipun terjadi peningkatan yang lebih tinggi pada provinsi (46,39) dan nasional (43,18), sehingga posisi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di bawah Provinsi Sumatera Barat namun masih di atas nasional. Pada tahun 2024, nilai IMDI Kabupaten sedikit menurun menjadi 44,1, sementara provinsi juga mengalami penurunan menjadi 44,13 dan nasional meningkat menjadi 43,34. Meskipun mengalami penurunan tipis.

Nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota tetap berada di atas rata-rata nasional, dan hampir setara dengan provinsi, menunjukkan daya saing digital masyarakat yang relatif kuat di tingkat regional. Secara keseluruhan, nilai IMDI Kabupaten Lima Puluh Kota konsisten lebih tinggi dari nasional dalam tiga tahun terakhir dan bersaing ketat dengan nilai provinsi, mencerminkan kemajuan dalam aspek literasi digital, infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi di masyarakat.

2.3.5 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

2.3.5.1 Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Berdasarkan definisinya, koefisien variasi harga antar wilayah merupakan perbandingan simpangan baku (standar deviasi) harga dengan rata-rata harga dan dinyatakan dalam bentuk persentase. Tujuan perhitungan koefisien harga adalah untuk melihat sebaran/distribusi data dari rata-rata hitungnya. Semakin kecil koefisien variasi maka data semakin seragam yang artinya menunjukan bahwa harga komoditas kebutuhan pokok pada satu tahun terakhir berada dalam keadaan stabil, sedangkan semakin besar koefisien variasi maka data semakin heterogen atau bervariasi. Dalam menjaga aktivitas perdagangan tetap terjadi maka titik temu antara kemampuan daya beli masyarakat dan harga jual komoditas yang stabil merupakan persyaratan utama. Sehingga koefisien ini sangat berguna untuk menjadi dasar intervensi kebijakan dalam mengendalikan harga barang di suatu daerah.

Namun tidak semua daerah kabupaten/kota memiliki sumber daya dalam mengumpulkan dan mengolah data koefisien tersebut sehingga untuk provinsi Sumatera Barat, koefisien variasi harga antar wilayah diganti dengan persentase dan stabilitas serta jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok. Setidaknya indikator ini bisa menjadi proxi untuk melihat sejauh mana kestabilan tingkat harga suatu komoditas yang beredar di suatu daerah. Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

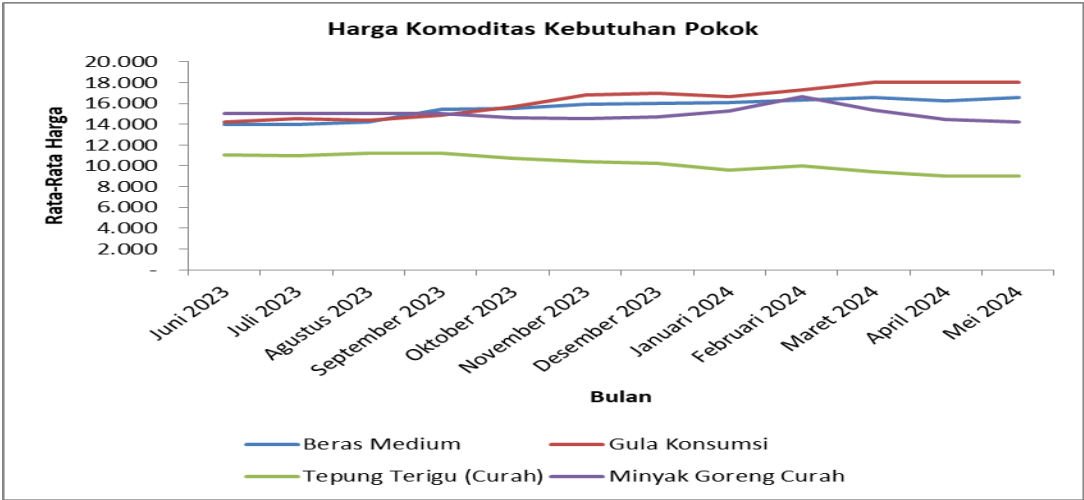
Tabel 2. 77
Rata-Rata Harga Komoditas Kebutuhan Pokok
Kabupaten Lima Puluh Kota Juni 2023 s/d Mei 2024

Komoditas	Juni 2023	Juli 2023	Agustus 2023	September 2023	Oktober 2023	November 2023	Desember 2023	Januari 2024	Februari 2024	Maret 2024	April 2024	Mei 2024
Beras Medium	14.000	14.000	14.224	15.417	15.550	15.967	16.000	16.073	16.310	16.573	16.268	16.613
Gula Konsumsi	14.259	14.536	14.379	14.867	15.645	16.783	16.952	16.694	17.345	18.000	18.000	18.000
Tepung Terigu (Curah)	11.093	11.000	11.207	11.233	10.758	10.433	10.258	9.565	10.017	9.435	9.036	9.000
Minyak Goreng Curah	15.000	15.000	15.000	15.000	14.613	14.517	14.726	15.306	16.621	15.338	14.495	14.186
Daging Sapi Murni	140.385	140.714	140.000	140.667	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	144.833	146.000	141.379
Daging Ayam Ras	31.074	31.071	26.724	26.433	25.419	24.233	25.381	26.790	29.655	36.877	40.054	40.173
Ikan Tongkol								26.522	27.679	27.963	30.000	28.103
Telur Ayam Ras	29.519	30.429	29.828	28.273	25.210	26.053	25.865	26.052	26.538	29.350	27.691	28.727
Bawang Merah	31.185	34.786	25.448	18.400	19.806	28.600	36.581	34.323	30.621	34.968	45.786	46.903
Cabai Merah Keriting	27.852	37.536	43.034	44.667	43.613	66.867	59.871	42.129	68.276	71.806	53.298	58.839

Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Ada 10 komoditas yang menjadi acuan dalam mengamati stabilitas harga bahan kebutuhan pokok di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana komoditas-komoditas ini adalah bahan pokok yang banyak dipergunakan oleh masyarakat. Terjaganya kestabilan harga komoditas ini akan memberikan dampak terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Untuk melihat perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok ini, dapat diamati pada grafik (2.46), grafik (2.47), dan grafik (2.48) berikut ini:

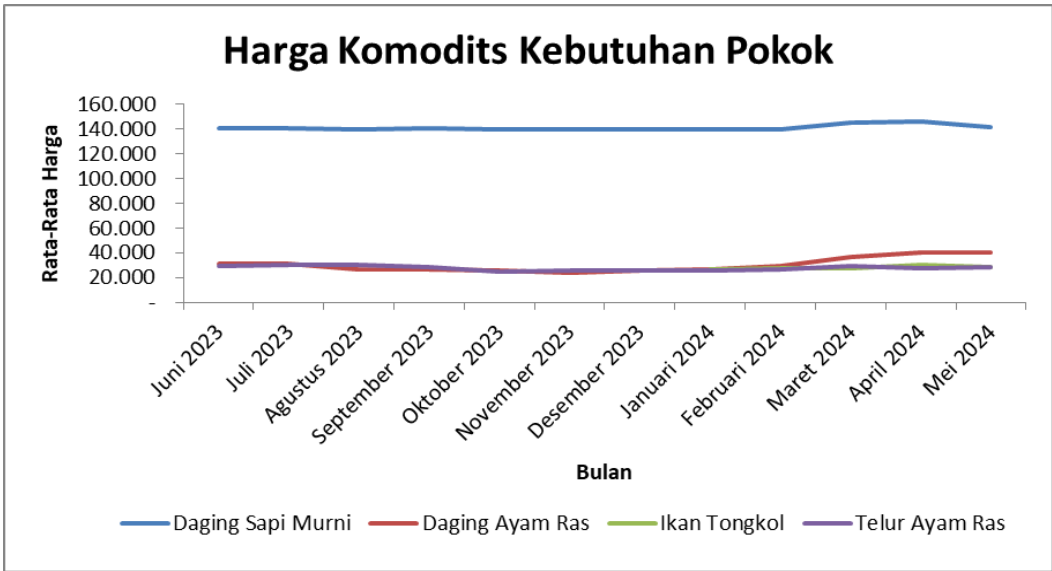
Grafik 2. 46
Harga Komoditas Kebutuhan Pokok Beras, Gula, Tepung Terigu dan Minyak Goreng



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Pada grafik di atas terlihat harga beras medium, tepung terigu curah, gula konsumsi dan minyak goreng curah berfluktuasi tiap bulannya. Untuk harga tepung terigu curah dan minyak goreng curah menunjukkan penurunan dalam 4 bulan terakhir. Akan tetapi, harga beras medium dan gula relatif mengalami kenaikan.

Grafik 2. 47
Harga Komoditas Daging Sapi, Daging Ayam, Ikan Tongkol dan Telur Ayam Ras



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga daging sapi dan daging ayam mengalami kenaikan dalam rentang waktu 12 bulan terakhir, sedangkan untuk telur ayam ras mengalami penurunan. Selain itu, mulai dari bulan Januari 2024 juga sudah ada pencatatan harga ikan tongkol, dimana dalam rentang 5 bulan harganya mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan harga pada bulan Januari.

Grafik 2. 48
Harga Komoditas Bawang Merah dan Cabai Merah Keriting



Sumber: Panel Harga Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Data Diolah

Untuk harga komoditas bawang putih dan cabai merah keriting, dalam 12 bulan terakhir mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan kondisi harga pada bulan Januari, dimana harga cabai merah keriting hampir selalu mengalami kenaikan setiap bulannya.

2.3.5.2 Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu komponen penyusun PDB/PDRB dari sisi pengeluaran yang menunjukkan besarnya investasi fisik di suatu wilayah pada periode tertentu. PMTB adalah investasi fisik yang mengakibatkan penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Adapun yang termasuk dalam investasi ini yaitu

pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari 1 (satu) tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Penghitungan / estimasi nilai PMTB dapat dilakukan melalui dua metode yaitu langsung dan tidak langsung.

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi pada setiap sektor kegiatan ekonomi (lapangan usaha) atas dasar harga berlaku (ADHB) dan harga pembelian (perolehan). PMTB dihitung dengan metode tidak langsung atau yang juga disebut sebagai pendekatan melalui arus komoditas (*commodity flow approach*) dilakukan dengan menghitung nilai produk barang yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi (*supply*) yang kemudian dialokasikan sebagian menjadi barang modal. Estimasi penghitungan PMTB berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai output sektor konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun konstan.

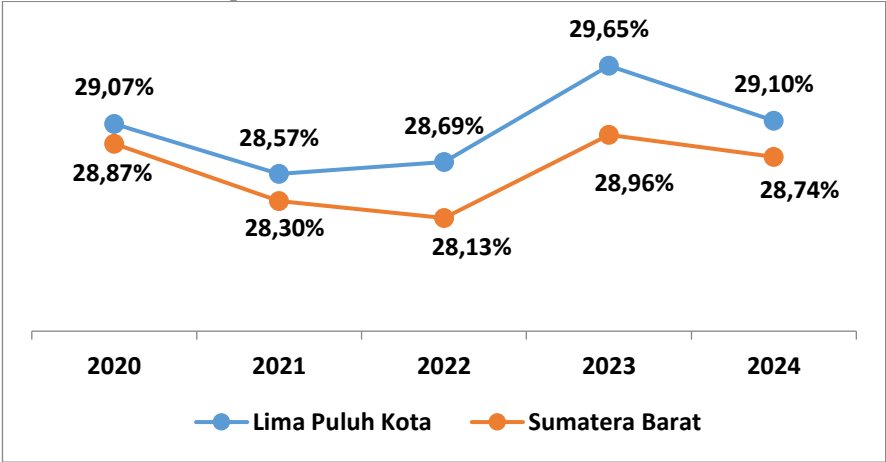
Nilai PMTB di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun kembali meningkat di tahun 2022-2023. Persentase PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan kembali meningkat untuk tahun 2022-2023, tetapi kembali menurun di tahun 2024. Namun penurunan dan kenaikan persentase PMTB terhadap PDRB ini tidak terlalu signifikan atau perubahan nilainya tidak begitu besar. Data PMTB dan kontribusinya terhadap PDRB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 78
Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	PMTB (RpMiliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	PMTB (%PDRB)
2020	3.215,49	11.062,32	29,07
2021	3.265,73	11.430,81	28,57
2022	3.411,02	11.890,13	28,69
2023	3.686,30	12.430,83	29,65
2024	3.763,71	12.932,00	29,10

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 2. 49
Perbandingan PMTB (% PDRB) Provinsi Sumatera Barat
dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kontribusi PMTB terhadap PDRB mengalami penurunan dari tahun 2020-2021 dan kembali meningkat di tahun 2022-2023, dan kembali turun di tahun 2024, berbeda dengan provinsi Sumatera Barat yang kontribusi PMTB terhadap PDRB yang terus mengalami penurunan sampai tahun 2022 dan baru naik di tahun 2023. Secara keseluruhan kontribusi PMTB terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat, hal ini dapat dilihat pada grafik dimana garis PMTB Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat.

2.3.5.3 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)

Ekspor adalah kegiatan alih kepemilikan (ekonomi) atau menjual barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lain. Net ekspor merupakan nilai bersih dari ekspor suatu wilayah. Penghitungan net ekspor yaitu dengan cara mengurangi nilai ekspor dengan nilai impor (ekspor dikurang impor). Ekspor barang dan jasa memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) suatu wilayah, begitu pula dengan kondisi pada Kabupaten Lima Puluh Kota.

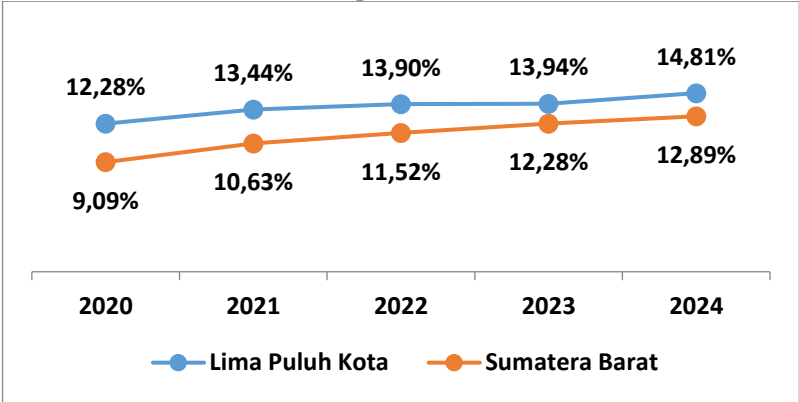
Tabel 2. 79
Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa
terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	Net Ekspor Barang dan Jasa (Rp Miliar)	PDRB ADHK (Rp Miliar)	Net Ekspor (%PDRB)
2020	1.358,68	11.062,32	12,28
2021	1.535,94	11.430,81	13,44
2022	1.652,89	11.890,13	13,90
2023	1.732,69	12.430,83	13,94
2024	1.915,61	12,932,00	14,81

Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB ADHK selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan setiap tahunnya sejalan dengan PDRB yang cenderung meningkat. Sesuai dengan data yang tersedia pada tahun 2020 nilai net ekspor barang dan jasa Kabupaten Lima Puluh Kota berkontribusi sebesar 12,28% terhadap PDRB dan terus meningkat hingga menjadi 14,81% pada tahun 2024. Kontribusi ekspor Kabupaten Lima Puluh Kota yang terus mengalami peningkatan ini berbeda dengan kondisi di Provinsi Sumatera Barat yang mana share ekspor terhadap PDRB Sumatera Barat meningkat setiap tahun 2020-2024. Perbandingan kondisi Ekspor (% PDRB) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 50
Perbandingan Kontribusi Net Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB)
Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber : BPS Kabupaten Lima Puluh Kota; BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

2.3.6 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

2.3.6.1 Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau

Rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang memenuhi hunian layak dan terjangkau maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota dari

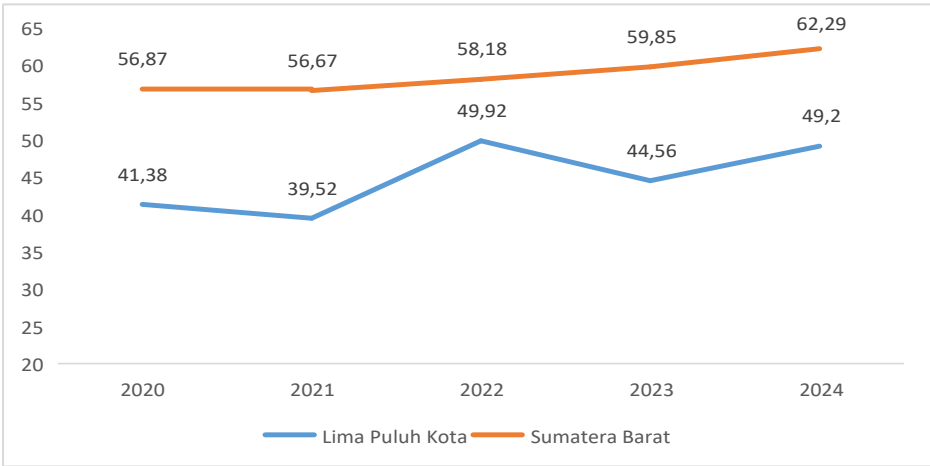
sektor perumahan. Tabel dan Grafik menunjukkan data rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana berikut:

Tabel 2. 80
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Wilayah	Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lima Puluh Kota	41,38	39,52	49,92	44,56	49,20
Sumatera Barat	56,87	56,67	58,18	59,85	62,29

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Grafik 2.51
Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada periode 2020 hingga 2024, terdapat perbedaan signifikan dalam capaian indikator persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak antara Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Untuk kondisi tahun 2020, capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 41,38%, jauh di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat yang mencapai 56,87%. Pada tahun 2021 nilai capaian indikator Kabupaten Lima Puluh Kota menurun menjadi 39,52% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 56,67%. Meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, kesenjangan masih cukup besar antara data Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan selisih sekitar 17,15%. Namun, pada tahun 2022, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat menjadi 49,92%, sementara Provinsi Sumatera Barat juga mengalami kenaikan menjadi 58,18%.

Tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan capaian 44,56%. Namun pada tahun 2024, capaian Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat kembali menjadi 49,20%, sementara Provinsi Sumatera Barat terus mengalami peningkatan mencapai 62,29%. Kesenjangan kembali meningkat menjadi sekitar 13,09%. Secara keseluruhan, Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2022, tetapi capaian akses terhadap hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota masih di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat selama periode 5 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hunian layak dan kondisi hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota agar meningkat atau bahkan menyamai capaian di tingkat provinsi.

2.3.6.2 Persentase Desa Mandiri

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah: (1) Layanan Dasar; (2) Sosial (3) Ekonomi; (4) Lingkungan (5) Aksesibilitas (6) Tata kelola pemerintahan desa

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:

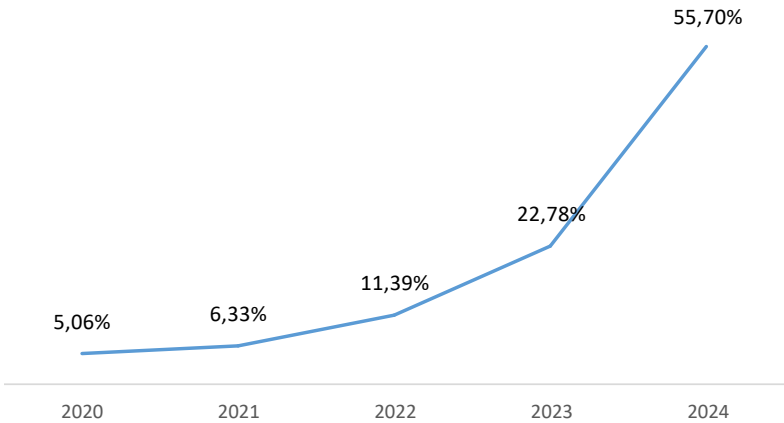
Tabel 2. 81
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2024 sudah 55,70% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status tertinggal yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 4 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2. 52
Persentase Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Selama periode 2020 hingga 2024, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah Desa Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dari 5,06% pada tahun 2020 menjadi 55,70% pada tahun 2024. Kenaikan ini menunjukkan kemajuan besar dalam pembangunan desa, terutama dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Peningkatan bertahap pada 2020–2022 menandakan fondasi awal penguatan pada 3 aspek, yang kemudian diakselerasi mulai tahun 2023. Peran strategis dari program Dana Desa, integrasi data IDM (Indeks Desa Membangun), serta pendampingan intensif oleh pemerintah pusat dan daerah turut mendukung lompatan kemajuan ini.

Kenaikan tajam pada tahun 2023 hingga 2024, dari 22,78% menjadi 55,70%, mencerminkan adanya percepatan pembangunan berbasis indikator IDM. Dukungan program nasional seperti SDGs Desa, revitalisasi BUMDes, serta pelibatan aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa menjadi faktor pendorong utama. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil mendorong transformasi desa secara inklusif dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan klasifikasi desa secara progresif menuju kategori mandiri. Berikut disajikan daftar 44 nagari berstatus Mandiri per Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024:

Tabel 2. 82
Nagari Berstatus Mandiri per Kecamatan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
1.	Akabiluru	1. Koto Tangah Batu Ampa 2. Batuhampar 3. Pauh Sangik 4. Durian Gadang
2.	Bukik Barisan	5. Baruah Gunuang
3.	Guguak	6. Guguak VIII Koto 7. VII Koto Talago 8. Kubang
4.	Harau	9. Taram 10. Solok Bio Bio 11. Tarantang 12. Bukik Limbuku 13. Harau 14. Batu Balang 15. Sarilamak 16. Gurun 17. Lubuak Batingkok 18. Koto Tuo
5.	Kapur IX	19. Muaro Paiti
6.	Lareh Sago Halaban	20. Labuah Gunuang 21. Batu Payuang 22. Bukik Sikumpa 23. Balai Panjang

No.	Kecamatan	Nagari Berstatus Mandiri
		24. Halaban 25. Tanjuang Gadang 26. Sitanang
7.	Luak	27. Tj. Haro Sikabu-Kabu Pd. Panjang 28. Mungo 29. Sungai Kamuyang
8.	Mungka	30. Jopang Manganti 31. Simpang Kapuak 32. Mungka 33. Talang Maur 34. Sungai Antuan
9.	Pangkalan Koto Baru	35. Manggilang 36. Tanjuang Balik 37. Gunuang Malintang 38. Pangkalan
10.	Payakumbuh	39. Koto Baru Simalanggang 40. Taeh Bukik 41. Simalanggang 42. Taeh Baruah
11.	Situjuah Limo Nagari	43. Situjuah Batua 44. Situjuah Banda Dalam

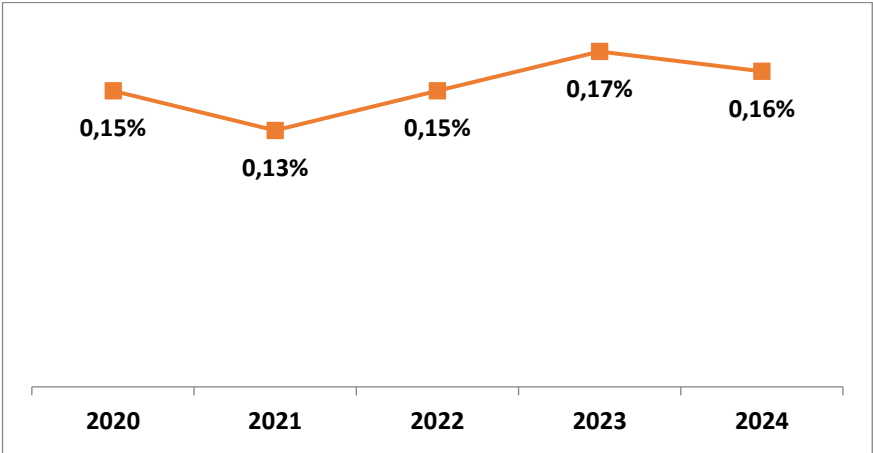
Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2025

2.3.7 Stabilitas Ekonomi Makro

2.3.7.1 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah. Perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 53
Perkembangan Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Data diolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui bahwa perkembangan rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) Kabupaten Lima Puluh Kota selama satu dekade terakhir mengalami tren positif meskipun sempat menurun pada tahun 2021 dan 2024. Pada tahun 2023, rasio pajak daerah terhadap PDRB mencapai titik tertinggi selama 5 tahun terakhir dengan nilai 0,17%. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah.Semakin tinggi nilai rasio

pajak daerah maka Pemerintah Daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

2.3.7.2 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)

Dana pihak ke tiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Total dana pihak ke tiga dalam 5 tahun terakhir berfluktuasi. Tabungan merupakan produk simpanan yang mendorong kenaikan dana pihak ketiga setiap tahunnya. Pertumbuhan total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

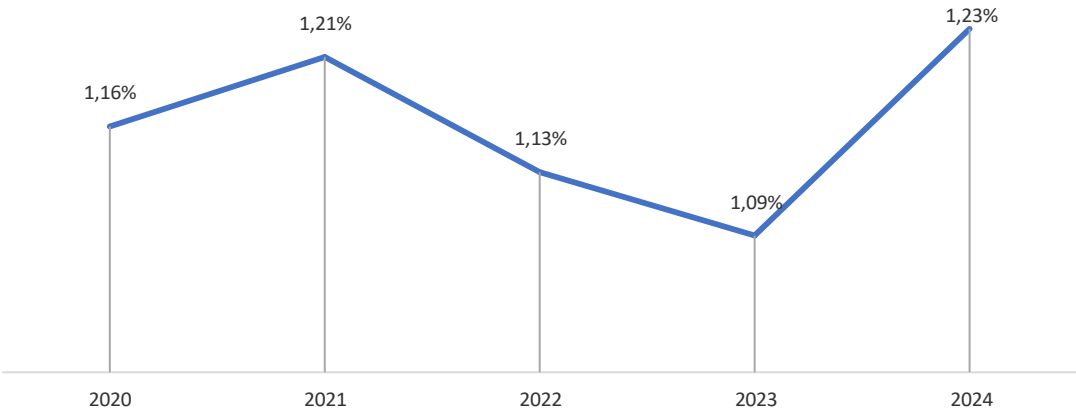
Tabel 2. 83
Perkembangan Total Dana Pihak Ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020– 2024

Tahun	Total Dana Pihak Ketiga (Miliar Rupiah)
2020	181
2021	196
2022	203
2023	214
2024	256

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 54
Perkembangan Persentase Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2024, Data diolah

Total dana pihak ketiga Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024 mengungkap dinamika sektor perbankan lokal yang sangat dipengaruhi oleh kondisi makroekonomi dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan. Pada tahun 2020, total dana pihak ketiga tercatat sebesar Rp181 miliar, yang hampir pasti disebabkan oleh tekanan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dalam situasi tersebut, masyarakat cenderung menarik tabungan untuk kebutuhan konsumsi, menunda simpanan jangka panjang, atau mengalami penurunan pendapatan secara umum.

Periode 2021 hingga 2023 menunjukkan tren pemulihan bertahap. Dana pihak ketiga meningkat menjadi Rp196 miliar pada 2021 (+8,3%), kemudian Rp203 miliar pada 2022 (+3,6%), dan mencapai Rp215,82 miliar pada 2023 (+6,3%). Pada tahun 2024, total dana pihak ketiga kembali mengalami peningkatan signifikan sebesar 18,7% menjadi Rp256,15 miliar. Capaian ini mengindikasikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan mulai pulih, dan aktivitas ekonomi lokal yang lebih stabil mendorong masyarakat untuk kembali menyimpan dana di lembaga keuangan formal. Kenaikan tajam ini juga bisa dikaitkan dengan peningkatan inklusi keuangan, perluasan layanan digital banking, serta adanya insentif atau program penempatan dana pemerintah daerah pada lembaga keuangan lokal.

Jika ditinjau dari sisi persentase terhadap PDRB ADHB, terlihat bahwa setelah mengalami tren penurunan dari 2020 hingga 2023, pada tahun 2024 terjadi pemulihan dengan rasio naik menjadi 1,23%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dana pihak ketiga mulai seimbang, bahkan lebih cepat dibandingkan pertumbuhan PDRB ADHB, yang mengindikasikan peran intermediasi keuangan mulai menguat kembali. Meski demikian, angka ini masih mencerminkan perlunya perbaikan untuk memperdalam pasar keuangan lokal.

Secara keseluruhan, tren 2024 memberikan sinyal positif bagi sektor perbankan lokal di Kabupaten Lima Puluh Kota. Meski demikian, tantangan struktural seperti rendahnya tingkat literasi keuangan di wilayah Perdesaan, kurangnya diversifikasi produk keuangan, serta keterbatasan infrastruktur digital tetap perlu diatasi. Strategi inklusi keuangan yang terintegrasi dengan transformasi digital dan sinergi lintas sektor dapat mendorong optimalisasi potensi penghimpunan dana masyarakat secara berkelanjutan dan inklusif.

2.3.7.3 Nilai Transaksi Saham per Kapita (Rupiah)

Nilai transaksi saham adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Kabupaten). Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikalidengan harga saham.Untuk mengukur *size* dari pasar modal dapat digunakanberbagai pendekatan. Salah satunya dengan mengukur tingkat likuiditas pasar melalui pendekatan rata-rata transaksi. Pasar modal yang aktif memberikan sinyal adanya pertumbuhan perekonomian. Sentimen pasar yangbaik kemudian akan meningkatkan performa saham yang pada akhirnya akan mempengaruhi nilai kapitalisasi pasarsecara keseluruhan. Pertumbuhan nilai transaksi saham Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. 84
Perkembangan Nilai Transaksi Saham
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	Nilai Transaksi Saham Tahunan (Miliar Rupiah)	Jumlah Penduduk	Nilai Transaksi Saham Berupa Nilai Rata-rata Tahunan (Miliar Rupiah)
2020	106	383.525	276.384
2021	339	385.634	879.072
2022	187	388.375	481.493
2023	109	396.427	275.611
2024	186	401.086	463.766

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan dalam nilai transaksi saham tahunan maupun per kapitanya di Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai transaksi saham tercatat sebesar Rp106 miliar, kemudian melonjak drastis pada tahun 2021 menjadi Rp339 miliar. Lonjakan tersebut menghasilkan nilai transaksi saham per kapita tertinggi dalam periode ini, yakni sebesar Rp879.072 miliar. Peningkatan tajam ini kemungkinan dipengaruhi oleh maraknya minat masyarakat terhadap investasi saham, terutama karena tren nasional saat itu menunjukkan peningkatan jumlah investor ritel, termasuk dari kalangan muda dan daerah, berkat kemudahan teknologi finansial (fintech), edukasi daring, serta aplikasi perdagangan saham yang semakin terjangkau dan mudah diakses.

Namun, tren tersebut tidak bertahan. Pada tahun 2022 nilai transaksi menurun menjadi Rp187 miliar, dan kembali turun signifikan menjadi Rp109,26 miliar pada tahun 2023. Penurunan ini menyebabkan nilai transaksi per kapita merosot dari Rp481.493 (2022) menjadi hanya Rp275.611 (2023). Sentimen negatif pasar, koreksi harga saham secara nasional maupun global, serta meningkatnya kehati-hatian investor dalam memilih instrumen investasi dapat menjadi faktor utama. Bahkan dengan terus meningkatnya jumlah penduduk setiap tahun, hal ini tidak cukup untuk mengimbangi penurunan nilai transaksi per kapita, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pasar modal masih belum stabil.

Pada tahun 2024 terjadi sedikit pemulihan dengan nilai transaksi saham mencapai Rp186,01 miliar dan nilai per kapitanya meningkat menjadi Rp463.766. Hal ini mengindikasikan potensi kebangkitan kembali partisipasi masyarakat terhadap investasi di pasar modal, meskipun

belum setinggi capaian puncaknya pada 2021. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi pertumbuhan partisipasi masyarakat dalam pasar modal, tren tersebut masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan dinamika pasar saham nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih kuat untuk meningkatkan literasi keuangan, membangun kebiasaan investasi jangka panjang, serta memperluas inklusi pasar modal. Pemerintah daerah dan otoritas keuangan dapat memperkuat edukasi dan dukungan terhadap ekosistem investasi di tingkat lokal agar pertumbuhan ini menjadi lebih konsisten dan berkelanjutan.

2.3.7.4 Total Kredit terhadap PDRB

Total Kredit per Kabupaten adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten. Pertumbuhan total kredit Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut.

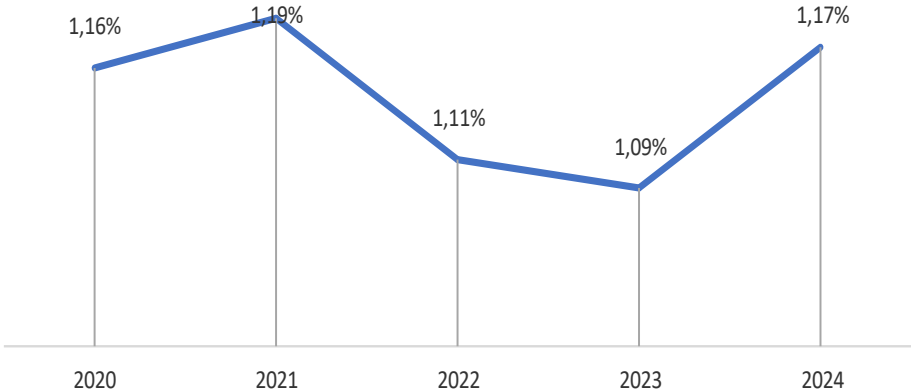
Tabel 2. 85
Perkembangan Total Kredit Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Tahun	Total Kredit (Miliar Rupiah)
2020	180
2021	192
2022	198
2023	216
2024	243

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten tersebut pada suatu waktu tertentu. Perkembangan persentase total kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 (lima) tahun terakhir disajikan dalam grafik 2.55 berikut.

Grafik 2. 55
Perkembangan Persentase Total Kredit terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020– 2024 (%)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat & BPS Lima Puluh Kota Tahun 2024. Data diolah

Berdasarkan data pada grafik di atas, total kredit di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan dinamika yang fluktuatif selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, persentase total kredit terhadap PDRB ADHB tercatat sebesar 1,16%, kemudian meningkat menjadi 1,19% pada 2021. Peningkatan ini mencerminkan adanya pemulihan awal pasca tekanan ekonomi akibat pandemi, sejalan dengan mulai pulihnya kepercayaan sektor perbankan dan pelaku usaha terhadap kondisi usaha lokal.

Namun, tren ini tidak berlanjut secara konsisten. Pada tahun 2022 dan 2023, persentase tersebut menurun menjadi masing-masing 1,11% dan 1,09%, yang menunjukkan bahwa

pertumbuhan kredit tidak mampu mengimbangi pertumbuhan ekonomi daerah. Artinya, meskipun secara nominal kredit bisa saja meningkat, laju peningkatannya lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB ADHB. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi intermediasi lembaga keuangan, khususnya dalam menyalurkan pembiayaan produktif, belum sepenuhnya optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

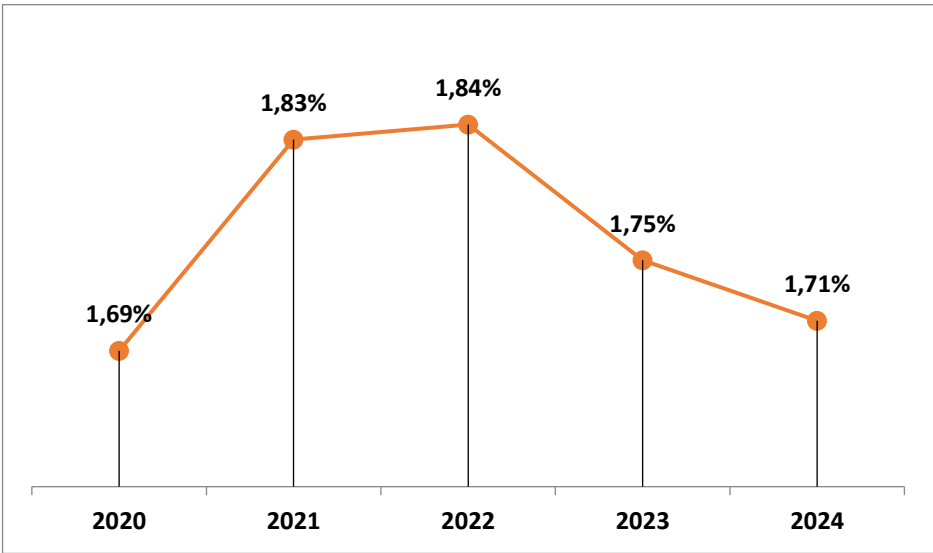
Pada tahun 2024, terjadi peningkatan kembali menjadi 1,17%, yang bisa diartikan sebagai sinyal positif mulai pulihnya peran sektor keuangan dalam menopang pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, rasio tersebut masih tergolong rendah dan menunjukkan bahwa kontribusi kredit terhadap ekonomi daerah masih terbatas. Rendahnya persentase ini dapat disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti minimnya akses masyarakat (terutama UMKM) terhadap sumber pembiayaan formal, rendahnya permintaan kredit produktif, atau tingginya ketergantungan pada pembiayaan informal.

Oleh karena itu, untuk mendorong kontribusi sektor keuangan secara lebih signifikan, diperlukan upaya strategis berupa peningkatan literasi keuangan masyarakat, pengembangan skema kredit yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan lokal, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan. Langkah-langkah ini penting agar pembiayaan menjadi lebih produktif, terjangkau, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara merata.

2.3.7.5 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota ke depan, sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi dan pembangunan, sehingga upaya pendalaman keuangan menjadi sangat penting baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan, dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Perkembangan Rasio PDRB sektor Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 56
Perkembangan Rasio PDRB Sektor
Jasa Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa perkembangan kontribusi sektor Jasa Keuangan selama satu dekade terakhir mengalami fluktuasi. Dalam kurung tahun 2020-2022, rasio PDRB sektor Jasa Keuangan mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2023-2024 mengalami penurunan rasio. Hal ini berarti Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi tantangan besar karena kondisi sektor jasa keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota masih terbilang dangkal yang berpengaruh terhadap perekonomian. Dengan kata lain, masih banyak penduduk Lima Puluh Kota yang belum menikmati layanan jasa keuangan secara formal.

2.3.7.6 Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD)

Undang-Undang No.59 tahun 2024 mengenai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 memuat visi Indonesia Emas 2045, yang dicapai melalui 8 misi pembangunan, 17 arah (tujuan) pembangunan, dan 45 indikator utama pembangunan, yang secara imperatif diamanatkan untuk diselaraskan pada dokumen RPJP Daerah 2025-2045. Adapun salah satu dari 45 Indikator Utama Pembangunan (IUP) tersebut adalah indikator inklusi keuangan, sebagaimana telah diselaraskan hingga level provinsi pada periode penyusunan RPJPD 2025-2045. Berkaitan dengan hal tersebut, sebagai turunan indikator Inklusi Keuangan level provinsi, Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) dibangun sebagai proksi indikator level Kabupaten/Kota, yang bertujuan untuk memberi gambaran secara lebih terukur mengenai kondisi akses keuangan masyarakat di Kabupaten/Kota.

Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) merupakan indeks komposit yang dikembangkan untuk menyediakan indikator kuantitatif dalam kerangka pengukuran yang lebih komprehensif sehingga dapat memperkuat pemantauan TPAKD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKAD memanfaatkan data dari sisi penawaran (supply side) dan permintaan (demand side) untuk menilai kinerja akses, penggunaan layanan, serta kedalaman keuangan. Indeks ini memberikan gambaran yang informatif bagi pemangku kepentingan di tingkat daerah maupun nasional dalam merumuskan program dan kebijakan yang lebih efektif. IKAD mulai diukur realisasinya sejak tahun 2022. Capaian IKAD Kabupaten Lima Puluh Kota 3 tahun terakhir disajikan sebagai berikut:



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2025

Perkembangan nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan tren positif namun mulai mengalami pelambatan. Pada tahun 2022, IKAD tercatat sebesar 3,29%, kemudian meningkat menjadi 3,48% pada tahun 2023, mencerminkan adanya perbaikan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, baik dari sisi ketersediaan (jumlah lembaga keuangan) maupun penggunaan (partisipasi masyarakat dalam produk keuangan seperti tabungan, kredit, dan asuransi). Peningkatan IKAD pada 2023 mengindikasikan keberhasilan program inklusi keuangan di daerah, termasuk perluasan layanan keuangan digital, kegiatan edukasi keuangan, serta sinergi antara lembaga keuangan dan pemerintah daerah dalam mendorong partisipasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan rumah tangga. Namun demikian, pada tahun 2024 terjadi sedikit penurunan menjadi 3,46%, yang dapat dimaknai sebagai indikasi stagnasi atau bahkan hambatan dalam upaya peningkatan akses keuangan.

Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti terbatasnya ekspansi jaringan lembaga keuangan ke wilayah terpencil, rendahnya literasi keuangan digital di kalangan masyarakat pedesaan, atau tantangan struktural seperti kendala dokumen kependudukan dan minimnya produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, stagnasi ini menunjukkan bahwa peningkatan IKAD ke depan tidak hanya bisa bergantung pada aspek kuantitatif (jumlah rekening, lembaga, atau nilai transaksi), tetapi juga harus memperhatikan kualitas akses, seperti pemanfaatan produk keuangan untuk kegiatan produktif, keberlanjutan

pemakaian layanan keuangan, dan perlindungan konsumen. Dengan demikian, meskipun secara umum IKAD Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan pencapaian yang cukup baik dan stabil, namun perlu strategi lanjutan yang lebih inovatif dan inklusif untuk mendorong pertumbuhan yang lebih signifikan. Ini termasuk penguatan digitalisasi layanan keuangan, penyediaan produk yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal, serta kolaborasi multisektor dalam mendukung ekosistem keuangan yang ramah dan berkeadilan.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

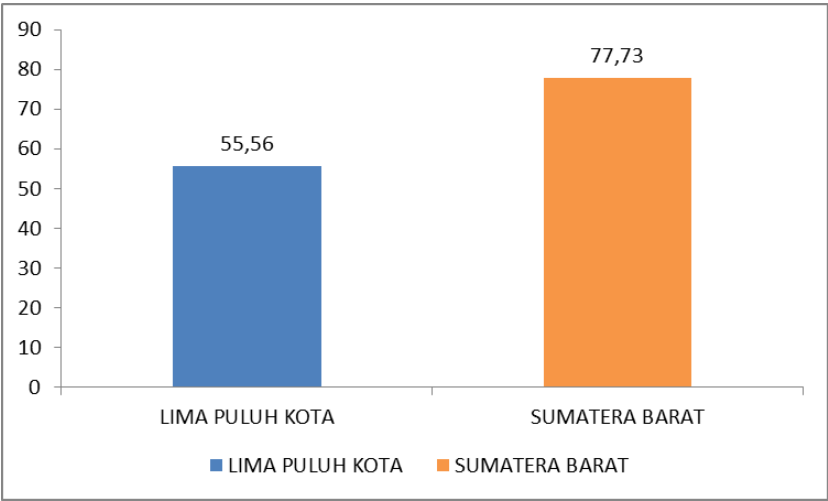
2.4.1.1 Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, deregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel sebagai berikut:

- a. Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, dengan bobot 25%.
- b. Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang PUU yang berkualitas, dengan bobot 25%.
- c. Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil reviu, dengan bobot 35%.
- d. Penataan database PUU, dengan bobot 15%

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian. Penghitungan Indeks reformasi hukum baru dimulai tahun 2023 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, nilai indeks reformasi hukum di tahun 2023 adalah 55,56 dengan predikat cukup. Bila dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, nilai Indeks Reformasi Hukum Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah nilai Provinsi Sumatera barat seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 58
Perbandingan Indeks Reformasi Hukum
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2023



Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.4.1.2 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE memberi peluang

untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota di dasarkan atas beberapa hal: (1) Tata Kelola; (2) Layanan SPBE (3) Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan (4) Sumber Daya Manusia SPBE.

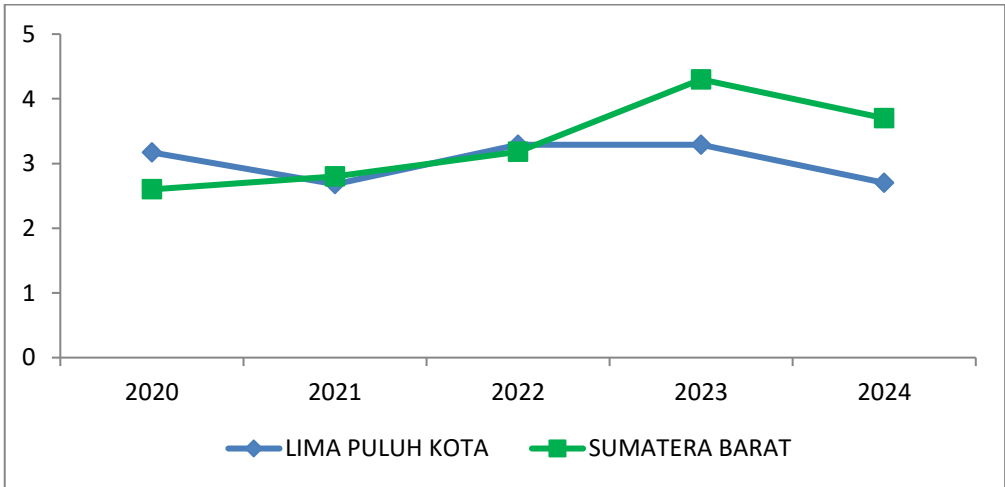
Tabel 2. 86
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No	Tahun	SPBE
1	2020	3,17
2	2021	2,68
3	2022	3,29
4	2023	3,29
5	2024	2,70

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Capaian Indeks SPBE untuk kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada pada rentang nilai indeks antara 2,6 - < 3,5, yang artinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada Kategori **BAIK**. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, pada tahun 2021 capaian Indeks SPBE Kabupaten Lima Puluh Kota berada dibawah capaian Provinsi Sumatera Barat. Namun, pada tahun 2022 capaian indeks Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibanding dengan capaian Provinsi Sumatera Barat. Akan tetapi, pada tahun 2023 dan 2024 kembali berada di bawah capaian Provinsi Sumatera Barat, seperti yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 59
Perbandingan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kominfo Lima Puluh Kota Tahun 2025

2.4.1.3 Indeks Pelayanan Publik

Indeks pelayanan publik merupakan indeks yang diperoleh melalui pemantauan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik dengan unsur penilaian meliputi aspek layanan profesionalisme SDM, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi, pengaduan, inovasi yang dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Pelaksanaan pelayanan publik harus dilihat dalam konteks yang holistic dan sistemik. Pelayanan publik di Indonesia selalu berkaitan dengan tata kelola instansi pemerintah, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik memerlukan unsur-unsur fundamental yang meliputi unsur profesionalisme dan akuntabilitas dari para penyelenggara pelayanan publik. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik

antara lain: (1) Keadilan (*Fairness*); (2) Partisipasi (*Participation*); (3) Akuntabilitas (*Accountability*); (4) Transparansi (*transparency*); (5) Berdayaguna (*useful*); dan (6) Aksesibilitas (*accessibility*).

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan dan mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menghitung Indeks Pelayanan Publik yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Berikut ditampilkan capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota menurut Ombudsman.

Tabel 2. 87
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2024 Berdasarkan Penilaian Ombudsman

Tahun	Indeks Pelayanan Publik
2021	46,93
2022	80,87
2023	85,59
2024	86,02

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas, capaian Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2024 Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota mencapai nilai 86,02 dengan predikat baik. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik pengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017, setiap tahunnya dipublikasikan Indeks Pelayanan Publik masing-masing daerah, dimana Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2024 digambarkan sebagai berikut.

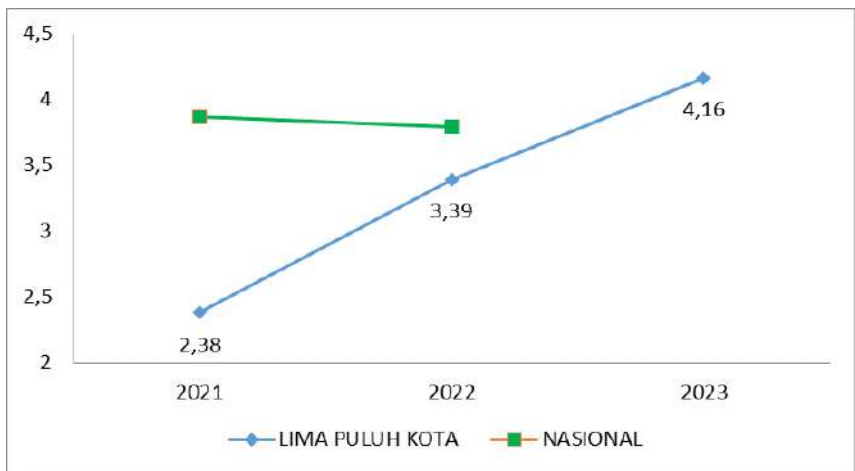
Tabel 2. 88
Nilai Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2021 - 2023 Berdasarkan Penilaian Kemenpan-RB

No.	Tahun	Indeks Pelayanan Publik	Skor
1.	2021	2,38	C-
2.	2022	3,39	B-
3.	2023	4,16	A-

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

Dari tabel di atas, dalam tiga tahun terakhir nilai indeks pelayanan publik Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat, dimana pada tahun 2023 sudah mencapai 4,16 dengan predikat sangat baik. Jika di bandingkan secara nasional, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada di bawah nasional, artinya Pelayanan yang diberikan kepada Publik di Kabupaten Lima Puluh Kota belum sebagus nasional yang ditampilkan pada grafik di bawah ini. Sebagai catatan, Indeks Pelayanan Publik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 belum tersedia.

Grafik 2. 60
Perbandingan Nilai Indeks Pelayanan Publik
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nasional Tahun 2022 - 2023



Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2024

2.4.1.4 Survei penilaian integritas (SPI KPK) (nilai)

Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah survei yang dilakukan terhadap institusi untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai alat ukur risiko korupsi di instansi publik, termasuk Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Tujuan dari SPI adalah untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta mendorong upaya pencegahan korupsi yang telah dilakukan oleh instansi-instansi tersebut. Beberapa masalah umum yang sering muncul dalam penilaian integrasi pemerintah sebagai berikut:

1. Korupsi : Praktik korupsi bisa menjadi salah satu permasalahan utama yang merusak integritas pemerintahan. Penyalahgunaan kekuasaan dan dana publik dapat merugikan masyarakat dan menciptakan ketidakpercayaan.
2. Nepotisme dan Kolusi: Praktik nepotisme (pemberian keuntungan kepada keluarga) dan kolusi (kerjasama ilegal antara individu atau kelompok) dapat merugikan prinsip-prinsip keadilan dan integritas.
3. Kurangnya Transparansi: Kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan atau penyaluran anggaran dapat menciptakan kecurigaan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
4. Pelanggaran Etika: Pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah atau pegawai dapat merusak citra pemerintah dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat.
5. Tidak Efektifnya Sistem Pengawasan: Jika sistem pengawasan internal dan eksternal tidak efektif, risiko terjadinya tindakan korupsi atau pelanggaran etika dapat meningkat.
6. Ketidakpatuhan terhadap Aturan dan Regulasi: Ketidakpatuhan terhadap aturan dan regulasi dapat menjadi indikasi lemahnya budaya kepatuhan dan integritas di lingkungan pemerintahan.
7. Keterbatasan Keterlibatan Masyarakat: Kurangnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pemerintahan dapat menciptakan lingkungan yang kurang akuntabel.
8. Sumber Daya Manusia: Keterbatasan keterampilan, integritas, atau motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya dapat menciptakan celah untuk pelanggaran etika.
9. Lemahnya Sistem Pengaduan dan Perlindungan Whistleblower: Jika tidak ada sistem yang baik untuk melaporkan pelanggaran dan melindungi para pengadu atau *whistleblower*, potensi pelanggaran integritas mungkin tidak terungkap.
10. Ketidakpastian Hukum: Ketidakpastian dalam sistem hukum atau penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi efektivitas upaya penegakan integritas.
11. Risiko perdagangan pengaruh (*trading in influence*) masih ada meski dalam skala rendah. Risiko ini perlu diantisipasi di masa mendatang, terutama karena rawan terjadi saat penentuan program/kegiatan, penentuan pemenang tender, perizinan, pemberian sanksi/denda, rekrutmen pegawai, dan pemberian/penyaluran bantuan.

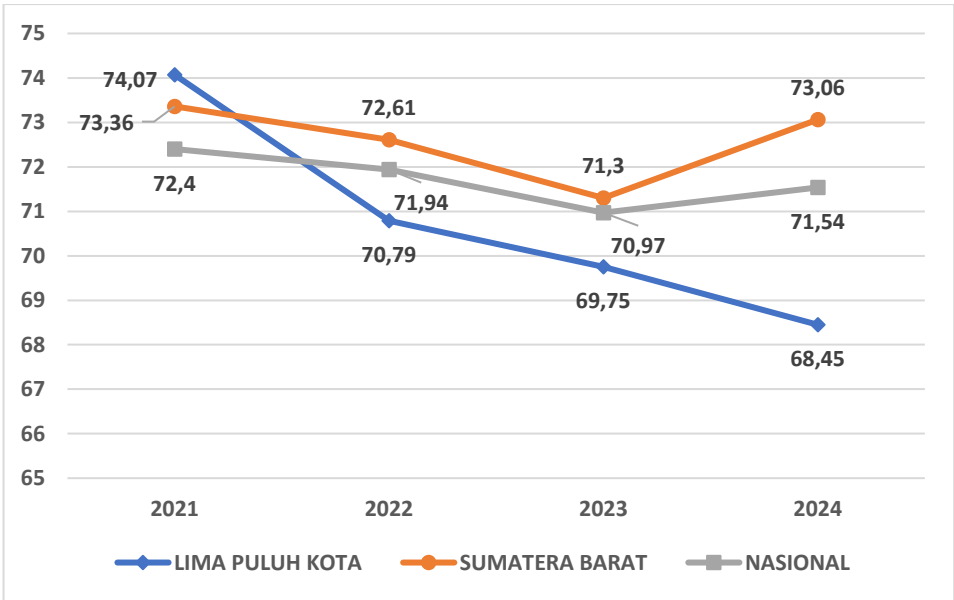
Tabel 2. 89
Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 – 2024

Tahun	Indeks Integritas Kabupaten
2021	74,07
2022	70,8
2023	69,76
2024	68,45

Sumber: KPK RI Tahun 2025

Survei Penilaian Integritas di Kabupaten Lima Puluh Kota baru dilaksanakan tahun 2021. Dari survei tersebut diperoleh Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota seperti yang di tampilkan pada tabel diatas. Dalam tiga tahun terakhir, Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan. Jika dibandingkan dengan nilai Indeks Integritas Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, pada tahun 2024 Nilai Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota masih dibawah nilai Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang ditampilkan dalam grafik berikut.

Grafik 2. 61
Perbandingan Indeks Integritas Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber: KPK RI Tahun 2025

2.4.1.5 Indeks Persepsi Anti Korupsi

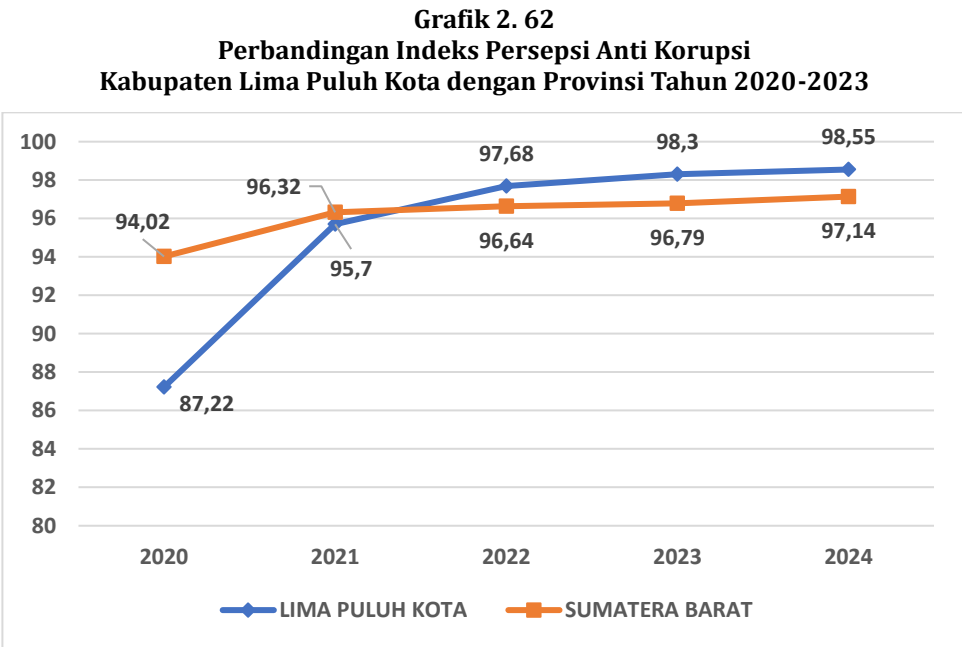
Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah indikator yang digunakan untuk menilai perilaku anti korupsi pada pelayanan data dan informasi statistik yang diberikan oleh BPS berdasarkan persepsi responden. Aspek penghitungan adalah terkait penerapan perilaku anti korupsi dalam memberikan pelayanan yang meliputi tidak ada diskriminasi, tidak ada praktik suap, tidak ada pungutan liar (pungli), serta tidak ada praktik percaloan. Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala 0 (korupsi yang tinggi) hingga 100 (korupsi yang rendah). Oleh karena itu, semakin tinggi nilai persepsi korupsi sebuah negara artinya semakin rendah pula korupsi yang terjadi di negara tersebut.

Tabel 2. 90
Indeks Persepsi Anti Korupsi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Tahun	Indeks Persepsi Anti Korupsi
1.	2020	87,22
2.	2021	95,70
3.	2022	97,68
4.	2023	98,30
5.	2025	98,55

Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari empat tahun terakhir nilai Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota selalu mengalami kenaikan, artinya korupsi di Kabupaten Lima Puluh Kota semakin rendah setiap tahunnya. Jika dibandingkan dengan nilai Provinsi Sumatera Barat, sejak tahun 2022 nilai indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Lima Puluh Kota berada di atas Provinsi Sumatera Barat seperti yang ditampilkan pada grafik dibawah ini.



Sumber: BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

2.4.2 Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah yang Tangguh & Demokrasi Substansial

2.4.2.1 Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan

Pemerintah Daerah dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan bahwa Satuan Polisi pamong Praja mempunyai tugas dalam menegakkan Peraturan Daerah, untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sehingga diperlukan upaya penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Sehingga untuk itu diperlukan pengukuran kinerja yakni Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan. Definisi operasional Indikator ini yaitu perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan. Berikut ini data capaian terkait dengan indikator dimaksud di Kabupaten Lima Puluh Kota :

Tabel 2. 91
Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 - 2024

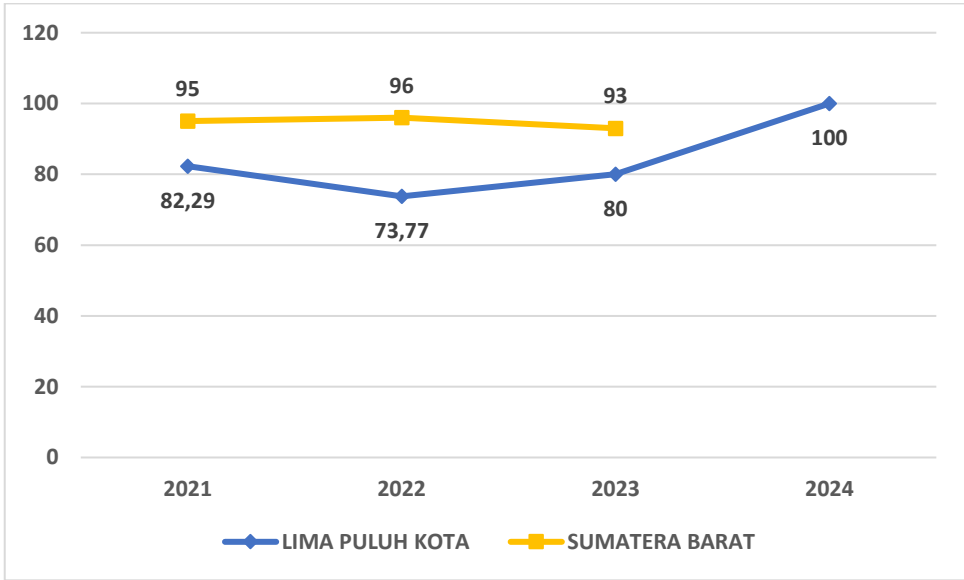
No.	Tahun	Jumlah Seluruh Kasus Pelanggaran Perda	Jumlah Kasus Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan (%)
1	2021	350	288	82,29
2	2022	61	45	73,77
2	2023	15	12	80
4	2024	51	51	100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, dari tahun 2021-2024 persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota selalu meningkat. Pada tahun 2024, Persentase Penanganan Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah 100%, artinya

dari 51 Kasus Pelanggaran Perda di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat terselesaikan seluruhnya. Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat, persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dari persentase Provinsi Sumatera Barat yang ditampilkan pada grafik berikut.

Grafik 2. 63
Perbandingan Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan di Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019-2022



Sumber: Satpol PP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.4.2.2 Angka Kriminalitas (per 100.000)

Angka Kriminalitas menjadi salah satu faktor pembentuk iklim berinvestasi. Semakin kecil tingkat kriminalitas pada suatu wilayah maka semakin besar tingkat keamanan dari gangguan oknum masyarakat pada wilayah tersebut. Kriminalitas ini terdiri dari beberapa jenis, di antaranya adalah kriminalitas konvensional, kriminalitas transnasional, kriminalitas siber dan kriminalitas ekonomi. Adapun dampak kriminalitas yang ditimbulkan dalam masyarakat di antaranya adalah : (1) ketidakamanan yang timbul dan adanya rasa takut, (2) gangguan ketertiban sosial, (3) hilangnya kepercayaan, (4) timbulnya biaya sosial dan ekonomi yang besar, (5) stigma dan diskriminasi.

Berdasarkan paparan di atas, tentu hal ini berpengaruh kepada iklim daya saing investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar manusia, semakin tinggi angka kriminalitas, maka semakin banyak tindak kejahatan dalam masyarakat, yang bisa menjadi indikasi bahwa kondisi masyarakat tidak aman dan sebaliknya semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat. Di samping itu, tinggi rendahnya angka kriminalitas juga menunjukkan kualitas sumber daya manusia dari sisi perilaku, karakter dan lingkungan yang sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Perkembangan angka kriminalitas dan persentase penyelesaian kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 92
Angka Kriminalitas Per 100.000 Penduduk dan Persentase Penyelesaian Gangguan Kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 - 2023

Tahun	Jumlah Penduduk	Angka Kriminalitas	Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
2020	383.525	252	82
2021	385.634	60	129
2022	388.375	78	48
2023	396.427	122	76
2024	401.086	187	76

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Angka kriminalitas di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 cenderung berfluktuasi dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2020. Angka kriminalitas pada tahun 2024 sebesar 187, mengindikasikan bahwa setiap 187 orang dari 100.000 penduduk berisiko terkena tindak kejahatan. Jika ditinjau dari sisi tingkat penyelesaian gangguan Kamtibmas, maka sampai tahun 2024 penyelesaian gangguan Kamtibmas belum maksimal.

2.4.2.3 Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat

Indeks Kinerja Organisasi atau IKO merupakan adaptasi dari *organizational performance index* yang digunakan untuk mengukur perubahan kinerja organisasi masyarakat/ormas dan hubungannya dengan penguatan kapasitas serta dampaknya kepada masyarakat. Indeks Kinerja Organisasi (IKO) diadopsi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) dari pendekatan Program USAID MADANI untuk menjadi sebuah alat mandiri yang akan membantu menilai organisasi masyarakat berdasarkan kualitas kerja dan pada saat bersamaan mengeksplorasi kapasitas organisasi berdasarkan penilaian kapasitas organisasi. Indeks Kinerja Organisasi memuat 5 domains dan 16 sub domains yang kemudian dapat menjadi dasar bagi organisasi masyarakat untuk mengembangkan organisasi kedepan. 5 domains Indeks Kinerja Organisasi tersebut yaitu Efektivitas Organisasi, Efisiensi Organisasi, Relevansi/Hubungan Organisasi, Keberlanjutan Organisasi dan Ketahanan Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan sensus ke 42 organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdata di dalam SIORMAS Kemendagri yaitu suatu sistem informasi sebagai Sarana Aktivitas dan Interaksi Antara ORMAS dengan Pemerintah. Berdasarkan hasil sensus tersebut, maka pada tahun 2023 indeks kinerja organisasi masyarakat adalah kurang (<50) masih di bawah target yang ditetapkan yaitu cukup (>50). Permasalahan masih kurangnya indeks kinerja organisasi masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain organisasi masyarakat belum secara aktif berperan dalam pembangunan daerah, sumber daya terbatas, keuangan belum mandiri, program kerja tidak jelas, manfaat organisasi masyarakat di daerah belum dirasakan masyarakat. Masalah lain adalah kaderisasi organisasi masyarakat belum maksimal, sumber pendapatan organisasi masyarakat masih mengandalkan pihak lain, pembinaan dari pemerintah belum maksimal, dan kontrol masyarakat terhadap kiprah organisasi masyarakat masih terbatas.

2.4.3 Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

2.4.3.1 Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang mengatur mengenai Kerja Sama Daerah dijelaskan bahwa Kerja Sama Daerah dapat dilakukan oleh daerah dengan daerah lain, pihak ketiga, atau lembaga atau pemerintah di luar negeri dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama dengan daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela. Kerja sama wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Berikut ini data persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan:

Tabel 2. 93
Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No.	Tahun	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan
1.	2019	80 %
2.	2020	100 %
3.	2021	100 %
4.	2022	100 %
5.	2024	-

Sumber: Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Kerjasama wajib yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Barat dan luar Provinsi Sumatera Barat

dari tahun ke tahun menunjukkan kemajuan yang signifikan dimana pada tahun 2020-2024, dari jumlah kerjasama yang ditargetkan semuanya dapat terealisasi atau mencapai 100%, sedangkan untuk capaian tahun 2024 belum ada.

2.4.3.2 Penyelesaian gangguan Kamtibmas

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 94
Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Tahun	Gangguan Kamtibmas			Penyelesaian Gangguan Kamtibmas (%)
	Lapor	Selesai	Tunggakan	
2020	968	798	229	82
2021	232	300	28	129
2022	302	144	158	48
2023	482	365	123	76
2024	752	578	112	76

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dalam lima tahun terakhir, tahun 2020 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas tertinggi berdasarkan laporan yang masuk ke Pemerintah Daerah, dimana penyelesaiannya pun juga tidak terlalu optimal, hanya sebesar 82%, sehingga terdapat 776 tunggakan kasus yang belum terselesaikan, sedangkan pada tahun 2021 merupakan tahun dengan gangguan Kamtibmas terendah, dimana penyelesaiannya mencapai 129% dan hanya terdapat 28 tunggakan kasus yang belum terselesaikan.

2.4.4 Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah

2.4.4.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Pendidikan

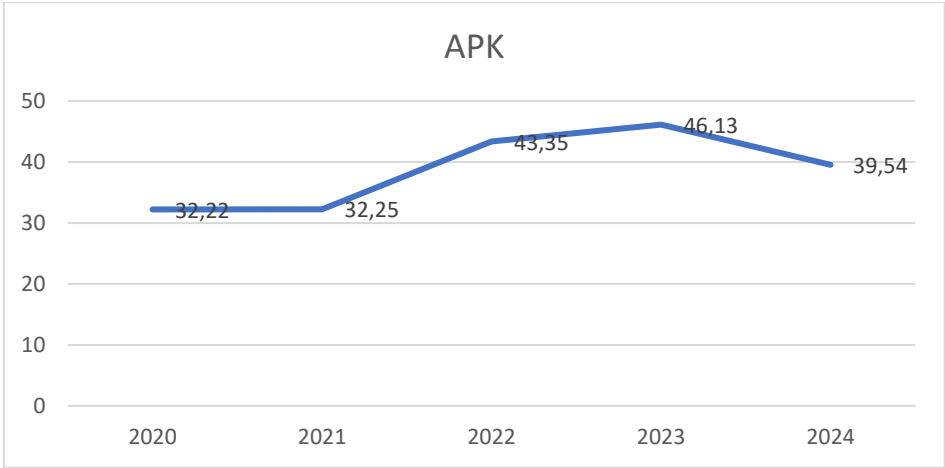
i. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya yang sedang bersekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tersebut. APK didapat dengan membagi jumlah penduduk yang sedang bersekolah tanpa memperhitungkan umur pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan Permendikbud 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, yang menitikberatkan pada peletakan dasar ke arah pertumbuhan dan 6 (enam) perkembangan: agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial-emosional, dan seni, sesuai dengan keunikan dan tahap-tahap perkembangan sesuai kelompok usia yang dilalui oleh anak usia dini.

Untuk APK PAUD, maka kelompok umur yang disasar adalah anak usia 3-6 tahun, sehingga untuk APK PAUD ini sendiri merupakan rasio jumlah siswa PAUD terhadap jumlah anak usia 3-6 tahun, berdasarkan data yang ada, maka berikut ditampilkan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024.

Grafik 2. 64
APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

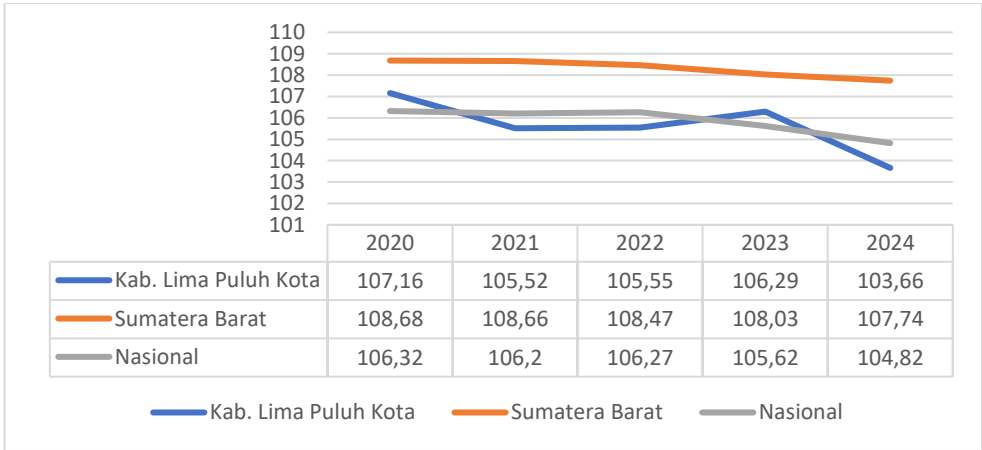


Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Perkembangan APK PAUD Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2023 mengalami peningkatan yang signifikan dan terjadi penurunan di tahun 2024. Bila dilihat dari nilai persentasenya, maka angka 39,54 pada tahun 2024 masih cukup rendah, artinya tingkat partisipasi penduduk untuk menyekolahkan anak di usia PAUD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa hal, dimana saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota baru memiliki 1 buah TK negeri dan berlokasi di Kecamatan Harau sementara sisanya merupakan TK yang dikelola oleh yayasan atau berstatus swasta.

Hal ini menjadi salah satu pemicu rendahnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di TK swasta yang biayanya lebih tinggi bila dibandingkan dengan TK Negeri. Di samping itu tidak semua TK swasta ini mudah diakses oleh masyarakat mengingat jumlah TK swasta ini pun belum seimbang dengan jumlah anak usia sekolah PAUD. Faktor lain yang memicu masyarakat untuk tidak menyekolahkan anak di usia PAUD adalah tidak adanya kebijakan yang tegas terkait pentingnya pendidikan PAUD. Untuk itu ke depan beberapa upaya akan dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain menyusun Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah tentang kewajiban pendidikan 1 tahun Pra Sekolah Dasar, aturan 1 jorong 1 PAUD serta aturan yang mendorong perubahan status TK Yayasan menjadi TK Negeri.

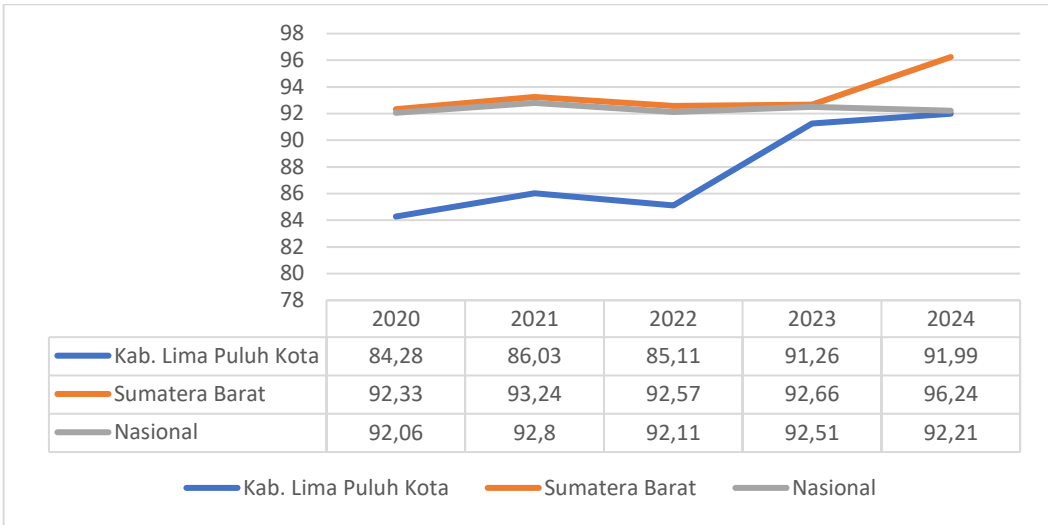
Grafik 2. 65
Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 - 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami tren menurun, dari 107,16 persen pada tahun 2020 menjadi 103,66 persen pada tahun 2024. Namun demikian, angka tersebut menunjukkan tingkat partisipasi penduduk untuk bersekolah di usia 7-12 sudah tinggi dan Kabupaten Lima Puluh Kota telah mampu menampung penduduk usia sekolah tersebut lebih dari target yang sesungguhnya. Akan tetapi, Angka Partisipasi Kasar (APK) 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 masih di bawah angka nasional.

Grafik 2. 66
Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15
Tahun Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024



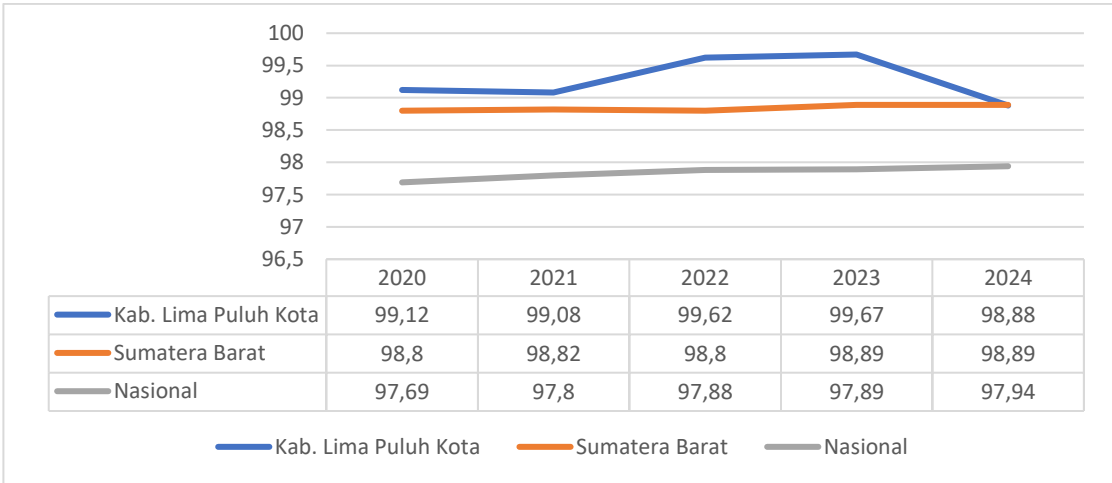
Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berada di bawah Provinsi dan Nasional, artinya belum semua penduduk berusia 13-15 tahun tertampung semuanya di sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Akan tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

ii. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Secara sederhana indikator ini juga merupakan ukuran daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

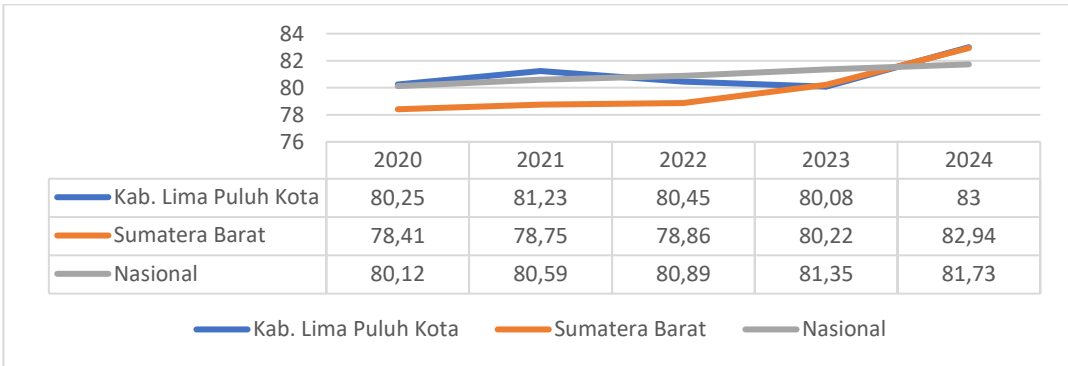
Grafik 2. 67
Angka Partisipasi Murni (APM) 7 – 12 Tahun
Menurut Kabupaten, Provinsi Dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir selalu berada di atas Provinsi dan nasional. APM 7-12 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 menunjukkan angka 98,88 persen, artinya sekitar 98,88 persen penduduk di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 7-12 tahun bersekolah tepat waktu dijenjang SD/ sederajat.

Grafik 2. 68
Angka Partisipasi Murni (APM) 13 – 15 Th
Menurut Kabupaten, Provinsi dan Nasional Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS RI dan BPS Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada grafik diatas, Angka Partisipasi Murni (APM) 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 sampai tahun 2024 berfluktuatif. Terjadi peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2024. APM 13-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar dari tahun 2023 menjadi sebesar 83.

iii. Angka Partisipasi Sekolah

Untuk melihat tingkat perkembangan pendidikan kabupaten Lima Puluh kota dapat digambarkan dengan Persentase Angka partisipasi Sekolah (APS), Persentase Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Persentase Angka Partisipasi Murni (APM). Angka partisipasi Sekolah (APS) adalah jumlah penduduk yang masih sekolah pada masing-masing kelompok usia sekolah dibagi dengan jumlah penduduk di masing-masing kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Berdasarkan indikator SPM urusan pendidikan, Angka partisipasi Sekolah (APS) dibagi dalam tiga kelompok umur yaitu APS 5-6 tahun, APS 7-15 tahun dan APS 7-18 tahun kesetaraan.

1) APS 5-6 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 5-6 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan. Capaian APS 5-6 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 95
Capaian APS 5-6 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

Tahun	Capaian Aps
2022	80,25
2023	49,32
2024	69,28

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 5-6 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan yang sangat signifikan. APS 5-6 tahun pada tahun 2023 sebesar 49,32 dan di tahun 2024 sebesar 69,28. Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 19,96 dimana di tahun 2024 jumlah anak usia 5-6 tahun yang sedang belajar di PAUD/TK jauh berkurang dibandingkan tahun 2023.

2) APS 7-15 Tahun

Angka Partisipasi Sekolah 7-15 tahun diperoleh dari jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan. Capaian APS 7-15 tahun Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 96
Capaian APS 7-15 Tahun Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

Tahun	Capaian Aps
2022	99,32
2023	99,56
2024	99,36

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-15 tahun dalam 2 tahun terakhir mengalami penurunan. APS 7-15 tahun pada tahun 2023 sebesar 99,56 dan di tahun 2024 sebesar 99,36 . Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami penurunan sebesar 0,20 dimana hampir semua anak usia 7-15 tahun sedang belajar di pendidikan dasar dan menengah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

3) APS 7-18 Tahun Kesetaraan

Angka Partisipasi Sekolah 7-18 tahun kesetaraan diperoleh jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Capaian APS 7-18 tahun kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 97
Capaian APS 7-18 Tahun Kesetaraan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022-2024

Tahun	Capaian Aps
2022	28,55
2023	30,52
2024	36,85

Sumber : Rapor Pendidikan Kemendikbud Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APS 7-18 tahun kesetaraan dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan. APS 7-18 tahun kesetaraan pada tahun 2023 sebesar 30,52 dan di tahun 2024 sebesar 36,85. Artinya, 2 tahun terakhir tersebut mengalami peningkatan sebesar 6,33 dimana masih banyak warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

iv. Ketersediaan sekolah/Penduduk usia sekolah pendidikan dasar dan menengah

Dengan mengetahui rasio ketersediaan sekolah baik tingkat pendidikan dasar maupun menengah, maka akan diketahui tingkat kemampuan sekolah untuk menampung semua penduduk baik di usia pendidikan dasar maupun menengah. Rasio ini diperoleh dengan membandingkan jumlah sekolah baik di tingkat dasar maupun menengah dengan jumlah penduduk pada usia pendidikan dasar maupun menengah dalam 10.000 penduduk. Jumlah sekolah di kabupaten lima puluh kota dari tahun 2020-2024 cenderung terus bertambah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2. 98
Jumlah Sekolah Menurut Jenisnya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

Jenis Sekolah	2020	2021	2022	2023	2024
TK	223	247	259	265	262
SD/ Sederajat	378	381	382	382	385
SMP/ Sederajat	84	84	87	88	89
SMA/ Sederajat	34	33	33	38	39
D1 s/d Universitas	1	1	1	1	1

Sumber BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

v. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh langsung terhadap

peningkatan kesejahteraan penduduk yang bersangkutan. Sedangkan pengaruh tidak langsung akan terlihat dari pola pikir masyarakat, karena semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya, maka cara berpikir mereka akan lebih maju sehingga lebih mudah menerima perubahan dan kemajuan, berikut dapat digambarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan atau Ijazah tertinggi yang dimiliki oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota yang berusia 15 tahun ke atas.

Dari data yang disajikan pada tabel dibawah ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah pada tahun 2024, sekitar 11,49 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan dasar, 5,56 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah pertama dan 6,63 persen penduduk masih sekolah di jenjang pendidikan menengah atas dan perguruan tinggi. Sedangkan penduduk yang tidak/belum sekolah baik laki-laki maupun perempuan mencapai 5,55 persen dan penduduk yang tidak lagi sekolah sebesar 70,77 persen.

Tabel 2. 99
Persentase Penduduk Usia 5 Tahun Ke Atas
menurut Tingkat Partisipasi Sekolah dan Jenis Kelamin Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Banyaknya		
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	L + P (%)
1	Tidak/ Belum pernah sekolah	5,71	5,41	5,55
2	Masih sekolah SD	10,90	12,05	11,49
3	Masih sekolah SMP	6,08	5,06	5,56
4	Masih sekolah ≥ SMA	6,65	6,61	6,63
5	Tidak sekolah lagi	70,66	70,88	70,77
Jumlah		100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, apabila dikelompokkan lebih fokus kepada jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan, maka terdapat sebanyak 64.823 jiwa telah menamatkan SD/ sederajat. Hal ini tentu berpengaruh terhadap kondisi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin pada tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 100
Jumlah Penduduk Berdasarkan
Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Jenis kelamin (jiwa)		Total (jiwa)
	Pria	Wanita	
Tamat SD/ sederajat	33.757	31.066	64.823
SLTP/ sederajat	23.862	24.801	48.663
SMA/ sederajat	36.500	37.162	73.662
Diploma I/II	356	1.050	1.406
Akademi/ Diploma III/ S. Muda	2.218	3.768	5.986
Diploma IV/ Strata I	6.844	13.137	19.981
Strata II	357	452	809
Strata III	13	9	22
Jumlah	103.907	111.445	213.352

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Jika dilihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah tertinggi selama 5 tahun terakhir, persentase penduduk yang tidak mempunyai ijazah SD semakin menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa selama 5 tahun terakhir tingkat partisipasi sekolah masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota semaki meningkat. Sementara persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/ sederajat dan jenjang SMP/ sederajat mengalami fluktuasi. Untuk lebih jelasnya, persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/ STTB tertinggi yang dimiliki 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 101
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut
Ijazah/ STTB Tertinggi Yang Dimiliki dan Jenis Kelamin Tahun 2020-2024

Tingkat Pendidikan	Tahun														
	2020			2021			2022			2023			2024		
	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
Tidak Punya Ijazah SD	20,34	21,84	21,11	15,71	21,12	18,48	15,65	18,27	16,99	14,91	20,89	17,94	16,07	20,07	18,12
SD/ sederajat	28,37	23,85	26,06	27,20	19,56	23,29	26,40	23,13	24,73	26,36	27,74	24,53	21,70	20,30	20,98
SMP/ sederajat	21,64	19,49	20,54	25,32	20,50	22,85	24,80	20,47	22,59	22,30	19,12	20,69	26,84	21,58	24,14
SMA/ sederajat	24,37	25,79	25,08	23,64	25,73	24,71	33,14	38,12	35,69	36,44	37,24	36,84	35,40	38,04	36,75
Diploma I/II/III	1,27	1,15	1,22	1,69	2,44	2,07									
Diploma IV/S1/S2/S3	4,01	7,88	5,99	6,44	10,67	8,61									
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

vi. Pendidikan Kesetaraan

Pendidikan kesetaraan adalah pendidikan non formal yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. Pendidikan non formal sendiri menurut UU dan Peraturan Pemerintah RI tentang pendidikan menyatakan bahwa pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), Pusat kegiatan belajar Masyarakat (PKBM), atau satuan sejenis lainnya.

Tabel 2. 102
Jumlah Sasaran Penduduk Pendidikan Kesetaraan
dan Jumlah PKBM di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah PKBM	24
2.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	2.226
3.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 7-21 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah di layani/ diintervensi	1.068
4.	Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata	725

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2023

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa Jumlah Sasaran Penduduk Usia 21 Tahun ke atas yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang telah terdata sebanyak 725 orang. Jumlah ini dapat saja makin bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih baik. Di samping itu, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tersebar di 13 Kecamatan belum dapat memenuhi kebutuhan di seluruh Nagari, masih ada penduduk sasaran yang belum terlayani karena jarak PKBM dari tempat tinggalnya tidak mudah dijangkau, disamping tingkat kesadaran penduduk terhadap pentingnya menamatkan pendidikan dasar dan menengah yang masih cukup rendah.

vii. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar

Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar merupakan persentase atas jumlah anak usia 7-12 Tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar terhadap jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 88,52%, artinya anak usia 7-12 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SD sederajat baru sebesar 88,52%.

viii. Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama

Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama merupakan persentase atas jumlah anak usia 13-15 Tahun yang sudah tamat

atau sedang belajar di sekolah menengah pertama terhadap jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten bersangkutan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, pada tahun 2024 tersebut, tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 79,51%, artinya anak usia 13-15 tahun yang telah tamat dan yang sedang sekolah di SMP sederajat baru sebesar 79,51%.

B. Urusan Wajib Kesehatan

i. Status Gizi Balita

Status gizi balita dinilai menurut 3 indeks, yaitu Berat Badan Menurut Umur (BB/U), Tinggi Badan Menurut Umur (TB/U), dan Berat Badan Menurut Tinggi Badan (BB/TB). BB/U adalah berat badan anak yang dicapai pada umur tertentu. TB/U adalah tinggi badan anak yang dicapai pada umur tertentu. Dan BB/TB adalah berat badan anak dibandingkan dengan tinggi badan yang dicapai. Ketiga nilai indeks status gizi di atas dibandingkan dengan baku pertumbuhan WHO. Perkembangan persentase *Balita Kurus* dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami tren meningkat.

Hal ini dapat disebabkan oleh pola asuh yang belum dilakukan dengan baik oleh orang tua terhadap balita sehingga menyebabkan balita tidak menerima asupan gizi yang memadai. Sedangkan tren persentase Balita Pendek menurun dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami fluktuasi. Jumlah balita gizi kurang, pendek dan kurus dapat diturunkan melalui intervensi penanganan yang baik melalui pemberian makanan tambahan serta melalui konseling dan pemantauan pertumbuhan tiap bulan. Perkembangan balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 103
Status Gizi Balita Berdasarkan BB/U, TB/U, dan BB/TB
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Balita Gizi Kurang (BB/U)		Balita Pendek (TB/U)		Balita Kurus (BB/TB)	
2020	1.865	7,84%	1.973	8,30%	1.161	4,88%
2021	2.029	8,58%	1.975	8,36%	1.030	4,36%
2022	2.263	9,53%	2.050	8,63%	1.074	4,52%
2023	1.050	4,57%	2.004	8,72%	1.050	4,57%
2024	2.628	11,0%	2.045	8,6%	1.145	4,81%

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025, Data Diolah

ii. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan TB/U adalah sebagai standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1995/Menkes/SK/XII/2010, berikut disampaikan persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 berdasarkan e-PPGBM.

Tabel 2. 104
Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020 - 2024 berdasarkan e-PPGBM

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>					
	2020	2021	2022	2023	2024	2024
Lima Puluh Kota	8,29	8,36	8,63	8,72	8,59	8,59

Sumber e-PPGBM, Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan e-PPGBM (Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat secara elektronik), sejak tahun 2020 persentase balita stunting di kabupaten Lima Puluh Kota mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2024 angka e-PPGBM nya sebesar 8,59% dengan jumlah anak sebanyak 2.046 anak stunting yang tersebar di 13 kecamatan atau 79 nagari. Persentase Balita Stunting berdasarkan hasil survei dapat dilihat pada tabel berikut ini.

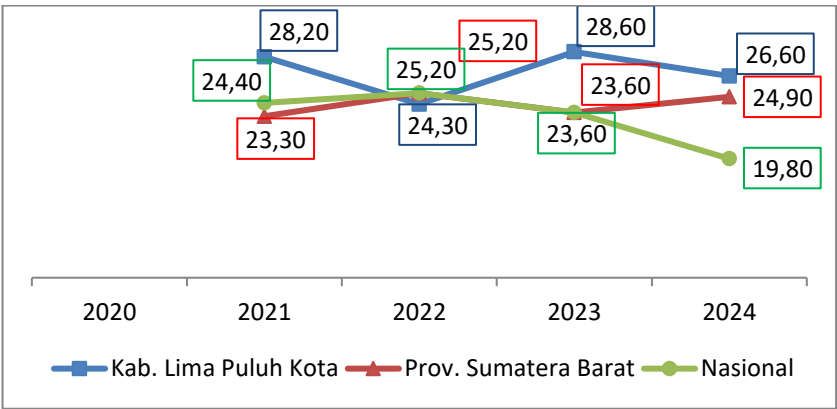
Tabel 2. 105
Persentase Balita Stunting berdasarkan Hasil Survei
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2023

Wilayah	Persentase Balita <i>Stunting</i>				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	-	28,2	24,3	28,6	26,6

Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Berdasarkan hasil survei SSGI (2019-2022) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami penurunan sampai tahun 2022 namun berdasarkan hasil Survei Kesehatan Indonesia Pada tahun 2023 naik menjadi 28,6% dan mengalami penurunan lagi sebesar 2% di tahun 2024 menjadi 26,6%. Pada tahun 2020 tidak diadakan survei sehingga data tidak tersedia. Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi dan Nasional ditampilkan pada grafik 2.69 berikut.

Grafik 2. 69
Perbandingan Persentase Balita Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota
dengan Provinsi dan Nasional Tahun 2021 - 2024 berdasarkan Hasil Survei



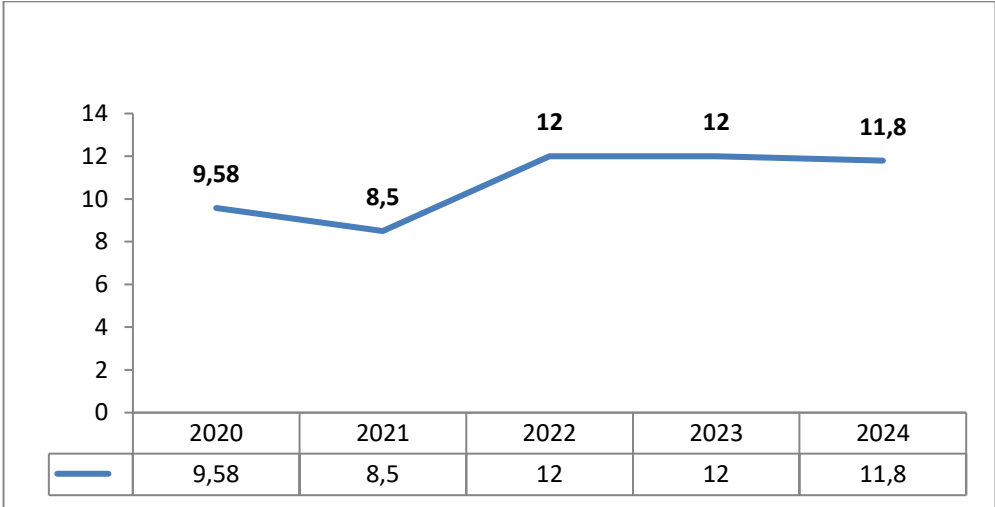
Sumber: SSGBI 2019; SSGI 2021-2022; SKI 2023

Dilihat dari grafik di atas, pada tahun 2024 persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota turun menjadi 26,6% dimana pada tahun sebelumnya 28,6%. Jika dibandingkan dengan Provinsi dan Nasional, persentase balita stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 masih di atas angka Provinsi dan Nasional, sehingga pemerintah diharapkan untuk meningkatkan upaya konvergensi dan sinergitas dalam percepatan penurunan persentase balita stunting.

iii. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan angka yang menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Perkembangan Angka Kematian Bayi dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 70
Angka Kematian Bayi (AKB) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Walaupun terjadi fluktuasi Angka Kematian Bayi dari tahun 2020 ke 2024, derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih termasuk baik dibandingkan secara nasional, Angka Kematian Bayi pada tahun 2024 sebesar 11,8 sudah berada di bawah target nasional tahun 2024 sebesar 16 per 1.000 kelahiran. Beberapa penyebab kematian bayi terbesar adalah Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan bawaan, pneumonia, diare dan beberapa penyebab lainnya. Jumlah kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 106
Kematian Bayi Berdasarkan Penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

Penyebab Kematian Bayi	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Berat Badan Lahir Rendah	16	15	16	16	28
Asfiksia	11	5	9	8	3
Kelainan Bawaan	3	3	5	8	2
Pneumonia	2	1	5	3	2
Diare	1	2	1	0	0
Lain-lain	27	24	28	28	22
Total	60	50	64	63	57

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

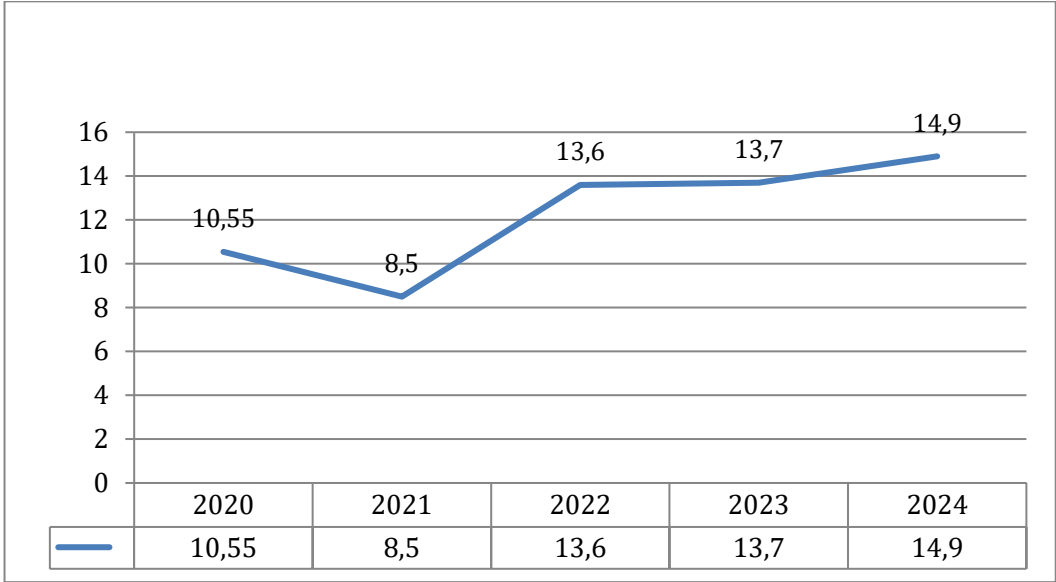
Kematian bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya status kesehatan ibu yang tidak baik yaitu pada saat kehamilan ibu mengalami Kurang Energi Kronis (KEK), anemia, dan penyakit penyerta lainnya. Kematian bayi dengan penyebab asfiksia, faktor yang dapat mengakibatkan pada kasus ini karena faktor komplikasi pada ibu hamil, faktor keterampilan dan sikap tenaga kesehatan penolong persalinan kurang baik.

Berdasarkan tabel di atas, kematian bayi berdasarkan penyebab di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir mencapai angka terendah pada tahun 2021 sebesar 50. Pada tahun 2024, kematian bayi tercatat sebanyak 57 dengan kategori penyebab terbanyak Lain-lain diikuti oleh kategori Berat Badan Lahir Rendah (BBLR).

iv. Angka Kematian Balita (AKBa)

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBa Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 71
Angka Kematian Balita dari Tahun 2020 - 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota



Sumber: BPS Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Dari grafik di atas, terlihat bahwa Angka Kematian Balita sejak tahun 2020 sampai 2024 menunjukkan tren yang meningkat, dari 8,5 di tahun 2021 menjadi 14,9 di tahun 2024. Hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan tempat tinggal termasuk penurunan pemeliharaan kesehatan terhadap balita walau belum terlalu signifikan.

v. **Angka Kematian Ibu (AKI)**

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri, atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa Memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu di Kabupaten Lima Puluh Kota sejak tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

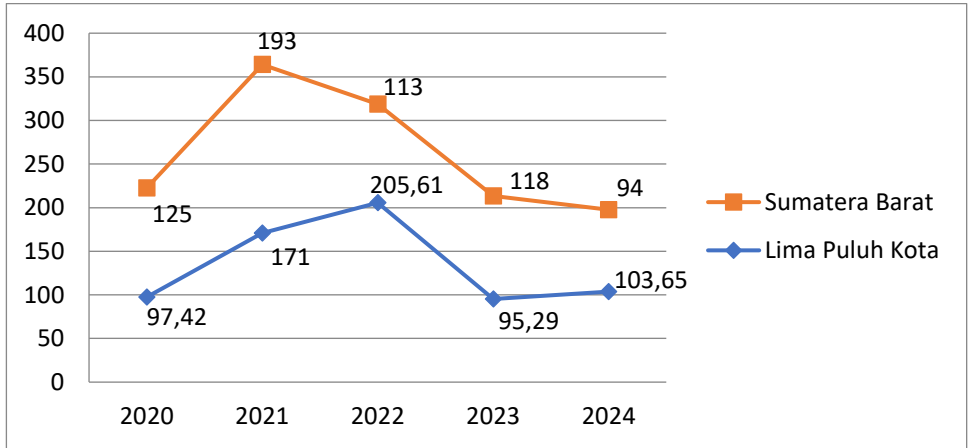
Tabel 2. 107
Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Wilayah	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup) (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	97,42	171	205,61	95,29	103,65

Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024, mengalami fluktuatif, artinya terjadi kenaikan dan penurunan, meskipun demikian AKI kondisi terakhir yaitu tahun 2024 pada angka 103,65 yang mana angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan awal, dimana tahun 2020 berada pada angka 97,42. Namun demikian upaya-upaya yang dilakukan selama tahun 2024, belum mampu menekan AKI dari 95,29 pada tahun 2023 menjadi 103,65 di tahun 2024. Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI) Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 72
Perbandingan Angka Kematian Ibu (AKI)
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2024



Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat; BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari grafik di atas, Angka Kematian Ibu Kabupaten Lima Puluh Kota masih berada dibawah angka Provinsi. Sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, Pemerintah Daerah perlu melakukan program kegiatan yang menurunkan angka kematian ibu. Upaya percepatan penurunan AKI dapat dilakukan dengan menjamin agar setiap ibu mampu mengakses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas pelayanan kesehatan, perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi, perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi, dan pelayanan keluarga berencana termasuk KB pasca persalinan. Penurunan kematian ibu dan anak tidak dapat lepas dari peran pemberdayaan masyarakat, yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan kelas ibu hamil dan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). P4K bertujuan meningkatkan peran aktif suami (suami Siaga), keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Program ini juga meningkatkan persiapan menghadapi komplikasi pada saat kehamilan, termasuk perencanaan pemakaian alat/obat kontrasepsi pasca persalinan. Kelas ibu hamil merupakan sarana bagi ibu hamil dan keluarga untuk belajar bersama tentang kesehatan ibu hamil yang dilaksanakan dalam bentuk tatap muka dalam kelompok.

vi. Persentase Bayi Yang Diimunisasi Per Puskesmas dan Kecamatan

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017, bahwa untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diperlukan upaya untuk mencegah terjadinya suatu penyakit melalui imunisasi, dimana pemerintah wajib memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan/meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga bila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Perkembangan persentase bayi yang diimunisasi per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.108
Persentase Bayi Yang Diimunisasi
Per Puskesmas dan Kecamatan tahun 2020 - 2024

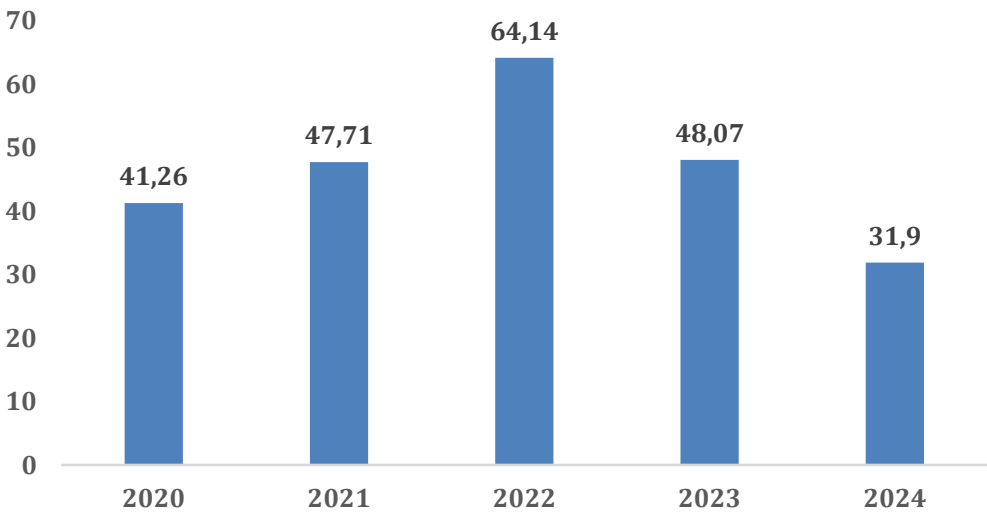
Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2023	2024	2024
Payakumbuh	Koto Baru Simalanggang	44,1	48,3	46,2	55,30	16,00
Akabiluru	Batuhampar	60,5	94,6	53,1	40,70	19,90
	Piladang	52,3	42,4	86,7	83,80	47,50
Luak	Mungo	35,2	37,8	40,8	37,60	24,20
Lareh Sago Halaban	Halaban	46,7	38,4	86,2	45,80	28,40
	Pakan Raba'a	24,3	21,8	77,4	61,60	26,70
Situjuah Limo Nagari	Situjuah	17,8	17,3	50,7	47,90	38,00

Kecamatan	Nama Puskesmas	Tahun				
		2020	2021	2023	2024	2024
Harau	Taram	56,8	85	74,6	63,00	53,60
	Tanjung Pati	51,6	49,7	90,0	52,40	60,20
Guguak	Dangung-Dangung	42,3	51,7	92,9	33,30	25,50
	Padang Kandis	21,7	19	55,2	37,30	32,30
Mungka	Mungka	31,2	33,3	47,0	47,50	20,20
Suliki	Suliki	20,7	26,4	34,8	30,30	19,10
Bukik Barisan	Maek	34,6	28,8	30,2	25,70	22,30
	Baruah Gunuang	33,6	52,3	48,9	39,10	30,80
	Banja Laweh	59,5	85,5	82,2	31,10	29,20
Gunuang Omeh	Koto Tinggi	5,9	6,7	20,0	37,20	20,30
Kapur IX	Muaro Paiti	50,3	35,5	81,9	59,80	44,80
	Sialang	32,9	35,1	87,6	54,70	43,00
Pangkalan Koto Baru	Pangkalan	39,6	47,4	84,3	45,20	32,90
	Rimbo Data	70,9	89,5	73,6	65,30	31,70
	Gunuang Malintang	75,2	103,2	52,4	63,40	35,50

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. 73
Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, cakupan imunisasi dasar lengkap di Kabupaten Lima Puluh Kota selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan cakupan tertinggi pada tahun 2022. Pada tahun 2020 cakupan imunisasi dasar sebesar 41.26. Namun pada tahun 2021 dan 2022 terjadi peningkatan kembali. Data terakhir menunjukkan cakupan imunisasi dasar lengkap tahun 2024 sebesar 31,9%. Bila dikaitkan dengan target pencapaian RPJMN 2024 sebesar 90%, maka perlu upaya dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk mencapai target tersebut.

vii. Cakupan kepesertaan JKN

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (mandatory) berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh

Pemerintah. Upaya ini untuk memastikan bahwa pemenuhan layanan kesehatan menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk yang menghadapi kesulitan finansial. Peningkatan cakupan ini dilakukan dengan meningkatkan jumlah masyarakat yang memiliki jaminan kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Cakupan Kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

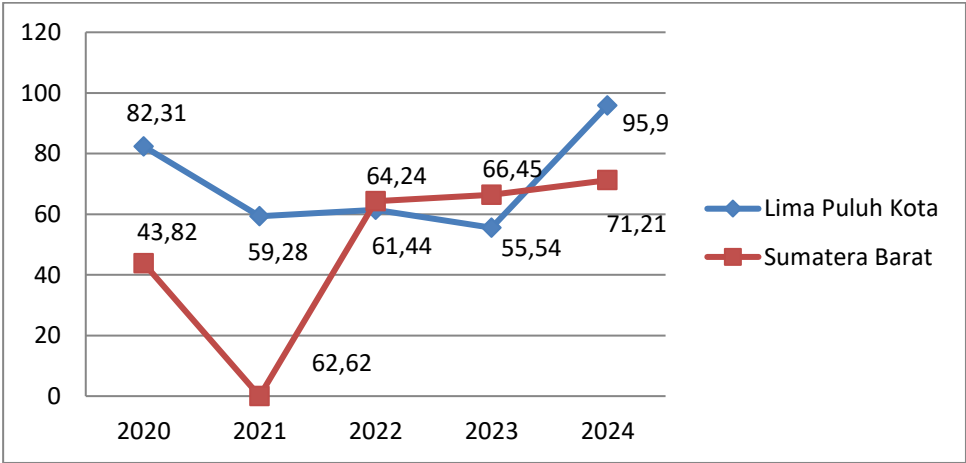
Tabel 2. 109
Cakupan Kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020–2024

Wilayah	Kepesertaan JKN (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lima Puluh Kota	82,31	59,28	61,44	55,54	95,9

Sumber Dinkes Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang cukup banyak terhadap kepesertaan JKN di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari 315.670 orang di tahun 2020 turun sebanyak 87.047 orang di tahun 2021 menjadi 228.623 orang. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 dan banyaknya orang kehilangan pekerjaan sehingga adanya peserta aktif yang tidak membayar premi sehingga peserta tidak aktif menjadi bertambah. Namun di tahun 2022 terjadi peningkatan lagi sebanyak 10.013 orang dan tren peningkatan ini berlanjut sampai tahun 2024 sebanyak 386.371 orang.

Grafik 2. 74
Perbandingan Cakupan Kepesertaan JKN
Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Provinsi Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, setiap tahunnya kontribusi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Cakupan Kepesertaan JKN terhadap Cakupan Kepesertaan JKN se Provinsi Sumatera Barat berfluktuasi, dimana cakupan tertinggi yang pernah dicapai oleh Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2020. Namun demikian, tiga tahun terakhir Cakupan kepesertaan JKN Kabupaten Lima Puluh Kota lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Barat.

viii. Rasio Daya Tampung RS Rujukan

Rasio daya tampung RS rujukan merupakan persentase atas jumlah daya tampung rumah sakit rujukan terhadap jumlah penduduk kabupaten. Berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2024, untuk tahun 2024, Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki Rasio 0,25. Artinya dari total penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 401.086 jiwa, yang mampu ditampung di RS Rujukan hanya sebanyak 101 orang.

ix. Persentase RS Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi

Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten yang terakreditasi merupakan persentase atas jumlah RS Rujukan yang terakreditasi terhadap jumlah RS Rujukan di Kabupaten Sampai dengan Tahun 2024, dari 1 RS Rujukan di Kabupaten Lima Puluh Kota, telah mendapatkan akreditasi, artinya secara persentase RS Rujukan yang terakreditasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 100%.

x. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar atas jumlah orang yang berumur 15-59 tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di kabupaten lima Puluh Kota baru berada pada angka 43,7%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 15-59 tahun, baru 43 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xi. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar terhadap jumlah warga negara usia 60 tahun di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 67,8%, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah 67 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xii. Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar merupakan persentase atas jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar terhadap jumlah penderita DM di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di kabupaten lima Puluh Kota berada pada angka 114,6 %, artinya dari 100 orang penduduk berusia 60 tahun, sudah lebih dari 100 orang yang telah mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.

xiii. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

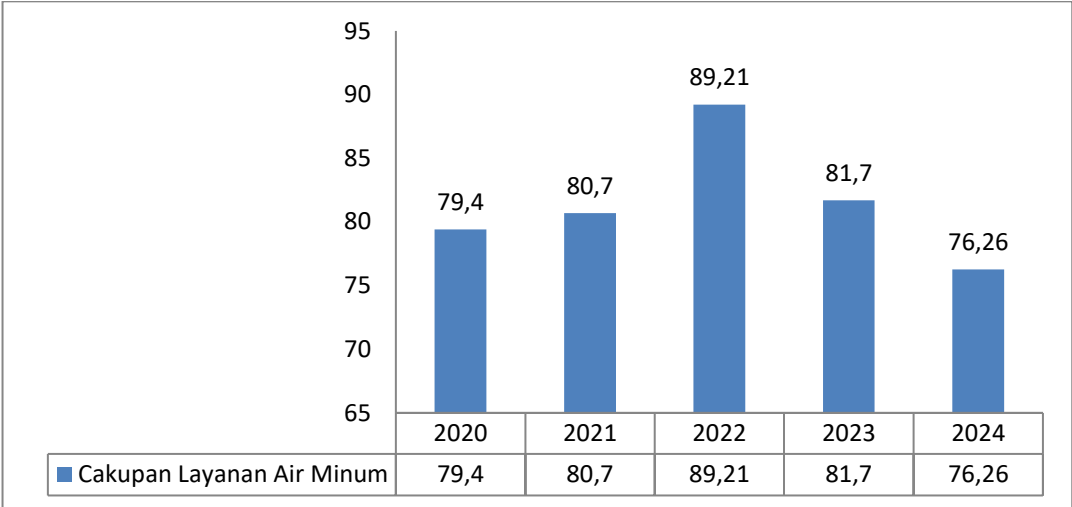
Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar merupakan persentase atas jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar terhadap jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV di kabupaten. Merujuk kepada pengertian indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada angka 61,9%, artinya dari 100 orang dengan risiko terinfeksi HIV, baru 61 orang yang telah mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar.

C. Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

i. Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, sistem jaringan prasarana lainnya salah satunya adalah sistem penyediaan air minum (SPAM). Perwujudan sistem penyediaan air minum yaitu pengembangan dan peningkatan SPAM. Untuk gambaran cakupan layanan air minum di Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 75
Cakupan layanan Air Minum Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 – 2024



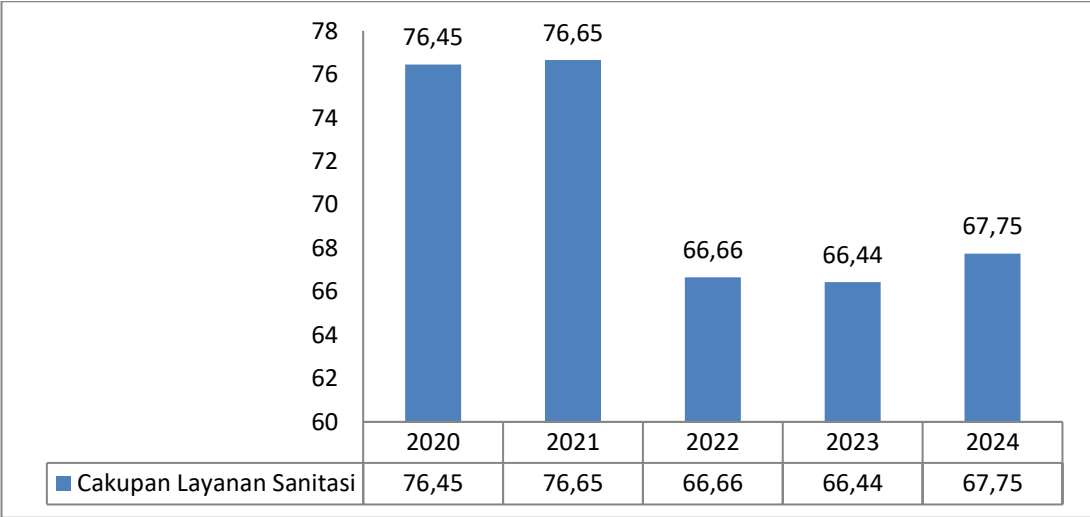
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Cakupan Layanan Air Minum merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi pada kurun tahun 2020-2024.

ii. Persentase Penduduk/Rumah Tinggal Berakses Sanitasi

Terhadap cakupan layanan sanitasi di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 2. 76
Cakupan layanan Sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

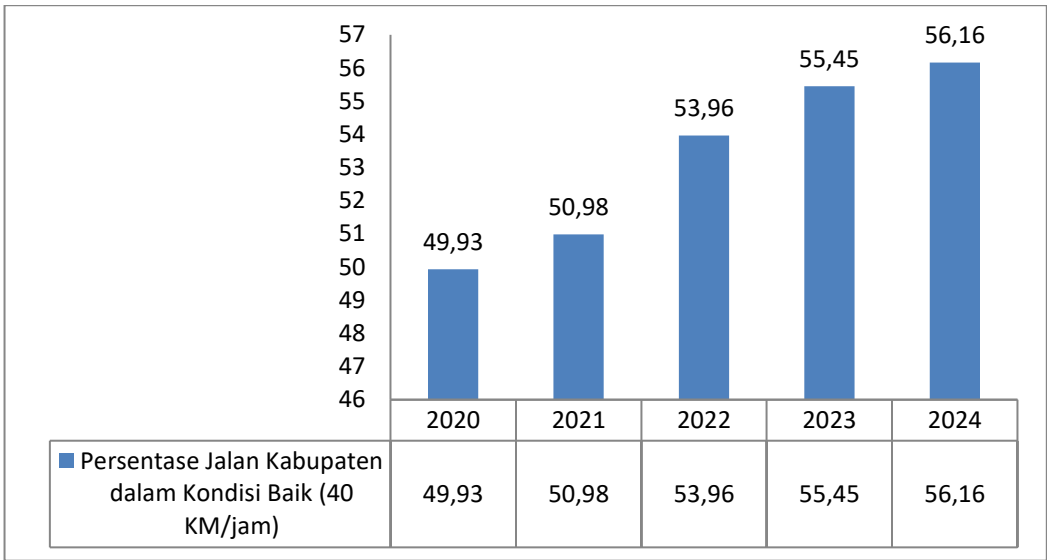
Sama dengan air minum, cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi juga merupakan salah satu indikator dasar yang termuat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yakni memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua, yang harus dicapai pada tahun 2030. Cakupan layanan akses penduduk terhadap sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2024 adalah 67,75%. Hal ini berarti terjadi kenaikan dari tahun 2023 yang memiliki capaian sebesar 66,44%.

iii. Kondisi Jalan Kabupaten

Kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang oleh pemerintah daerah, khususnya pada bidang jalan, dapat dilihat dari perkembangan pembangunan jalan yang berstatus sebagai jalan kabupaten. Ada 2 indikator yang dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mengukur kinerja pembangunan jalan, yaitu persentase Jalan Kabupaten kondisi baik dan tingkat

kemantapan Jalan Kabupaten. Jalan Kabupaten dalam kondisi baik adalah ruas-ruas jalan dengan kondisi baik. Kondisi jalan tersebut dapat dilihat pada grafik dibawah ini

Grafik 2. 77
Persentase Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota Kondisi Baik Tahun 2020 – 2024

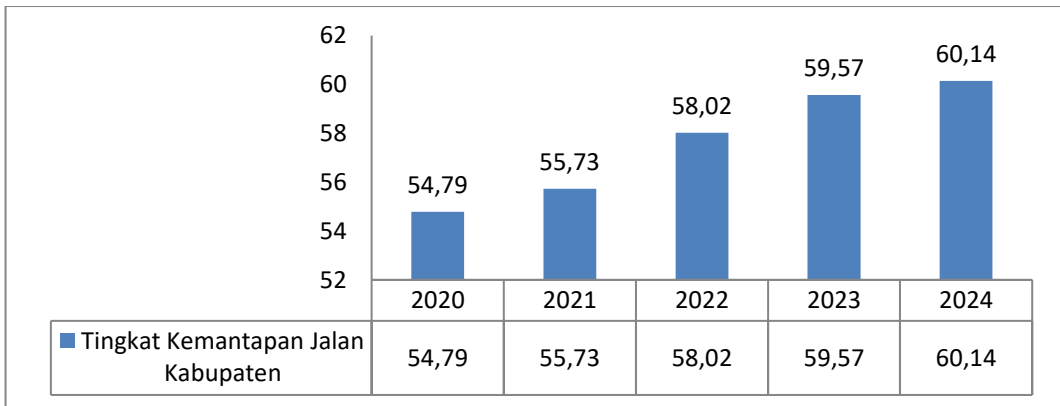


Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jalan dengan kondisi baik baru mencapai 56,16% dari total panjang jalan kabupaten sebesar 1.101,20 km. Kondisi jalan ini masih jauh dari yang diharapkan, dan kondisi baik ini pun pada umumnya baru terdapat pada daerah perkotaan dan pusat-pusat kecamatan, sementara di daerah pinggiran dan daerah perbatasan dengan kabupaten/kota tetangga, kondisi jalan masih sangat buruk. Di samping itu, Kabupaten Lima Puluh Kota, masih sangat perlu melakukan pembenahan jaringan dan kondisi jalan di Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK), walaupun pada umumnya kondisi jalan IKK sudah baik, namun belum memadai untuk mengoptimalkan fungsi jalan untuk kelancaran arus orang/barang di sebuah kota, karena pada beberapa titik masih terjadi kemacetan. Kondisi ini diantaranya disebabkan oleh karena status jalan yang berada di tengah–tengah Kota Sarilamak saat ini masih merupakan jalan kewenangan Nasional.

Pemerintah daerah juga perlu menyikapi proyek strategis nasional “Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera”, dimana dalam perencanaanya menetapkan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai salah satu daerah yang dilewati oleh trase jalan tersebut. Sinkronisasi program merupakan hal penting yang harus dilakukan, bisa dalam bentuk penambahan ruas jalan baru atau peningkatan kondisi jalan yang menghubungkan jalan kabupaten dengan jalan tol Trans Sumatera tersebut. Sedangkan Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap adalah ruas-ruas Jalan Kabupaten dengan kondisi baik dan sedang. Perkembangan pembangunan jalan kabupaten dalam kondisi mantap dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 78
Kemantapan Jalan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024



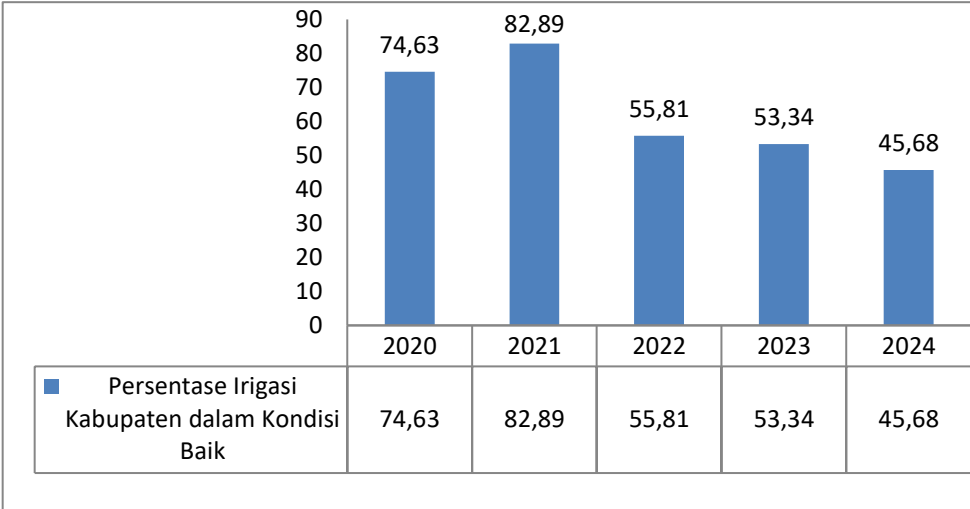
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Kondisi kemantapan jalan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 berdasarkan data capaian terus mengalami peningkatan dari 54,79% pada tahun 2020 meningkat menjadi 60.14% pada tahun 2024.

iv. Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, prasarana sumber daya air Kabupaten Lima Puluh Kota salah satunya meliputi sistem jaringan irigasi. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi, dalam upaya menjaga serta mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan cukup baik tetapi belum optimal. Kondisi irigasi Kabupaten Lima Puluh Kota dapat terlihat dari grafik di bawah ini:

Grafik 2. 79
Persentase Daerah Irigasi
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Kondisi Baik 2020 – 2024



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Grafik di atas bahwa persentase ini belum cukup memadai untuk kebutuhan penyelenggaraan pembangunan pertanian beririgasi yang baik, karena kondisi jaringan irigasi saat ini masih menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya produktivitas pertanian lahan basah.

v. Ketersediaan Bangunan Strategis Pemerintah

Bangunan strategis adalah bangunan yang mempunyai nilai strategis bagi daerah seperti kantor pemerintah, rumah dinas, Islamic centre, terminal dan pasar. Aktivitas perkantoran Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota belumlah seluruhnya berada di Kawasan IKK Sarilamak. Sampai pada tahun 2024, baru 71,74% bangunan strategis yang berada di wilayah administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping kantor pelayanan pemerintahan, rumah dinas kepala daerah dan pejabat pemerintahan masih berada di wilayah administrasi Kota Payakumbuh. Kebutuhan akan bangunan strategis lainnya juga belum bisa dipenuhi secara optimal.

vi. Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir Di WS Kewenangan Kabupaten

Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten merupakan persentase luas Kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten terhadap luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten. Merujuk kepada maksud dari indikator ini, maka untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota indikator ini baru mencapai angka 41,36 %, artinya dari semua Kawasan permukiman yang rawan terkena banjir, baru 41,36% nya yang sudah memiliki infrastruktur pengendalian banjir.

vii. Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi

Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi merupakan persentase atas jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya yang tidak terjadi kecelakaan konstruksi terhadap jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya. Indikator rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi untuk tahun 2024 memiliki nilai capaian 99,32 %.

D. Urusan Wajib Perumahan dan Kawasan Permukiman

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, rencana struktur ruang salah satunya adalah rencana sistem pusat permukiman. Rencana sistem pusat permukiman Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas Pusat Pelayan Lingkungan (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). PKL merupakan perkotaan Sarilamak di Kecamatan Harau yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, perkantoran, perdagangan dan jasa perkotaan serta pusat pengembangan pendidikan. PPK merupakan pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan. PPL meliputi PPL Pakan Sabtu di Kecamatan Luak dan PPL Maek di Kecamatan Bukik Barisan.

Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya perumahan dan permukiman menjadi salah satu sektor dari pembangunan infrastruktur dasar yang diprioritaskan pada RPJMN 2024-2029. Salah satu cakupan pelayanan infrastruktur dasar tersebut adalah penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peran serta dari pemerintah daerah untuk mencapai target RPJMN tersebut. Salah satu indikator penyediaan hunian layak adalah rasio rumah layak huni. Perkembangan penyediaan hunian layak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat dari nilai rasio rumah layak huni pada tabel berikut:

Tabel 2. 110
Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Lima Puluh Kota

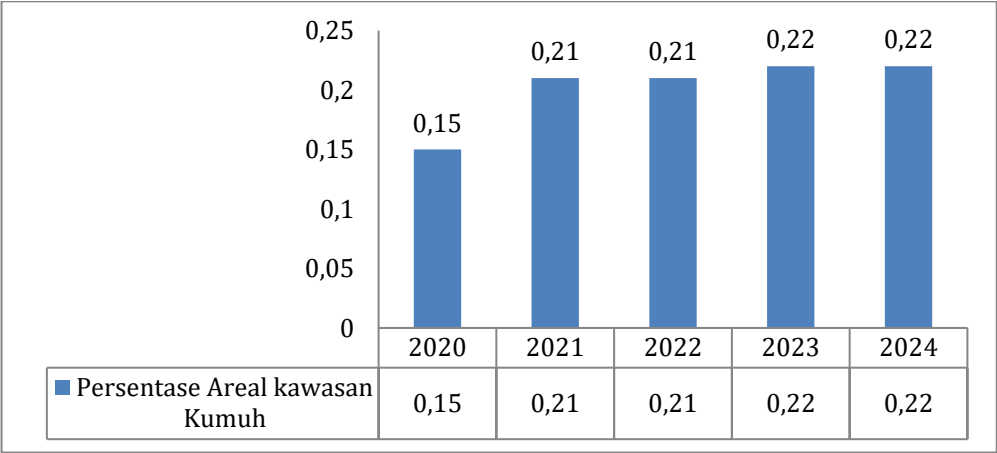
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Rumah Layak Huni	0,155	0,173	0,202	0,197	0,177

Sumber: DLHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio rumah layak huni mengalami peningkatan pada tahun 2023 sebesar 0,042 dari tahun 2020 dan kembali turun pada tahun 2024 karena adanya intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat. Semakin tinggi rasio rumah layak huni akan menggambarkan semakin banyak rumah yang layak dihuni oleh penduduk. Secara rasio, masih belum optimalnya rumah yang layak dihuni oleh masyarakat. Hal ini menjadi tugas pemerintah daerah ke depannya agar rumah yang layak dihuni oleh penduduk Kabupaten Lima Puluh Kota semakin baik. Pada saat ini Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi permasalahan dengan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah layak huni.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebabnya, di antaranya yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup pesat dan terjadinya migrasi penduduk sehingga membutuhkan penyediaan perumahan serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai di lingkungan permukiman. Minimnya alokasi anggaran APBD mempengaruhi pencapaian akses masyarakat terhadap layanan dasar. Di samping ketersediaan rumah layak huni, pembangunan perumahan dan permukiman juga memperhatikan kondisi lingkungannya yang ditangani melalui pengurangan kawasan kumuh. Perkembangan penanganan kawasan kumuh seperti dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 80
Persentase Areal kawasan Kumuh Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020- 2024



Sumber: Dinas LHPP Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Data di atas menunjukkan bahwa tidak adanya perubahan yang signifikan terhadap persentase areal kawasan kumuh di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dibanding tahun sebelumnya. Penambahan luasan ini terjadi bukan karena tumbuhnya kawasan kumuh baru, tetapi karena adanya penambahan batasan deliniasi kawasan kumuh di seluruh kecamatan.

E. **Urusan Wajib Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Rasa aman dan nyaman sangat dibutuhkan setiap warga negara untuk kelancaran beraktivitas dengan baik. Kondisi ini dapat dinikmati jika ketentraman dan ketertiban dapat tercipta. Untuk menjamin terciptanya ketentraman dan ketertiban tersebut, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum (trantibum) di wilayahnya masing-masing sesuai dengan kewenangannya. Namun demikian, ketentraman dan ketertiban ini masih belum dapat tercipta secara optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota, hal ini terlihat dari masih adanya kasus-kasus pelanggaran perda dan gangguan keamanan lainnya, sebagaimana yang dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 111
Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Peraturan Daerah	Jumlah Penertiban
Perda Nomor 3 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat :	2
1. Penertiban PSK/Tunasusila	3
2. Penertiban Minuman beralkohol/tuak	9
3. Penertiban Cafe	3
4. Penertiban pelajar	3
5. Penertiban izin usaha	1
6. Penertiban pedagang kaki lima	4
7. Sosialisasi tertib izin usaha, lingkungan, dan pelajar	
Total Kasus Penegakan Perda	14

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Adapun selama tahun 2024 ada satu Peraturan Daerah yang ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lima Puluh Kota. Perda tersebut adalah Perda Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Masyarakat Selama tahun 2024, terjadi 14 kasus pelanggaran perda yang ditertibkan. Adapun rinciannya dapat dilihat pada tabel di atas. Terhadap gangguan keamanan, ketertiban masyarakat (Kamtibmas), walaupun tidak merupakan kewenangan langsung Daerah, perlu juga ditampilkan datanya untuk menggambarkan kondisi di

Lima Puluh Kota. Di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu lima tahun berdasarkan data Polres, yang melapor dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 112
Gangguan Keamanan, Ketertiban Masyarakat
(Kamtibmas) di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Gangguan Kamtibmas	Lapor				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembunuhan	4	1	-	-	1
2.	Curas	17	5	1	2	6
3.	Pemeriksaan dan pembunuhan	-	-	-	-	-
4.	Curat	194	30	51	61	48
5.	Pencurian Bias	62	20	40	37	135
6.	Penganiayaan Berat	58	9	16	31	42
7.	Penganiayaan	128	26	40	85	147
8.	Pengrusakan	32	5	11	11	21
9	Penghinaan Ringan	10	1	-	1	3
10.	Penipuan	53	5	21	15	18
11.	Curanmor	81	27	18	29	26
12.	Setubuhan-perbuatan cabul	43	5	4	9	0
13.	Perjudian	9	5	12	2	6
14.	Asusila-bersetubuh dengan perempuan di bawah umur	4	12	-	12	11
15.	Penggelapan	59	16	15	21	68
16.	Pengancaman	12	1	4	13	9
17.	Perbuatan tidak menyenangkan	1	-	-	6	3
18.	Pemeriksaan	1	-	-	-	3
19.	Kawin Liar	-	-	-	-	1
20.	Pengeroyokan	35	6	17	34	16
21.	Narkotika	30	34	-	49	113
22.	Pemalsuan	2	-	-	2	2
23.	Perampasan tanah	4	2	3	6	6
24.	Pencemaran Nama Baik	8	1	2	3	3
25.	Bunuh Diri	5	-	1	5	1
Jumlah		905	852	211	434	697

Sumber: BPS Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Laporan Gangguan Kamtibmas dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi, dimana laporan tertinggi untuk gangguan kamtibmas adalah pencurian biasa sedangkan pada tahun 2024 untuk pemeriksaan dan pembunuhan tidak ada laporan.

i. Sub Bidang Kebencanaan

Pada sub bidang Kebencanaan, pencapaian indikator penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah dengan risiko sedang (119,20) dan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana dengan capaian sebesar 0,27 (rendah). Kinerja dan realisasi penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan bencana pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 113
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Tahun 2024

No.	Indikator	Target			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Penurunan Indeks risiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	Sedang (73-67)	Sedang (67-61)	Sedang (61-55)	119,2
2	Meningkatnya Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dalam penanggulangan bencana	Sedang (0,41-0,6)	Sedang (0,61-0,7)	sedang (0,71 - 0,8)	0,27

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

ii. Sub Bidang kebakaran

Pada Sub Bidang Kebakaran pencapaian indikator persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran tahun 2024 adalah 100%. Target dan Capaian Kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.113.a
Kinerja Penyelenggaraan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran

No.	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran	58%	64%	70%	100%

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Waktu tanggap atau lebih dikenal dengan *Response Time* adalah total waktu yang dihitung dari saat berita kebakaran diterima, pengiriman pasukan dan sarana pemadam kebakaran ke lokasi kebakaran sampai dengan kondisi siap untuk melaksanakan operasi pemadaman (biasa ditandai dengan keluarnya air/ penyemprotan air pertama). Sesuai dengan luas wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota, idealnya 1 (satu) kecamatan mempunyai 1 (satu) Wilayah Manajemen kebakaran (WMK) dan 1 (satu) WMK mempunyai minimal 1 (satu) pos. Sementara saat ini Kabupaten Lima Puluh kota baru memiliki 7 (tujuh) Pos WMK. Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 114
Data Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Nama Posko	Wilayah Kerja
1.	Induk	Kecamatan Payakumbuh, Kecamatan Situjuah, Kecamatan Akabiluru
2.	Harau	Kecamatan Harau
3.	Lareh Sago Halaban	Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kecamatan Luak
4.	Mungka	Kecamatan Guguk, Kecamatan Mungka
5.	Suliki	Kecamatan Gunung Omeh, Kecamatan Suliki, Kecamatan Bukit Barisan
6.	Pangkalan	Kecamatan Pangkalan
7.	Kapur IX	Kecamatan Kapur IX

Sumber: Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari laporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran. Untuk tahun 2024, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 9 menit 38 detik.

F. Urusan Wajib Sosial

Pembangunan pada urusan wajib sosial difokuskan kepada pencapaian peningkatan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau yang saat ini telah diubah menjadi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yaitu perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung, seperti terjadinya bencana. Target dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib sosial tahun 2024, dari 8 indikator ada 7 indikator yang sudah memenuhi target tahun 2024. Ada 1 indikator yang capaian kinerjanya 0 persen, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2024 di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak dilaksanakan tanggap darurat bencana. Target dan capaian penyelenggaraan urusan sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. 115
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Wajib Sosial Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024	Catatan Analisis
		2023	2024	2025		
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	86,8	88,2	89,6	95,10	-
2	Persentase PMKS yang tertangani	94,5	95,2	96,2	95,10	-
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	93,64	93,8	94	95,10	-
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	98	98	98	100	-
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	98	98	98	0	-
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	64	65	66	97,2	-
7	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	7,6	7,6	7,6	17	-
8	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota	100	100	100	100	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

2.4.4.2 Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Wajib Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan urusan wajib. Beberapa informasi terkait dengan ketenagakerjaan disajikan antara lain angka sengketa pengusaha pekerja, kasus terhadap perjanjian bersama, kepesertaan pekerja dalam BPJS, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis berkompeten, tenaga kerja yang mendapat kompetensi yang berbasis masyarakat dan tenaga kerja yang mendapat keterampilan kewirausahaan. Perkembangan dari informasi ketenagakerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 116
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja kabupaten Lima Puluh Kota 2024

No.	Uraian	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	10	10	10	3
2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	10	10	10	2
3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	500	550	600	37

No.	Uraian	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
4	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta Jamsostek	6.500	7.000	7.250	13482
5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	180	180	180	48
6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	70	70	70	-
7	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan	90	90	90	32

Sumber: Disperinaker Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dilihat dari capaian kinerja tahun 2024, hanya 3 indikator yang mencapai target yaitu angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun, Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama (PB) dan Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek. Dilihat dari pencari kerja yang ditempatkan, capaian tahun 2024 masih belum memenuhi target kinerja yang diharapkan. Begitupun dengan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kewirausahaan, masih belum mencapai target yang ditetapkan.

B. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Perkembangan indikator pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 117
Capaian Indikator Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	8,59	9,01	9,4	30,76
2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	8,57	14,28	17,14	5,71
3	Rasio KDRT	0,004	0,003	0,002	0,002
4	Partisipasi angkatan kerja perempuan	99.750	99.800	100.000	94,267
5	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	100%	100	100	100
7	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu	100%	100	100	100
8	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	100%	100	100	100

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
9	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	100%	100	100	100
10	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	100%	100	100	100
11	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	0,0029	0,0029	0,0029	0,0013
12	Persentase ARG (Anggaran responsif Gender pada belanja langsung APBD)	5,56	6,1	6,7	-

Sumber: Dinas PPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari 12 indikator urusan wajib pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang mencapai target ada 9 indikator. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 tahun per 1.000 rumah tangga. Rasio KDRT tahun 2024 adalah 0,002 artinya ada 2 KDRT yang dilaporkan per 1.000 rumah tangga di Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator yang belum mencapai target adalah proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD, Partisipasi angkatan kerja perempuan dan persentase ARG (Anggaran responsif gender pada belanja langsung APBD). Hal ini perlu untuk menjadi perhatian yang lebih sehingga Lima Puluh Kota yang madani bisa dicapai. Terkait dengan kinerja perlindungan anak, maka indikator yang biasa digunakan adalah Kabupaten Layak Anak. Kabupaten atau Kota Layak Anak (KLA) adalah Kabupaten atau Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Adapun tujuan diciptakannya Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) adalah untuk memenuhi hak dan melindungi anak. Secara khusus tujuannya antara lain untuk membangun inisiatif pemerintah daerah yang mengarah pada upaya transformasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk: kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak (PHPA) pada suatu wilayah kabupaten atau kota. Kabupaten Layak Anak penting diwujudkan di daerah termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Di samping itu anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara. Untuk itulah, maka sejak tahun 2017 Kabupaten Lima Puluh Kota telah berkomitmen dan ikut mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

C. Urusan Wajib Pangan

Urusan wajib pangan dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Lima Puluh Kota ada 4 indikator. Terdapat 3 dari 4 indikator yang mencapai target pada tahun 2024. 3 indikator yang mencapai target tersebut adalah Ketersediaan pangan utama, Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan dan persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) yang tercapai 109,1%. Target dan capaian indikator penyelenggaraan pemerintahan urusan wajib pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 118
Capaian Indikator Urusan Wajib Pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Ketersediaan pangan utama (Kg/ka/thn)	393,15	405,45	417,75	423,55
2	Ketersediaan energi dan protein per kapita (Kg/ka/thn)	6.426	6.515	6.604	5.951,64
3	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (%)	80,00	82	84	87

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
4	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) (%)	41,14	53,14	74,15	109,1

Sumber: Dinas Pangan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

D. **Urusan Wajib Pertanahan**

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi. Capaian indikator Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 119
Capaian Indikator Urusan Wajib Pertanahan
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas PUPR Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Pertanahan yaitu Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, selama 5 tahun terakhir tercapai 100%. Selama 5 tahun terakhir, tidak ada kasus sengketa tanah garapan yang dilaporkan.

E. **Urusan Wajib Lingkungan Hidup**

Selanjutnya Lingkungan Hidup merupakan salah satu sub urusan wajib non pelayanan dasar. Kinerja penyelenggaraan sub urusan ini selama tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 120
Indikator Sub Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,13	70,51	71,87	71,63	74,88
2	Indeks Kualitas Air (IKA)	50,00	52,50	55,63	50,92	61,92
3	Indeks Kualitas Udara (IKU)	90,87	91,53	92,00	90,24	93,65
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	61,75	62,54	62,53	62,67	62,42

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Untuk urusan wajib lingkungan hidup, terdapat 4 indikator kinerja. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2023. Nilai IKLH dapat digunakan sebagai instrumen indikator keberhasilan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Jika mengacu pada data 5 tahun terakhir, hal ini berarti bahwa Pemerintah Daerah sudah cukup melakukan perbaikan dalam mengelola dan mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Indikator kualitas lingkungan yang digunakan untuk menghitung IKLH terdiri dari 3 indikator yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), yang diukur berdasarkan parameter – parameter pH, TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan NO3-N. Indeks Kualitas Udara (IKU) yang diukur berdasarkan parameter SO2 dan NO2, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan hutan. Untuk Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks

Kualitas Tutupan Lahan selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, perkembangan capaian pengurangan dan penanganan sampah tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 121
Capaian pengurangan dan penanganan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

N o	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah (ton/tahun)	56.536,00	56.295,41	55.954,79	56.964,67	58.558,56
2	Pengurangan (ton/tahun)	9.709,00	10.142,58	11.697,77	12.564,01	10.878,90
3	Penanganan (ton/tahun)	6.591,90	6.898	7.665,00	6.851,05	3.650
4	Sampah yang tertangani	16300,9	17040,58	19362,77	19415,06	10.979,90
5	Persentase sampah yang tertangani	28,83%	30,27%	34,60%	34,08%	18,58%

Sumber: SIPSN Tahun 2024

Pengelolaan sampah dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Berdasarkan tabel diatas, persentase sampah yang tertangani di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan, namun terjadi penurunan di tahun 2024 pasca ditutupnya TPA Regional Payakumbuh.

F. Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Capaian indikator dalam urusan wajib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 dapat terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 122
Capaian Indikator Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase penduduk ber KTP per satuan penduduk	98,60	98,65	98,70	96,10	98,87
2	Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun)	95	95	95	95,54	96,24
3	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	100,00	100	100	100	100
4	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	100,00	100	100	100	100
5	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	98,60	98,65	98,70	96,10	98,87
6	Cakupan penerbitan akta kelahiran	43,30	43,4	43,5	95,54	50,72
7	Perekaman KTP Elektronik	99,00	99,20	99,40	96,10	98,99
8	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA	40,00	45	50	46,12	47,33
9	Kepemilikan akta kelahiran	7.500	7.500	7.500	8.913	8420

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari sembilan indikator Kinerja Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, enam indikator sudah mencapai target. Keenam indikator tersebut adalah Persentase anak berakte kelahiran usia (0 - 18 tahun), Ketersediaan database kependudukan skala provinsi, Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, Cakupan penerbitan akta kelahiran, Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) yang memiliki KIA dan Kepemilikan akta kelahiran.

G. **Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Melalui Surat Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN/Bappenas RI Nomor T-04777/Dt.2.2/PP.02.01/03/2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang penyampaian informasi mengenai indikator Persentase Desa mandiri dalam RPJPD 2025-2045, disampaikan bahwa telah dilaksanakan Penyempurnaan Indeks Desa pada tahun 2023-2024 oleh Bappenas RI bersama Kementerian Desa PDTT, Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, BPS, dan Kementerian Keuangan hingga disepakati penggunaan Indeks Desa (penyempurnaan) sebagai indeks tunggal capaian pembangunan desa. Indeks Desa ini telah diluncurkan secara resmi pada tanggal 4 Maret 2024 untuk selanjutnya dipergunakan dalam seluruh dokumen perencanaan nasional serta daerah, menggantikan seluruh indikator pembangunan desa lainnya. Indeks Desa dimaksud ini kemudian menjadi sumber dalam penyusunan indikator Persentase Desa Mandiri dalam dokumen perencanaan Pembangunan di Indonesia.

Persentase Desa Mandiri merupakan perbandingan antara jumlah desa dengan status pembangunan mandiri dibandingkan dengan total jumlah desa di tingkat nasional maupun provinsi/kabupaten/kota. Status pembangunan desa ditetapkan berdasarkan data capaian pembangunan desa yang bersumber dari Indeks Desa. Indeks Desa ini merupakan indeks pengukuran terhadap tingkat kemajuan/pembangunan desa di Indonesia. Basis data pengukuran Indeks Desa berasal dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Desa dan dikelola oleh Kementerian Desa PDTT Adapun dimensi dalam pengukuran Indeks Desa adalah: (1) Layanan Dasar; (2) Sosial; (3) Ekonomi; (4) Lingkungan; (4) Aksesibilitas; (5) Tata kelola pemerintahan desa.

Desa Mandiri merupakan desa yang dianggap telah memenuhi seluruh aspek strategis pembangunan desa berdasarkan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa. Apabila disandingkan dengan Indeks Desa Membangun (IDM) yang merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan, maka jumlah Nagari yang berstatus mandiri sejak tahun 2019-2023 digambarkan sebagai berikut:

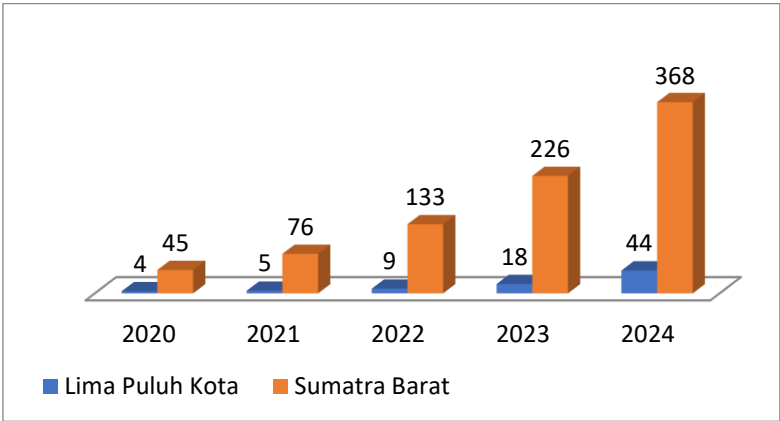
Tabel 2. 123
Status Nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM)
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Tahun	Nagari Sangat Tertinggal	Nagari Tertinggal	Nagari Berkembang	Nagari Maju	Nagari Mandiri	Jumlah Nagari
2020	0	2	19	54	4	79
2021	0	2	19	53	5	79
2022	0	1	12	57	9	79
2023	0	1	4	56	18	79
2024	0	1	1	33	44	79

Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah Nagari Mandiri dalam 5 tahun terakhir mengalami peningkatan jumlah yang cukup besar, dimana pada tahun 2023 sudah 22,78% Nagari yang berstatus mandiri. Namun demikian, masih ada nagari dengan status tertinggal yaitu Nagari Galugua. Dengan demikian, Nagari Galugua perlu menjadi prioritas pembangunan Lima Puluh Kota dalam 5 tahun ke depan. Dengan adanya 1 nagari tertinggal dan 4 nagari yang berstatus nagari berkembang, dapat diartikan bahwa nagari masih belum bisa mengoptimalkan potensi yang ada. Walaupun Indeks Desa Membangun (IDM) tidak bisa disandingkan secara langsung dengan Indeks Desa, akan tetapi mengingat Indeks Desa baru diluncurkan pada tahun 2024, maka IDM masih digunakan untuk menggambarkan status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Grafik 2. 81
Jumlah Desa Mandiri Kabupaten Lima Puluh Kota
dan Sumatera Barat Tahun 2020-2024



Sumber: Kementerian desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Tahun 2024

Berdasarkan grafik di atas, pada tahun 2024 dari 368 Nagari Mandiri di Provinsi Sumatera Barat, 18 diantaranya adalah Nagari Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana bila semua Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota berstatus mandiri artinya sudah berkontribusi sebesar 6,20% capaian Nagari Mandiri se Sumatera Barat yang berjumlah 1.275 Nagari/Desa.

H. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Target dan capaian kinerja indikator urusan wajib pengendalian penduduk dan keluarga berencana kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 124
Capaian Indikator Urusan Wajib Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Laju pertumbuhan penduduk	1,25	1,1	0,95	0,93	0,93
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,22	2,20	2,18	2,37	2,37
3	Persentase Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB	55	60	65	47	47%
4	Rasio Akseptor KB	1: 6	1 : 5	1 : 4	1 : 4	1:4
5	Angka Pemakaian kontrasepsi/ CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	74,30	74,6	74,8	69,67	59,6
6	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	23	22	22	15.1	15,1
7	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	0,60	0,6	0,5	0.48	0,4
8	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	9,10%	8,63%	8,25	13,06	15,88
9	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	26,70%	27,1%	27,5	24,66	32,78
10	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	77,00	80	83	96	82
11	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	77,00	80	83	85,32	84
12	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	82,00	83	84	80,58	84
13	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	5,00	6	8	13	13
14	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan	76,00	78	78	92,5	78

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
	dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk					
15	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	65,00	70	70	66,7	66
16	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/ kelurahan	1: 1,2	1 : 1,2	1 : 1	1 : 1	1:1
17	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100,00	100	100	100	100
18	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00	100	100	100	100
19	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100,00	100	100	100	100
20	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	65,00	65	70	75	70
21	Cakupan keluarga yang mempunyai balitadan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	65,00	65	70	67	70
22	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR)	74,30	74,6	74,8	69,67	74,6

Sumber: BPS dan DPPKBPPPA Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah Angka yang menunjukkan tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Laju Pertumbuhan Penduduk berguna untuk mengetahui perubahan jumlah penduduk antar dua periode waktu.

I. Urusan Wajib Perhubungan

Pada pencapaian target dan kinerja urusan penyelenggaraan urusan perhubungan tahun 2024, dari 8 indikator terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target. Indikator-indikator yang mencapai target tersebut antara lain Rasio ijin trayek, Jumlah uji KIR Angkutan Umum, Persentase kepemilikan KIR angkutan umum. Untuk indikator Jumlah arus penumpang angkutan umum, Persentase layanan angkutan darat dan Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum, ketiganya tidak terealisasi karena tidak terlaksananya survei untuk memperoleh data terkait, dan indikator pemasangan rambu tidak terlaksana karena keterbatasan anggaran. Sedangkan untuk indikator Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun tidak terealisasi dikarenakan operasional terminal telah dihentikan berdasarkan Pemberitahuan Kepala Dinas Perhubungan tanggal 3 Januari 2022 Nomor: 551.2/003/Pras/I/2022 dan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor: 538/SK/Pras.IX/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Penghentian Pemungutan Retribusi Terminal Angkutan Barang Rimbo Data. Capaian kinerja penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat di lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 125
Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023	Capaian 2024
		2023	2024	2025		
1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	-	-

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2023	Capaian 2024
		2023	2024	2025		
2	Rasio ijin trayek	2,95	2,96	2,97	4,12	3,53
3	Jumlah uji KIR angkutan umum	6.069	6.162	6.237	253	7147
4	Persentase layanan angkutan darat	2,00%	2,20%	2,40	-	-
5	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	91%	93%	93%	95,25%	92,25 %
6	Pemasangan Rambu-rambu	61%	62%	63%	55,48%	-
7	Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	4.300.000	4.400.000	4.500.000	-	-
8	Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun	135.000	140.000	145.000	-	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

J. **Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika**

Capaian kinerja urusan wajib komunikasi dan informatika Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 dapat dilihat dari tabel di bawah.

Tabel 2. 126
Capaian Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan	18	18	20	15	0
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	79	80	81	80	82,6
3	Nilai Indeks SPBE pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota	3,18	3,40	3,50	3,29	2,7
4	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	80	85	90	100	100

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator pada Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika, 3 diantaranya sudah mencapai target. Satu indikator yang belum mencapai target adalah Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok masyarakat di tingkat kecamatan yang masih tercapai 15 dari target sebanyak 18. Dalam memenuhi Reformasi Birokrasi perlu diupayakan untuk peningkatan pelayanan publik, salah satunya ditunjang oleh sistem informasi pada pemerintahan daerah. Sistem informasi ini melingkupi keseluruhan sistem pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Namun sampai saat ini sistem informasi tersebut belum mencakup keseluruhan pemerintahan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena adanya beberapa daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur telekomunikasi atau yang biasa dikenal dengan *blank spot* di Kabupaten Lima Puluh Kota yakni :

Tabel 2. 127
Daerah yang belum terjangkau oleh infrastruktur Telekomunikasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	Daerah/jorong	Nagari	Kecamatan
1.	Aia Angek disamping monumen Bela Negara	Koto Tinggi	Gunuang Omeh
2.	Jorong Landai	Harau	Harau
3.	Jorong Sungai Data	Harau	Harau
4.	Jorong Baliak	Simpang Sugiran	Guguak
5.	Jorong Mudiak Liki	Kurai	Suliki
6.	Jorong Nenan	Maek	Bukit Barisan
7.	Jorong Galugua	Galugua	Kapur IX
8.	Jorong Koto Tengah	Galugua	Kapur IX
9.	Jorong Tanjung Jajaran	Galugua	Kapur IX
10.	Jorong Monga	Galugua	Kapur IX

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengatasi daerah *blank spot* adalah :

1. Telah mengupayakan permintaan menara Telekomunikasi ke instansi pusat dalam hal ini adalah BAKTI Kemenkominfo.
2. Dengan adanya Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan seluruh OPD, bekerjasama dengan salah satu provider telekomunikasi, sehingga di sepanjang jalur Jaringan intra Pemerintah yang disediakan oleh provider juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk telekomunikasi.

Terkait dengan ketersediaan akses internet di perangkat daerah, diukur dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo, dimana pada tahun 2023 telah mencapai angka 100%, sedangkan terkait indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kota, untuk tahun 2023 di Kabupaten Lima Puluh Kota telah mencapai angka 166%.

K. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

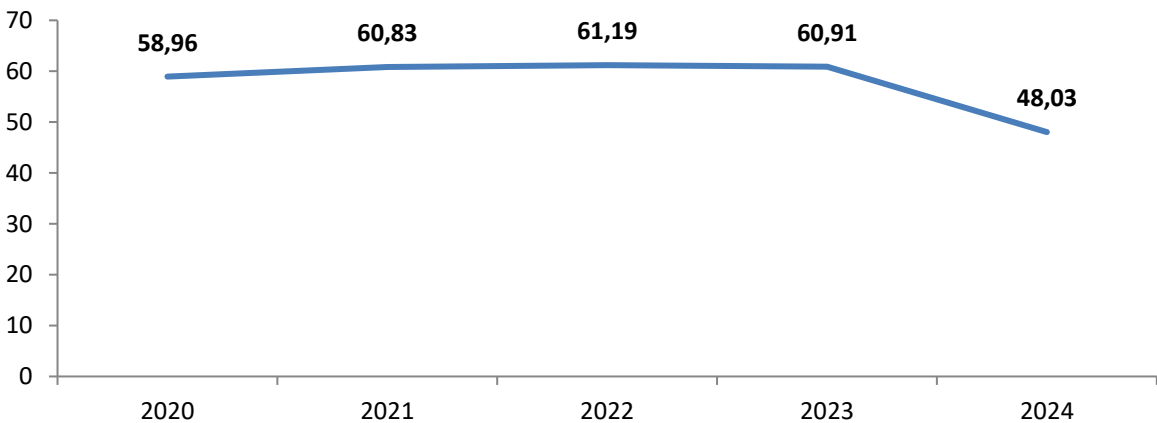
Sesuai dengan UUD Tahun 1945, Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, maka dapat dipahami bahwa sistem perekonomian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi. Dalam pemahaman ini maka koperasi dan usaha kecil menengah merupakan urat nadi dari perekonomian tersebut. Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah sebagai tonggak penggerak perekonomian sangat diperlukan sehingga amanat UUD 1945 tersebut dapat diwujudkan. Selama lima tahun terakhir, jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, jumlah koperasi tercatat sebanyak 254 koperasi. Dengan kata lain terjadi kenaikan jumlah koperasi sebanyak 34 koperasi dalam kurun tahun 2020-2024. Jumlah koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 128
Jumlah Koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Koperasi	212	217	219	220	254
2	Koperasi Aktif	125	132	134	134	122
3	Koperasi Tidak Aktif	87	85	85	86	132

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Grafik 2. 82
Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024



Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Jika dilihat dari Persentase koperasi aktif per tahunnya, terjadi peningkatan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, kemudian pada tahun 2023 sedikit mengalami penurunan. Akan tetapi jika dilihat perkembangan persentase koperasi aktif selama lima tahun terakhir, maka tidak terjadi peningkatan. Pada tahun 2020, persentase koperasi aktif sebesar 58,96 dan pada akhir tahun 2024 persentase koperasi aktif tercatat sebesar 48,03. Penyebab dari rendahnya koperasi aktif yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota karena banyak koperasi-koperasi tersebut tidak memiliki *business plan* yang jelas ditambah dengan masih rendahnya kualitas sumber daya pengurus koperasi tersebut. Sehingga koperasi-koperasi yang tersebut tidak bertahan lama dalam menjalankan usahanya. Untuk itu peran aktif dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam melakukan pembinaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi mutlak diperlukan. Persentase koperasi aktif di Kabupaten Lima Puluh Kota selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada grafik di atas.

Tabel 2. 129
Pertumbuhan Usaha Mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 – 2024

No.	Tahun	Jumlah Usaha Mikro
1.	2020	7.308
2.	2021	8.258
3.	2022	8.302
4.	2023	8.431
5.	2024	8.650

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Usaha mikro yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota terus mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 jumlah usaha mikro di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 8.258 usaha, sementara pada akhir tahun 2024 menjadi 8.650 unit. Jika ditinjau jumlah usaha mikro selama rentang waktu 5 tahun terakhir, maka terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya Ketersediaan data dan anggaran serta kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi pencapaian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dalam upaya membantu perkembangan UMKM di Kabupaten Lima Puluh Kota. Ditambah dengan adanya ketakutan dari masyarakat tentang transparansi skala usahanya. Karena ukuran untuk melihat skala usaha tersebut adalah dari aset yang dimiliki dan atau omset usaha secara tahunan, membuat Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM sulit untuk melakukan klasifikasi usaha mana saja yang sudah mengalami perkembangan dan mana yang tidak. Ketakutan dari masyarakat untuk transparan tentang omset dan aset dipengaruhi oleh ketakutan terhadap kewajiban pajak.

Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan Dirjen Perpajakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kriteria usaha yang dikenakan pajak dan mana yang tidak sehingga masyarakat tidak lagi takut untuk memberikan data yang akurat terhadap perkembangan usahanya. Pada akhirnya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM dapat mengetahui dan memberikan bantuan baik dalam pengembangan usaha maupun penyelamatan usahanya. Di samping permasalahan di atas, permasalahan lainnya terkait dengan perdagangan, koperasi dan UMKM adalah masih rendahnya kerjasama dan kemitraan dalam investasi baik dengan masyarakat dan dunia usaha, mutu dan harga barang yang belum terjaga, dan daya promosi produk yang masih rendah serta pemanfaatan informasi dan teknologi yang rendah, dan belum optimalnya pertumbuhan wirausahawan baru.

L. Urusan Wajib Penanaman Modal

Salah satu motor penggerak pembangunan perekonomian daerah adalah modal dalam negeri maupun modal asing yang ditanamkan investor di daerah untuk investasi. Kondisi internal daerah seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum akan mempengaruhi keinginan investor dalam menanamkan modalnya. Kehadiran investor akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak baik bagi investor maupun pemerintah daerah. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) tahun 2024 adalah 5.274 investor dengan nilai investasi Rp. 1.116.738.877.010,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 130
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan
Penanaman Modal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/ PMA)	3.226	3.388	3.557	3.697	5.274
2	Jumlah Nilai Investasi Skala Nasional (PMDN/ PMA)	421.087.307.347	442.141.672.715	464.248.756.350	1.116.738.877.010	3.211.247.219.777
3	Nilai Realisasi PMDN	399.174.178.105	419.132.887.011	440.089.531.361	627.483.288.235	545.605.223.435
4	Nilai realisasi PMA	2.409.723.140	2.530.209.297	2.656.719.761	4.536.268.077	1.293.754.918

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025

Dilihat dari sebaran jumlah perizinan di tahun 2024, Kecamatan Harau merupakan kecamatan dengan jumlah izin yang paling banyak yaitu 1.147 izin untuk usaha mikro, kecil, menengah dan besar. Jumlah perizinan dan kategori usaha penanaman modal di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 131
Jumlah Perizinan dan Kategori Usaha Penanaman Modal
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Perizinan	Kategori Usaha/Business Category			
			Mikro	Kecil	Menengah	Besar
1	Payakumbuh	635	22.012.350.000	16.233.560.000	5.819.181.048	0
2	Akabiluru	704	15.676.800.100	4.350.000.000	0	0
3	Luak	700	21.028.186.792	7.100.000.000	0	-
4	Lareh Sago Halaban	804	26.746.780.010	35.440.000.000	5.500.000.000	2.533.513.471.246
5	Situjuah Limo Nagari	396	15.161.680.474	6.000.000.000	0	0
6	Harau	1.197	51.947.482.384	43.665.126.092	5.902.000.000	83.439.883.310
7	Guguak	596	18.199.701.805	9.730.169.964	4.000.000.000	0
8	Mungka	308	10.848.099.950	4.910.000.000	0	0
9	Suliki	241	8.299.900.000	2.580.000.000	0	0
10	Bukik Barisan	279	6.898.963.280	1.500.000.000	0	10.750.000.000
11	Gunuang Omeh	255	3.549.700.000	0	0	0
12	Kapur IX	345	7.954.750.000	12.538.600.000	0	14.800.000.000
13	Pangkalan Koto Baru	244	9.852.665.105	34.102.000.000	15.683.843.807	135.512.324.410
Kabupaten Lima Puluh Kota		6.704	218.177.059.900	178.149.456.056	36.905.024.855	2.778.015.678.966

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024

M. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

Capaian kinerja urusan wajib kepemudaan dan olahraga tahun 2024, jika dilihat dari 6 indikator urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tahun 2024 realisasi keenam indikator tersebut sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 132
Capaian Kinerja Urusan Penyelenggaraan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	50%	60%	65%	50%	61
2	Persentase wirausaha muda	0,04%	0,05%	0,06%	0,12%	0,10
3	Cakupan pembinaan olahraga	7	8	9	7	9
4	Cakupan pembinaan atlet muda	110	114	122	120	243
5	Jumlah atlet berprestasi	54	142	58	214	155
6	Jumlah prestasi olahraga	42	44	46	214	54

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

N. Urusan Wajib Statistik

Capaian indikator penyelenggaraan urusan statistik Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sudah mencapai 100 persen. Hal ini berarti keseluruhan OPD, yaitu sebanyak 42 yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menggunakan data statistik dalam penyusunan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Target dan capaian penyelenggaraan urusan statistik dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2. 133
Capaian Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	55	65	75	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	55	65	75	100	100

Sumber: Dinas Kominfo Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

O. Urusan Wajib Persandian

Indikator kinerja program pada Urusan Wajib Persandian yaitu Persentase penyelenggaraan Persandian. Capaian indikator Persentase penyelenggaraan Persandian selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 134
Capaian Indikator Urusan Wajib Persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	Capaian			
	2021	2022	2023	2024
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	0	35.91%	38.29%	37,98%

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah selama 4 tahun mengalami fluktuasi dimana pada tahun 2023 Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah mengalami peningkatan dari tahun 2022 dan kembali turun di tahun 2024. Penilaian tingkat capaian indikator kinerja Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten yang dilakukan secara mandiri (self-assessment). Sementara penilaian tahun 2021 masih memakai indikator Persentase Penyelenggaraan Persandian sesuai dengan kondisi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2016-2021.

P. **Urusan Wajib Kebudayaan**

Pada tahun 2024, telah dilaksanakan 3 kegiatan penyelenggaraan festival seni dan budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota. Capaian penyelenggaraan urusan kebudayaan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2. 135
Capaian Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	5	5	3	3
2	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	105	110	110	110	110
3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	70	70	75	70	70
4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	20	20	25	-	20
5	Terlestarikannya cagar budaya	80	85	90	65	85

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Q. **Urusan Wajib Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan institusi yang berfungsi sebagai pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Dilihat dari fungsi perpustakaan tersebut maka perpustakaan memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kecerdasan dan kapasitas sumber daya manusia. Dalam menyelenggarakan urusan perpustakaan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten serta pelestarian naskah kuno milik daerah dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Gambaran mengenai penyelenggaraan perpustakaan di tingkat kabupaten tahun 2024 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. 136
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Realisasi Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.473	2.510	2.548	8.046	9,136
2	Koleksi buku yang tersedia di Perpustakaan daerah	28.316	31.416	34.716	25.549	25,975
3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,00	1,00	1,00	0,11	0,09
4	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun	0,81	0,82	0,83	2,07	2,30
5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	14.407	15.012	15.657	15.208	10,906
6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat	3	6	8	8	9
7	Nilai tingkat kegemaran membaca	10,25	11,00	12,25	64,19	79,67
8	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	3,50	4	4,5	85,47	89,72

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pengunjung perpustakaan per tahun pada tahun 2024 tercatat sebanyak 9.136 yang berarti sudah memenuhi target sebanyak 2.510 pengunjung. Akan

tetapi jika ditinjau dari segi koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, capaian sebanyak 25.975 buku belum mencapai target 2024 sebanyak 31.416 buku. Di sisi lain, indikator Rasio perpustakaan persatuan penduduk memiliki capaian sebesar 0,09 dengan target 1,00 pada tahun 2024. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertahun pada tahun 2024 sebesar 2,30 dengan target sebesar 0,82. Selanjutnya untuk indikator Jumlah koleksi judul buku perpustakaan sudah mencapai target 2024, dengan capaian sebanyak 10.906 buku. Pada tahun 2024, terdapat 9 orang pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat. Kemudian untuk indikator Nilai tingkat kegemaran membaca dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sudah mencapai target pada tahun 2024 dengan nilai capaian masing-masing sebesar 79,67 dan 89,72.

Artinya dari sisi sumber daya yang tersedia, perpustakaan sudah cukup, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dari sisi sumber daya sarana dan prasarana, hanya perlu diupayakan program-program yang ditujukan untuk menarik masyarakat dan aparatur untuk membiasakan diri mengunjungi perpustakaan, menambah perpustakaan-perpustakaan di sekolah-sekolah, kantor-kantor pemerintah dan di tempat-tempat yang dekat dengan masyarakat, dan upaya untuk meningkatkan gemar membaca. Berkaca dari data capaian indikator tahun 2024, maka upaya yang mesti dilakukan adalah menciptakan inovasi-inovasi. Inovasi-inovasi terkait hal ini mutlak perlu dilakukan, karena untuk membangun 1 unit perpustakaan yang hanya mengandalkan Anggaran Pemerintah Daerah, membutuhkan anggaran yang besar, sehingga diperlukan sokongan dari semua pihak untuk mewujudkan hal ini.

R. Urusan Wajib Kearsipan

Dalam menyelenggarakan urusan kearsipan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan arsip dinamis pemerintah kabupaten dan BUMD serta arsip statis yang diciptakan oleh pemerintah kabupaten, BUMD, organisasi kemasyarakatan/politik, pemerintah nagari dan perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam kabupaten.

Gambaran mengenai penyelenggaraan kearsipan di tingkat kabupaten pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 137
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan Kearsipan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	34,54	39,54	44,54	35,25	36,07
2	Peningkatan SDM pengelolaan kearsipan	60	60	60	5	128
3	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan)	60,00	64,00	70,00	52,99	54,06
4	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	55,00	59,00	64,00	18,41	23,97

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, ada 4 indikator yang menjadi ukuran keberhasilan penyelenggaraan Urusan Kearsipan, yaitu Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku, Peningkatan SDM pengelola kearsipan, Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan), dan Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan

negara pemerintahan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat. Dari 4 indikator tersebut di tahun 2024, hanya 1 yang telah memenuhi target yang dicanangkan, artinya kinerja dari Urusan Kearsipan belum sesuai dengan yang direncanakan.

2.4.4.3 Urusan Pilihan

A. Urusan Perikanan

Target dan capaian konsumsi ikan untuk tahun 2024 adalah 42 KG/Kapita/Tahun dengan capaian 40,24 KG/Kapita/Tahun. Hal ini berarti bahwa capaian hampir mencapai target. Realisasi capaian konsumsi ikan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 138
Capaian Penyelenggaraan Urusan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Konsumsi Ikan (KG/Kapita/Tahun)	41	42	43	40,11	40,24

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2024

PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHB pada tahun 2024 adalah Rp6.558,34 dan PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ADHK 2010 pada tahun 2024 adalah sebesar Rp4.029,09. Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2024 adalah sebesar 3,64%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 139
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A
(Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) Tahun 2024 dalam miliar

No.	Uraian	Capaian 2024
1.	PDRB ADHB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.558,34
2.	PDRB ADHK 2010 Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.029,09
3.	Persentase sub kategori perikanan terhadap PDRB	3,64

Sumber: Dinas Perikanan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

B. Urusan Pilihan Pariwisata

Urusan Pariwisata lebih dititikberatkan perkembangannnya kepada dua indikator, yaitu (a) kunjungan wisatawan mancanegara dan (b) kunjungan wisatawan nusantara. Pada tahun 2024, jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota tercatat sebanyak 500.678 kunjungan. Jumlah ini menurun jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat sebanyak 630.266 kunjungan. Pada tahun 2021, tidak terdapat sama sekali kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota dan pada tahun 2024 terdapat sebanyak 444 kunjungan wisatawan mancanegara ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Untuk dapat melihat perkembangan jumlah kunjungan wisata per bulan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 140
Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

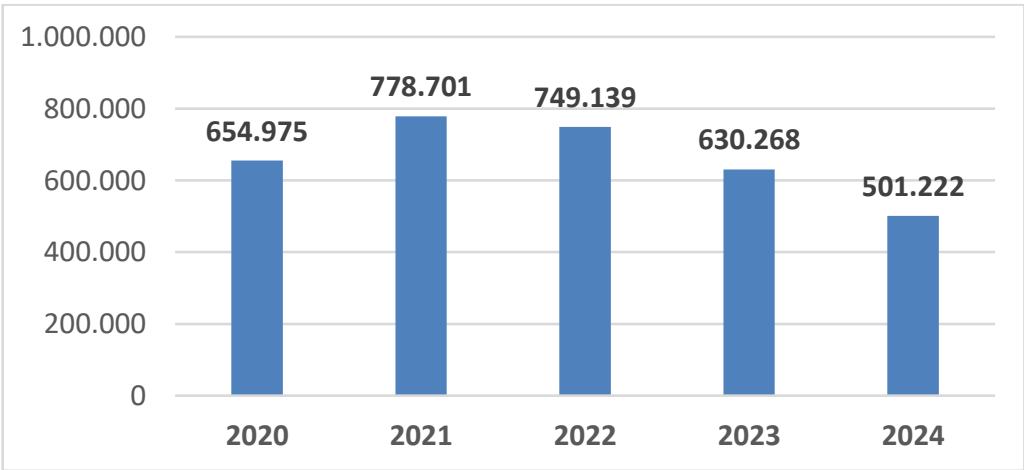
No	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Jumlah Total
1	Januari	33.213	83	33.296
2	Februari	45.407	90	45.497
3	Maret	30.697	34	30.731
4	April	74.468	33	74.501
5	Mei	37.695	51	37.746
6	Juni	34.561	44	34.605
7	Juli	47.977	51	48.028

No	Bulan	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Manca Negara	Jumlah Total
8	Agustus	36.748	56	36.804
9	September	43.235	2	43.237
10	Oktober	30.389	-	30.389
11	November	32.469	-	32.469
12	Desember	53.819	-	53.819
2024		500.678	444	501.122
2023		630.226	42	630.268
2022		749.034	105	749.139
2021		778.701	-	778.701
2020		654.296	679	654.975

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Perkembangan jumlah total wisatawan (wisatawan nusantara dan wisatawan manca negara) selama kurun waktu tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 83
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisatawan
Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024



Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2024

Pada tahun 2024, kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD senilai Rp945.653.000 dan mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang senilai Rp1.364.241.000. Sementara itu, indikator lama kunjungan wisata pada tahun 2024 sebesar 1 hari yang sudah sesuai target sebesar 1 hari. Kemudian untuk indikator tingkat hunian akomodasi juga sudah mencapai target pada 2024 sebesar 75,06% dengan capaian sebesar 76,6%.

C. Urusan Pilihan Pertanian

Terhadap komoditas padi, luas panen untuk tingkat kecamatan pada tahun 2024, yang terluas ada di Kecamatan Harau, yaitu dengan luas panen 7.964 Ha, sedangkan luas panen terkecil berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan luas panen 610,90 Ha. Sebaran luas panen untuk setiap kecamatan sekaligus produksinya pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 141
Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Padi
Menurut Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No.	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
1	Gunuang Omeh	2.096	2.041	7.739	3,79
2	Suliki	2.568	2.336	10.284	4,40
3	Bukik Barisan	3.868	4.119	14.552	3,53

No.	KECAMATAN	Tanam (ha)	Panen (ha)	Produksi (ton)	Provitas (ton/ha)
4	Guguak	4.857	4.853	18.698	3,85
5	Mungka	1.953	2.015	8.680,70	4,31
6	Payakumbuh	4.746	4.752	20.574	4,33
7	Akabiluru	4.193	4.160	18.154	4,36
8	Luak	3.150	3.425	14.726	4,30
9	Situjuah Limo Nagari	4.015	3.731	15.577	4,18
10	Lareh Sago Halaban	4.521	4.609	20.125	4,37
11	Harau	7.200	7.964	33.319	4,18
12	Pangkalan Koto Baru	610,90	610,90	1.993,60	3,26
13	Kapur IX	576	299,30	860,80	2,88
Jumlah	2024	44.354,50	44.915,20	185,283,10	4,13

Sumber: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari sisi produktivitas komoditas padi tahun 2024, produktivitas padi di Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 4,13 ton/hektar. Produktivitas padi tersebut masih rendah yang disebabkan oleh masih terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, termasuk akses petani terhadap pupuk, serta permodalan. Realisasi penyelenggaraan urusan pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 142
Capaian Penyelenggaraan Urusan Pertanian Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian 2024
		2023	2024	2025	
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,98	5,18	5,38	5,19

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Sektor pertanian memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2024 Persentase kontribusi sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB adalah sebesar 25,54%. PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 143
PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota Kategori A
(Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) terhadap PDRB Tahun 2023

No.	Uraian	Capaian 2023
1.	Persentase sub kategori Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian terhadap total PDRB	25,54

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

D. Urusan Pilihan Perdagangan

Sektor perdagangan memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota. Berdasarkan data BPS Kabupaten Lima Puluh Kota, di tahun 2024, sektor perdagangan besar dan eceran berkontribusi sekitar 16,36% atau sekitar 2.115,74 miliar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. Sementara jika dilihat dari pertumbuhannya berdasarkan harga konstan maka sektor perdagangan tumbuh sekitar 5,33%. Sebagai daerah penghubung antara bagian barat dan timur sumatera, seharusnya kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB tersebut harus lebih besar. Ditambah dengan dikenalnya daerah ini sebagai salah satu daerah lumbung pangan. Sehingga kontribusi 16,36% tersebut harusnya bisa lebih ditingkatkan. Berbicara mengenai perdagangan tentu tidak lepas dari berbicara tentang perlindungan konsumen yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Salah satu perlindungan konsumen yang merupakan kewenangan dari daerah tingkat II adalah perlindungan dari sisi ukuran timbangan atau Metrologi. Ketepatan dan akurasi hasil timbangan dalam setiap transaksi barang merupakan hak mutlak dari konsumen atau si pembeli.

Berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, idealnya transaksi jual-beli yang berjalan mulus akan mendatangkan kepuasan dan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Apapun produk dan layanan yang ditawarkan oleh penjual harus memuaskan atau memenuhi standar dan ekspektasi para pembeli. Salah satu standar ekspektasi dari si pembeli adalah ketepatan hasil pengukuran dari barang yang mereka beli. Dalam terminologi metrologi, timbangan tersebut di sebut Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Capaian persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku untuk tahun 2024 adalah 9,6%. Capaian ini belum mencapai target sebesar 50%. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 144
Realisasi Capaian Penyelenggaraan Urusan
Perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian Tahun 2024
		2023	2024	2025	
1	Persentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	45%	50%	55%	9,6%

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2024, tidak ada data mengenai pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan).

E. Urusan Pilihan Perindustrian

Sektor industri adalah salah satu sektor yang mempunyai peranan terhadap perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat salah satunya melalui indikator Kontribusi sektor industri terhadap PDRB. Selama periode 2020-2024, kontribusi sektor industri terhadap PDRB cenderung meningkat. Sebagaimana terlihat pada tabel, kontribusi sektor industri terhadap PDRB persentasenya tahun 2024 sebesar 6,65%.

Tabel 2. 145
Perkembangan Indikator Urusan Pilihan Perindustrian
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Kontribusi Lapangan Usaha Industri terhadap PDRB	%	6,36	6,49	6,47	6,51	6,65

Sumber: BPS Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Diperlukan beberapa intervensi dari Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, antara lain melalui:

1. Pemanfaatan sumber daya dan penggunaan teknologi, antara lain usaha-usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah yakni: membangun rumah produksi pengolahan songket Halaban beserta peralatannya, membangun rumah produksi gula aren beserta peralatannya, memberikan bantuan peralatan produksi seperti: mesin jahit, mesin spinner, peralatan pengolahan makanan ringan, oven pengering produksi jelly gambir.
2. Mengadakan kegiatan temu bisnis, yaitu mempertemukan IKM dengan pengusaha dan melakukan promosi produk, salah satu usaha yang dilakukan adalah mengikutsertakan IKM-IKM dalam event pameran dalam daerah dan luar daerah, bahkan ada yang sampai ke luar negeri. Kemudian memasarkan produknya secara online, antara lain: produk songket halaban dengan Shopee, produk tenun kubang, produk denai coffee dengan BukaLapak. Produk border, songket halaban dan tenun kubang dipasarkan secara langsung ke Bukittinggi, Padang, Jakarta dan ke luar negeri

yaitu ke Singapura dan Malaysia. Sedangkan produk olahan makanan ringan banyak dipasarkan ke Bukittinggi, Padang, Pekanbaru dan Jakarta.

3. Peningkatan akses permodalan, yaitu mempertemukan IKM dengan mitra usaha yang dapat memberikan suntikan modal (sistem bapak angkat) salah satunya melalui dana CSR di perusahaan.

Tabel 2. 146
Jumlah Unit Usaha Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Unit Usaha				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	937	1.270	267	917	238
2	Industri Sandang dan Kulit	100	281	80	39	11
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	5.892	6.010	38	52	12
4	Industri Logam dan Elektronika	48	77	36	38	36
5	Industri Kerajinan	203	223	15	11	7
Jumlah		7.180	7.861	436	1.057	304

Sumber: BPS, Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah industri formal di Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat dari 436 unit usaha pada tahun 2022 menjadi 1.057 unit usaha pada tahun 2023 dan menurun pada tahun 2024 304 unit. Untuk data nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 147
Nilai Produksi Menurut Jenis Industri
di Kabupaten Lima Puluh Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Industri	Produksi				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Industri Pangan	62.968.161,107	62.971.357,907	1.796.999.450	61.916.338	45.752.233
2	Industri Sandang dan Kulit	11.375.978,380	11.377.426,380	4.747.300	2.226.400	4.838
3	Industri Kimia dan Bahan Bangunan	295.391.998,511	295.393.768,511	8.238.552	29.287.800	5.384.011
4	Industri Logam dan Elektronika	7.485,515	11.545,515	1.899.500	1.829.800	1.818.650
5	Industri Kerajinan	1.378.206,307	1.378.246,307	61.824.000	614.500	2.220
Jumlah		371.121.829,82	371.132.344,62	1.873.708.802	95.874.838	52.961.952

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka 2021-2025

Nilai produksi menurut jenis industri di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 mengalami penurunan yang signifikan dimana pada tahun 2020 totalnya mencapai Rp371.121.829,82 sedangkan pada tahun 2024 menurun hingga Rp.52.961.952

2.4.4.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

i. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya menyebutkan bahwa SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Adapun komponen dalam penilaian SAKIP tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 148
Hasil Evaluasi SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30%	22,37
2.	Pengukuran Kinerja	30%	17,29
3.	Pelaporan Kinerja	15%	10,26
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,24
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	62,16
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Sumber: Bappelitbangda, Inspektorat Setda, LHE, 2024

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai sebesar 62,16 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “baik”, yaitu pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sudah baik khususnya pada unit kerja utama, namun masih adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Perkembangan hasil penilaian peringkat SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 149
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Peringkat Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tahun 2020 peringkat nilai SAKIP Kabupaten Lima Puluh Kota sudah mendapat predikat “B” sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang berarti selama empat tahun terakhir akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun masih perlu perbaikan, baik terhadap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun terkait evaluasi internal dan capaian kinerja daerah.

ii. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah perlu disusun IKM sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 150
Perkembangan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,99	84,09	86,55	87,26	86,40

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2024 dilaksanakan oleh 37 Perangkat Daerah dan Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dari survei tersebut didapatkan IKM Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar 86,40. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa IKM Kabupaten Lima Puluh Kota selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Selama tahun 2020-2024, IKM Kabupaten Lima Puluh Kota meningkat sebesar 2,41 poin.

iii. Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah 70,81 dengan kategori “BB”. Dari nilai ini dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks dari tahun 2021.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota perlu meningkatkan upaya yang lebih baik dalam pelaksanaan reformasi birokrasi agar mencapai 75,00 predikat “BB” pada tahun 2026. Indeks Reformasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 151
Data Capaian Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Indikator	Capaian				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	69,87	48,85 (C)	51,81 (CC)	58,5 (CC)	70 .81(BB)

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

iv. Potensi Zakat

Berkaitan dengan potensi zakat, realisasi penerimaan selama 5 tahun terakhir jika ditinjau dari jumlah orang mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, penerimaan zakat ditargetkan sebanyak 7.426 orang dan terealisasi sebanyak 70.472 orang dengan rincian sebesar Rp.10.793.229.835. Jumlah dana yang disalurkan pada tahun 2024 sebesar Rp. 9.156.829.500 kepada sebanyak 21.190 orang. Untuk potensi penerimaan Zakat dari ASN pada tahun 2024 adalah sebesar Rp.12.053.760.000,-. Sedangkan untuk *Muzzaki-muzzaki* yang berasal dari pengusaha, kontraktor, petani dan *muzzaki* lainnya belum terjangkau oleh BAZNAS, sehingga dalam hal ini *maqashid al-Syariah* zakat untuk *muzzaki* di Lima Puluh Kota belum sepenuhnya terpenuhi. Pengumpulan yang dilakukan juga baru sebatas dana zakat, sedangkan untuk dana lain seperti infak, sedekah, dana sosial keagamaan lainnya yang juga memiliki potensi luar biasa belum dikumpulkan oleh BAZNAS. Target dan penerimaan Zakat di Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 152
Data Target dan Penerimaan Zakat
Kabupaten Lima Puluh Kota melalui BAZNAS Tahun 2020-2024

No	Tahun	Target Penerimaan		Realisasi Penerimaan		Jumlah Dana Yang Disalurkan		Potensi Penerimaan Zakat ASN	
		Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.	Orang	Rp.
1	2020	4.500	4.640.000.000	1.692	3.978.733.270	8.084	3.924.103.900	6.241	10.241.550.000
2	2021	3.842	4.645.000.000	4.014	4.377.238.897	7.125	4.734.792.837	6.241	10.241.550.000
3	2022	4.779	7.008.000.000	4.028	4.358.000.632	7.311	4.283.003.079	6.241	10.241.550.000
4	2023	9.430	8.000.000.000	15.955	6.022.017.170	7.461	4.586.991.434	6.241	10.241.550.000
5	2024	7.426	7.000.000.000	70.472	10.793.229.835	21.190	9.156.829.500	6.278	12.053.760.000

Sumber: Baznas Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Berkaitan dengan *mustahiq* yaitu pada penyaluran zakat. Program-program yang diterapkan BAZNAS Kabupaten Lima Puluh Kota pada umumnya masih bersifat konsumtif saja. Dari persentase dana yang terhimpun, belumlah disalurkan untuk zakat produktif. Sehingga hal ini tidak akan menggerakkan ekonomi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain pengumpulan zakat yang belum optimal, BAZNAS juga belum mampu sepenuhnya memberikan kenyamanan terhadap *muzzaki* selama ini.

v. Angka Partisipasi Kasar Surau/MDA/TPQ

Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ diperoleh dari berapa jumlah anak yang mendapatkan akses belajar pada lembaga pendidikan

keagamaan yang terdapat di nagari-nagari yaitu TPQ, MDA dan Surau. Dari data tahun 2024, jumlah anak yang belajar di seluruh lembaga tersebut mencapai 47.999 murid, dengan rincian pada TPQ sebanyak 38.113 murid, pada MDTA sebanyak 8.178 murid dan pada surau 1.708 murid. Jumlah dan jumlah murid secara rinci pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 153
Jumlah TPQ, MDTA dan Surau Serta Jumlah Murid Tahun 2024

No	KECAMATAN	TPQ		MDTA		SURAU	
		Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
1	Guguak	127	2.193	81	1.252	4	80
2	Akabiluru	134	2.413	53	1.058	-	-
3	Harau	286	5.948	10	185	76	1.435
4	Kapur IX	180	3.106	-	-	-	-
5	Lareh Sago Halaban	282	4.850	24	389	7	170
6	Luak	155	2.907	5	91	-	-
7	Situjuah Limo Nagari	159	2.775	3	110	-	-
8	Suliki	107	1.870	68	1.064	-	-
9	Mungka	124	2.165	29	512	-	-
10	Bukik Barisan	111	2.153	87	1.907	-	-
11	Gunuang Omeh	75	1.274	41	737	1	23
12	Pangkalan Koto Baru	116	2.934	6	202	-	-
13	Payakumbuh	197	3.525	40	671	-	-
	JUMLAH	2.053	38.113	447	8.178	88	1.708

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Tabel di atas menggambarkan jumlah guru mengaji dan jumlah murid masing-masing lembaga dilihat dari masing-masing kecamatan. Jumlah terbanyak dari guru dan murid ada pada TPQ, dimana jumlah gurunya sebanyak 2.053 orang dengan jumlah murid sebanyak 38.113 orang. Jumlah guru dan murid terbanyak selanjutnya terdapat pada MDTA dengan jumlah guru sebanyak 447 orang dan jumlah murid sebanyak 8.178 murid. Sedangkan untuk surau sebanyak 88 orang guru dengan jumlah murid 1.708 orang. Jika dilihat perbandingan jumlah murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau dengan jumlah penduduk usia 7-15 tahun, ternyata masih ada anak yang tidak mengikuti atau tidak mendapat akses untuk mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau. Hal inilah yang juga menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, bagaimana upaya agar seluruh anak usia 7-15 tahun ini bisa memperoleh pendidikan tersebut. Adapun perkembangan jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 154
Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 - 2023

No.	Jumlah TPQ/MDTA/Surau/Masjid	2020	2021	2022	2023	2024
1.	TPQ	805	870	880	879	-
2.	MDTA	136	141	126	137	-
3.	Surau	24	25	42	44	-
4.	Masjid	419	429	430	435	-

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Untuk data tahun 2024 untuk jumlah TPQ/MDTA/Surau/ Masjid di Kabupaten Lima Puluh Kota belum ada datanya, Jika dilihat Angka Partisipasi Kasar (APK) Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2018 sampai 2021 terus mengalami peningkatan akan tetapi mengalami penurunan pada tahun 2022 dan meningkat kembali pada tahun 2023 sebagaimana diperlihatkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 155
APK Murid Belajar Agama Usia 7-15 Tahun
di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1.	APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun	67,94	76,39	72,69	77,52	77,52

Sumber: Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Pada tahun 2024, Angka Partisipasi Kasar Murid belajar agama usia 7-15 tahun di Surau/MDA/TPQ sebesar 77,52. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi penduduk usia 7-15 tahun untuk belajar agama masih rendah, masih ada sekitar 23 dari 100 penduduk usia 7-15 tahun yang belum mengenyam pendidikan agama di Surau/MDA/TPQ. Langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka peningkatan APK murid yang belajar di TPQ, MDTA dan Surau di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya tetap memberikan insentif berupa honor kepada guru-guru TPQ, MDTA dan Surau serta Imam dan Gharin, agar mereka lebih bersemangat dan bergairah untuk tetap mengajar di lembaga tersebut, hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah pada pendidikan agama khususnya pendidikan Al Qur'an.

Di samping itu juga melalui pembinaan dan penilaian Lembaga Didikan Subuh (LDS) serta melaksanakan MTQ secara berjenjang mulai di tingkat Nagari sampai Kabupaten. Dengan peningkatan APK murid yang mengikuti pendidikan di TPQ, MDTA dan Surau, maka sasaran strategis ini Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan yaitu “Meningkatnya Aktivitas Masjid/ Musholla/ Surau/MDA/TPQ” juga akan tercapai. Selanjutnya dampak yang diharapkan adalah terwujudnya pembinaan karakter generasi muda (anak nagari) melalui pendidikan yang diambil dari nilai-nilai surau dahulu yang telah melahirkan tokoh-tokoh dari Minangkabau yang berkiprah di tingkat Nasional maupun Internasional.

B. Sekretariat DPRD

Capaian indikator kinerja penunjang urusan sekretariat dewan mencapai target di tahun 2023 baik dilihat dari tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD kabupaten, tersusun dan terintegrasinya program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan perda dan fungsi anggaran dalam dokumen RPJMD dan RKPD. Program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD juga sudah terintegrasi pada tahun 2023. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 156
Capaian Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Provinsi/Kab/Kota	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	ada	ada	ada	ada	ada
3	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	ada	ada	ada	ada	ada

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

2.4.4.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Perencanaan

Capaian target indikator kinerja penunjang urusan perencanaan pembangunan dipenuhi untuk tahun 2023. Setiap dokumen perencanaan yang ada selalu ditetapkan dengan Perda atau Perkada. Sedangkan untuk indikator konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD tersedia di Dokumen RKPD. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel berikut ini

Tabel 2. 157
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Penunjang Pemerintahan
(Perencanaan Pembangunan) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Aspek/Fokus/ Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target Capaian			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/ Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran konsisten program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Walaupun semua target di tahun 2024 tercapai, bukan berarti urusan penunjang pemerintahan ini tidak mengalami permasalahan. Beberapa permasalahan antara lain, yaitu: sinkronisasi dan sinergitas perencanaan antar tingkat pemerintahan belum optimal; perumusan indikator kinerja dan penentuan kegiatan prioritas pembangunan pada setiap bidang urusan belum optimal; dan perencanaan penganggaran pada dokumen perencanaan belum didasarkan pada rincian kebutuhan. Permasalahan lainnya terdapat pada pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang belum optimal, antara lain: belum optimalnya evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan dokumen perencanaan; dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integrasi, Spasial (THIS); belum optimalnya ketersediaan hasil analisa data dan informasi capaian kinerja Perangkat Daerah; belum optimalnya dukungan SKPD terhadap pencapaian sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dan Program Prioritas Daerah; pengendalian pembangunan belum diperkuat dan difungsikan menjadi salah satu kontributor yang mempengaruhi tingkat pencapaian sasaran prioritas daerah; peran Bapelitbang dalam perencanaan belum optimal dalam mengarahkan anggaran untuk melaksanakan perencanaan pembangunan daerah.

B. Keuangan

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah. Melalui PAD pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya.

PAD merupakan salah satu jenis sumber pendapatan daerah. Sebagai sumber pendapatan, pemerintah daerah dapat menghimpun PAD dari pemungutan pajak dan retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan sumber lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PAD juga mencerminkan tingkat kemandirian dari suatu daerah. Semakin tinggi capaian PAD pada suatu daerah akan membuktikan bahwa daerah tersebut mampu melaksanakan desentralisasi fiskal. Selain itu, capaian tersebut menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung pada pemerintah pusat. PAD di Kabupaten Lima Puluh Kota masih rendah dibandingkan dengan jumlah total pendapatan yang diterima, yakni masih di bawah 10%. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat. Perkembangan

PAD dan persentasenya terhadap Pendapatan di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat dari Tabel 2.127.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

- Wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.
- Wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
- Tidak wajar (*adversed opinion*) adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
- Tidak menyatakan pendapat (*disclaimer of opinion*) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2. 158
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019-2023

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Pendapatan Asli Daerah	77.429.483.703,61	79.852.144.928,96	82.916.128.991,64	102.016.528.328,68	95.771.634.112,99
Pendapatan	1.209.471.396.990,61	1.260.792.546.305,96	1.142.618.819.349,64	1.262.125.884.491,68	1.292.646.891.093,99
Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan	6,40	6,33	7,26	8,08	7,36

Sumber: Kabupaten Lima Puluh Kota Dalam Angka, Tahun 2024

C. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan ASN dalam melaksanakan tugas. Untuk lebih jelasnya tersaji pada tabel berikut:

Tabel 2. 159
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	53,72	52,66	52,72	59,51	77,55

Sumber: BKPSDM Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari tabel nilai Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 nilainya adalah 53,72 kemudian pada tahun 2021 turun sedikit menjadi 52,66 dan naik kembali pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 52,72, lalu meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi sebesar 59,51 dan meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 77,55.

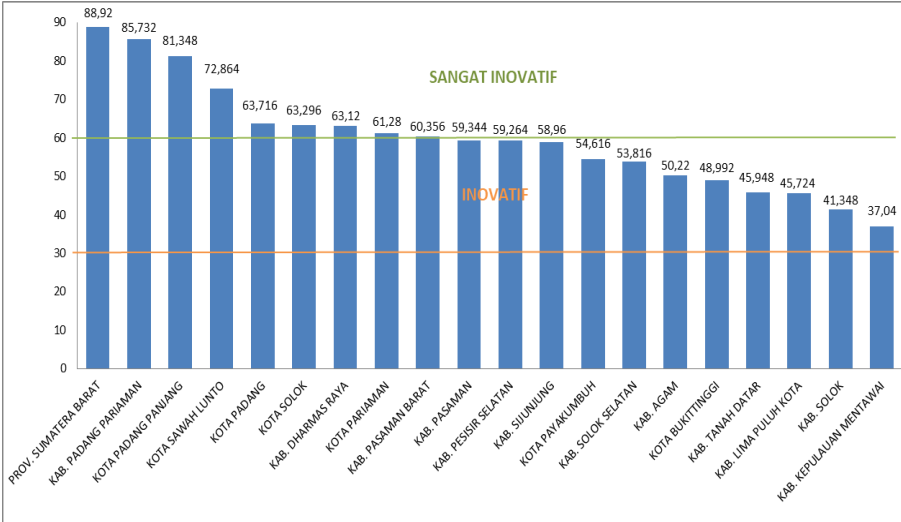
D. Penelitian dan Pengembangan

Urusan penunjang pemerintahan untuk Layanan Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini masih berada dalam satu sub bidang (setingkat eselon IV) dibawah Bidang Ekonomi, Penelitian dan Pengembangan pada perangkat daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan di

daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kegiatan urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) selama ini belum optimal karena terkendala dengan kedudukan organisasi Litbang yang masih eselon IV serta kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama belum adanya fungsional peneliti untuk urusan kelitbangan ini.

Adapun beberapa kegiatan kelitbangan yang telah dilakukan antara lain adalah inventarisasi pelaksanaan penelitian/kajian yang dilaksanakan di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk kegiatan inventarisasi inovasi yang dilaksanakan oleh OPD, Nagari dan individu. Selain itu, sejak tahun 2018 Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengikuti penilaian Indeks Inovasi Daerah/IGA (*Innovation Government Award*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sejak tahun 2017. Adapun Nilai Indeks Inovasi lingkup pemerintah daerah se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 84
Nilai Indeks Inovasi Daerah Dalam Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024



Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2025

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa Provinsi Sumatera Barat bersama dengan 6 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat mendapatkan predikat Provinsi dan Kota Sangat Inovatif. Selanjutnya 12 Kabupaten/Kota lainnya mendapat predikat Kabupaten/Kota Inovatif, termasuk Kabupaten Lima Puluh Kota. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapatkan predikat kurang inovatif. Data perolehan Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota beberapa tahun terakhir sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 160
Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

No.	Tahun	Nilai Indeks Inovasi Daerah	Ket.
1.	2020	197	Kurang Inovatif
2.	2021	28,81	Kurang Inovatif
3.	2022	47,47	Inovatif
4.	2023	37,84	Inovatif
5.	2024	45,72	Inovatif

Sumber: Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024

Dengan mempedomani tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan interval skor Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2020-2024, Dengan demikian, untuk membandingkan capaian Indeks Inovasi Daerah selama 5 tahun terakhir dapat dilakukan dengan cara membandingkan predikat dari indeksnya. Pada tahun 2020 indek inovasi daerah memiliki nilai kurang inovatif. Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2021 mendapat predikat kurang inovatif, yang berarti belum ada peningkatan dari tahun 2020. Kemudian pada tahun 2022 sampai dengan 2024. Kabupaten Lima Puluh Kota mendapat predikat inovatif. Walaupun telah mendapat predikat inovatid, perlu kiranya dilakukan upaya peningkatan kinerja dan jumlah SDM dari urusan kelitbangan guna meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan dan pelaksanaan Inovasi di Kabupaten Lima

Puluh Kota. Sehingga diharapkan urusan kelitbangan ini perlu mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah sehingga dapat meningkatkan aspek daya saing daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun target dan capaian indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan Penelitian Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 161
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan
Penunjang Pemerintahan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbangan	20	20	20	20	66,67
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	100	100	100	100	100
3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	27,91	30,23	32,56	34,88	50
4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	23,26	23,26	23,26	38,89	55,88

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Dari 4 indikator penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan (penelitian dan pengembangan), seluruhnya sudah mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tetap perlu melakukan upaya yang lebih baik dalam hal implementasi dan pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.4.4.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

i. Pengawasan

Terdapat 3 indikator capaian kinerja penyelenggaraan unsur pengawasan urusan pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota. Indikator Persentase tindak lanjut temuan ekstern dan intern masing-masing memiliki capaian sebesar 82,09% dan 78%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 162
Capaian Indikator Unsur Pengawasan Urusan
Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Indikator	Target IKD Dalam RPJMD			Capaian	
		2023	2024	2025	2023	2024
1	Persentase tindak lanjut temuan					
	- Ekstern	82,5	83,00	83,50	82,09	83,3
	- Intern	84	84,50	85,00	78	77
2	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berada pada level 3, artinya pada tingkatan ini Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Kapabilitas APIP Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 berada pada level 3, artinya APIP Kabupaten Lima Puluh Kota telah melaksanakan penilaian dan pelaporan atas efisiensi, efektivitas dan kehematan dari operasi, aktivitas, atau program; atau berkaitan dengan tata kelola/manajemen risiko/pengendalian (*governance, risk Manajement, and control*), dan hasil yang dicapai serta APIP telah melaksanakan analisis atas kondisi/situasi dan memberikan pedoman dan nasehat kepada manajemen. Jasa advis yang diberikan menambah nilai tanpa menggantikan tanggung jawab manajemen. Jasa advis diarahkan

melalui fasilitasi bukannya penjaminan, yang termasuk di dalamnya adalah pelatihan, reviu pengembangan sistem, penilaian mandiri atas pengendalian dan kinerja, konseling dan pemberian nasihat.

2.4.4.7 Unsur Kewilayahan

i. Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dijelaskan bahwa Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. Selanjutnya, urusan yang menjadi kewenangan Kecamatan adalah penunjang urusan pemerintah pada wilayah kecamatan yang melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan umum dan otonomi daerah. Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Kecamatan yang disebut Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota di atas, seluruh Kecamatan, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah yaitu :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum, yaitu urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu tugas yang melekat pada jabatan Camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu Camat menerima pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati.

2.4.4.8 Unsur Pemerintahan Umum

i. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 105 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di wilayah Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan

penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- e. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten;
- f. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati

Pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai berikut :

1. Indikator Kinerja Utama Persentase Fasilitasi Penyelesaian Konflik Sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota tercapai 100%. Hal ini karena adanya adanya kerja sama yang baik dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, aparatur pemerintahan Kecamatan , Nagari ,dan Wali Jorong
2. Indikator Kinerja Utama Persentase Pelaksanaan Peringatan Hari Besar Nasional tercapai 100%. Hal ini dapat terjadi karena:
 - Tingginya partisipasi masyarakat dalam rangka peringatan peristiwa sejarah dalam rangka hari bela Negara yang dilaksanakana di 7(tujuh) titik Peringatan Peristiwa PDRI di Kabupaten Lima Puluh Kota.
 - Kerja sama yang baik dengan FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
3. Indikator Kinerja Utama Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pileg, Pilpres dan Pemilu tercapai 97% hal ini disebabkan kerja sama yang FORKOPIMDA Kabupaten Lima Puluh Kota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Badan Pengawas Pemilu kabupaten Lima Puluh Kota dan jajarannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota juga dengan Aparatur Pemerintahan Kecamatan dan Nagari serta Tokoh Masyarakat.
4. Indikator Kinerja Utama Persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras tidak mencapai target hal ini disebabkan oleh karena :dan capaiannya yang terendah adalah persentase penurunan jumlah pengguna narkoba dan minuman keras. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan alokasi anggaran untuk penyuluhan narkoba dan minuman keras.
 - Terbatasnya dana untuk penyuluhan narkoba kepada masyarakat, dimana hanya 25 (dua puluh) lima orang perkecamatan.
 - Semakin canggihnya modus operandi sindikat dan penyelundup narkoba.
 - Faktor geografi dari Negara Indonesia yang menyebabkan masih belum optimalnya pengawasan.
 - Faktor kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, dimana salah satunya disebabkan oleh gaya hidup konsumtif.

Sanksi hukum yang belum memberikan efek jera bagi pengguna maupun pengedar narkoba dan minuman keras.

2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan tahapan perencanaan pembangunan tersebut meliputi: 1) Penyusunan perencanaan, 2) Penetapan rencana, 3) Pengendalian pelaksanaan rencana, 4) Evaluasi pelaksanaan rencana. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana dilakukan oleh masing - masing pimpinan Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 dimaksud, terhadap pengendalian dan evaluasi diatur lebih lanjut oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah. Tata cara pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bertujuan untuk mewujudkan: (1) Konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan Daerah.; (2) Konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional; (3) Konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah; (4) Konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan (5) Kesesuaian antara capaian pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 181 ayat (3) Permendagri Nomor 86 tahun 2017, menyatakan bahwa Bupati/Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah lingkup Kabupaten/Kota. Selanjutnya di tingkat Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pengendalian dan evaluasi dimaksud meliputi: (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah; (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan (3) Evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.

Evaluasi dan pengendalian terhadap rencana pembangunan daerah merupakan hal yang harus dilakukan oleh Kabupaten/Kota. Pada tahun 2025, dilakukan terhadap evaluasi hasil rencana pembangunan daerah tahun 2025 sampai dengan TW I yang dihubungkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan daerah tahun 2025, dan Indikator Kinerja Utama Kepala Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 (RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026). Evaluasi dan pengendalian ini akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan untuk perencanaan tahun berikutnya yaitu perencanaan pembangunan daerah tahun 2026.

Maksud dan tujuan evaluasi dan pengendalian rencana pembangunan daerah tahun 2025 sampai TW I adalah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah, konsistensi antara RKPD tahun 2025 sampai TW I dengan RPJMD tahun 2021-2026 dilihat dari capaian pembangunan daerah berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.163 berikut.

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	681.802.960.670		1.601.933.599.937	-	431.572.567.901		82.019.946.911		82.019.946.911				1.683.953.546.848	34,24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		679.387.654		804.615.278	100	182.582.900		-		0				804.615.278	8,24							
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	211.243.542	9	369.165.497	2	157.827.900		0		0			9	369.165.497	4,36	1,75	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	33.733.796	3	31.341.400	1	1.602.000		0		0			3	31.341.400	3,00	0,93	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	33.733.796	3	44.558.700	1	1.602.000		0		0			3	44.558.700	3,00	1,32	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	33.733.796	4	41.665.900	1	1.602.000		0		0			4	41.665.900	2,00	1,24	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	33.733.796	3	44.934.100	1	1.602.000		0		0			3	44.934.100	3,00	1,33	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	266.200.000	4	214.341.781	1	10.980.000		0		0			4	214.341.781	4,00	0,81	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	67.008.929	3	58.607.900	1	7.367.000		0		0			3	58.607.900	3,00	0,87	Sub-Substansi Perencana dan Pelaporan					
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi keuangan perangkat daerah		673.619.912.231		1.595.147.298.412	100	430.674.344.491		82.019.946.911		82.019.946.911				1.677.167.245.323	5,87							
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12	673.524.745.731	48	1.595.082.965.412	4.300	430.666.864.491	4300	82.019.946.911		82.019.946.911			48	1.677.102.912.323	4,00	2,49	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	21.961.500	12	14.858.000	1	1.496.000		0		0			12	14.858.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	21.961.500	12	14.827.000	1	1.496.000		0		0			12	14.827.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12	21.961.500	12	14.974.000	1	1.496.000		0		0			12	14.974.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD	12	14.641.000	12	9.678.000	18	1.496.000		0		0			12	9.678.000	1,00	0,66	Sub-Substansi Keuangan dan BMD					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.				9	Rp.	10	11		12	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12	14.641.000	12	9.996.000	1	1.496.000		0		0			12	9.996.000	1,00	0,68	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah		1.477.871.591		889.406.000	100	16.350.000		-		0				889.406.000		0,60		
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	1.477.871.591	1	889.406.000	1	16.350.000		0		0			1	889.406.000	0,50	0,60	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi kepegawaian perangkat daerah		467.377.323		475.661.000	100	135.500.000		-		0				475.661.000		2,31		
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	60	79.860.000	-	-	80	72.500.000		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	22	176.357.500	28	56.616.000	10	3.000.000		0		0			28	56.616.000	1,27	0,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	22	211.159.823	824	419.045.000	50	60.000.000		0		0			824	419.045.000	37,45	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan komponen administrasi umum perangkat daerah		949.576.927		878.464.940	100	199.473.480		-		0				878.464.940		4,05		
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	67.512.579	105	46.591.000	1	8.815.000		0		0			105	46.591.000	8,75	0,69	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	424.232.292	22	303.640.757	12	130.658.460		0		0			22	303.640.757	1,83	0,72	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12	288.387.770	40	192.547.000	1	25.000.020		0		0			40	192.547.000	3,33	0,67	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	169.444.286	22	335.686.183	1	35.000.000		0		0			22	335.686.183	1,83	1,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah pemenuhan komponen pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah				-	-	-		-		0				0		-		
					Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
					Pengadaan mebel	Jumlah Mebel yang Disediakan			-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Keuangan dan BMD	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3.854.003.065		3.068.233.332	100	191.618.030		-		0				3.068.233.332		9,12		
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12.937.320	45	17.020.000	1	2.500.000		0		0			45	17.020.000	3,75	1,32	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	78.236.180	49	389.680.362	1	87.000.030		0		0			49	389.680.362	4,07	4,98	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	60.500.000	12	129.757.720	-	-		0		0			12	129.757.720	1,00	2,14	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	3.702.329.565	42	2.531.775.250	1	102.118.000		0		0			42	2.531.775.250	3,48	0,68	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1											
								5		6		7		8					9		10			11	12
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan komponen pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		754.831.880		669.920.975	-	172.699.000		0		0			669.920.975		4,04			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12	193.615.730	44	229.222.500	1	39.190.000		0		0			44	229.222.500	3,63	1,18	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	337.341.950	33	198.705.650	5	84.058.000		0		0			33	198.705.650	2,75	0,59	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12	91.839.000	128	130.530.000	10	39.180.000		0		0			128	130.530.000	10,67	1,42	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	132.035.200	11	111.462.825	1	10.271.000		0		0			11	111.462.825	0,92	0,84	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	
						Program pengelolaan pendidikan	Persentase pengelolaan pendidikan	100%	146.414.028.902		256.435.648.471	-	70.527.281.575		-		0				398.597.336.662		78,58		
						Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah dasar		91.949.019.953		255.979.583.471	95	69.983.451.275		-		0				255.979.583.471		78,58		
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	3.729.967.780	7	848.230.328	1	359.200.000		0		0			7	848.230.328	0,39	0,23	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7	2.840.322.056	16	4.031.517.901	7	1.319.628.000		0		0			16	4.031.517.901	2,29	1,42	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	3.632.537.116	30	4.245.672.276	-	-		0		0			30	4.245.672.276	0,97	1,17	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	4.263.557.694	16	4.436.600.960	7	1.100.560.000		0		0			16	4.436.600.960	1,78	1,04	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	12	8.116.079.562	169	20.421.621.757	30	2.856.680.000		0		0			169	20.421.621.757	14,06	2,52	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1	2.281.577.041	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	4.355.189.457	54	22.126.524.250	30	11.109.978.000		0		0			54	22.126.524.250	3,84	5,08	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	16	1.563.488.000	10	549.949.000		0		0			16	1.563.488.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	-	-	-	-		0		0			0	0			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8	868.120.792	10	1.640.754.000	10	957.420.000		0		0			10	1.640.754.000	1,25	1,89	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	6	2.711.526.244	30	3.733.122.600	7	1.482.364.075		0		0			30	3.733.122.600	4,99	1,38	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	0	0	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	31	2.527.901.750	507	2.510.086.100	5	250.000.000		0		0			507	2.510.086.100	16,35	0,99	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
						-	-	0	0	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						-	-	0	0	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	370	4.892.183.005	5.094	3.794.855.500	1	100.000.000		0		0			5.094	3.794.855.500	13,77	0,78	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						-	-	0	0	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						-	-	5	481.277.500	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	362	-	100	100.000.000		0		0			362	0	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	21	1.191.245.000	35	18.755.036.100	1	5.060.000.000		0		0			35	18.755.036.100	1,66	15,74	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	1	142.254.618	360	195.573.000	-	-		0		0			360	195.573.000	360,00	1,37	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas					
						-	-	1	37.351.188	360	741.279.734	-	-		0		0			360	741.279.734	360,10	19,85	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4	335.721.990	101	511.938.595	373	262.835.000		0		0			101	511.938.595	25,25	1,52	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2	293.619.266	258	1.246.740.061	1	150.000.000		0		0			258	1.246.740.061	129,15	4,25	Seksi PTK SD					
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	146.730.106	1.924	2.213.800.401	80	520.000.000		0		0			1.924	2.213.800.401	962,23	15,09	Seksi PTK SD					
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	-	-			373	450.000.000							0				Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	366	49.055.528.077	736	157.621.181.408	373	37.971.401.200		0		0			736	157.621.181.408	2,01	3,21	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas					
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	1	46.329.714	1	48.847.500	-	-		0		0			1	48.847.500	1,00	1,05	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas					
						Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun			17	4.575.486.000	5	4.673.436.000		0		0			17	4.575.486.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-			2	300.000.000							0				Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas					
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-			373	55.000.000							0				Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			360	717.227.000	1	300.000.000		0		0			360	717.227.000			Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas					
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-			3	55.000.000							0				Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama		38.362.338.823		91.256.020.603	-	28.905.482.100		-				2.326	91.256.020.603		43,25							
					Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	18	1.460.524.934	7	986.088.000	3	904.594.000		0			0	7	986.088.000	0,39	0,68	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	7	3.895.580.649	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	31	1.204.519.329	11	1.782.493.800	10	520.800.000		0			0	11	1.782.493.800	0,35	1,48	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	9	605.000.000	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12	3.245.848.075	21	7.345.311.900	5	1.908.080.000		0			0	21	7.345.311.900	1,75	2,26	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	0	0	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					-	-	1	0	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1	363.000.000	-	750.428.100	-	-		0			0	0	750.428.100	0,00	2,07	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	6	696.559.417	41	1.839.985.100	4	750.000.000		0			0	41	1.839.985.100	6,77	2,64	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	2.751.621.554	20	3.177.122.282	6	3.000.000.000		0			0	20	3.177.122.282	5,00	1,15	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	811.670.420	5	985.722.881	6	749.206.700		0			0	5	985.722.881	5,00	1,21	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	481.277.500	3	1.411.590.167	6	850.528.000		0			0	3	1.411.590.167	1,00	2,93	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					-	-	0	0	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	0	0	11	299.355.000	5	504.060.000		0			0	11	299.355.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	21	1.331.000.000	1	24.595.000	6	150.000.000		0			0	1	24.595.000	0,05	0,02	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					-	-	0	0	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					-	-	0	605.000.000	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas						
					Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	0	605.000.000	1.079	4.658.997.000	1	100.000.000		0			0	1.079	4.658.997.000	0,00	7,70	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						
					Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	0	0	57	483.204.000	500	50.000.000		0			0	57	483.204.000	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						
					-	-	57	605.000.000	-	-	-	-		0			0	0	0	0,00	0,00	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						
					Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	0	605.000.000	17	1.803.198.225	8	500.000.000		0			0	17	1.803.198.225	0,00	2,98	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						
					Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	1	39.024.920	59	108.214.900	-	-		0			0	59	108.214.900	59,00	2,77	Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas						
					-	-	1	26.780.785	57	190.777.800	-	-		0			0	57	190.777.800	56,97	7,12	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						
					Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	4	447.262.585	200	558.073.860	100	545.008.100		0			0	200	558.073.860	50,00	1,25	Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1											
								5		6		7		8					9		10			11	12
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	2	258.916.768	91	506.865.808	10	35.000.000		0		0			91	506.865.808	45,64	1,96	Seksi PTK SMP	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	2	168.246.386	524	844.432.189	250	455.680.000		0		0			524	844.432.189	261,91	5,02	Seksi PTK SMP	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	-	-			61	347.000.000								0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	366	18.088.955.500	59	62.705.535.491	61	16.782.920.000		0		0			59	62.705.535.491	0,16		Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	1	66.550.000	-	68.265.000	-	-		0		0			0	68.265.000	0,00		Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-			51	36.000.000								0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan			59	269.699.100	1	216.775.000		0		0			59	269.699.100			Seksi Kurikulum dan Penilaian Dikdas	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-			3	36.000.000								0			Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	-	-	4	456.065.000	4	463.830.300		0		0			4	456.065.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana Dikdas	
						Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini		8.495.807.872		32.563.208.642	95	7.395.238.597		-		0				32.563.208.642		180,19		
						-	-	3	297.271.263	14	1.855.919.496	-	-		0		0			14	1.855.919.496	4,66	6,24	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	0	0	61	4.663.709.309	10	967.084.997		0		0			61	4.663.709.309	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	413.477.147	8	1.256.004.316	1	171.800.000		0		0			8	1.256.004.316	2,62	3,04	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						-	-	1	99.825.000	-	49.881.358	-	-		0		0			0	49.881.358	0,00	0,50	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	30	254.437.953	18	448.713.000	3	189.000.000		0		0			18	448.713.000	0,60	1,76	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia			100	760.961.600	-	-		0		0			100	760.961.600	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
													I												
							1	2				3	4	5				6		7			8		9
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
						Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik PAUD	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	223	7.003.988	1.509	1.048.391.343	1	50.000.000		0		0			1.509	1.048.391.343	6,77	149,68	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	4	478.647.831	34	1.622.252.820	1	504.111.600		0		0			34	1.622.252.820	8,50	3,39	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	4	475.646.160	5.101	736.863.700	328	322.780.000		0		0			5.101	736.863.700	1.275,25	1,55	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
						-	-	1	0	70	69.140.000	-	-		0		0			70	69.140.000	0,00	0,00	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	1	105.361.960	281	962.600.623	90	161.052.000		0		0			281	962.600.623	281,46	9,14	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1	91.133.570	151	179.874.862	328	35.000.000		0		0			151	179.874.862	150,99	1,97	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
						Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	6341	6.273.003.000	294	18.250.500.000	328	4.258.800.000		0		0			294	18.250.500.000	0,05	2,91	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	0	0	280	30.300.000	328	15.000.000		0		0			280	30.300.000	0,00	0,00	Seksi Kurikulum, Penilaian dan Peserta Didik PAUD	
						Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	-	-			328	15.000.000							0					
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-			1	50.000.000							0					
						Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	-	-	1	480.969.215	3	483.060.000		0		0			1	480.969.215			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah			1	147.127.000	1	147.550.000		0		0			1	147.127.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	-	-			1	25.000.000							0					
						Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan pendidikan anak usia dini		7.606.862.254		18.798.523.946	95	7.000.673.800		-		0				18.798.523.946		255,88		
						Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun	-	-	3	885.948.000	-	-		0		0			3	885.948.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	356.708.000	5	452.751.967	-	-		0		0			5	452.751.967	1,66	1,27	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						-	-	0	0	-	-	-	-		0		0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah/PNF/Kesetaraan	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	21	428.708.445	19	39.738.000	4	5.000.000		0		0			19	39.738.000	0,90	0,09	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2252	1.627.706.520	2.979	166.208.620	900	1.380.000.000		0		0			2.979	166.208.620	1,32	0,10	Seksi Pendidikan Non Formal	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														1									
								5	6		7		8		9				10		11		
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.		
						Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	1	197.489.000	4	459.776.000		0	0				1	197.489.000	0,00	0,00	Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						-	-	21	14.567.795	1	197.762.662	-	0	0				1	197.762.662	0,05	13,58	Seksi Pendidikan Non Formal	
						-	-	2252	11.060.610	23	1.999.480.997	-	0	0				23	1.999.480.997	0,01	180,77	Seksi Pendidikan Non Formal	
						-	-	1	12.125.410	1	6.000.000	-	0	0				1	6.000.000	1,00	0,49	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	21	297.691.460	159	139.105.000	30	55.210.000	0	0			159	139.105.000	7,57	0,47	Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	21	2.652.949	32	148.952.100	38	156.787.800	0	0			32	148.952.100	1,52	56,15	Seksi Pendidikan Non Formal	
						Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	2252	4.855.641.065	32	14.365.926.000	38	4.868.900.000	0	0			32	14.365.926.000	0,01	2,96	Seksi Pendidikan Non Formal	
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	-	-	-	-	-	0	0				0	0	0,00	0,00	Seksi Pendidikan Non Formal	
						Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	-	-	-	-	1	25.000.000	0	0			0	0			Seksi Pendidikan Non Formal	
						Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	-	-	1	168.361.600	50	50.000.000	0	0			1	168.361.600			Seksi Pendidikan Non Formal	
						Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	-	-	-	-	-	0	0				0	0			Seksi Pendidikan Non Formal	
						Pembangunan Ruang Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	-	-	1	30.800.000	-	0	0				1	30.800.000			Sub-Substansi Kelembagaan Sarana dan Prasarana PAUD dan PNF	
						Program pendidikan dan tenaga kependidikan	Persentase pemenuhan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	100%	2.525.534.433		189.989.600	-	62.011.500	-	0				189.989.600		0,13		
						Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah pemenuhan komponen pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan pendidikan dasar, PAUD, dan pendidikan non formal/ kesetaraan	-	2.525.534.433		189.989.600	98	62.011.500	-	0				189.989.600		0,13		
						Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1	1.085.054.759	560	11.600.000	1	62.011.500	0	0			560	11.600.000	560,00	0,01	Seksi PTK SD, Seksi PTK SMP, Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														I										
								5		6		7		8					9		10			11
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
						-	-	1	1.440.479.675	39	178.389.600	-	-		0		0			39	178.389.600	39,00	0,12	Seksi PTK SD, Seksi PTK SMP, Sub-Substansi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN									830.742.524.006		1.858.559.238.008		502.161.860.976		82.019.946.911		82.019.946.911				2.082.740.873.110		56,41	

						Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	6	163.553.000.000	1	65.674.571.348	-	-	-	-	0	-		1	65.674.571.348	16	40	DINAS KESEHATAN
						Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase faskes yang melakukan pelayanan BLUD	6	163.553.000.000	1	65.674.571.348,13	0	-	0	-	0	-		1	65.674.571.348	16	40	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Tanjung Pati	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	14.775.000.000	1	2.263.405.324					0	-		1	2.263.405.324	17	15	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Gunung Malintang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	7.765.000.000	1	489.015.758					0	-		1	489.015.758	17	6	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Taram	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	7.660.000.000	1	1.031.206.375					0	-		1	1.031.206.375	17	13	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Suliki	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	6.346.000.000	1	1.114.326.301					0	-		1	1.114.326.301	17	18	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Situjuh	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	7.925.000.000	1	1.301.782.465					0	-		1	1.301.782.465	17	16	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Rimbo Data	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	2.076.000.000	1	307.646.103					0	-		1	307.646.103	17	15	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Baruh Gunung	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	3.198.000.000	1	496.783.273					0	-		1	496.783.273	17	16	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pangkalan	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	5.911.000.000	1	1.441.984.581					0	-		1	1.441.984.581	17	24	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Banja Loweh	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	3.442.000.000	1	531.408.343					0	-		1	531.408.343	17	15	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungo	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	14.880.000.000	1	1.940.944.286					0	-		1	1.940.944.286	17	13	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Pakan Rabaa	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	8.544.000.000	1	1.807.243.300					0	-		1	1.807.243.300	17	21	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Piladang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	3.411.000.000	1	617.406.100					0	-		1	617.406.100	17	18	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Batu Hampa	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	9.148.000.000	1	1.362.082.062					0	-		1	1.362.082.062	17	15	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Halaban	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	5.093.000.000	1	922.256.619					0	-		1	922.256.619	17	18	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Muaro Paiti	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	6.356.000.000	1	1.222.277.058,00					0	-		1	1.222.277.058	17	19	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Sialang	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	5.005.000.000	1	885.230.681					0	-		1	885.230.681	17	18	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Koto Baru Smlg	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	16.777.000.000	1	2.342.970.812					0	-		1	2.342.970.812	17	14	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Dangung , Dangung	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	11.071.000.000	1	2.017.206.255					0	-		1	2.017.206.255	17	18	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Mungka	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	9.894.000.000	1	1.675.091.080					0	-		1	1.675.091.080	17	17	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Padang Kandis	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	2.750.000.000	1	516.068.439					0	-		1	516.068.439	17	19	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Koto Tinggi	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	6.281.000.000	1	845.637.603					0	-		1	845.637.603	17	13	
						Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pusk. Maek	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan	6	5.245.000.000	1	749.906.031					0	-		1	749.906.031	17	14	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD RSUD Achmad Darwis	Jumlah BLUD yang menyediakan dan penunjang pelayanan			1	39.792.692.499					0	-		1	39.792.692.499	#DIV/0!	#DIV/0!							
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pencapaian SPM Kesehatan	11.621	578.039.709.681	1.780	46.499.225.831	297	41.086.156.250	0	62.198.791	0	62.198.791		1780	46.561.424.622	15	8	DINAS KESEHATAN						
					Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota	Persentase Bangunan Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.	129	352.434.212.290	13	19.861.525.873	5	14.229.994.442	-	47.140.871	0	47.140.871		13	19.908.666.744	10	6							
						Persentase Sarana Prasarana Puskesmas yang memenuhi standar sesuai Permenkes 43 tahun 2019.																						
					Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah rumah sakit baru yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1: 10000	2	30.000.000.000	1	141.445.421	1	740.066.500			0	-		1	141.445.421	50	0							
					Pembangunan puskesmas	Jumlah puskesmas yang dibangun	4	29.335.432.800	0	-	3				0	-		0	-	0	0							
					Pengembangan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana , alat kesehatan dan SDM sesuai standar	-	-	6	9.081.292.868	4	3.464.331.800			0	-												
					pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah pengembangan fasilitas kesehatan lainnya			1	812.615.000					0	-		1	812.615.000	0	0							
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh puskesmas	22	6.000.000.000	1	178.498.640	22	442.896.250			0	-		1	178.498.640	5	3							
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun	2	2.000.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya (RSUD Achmad Darwis)	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang dibangun			1	891.840.849					0	-		1	891.840.849	0	0							
					Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun	12	14.366.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah sarana, pra sarana dan alat kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	24	13.984.000.000	5	2.324.855.853	5	2.683.221.500			0	-		5	2.324.855.853	22	17							
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah sarana, pra sarana rumah dinas tenaga kesehatan yang telah dilakukan rehabilitasi dan pemeliharaan oleh fasilitas kesehatan lainnya	10	1.920.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	132	15.000.000.000			0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana di fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	12	102.488.475.379							0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	38	14.957.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	26	14.551.000.000	22	404.775.000	22	446.000.000			0	-		22	404.775.000	85	3							
					Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	228	74.740.771.711	0	2.186.280.200					0	-		0	2.186.280.200	0	3							
					Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan alat uji dan kalibrasi pada unit pemeliharaan fasilitas kesehatan regional	22	171.440.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Obat dan Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	6	12.000.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6	7.800.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah bahan habis pakai yang disediakan	6	5.960.386.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana fasyankes yang dilakukan pemeliharaan	132	2.370.092.400	0	-	0				0	-		0	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah pra sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang dilakukan pemeliharaan	36	1.479.300.000	0	-	0			0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar	138	2.486.064.000	22	34.938.000	23	226.244.500		0	-			22	34.938.000	16	1							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Gunung Malintang	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Taram	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Suliki	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Sitiuh	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Baruah gunung	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas pangkalan	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Tanjung pati	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Mungo	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas muaro paiti	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Halaban	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar			0	-				0	-			0	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas sialang	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Danggung- Danggung	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas mungka	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Padang Kandis	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Koto tinggi	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan /Alat Penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas maek	Jumlah alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas layanan kesehatan yang terpelihara sesuai standar		0		-				0	-			0	-	0	0							
					Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin , makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	Jumlah Pengadaan Obat, Bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan	22	3.533.940.701	22	5.921.132.892				0	-			22	3.533.940.701	0	0							
					Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, BMHP, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah distribusi alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke puskesmas serta faskes lainnya	1.728	824.250.000	22	271.043.341	22	306.101.000	6	47.140.871	6	47.140.871		28	318.184.212	2	39							
					Kegiatan Penyediaan layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan sesuai standar	46.350	225.397.377.391	7.107	26.487.171.458	1.176	26.508.945.700	0	15.057.920	0	15.057.920		7107	26.502.229.378	15	12							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	40.261	469.802.100	4968	42.446.000	5919	321.810.000		0	-			4968	42.446.000	12	9							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	39.934	13.014.805.000	5248	33.711.000	5871	115.320.000		0	-			5248	33.711.000	13	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	39.839	332.240.500	4960	146.484.960	5857	50.000.000		0	-			4960	146.484.960	12	44							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	166.266	396.660.600	23389	23.375.000	24444	150.000.000		0	-			23389	23.375.000	14	6							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	70.585	492.295.000	13076	92.126.400	11228	259.440.000		0	-			13076	92.126.400	19	19							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	1.630.560	1.324.263.045	64880	77.853.800	258481	375.555.000		0	-			64880	77.853.800	4	6							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	189.840	1.093.896.160	37692	51.592.400	31659	40.940.000		0	-			37692	51.592.400	20	5							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	432.572	322.713.315	19030	55.695.500	72204	66.000.000			0	-			19030	55.695.500	4	17						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita diabetes mellitus yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	15.964	391.154.740	1777	444.797.120	2646	70.000.000			0	-			1777	444.797.120	11	114						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah orang dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	3.339	456.978.990	837	37.537.100	587	58.000.000			0	-			837	37.537.100	25	8						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit TB yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	36.643	420.577.000	4880	429.446.000	6137	95.000.000			0	-			4880	429.446.000	13	102						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderit HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	46.581	483.015.000	5321	64.262.950	7875	135.000.000			0	-			5321	64.262.950	11	13						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	6	468.125.000	0	-	1	-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	6	300.454.395	0	-	1				0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	1.800	874.800.000	0	-					0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6	568.907.417	1	79.858.000	1	212.680.000			0	-			1	79.858.000	17	14						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah Raga	30	271.363.500	5	9.185.000	5	25.475.000			0	-			5	9.185.000	17	3						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	1.561.041.504	9	143.188.700	9	150.000.000			0	-			9	143.188.700	150	9						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6	277.800.000	0	-		-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	6	300.000.000	6	255.420.550	6	476.824.000			0	-			6	255.420.550	100	85						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	6	130.822.797	1	18.346.000	1	33.500.000			0	-			1	18.346.000	17	14						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan surveilans Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	6	617.881.600	1	64.765.000	1	93.510.000			0	-			1	64.765.000	17	10						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	38.154	273.359.600	4800	20.976.000	6444	30.985.000			0	-			4800	20.976.000	13	8						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Napza	Jumlah penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan	150	232.546.171	0	27.270.000	25	26.327.500			0	-			0	27.270.000	0	12						
					Pengelolaan upaya kesehatan khusus	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	30	2.188.676.700	0	-	0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah Pengelolaan Upaya pengurangan risiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan					1	20.000.000			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	6	1.092.932.000	1	593.953.244	1	441.642.000			0	-			1	593.953.244	17	54						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	37.990.901.600	1	20.569.040.600	1	20.862.505.200			0	-		1	20.569.040.600	17	54							
					Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	1.915.000.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Sub Kegiatan : Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang menerima layanan deteksi dini penyalahgunaan NAPZA di fasyankes dan sekolah	28.040	506.518.760	0	17.287.500	4903	25.060.000			0	-		0	17.287.500	0	3							
					Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan	61	641.527.100	0	680.000	12	20.000.000			0	-		0	680.000	0	0							
					Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	36	472.489.297	1	96.777.100	6	285.000.000			0	-		1	96.777.100	3	20							
					Operasional pelayanan puskesmas	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	17.500.000.000	1	201.146.161	0	698.132.000																
					Operasional pelayanan fasilitas kesehtan lainnya	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	1		0	-	1	-			0	-		0	-	0	0							
					Pelaksanaan akreditasi faskes di kabupaten/ kota	Jumlah faskes yang terakreditasi di kabupaten/kota	66	8.086.164.000	6	34.888.000	6	40.000.000																
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan hasil investigasi awal kejadian tidak di harapkan (kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	-	-	1	2.340.000	5	75.000.000			0	-		1	2.340.000	0	0							
					Sub Kegiatan : Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	6	657.554.500	0	-	1	20.000.000			0	-		0	-	0	0							
					Operasional Pelayanan RS	Jumlah dokumen operasional pelayanan RS	3	765.000.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah public safety center (PSC) 119 tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan rumah sakit dalam satu sistem penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	4	1.500.300.000	0	2.808.076.373	1	935.190.000			0	-		0	2.808.076.373	0	187							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	6	627.810.000	0	-	1	-			0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1	41.045.000	1	300.050.000	1	15.057.920	1	15.057.920		2	56.102.920	0	0							
					Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah fasyankes yang melayani konsultasi jarak jauh antar fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatn yang berkualitas	22	3.300.000.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Penelitian Kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan penelitian kesehatan	4	100.000.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	Jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas	-	-	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1	3.600.000					0	-		1	3.600.000	0	0							
					puskesmas tanjung pati					643.501.855					0	-		0	643.501.855	0	0							
					Operasional Pelayanan Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	7.354.000.000	1	106.950.000					0	-		1	106.950.000	17	1							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Tanjung Pati	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			547	26.917.500					0	-		547	26.917.500	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar.			567	9.525.000					0	-		567	9.525.000	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			1553	84.000.000			K	Rp.	0	-			1553	84.000.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			397	900.000					0	-			397	900.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			654	900.000					0	-			654	900.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	171.084.355					0	-			1	171.084.355	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	11.250.000					0	-			1	11.250.000	0	0						
						Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	12.450.000					0	-			1	12.450.000	0	0						
						Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	118.050.000					0	-			1	118.050.000	0	0						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1	41.250.000					0	-			1	41.250.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)		-	1	900.000					0	-			1	900.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			0	33.975.000					0	-			0	33.975.000	0	0						
						Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			0	25.350.000					0	-			0	25.350.000	0	0						
						Peningkatan upaya promosi kesehatan , advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Peningkatan upaya promosi kesehatan , advokasi , kemitraan dan pemberdayaan masyarakat			1	200.000.000					0	-			1	200.000.000	0	0						
						Operasional Pelayanan Puskesmas Rimbo Data	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	3.875.000.000	1	72.149.084					0	-			1	72.149.084	17	2						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Rimbo Data	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			66	16.720.000					0	-			66	16.720.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir				-					0	-			0	-	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			333	9.550.000					0	-			333	9.550.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			161	800.000					0	-			161	800.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			827	3.000.000					0	-			827	3.000.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			589	23.625.000					0	-			589	23.625.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat			15	4.800.000					0	-			15	4.800.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			85	2.000.000					0	-			85	2.000.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	113.741.500					0	-			1	113.741.500	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1	16.087.500					0	-			1	16.087.500	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	8.300.000					0	-			1	8.300.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1	50.250.000					0	-			1	50.250.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	-					0	-			1	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			1	1.200.000					0	-			1	1.200.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	24.200.000					0	-			1	24.200.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			8	2.400.000					0	-			8	2.400.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Halaban	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.902.000.000	1	77.637.416					0	-			1	77.637.416	17	2						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													1											
							5		6		7		8					9		10			11	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Halaban	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		226		10.840.000				0	-			226	10.840.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin		189						0	-			189	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir		190						0	-			190	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita		1005		1.040.000				0	-			1005	1.040.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		471		4.040.000				0	-			471	4.040.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif		3066		11.700.000				0	-			3066	11.700.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut		1686		9.440.000				0	-			1686	9.440.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat		32		8.080.000				0	-			32	8.080.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		149		8.150.000				0	-			149	8.150.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar.								0	-			0	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1		102.467.038				0	-			1	102.467.038	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.		1		16.155.000				0	-			1	16.155.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan		1		7.940.000				0	-			1	7.940.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.		1		8.810.000				0	-			1	8.810.000	0	0			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							1	2	3	4	5	6	7	8				9	10	11	12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.				
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan								0	-			0	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			25	2.360.000				0	-			25	2.360.000	0	0			
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	48.560.000				0	-			1	48.560.000	0	0			
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			12	1.320.000				0	-			12	1.320.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			20	1.060.000				0	-			20	1.060.000	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1	11.380.000				0	-			1	11.380.000	0	0			
					Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Hampar	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.902.000.000	1	82.993.136				0	-			1	82.993.136	17	2			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Batu Hampar	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			177	25.962.500				0	-			177	25.962.500	0	0			
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			204					0	-			204	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			195					0	-			195	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			660					0	-			660	-	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			393	3.850.000				0	-			393	3.850.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			2002	8.150.000				0	-			2002	8.150.000	0	0			
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1462	1.350.000				0	-			1462	1.350.000	0	0			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat			26	2.680.000					0	-			26	2.680.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			349	2.460.000					0	-			349	2.460.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			221	3.240.000					0	-			221	3.240.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	90.507.500					0	-			1	90.507.500	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1	9.840.000					0	-			1	9.840.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	2.621.000					0	-			1	2.621.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1	25.700.000					0	-			1	25.700.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	1.190.000					0	-			1	1.190.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			1	2.520.000					0	-			1	2.520.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	77.690.000					0	-			1	77.690.000	0	0						
					Sub Kegiatan : Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan			1	380.000					0	-			1	380.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1	500.000					0	-			1	500.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1	1.700.000					0	-			1	1.700.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mungo	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	6.808.000.000	1	94.146.662					0	-			1	94.146.662	17	1						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
																</												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	6.640.000					0	-			1	6.640.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan			1	7.650.000					0	-			1	7.650.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	1.890.000					0	-			1	1.890.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA				540.000					0	-			0	540.000	0	0						
					Pengelolan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				-					0	-			0	-	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				49.550.000					0	-			0	49.550.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.				4.560.000					0	-			0	4.560.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)				1.790.000					0	-			0	1.790.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis				2.340.000					0	-			0	2.340.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas									0	-			0	-	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Gn. Malintang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	3.875.000.000	1,25	61.312.123					0	-			1	61.312.123	21	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Gn. Malintang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			80	18.100.000					0	-			80	18.100.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			85	-					0	-			85	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			417	6.540.000					0	-			417	6.540.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			186	3.970.000					0	-			186	3.970.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			633						0	-			633		-	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			681	6.560.000					0	-			681	6.560.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah penduduk dengan gangguan jiwa berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada orang dengan gangguan jiwa berat			20	7.170.000					0	-			20	7.170.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			103	19.170.000					0	-			103	19.170.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	52.852.000					0	-			1	52.852.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	4.100.000					0	-			1	4.100.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan			1	16.700.000					0	-			1	16.700.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	200.000					0	-			1	200.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	42.632.500					0	-			1	42.632.500	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1	4.710.000					0	-			1	4.710.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Baruh Gunuang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.759.000.000	1	22.646.864					0	-			1	22.646.864	17	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Baruh Gunuang.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			96	7.575.000					0	-			96	7.575.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita		449		2.232.500				0	-			449	2.232.500	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar		139		3.360.000				0	-			139	3.360.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif		773		1.730.000				0	-			773	1.730.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut		743		2.050.000				0	-			743	2.050.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.		31		3.500.000				0	-			31	3.500.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		70		1.770.000		-		0	-			70	1.770.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV		77		200.000				0	-			77	200.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)								0	-			0	-	0	0							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar		1		110.000				0	-			1	110.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1		66.967.000				0	-			1	66.967.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.								0	-			0	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	17.836.000					0	-			1	17.836.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan. Terlaksananya pelayanan operasional promosi kesehatan			1	17.340.000					0	-			1	17.340.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	4.650.000					0	-			1	4.650.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			1	320.000					0	-			1	320.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	45.690.000					0	-			1	45.690.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.									0	-			0	-	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)				4.290.000					0	-			0	4.290.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis				680.000					0	-			0	680.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria				1.280.000					0	-			0	1.280.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Pangkalan	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1	130.684.434					0	-			1	130.684.434	17	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pangkalan.	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			273	50.622.500					0	-			273	50.622.500	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			1500	20.000.000					0	-			1500	20.000.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas							0	-			0	-	0	0							
						Operasional Pelayanan Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.486.000.000	1	61.071.734			0	-			1	61.071.734	17	1							
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Banja Loweh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			66	21.955.000			0	-			66	21.955.000	0	0							
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			67				0	-			67	-	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			58				0	-			58	-	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			376	6.660.000			0	-			376	6.660.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			668	11.850.000			0	-			668	11.850.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			1138	8.000.000			0	-			1138	8.000.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			679	17.498.000			0	-			679	17.498.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			9	3.490.000			0	-			9	3.490.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.			68	7.940.000			0	-			68	7.940.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	66.885.000			0	-			1	66.885.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1	11.265.000			0	-			1	11.265.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	7.116.000			0	-			1	7.116.000	0	0							
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1	9.000.000			0	-			1	9.000.000	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	930.000					0	-			1	930.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan kesehatan Terlaksananya pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1	2.230.000					0	-			1	2.230.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	44.120.000					0	-			1	44.120.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.			1	1.920.000					0	-			1	1.920.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1	1.880.000					0	-			1	1.880.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1	1.440.000					0	-			1	1.440.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1	10.220.000					0	-			1	10.220.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Situjuh	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	6.537.000.000	1	112.588.200					0	-			1	112.588.200	17	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Situjuh	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			258	27.500.000					0	-			258	27.500.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			1313	5.600.000					0	-			1313	5.600.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			720	21.970.000					0	-			720	21.970.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			3615	12.300.000					0	-			3615	12.300.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			2048	34.010.000					0	-			2048	34.010.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.		22		5.920.000				0	-			22		5.920.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis		299		6.290.000				0	-			299		6.290.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00		233.702.000				0	-			1		233.702.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.		1,00		18.880.000				0	-			1		18.880.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan		1,00		19.084.000				0	-			1		19.084.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.		1,00		24.310.000				0	-			1		24.310.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00		3.270.000				0	-			1		3.270.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA		1,00		-				0	-			1		-	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,00		70.820.000				0	-			1		70.820.000	0	0						
					Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium rujukan/nasional yang didistribusikan		1,00		4.200.000				0	-			1		4.200.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		1,00		630.000				0	-			1		630.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		1,00		5.060.000				0	-			1		5.060.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	6.996.000.000	1,25	131.826.238				0	-			1		131.826.238	21	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		385		42.850.000				0	-			385		42.850.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													1											
							1	2				3	4	5		6			7		8			9
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					-					0	-			0	-	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			1475		3.200.000					0	-			1475	3.200.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			1011		18.100.000					0	-			1011	18.100.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			5049		11.400.000					0	-			5049	11.400.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1750		14.125.000					0	-			1750	14.125.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			35		4.860.000					0	-			35	4.860.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan kesehatan orang terduga tuberkulosis.			265		6.460.000					0	-			265	6.460.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1		251.492.506					0	-			1	251.492.506	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1		10.500.000					0	-			1	10.500.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1		11.830.000					0	-			1	11.830.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.			1		42.060.000					0	-			1	42.060.000	0	0	
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1		100.000					0	-			1	100.000	0	0	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			25		4.800.000					0	-			25	4.800.000	0	0	
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1		89.440.000					0	-			1	89.440.000	0	0	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.			1	760.000			K	Rp.	0	-			1	760.000	0	0						
						Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1	14.620.000					0	-			1	14.620.000	0	0						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1	3.980.000					0	-			1	3.980.000	0	0						
						Operasional Pelayanan Puskesmas Piladang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.233.000.000	1	79.061.559					0	-			1	79.061.559	17	2						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Piladang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			165	39.657.500					0	-			165	39.657.500	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			0						0	-			0	-	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			804	5.400.000					0	-			804	5.400.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			435	3.750.000					0	-			435	3.750.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			3036	3.800.000					0	-			3036	3.800.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1260	5.250.000					0	-			1260	5.250.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			41	5.400.000					0	-			41	5.400.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			138	6.250.000					0	-			138	6.250.000	0	0						
						Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			195	2.700.000					0	-			195	2.700.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	90.013.000					0	-			1	90.013.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1	1.200.000					0	-			1	1.200.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	9.478.000					0	-			1	9.478.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.			1	6.780.000					0	-			1	6.780.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	2.500.000					0	-			1	2.500.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			1	1.800.000					0	-			1	1.800.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	65.300.000					0	-			1	65.300.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.			1,00	1.190.000					0	-			1	1.190.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1,00	1.800.000					0	-			1	1.800.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1,00	1.950.000					0	-			1	1.950.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Suliki	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1,0	105.312.843					0	-			1	105.312.843	17	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Suliki	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			203	78.055.500					0	-			203	78.055.500	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			709	400.000					0	-			709	400.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			462	9.140.000					0	-			462	9.140.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			1406	9.580.000					0	-			1406	9.580.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1510	11.880.000					0	-			1510	11.880.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			48	7.060.000					0	-			48	7.060.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			222	4.140.000					0	-			222	4.140.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1	118.735.000					0	-			1	118.735.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1	8.250.000					0	-			1	8.250.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1	9.418.000					0	-			1	9.418.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.			1	17.490.000					0	-			1	17.490.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1	3.400.000					0	-			1	3.400.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA			1	1.354.000					0	-			1	1.354.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1	123.060.000					0	-			1	123.060.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas									0	-			0	-	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1,0	13.720.000					0	-		1	13.720.000	0	0							
					Puskesmas taram									0	-			0	-	0	0							
					Operasional Pelayanan Puskesmas Taram	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.902.000.000	1,00	51.995.000					0	-		1	51.995.000	17	1							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas taram	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			254,00	9.742.500					0	-		254	9.742.500	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin				3.725.000					0	-		0	3.725.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			0,00	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			442,00	42.450.000					0	-		442	42.450.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			0,00	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			0,00	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			0,00	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			304,00	12.300.000					0	-		304	12.300.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1,00	63.920.000					0	-		1	63.920.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			0,00						0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1,00	19.350.000					0	-		1	19.350.000	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan Promosi Kesehatan.			0,00	-					0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1,00	10.855.000					0	-			1	10.855.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA									0	-			0	-	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1,00	95.850.000					0	-			1	95.850.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.									0	-			0	-	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1,00	900.000					0	-			1	900.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1,00	19.800.000					0	-			1	19.800.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi	Jumlah Pengelolaan Pelayanan Kesehatan reproduksi			1,00	16.250.000					0	-			1	16.250.000	0	0						
					Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Jumlah Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak			1,00	77.025.000					0	-			1	77.025.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			0,00						0	-			0	-	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Muaro Paiti	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1,25	63.255.443					0	-			1	63.255.443	21	1						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Muaro Paiti	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			185,00	19.317.500					0	-			185	19.317.500	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			228,00						0	-			228	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			162,00						0	-			162	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			804,00	4.000.000					0	-			804	4.000.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			615,00	7.500.000					0	-			615	7.500.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			3438,00	6.220.000					0	-			3438	6.220.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			2287,00	15.060.000					0	-			2287	15.060.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			42,00	1.640.000					0	-			42	1.640.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			104,00	5.940.000					0	-			104	5.940.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah dokumen Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana sesuai standar									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			200,00	88.290.000					0	-			200	88.290.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			12,00	14.590.000					0	-			12	14.590.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			240,00	14.500.000					0	-			240	14.500.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			13,00	2.730.000					0	-			13	2.730.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			24,00	400.000					0	-			24	400.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			25,00	4.220.000					0	-			25	4.220.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			320,00	83.170.000					0	-			320	83.170.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					elayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.			1,00	2.280.000					0	-			1	2.280.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1,00	5.940.000					0	-			1	5.940.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1,00	3.960.000					0	-			1	3.960.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Sialang	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.894.000.000	1,25	94.793.827					0	-			1	94.793.827	21	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Sialang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			160,00	52.480.000					0	-			160	52.480.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin			194,00						0	-			194	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir			186,00						0	-			186	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			641,00	36.575.000					0	-			641	36.575.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			333,00	26.400.000					0	-			333	26.400.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			2009,00	4.400.000					0	-			2009	4.400.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1193,00	11.985.000					0	-			1193	11.985.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			32,00	2.360.000					0	-			32	2.360.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			166,00	6.780.000					0	-			166	6.780.000	0	0						
					Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			170,00	4.720.000					0	-			170	4.720.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00		170.370.000					0	-			1	170.370.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.		1,00		2.360.000					0	-			1	2.360.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan		1,00		12.411.000					0	-			1	12.411.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.		1,00		11.730.000					0	-			1	11.730.000	0	0						
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00		3.380.000					0	-			1	3.380.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA		25,00		11.700.000					0	-			25	11.700.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,00		39.440.000					0	-			1	39.440.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.		1,00		380.000					0	-			1	380.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)		1,00		1.180.000					0	-			1	1.180.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		44,00		2.360.000					0	-			44	2.360.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria		1,00		3.540.000					0	-			1	3.540.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Baru Smlg	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	7.354.000.000	1,25	121.747.967					0	-			1	121.747.967	21	2						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil		571,00		33.200.000					0	-			571	33.200.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin									0	-			0	-	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8					9		10	11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								0	-			0	-	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita								0	-			0	-	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			967,00	10.050.000				0	-			967	10.050.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			2886,00	11.270.000				0	-			2886	11.270.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			2973,00	13.070.000				0	-			2973	13.070.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat.			179,00	10.480.000				0	-			179	10.480.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			159,00	800.000				0	-			159	800.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang dengan resiko HIV			461,00	400.000				0	-			461	400.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.								0	-			0	-	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1,00	287.282.000				0	-			1	287.282.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.			1,00	2.250.000				0	-			1	2.250.000	0	0					
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1,00	8.340.000				0	-			1	8.340.000	0	0					
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1,00	5.710.000				0	-			1	5.710.000	0	0					
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1,00	5.220.000				0	-			1	5.220.000	0	0					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			25,00	15.560.000					0	-			25	15.560.000	0	0						
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1,00	49.510.000					0	-			1	49.510.000	0	0						
					pelayanan kesehatan pengambilan dan Pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium	Jumlah dokumen hasil pelayanan kesehatan pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial kejadian luar biasa (KLB) ke laboratorium.			1,00	760.000					0	-			1	760.000	0	0						
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			1,00	2.780.000					0	-			1	2.780.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1,00	600.000					0	-			1	600.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1,00	940.000					0	-			1	940.000	0	0						
					Operasional Pelayanan Puskesmas Dangung - Dangung	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	7.625.000.000	0,0	-					0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Dangung-dangung	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			361,0	20.600.000					0	-			361	20.600.000	0	0						
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin									0	-			0	-	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			1953,0	2.400.000					0	-			1953	2.400.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			1275,0	17.730.000					0	-			1275	17.730.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			3565,0	9.150.000					0	-			3565	9.150.000	0	0						
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			2257,0	1.920.000					0	-			2257	1.920.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			209,0	11.920.000				0	-			209	11.920.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1,0	102.727.921				0	-			1	102.727.921	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1,0	2.390.000				0	-			1	2.390.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1,0	9.600.000				0	-			1	9.600.000	0	0							
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1,0	17.810.000				0	-			1	17.810.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA			25,0	900.000				0	-			25	900.000	0	0							
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1,0	82.216.158				0	-			1	82.216.158	0	0							
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)			12,0	7.040.000				0	-			12	7.040.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			1,0	5.500.000				0	-			1	5.500.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria								0	-			0	-	0	0							
					Operasional Pelayanan Puskesmas Mungka	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.992.000.000	1	102.807.336				0	-			1	102.807.336	17	2							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA								0	-			0	-	0	0							
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1		56.390.000				0	-			1	56.390.000	0	0							
					Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)	Jumlah laporan Hasil Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal). Terlaksananya Investigasi awal Kejadian tidak di harapkan (Kejadian ikutan pasca imunisasi dan pemberian obat massal)								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			19	2.310.000				0	-			19	2.310.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria		1		8.020.000				0	-			1	8.020.000	0	0							
					Operasional Pelayanan Puskesmas Pd Kandis	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	4.621.000.000	1,25	34.300.552				0	-			1	34.300.552	21	1							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Padang Kandis	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			90,00	16.460.000				0	-			90	16.460.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir								0	-			0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			406,00	15.000.000				0	-			406	15.000.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			630,00	6.400.000				0	-			630	6.400.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			1561,00	5.350.000				0	-			1561	5.350.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			926,00	4.890.000				0	-			926	4.890.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat			18,00	3.500.000				0	-			18	3.500.000	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8					9		10	11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.		11,00		2.850.000					0	-			11	2.850.000	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat		1,00		55.331.000					0	-			1	55.331.000	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahraga.		1,00		950.000					0	-			1	950.000	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan		1,00		5.292.000					0	-			1	5.292.000	0	0				
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan		1,00		6.105.000					0	-			1	6.105.000	0	0				
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan		1,00		350.000					0	-			1	350.000	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA									0	-			0	-	0	0				
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular		1,00		12.300.000					0	-			1	12.300.000	0	0				
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis		11,00		1.500.000					0	-			11	1.500.000	0	0				
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria									0	-			0	-	0	0				
					Operasional Pelayanan Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.447.000.000	1	84.662.395					0	-			1	84.662.395	17	2				
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Koto Tinggi	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			185	25.959.000					0	-			185	25.959.000	0	0				
					Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin									0	-			0	-	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									0	-			0	-	0	0				
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			993	14.100.000					0	-			993	14.100.000	0	0				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
							5		6		7		8					9		10			11		12		13																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			280		9.000.000					0		-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			6	2.380.000					0	-			6	2.380.000	0	0						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria			1	880.000					0	-			1	880.000	0	0						
						Operasional Pelayanan Puskesmas Maek	Jumlah dokumen operasional pelayanan puskesmas	6	5.439.000.000	1,25	48.011.694					0	-			1	48.011.694	21	1						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil di puskesmas Maek	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil			108,00	46.362.500					0	-			108	46.362.500	0	0						
						Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin									0	-			0	-	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan bayi baru lahir									0	-			0	-	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan balita			469,00	280.000					0	-			469	280.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			323,00	9.140.000					0	-			323	9.140.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia produktif			2671,00	3.600.000					0	-			2671	3.600.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan pada usia lanjut			1027,00	5.760.000					0	-			1027	5.760.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar Terlaksananya pelayanan kesehatan jiwa masyarakat			20,00	5.760.000					0	-			20	5.760.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang terduga menderita Tuberkulosis yang mendapatkan Pelayanan sesuai standar. Terlaksananya pelayanan kesehatan Orang terduga Tuberkulosis.			103,00	8.300.000					0	-			103	8.300.000	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB) sesuai standar.									0	-			0	-	0	0						
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat			1,00	96.183.000					0	-			1	96.183.000	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olah raga	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahragra. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Kerja dan Olahragra.			1,00	1.920.000					0	-		1	1.920.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan . Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Lingkungan			1,00	9.490.000					0	-		1	9.490.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan . Terlaksananya pelayanan Promosi Kesehatan.			1,00	6.220.000					0	-		1	6.220.000	0	0							
					Pengelolaan Surveillance Kesehatan	Jumlah dokumen Hasil Pengelolaan Surveillance Kesehatan . Terlaksananya pengelolaan Surveillance kesehatan			1,00	200.000					0	-		1	200.000	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan. Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA									0	-		0	-	0	0							
					Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah dokumen Hasil Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular. Terlaksananya Pelayanan kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1,00	85.895.000					0	-		1	85.895.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang menderita tuberkulosis yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis			9,00	2.160.000					0	-		9	2.160.000	0	0							
					Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Jumlah orang menderita malaria yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar. Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan malaria									0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas									0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	jumlah keluarga yang sudah di kunjungi dan di intervensi masalah kesehatannya oleh tenaga kesehatan puskesmas									0	-		0	-	0	0							
					Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	6	1.268.609.600	1	117.081.500	6	295.768.108	0	-	0	-		1	117.081.500	17	9							
					Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Jumlah Pengelolaan sistem informasi kesehatan	6	231.740.000	1	117.081.500	6	295.768.108			0	-		1	117.081.500	17	51							
					Sub Kegiatan : Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah alat Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang disediakan	28	828.749.600	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengelolaan data dan informasi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	6	208.120.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Kegiatan : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C dan D serta Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Persentase RS kelas C dan D yang memiliki izin	1	145.739.500	1	33.447.000	1	51.448.000	0	-	0	-		1	33.447.000	100	23							
					Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya	jumlah Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan rumah sakit kelas C, D dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya			1	33.447.000	1	34.448.000			0	-		1	33.447.000	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Peningkatan mutu pelayanan Fasilitas Kesehatan	jumlah faskes yang di lakukan pengukuran indikator nasional mutu / INM pelayanan kesehatan	1	145.739.500	0	-	1	17.000.000			0	-		0	-	0	0							
					Program : Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan yang terlaksana	10	562.177.077	5,7	436.273.916	2,4	315.000.000	0,0	-	0	-		6	436.273.916	57	78	DINAS KESEHATAN						
					Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kebijakan di Bidang kesehatan yang diterbitkan	22	119.537.100	5	291.197.500	5	150.000.000	0	-	0	-		5	291.197.500	23	244							
					Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	22	119.537.100	5,0	91.197.500	5	150.000.000			28	91.197.576		33	182.395.076	149	153							
					Sub Kegiatan : Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat RSUD Achmad Darwis	Jumlah dokumen promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat			1,0	200.000.000					0	-		1	200.000.000	0	0							
					Kegiatan : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PHBS di masyarakat	30	323.307.977	6	77.814.416	2	165.000.000	0	-	0	-		6	77.814.416	20	24							
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	30	323.307.977	5	39.814.816	5	120.000.000			0	-		5	39.814.816	17	12							
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas Taram	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1	-			0	-		0	-	0	0							
					Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di Puskesmas gunung malintang	jumlah dokumen hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat					1	-			0	-		0	-	0	0							
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat			1,0	37.999.600	0	45.000.000			0	-		1	37.999.600	0	0							
					Kegiatan : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten / Kota			119.332.000	6	67.262.000	-	-	-	-	0	-		6	67.262.000	0	56							
					Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	22	119.332.000		67.262.000	0	-			0	-		0	67.262.000	0	56							
					Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Gunung Malintang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-		1	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13					
						Sub Kegiatan : Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Taram	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Suliki	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Situjuh	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Baruah Gunung	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-	0	-			0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Pangkalan	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-					0	-				1	-	0	0					
						Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat			1,0	-					0	-				1	-	0	0					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													1										
							5		6		7		8		9				10		11		
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungo	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Piladang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Batu Hampar	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Halaban	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Muaro Paiti	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Sialang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat		1,0		-				0	-				1	-	0	0	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Dangu-dangung	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				1,0	-				0	-			1	-	0	0						
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Mungka	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				1,0	-				0	-			1	-	0	0						
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Padang Kandis	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				1,0	-				0	-			1	-	0	0						
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				1,0	-				0	-			1	-	0	0						
					Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) di Puskesmas Maek	Jumlah dokumen hasil Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM). Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat				1,0	-				0	-			1	-	0	0						
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman		233	1.622.692.700	24,50	401.345.825	30,38	420.899.000	0,0	-	0	-			25	401.345.825	11	25	DINAS KESEHATAN					
					Kegiatan : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Indikator Kegiatan : Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alkes dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang memiliki izin	171	533.199.800	13	59.097.500	35	81.700.000	-	-	0	-			13	59.097.500	8	11						
					Sub Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal, UMOT	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Perizinan apotek, Toko Obat, Alkes, Optikal, UMOT	12	200.199.800	13	59.097.500	70	81.700.000			0	-			13	59.097.500	108	30						
					Sub Kegiatan : Penyediaan dan Pengelolaan data perizinan dan tindak lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, toko obat, toko alkes dan optikal, UMOT	Jumlah apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang dikendalikan dan diawasi dalam rangka penerbitan dan tindak lanjut penerbitan izin apotik, toko obat, toko alkes dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	330	333.000.000	0	-	0	-			0	-			0	-	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Kegiatan : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Indikator Kegiatan : Jumlah Sertifikat Produksi Pangan IRT-P dan Nomor P-IRT yang diterbitkan	360	426.391.100	60	136.707.500	60	164.644.000	-	-	0	-		60	136.707.500	17	32							
					Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	360	426.391.100	60	136.707.500	60	164.644.000			0	-		60	136.707.500	17	32							
					Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan	18	296.999.800	0	25.045.000	2	-	0	-	0	-		0	25.045.000	0	8							
					Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah dokumen hasil pengendalian Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan /Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	18	296.999.800	0	25.045.000	3	-			0	-		0	25.045.000	0	8							
					Sub. Kegiatan : Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak Lanjut Pengawasan SPP-IRT dan Nomor PIRT sebagai izin produksi untuk produk Makanan Minuman																						
					Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	jumlah IRT-P yang diawasi	150	366.102.000	25	180.495.825	25	174.555.000	0	-	0	-		25	180.495.825	17	49							
					Sub Kegiatan : Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	150	366.102.000	25	180.495.825	25	174.555.000			0	-		25	180.495.825	17	49							
					Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	255	720.029.523.738	44	107.688.014.031	23	88.718.630.239	0	22.416.903.993	0	22.416.903.993		44	130.104.918.024	17	18	DINAS KESEHATAN						
					Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	29	2.250.035.200	0	-	3	-	0	-	0	-		0	-	0	0							
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	705.490.800	0	-	1				0	-		0	-	0	0							
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	6	555.000.000	0	-	1				0	-		0	-	0	0							
					Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	12	259.454.900	0	-	2				0	-		0	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8		9				10		11			12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	6	127.620.000	0	-	1				0	-			0	-	0	0					
					Koordinasi dan Penyusunan perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	119.412.100	0	-	2				0	-			0	-	0	0					
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	61.000.000	0	-	12				0	-			0	-	0	0					
					Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	72	35.590.400	0	-					0	-			0	-	0	0					
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	48	386.467.000	0	-	2				0	-			0	-	0	0					
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	1.458	703.255.727.173	333	106.679.668.703	167	88.061.797.189	0	22.416.903.993	0	22.416.903.993			333	129.096.572.696	23	18					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	8.300	499.650.167.958	1000	106.679.668.703	1000	88.061.797.189		22.416.903.993	0	22.416.903.993			1000	129.096.572.696	12	26					
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.566	186.624.102.715	0	-					0	-			0	-	0	0					
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi tugas ASN	72	15.570.000.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	150	881.894.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	42	276.117.500	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan dokumen	72	98.242.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	6	155.203.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	58	1.049.796.500	0	-	0	-	0	-	0	-			0	-	0	0					
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	12	37.495.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan hasil penilaian barang milik daerah dan hasil koordinasi penilaian barang milik daerah SKPD	60	87.565.000	0	-					0	-			0	-	0	0					
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan hasil pembinaan, pengawasan dan pengendalian barang milik daerah pada SKPD	132	126.210.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	12	70.875.000	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	72	727.651.500	0	-	0				0	-			0	-	0	0					
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0	-	0	-	0	-			0	-	0	0					
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah					0	-			0	-			0	-	0	0					
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	105	1.828.820.400	0,0	-	0,2	110.237.050	0,0	-	0	-			0	-	0	0					
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai terlaksananya pengadaan mesin absensi					0				0	-			0	-	0	0					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	2	660.000.000	0	-	0	-	K	Rp.	0	-		0	-	0	0							
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	6	140.931.000	0	-	1	110.237.050		-	0	-		0	-	0	0							
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	60	360.000.000	0,0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	225	284.679.400	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis impementasi peraturan perundang-undangan	230	383.210.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	27	2.736.117.350	0,2	8.607.433	4,0	84.348.000	0,0	-	0	-		0	8.607.433	1	0							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6	84.500.000	0		0				0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	6	404.175.000	0		0				0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6	227.185.900			0				0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	25.118.000			0				0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	6	20.249.450							0	-		0	-	0	0							
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	72	144.970.000	1	8.607.433	12	14.640.000			0	-		1	8.607.433	1	6							
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	1.344.682.000			12	69.708.000			0	-		0	-	0	0							
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72	485.237.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	-	-	-	-	-	0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang di sediakan									0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan									0	-		0	-	0	0							
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang di sediakan									0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terlaksanananya pelayanan kepegawaian pada dinas kesehatan	72	5.812.232.190	12	885.039.805	6	294.960.000	0,0	-	0	-		12	885.039.805	17	15							
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72	44.520.000	0	-	0				0	-		0	-	0	0							
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	1.029.100.000	12	160.107.124	12	186.960.000			0	-		12	160.107.124	17	16							
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	72	3.191.464.350	12	590.952.684					0	-		12	590.952.684	17	19							
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72	175.881.840	0		0	-			0	-		0	-	0	0							
					penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	1.243.490.000	0	-	12	108.000.000			0	-		0	-	0	0							
					penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72	127.776.000	12	133.979.997					0	-		12	133.979.997	17	105							
					Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	tersedianya perawatan kenderaaan oprasional dan pembayaran STNK kenderaan dinas oprasional	38	3.096.794.925	3,8	114.698.090	5,6	167.288.000	0,0	-	0	-		4	114.698.090	10	4							
					penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kenderaan dinas jabatan yang dipelkhara dan dibayarkan pajaknya	6	1.333.503.000	12	35.088.040	1	42.950.000			0	-		12	35.088.040	200	3							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	117	679.796.000	1,00	30.630.050	9	68.150.000			0	-		1	30.630.050	1	5							
						penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	24	602.711.925	0	-					0	-		0	-	0	0							
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang di pelihara					5				0	-		0	-	0	0							
						Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1	28.360.000	1	11.980.000	12	16.720.000			0	-		1	11.980.000	100	42							
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	6	480.784.000	1	37.000.000	1	39.468.000			0	-		1	37.000.000	17	8							
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat		17	265.328.640	0	11.801.000	0,5	45.000.000	0	-	0	-		0	11.801.000	0	4	DINAS KESEHATAN						
						Kegiatan : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sarana Kesehatan yang menyelenggarakan sistem informasi terintegrasi	17	265.328.640	0	11.801.000	0,5	45.000.000	0	-	0	-		0	11.801.000	0	4							
						Sub kegiatan : Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	6	134.301.440	0	11.801.000	1	45.000.000			0	-		0	11.801.000	0	9							
						Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	131.027.200	0	-	0	-			0	-		0	-	0	0							
						Program : Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pencapaian SPM Kesehatan	641	25.288.124.240	22,3	1.206.704.581	22,4	1.149.009.000	0,0	60.731.800	0	60.731.800		22	1.267.436.381	3	5	DINAS KESEHATAN						
						Kegiatan : Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesehatan yang diberikan rekomendasi izin praktek	6	265.328.640	0	11.801.000	0,5	45.000.000	0	-	0	-		0	11.801.000	0	4							
						Sub kegiatan : Pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	Jumlah dokumen hasil pengendalian perizinan praktik tenaga kesehatan	6	134.301.440	0	11.801.000	1	45.000.000			0	-		0	11.801.000	0	9							
						Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	6	131.027.200	0	-	0	-			0	-		0	-	0	0							
						Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten / Kota	Persentase ketersediaan SDM Kesehatan di Fayankes sesuai Permenkes 43 Tahun 2019	1.916	24.987.020.600	55,8	362.907.751	55,8	576.099.000	0,0	60.731.800	0	60.731.800		56	423.639.551	3	2							
						Sub Kegiatan : Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber daya manusia Kesehatan	6	91.505.300	0	2.805.000	1	208.500.000		18.537.800	0	18.537.800		0	21.342.800	0	23							
						Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	7.362	260.576.550	1227	328.052.751	1227	367.599.000		42.194.000	0	42.194.000		1227	370.246.751	17	142							
						Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Taram	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes					0	-			0	-		0	-	0	0							
						Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Suliki	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes					0	-			0	-		0	-	0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Rimbo Data	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Baruah Gunung	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pangkalan	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Banja Loweh	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Terlaksananya pelayanan operasional kesehatan					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Tanjung Pati	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mungo	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Pakan Rabaa	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Piladang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Halaban	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Muaro Paiti	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Sialang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Koto Baru Simalanggang	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Dangung-Dangung	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Mungka	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Padang Kandis	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						
					Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Koto Tinggi	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar					0	-			0	-			0	-	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar di Puskesmas Maek	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes. Tercapai pemenuhan SDM sesuai standar									0	-		0	-	0	0							
						Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah SDM Kesehatan yang memenuhi standar di fasyankes	288	23.835.000.000	0	-					0	-		0	-	0	0							
						Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	6	799.938.750	0	32.050.000	0	-			0	-		0	32.050.000	0	4							
						Kegiatan : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Indikator Kegiatan : Persentase Tenaga Kesehatan yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan untuk memenuhi standar kompetensi di bidang kesehatan	1	35.775.000	11	831.995.830	11	527.910.000	0	-	0	-		11	831.995.830	1100	2326							
						Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	Jumlah SDM kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	1	35.775.000	11	831.995.830	11	527.910.000			0	-		11	831.995.830	1100	2326							
TOTAL URUSAN KESEHATAN									1.489.360.556.076		221.917.936.532		131.734.694.489		22.539.834.584	0	22.539.834.584		4	244.457.771.116	0	0							
Urusan Pemerintahan RSUD																													
						Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68 75 85	347.829.342.540	26%	143.415.766.757	100%	69.703.739.070	21%	15.754.296.624	21%	15.754.296.624		47%	159.170.063.381	0	46	RSUD AHMAD DARWIS						
						Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68 75	35.590.400	17,19	6.119.200	-	-	-	-	0	-		17,19	6.119.200	0	17							
						Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan perencanaan, dokumen anggaran dan laporan kinerja perencanaan serta perjalanan dinas dalam kota	64 dokumen dan 321 laporan serta perjalanan dinas dalam kota = 208 OH	35.590.400	21 dokumen dan 108 laporan serta Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200	-	-	-	-	0	-		21 dokumen dan 108 laporan serta Jumlah perjalanan dinas dalam daerah/kota = 32 OH	6.119.200		17							
						Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68 75	186.624.102.715	21,27	58.512.330.529	-	27.665.560.697	-	6.594.172.484	0	6.594.172.484		21,27	65.106.503.013		35							
						Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tambahan penghasilan, pembayaran honorarium pelaksana kegiatan, Jumlah Tenaga ASN yang menerima Insentif dan Jumlah PPPK	268 orang, 72 bulan, 88 orang dan 6 orang	186.624.102.715	Jumlah orang yang menerima gaji = 294 orang, Jumlah Pembayaran honor = 20 bulan, Jumlah Tenaga ASN yang menerima Insentif = 80 orang	58.512.330.529	Jumlah orang yang menerima gaji = 377 orang	27.665.560.697	Jumlah orang yang menerima gaji = 377 orang	6.594.172.484	377	6.594.172.484			65.106.503.013		35							
						Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																						
						Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68 75	-	- ,00	-	100	22.200.000			0	-		-	-	#VALUE!	#DIV/0!							
						Sub Kegiatan : Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		-	-	-																		
						Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	68 75	569.164.450	12,27	69.818.594	-	-	-	-	0	-			69.818.594		12							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
						Sub Kegiatan : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah langganan koran dan majalah	2.850 Eksampler	20.249.450	519 Eksampler	3.315.000	-	-	-	-	-		519 Eksampler	3.315.000		16							
						Sub Kegiatan : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																					
						Sub Kegiatan : Fasilitas kunjungan tamu	Jumlah porsi makan dan minum tamu yang disediakan	4.930 porsi	63.566.000	1.054 porsi	9.771.000	-	-	-	-	-		1.054 porsi	9.771.000		15							
						Sub Kegiatan : Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat dan Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi	Rapat = 6.537 porsi dan perjalanan dinas biasa = 359 OH	485.349.000	Rapat = 1.078 porsi dan perjalanan dinas biasa = 39 OH	56.732.594	-	-	-	-	-		Rapat = 1.078 porsi dan perjalanan dinas biasa = 39 OH	56.732.594		12							
						Kegiatan : Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	6875	4.027.036.350	25,86	2.202.207.039	100,00	525.615.000	-	-	0	-		2.202.207.039		55							
						Sub Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening telepon, rekening air dan rekening listrik	72 bulan	3.899.260.350	36 laporan	2.192.852.039	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan = 10 laporan	525.615.000	-	-	0	-		27 bulan, 24 laporan	2.192.852.039		56						
						Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Perjalanan dinas dalam daerah	945 OH	127.776.000	90 OH	9.355.000	-	-	-	-	0	-		Jumlah OH perjalanan dinas dalam kota = 90 OH	9.355.000		7						
						Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai AKIP; Nilai IRB	6875	602.711.925	15,89	95.778.459	100	106.150.000	-	-	0	-		15,89	95.778.459		16						
						Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	kendaraan roda empat = 2 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	602.711.925	kendaraan roda empat = 3 unit dan kendaraan roda dua = 1 unit	95.778.459,00	ngan yang dipelihara c	106.150.000	-	-	0	-		95.778.459		16							
						Kegiatan : Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai AKIP; Nilai IRB; Nilai IKM	68,00; 75,00; 85,00	155.970.736.700	30,75	82.529.512.936	90,00	41.406.413.373	22,12	9.160.124.140	22	9.160.124.140		52,87	91.689.637.076		59						
						Sub Kegiatan : Pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien yang dilayani di rumah sakit : Rawat Jalan dan Rawat Inap	Rawat Jalan = 174.924 orang dan Rawat Inap = 30.513 orang	155.970.736.700	Rawat Jalan = 55.195 orang dan Rawat Inap = 5.573 orang	82.529.512.936	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan = 1 unit kerja	41.406.413.373	1 unit kerja	9.160.124.140		9.160.124.140		91.689.637.076		59							
						Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar;	70,00	187.058.233.090	5,39	13.168.582.238	67,00	7.857.139.000	-	-	0	-		-	13.168.582.238		7	RSUD AHMAD DARWIS					
						Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Persentase sumber daya rumah sakit sesuai standar	70,00	183.189.633.090	5,12	12.464.642.452	67	7.643.564.000	-	-	0	-		12.464.642.452		7							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Sub Kegiatan : Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang dibangun	Pemagaran RS = 1 paket, Interior Kamar Operasi/ MOT OK =1 Paket, Gedung Laboratorium = 1 paket, Gedung Instalasi Radiologi = 1 paket, dan 1 Paket Rekam Medis dan Gedung Rawat Inap (Perinatologi) = 1 Paket, Gedung Rawat Inap (Internis dan jantung) = 1 Paket, Gedung Instalasi Gizi = 1 paket dan Gedung Rawat Inap VIP = 1	102.488.475.379	1 unit	891.840.849	1 unit	4.845.813.000			0	-			891.840.849		1							
					Sub Kegiatan : Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	28 Paket Alat Kes/ Aldok DAK dan 2 Paket Alkes/Aldok Penanganan Covid 19	74.740.771.711	8 unit , 3 Paket Alat Kes/ Aldok DAK dan 1 Paket Alkes/Aldok Penanganan Covid 19	10.872.142.476	-	-	-	0	-			10.872.142.476		15								
					Sub Kegiatan : Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	-	-	-	Jumlah Sarana, Prasa	2.797.751.000			0	-			-		#DIV/0!								
					Sub Kegiatan : Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Barang Habis Pakai yang tersedia untuk pelayanan covid 19	12 Paket	5.960.386.000	2 paket	700.659.127	-	-	-	0	-			700.659.127		12								
					Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tercapai target; Persentase Indikator Mutu Nasional yang mencapai target	84 75	3.868.600.000	18,20	703.939.786	-	213.575.000	-	-	0	-		18,20	703.939.786		18							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah kunjungan Pasien Covid 19 yang dilayani di RS	1640 orang	910.800.000	360 orang	111.845.000	-	-	-	-	0	-		360 orang	111.845.000		12							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah limbah infeksius covid 19 yang diangkut	12400 Kg	277.800.000	2400 kg	48.000.000	-	-	-	-	0	-		2400 kg	48.000.000		17							
					Sub Kegiatan : Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Jumlah pengobatan bagi pasien kurang mampu	253 orang	1.915.000.000	109 orang	498.817.286	-	-	-	-	0	-		109 orang	498.817.286		26							
					Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Peserta yang divaksinasi di RS	305 orang	765.000.000	305 orang	45.277.500	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit :10 Dokumen	213.575.000	-	-	0	-		305 orang	45.277.500		6							
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	0	-		3,64	867.142.954	5	4	RSUD AHMAD DARWIS						
					Kegiatan : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	70,00	23.835.000.000	3,64	867.142.954	-	-	-	-	0	-		3,64	867.142.954	5	4							
					Sub Kegiatan : Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Tenaga Kesehatan Non ASN yang menerima Insentif Penanganan Covid 19	48 orang	23.835.000.000	48 orang ditambah 255 OH	867.142.954	-	-	-	-	0	-		48 orang ditambah 255 OH	867.142.954		4							
														0	-			-										

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
								5		6		7		8						9			10		11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target	84,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	82,00	200.000.000	-	-	0	-			2,57	420.255.416	3	7	RSUD AHMAD DARWIS							
					Sub Kegiatan : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Yang mencapai target ; Persentase Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit Sesuai Standar	84,00; 70,00	5.873.400.000	2,57	420.255.416	82,00	200.000.000	-	-	0	-			2,57	420.255.416		7								
					Peningkatan upaya promosi kesehatan,advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis di rumah sakit serta jumlah lembaga yang menerima hibah (PMI)	Mitra RS = 24 dokumen, dr. reveral = 3 org, pendayagunaan dokter spesialis/WKD S = 3 org dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	5.873.400.000	Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	420.255.416	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	527.500.000	-	-	0	-			Mitra RS = 4 dokumen, dr. reveral = 3 org, dan lembaga penerima hibah = 1 lembaga	420.255.416		7								
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN RSUD								564.595.975.630		157.871.747.365		77.760.878.070		15.754.296.624	0	15.754.296.624				173.626.043.989		31								
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN								2.053.956.531.706		379.789.683.897		209.495.572.559		38.294.131.208	0	38.294.131.208				418.083.815.105		20								

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Administrasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	483.955.135.326.907	15.838.492.382	100	9.587.004.234	24%	2.347.413.644	24%	2.347.413.644			24%	18.185.906.026	0%	0%	DINAS PUPR
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100	705.608.000	125.131.000	100	10.000.000		0					0%	125.131.000			
						Penyusunan Perencanaan Daerah	Dokumen Perangkat Daerah	9	251.240.000	57.377.000	2	5.000.000	0	5						57.377.000			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (dokumen)	0	0					0					0				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (dokumen)	0	0					0					0				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (dokumen)	0	0					0					0				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (dokumen)	0	0					0					0				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi yang disusun (dokumen)	28	289.368.000	47.700.000	1	5.000.000		0					47.700.000				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen LKJIP, LKPI yang disusun (dokumen)	14	165.000.000	29.833.000				1					29.833.000				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	100	483.932.204.652.933	13.167.220.250	4	9.020.110.734		2.337.819.092	198	2.337.819.092			0	24.324.799.593	0	18	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan nya (orang)	89	483.931.665.652.933	21.953.740.001	102	9.598.492.796	95	2.337.819.092	198	2.337.819.092				24.291.559.093		0,01	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan akhir tahun yang disusun (dokumen)	7	116.000.000	5.582.000				0	0				5.582.000		4,81		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD yang disusun (dokumen)	90	225.000.000	8.368.000	-	-	-	-	0	0			8.368.000		3,72		
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen laporan prognosis realisasi anggaran yang disusun (dokumen)	7	198.000.000	19.290.500		-		-	0	0			19.290.500		9,74		

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7							8		9			10		11		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0	0	0	0	0	0												
						Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	0	0			0	0	0	0	0	0												
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (laporan)	0	0			0	0	0	0	0	0												
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	0	0	0													
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (paket)	0	0			0	0	0	0														
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (orang)	0	0			0	0	0	0														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	4.303.889.974		495.215.788	100	86.600.000						495.215.788										
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang diadakan (jenis)	30	173.175.000	49	20.903.000	4	2100.000						49	20.903.000									
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (paket)	-	-			4	6.500.000						0	0									
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia (jenis)	68	883.066.300	126	132.501.000	5	25.000.000						126	132.501.000									
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetak yang tersedia (lembar)	43500	649.607.674	35825	60.417.994	2	22.000.000						35825	60.417.994									
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia (jenis)	4	227.800.000	13	28.560.000	4	12.000.000						13	28.560.000									
						Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan (orsi)	35325	432.475.000	2183	82.822.000	1	9.000.000						2183	82.822.000									
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan konsultasi (OH)	278	1.937.766.000	128	170.011.794	1	10.000.000	20					128	170.011.794									
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-			4	6.500.000		0	0	0				#DIV/0!								
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (unit)	68	883.066.300	126	132.501.000	5	25.000.000		0	0	0					0%							
						Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan (unit)	43500	649.607.674	35825	60.417.994	2	22.000.000		0	0	0					0%							
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (unit)	4	227.800.000	13	28.560.000	4	12.000.000		0	0	0					0%							
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (unit)	35325	432.475.000	2183	82.822.000	1	9.000.000		0	0	0					0%							
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	5.141.840.000		1.149.362.544	100	85.000.000		9.594.552	0	9.594.552			1.158.957.096									
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai yang tersedia (lembar)	9360	80.900.000	205	7.250.000								205	7.250.000									
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telpon dan listrik yang dibayarkan (rekening)	288	740.000.000	96	215.145.544	1	65.000.000	1	9.594.552		9.594.552		96	224.740.096									
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan kantor yang dipelihara (unit)	52	345.170.000	95	31.334.000	1	20.000.000						95	31.334.000									
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kontrak yang dibayarkan gajinya (orang)	28	3.975.770.000	15	895.633.000				0				15	895.633.000									
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	12.779.336.000		1.402.117.445		110.026.250			0	0			1.402.117.445									
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan yang dibayarkan pajak dan KIR (unit)	68	1.954.984.000	114	398.347.796	30	63.100.000						114	398.347.796	20,38%								
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat berat yang terpelihara (unit)	12	7.532.580.000	27	824.017.400	11	43.826.250						27	824.017.400	10,94%								
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah alat - alat ukur yang terpelihara (unit)	10	3.291.772.000	17	179.752.249	11	3.100.000						17	179.752.249	5,46%								
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (unit)	0	0										0	-									
						PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik	81.52	301.948.266.100		13.420.442.259	79.12	5.542.958.558	9%	501.068.585	9%	501.068.585		9%	13.921.510.844	#VALUE!	5%	DINAS PUPR						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumber Daya Air yang terkelola/ terpelihara	84.62	43.972.530.500		2.155.966.996	81.25	951.799.950		0	0			3076591246										
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengendalian Banjir yang tersusun (dokumen)	34	3.986.331.000	11	387.614.196	1	178.000.000		0			11	387.614.196	32%	9,72								
						Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah embung dan penampung air lainnya yang terpelihara (embung)	41	11.694.404.700	5	739.466.600	1	203.000.000	0				5	739.466.600	12%	6,32								
						Normalisasi/Restorasi Sungai	Jumlah kawasan sungai yang dinormalisasi (kawasan)	145	28.291.794.800	27,348	1.949.510.450			0				27,348	1.949.510.450	19%	6,89								
						Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jaringan irigasi yang terkelola	83.03	257.975.735.600		11.264.475.263	81.22	4.591.158.608						15.695.548.654										
						Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan/ jaringan irigasi / rawa yang tersusun (dokumen)	42	4.656.467.300	19	882.198.839	2	231.719.100					19	882.198.839	45%	18,94566808								
						Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Bendung Irigasi yang dibangun (unit)	-	-	5	650.496.000		-					5	650.496.000	#DIV/0!	#DIV/0!								
						Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang ditingkatkan (jaringan irigasi)	208	55.114.274.600	20,862	7.398.611.011	0,833	1.111.234.000					20,862	7.398.611.011	10%	13,42412844								
						Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	175	185.614.393.700	22,34	5.355.975.079	2,2	7.093.315.900					22,34	5.355.975.079	13%	2,885538655								
						Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah jaringan irigasi yang terpelihara (jaringan irigasi)	223	12.590.600.000	36,65	1.408.267.725	0,9	1.055.482.000					36,65	1.408.267.725	16%	11,1850724								
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum	90.12	54.631.000.000		5.647.243.014	84.72	584.895.000	3%	17.942.100	3%	17.942.100		3%	5.665.185.114	#VALUE!	10%	DINAS PUPR						
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	61364	54.631.000.000		5.647.243.014	450	584.895.000		17.942.100	0	68.807.100												
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Kapasitas SPAM IKK/Perkotaan atau SPAM Tematik Tertentu yang terbangun (Liter/Detik)	-	-		-		-		0	0	0												
						Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perdesaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	51.759	25.151.000.000	1786	5.256.338.014					0													
						Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah tambahan rumah tangga di kawasan perkotaan yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)	9605	29.480.000.000	2	390.905.000					0													
						Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah tambahan rumah tangga yang mendapatkan layanan air bersih (rumah)			600	2.189.200.000					0	68.807.100												
						PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan (%)	75	11.105.650.000		615.000.000	60	0		0	0		0%	615.000.000	0%	6%	DINAS PUPR							
						Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang terkelola (ton)	0	11.105.650.000		615.000.000	230	0		0	0													
						Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun (unit)	0	11.105.650.000	1	615.000.000	0	0		0	0													
						Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang tersedia (unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0													
						PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak	86.85	65.754.000.000		9.386.060.090	100	3.967.500.000	1%	24.043.000	1%	24.043.000		1%	9.410.103.090	#VALUE!	14%	DINAS PUPR						
						Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	59541	65.754.000.000		9.386.060.090		3.967.500.000		24.043.000	0	170.295.000												
						Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik (orang)				687.313.000					0													
						Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah tambahan rumah tangga yang memperoleh akses sanitasi yang layak (rumah)	59.541	65.754.000.000	684	9.386.060.090					0													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi jalan (km)	107.57	226.252.805.000	66.34	104.116.652.648	676,5	48.178.185.700	0	51.634.300	0			66,62	104.116.652.648	#VALUE!	46,02							
						Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala (km)	92.67	226.173.791.040	34.54	38.624.883.803	3	3.355.000.000	0	7.499.000	0			34,54	38.624.883.803	#VALUE!	17,08							
						Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin (km)	98.8	33.000.000.000	39,5	6.725.376.227	40	3.000.000.000	0	0	7			46,3	6.725.376.227	#VALUE!	20,38							
						Pembangunan Jembatan	Jumlah jembatan yang terbangun (unit)	31	121.103.600.940	3	8.571.070.552			0	32.250.000	0			3	8.571.070.552	10%	7,08							
						Penggantian Jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan Penggantian (m)			1	592.365.000	1	2.285.000.000			0			1	592.365.000	#DIV/0!	#DIV/0!							
						Rehabilitasi Jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan Rehabilitasi (m)	-	-	1	567.576.000					0			1	567.576.000	#DIV/0!	#DIV/0!							
						Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah jembatan yang direhabilitasi secara berkala (Unit)	-	-	2	300.544.000					0			2	300.544.000	#DIV/0!	#DIV/0!							
						PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Lembaga Konstruksi yang terbina	100	6.247.290.000		114.278.000	100	15.000.000	15%	2.280.000	15%	2.280.000		15%	116.558.000	0%	2%	DINAS PUPR						
						Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah sertifikat keahlian yang diterbitkan (sertifikat)	416	2.470.789.800		44.333.000	65	10.000.000		2.280.000	0	0			52.828.000		0,021							
						Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis (dokumen)	6	230.000.000		1.900.000					0				1.900.000	0%	0,83							
						Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Mengikuti Pelatihan (orang)	260	758.399.900		29.893.000					0				29.893.000	0%	3,94							
						Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Tersertifikasi (orang)	156	844.269.800		13.670.000	30	35.000.000	0						13.670.000	0%	1,62							
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (orang)	40	638.120.100		7.365.000	1	1.493.400	0	0					7.365.000	0%	1,15							
						Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi (dokumen)	-	-							0													
						Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota (%)	100	1.613.040.000		15.045.000	100	0		0	0	0												
						Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen Sistem Informasi Jasa Konstruksi (laporan)	4	325.000.000	1	5.335.000					0													
						Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan dari Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi (dokumen)	7	515.000.000	1	1.785.000					0													
						Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPIAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPIAKI (orang)			0	0					0													
						Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Tersedianya Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota	4	390.000.000	2	3.675.000					0													
						Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	Jumlah Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan (dokumen)	0	0							0													
						Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi	Tersedianya Data Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi di Kabupaten Lima Puluh Kota	4	383.040.000	1	4.250.000		0		0	0	0												
						Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Jumlah Rekomendasi IUJK Nasional yang diterbitkan	124	1.311.720.000		28.030.000	0	0	0	0	0	0												
						Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional	Jumlah Rekomendasi Teknis IUJK yang diterbitkan	124	486.720.000	0	760.000					0													
						Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi yang meningkat kapasitasnya	45	375.000.000	30	24.990.000					0													
						Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan	Persentase Termonevnya IUJK yang telah diterbitkan (%)	100	450.000.000	0	2.280.000					0													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengawasan Tertib Usaha Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Monitoring dan evaluasi kegiatan Jasa Konstruksi	100	851.740.200		26.870.000	70	5.000.000	70	0	70	0												
						Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (dokumen)	6	150.000.000	0	500.000					0													
						Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (orang)	0	0							0													
						Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase termonevnya tertib Usaha, tertib Penyelenggaraan, dan tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (%)	60	701.740.200	60	26.370.000	60	5.000.000	0	0	0	0												
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase ketaatan terhadap RTRW	90	6.779.000.000	70	583.158.060	75	475.500.000	4%	21.118.959	4%	21.118.959		71%	604.277.019	1%	9%	DINAS PUPR						
						Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah ditetapkannya Peraturan Daerah RTRW dan Peraturan Daerah RDTR Kawasan (dokumen)	6	2.340.000.000	0	568.033.060	1	465.500.000	0	16.436.459	0	0		1.032.783.867										
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)	0	0							0			0		#DIV/0!	#DIV/0!							
						Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, dan Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)	6	840.000.000	2	466.400.807					0			2	466.400.807	33%	55,52							
						Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (dokumen)	6	650.000.000	2	565.883.060					0			2	565.883.060	33%	87,06							
						Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang (dokumen)	5	850.000.000	-	500.000					0			0	500.000	0%	0,06							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan peraturan Tata Ruang (dokumen)	14	2.610.000.000	100	6.815.000	4	0	0	0	0	0		6.815.000		0,261111111								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota (dokumen)	14	2.610.000.000	1	6.815.000		0	0	0	0	0		6.815.000		1								
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi pemanfaatan ruang yang terlaksana (lokasi)	135	1.190.000.000	18	0	5	10.000.000	2	4.682.500	4	8.705.500												
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (dokumen)	56	1.190.000.000	5	0		0		0	0	0												
						Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah (dokumen)					5	10.000.000		4.682.500		8.705.500												
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan sinkronisasi kesesuaian pengendalian peraturan Tata Ruang (lokasi)	45	639.000.000		8.310.000		0		0	0	0												
						Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	32	639.000.000	2	8.310.000		0		0	0	0												
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									485.212.700.502.477		178.088.713.140		19.653.221.642	5%	3.040.988.988	1	3.016.379.588		1	181.105.092.728	#VALUE!	#DIV/0!							
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah (%)	100%	8.398.854.054	100%	5.858.031.401	100%	4.529.723.945	9%	1.093.655.448	9%	1.093.655.448		54%	6.951.686.849			DINAS LINGKUNGBN HIDUP						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dokumen)	65,00	112.343.055	14	39.502.000	65	8.600.000	0%	0	0,00	0			14	39.502.000								
					Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah (dokumen)	3,00	41.068.005	0	-	6	3.600.000			0	0			0	0								
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	48,00	37.334.550	0	-					0	0			0	0								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja (Laporan)	14,00	33.940.500	14	39.502.000	12	5.000.000			0	0			14	39.502.000								
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD (%)	100,00	6.528.399.759	100	5.147.509.900	100	4.332.785.795	19%	1.038.938.240	19%	1.038.938.240			100	6.186.448.140								
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta Honorarium Pengelola kegiatan (orang pegawai)	48,00	5.902.013.759	152	4.843.825.400	40	4.329.735.795	40,00	1.038.938.240	40	1.038.938.240			192	5.882.763.640								
					Penyediaan Administrasi Pelaksana Tugas ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Honor (Orang)	86,00	86.000.000	60	74.360.000					0	0			60	74.360.000								
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pembayaran Lembur PNS, Non PNS dan Pembayaran premi asuransi jiwa dan kecelakaan kerja (orang)	86,00	540.386.000	286	229.324.500	1	3.050.000			0	0			286	229.324.500								
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (%)	100,00	54.831.346		-	0	0	0%	0														
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen rencana kebutuhan barang (dokumen)	1,00	29.908.007	0	-																		
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah (laporan)	1,00	24.923.339	0	-																		
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Prosentase administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah (%)	100,00	61.042.800	0	-	0	0	0%	0														
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan retribusi daerah (kali)	2,00	36.892.800	0	-																		
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah dokumen pendataan dan pendaftaran obyek retribusi daerah (dokumen)	1,00	24.150.000	0	-																		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (%)	100,00	134.134.234	0	-	0	0	0%	0														
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya (stel)	77,00	68.546.500	0	-																		
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (orang)	2,00	43.725.156	0	-																		
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (kali)	1,00	21.862.578	0	-																		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100,00	625.836.200	100	389.413.940	100	46.000.000	37%	9.200.700	37	9.200.700			137	398.614.640								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat Listrik dan lampu (jenis)	10,00	14.907.200	22	7.814.000	1	1.500.000	1	500.000	1	500.000			23	8.314.000								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan dan Perlengkapan Kantor (unit)	15,00	67.881.000	5	100.726.040	1	1.500.000			0	0			5	100.726.040								
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor (jenis)	48,00	135.762.000	138	66.485.200	1	13.000.000	1	3.249.000	1	3.249.000			139	69.734.200								
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan, penggandaan, penjiilidan dan publikasi (jenis)	4,00	108.609.600	24	73.006.900	1	10.000.000	1	3.877.700	1	3.877.700			25	76.884.600								
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah pengadaan makanan dan minuman rapat dan tamu (porsi)	4363,00	95.033.400	788	30.306.000	4	6.000.000	1	1.059.000	1	1.059.000			789	31.365.000								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pegawai yang melaksanakan rakor luar daerah (orang)	38,00	203.643.000	45	111.075.800	12	14.000.000	3	515.000	3	515.000			48	111.590.800								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)	100,00	468.378.900	100	-	100	0	0%	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								1	2					3	4				5		6			7	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/ pperasional (unit)	4,00	407.286.000	0	-														
						Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel (unit)	5,00	61.092.900	0	-														
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	120.668.460	100	58.245.138	100	79.338.150	24%	23.689.240	0,24	23.689.240			100,24	81.934.378				
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materail dan pengiriman surat (buah)	4620,00	27.152.400	500	6.000.000	12	2.000.000	3	500.000	3	500.000			503	6.500.000				
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah rekening yang dibayar (jenis)	5,00	67.881.000	16	41.882.738	12	35.838.150	3	7.189.240	3	7.189.240			19	49.071.978				
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah barang yang dipelihara / service (unit)	31,00	13.576.200	10	3.525.000	1	1.500.000			0	0			10	3.525.000				
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah peralatan kebersihan kantor (paket)	24,00	12.058.860	36	6.837.400	12	40.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000			39	22.837.400				
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah (%)	100,00	293.219.300	100	223.360.423	100	63.000.000	0%	21.827.268	0,00	21.827.268			100,00	245.187.691				
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dilakukan service, BBM, suku cadang dan pajak kendaraan (unit)	44,00	137.093.000	44	148.014.240	92	60.000.000	8	21.827.268	8	21.827.268			52	169.841.508				
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (unit)	50,00	115.397.700	0	-					0	0			0	0				
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung yang direhab (unit)	1,00	40.728.600	1	75.346.183	1	3.000.000			0	0			1	75.346.183				
						PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota (%)	34,50	4.899.696.084	0	45.815.110	30	603.750.000	0%	47.815.110	0%	47.815.110			0,00	93.630.220			DINAS LINGKUNGBABN HIDUP	
						Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pendataan Kawasan Perumahan (dokumen)	3,00	4.899.696.084	0	45.815.110	3	603.750.000	0,00	47.815.110	0	47.815.110			0	93.630.220				
						Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen dan Updating Database Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Dokumen Database PSU dan Dokumen RP2KPKP (dokumen)	3,00	447.216.000	0	-	3	100.000.000			0	0			0	0,0				
						Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana (kali)	3,00	36.000.020	0	-	3	3.750.000			0	0			0	0				
						Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada masyarakat/Sukarelawan tanggap bencana	Jumlah peserta sosialisasi (orang)	60,00	36.000.020	0	-					0	0			0	0				
						Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	45,00	1.200.000.000	0	45.815.110					0	0			0	45.815.110				
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	45,00	1.200.000.000	0	-	5	200.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000			0	2.000.000				
						Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/kota yang terehabilitasi									0	0			0	0				
						Pembangunan Rumah bagi korban bencana	Jumlah Rumah bagi korban bencana Kabupaten/kota yang terbangun		0		-	10	300.000.000		45.815.110	0	45.815.110			0	45.815.110				
						Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota (unit)	45,00	1.200.000.000	0	-	0	0		0	0	0			0	0				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45,00	36.000.022	0	-					0	0		0	0									
						Penatausahaan Serah Terima Rumah Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten	Jumlah unit rumah yang diserahkan terimakan (unit)	45,00	36.000.022	0	-					0	0		0	0									
						Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25,00	354.240.000	0	-					0	0		0	0									
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah rekomendasi pembangunan dan pengembangan perumahan (buah)	25,00	354.240.000	0	-					0	0		0	0									
						PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (%)	75%	8.087.813.360	0	5.304.366.800	65%	4.400.000.000	0%	25.000.000	0%	25.000.000		0	5.329.366.800			DINAS LINGKUNGABN HIDUP						
						Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1,00	8.087.813.360	0	5.304.366.800		4.400.000.000	0,00	25.000.000	0	25.000.000		0	5.329.366.800									
						Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen Survei dan updating lokasi perumahan dan permukiman kumuh (dokumen)	1,00	342.144.000	0	-					0	0		0	0									
						Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi dan dibangun pada kawasan permukiman kumuh (unit)	264,00	7.745.669.360	164	5.304.366.800	264	4.400.000.000	0,00	25.000.000	0	25.000.000		164	5.329.366.800									
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi /bansos peningkatan rumah bagi MBR (unit)	200,00	4.991.250.000	164	5.186.924.700	68	4.125.000.000		0														
							Jumlah rumah layak huni yang dibangun / bansos rumah bagi MBR (unit)	64,00	2.754.419.360	0	-	64	2.276.379.636		0														
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah lokasi Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU Kawasan Permukiman Kumuh (lokasi)	8,00	242.508.200	0	-	0	200.420.000		0														
						PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani (%)	34%	12.988.136.612	0	-	30	9.758.179.273	0%	0	0	0		0	0			DINAS LINGKUNGABN HIDUP						
						Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	375,00	12.988.136.612	0	-	300	9.758.179.273		0														
						Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh engan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha (unit)	375,00	11.890.061.612	0	-	300	8.933.179.273		0														
						Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah unit rumah kerja sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh (unit)	45,00	1.098.075.000	0	-	30	825.000.000		0														
						PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum/PSU (%)	53%	3.470.247.946	18	3.754.111.000	42	2.867.973.510	0%	3.920.000	0,0	3.920.000		18	3.758.031.000			DINAS LINGKUNGABN HIDUP						
						Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35,00	3.764.997.946	18	3.754.111.000	30	2.930.283.510		3.920.000	0	3.920.000		18	3.758.031.000									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													I											
							5		6		7		8					9		10	11		12	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.				
					Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian (lokasi)	35,00	3.076.538.146	18	3.754.111.000	29	2.542.593.510		3.920.000	0	3.920.000			18	3.758.031.000				
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1,00	196.854.900	0	-	1	162.690.000		0	0	0			0	0				
					PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman	100%	98.250.000	0	-	0	75.000.000		0	0	0			0	0				
					Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60,00	98.250.000	0	-	0	75.000.000		0	0	0			0	0				
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan (buah)	60,00	98.250.000	0	-	0	75.000.000		0	0	0			0	0				
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi penyediaan rumah layak huni dan PSU perumahan (laporan)	1,00	196.854.900	0	-					0	0			0	0				
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN								24.856.611.445		14.962.324.311		12.401.447.455		1.170.390.558		1.170.390.558				16.132.714.869				
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN																	DAMKAR		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota		100%	5.419.760.510	100%	3.562.008.651	100%	5.492.940.153	25%	1.396.891.098	25%	1.396.891.098			125%	4.958.899.749	125	91	DAMKAR	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.895.000.000		2.774.511.101		5.118.264.967		1.376.723.119	0	1.376.723.119			0	4.151.234.220	0	107	DAMKAR	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan ASN serta THL dan honorarium	14	3.800.000.000	14	2.750.356.101	14	5.071.425.367	3	1.376.723.119	3	1.376.723.119			17	4.127.079.220	121	109	DAMKAR	
					Koordinasi dan Penyusunan Kuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan dan Dokumen Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	12	35.000.000	12	13.605.000	12	32.124.400	3	0	3	0			15	13.605.000	125	39	DAMKAR	
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan realisasi dan capaian kinerja SKPD	12	60.000.000	12	10.550.000	12	14.715.200	3	0	3	0			15	10.550.000	125	18	DAMKAR	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			647.395.510		243.446.300		147.677.564		0	0	0			0	243.446.300	0	38	DAMKAR	
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Periode Pemenuhan Jumlah Alat-alat Listrik dan Jaringan Instalasi Listrik Kantor	12	50.419.200	12	31.075.000	12	9.790.600	3	0	3	0			15	31.075.000	125	62	DAMKAR	
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan	12	46.720.000	12	5.925.000	12	30.500.000	0	0	0	0			12	5.925.000	100	13	DAMKAR	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	umlah Peralatan Kebersihan dan Bahan Kebersihan Kantor/Posko Utama/9 Posko Pembantu	12	54.140.640	12	18.392.400	12	12.871.550	3	0	3	0			15	18.392.400	125	34	DAMKAR	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pemenuhan Alat Tulis Kantor Posko Utama dan Posko Pembantu	12	139.369.230	12	58.248.500	12	38.601.000	3	0	3	0			15	58.248.500	125	42	DAMKAR	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan	Jumlah Barang Cetakan dan Jumlah Lembar Penggadaan	7000 lbr	61.766.640	12	14.093.400	12	5.748.500	3	0	3	0			15	14.093.400	0	23	DAMKAR	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar Harian/ Mingguan dan Majalah	12	97.000.000	12	4.500.000	12	0	0	0	0	0			12	4.500.000	100	5	DAMKAR	
					Penyediaan Bahan/Material	Terlaksananya Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	12	63.884.800	0	8.000.000	0	0	0	0	0	0			0	8.000.000	0	13	DAMKAR	
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makan dan Minum/ snek Pegawai, Makanan dan Minum/ Snek Rapat, Makanan dan minum/ Snek Tamu	3360 porsi	44.320.000	2100	20.600.000	2100	2.000.000	300	0	300	0			2400	20.600.000	0	46	DAMKAR	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			100.000.000	0	29.499.000	0	0	K	2.400.000	0	2.400.000			0	31.899.000	0	31,899	DAMKAR					
					Pendataan Sarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat data bangunan/ gedung/ lingkungan di persyaratan harus memiliki sistim proteksi kebakaran	13 kec	50.000.000	37	16.029.000	37	0	0	2.400.000	0	2.400.000		37	18.429.000	0	37	DAMKAR						
					Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah dokumen yang menurut data bangunan / gedung/lingkungan yang memenuhi kelayakan standar sarana prasarana proteksi kebakaran	50 lokasi	50.000.000	20	13.470.000	20	0	0	0	0	0		20	13.470.000	0	27	DAMKAR						
					Investigasi Kejadian Kebakaran			30.000.000	50	8.195.000	50	4.580.000	0	0	0	0		50	8.195.000	0	27	DAMKAR						
					Investigasi Kejadian Kebakaran, Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah dokumen yang memuat hasil kejadian kebakaran yang dilakukan investigasi lanjutan yng meliputi penelitian dan pengujian	85	30.000.000	50	8.195.000	50	4.580.000	0	0	0	0		50	8.195.000	59	27	DAMKAR						
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			190.000.000	282	12.805.000	294	2.128.620.570	0	454.339.136	0	454.339.136		282	467.144.136	0	246	DAMKAR						
					Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi	Jumlah warga masyarakat yng mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran setiap tahunnya	75	40.000.000	42	0	42	2.128.620.570	0	454.339.136	0	454.339.136		42	454.339.136	56	1136	DAMKAR						
					Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/ Kelurahan yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran pada lingkup sistem ketahanan kebakaran lingkungan (SKKL) setiap tahunnya	390 org	80.000.000	240	12.805.000	240	0	0	0	0	0		240	12.805.000	0	16	DAMKAR						
					Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen Yang memuat jumlah SKKL desa/kelurahan yang telah tersedia Dukungan Sarana Prasarana Damkar	0,5	70.000.000	0	0	12	0	0	0	0	0		0	0	0	0	DAMKAR						
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			250.000.000	41	7.330.000	51	3.350.000	0	0	0	0		41	7.330.000	0	3	DAMKAR						
					Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa,Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah laporan hasil Penyelenggraan Operasi Penyelamatan yang mengancam keselamatan manusia	80	50.000.000	41	7.330.000	41	3.350.000	0	0	0	0		41	7.330.000	51,25	15	DAMKAR						
					Pembinaan Aparatur Pencarian Dan Pertolongan Terhadap kondisi Membahayakan Manusia/Pyelamatan dan Evakuasi	Jumlah laporan hasil pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi yang sah dan legal	0,65	200.000.000	0	0	10	0	0	0	0	0		0	0	0	0							
								11.239.870.510		9.727.806.210		12.323.134.793		1.927.295.234		1.927.295.234			11.655.101.444	63	103	DAMKAR						
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN																					
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN																					
					Program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	55.947.906.338	100%	5.636.880.587	100%	5.597.347.223	26%	1.428.829.730	26%	1.428.829.730		126%	7.065.710.317			SATPOL PP						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	1.148.679.360		6.989.000	20	1.000.000		4.428.000	0	4.428.000		0	11.417.000			SATPOL PP						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		249.225.061	4 dokumen	6.989.000	19	1.000.000	5	4.428.000	5	4.428.000		5	11.417.000			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD		78.571.694		0	1	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		111.517.523		0	2	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		105.164.919		0	1	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		106.789.519		0	2	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		215.941.520		0	12	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		281.469.125		0	55	0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		42.619.459.936		5.278.790.830	20	5.476.283.365		1.389.332.665	0	1.389.332.665		0%	6.668.123.495			SATPOL PP						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42.246.340.986		14 bulan	5.273.382.830	59	5.470.875.365	4	1.384.290.665	4	1.384.290.665		4	6.657.673.495			SATPOL PP						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	175.074.769				0			0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	73.794.890			0		0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	87.537.384		14 laporan	5.408.000	18	5.408.000	4	5.042.000	4	5.042.000		4	10.450.000			SATPOL PP						
					Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	36.711.906			0		0		0	0	0		0	0			SATPOL PP						
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0																
						Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD																						
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD				0		0																
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	2	2.806.842.525		5.107.000	20	490.000		4.991.000	0	4.991.000			10.098.000			SATPOL PP						
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya					136	0			0	0			0									
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	2.022.714.375		12 dokumen	5.107.000	4	490.000	3	4.991.000	3	4.991.000			10.098.000									
					Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai bedasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	134.173.387			0	3	0		0	0	0			0									
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	481.455.614		130 stel	0	130	0		0	0	0			0									
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	168.499.149		60 dokumen	0	1	0		0	0	0			0									
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	2.422.086.413			150.976.274	20	9.511.000		8.963.100	0	8.963.100			159.939.374			SATPOL PP						
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	30.638.085		4 paket	2.431.000	4	500.000	1	280.000	1	280.000			2.711.000			SATPOL PP						
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	175.074.769		4 unit	17.350.000	3	1.000.000		0	0	0			17.350.000			SATPOL PP						
					penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	51.848.912								0	0			0			SATPOL PP						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	262.612.153		2 paket	23.419.470	4	4.000.000	1	5.600.000	1	5.600.000			29.019.470			SATPOL PP						
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	55.976.656		10 paket	10.368.900	5	526.000	1	2.618.100	1	2.618.100			12.987.000			SATPOL PP						
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	40.967.496		12 bulan						0	0			0									
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	52.434.893		50 laporan	7.200.000	12	1.005.000	3	465.000	3	465.000			7.665.000			SATPOL PP						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1.752.533.450		20 laporan	90.206.904	60	2.480.000		0	0	0			90.206.904			SATPOL PP						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2.888.698.959			0	20	0		0	0	0			0			SATPOL PP						
						Jumlah paket mebel yang disediakan									0	0			0			SATPOL PP						
						Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum									0	0			0			SATPOL PP						
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	2.100.862.500			0	1	0		0	0	0			0									
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	525.224.306			0	20		0	0	0	0			0									
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	262.612.153			0	3	0		0														
					Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	2.360.578.714			42.805.283	20	31.476.000		2.197.965	0	2.197.965			45.003.248			SATPOL PP						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	38.211.906		12 buku	300.000	12	500.000	0	0	0	0			300.000			SATPOL PP						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														I										
								5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.					9	Rp.		10	11
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan		309.006.967	36 laporan	9.823.226	12	11.500.000	3	2.197.965	3	2.197.965		12.021.191			SATPOL PP		
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		2.013.359.841	12 laporan	32.682.057	36	19.476.000	0	0	0	0		32.682.057			SATPOL PP		
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		1.701.560.431		152.212.200	15	78.586.858		18.917.000	0	18.917.000		171.129.200			SATPOL PP		
							Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara															SATPOL PP		
							Persentase pelaksanaan administrasi umum															SATPOL PP		
							Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya															SATPOL PP		
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		1.344.145.291	15 unit	146.082.200	9	77.086.858	3	18.917.000	3	18.917.000		164.999.200					
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		86.049.249	15 unit	6.130.000	6	1.500.000	0	0	0	0		6.130.000					
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi		271.365.892			1	0		0									
						Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda		29.113.525.197	100%	1.929.083.218	77%	1.900.945.000		287.398.054	0	287.398.054		2.216.481.272			SATPOL PP		
						Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah aparaturnya yang mengikuti Bimtek/Pelatihan Petugas Tindak Internal (PTI)		23.900.146.415		1.795.707.318		1.842.920.000		282.408.054	0	282.408.054		2.078.115.372			SATPOL PP		
							Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA															SATPOL PP		
							Jumlah Aparatur yang mengikuti pelatihan PHH dalam rangka mendukung pemilu 2024															SATPOL PP		
							Jumlah personil yang turun ke lapangan untuk pengamanan massa kampanye, penertiban baliho, pengamanan masa tenang pemilu dan pengamanan pemungutan dan perhitungan suara 2024															SATPOL PP		
							Jumlah terlaksananya konsultasi dan koordinasi dalam penyusunan															SATPOL PP		
						Pencegahan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawasan		1.785.595.313	22 laporan	424.572.500	22	30.000.000	9	12.270.000	9	12.270.000		436.842.500					
						Penindakan atas Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah laporan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan		439.542.875	31 kali	93.440.000	31	30.000.000	4	6.400.000	4	6.400.000		99.840.000			SATPOL PP		
						Koordinasi Penyelenggaraan Ketertarikan dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat tingkat kabupaten kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketertarikan, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota		742.950.031	13 dokumen	48.774.200	30	16.400.000	3	1.000.000	3	1.000.000		49.774.200			SATPOL PP		
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan		2.459.833.438	7 dokumen	127.542.500	30	16.665.000	2	500.000	2	500.000		128.042.500			SATPOL PP		
						Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan dan Satlinmas termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya		2.510.000.000	420 orang	1.025.658.118	136	1.720.250.000	148	255.738.054	148	255.738.054		1.281.396.172					
						Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana ketertarikan dan ketertiban umum yang tersedia		15.277.134.997	10 unit	20.000.000	10	5.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000		22.000.000			SATPOL PP		
						Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketertarikan Masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketertarikan masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan		239.013.819	1 dokumen	22.965.000	1	7.675.000	0	3.500.000	0	3.500.000		26.465.000			SATPOL PP		
						Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan perda dan perkada yang terlayani		446.075.944	15 laporan	32.755.000	30	16.930.000	3	1.000.000	3	1.000.000		33.755.000					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
						Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase penurunan perda		4.203.157.313		89.445.900		40.000.000		1.190.000	0	1.190.000				90.635.900			SATPOL PP					
							Terlaksananya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda																	SATPOL PP					
							Terlaksananya sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai																	SATPOL PP					
							Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan terhadap Perda																	SATPOL PP					
						Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		1.548.476.250	36 laporan	40.490.000	27	15.000.000	0	0	0	0				40.490.000								
						Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah		1.138.781.000	60 laporan	23.555.900	20	10.000.000	0	0	0	0				23.555.900								
						Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sesuai SOP		1.515.900.063	24 laporan	25.400.000	24	15.000.000	6	1.190.000	6	1.190.000				26.590.000								
						Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase penurunan pelanggaran perda		1.010.221.469		43.930.000		18.025.000		3.800.000	0	3.800.000				47.730.000			SATPOL PP					
							Jumlah laporan hasil pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS Penegak Perda																	SATPOL PP					
							Jumlah aparatur yang mengikuti diklat/bimtek peningkatan karier dan kapasitas aparatur																						
						Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah	24 dokumen	31.030.000	7	9.995.000	0	0	0	0	0	0				31.030.000								
						Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pengembangan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda		1.010.221.469	8 laporan	12.900.000	2	8.030.000	1	3.800.000	1	3.800.000				16.700.000								
TOTAL SATPOL PP									85.061.431.535		7.565.963.805		7.498.292.223		1.716.227.784		1.716.227.784				9.282.191.589								
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN																													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN																							BPBD						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan pada BPBD Kab. Lima Puluh Kota	0	4.306.752.550	100%	4.269.370.171	100%	4.949.168.708	20%	942.594.674	20%	942.594.674			120%	5.211.964.845	0	121	BPBD					
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja BPBD	0	61.794.000	8	24.927.860	8	54.658.000	2	3.490.000	2	3.490.000			10	28.417.860	0	46	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran (Renja, RKA, DPA, RKAP, DPAP1) dan laporan bencana	5	37.452.000	6	24.927.860	6	54.658.000	2	3.490.000	2	3.490.000			8	28.417.860	160	76	BPBD					
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja (LkJP, LKPJ, LPDP, EKPPD), SPIP	4	24.342.000		0		0		0	0	0			0	0	0	0	BPBD					
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya kelengkapan dan peningkatan kapasitas aparatur	0	3.255.928.850	100	3.766.867.526	100	4.485.260.608	19%	899.088.349	20	899.088.349			120	4.665.955.875	0	143	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	14	3.242.197.850	14	3.744.587.526	14	4.456.225.608	400%	893.928.349	4	893.928.349			18	4.638.515.875	129	143	BPBD					
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	0	0	12	22.280.000	12	29.035.000	3	5.160.000	3	5.160.000			15	27.440.000	0	0	BPBD					
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan	4	13.731.000		0		0		0	0	0			0	0	0	0	BPBD					
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	0	0	5	12.500.000	0	0	0	0	0	0			5	12.500.000	0	0	BPBD					
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			5	12.500.000				0	0	0			5	12.500.000	0	0	BPBD					
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kelengkapan pendukung pelaksanaan urusan oerkantoran	0	193.029.700	100	180.601.785	100	188.892.600	20%	5.461.000	0,2	5.461.000			100,2	186.062.785	0	96	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah alat listrik yang diadakan (jenis)	6	9.896.000		0		0		0	0	0			0	0	0	0	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan (printer, laptop, dan PC)	6	18.900.000		0		0		0	0	0			0	0	0	0	BPBD					
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor	12	35.316.700	4	47.465.085	4	68.734.000	1	3.544.000	1	3.544.000			5	51.009.085	42	144	BPBD					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
1						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis barang cetakan jumlah lembar pengandaan (Jenis, Lembar)	4000	25.180.000	5	22.146.700	5	31.470.600	1	1.917.000	1	1.917.000			6	24.063.700	0	96	BPBD
						Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan Minum tamu	2100	5.025.000	4	2.630.000	4	1.700.000	0		0	0			4	2.630.000	0	52	BPBD
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat keluar daerah dalam propinsi danluar propinsi yang diikuti	160	98.712.000	160	108.360.000	160	86.988.000	0	0	0	0			160	108.360.000	100	110	BPBD
						Kegiatan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana prasarana pendukung untuk menunjang urusan pemerintahan	0	10.000.000	3	0	3	0		0	0	0			3	0	0	0	BPBD
						Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Meja Kerja dan Kursi kerja Esselon yang diadakan				0	0			0	0	0			0	0	0	0	BPBD
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	3	10.000.000	0	0	0	0			0	0			0	0	0	0	BPBD
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya jasa penunjang urusan perkantoran	0	645.630.000	100	110.383.000	100	105.100.000	20%	7.874.925	0,2	7.874.925			100,2	118.257.925	0	18	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yg diadakan	1000	6.000.000	3	1.279.000	3	1.000.000	0	0	0	0			3	1.279.000	0	21	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Periode pemenuhan kebutuhan komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	12	35.400.000	12	73.104.000	12	68.100.000	3	7.874.925	3	7.874.925			15	80.978.925	125	229	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Hari Honor THL, Jumlah THL, jasa Pelayanan Umum PTT yg dibayarkan premi asuransinya	14	604.230.000	13	36.000.000	13	36.000.000			0	0			13	36.000.000	93	6	BPBD
						Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	tersedianya pemeliharaan barang milik daerah		140.370.000	100	174.090.000	100	115.257.500	20%	26.680.400	0,2	26.680.400			100,2	200.770.400	0	143	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Layanan	Jumlah pemeliharaan dan pajak kendaraan yang dibayarkan	8	130.740.000	8	161.010.000	8	105.467.500	2	22.680.400	2	22.680.400			10	183.690.400	125	141	BPBD
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah perioden pemeliharaan peralatan gedung kantor (bulan)	12	9.630.000	2	13.080.000	4	9.790.000	1	4.000.000	1	4.000.000			3	17.080.000	25	177	BPBD
						PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Penurunan Indeks resiko bencana (IRB) Kab. Lima Puluh Kota	0	1.479.640.000	100%	1.623.628.500	100%	1.898.727.900	10%	184.811.000	10%	184.811.000			110%	1.808.439.500	0	122	BPBD
						Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase warga negara pada daerah rawan bencana yang memperoleh layanan informasi bencana (100%)	0	350.000.000	0	350.000.000	0	350.000.000	0	0	0	0			0	350.000.000	0	100	BPBD
						Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (Per Jenis Bencana)	1. Pengadaan dan pemasangan Rambu Evakuasi dan Papan Informasi Publik per jenis bencana	2	10.000.000	0	0		0			0	0			0	0	0	0	BPBD
						Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRBB)	Pengadaan Penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRBB)	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	0	0	0	0			1	350.000.000	100	100	
						Kegiatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (100%)	0	874.998.000	100	1.118.773.500	100	1.496.124.900	20	184.811.000	20	184.811.000			120	1.303.584.500	0	149	BPBD
						Sub Kegiatan Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	Jumlah Pelatihan Pengelolaan Resiko Bencana Kab/Kota	200	100.000.000	200	100.000.000	20	10.125.000	0	0	0	0			200	100.000.000	100	100	BPBD
						Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	36	578.760.400	200	948.000.000	30	155.556.000	30	155.556.000					66	734.316.400	0	0	BPBD
						Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/ Kota	1. jasa piket pos Pusat Pengandilan Operasional Prasarana Penanggulangan (PUSDALOPS PB) dan TRC	5000	424.998.000	12	90.013.100	12	187.999.900	3	29.255.000	3	29.255.000			15	119.268.100	0	28	BPBD
						Sub Kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB)	1	350.000.000	1	350.000.000	1	350.000.000	0	0	0	0			1	350.000.000	100	100	BPBD
						Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (100%)	100	195.119.000	100	30.073.000	0	30.073.000	0	0	0	0			100	30.073.000	100	15	BPBD
						Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Paket logistik dan Kelengkapan lainnya bagi penduduk terdampak bencana dana tempat penampungan sementara	300	195.119.000	1	30.073.000	1	30.073.000			0	0			1	30.073.000	0	15	BPBD
						Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana	100	59.523.000	100	124.782.000	100	22.530.000	20	0	20	0			120	124.782.000	120	210	BPBD
						Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah OK (orang kegiatan) peserta pelatihan pengkajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA)	120	59.523.000	90	124.782.000	100	22.530.000	0	0	0	0			90	124.782.000	75	210	BPBD
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BPBD BPBD									5.786.392.550		5.892.998.671		6.847.896.608	15%	1.127.405.674	15%	1.127.405.674			115%	7.020.404.345	0	122	BPBD
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM									102.087.694.595		23.186.768.686		26.669.323.624		4.770.928.692		4.770.928.692				27.957.697.378	21	75	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							1	2				3	4	5				6		7			8
	1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	
	1	06	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95%	39.601.203.290	95%	14.020.202.920	95 %	4.067.603.533		990.315.523	0%	990.315.523		95%	15.010.518.443	100%	38%	DINAS SOSIAL
	1	06	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Sinergitas Evaluasi Perangkat Daerah	95%	488.329.000	95%	63.276.000	95 %	17.579.100		0	0%	0		95%	63.276.000	100%	13%	
	1	06	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum OPD dan RENJA	12	102.000.000	6	14.272.000	2	11.059.100	-	0	-	0		6	14.272.000	50%	14%	
	1	06	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah RKA	6	63.000.000	1	1.877.000	0	0	-	0	-	0		1	1.877.000	17%	3%	
	1	06	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan	6	58.500.000	1	1.877.000	0	0	-	0	-	0		1	1.877.000	17%	3%	
	1	06	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA	6	58.500.000	1	1.917.000	0	0	-	0	-	0		1	1.917.000	17%	3%	
	1	06	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan	6	58.500.000	1	1.904.000	0	0	-	0	-	0		1	1.904.000	17%	3%	
	1	06	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LKJIP, SPIP, LKPI, EKPPD, LPPD, PK, RKT, Rencana Aksi, Realisasi Rencana Aksi, SPM dan Laporan Capaian Kinerja	72	102.829.000	35	36.004.000	15	6.520.000	-	0	-	0		35	36.004.000	49%	35%	
	1	06	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah OH yang Melaksanakan Evaluasi Kinerja dan Monitoring Kegiatan APBD	516	45.000.000	122	5.425.000	0	0	-	0	-	0		122	5.425.000	24%	12%	
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan Laporan OPD	95%	27.317.093.190	95%	12.071.987.960	95 %	3.812.324.033	95%	982.377.586	95%	982.377.586		95%	13.054.365.546	100%	48%	
	1	06	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan TunjanganASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN, Jumlah Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan (Honor PA, KPA, PPK, PPTK, Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Pengadaan dan PPHP	72	26.983.854.690	48	12.055.947.960	12	3.812.324.033	3	982.377.586	3	982.377.586		51	13.038.325.546	71%	48%	
	1	06	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ dan Jumlah SPJ Kegiatan untuk Verifikasi	72	223.903.500	12	2.665.000	0	0		0	0	0		12	2.665.000	17%	1%	
	1	06	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	6	33.889.000	3	6.334.000	0	0		0	0	0		3	6.334.000	50%	19%	
	1	06	01	2.02	07	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6	27.000.000	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.02	08	Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/SemesteranSKPD	Jumlah Koordinasi dan PenyusunanLaporan KeuanganBulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72	23.995.000	24	5.105.000	0	0		0	0	0		24	5.105.000	33%	21%	
	1	06	01	2.02	09	Penyusunan Pelaporan danAnalisis Prognosis RealisasiAnggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	6	24.451.000	1	1.936.000	0	0		0	0	0		1	1.936.000	17%	8%	
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	95%	43.376.000	95%	4.125.000	95%	1.980.000		0		0		95%	4.125.000	100%	10%	
	1	06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan RKBMD dan RKPBMd	12	21.585.000	2	1.953.000	0	0		0	0	0		2	1.953.000	17%	9%	
	1	06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD	12	21.791.000	3	2.172.000	2	1.980.000		0	0	0		3	2.172.000	25%	10%	
	1	06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	95%	269.976.000	95%	19.000.000	95 %	0		0	0	0			0	0		
	1	06	01	2.05	01	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Stel Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya/ Pakaian Khusus Hari Tertentu yang diadakan	420	210.000.000	1	19.000.000	0	0		0	0	0		1	19.000.000	0%	9%	
	1	06	01	2.05	04	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah OH yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	54	59.976.000	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	95%	2.464.758.100	95%	484.170.225	95 %	88.870.400		2.155.000	0	2.155.000		95%	486.325.225	100%	20%	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														1										
								5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.				9	Rp.	10	11		12
1	1	06	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Alat Listrik yang diadakan	72	84.999.000	48	15.010.000	12	1.500.000	3	150.000	3	150.000			51	15.160.000	71%	18%	
	1	06	01	2.06	04	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.06	05	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	72	66.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Jumlah Bulan Alat Kebersihan yang diadakan	72	241.067.300	48	127.799.000	12	12.476.000	3	1.198.000	3	1.198.000			51	128.997.000	71%	54%	
	1	06	01	2.06	08	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	72	235.855.800	38	84.024.500	12	8.079.400	3	807.000	3	807.000			41	84.831.500	57%	36%	
	1	06	01	2.06	09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Pembayaran Bahan Bacaan dan Surat Kabar	72	47.450.000	12	4.740.000	0	0	0	0	0	0			12	4.740.000	17%	10%	
	1	06	01	2.06	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Porsi Makan dan Minum Tamu yang disediakan	5598	154.010.000	1749	45.066.300	12	9.960.000		0	0	0			1749	45.066.300	31%	29%	
	1	06	01	2.06	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Porsi Makan dan Minum Rapat dan Jumlah OH yang Mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	5402	1.569.376.000	527	207.530.425	82	56.855.000		0	0	0			527	207.530.425	10%	13%	
	1	06	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	4.146.044.000	95%	70.022.550	95 %	26.960.000		0	0	0			95%	70.022.550	100%	2%	
	1	06	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.07	05	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Kendaraan Roda 2 dan Kendaraan Roda 4	9	1.775.344.000	3	49.422.550	0	0	0	0	0	0			3	49.422.550	33%	3%	
	1	06	01	2.07	06	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	55	225.000.000	3	15.000.000	0	0	0	0	0	0			3	15.000.000	5%	7%	
	1	06	01	2.07	07	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dan Mesin lainnya	30	695.700.000	9	5.600.000	4	26.960.000	0	0	0	0			9	5.600.000	30%	1%	
	1	06	01	2.07	08	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.07	09	Pengadaan Sarana dan Prasaarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasaarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	500.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	95%	2.029.100.000	95%	501.312.144	95 %	25.000.000	95 %	2.224.540	95%	2.224.540			95%	503.536.684	100%	25%	
	1	06	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat	72	54.690.000	36	2.467.000	12	500.000	3	50.000	3	50.000			39	2.517.000	54%	5%	
	1	06	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet	72	345.420.000	48	110.415.144	12	24.500.000	3	2.174.540	3	2.174.540			51	112.589.684	71%	33%	
	1	06	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72	45.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.08	05	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Gaji PTT, THL dan Honor Pengurus barang Pengguna	72	1.583.990.000	36	388.430.000	0	0	0	0	0	0			36	388.430.000	50%	25%	
	1	06	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	95%	2.842.527.000	95%	806.309.041	95 %	94.890.000		3.558.397	0	3.558.397			95%	809.867.438	100%	28%	
	1	06	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6	211.626.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	
	1	06	01	2.09	06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak, danPerizinan Kendaraan DinasOperasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	72	1.510.797.000	48	584.446.374	12	88.600.000	3	3.558.397	3	3.558.397			51	588.004.771	71%	39%	
	1	06	01	2.09	09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata Perbaikan Peralatan Kantor yang dilakukan dalam Satu Tahun	72	96.240.000	47	17.979.400	12	6.290.000		0	0	0			47	17.979.400	65%	19%	
	1	06	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor	6	823.864.000	2	203.883.267	0	0		0	0	0			2	203.883.267	33%	25%	
	1	06	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0%	0%	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	1	06	02		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang di Berdayakan	95%	13.560.561.000	95%	3.365.099.774	95%	0%	0	0	0	0		95%	3.365.099.774	100%	25%	DINAS SOSIAL						
	1	06	02	2,03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan SosialDaerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	95%	13.560.561.000	95%	3.365.099.774	95 %	0	0	0	0			95%	3.365.099.774	100%	25%							
	1	06	02	2,03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Peningkatan Sumber Daya Manusia PSM dan Pemilihan Pilar-pilar Berprestasi	81	2.511.609.000	81	557.844.200	0	0	0	0	0	0		81	557.844.200	100%	22%							
	1	06	02	2,03	02 Peningkatan KemampuanPotensi Tenaga KesejahteraanSosial Kecamatan KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Sumber Daya Manusia TKSK dan Pemilihan Pilar-Pilar Berprestasi	13	932.242.500	13	252.374.700	0	0	0	0	0	0		13	252.374.700	100%	27%							
	1	06	02	2,03	03 Peningkatan KemampuanPotensi Sumber KesejahteraanSosial Keluarga KewenanganKabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana PPKS, Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat (RLTH) Pengadaan Bangunan Warung Binaan Sosial (Warbinsos) dan Jumlah Pemberian Bantuan UEP Fakir Miskin	456	3.215.660.000	204	1.763.733.090	0	0	0	0	0	0		204	1.763.733.090	45%	55%							
	1	06	02	2,03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber KesejahteraanSosial Kelembagaan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna Yang Mengikuti Sosialisasi dan Lomba Karang Taruna dan Jumlah PSKS Kelembagaan Masyarakat yang di berdayakan	104	6.051.491.300	217	749.853.284	0	0	0	0	0	0		217	749.853.284	209%	12%							
	1	06	02	2,03	05 Peningkatan KemampuanSumber Daya Manusia danPenguatan Lembaga KonsultasiKesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Sosial dan Penyerahan Bantuan untuk Masyarakat	66	849.558.200	11	41.294.500	0	0	0	0	0	0		11	41.294.500	17%	5%							
					PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	25%	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%	0%	DINAS SOSIAL						
					Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	25%	450.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0%	0%							
					Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	6	450.000.000	0	-	0	-	-	-	0	0		0	0	0%	0%							
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	85%	26.642.853.800	85%	8.057.801.334	85 %	2.799.921.998	0%	12.000.000	0	12.000.000		85%	8.069.801.334	100%	30%	DINAS SOSIAL						
					Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Dasar	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang DisabilitasTerlantar, Anak Dasar	85%	22.543.488.800	85%	4.956.002.094	85 %	730.942.432	0	6.000.000	0%	6.000.000		85%	4.962.002.094	100%	22%							
					Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, sertaGelandangan Pengemis di Luar Pantl Sosial	Jumlah Bantuan Permakanan bagi Lansia Terlantar, Lansia Tidak Potensial UEP bagi Lansia	12152	13.724.705.300	2275	1.816.732.797	10	15.250.000	0	0	0	0		2275	1.816.732.797	19%	13%							
					Penyediaan Sandang	Jumlah Bantuan Sandang untuk Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Bayi Terlantar dan Disabilitas Terlantar	596	1.194.416.500	100	130.244.836	8	13.000.000	0	0	0	0		100	130.244.836	17%	11%							
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Pemberian Alat Bantu Cacat bagi Lansia	528	1.476.209.500	98	88.390.928	44	53.000.000	0	0	0	0		98	88.390.928	19%	6%							
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikisik Keluarga	360	447.632.000	153	66.835.514	0	0	0	0	0	0		153	66.835.514	43%	15%							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							5		6		7		8					9		10			11	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
					Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Pelatihan, Pelayanan dan Bantuan UEP bagi Penyandang Disabilitas, Tersedianya Rumah Idaman UI/LS/Rumah Antara/Rumah Singgah bagi Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan	274	2.146.194.500	90	348.730.623	15	71.000.000	0	0	0	0	90	348.730.623	33%	16%				
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	150	900.000.000	146	489.729.840	0	0	0	0	0	0	146	489.729.840	97%	54%				
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, Pelatihan bagi Anak Terlantar dan Putus Sekolah dan Pengiriman Anak ke Panti Rehabilitasi dan Bimbingan Lanjut untuk Anak terlantar (Putus Sekolah)	480	1.374.685.000	1973	1.919.059.956	595	553.692.432	6.000.000	0	6000000		1973	1.925.059.956	411%	140%				
					Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Pemberian Layanan Kedaruratan	30	123.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	30	123.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial	169	1.033.646.000	69	96.277.600	75	25.000.000	0	0	0	0	69	96.277.600	41%	9%				
1	06	04	2,02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	85%	4.099.365.000	85%	3.101.799.240	85 %	2.068.979.566	6.000.000	0	6.000.000		85%	3.107.799.240	100%	76%				
					Pemberian Layanan Kedaruratan	JumlahPemberian Layanan Kedaruratan	60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyediaan Permakanan	180	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang	180	165.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penyediaan Alat Bantu	90	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Pemberian Bimbingan Fisik,Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Eks Penyandang Penyakit Sosial yang mengikuti pelatihan kewirausahaan dan bantuan UEP dan bimbingan lanjut untuk wanita tuna susila	140	1.332.480.000	179	905.979.882	99	471.104.288	0	0	0	0	179	905.979.882	128%	68%				
					Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	60	150.000.000	181	864.819.325	285	1.247.875.278	6.000.000	0	6.000.000		181	870.819.325	302%	581%				
					Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Validasi Data Penerima Bantuan Jaminan Kesehatan Nasional, PBI JKSS, PBI Jamkesda dan PBI JKN APBD Serta Sosialisasi	212391	1.028.450.000	209199	1.331.000.033	17	350.000.000	0	0	0	0	209199	1.331.000.033	98%	129%				
					Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Pemberian Layanan Rujukan	60	150.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
					Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Panti di Kabupaten Lima Puluh Kota dan Jumlah Tenaga Pembina Anak Terlantar yang mengikuti Bimbingan Teknis	159	358.435.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Perlindungan dan Jaminan Sosial	85%	9.989.848.600	85%	1.185.574.609	85 %	0	0	0	0	0	85%	1.185.574.609	85%	12%	DINAS SOSIAL			
1	06	05	2,02		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase Pemeliharaan Anak Terlantar	85%	880.000.000	85%	0	85 %	0	0	0	0	0	85%	0	100%	0%				
1	06	05	2,02	01	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	108	225.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%				
1	06	05	2,02	03	Rujukan Anak - Anak Terlantar	Jumlah Rujukan Anak - Anak Terlantar	130	345.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab								
				5		6		7		8						9			10		11		12		13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	1 06 05 2,02 04	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	156	310.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0%	0	0%	0%								
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan DaerahKabupaten/Kota	Persentase Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten	95%	9.109.848.600	95%	1.185.574.609	95%	0	0	0	0	0	95%	1.185.574.609	100%	13%									
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data BDT serta Pendataan PPKS dan PSKS	13	2.461.734.600	13	290.507.346	13	0	0	0	0	0	13	290.507.346	100%	12%									
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Monitoring Penyaluran Bantuan Sosial Pangan (BSP) Sembako	24994	887.854.900	25287	78.893.200	0	0	0	0	0	0	25287	78.893.200	101%	9%									
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Monitoring Penyaluran Bantuan Keluarga Harapan (PKH)	16898	2.070.546.300	21958	467.226.063	0	0	0	0	0	0	21958	467.226.063	130%	23%									
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Pelatihan dan Pemberian Bantuan Sosial Barang bagi Korban Tindak Kekerasan (KTK) dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Bantuan UEP untuk WRSE dan KTK	564	3.689.712.800	67	348.948.000	0	0	0	0	0	0	67	348.948.000	12%	9%									
1	06 06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang Tertangani	95%	3.612.297.000	100%	758.526.969	100 %	294.442.401	0%	20.127.000	0	20.127.000	100%	778.653.969	105%	22%	DINAS SOSIAL								
1	06 06 2,01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	95%	2.458.829.900	95%	716.036.969	95 %	294.442.401		20.127.000	0	20.127.000	95%	736.163.969	100%	30%									
1	06 06 2,01 01	Penyediaan Makanan	Jumlah Penyediaan Makanan dan Pembangunan Gudang Logistik	859	1.147.199.900	605	435.423.676	157	198.013.701	25	15.752.000	25	15.752.000	630	451.175.676	73%	39%									
1	06 06 2,01 04	Penyediaan Sandang	Jumlah Penyediaan Sandang untuk Korban Bencana	900	543.000.000	150	186.469.764	41	89.678.700		4.125.000	0	4.125.000	150	190.594.764	17%	35%									
1	06 06 2,01 05	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	500.000.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%									
1	06 06 2,01 06	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan orang terlarntar dalam perjalanan	72	86.000.000	27	8.330.000	2	6.750.000	1	250.000	1	250.000	28	8.580.000	39%	10%									
1	06 06 2,01 07	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Penggantian transportasi Tagana dan selter Pengungsi	83	182.630.000	94	85.813.529	0	0		0	0	0	94	85.813.529	113%	47%									
1	06 06 2,02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadapKesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	95%	1.153.467.100	95%	42.490.000	95 %	0	0	0	0	0	95%	42.490.000	100%	4%									
1	06 06 2,02 02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Sosialisasi untuk Kampung Siaga Bencana dan Pembentukan Kampung Siaga Bencana	7	600.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%									
1	06 06 2,02 03	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana dan Perekrutan Tagana Muda	150	553.467.100	25	42.490.000	0	0		0	0	0	2500%	42.490.000	17%	8%									
1	06 07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Makam Pahlawan yang Terkelola dengan Baik	95%	1.107.548.100	95%	150.827.700	95 %	33.367.900	0%	0	0	0	95%	150.827.700	100%	14%									
1	06 07 2,01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	0,95	1.107.548.100	95%	150.827.700	95 %	33.367.900		0	0	0	95%	150.827.700	100%	14%									
1	06 07 2,01 01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Rehab sarana dan Prasaranan Makam Pahlawan dan Peringatan Hari Pahlaan 10 November	12	689.548.100	4	132.827.700	1	33.367.900		0	0	0	4	132.827.700	33%	19%									
1	06 07 2,01 03	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	3	300.000.000	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0%	0%									
1	06 07 2,01 04	Pengamanan Taman MakamPahlawan NasionalKabupaten/Kota	Jumlah Hari Kerja Tenaga Pengamanan Taman Makam Pahlawan	72	118.000.000	12	18.000.000	0	0		0	0	0	12	18.000.000	17%	15%									
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					94.964.311.790		27.538.033.306		7.195.335.832	0%	1.022.442.523	14%	1.022.442.523		28.560.475.829		30%									
URUSAN TENAGA KERJA																										
3	31 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase peningkatan kinerja pemerintah daerah	100%	25.073.606.042	-	12.826.593.243	-	3.990.215.436		874.291.040		874.291.040		13.705.684.283			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA								
3	31 01 2,01	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	100%	79.350.000	-	-	-	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									
3	31 01 2,01 06	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	12 dokumen	79.350.000	-	-	2 dokumen	1.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							5	6	7	8	9	10	11				12	13			
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
	3	31	01	2,02	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan program dan kegiatan PD (Renstra, Renja, RKA, DPA)							K		-			0			
	3	31	01	2,02	01 Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	18.574.190.142	-	11.015.302.204	-	3.752.687.900	-	874.291.040	-	874.291.040	-	11.889.593.244	-		
	3	31	01	2,02	05 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72 bulan	18.530.690.142	47 bulan	11.005.792.154	43 org/ 14 bulan	3.751.687.980	3 bulan	874.291.040	3 bulan	874.291.040		11.880.083.194		64,11	
	3	31	01	2,05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan Sakhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	6 dokumen	43.500.000	2 dokumen	9.510.050	1 laporan	1.000.000	3 bulan	-	-	-		9.510.050		21,86	
	3	31	01	2,05	05 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	Tersedianya akuntansi dan pelaporan keuangan	1 dokumen	5.500.000							-			-		-	
					Kegiatan : Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	Persentase tersedianya Administrasi Kepegawainan Perangkat Daerah	100%	49.000.000	-	5.938.600	-	1.000.000	-	-	-	-	-	5.938.600	-	12	
					Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Tertukutnya pendidikan dan pelatihan formal bagi aparaturn									-			-			
	3	31	01	2,06	Sosialisasi peraturan perundang- undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan per- UU an bagi ASN									-			-			
	3	31	01	2,06	01 Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah laporan monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	5 laporan	49.000.000	1 laporan, 1 dokumen	5.938.600	1 dokumen	1.000.000	-	-	-	-		5.938.600		12,12	
	3	31	01	2,06	04 Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	100%	2.053.451.900	-	539.972.760	-	56.437.000	-	-	-	-	-	539.972.760	-		
	3	31	01	2,06	05 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	6 paket	87.432.000	29 bulan	17.480.000	1 paket	2.497.000			-			17.480.000		19,99	
	3	31	01	2,06	08 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 paket	297.685.200	41 bulan	69.341.132	1 paket	10.021.000	-	-	-	-		69.341.132		23,29	
	3	31	01	2,06	09 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 paket	232.435.700	36 bulan	57.882.500	1 paket	3.950.000			-	-	-	57.882.500		24,90	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (koran, peliputan media massa)									-	6 bulan	-		#DIV/0!		
					Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah paket fasilitasi kunjungan tamu	72 paket	275.885.000	41 bulan	59.428.500	1 paket	4.995.000	-	-	-	-		59.428.500		21,54	
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	72 laporan	1.160.014.000	41 bulan	335.840.628	1 laporan	34.974.000	-	-	-	-		335.840.628		28,95	
	3	31	01	2,08	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	8.000.000							-			-			
	3	31	01	2,08	01 Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	370.000.000	-	-	-	4.800.000			-			4.800.000			
	3	31	01	2,08	02 Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang disediakan	26 unit	370.000.000	0	-	1 unit	4.800.000						4.800.000			
	3	31	01	2,09	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.579.840.000	-	904.565.079	-	126.332.456	-	-	-	-	-	904.565.079	-	60	
	3	31	01	2,09	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	381.500.000	41 laporan	84.768.575	1 laporan	43.063.400	0		-	-		84.768.575		22,22	
	3	31	01	2,09	06 Penyediaan jasa pelayanan umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 laporan	2.198.340.000	29 bulan	819.796.504	1 laporan	83.269.056	0		-	-		819.796.504		37,29	
	3	31	01	2,09	09 Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terpeliharannya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	1.367.774.000	-	360.814.600	-	47.958.000						360.814.600			
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan pertinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	90 unit roda 2, 12 roda 4	917.918.000	46 unit	268.129.600	5 unit	39.650.000	0		-	-		268.129.600		29,21	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
					Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	96 unit	228.240.000	24 bulan, 20 unit	54.235.000	30 unit	4.850.000	-		-	-		54.235.000		23,76	
					Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah unit gedung kantor dan bangunan yang dipelihara	12 unit	221.616.000	2 unit, 2 paket, 10 bulan	38.450.000	1 unit	3.458.000	-		-	-		38.450.000		17,35	
					Program : Pelatihan Kerja dan produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	100%	1.829.060.000	-	2.641.964.722	-	2.379.908.168						2.641.964.722			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
					Kegiatan : Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terpeliharannya barang milik daerah urusan pemerintah daerah	100%	1.829.060.000	-	2.641.964.722	-	2.379.908.168						2.641.964.722			
					Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada tahun n	707 orang	1.829.060.000	372 pencari	2.641.964.722	172 orang	2.379.908.168	-		-	-		2.641.964.722		144,44	
					Program : Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja	100%	760.000.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	4.999.900						105.222.819			
					Kegiatan : Pelayanan antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	100%	760.000.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	4.999.900						105.222.819			
					Perluasan kesempatan kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui perluasan kesempatan kerja	260 orang	760.000.000	2000 orang	105.222.819	11 orang	4.999.900	-		-	-		105.222.819		13,85	
TOTAL URUSAN BIDANG TENAGA KERJA								27.662.666.042		15.573.780.784		6.375.123.504	-	874.291.040	-	874.291.040	-	16.452.871.824	-	-	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja													-		-			105.222.819			
Fator penghambat pencapaian kinerja													-		-			105.222.819		13,85	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8					9		10			11		12		13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.						

[illegible]

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								5		6		7		8		9				10		11			12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Jalan.Daerah.Kabupaten./Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat PeningkatanKapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			60	26.544.000																	
						Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten./Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat PeningkatanKapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			65	26.544.000	100																
						PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		100	2.220.697.485		0		0		0						-							
						Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan PenyajianData Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data diTingkat Daerah.Kabupaten./Kota		3	2.220.697.485		0		0		0						-							
						Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/ Kota yang Tersedia				923.202.458		0		0						-							
						Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data diKewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah promosi dan edukasi melalui media luar ruang Jumlah promosi melalui media elektronik Jumlah promosi melalui media massa		1.297.495.027		0		0		0						-							
						PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PIHA)	Tingkat Capaian Kabupaten Layak Anak	KLA	1.340.187.837		158.206.469		420.003.200								151.158.200			P2KBP3A				
						Pelembagaan PIHA pada Lembaga Pemerintah, Nongovernment, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Kecamatan Layak Anak	100	1.340.187.837	15,40	151.158.200	90	420.003.200								151.158.200							
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha		892.323.774	25	151.158.200	20	420.003.200								151.158.200							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		447.864.063		0		0		0		0				0							
						PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan pada unit layanan khusus	100	2.765.521.323	100	309.964.699	100	2.347.282.678								120.019.000			P2KBP3A				
						Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Jalan.Daerah.Kabupaten./Kota	Persentase penurunan kekerasan terhadap anak	0,017	878.573.474		120.019.000	0,03	302.512.678								120.019.000							
						Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		798.573.474	43	120.019.000	150	302.512.678								120.019.000							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/ Kota		80.000.000																			
						Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyediaan lembaga layanan	100	915.142.537	100	163.595.699	100	2.009.750.000															
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		915.142.537																			
						Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK				43	163.595.699	90	2.009.750.000															
						Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga layanan yang terlatih	100	971.805.312	100	26.350.000	100	35.020.000															
						Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		51.000.000																			
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/ Kota		920.805.312																			
						Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan dan Penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				160	26.350.000	200	35.020.000															
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN								16.421.581.423		897.066.892		3.760.409.878	0%	0	0%	0			795.897.792									

PERTANAHAN																						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
					PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase cakupan pengelolaan Izin Lokasi (%)	100	767.630.000		0	0	0%	0	0%	0			0%		0%	0%	PUPR
					Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Lokasi yang direkomendasikan		767.630.000		0	0	0%	0	0%	0			0%		0%	0%	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13				
						Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang (dokumen)	0	767.630.000			0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%						
						PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan yang difasilitasi	100	457.520.000	0	5.295.000	1	0	0	0	0	0		0	0	0	0		PUPR				
						Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian sengketa tanah garapan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang difasilitasi (kasus)	23	457.520.000	0	5.295.000	1			0%	0		0%		0%	0%							
						Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	19	457.520.000	0	5.295.000	1			0%	0		0%	5.295.000	0%	1,16%							
						Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						1			0%				-	#DIV/0!	#DIV/0!							
						PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan (%)	100	1.255.090.000						0%	0		0%		0%	0%		PUPR					
						Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan yang difasilitasi	10	1.255.090.000						0%			0%		0%	0%							
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (dokumen)	2	150.000.000						0%			0%		0%	0%							
						PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin pengelolaan membuka tanah yang difasilitasi (%)	80	633.280.000		17.675.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%		PUPR				
						Penerbitan Izin Membuka Tanah	Luas izin membuka tanah (ha)	0	633.280.000		17.675.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%						
						Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara	Jumlah pengendalian pemanfaatan tanah negara yang terlaksana yang difasilitasi (kali)	80	633.280.000	11	17.675.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%						
						PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase penatagunaan tanah di Kabupaten Lima Puluh Kota	100	400.510.000	20	23.665.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%		PUPR				
						Penggunaan Tanah yang Hampirannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penggunaan tanah yang difasilitasi (kapling)	8	400.510.000	2	23.665.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%						
						Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah perencanaan penggunaan tanah yang dibuat (dokumen)	5	400.510.000	21	23.665.000	0	0	0%	0	0%	0		0%		0%	0%						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN										46.635.000	0	0	0%	0	100%				0%	0	0%	0%						
						PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pemenuhan Dokumen Perencanaan dan pengendalian Lingkungan Hidup (%)	100%	1.034.791.200		44.534.550	71%	110.000.000		1.300.000	0	1.300.000		0	45.834.550				DLHPP				
						Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan dan pengendalian lingkungan hidup (dokumen)	1,00	1.034.791.200	0	44.534.550	1	110.000.000	0	1.300.000	0	1.300.000		0	45.834.550								
						Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (dokumen)	1,00	135.762.000	0	-				0	0		0	0									
						Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP yang disusun (dokumen)	1,00	597.352.800	0	-				0	0		0	0									
						Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang (dokumen)	1,00	3.000.000	0	-	1	110.000.000	1	1.300.000	1	1.300.000		1	1.300.000								
						Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJMD/KRP (dokumen)	1,00	298.676.400	1	44.534.550				0	0		1	44.534.550									
						PROSEDUR PENCEKAMAN DAN/ATAU PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air (poin)	65%	1.707.084.698	52%	4.240.766.796		176.550.000		35.196.000	0%	35.196.000		52%	4.275.962.796								
							Indeks Kualitas Udara (poin)	91,57		91,52	-																	
						Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah titik pantau pengujian kualitas lingkungan hidup (lokasi)		1.707.084.698		4.240.766.796		176.550.000		35.196.000		35.196.000			4.275.962.796								
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan, Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Titik Pantau Badan Air Kewenangan Kabupaten (titik)	22,00	540.396.648	41	1.330.157.200	1	37.030.000	0	3.000.000	0	3.000.000		41	1.333.157.200								
							Jumlah Titik Pantau Kualitas Udara (titik)	4,00	0	0	-				0	0		0	0									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8					9		10	11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (dokumen)	1,00	67.881.000	0	13.060.000	1	19.520.000	0	1.196.000	0	1.196.000		0	14.256.000							
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Parameter Pengujian Kualitas Lingkungan Terakreditasi (parameter)	26,00	1.098.807.050	28	2.897.549.596	3	120.000.000	1	31.000.000	1	31.000.000		29	2.928.549.596							
					Personil Pengelolaan Lingkungan yang berkualifikasi (orang)		14,00	0	0	-					0	0		0	0							
					Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	30,00	1.159.697.638	0	75.310.000	20	0		0												
					Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Sarana Prasarana Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (unit)	30,00	229.822.439	0	-																
					Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Isolasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2,00	266.200.000	0	-																
					Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (kawasan)	2,00	266.200.000	0	75.310.000																
					Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Luas kawasan rusak/tercemar yang terpulihkan (Ha)	12,00	397.475.199	0	-																
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas Rehabilitasi Lahan (Ha)			0	-																
					PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Perentase Kawasan kehati yang terkelola (%)	6%	24.315.474.079	0,029	5.059.177.621	5	22.223.945.520	0	0	0%	0		3%	5.059.177.621							
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Luas RTH Publik 20% terhadap luas wilayah perkotaan (%)	24315,75	24.315.474.079	0,029	5.059.177.621	5	0		0												
					Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen Rencana Pengelolaan Kehati (dokumen)	0,00	0	0	11.415.000																
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Pembangunan Taman Kehati (Ha)	0,00	1.240.000.000	0	-																
					Operasi dan Pemeliharaan Taman Kehati (Ha)		15,00	0	0	-																
					Pengelolaan Kebun Raya	Dokumen Rencana Tapak Kebun Raya (dokumen)	1,00	359.000.000	0	-																
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas pembangunan RTH publik wilayah perkotaan (m2)	1464,10	22.540.485.000	40870	5.047.762.621																
					Operasi dan Pemeliharaan RTH publik wilayah perkotaan (m2)		4991,00	0	0	-																
					Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah kelompok masyarakat pemelihara kawasan kehati yang dibina (Kelompok)	7,00	135.260.479	0	-																
					Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah pembangunan sarana dan prasarana pengelolaan kehati (unit)	45,73	40.728.600	0	-																
					PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	0,00	153.171.480	4	31.752.608	27	126.588.000	0	0	0%	0		400%	31.752.608							
					Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70,00	153.171.480	4	31.752.608	27	126.588.000		0												
					Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha/kegiatan yang mengelola limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan (usaha/kegiatan)	70,00	153.171.480	4	31.756.080																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup (%)	96%		541.523.400	200%	57.105.000	86	447.540.000	0	0	0%	0		200%	57.105.000									
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Lingkungan Usaha/ Kegiatan yang layak Lingkungan (Dokumen)	220,00		544.245.900	2	57.105.000	220	0		960.000	0	960.000		2	58.065.000									
					Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah upgrading Penilai Kelayakan Lingkungan (orang)	30,00		149.338.200	0	42.660.000					0	0		0	42.660.000									
					Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Diklat dan/atau upgrading Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (orang)	3,00		29.947.500	0	-					0	0		0	0									
					Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha/kegiatan yang mempunyai Izin Lingkungan yang dilakukan pembinaan dan Pengawasan (usaha/kegiatan)	47,00		364.960.200	10	14.445.000			0	960.000	0	960.000		10	15.405.000									
					PROGKAM PENERAKKAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),	Persentase pendampingan/pengakuan keberadaan MHA yang terfasilitasi (%)	100%		107.811.000	0	-	47%	89.100.000	0	0	0	0		0	0									
					Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA, kearifan lokal dan pengetahuan tradisional yang diberdayakan (kelompok)	400,00		107.811.000	0	-	118	89.100.000		0														
					Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Masyarakat	Jumlah kebijakan daerah tentang pengakuan dan perlindungan MHA (peraturan)	1,00		107.811.000	0	-	1	89.100.000		0														
					PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase cakupan pendidikan pelatihan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat (%)	100%		533.966.950	10%	26.510.000	67%	441.295.000	0	335.803.876	25%	335.803.876		35%	362.313.876									
					Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang dibina dan dilatih dalam rangka PPLH (kelompok)	28,00		545.585.903	10	646.279.352	28	34.051.000		36.889.000	0	36.889.000		10	683.168.352									
					Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten (sekolah)	25,00		278.312.100	10	26.510.000					0	0		10	26.510.000									
					Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah kelompok masyarakat/Jorong yang melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim melalui Proklim (Jorong)	6,00		210.431.100	0	602.935.552	1	22.006.000	0	35.949.000	0	35.949.000		0	638.884.552									
					Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup (kali)	7,00		56.842.703	0	16.833.800	2	12.045.000	0	940.000	0	940.000		0	17.773.800									
					PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase tingkat partisipasi masyarakat dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (%)	44%		267.434.200	0	-	25%	221.020.000	0	0	0	0		0	0									
					Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	7,00		267.434.200	0	-	4	221.020.000		0	0	0		0	0									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
						Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah lembaga masyarakat yang melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui program kalpataru (kelompok)	6,00	267.434.200	0	-					0	0		0	0									
						PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat dibidang lingkungan hidup yang ditindak-lanjuti (%)	100%	236.555.000	6%	12.990.000	100%	0	0	0	0			6%	14.556.000									
						Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18,00	236.555.000	6	12.990.000	14	0	1.566.000	0	1.566.000			6	14.556.000									
						Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan masyarakat masyarakat di bidang lingkungan hidup yang diselesaikan (laporan)	18,00	139.150.000	6	12.990.000		0	1.566.000	0	1.566.000			6	14.556.000									
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administratif, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Sanksi Administrasi, Sengketa dan/atau penyidikan lingkungan hidup (buah)	14,00	97.405.000	0	-					0	0		0	0									
						PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Penanganan Sampah (%)	70%	4.452.637.243	12%	1.459.905.597	12%	30	1.664.205.200	0	250.000.000			12	1.709.936.000									
						Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Sampah (%)	70,00	4.565.319.703	12,25	1.459.936.000	28		250.000.000	0%	250.000.000			12,25	1.709.936.000									
						Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Kebijakan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah (peraturan)	1,00	167.609.200	0	-					0	0		0	0									
						Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kapasitas pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah (ton/tahun)	1346,04	540.944.826	-	1	8.710.000					0	0		0	0								
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah wilayah perkotaan yang tertangani (ton/hari)	30,26	2.048.343.116	72	1.426.516.000	10000	2	250.000.000	2	250.000.000			74	1.676.516.000									
						Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah nagari yang melakukan pengelolaan sampah secara mandiri (nagari)	24,00	295.966.000	5	16.350.000					0	0		5	16.350.000									
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Tersedianya fasilitas utama/alat angkut pengelolaan sampah (unit)	1,00	1.287.091.641	1	17.070.000					0	0		1	17.070.000									
							Tersedianya fasilitas pendukung/tempat sampah sementara pengelolaan sampah (unit)	20,00	0	0	-					0	0		0	0									
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	Persentase pengurangan sampah (%)	0,00	112.682.460	0	-					0	0		0	0									
						Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah kelompok masyarakat yang mengelola sampah secara mandiri melalui Bank Sampah (kelompok)	41,00	112.682.460	0	-					0	0		0	0									
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									33.350.449.250		10.932.742.172		25.295.944.120	10	2.035.205.076	8%	620.999.876		437%	6.348.212.672									
						Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	51.933.646.537	95,70%	2.601.223.933	90%		3.567.854.898	25%	328.629.770	25,00%	328.629.770		121%	2.929.853.703		5,64	CAPIL					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													I											
							5		6		7		8					9		10	11		12	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.				
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	85%	2.377.724.739	99,27%	-	100%	3.045.000	-	-					-	-				
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja	12 dokumen	393.874.461	2 Dokumen	-		3045000,	-	-					-	-				
					Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen RKA yang tersusun	6 dokumen	819.918.724	1 Dokumen	-		-	-	-					-	-				
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran RKA yang tersusun	12 dokumen	163.747.431	2 Dokumen	-		-	-	-					-	-				
					Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Jumlah dokumen DPA yang tersusun	6 Dokumen	167.488.779	1 Dokumen	-		-	-	-					-	-				
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang tersusun, Jumlah dokumen Pergeseran DPA yang tersusun	12 dokumen	126.158.878	2 Dokumen	-		-	-	-					-	-				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKJIP, LKPPD yang tersusun, Laporan Realisasi fisik dan Keuangan OPD	84 dokumen	322.220.735		-		-	-	-					-	-				
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			19 Dokumen															
					Evaluasi kinerja perangkat daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan terkait pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil	13 Kecamatan	384.315.731				-	-	-					-	-				
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	30.864.650.085	95,55%	2.223.748.083	100,00%	3.169.850.508	16%	311.991.437		311.991.437			2.535.739.520		8,22			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tambahan penghasilan PNS sebanyak 31 orang (14 bulan), Honor Penanggungjawaban Pengelola Keuangan (12 bulan)	84 bulan	30.558.269.240			35 orang/14 bulan	3.799.181.499	8,21%	311.991.437	30 orang /8 bulan	311991437,0			60 orang /8 bulan	2.535.739.520		8,30		
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/bulan	2.223.748.083														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	6	131.306.077	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-					-	-				
					Pengelolaan dan penyajian bahan tanggapan pemeriksaan	Tanggapan pemeriksaan	6	87.537.384	1 laporan	-	1 laporan	-	-	-					-	-				
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan semesteran	12	87.537.384		-		-	-	-							-			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	64.838.941	99,57%			-	-	-							-			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tertatanya dan terpeliharanya barang milik daerah	6	64.838.941	1 laporan	-		-	-	-					-	-				
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya disiplin aparatur dlm pelaksanaan tugas	100	687.682.799		-	-	-	-	-					-	-				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pakaian dinas yang dibutuhkan	518	259.000.000		-	-	-	-	-					-	-				
					Pendidikan dan pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terkirimnya peserta diklat administrasi kependudukan (Admin, Bidang Capil, Bidang Dalduk, Bidang PIAK, Bidang Pemanfaatan Data)	17	154.073.386		-	-	-	-	-					-	-				
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan administrasi kependudukan	780	141.110.264		-	-	-	-	-					-	-				
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan administrasi kependudukan	5	133.499.149	-	-	-	-	-	-					-	-				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	100	10.587.094.458	97,03%	101.732.850	100%	133.953.390	12%	-	-				101.732.850		0,96			
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	72	8510107194,0							-			7 paket	-	-				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														I											
								5		6		7		8					9		10	11		12	
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.				
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			7 paket	997000,0	9 paket	2.020.000												
						Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop perencanaan (1 unit)	Laptop perencanaan (1 unit)	175074769,0					5 paket	-			5 paket	-		-				
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5 paket	40030850,0	7 paket	266.487.000												
						Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan		-		-	-		-	-	-		2 paket	-		#DIV/0!				
							Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan					3 paket													
						Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	Amplop dinas (2 pack), Fotocopy (5000 lembar), Kwitansi (65 buku), Lembar Disposisi (12 buku), Jilid (10 buah), Map OPD (300 lembar), Spanduk (12 meter)	55.976.656	-	-	-	-	-	-	-			-		-				
							Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan					12 Paket	5.000.000												
						Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Koran (1200 Eksemplar)	1200	40.967.496	1200 Eksemplar	-			-	-	-			-	-					
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Makan siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack / minum (300 porsi)	Makan siang (100 porsi), Sarapan (37 porsi), Snack / minum (300 porsi)	52.434.893							-			-		-				
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	1.365.000	12 Laporan	4.440.000												
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah OH yang mengikuti rapat koordinasi dan Konsultasi, Fasilitasi konsumsi rapat	20	1.752.533.450										-		-				
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			36 Laporan	59.340.000	20 Laporan	52.542.000												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diadakan	100	3.458.252.084							-			-	-	-				
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Kendaraan dinas roda 4, Kendaraan dinas roda 2	4	1.679.648.250	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-				
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Komputer, Laptop perencanaan	3	1.778.603.834						-	-			-	-	-				
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	2.191.843.000	98,78%	158.617.000	100%	164.406.000	23%	15.164.533	15.164.533		173.781.533		7,93					
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Buku cek , materai 10.000	Cek (1 buku) , materai 10.000 (200 lembar)	11.467.397	Cek (3 buku), materai 10.000 100 lembar)						-			-	-					
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			3 Laporan	1.500.000	3 Laporan	1.500.000												
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening Telepon, Listrik, Air dan Internet dalam satu tahun	12	597.180.036	12 bulan											-				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			12 laporan	64.217.000	12 laporan	72.206.000	12,63%	9.164.533										
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pembayaran jasa kantor (THL 4 orang, PTT 2 orang, tenaga kebersihan 2 orang, tenaga supir 1 orang)	12	1.583.195.567	12 bulan											-				
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang yang Disediakan			12 laporan	92.900.000	12 laporan	72.000.000	8,33%	6.000.000										
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	1.701.560.431	89,75%	117.126.000	100%	94.951.000	1,55	1.473.800	1.473.800		118.599.800		6,97					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan roda 4 (5 unit) & roda 2 (15 unit), BBM / oli, pajak	12	1.344.145.291	15 unit kendaraan roda 2 dan 4 unit kendaraan roda 4					-					-	-								
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya			18 Unit	109.526.000	18 Unit	134.250.000	1,10%	1.473.800														
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/ berkala komputer/ laptop (9 unit), AC, printer (6 unit), running text, mesin antrian	1	86.049.248,00			---																	
							Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			20 Unit	7.600.000	20 Unit	7.080.000			20 unit													
						Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung tidak bertingkat 260 M2/tahun	1	271.365.892	-	-	-	-		-		-			-	-	-							
						Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	4.169.490.000	90%	170.300.000	90%	238.611.000	14,46%	18.000.000	14,46%	18.000.000		104%	188.300.000	4,52	4,52	CAPIL						
						Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	2.084.745.000	90%	170.300.000	90%	238.611.000	14,46%	18.000.000	99,66%	18.000.000			188.300.000		9,03							
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Persentase Penerbitan Dokumen KK, KTP dan KIA	96	1.042.372.500											-		1,73							
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan , Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	96	-	1500 Dokumen	170.300.000	1750 dokumen	186.000.350	9,68%	18.000.000	0	18.000.000		100%	18.000.000									
						Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah KK yang diterbitkan	96	1.042.372.500								-												
							2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	96									-												
							3. Jumlah Penerbitan KIA	65																					
							4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	4200									-												
							3. Jumlah perekaman KTP-el									-	-		0		-								
						Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penataan Pendaftaran penduduk	96	1.042.372.500	-	-	-	-		-	-	-			-	-	-							
						Pengadaan Blangko Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Pengadaan Kerta A4 80 gr untuk cetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil selain KTP-el dan KIA	4200	1.042.372.500	-	-	-	-		-	-				-	-	-							
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		1.042.372.500	-	-	-	-		-	0			-	-	-	-							
						Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	1. Jumlah KK yang diterbitkan	98	1.042.372.500	-	-	-	-		-		-			-	-	-							
							2. Jumlah KTP-el yang diterbitkan	98									-			-	-	-							
							3. Jumlah Penerbitan KIA	65									-			-	-	-							
							4. Jumlah SKPWNI yang diterbitkan	4200									-			-	-	-							
							5. Jumlah perekaman KTP-el	96									-			-	-	-							
						Program Pencatatan Sipil	Terlaksananya Program Pencatatan Sipil	96%	1.781.790.000	92,00%	601.500.000	92%	217.136.750	25,00%	10.000.000	25,00%	10.000.000		117%	611.500.000		34,32	CAPIL						
						Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase Penerbitan Akta kelahiran			92,00%	101.500.000	92%	92.518.000	19,95%	10.000.000	91,46%	10.000.000			111.500.000									
						Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	1. Jumlah penerbitan akta kelahiran	7500 dokumen					0			-	-		7500 dokumen	-									
							2.Jumlah penerbitan akta kematian	350 dokumen								-	-		200 dokumen										
							2.Jumlah penerbitan akta perkawinan									-				-									
							Jumlah penerbitan akta perkawinan dan perceraian	8 dokumen									-		8 dokumen			-							
							Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting			7500 dokumen	101.500.000	2550 Dokumen	74.006.800	13%	10.000.000	0	10.000.000		0	10.000.000									
						Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			1.781.790.000				24.618.750				-			-	-	-							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah peserta tsbat nikah yang difasilitasi untuk penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran yang semula statusnya anak seorang ibu) yang berubah akibat terbitnya buku nikah (tsbat nikah)	360	365.274.336	-	-					-				-	-	-							
						Persentase target nasional Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	95	492.166.664	-	-	-				-				-	-	-							
						Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam					6 laporan	15.000.000																
					Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Kualitas/ jumlah Pelayanan langsung ke jorong, Nagari, Kecamatan (sistem jemput bola)	175	457.945.000						-	-				-	-	-							
					Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan terkait Pencatatan Sipil	1. Persentase target nasional Kepemilikan akta kelahiran usia 0-18 tahun	7500	466.404.000							-	-			-	-	-							
						2. Jumlah Akta Perkawinan yang diterbitkan	8								-	-			-	-	-							
						3. Jumlah Akta Kematian yang diterbitkan	350								-	-			-	-	-							
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			3.847.880.000	92%	500.000.000	93%	100.000.000			77,63%	-			500.000.000	12,99	-							
					Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil			4 laporan	500.000.000	2 laporan	400.000.000			77,63%	-												
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	98	2.464.530.000	90%	250.190.000	95%	340.445.250	0%		0,00%	-			90%	250.190.000	10,15	CAPIL						
					Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Terlaksananya Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		856.140.000	90%	245.090.000	95%	340.445.250	0,62%		99,07%	-			245.090.000		28,63							
					Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1. Terlaksananya pengelolaan database kependudukan	100	527.210.000								-			-	-	-							
						2. Tersedianya buku data agregat per semester	15		15 buku						99,07%	-		15 buku	-	-	-							
						3. Terlaksananya koordinasi dan konsultasi, workshop, pelatihan dan rapat kerja pengelolaan data kependudukan ke Nagari, Kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	100		1 paket							-		1 paket	-	-	-							
						4. Tersedianya laporan Kependudukan	2		12 bulan							-		12 bulan	-	-	-							
						Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan			2 Buku Agregat	245.090.000	50 Dokumen	137467000,0																
					Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS) Pemanfaatan Data Kependudukan dengan Lembaga/OPD Pengguna	22	328.930.000								-			-	-	-							
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1.286.690.000	5.100.000			-				-			5.100.000		-							
					Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Terfasilitasinya sistem, jaringan dan peralatan melalui SIAK		479.810.000								-			-	-	-							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														I										
								5		6		7		8					9		10	11		12
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
							2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	90		0	-	0	-			-				-		-		
							3. Tersedianya sarana dan prasarana PIAK	90								-				-		-		
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Tersedianya Pemanfaatan Data Kependudukan olen instansi/Lembaga Pengguna	90	354.240.000			-				-				-		-		
						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Meningkatnya pemahaman terkait PIAK	22	452.640.000			-	-			-						-		
							2. Terbangunnya pemahaman masyarakat tentang administrasi kependudukan	79								-				-		-		
							3. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat	79								-				-		-		
							Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			1 laporan	5.100.000													
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	79	321.700.000			-				-				-		-		
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Terkontrolnya sistem, jaringan dan peralatan perekaman		321.700.000			-	0				-				-		-	
							2. Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi ke Nagari, kecamatan, Kabupaten/ Kota, Propinsi dan Pusat				-						-				-		-	
						Program Pengelolaan Profil Kependudukan		90	290.910.000	99,76%	44.905.250	100%	42.411.750	12,00%	4.000.000	12,00%	4.000.000			12%	48.905.250		16,81	CAPIL
						Penyusunan Profil Kependudukan	Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan	90	290.910.000	100 buku	44.905.250	100%	42.411.750	12,86%	4.000.000	99,22%	4.000.000				48.905.250		16,81	
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Tersedianya Buku Profil Perkembangan Kependudukan		290.910.000								-			44.905.250		15,44		
							Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun			8 Dokumen	44.905.250	8 Dokumen	29000000,	,138	4000000,	3 Dokumen	4000000,0							
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG CAPIL									60.640.366.537		3.668.119.183	0	4.406.459.648	15%	360.629.770	15%	356.629.770			89%	3.979.843.703	90%	1429%	

						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	95%	31.126.153.403	95	3.819.614.953	95	4.667.108.850		1.011.196.745		1.011.196.745					4.830.811.698			P2KBP3A
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergisitas perencanaan dan evaluasi perangkat daerah	95	127.569.904	95	5.275.000		5.389.000		0							5.275.000			
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah		45.801.697	2	2.498.000	2	0		0							2.498.000			
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		7.540.643		0		0		0							0			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		7.434.066		0		0		0					0									
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		66.793.498	24	2.777.000	24	0		0					2.777.000									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	95	23.650.316.999	95	3.628.491.416	95	4.353.768.850		1.011.196.745					3.628.491.416									
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan tunjangan ASN		23.610.752.228	32	3.626.690.416	32	4.353.768.850	34	1.011.196.745	34	1.011.196.745			4.637.887.161									
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		39.564.771	2	1.801.000				0					1.801.000									
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	95	1.611.626.305	95	53.635.049	95	68.796.000							53.635.049									
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan		15.262.750	1	130.000	1	1.800.000							130.000									
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		209.030.374	2	11.292.000	2	17.946.000							11.292.000									
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		168.544.087	2	7.549.000	1	7.100.000							7.549.000									
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		61.875.000	1	540.000	120	1.800.000							540.000									
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				12	5.245.000	12	4.995.000							5.245.000									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		1.156.914.094	12	27.709.049	12	35.155.000							27.709.049									
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	50	1.098.213.365			50	16.700.000																
					Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang Disediakan		626.541.685			10	9.000.000																
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		471.671.680			1	7.700.000																
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	95	2.364.768.860	95	59.460.988	95	120.960.000		8.920.422					59.460.988									
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		24.540.108	12	1.000.000	12	1.000.000							1.000.000									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang Disediakan		344.578.988	12	18.822.988	12	22.760.000							18.822.988									
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		1.995.649.764	12	39.638.000	12	97.200.000							39.638.000									
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	95	2.273.657.970	95	72.752.500	95	106.884.000							72.752.500									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya		1.773.106.507	16	67.278.500	10	96.100.000	2		2%				67.278.500									
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara		105.295.263	10	5.474.000	10	7.880.000							5.474.000									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi		395.256.200			1	2.904.000								0								
						PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	95	616.005.100	93	132.740.879	95	108.600.000							103.929.800				P2KBP3A					
						Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Persentase kebijakan provinsi yang ditindaklanjuti dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk	100	262.050.000	100	4.950.000																		
						Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota		232.050.000											0									
						Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal		30.000.000																				
						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana				13	4.950.000																		
						Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemetaan perkiraan pengendalian penduduk	80	353.955.100	60	127.790.879	70	108.600.000							103.929.800									
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah dokumen Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		43.595.000		0		0							0									
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga		280.360.100	13	48.400.000	26	48.600.000		0					48.400.000									
						Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB		30.000.000	12	55.529.800	156	60.000.000		0					55.529.800									
						Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangsa Kencana				12	23.861.079																		
						PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	75	51.954.230.934	69,67	2.606.732.990	74,80	3.262.442.000							2.585.527.490				P2KBP3A					
						Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Persentase promosi KKBPk terhadap keluarga dan kampung KB	65	26.778.523.136	63	834.516.215	64	1.502.800.000							834.516.215									
						Advokasi Program KKBPk kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholder dan Mitra Kerja	12	445.112.012	30	36.640.000	40	200.000.000							36.640.000									
						Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPk sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal		4.761.393.951		0		0		0					0									
						Promosi dan KIE Program KKBPk Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang		305.255.000	3	84.165.000	60	125.000.000		0					84.165.000									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPd Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPd Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPd (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPd s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPd Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1										
								5		6		7		8						9			10	
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.			
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)		1.002.800.000	83	113.002.500	130	260.000.000		0				113.002.500					
						Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)		17.665.879.417	13	589.218.715	130	917.800.000		0				589.218.715					
						Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK		2.598.082.756	13	11.490.000		118.807.000		0				11.490.000					
						Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Cakupan PKB yang didayagunakan	37,97	8.631.525.710	37,97	612.799.500	37,97	601.200.000		0				591.594.000					
						Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB								0				0					
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		8.631.525.710	360	591.594.000	3	601.200.000						591.594.000					
						Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan PengembanganProgram Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk PetugasKeluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)					13	21.205.500					0						
						Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang	28.2	7.244.175.906		714.355.400	27,5	833.642.000						714.355.400					
						Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		443.540.211	37	67.125.400	26	23.400.000		2.550.000				67.125.400					
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)		6.304.135.695		627.478.000	1743	699.242.000		0				627.478.000					
						Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB						1	111.000.000											
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya		496.500.000	13	19.752.000								19.752.000					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													1											
							5		6		7		8					9		10	11		12	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase organisasi kemasyarakatan yang berperan di kampung KB	65	9.300.006.182		445.061.875	60	324.800.000							445.061.875					
					Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB		520.638.182	2	28.289.375	0	0							28.289.375					
					Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB		8.779.368.000	27	416.772.500	58	324.800.000							416.772.500					
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Total Fertility Rate (TFR)	2,16	8.696.652.000		1.812.514.400	2,18	1.783.600.000							105.210.000			P2KBP3A		
					Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase keluarga aktif mengikuti kegiatan tribina	85	8.696.652.000	75	405.514.400	83	160.000.000							105.210.000					
					Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesehteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)		8.696.652.000																
					Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan usia serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)				6	65.404.400	0													
					Penumbuhan dan Peningkatan KesadaranKeluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas			150	105.210.000	60	30.000.000							105.210.000					
					Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-Rdan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia			25	234.900.000	25	130.000.000												
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Oragnisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				80	1.407.000.000	100	1.623.600.000												
					Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja CalonPengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita			10	591.900.000	130	738.000.000							591.900.000					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pascasalin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan			130	815.100.000	130	885.600.000							815.100.000									
TOTALURUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELUARGA BERENCANA								92.393.041.437		8.371.603.222		9.821.750.850		1.011.196.745		1.011.196.745				7.625.478.988									
							Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.42	12.198.080.000	2.38	11.367.221.825	2.68	509.308.342	-	103.200.000	0%	103.200.000			-	11.470.421.825	#VALUE!	94						
							Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.50		0.33		0.51							-		#VALUE!								
							Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.42	12.198.080.000	2.38	11.367.221.825	2.68	509.308.342	-	103.200.000	-	103.200.000			#VALUE!	11.470.421.825	#VALUE!	94						
							Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.50		0.33		0.51				-					#VALUE!								
						Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan	2.42	5.957.666.816	2.38	8.804.460.514	2.68	378.767.692	-	100.000.000	0%	100.000.000		-	8.904.460.514	#VALUE!	149	DINAS PERHUBUNGAN						
						Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0.50	6.240.413.184	0.33	2.562.761.311	0.51	130.540.650		3.200.000	0%	3.200.000		-	2.565.961.311	#VALUE!	41							
						Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0	100%	34.800.000	0	0	-	0	-	0		100%	34.800.000									
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	-	0	1	34.800.000	-	0		0	-	0		1	34.800.000									
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																						
						Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																						
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																						
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota																						
						Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota																						
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase sarana keselamatan lalu lintas jalan di jalan yang berfungsi dengan baik		3.940.661.816	60%	8.246.382.374	60%	166.254.592		0	-	0		60%	8.246.382.374									
						Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun									-	0		-	0									
						Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2.145	2.672.021.816	133	1.959.878.637	11	126.254.592		0		0		133	1.959.878.637		73							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1	40.000.000	1	5.858.535.517	0	0		0		0		1	5.858.535.517		14646							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	600	1.228.640.000	305	427.968.220	250	40.000.000		0		0		305	427.968.220		35							
						Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tercapainya dan tertib pengelolaan terminal		810.000.000	100%	333.566.278	100%	0	-	0	-	0		100%	333.566.278		41							
						Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	-	0							-	0		-	0									
						Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi																						
						Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)																						
						Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital																						
						Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	2	275.000.000	1	76.994.700	0	0		0	-	0		1	76.994.700		28							
						Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penunngang Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	10	100.000.000			0				-	0		-	0	0	0							
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	2	435.000.000	2	256.571.578	0	0	-	0	-	0		2	256.571.578	100	59							
						Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		78.500.000	100%	222.981.156	100%	21.000.000	-	0	0	0		100%	222.981.156		284							
						Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10	43.500.000	3	108.568.660	1	21.000.000		0	-	0		3	108.568.660		250							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	5	35.000.000	3	114.412.496	-	0	0	-	0		3	114.412.496	60	327								
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase angkutan umum dan barang yang laik jalan (%)		1.006.680.000	99,36%	481.188.340	98%	167.514.100	-	100.000.000	-	100.000.000			581.188.340		58							
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			-	0			100.000.000	-	100.000.000		-	100.000.000										
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	243.480.000			2	39.748.000		-	0		-	0	0	0								
					Registasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar						0		-	0		-	0										
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.500	319.200.000	2.550	394.508.406	1	89.497.100		-	0		2.550	394.508.406	24	124								
					Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1	232.000.000				0		-	0		-	0	0	0								
					Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji						0		-	0		-	0										
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	9	61.000.000	9	53.762.500	9	38.269.000		-	0		9	53.762.500	100	88								
					Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	80.000.000	2	32.917.434	-	0		-	0		2	32.917.434	67	41								
					Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	3	25.000.000						-	0		-	0	0	0								
					Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	4	46.000.000						-	0		-	0	0	0								
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/Kota		4.669.524.184	100%	1.894.214.609	100%	100.543.000		3.200.000	-	3.200.000		100%	1.897.414.609		41							
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	60	367.937.900	14	153.395.649	12	37.200.000	-		-	0		14	153.395.649	23	42							
					Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			-	0	-	0		-	0		-	0										
					Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan																						
					Pembangunan Rule Aman Sekolah (RASS)	Jumlah kawasan pembangunan Rule Aman Sekolah yang terbangun																						
					Monitoring dan evaluasi Rule Aman Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rule Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi																						
					Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi																						
					Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya																						
					Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan																						
					Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)																						
					Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota								-	0		-	0										
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	16	336.138.000	-	0	-	0		-	0		-	0	0	0								
					Pengadaan dan Pemasangan Perengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan								-	0		-	0										
					Penataan Manaj'em'en dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/KotaProvinsi	12	3.965.448.284	14	1.740.818.960	1	63.343.000		3.200.000	-	3.200.000		14	1.744.018.960	117	44							
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota		364.793.000	100%	49.142.868	100%	0	-	0	-	0		100%	49.142.868		13							
					Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12	147.438.000	3	48.242.868	-	0		0	-	0		3	48.242.868	25	33							
					Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	8	74.170.000						-	0		-	0	0	0								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalain	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalain yang terawasi	12	143.185.000	1	900.000	-	0			-	0			1	900.000	8	1						
						Peningkatan Kompetensi Penilai Andalain	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalain yang ditetapkan																						
						Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan	Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana		697.725.000	100%	12.740.800	100%	44.999.000	-	0	-	0			100%	12.740.800		2						
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	2	80.000.000							-	0			-	0	0	0						
						Pelaksanaan inspeksi, audit dan pemantauan pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor kabupaten/kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12	183.700.000			1	18.134.000			-	0			-	0	0	0						
						Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	10	195.000.000							-	0			-	0	0	0						
						Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	12	99.825.000							-	0			-	0	0	0						
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektur LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16	139.200.000	2	12.740.000	-	0			-	0			2	12.740.000	13	9						
						Pelaksanaan Pengawas Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Uji Petik Terhadap Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor					1	26.865.000																
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbitnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota		30.000.000	100%	5.736.400	100%	0	-	0	-	0			100%	5.736.400		19						
						Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota									-	0			-	0								
						Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	15	30.000.000	15	5.736.400	-	0		0	-	0			15	5.736.400	100	19						
						Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/kota 1 (satu)	100%	116.596.000	-	0	-	0	-	0	-	0			-	0	0	0						
						Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Kabupaten/Kota	3	45.000.000			-	0		0	-	0			-	0	0	0						
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	71.596.000						0	-	0			-	0	0	0						
						Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	-	0	-	0	-	0	-	0			-	0								
						Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0	-	0			-	0								
						Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota								0	-	0			-	0								
						Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									-	0			-	0								
						Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Persentase terlaksana penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan dalam satu daerah kabupaten/kota	100%	312.600.000	100%	64.149.800	100%	0	-	0	-	0			0%	64.149.800	0	21						
						Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	7	200.000.000	2	64.149.800	-	0		0	-	0			2	64.149.800	29	32						
						Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	12	112.600.000						0	-	0			-	0	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	-	0	-	0	-	0														
					Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
					Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
					Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota																						
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Persentase terbitnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	100%	171.000.000	100%	22.320.000	100%	8.997.650	-	0	-	0		100%	22.320.000	100	13							
					Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek kewenangan Kabupaten / Kota	12	21.000.000	3	15.610.000	1	8.997.650		0	-	0		3	15.610.000	25	74							
					Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12	150.000.000	15	6.710.000		0		0	-	0		15	6.710.000	125	4							
					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kelancaran Lalu Lintas	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0									
					Facilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pensetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.									-	0		-	0									
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota									-	0		-	0									
					Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya penetapan tarif Kelas Ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek serta angkutan perkotaan dan pedesaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0									
					Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	0			-	0		0	-	0		-	0									
					Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
					Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																						
					1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	79,61	20.646.861.403		15.863.715.606	79,57	12.293.690.275	0	2.692.998.299		7.107.153.106			-	22.970.868.712	0	111							
					2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88		N/A		85					7.107.153.106			-		0								
					Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.646.861.403	100%	15.863.715.606	100%	12.293.690.275	0	2.692.998.299		7.107.153.106				22.970.868.712	0	111							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7							8		9			10		11		12	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13					
					Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	20.646.861.403	100%	15.963.715.606	100%	12.293.690.275	22%	2.692.998.299	#DIV/0!	2.692.998.299					18.556.713.905	0	90	DINAS PERHUBUNGAN				
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah		397.576.355	85%	16.777.900	85%	0	-	0	85%	0		170%		16.777.900	4							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	80.525.500							-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	51.243.500							-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	42.166.080							-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	86.381.900							-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	29.282.000							-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	66.982.575	5	8.631.500	0	0		0	-	0		5	8.631.500	100	13							
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	40.994.800	4	8.146.400	0	0		0	-	0		4	8.146.400	100	20							
					Administrasi Keuangan	Persentase terbit administrasi keuangan		6.098.482.375	100%	6.845.732.827	100%	4.751.313.075		896.401.449	100%	896.401.449		200%		7.742.134.276		127						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	46	5.876.520.422	49	6.838.508.627	49	4.734.331.875	49	896.401.449		896.401.449			7.734.910.076	0	132							
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								0		0		-		0								
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	137.429.211	12	3.127.000	12	16.981.200		0		0			3.127.000	0	2							
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD								0		0		-		0								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	29.282.000	1	4.097.200	0	0		0		0			4.097.200	0	14							
					Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan								0		0		-		0								
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	16	27.817.900						0		0		-		0	0	0						
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	27.432.842						0		0		-		0	0	0						
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi barang milik daerah	1	263.977.230	-	0		0	-	0	-	0		-		0	0	0						
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	51.653.448						0	-	0		-		0	0	0						
					Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1	65.152.450						0	-	0		-		0	0	0						
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		0						0	-	0		-		0								
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		0						0	-	0		-		0								
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	43.483.770						0	-	0		-		0	0	0						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2	103.687.562						0	-	0		-		0	0	0						
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD		0						0	-	0		-		0								
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase terbit administrasi pendapatan daerah		119.416.681		0	-	0	-	0	-	0		-		0		0						
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4	27.974.559						0	-	0		-		0	0	0						
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	4	2.287.363						0	-	0		-		0	0	0						
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah		0						0	-	0		-		0								
					Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	4	1.133.945						0	-	0		-		0	0	0						
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12	1.497.921						0	-	0		-		0	0	0						
					Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah		0						0	-	0		-		0								
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12	86.522.893						0	-	0		-		0	0	0						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome 1) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4									10		11											
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terlibat administrasi kepegawaian perangkat daerah		1.400.181.750	-	0	-	0	-	0	-	0		-	0		0							
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai								-	0		-	0										
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	753.931.750						-	0		-	0	0	0								
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian								-	0		-	0										
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								-	0		-	0										
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai								-	0		-	0										
					Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5	2.250.000						-	0		-	0	0	0								
					Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas								-	0		-	0										
					Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan								-	0		-	0										
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	14	644.000.000						-	0		-	0	0	0								
					Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan								-	0		-	0										
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan								-	0		-	0										
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terlibat administrasi umum perangkat daerah		600.314.528	100%	690.507.897	100%	237.248.200	19.741.950	100%	19.741.950			200%	710.249.847		118							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	4.977.940	2	3.897.000	4	7.000.000		0		0	2	3.897.000	200	78								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	14.641.000	2	23.250.000	4	13.099.600	-	0		0	2	23.250.000	200	159								
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0		0			0		-	0										
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	133.811.420	5	123.669.259	4	47.550.000		0		0	5	123.669.259	500	92								
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	92.825.404	13	78.293.454	12	34.831.600	3	3.060.250		3.060.250	13	81.353.704	1300	88								
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5	8.900.117	5	3.120.000		0		0		0	5	3.120.000	100	35								
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			-	0					0		-	0										
					Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	120.788.250	24	71.202.500	12	30.000.000	-	0		0	24	71.202.500	200	59								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	224.370.397	24	387.075.684	12	104.767.000	3	16.681.700		16.681.700	24	403.757.384	40	180								
					Penatausahaan Asip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Asrip Dinamis pada SKPD									0		-	0										
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD									0		-	0										
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan		787.500.000	3	31.556.757	-	0	-	0	-	0		3	31.556.757		4							
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	450.000.000						-	0		-	0	0	0								
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	24	149.500.000						-	0		-	0	0	0								
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			3	31.556.757	-	0	-	0	-	0	3	31.556.757										
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan								-	0		-	0										
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	21	188.000.000						-	0		-	0	0	0								
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		10.201.834.159	100%	7.960.204.050	100%	7.144.230.000	1.765.854.900	100%	1.765.854.900			200%	9.726.058.950		95							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6	7.320.500	2	5.150.000	4	2.000.000	1	500.000		500.000		2	5.650.000	33	77							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	9.663.060.000	24	6.478.834.269	12	6.402.600.000	3	1.563.354.900		1.563.354.900		24	8.042.189.169	40	83							
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	27.569.003	4	15.631.000	12	7.630.000	-	0		0	4	15.631.000	67	57								
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	503.884.656	12	1.460.588.781	12	732.000.000	2	202.000.000		202.000.000		12	1.662.588.781	20	330							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													I											
							5		6		7		K	Rp.				K	Rp.	9			10	
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang kondisioni baik		777.578.325	100%	318.936.175	100%	160.899.000		11.000.000	100%	11.000.000			200%	329.936.175		42		
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya								-	0				-	0				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11	297.578.325	14	314.936.175	19	140.899.000	1	11.000.000		11.000.000		14	325.936.175	127	110			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya									0				-	0				
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya									0				-	0				
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara									0				-	0				
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara									0				-	0				
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara									0				-	0				
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara									0				-	0				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	380.000.000							0				-	0	0	0		
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	100.000.000	1	4.000.000	3	20.000.000		0		0		1	4.000.000	50	4			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi									0				-	0				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi									-	0			-	0				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN								32.844.941.403		27.230.937.431		12.802.998.617	7%	2.796.198.299	#DIV/0!	2.796.198.299				30.027.135.730				

					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMINFO																				
2	16	01			Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah peningkatan penunjang urusan pemerintahan daerah	80%	32.972.044.563	60%	17.968.225.761	45%	5.335.583.364	26%	1.379.324.430	26%	1.379.324.430			86%	19.347.550.191					Diskominfo
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.		32.972.044.563																	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah																			
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Keuangan	72 bulan	25.143.881.973	48 Bulan	15.724.114.239	12 Bulan	4.877.647.145	3 Bulan	1.341.462.234	3 Bulan	1.341.462.234			51 Bulan	17.065.576.473	33,3	67,97			Diskominfo
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	25.143.881.973	42 OB	15.724.114.239	42 OB	4.877.647.145	42 OB	1.341.462.234	42 OB	1.341.462.234			42 OB	17.065.576.473	33,33	67,97			Diskominfo
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD																			
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan Administrasi Umum	72 Bulan	2.594.653.648	48 Bulan	708.899.415	12 Bulan	117.892.282	3 Bulan	14.165.604	3 Bulan	14.165.604			51 Bulan	723.065.019	174	174			Diskominfo
2	16	01	2.06	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	72 bulan	38.492.278	2 Paket	17.166.000	1 Paket	1.300.000													
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan												2 Paket	17.166.000	45	45			Diskominfo	
2	16	01	2.06	000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	72 Bulan	560.332.285	13 Paket	156.184.730	12 Paket	44.445.704						13 Paket	156.184.730	28	28			Diskominfo	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	72 Bulan	465.791.688	10 Paket	74.136.400	12 Paket	8.005.078						10 Paket	74.136.400	16	16			Diskominfo	
2	16	01	2.06	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan fasilitasi kunjungan tamu	72 Bulan	39.413.830	36 Laporan	21.813.000	12 Laporan	2.550.000						36 Laporan	21.813.000	55	55			Diskominfo	
2	16	01	2.06	0001	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 Bulan	1.490.623.567	24 Laporan	439.599.285	12 Laporan	61.591.500	3 Laporan	14.165.604	3 Laporan	14.165.604			36 Laporan	453.764.889	30	30			Diskominfo
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	16	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72 Bulan	4.108.169.337	48 Bulan	1.079.387.911	12 Bulan	274.464.953	3 Bulan	20.196.592	3 Bulan	20.196.592		51 Bulan	1.099.584.503	21	27	Diskominfo						
	2	16	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72 Bulan	10.068.870	48 Laporan	5.063.900	12 Laporan	1.575.000	-	-	-	-	48 Laporan	5.063.900	50	50	Diskominfo						
	2	16	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	72 Bulan	1.587.641.069	48 Laporan	414.370.961	12 Laporan	132.866.433	3 Laporan	20.196.592	3 Laporan	20.196.592		51 Laporan	434.567.553	27	27	Diskominfo					
	2	16	01	2.08	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72 Bulan	2.510.459.398	48 Laporan	659.953.050	12 Laporan	140.023.520	-	-	-	-	48 Laporan	659.953.050	26	26	Diskominfo						
	2	16	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan pemeliharaan Barang Milik Daerah agar dalam kondisi Baik	17 Jenis Peralatan	1.125.339.605	39 Jenis Peralatan	455.824.196	14 Jenis Peralatan	65.578.984	4 Jenis Peralatan	3.500.000	4 Jenis Peralatan	3.500.000		#VALUE! Jenis Peralatan	459.324.196	76	66	Diskominfo						
	2	16	01	2.09	000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipeliharadan dibayarkan pajak dan perizinannya.	9 Unit	961.845.830	5 Unit	419.604.889	5 Unit	40.368.984	5 Unit	3.500.000	5 Unit	3.500.000		5 Unit	423.104.889	44	44	Diskominfo					
	2	16	01	2.09	000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Jenis Peralatan	163.493.775	19 Unit	36.219.307	5 Unit	25.210.000	-	-	-	-	19 Unit	36.219.307	22	22	Diskominfo						
	2	16	02		Program Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase peningkatan Desiminasi Informasi dan Komunikasi Piblik.	85%	10.526.130.500	56%	2.182.598.435	75%	47.916.000			89.994.000	4	89.994.000	60	2.272.592.435	67	22	Diskominfo						
	2	16	02	2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	85%	10.526.130.500	56%	2.182.598.435	75%	47.916.000			89.994.000	4	89.994.000	60	2.272.592.435	67	22	Diskominfo						
	2	16	02	2.01	000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	72 Bulan	6.010.356.000	48 Dokumen	499.513.500	12 Dok	-					48 Dok	499.513.500	33	8	Diskominfo						
	2	16	02	2.01	000	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah dokumen hasil Pelayanan Informasi Publik	72 Bulan	1.613.520.500	48 Dokumen	106.711.770	1 Dok	-					#VALUE!	106.711.770	67	7	Diskominfo						
	2	16	02	2.01	000	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	6 Kali Upacara	2.902.254.000	4 layanan	3.300.678.452	1 Layanan	-					4 Layanan	3.300.678.452	67	114	Diskominfo						
					Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan manajemen komunikasi krisis.																						
	2	16	02	2.01	001	Relasi Media	Jumlah aktifitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers dan. 2. terdaftar di dinas kominfo dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media.	-	-	-	1 Lap	21.896.000										Diskominfo						
	2	16	02	2.01	001	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	-	-	4 Permohonan	22.000.000										Diskominfo						
	2	16	02	2.01	001	Monitoring Informasi Kebijakan, opini dan aspirasi publik.	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah.	-	-	-	12 Rekomendasi	4.020.000										Diskominfo						
	2	16	02	2.01	002	Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik Pemerintah Daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ iuknis	-	-	-	3 Media	251.094.500	3 Media	89.994.000		89994000		89.994.000		-	-	Diskominfo						
	2	16	03		Program Aplikasi Informatika	Persentase peningkatan layanan informasi dan pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)	92%	10.009.600.200	87%	9.542.186.541	90%	1.824.081.000						9.542.186.541	95,3	95	Diskominfo							
					Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase peningkatan Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.																						
					Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																						
					Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah																						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I									
								5		6		7		8					9		10		
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	2	16	03	2.02		Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Pengelolaan e-Government di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota				9.542.186.541	74%	1.824.081.000							9.542.186.541			Diskominfo
						Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
						Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang dikelola																
						Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dikembangkan																
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan	Jumlah layanan publik yang terhubung dengan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah																
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/ Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan masterplan smart city.																
	2	16	03	2.02	001	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan pusat data nasional				319.145.162	1 Dok	13.081.000							319.145.162			Diskominfo
	2	16	03	2.02	001	Koordinasi dan pelaksanaan manajemen SPBE	Jumlah dokumen koordinasi pelaksanaan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)				0	1 Dok	744.000							0			Diskominfo
	2	16	03	2.02	002	Pembangunan dan atau pegebangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah Aplikasi khusus yang dibangun dan /atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah				317.920.566	3 Aplikasi	55.000							317.920.566			Diskominfo
	2	16	03	2.02	002	Koordinasi dan fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota cerdas	Jumlah Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terhubung dengan sisten penghubung layanan Pemerintah Daerah				170.791.844	3 Aplikasi	1.200.000							170.791.844			Diskominfo
	2	16	03	2.02	002	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang mendapatkan sosialisasi program kabupaten/ kota cerdas	43	10.009.600.200		8.734.328.969	1 Unit	1.809.001.000							8.734.328.969	87,3	87	Diskominfo
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFORMATIKA									43.498.175.063		29.693.010.737		7.207.580.364		1.469.318.430		1.469.318.430			31.162.329.167			

KOPERASI																							
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah daerah	100	6.583.456.460	100%	4.432.703.589	100%	4.822.528.553	25%	1.159.392.697		1.159.392.697					5.592.096.286	85	DISKOPERINDAG
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah	6 Dok	177.844.552										2 Dok			33		
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan daerah (renstra dan renja perubahan)	3 Dok	121.874.866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-		33	-	
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen evaluasi kinerja daerah	3 Dok	55.969.687	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Dok	-		33	-	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terseleenggaranya pengelolaan administrasi keuangan dinas	100%	3.149.913.054	100%	3.991.808.039	100%	4.458.938.553		1.095.746.226	100%	1.095.746.226					5.087.554.265	162	
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	14 Bulan	3.126.889.828	14 Bulan	3.991.808.039	14 Bulan	4.458.938.553	3 Bulan	1.095.746.226	11 Bulan	1.095.746.226				18 bulan	5.087.554.265	129	163
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya laporan akhir tahun perangkat daerah	1 Laporan	23.023.226	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Laporan	-		100	-	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tepenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas	1	104.533.538				-											
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian dinas hari tertentu	127 Stel	104.533.538	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	12 Bulan	592.188.533	12 Bulan	74.165.518	12 Bulan	80.010.000	3 Bulan	9.052.500	12 Bulan	9.052.500				17 Bulan	83.218.018	142	14

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							1	2				3	4	K				Rp.	K	Rp.	K		Rp.
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya bola lampu dan kabel listrik	45 Bulan	60.665.963	-	1.003.000	12 Bulan	1.000.000	3 Bulan	-	3 Buah	-			3 Buah	1.003.000	7	2	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya ATK dinas	12 Bulan	129.703.732	12 Bulan	24.119.076	12 Bulan	20.000.000	3 Bulan	5.248.000	12 Bulan	5.248.000			12 Bulan	29.367.076	100	23	
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan	97.418.894	12 Bulan	7.600.992	12 Bulan	8.000.000	3 Bulan	1.999.500	12 Bulan	1.999.500			12 Bulan	9.600.492	100	10	
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya media massa dan informasi	12 Bulan	26.628.750	-	-		0	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum rapat dan tamu	12 Bulan	120.818.531	12 Bulan	6.860.000	12 Bulan	2.400.000	3 Bulan	-	12 Bulan	-			12 Bulan	6.860.000	100	6	
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya dana untuk konsultasi dan koordinasi	12 Bulan	156.952.663	12 Bulan	34.582.450	12 Bulan	48.610.000	3 Bulan	1.805.000	12 Bulan	1.805.000			12 Bulan	36.387.450	100	23	
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital	1	987.221.257															
					Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan dinas operasional	0 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Tersedianya kursi eselon III, IV, staf, lemari arsin dan meja 1/2 biro	3 Paket	121.758.998	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pembangunan kelengkapan Gedung PLUIT, Gedung Rumah Digital, Gedung Dinas dan 2 Gedung SRG	5 Paket	703.097.435	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PC dan printer Rumah digital, Laptop perencanaan	16 Unit	162.364.824	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi dinas	100%	859.031.975	100	268.020.182	100%	191.870.000		47.528.971		47.528.971			100%	315.549.153	100	37	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedia benda pos (materai) dan buku cek	1100 Lembar	106.059.375	310 Lembar	1.260.000	42 Lembar	920.000	200 Lembar	500.000	310 Lembar	500.000			98 Lembar	1.760.000	9	2	
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telp	12 Bulan	240.537.600	12 Bulan	76.079.782	12 Lembar	76.950.000	3 Bulan	17.028.971	12 Bulan	17.028.971			12 Lembar	93.108.753	100	39	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Terbayarnya honorarium PNS dan Non PNS (pengelola keuangan dan petugas piket dan kebersihan)	12 Bulan	512.435.000	12 Bulan	190.680.400	12 Lembar	114.000.000	3 Bulan	30.000.000	12 Bulan	30.000.000			12 Lembar	220.680.400	100	43	
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas	100%	712.723.551	100%	98.709.850	100%	91.710.000		7.065.000		7.065.000			100%	105.774.850	100	15	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya kendaraan dinas serta pajak	12 Bulan	220.572.613	12 Bulan	82.169.850	12 Bulan	88.300.000	3 Bulan	7.065.000	12 Bulan	7.065.000			12 Bulan	89.234.850	100	40	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya AC, komputer dan laptop	12 Bulan	188.400.938	12 Bulan	16.540.000	12 Bulan	3.410.000	3 Bulan	-	12 Bulan	-			12 Bulan	16.540.000	100	9	
					Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung Plut, dinas, rumah digital dan resi gudang	1 Gedung	303.750.000	3 Gedung	-	-	-	-	-	3 Gedung	-			6 Gedung	#VALUE!	600	#VALUE!	
					Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Peningkatan Koperasi yang telah diawasi		65.800.000				15.000.000											DISKOPERINDAG
					Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	80 Koperasi	65.800.000				15.000.000											
					Sub Kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan terhadap kekuatan, kesehatan, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi	1 Kegiatan	45.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Pembinaan pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	Terlaksananya pengawasan terhadap Kepatuhan Koperasi Terhadap peraturan perundang-undangan	200 Koperasi	20.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Sub Kegiatan Pelaksanaan proses pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotannya daerah kabupate/kota				-	-	-	15.000.000	-	-	-	-			-	-	-	-	
					Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase USP yang sudah memiliki izin						10.000.000											DISKOPERINDAG

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						4																						
					Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terdatanya jumlah USP yang sudah memiliki cabang						10.000.000																
					Sub Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya USP yang akan membuka cabang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	-	-	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase peningkatan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan		98.650.000	100%									12%		80%	-	DISKOPERINDAG						
					Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	8 Kegiatan	73.650.000			2 Kegiatan							12 Kegiatan		150 Kegiatan	-							
					Sub Kegiatan Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Terlaksananya pelatihan tentang perkoperasian	170 orang	73.650.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Kegiatan Pendidikan dan Latihan UKM bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Terlathinya SDM UKM dari sisi pemahamandan pengetahuan tentang ruang lingkup UKM	100 Orang	25.000,000	1 Kegiatan		50 Orang																	
					Sub Kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	1 Kegiatan	25.000,000	1 Kegiatan	-	2 Kegiatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
					Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Peningkatan skala Usahanya		73.990.000		28.440.200												DISKOPERINDAG						
					Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi	15 Koperasi	73.990.000		28.440.200								28.440.200		38								
					Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya bimtek, koordinasi dan temu usaha bagi koperasi	1 Kegiatan	73.990.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
					Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup keluarga	-	-	-	28.440.200	-	-	-	-	-	-	-	23 Keluarga										
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro dan kecil yang diberdayakan		1.310.700.000	5	139.206.740	15	61.000.000		15.000.000		15.000.000		5%	154.206.740			DISKOPERINDAG						
					Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab / Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		36.776.942.474		3.816.993.410		4.364.101.488	34	935.690.809	0	935.690.809		205	4.752.684.219			DPMPTSP						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pesentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembanguann Daerah		652.800.000		5.454.000	7	10.027.000	7	2.720.000	0	2.720.000		19	8.174.000									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen Renstra dan Renja DPMPTSP	2 dokumen	185.000.000		2.904.000	2	5.024.000		1.360.000		1.360.000		3	4.264.000	1,50	0,02							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terealisasinya Dokumen RKA SKPD	1 dokumen	49.100.000		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00	-							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 dokumen	47.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-							
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	51.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-							
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terealisasinya Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	59.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1,00	-							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan Realisasi Kinerja DPMPTSP	5 dokumen	76.300.000	2.550.000	5	5.003.000	1.360.000	5	1.360.000	1.360.000	-	-	6	3.910.000	1,20	0,05							
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terealisasinya Dokumen SAKIP Monitoring dan Evaluasi Kegiatan OPD	6 dokumen	184.700.000	0	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1,00	-							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah		26.549.591.474	3.398.828.550		3.620.833.588	861.299.976	0	861.299.976				0	4.260.128.526	4	0							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terealisasinya pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 bulan	26.406.891.474	3.394.089.550	12	3.610.821.588	858.799.976	3	858.799.976	858.799.976				4.252.889.526	1,25	0,16							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terealisasinya Laporan Keuangan Akhir Tahun DPMPTSP	1 laporan	61.200.000	2.989.000	1	5.003.500	2.500.000	-	2.500.000	2.500.000				5.489.000	1,00	0,09							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan /Semesteran SKPD	Terealisasinya Laporan Keuangan Semesteran Teralisasinya Laporan Keuangan Bulanan	12 bulan	41.700.000	1.750.000	14	5008500	-	-	-	-				1.750.000	1,17	0,04							
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terealisasinya Dokumen Pelaporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 laporan	39.800.000	0		0			-					-	1,00	-							
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya sarana penunjang administrasi kepegawaian dinas		264.000.000	0		0	0		0														
					Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bimtek Implentasi Peraturan Perundang-undangan	35 orang	264.000.000	0		0	0		0														
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah		2.014.000.000	138.650.440	96	289.504.900	19.492.575	18	19.492.575	19.492.575	0	-		117	158.143.015								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Listrik dan Penerangan Perkantoran	12 bulan	55.000.000	1.123.000	12	3.021.000	-	3	-	-	-	-		1.123.000	1,25	0,02							
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Peralatan dan Pelengkapan Kantor yang siap digunakan	12 bulan	164.000.000	19.523.000	12	110.440.460	3.845.000	3	3.845.000	3.845.000		-		23.368.000	1,25	0,14							
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Keperluan Peralatan Rumah Tangga yang memadai	12 bulan	71.000.000	-	12	6.000.000	-	-	-	-	-	-		-	1,00	-							
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terwujudnya Kebersihan bangunan Kantor	12 bulan	45.000.000	4.089.900	12	6.000.000	-	3	-	-	-	-		4.089.900	1,25	0,09							
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terwujudnya ADM Perkantoran yang Baik	12 bulan	202.400.000	12.000.300	12	12.000.412	1.200.000	3	1.200.000	1.200.000		-		13.200.300	1,25	0,07							
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan Wawasan dan Informasi Sumber Daya Aparatur	12 bulan	23.600.000	-	12	-	-	-	-	-	-	-		-	1,00	-							
					Fasilitasi Kunjungan Tamu Kantor	Terlaksananya Pelayanan Tamu Kantor	12 bulan	123.000.000	4.640.000	12	8.000.000	630.000	3	630.000	630.000		-		5.270.000	1,25	0,04							
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Pekerjaan yang Berkaitan dengan Instansi Baik di Dalam Maupun di Luar	12 bulan	1.330.000.000	97.274.240	12	144.043.028	13.817.575	3	13.817.575	13.817.575		-		111.091.815	1,50	0,08							
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.893.951.000	0	0	0	131.000.000	0	0	0	0	-	0	0	0	0							
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/ Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 unit	2.314.975.000	0		0			0			-											
					Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Mobiler Kantor	1 paket	283.901.000	0		0			0			-											

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	3 unit	295.075.000		0		131.000.000		0														
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.618.600.000		149.635.870	36	163.936.000	6	40.529.458	0	40.529.458		42	190.165.328	305.166.669	0							
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terdistribusinya Surat Keluar dan Tercukupinya Benda Pos	12 bulan	32.200.000	12	280.000	12	280.000	-	-		-		12	280.000	1,25	0,15							
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Lancarnya Penyediaan Telepon, Internet,Air dan Listrik	12 bulan	271.400.000	12	13.072.470	12	14.280.000	3	3.106.606	-	3.106.606		15	16.179.076	1,00	0,06							
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terwujudnya Jasa Pelayanan ADM Perkantoran yang Efektif dan Efisien	12 bulan	1.315.000.000	12	136.283.400	12	149.376.000	3	37.422.852		37.422.852		15	173.706.252	305.166.667	-							
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.784.000.000		124.424.550		148.800.000	3	11.648.800	0	11.648.800		27	136.073.350									
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terawatnya dan Terpeliharanya serta terlaksananya Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	12 bulan	829.000.000		116.639.550	12	138.800.000	3	11.648.800		11.648.800		15	128.288.350	-	0,003							
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpelihara dan Terawatnya Peralatan Mesin Kantor	12 bulan	124.000.000		7.785.000	12	10.000.000	-	0		-		12	7.785.000	-	0,011							
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpelihara dan Terawatnya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 bulan	1.831.000.000		0		0		0					-									
						Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase pengembangan iklim penanaman modal		1.731.330.000	0	13.310.000	12	0	0	0	0	0		0	13.310.000			DPMPTSP						
						Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Terlaksananya pembentukan kebijakan dan sosialisasi kebijakan penanaman modal		793.760.000	0	4.387.500	8	0	0	0	0	0		0	4.387.500									
						Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	3 kebijakan	531.260.000		1.500.000	6			0				1.500.000	-	0,030								
						Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	6 pertemuan	262.500.000		2.887.500	2			0				2.887.500	-	-								
						Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi		937.570.000	0	8.922.500	4	0	0	0	0	0		0	8.922.500									
						Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1 dokumen	470.000.000		2.877.500	1			0				2.877.500										
						Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi InvestasiRegional)	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				4.145.000	2							4.145.000										
						Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	1 dokumen	467.570.000		1.900.000	1			0				1.900.000										
						Program Promosi Penanaman Modal	Persentase rencana investasi		370.350.000	0	1.485.000	0	0	3	0	0	0		0	1.485.000			DPMPTSP						
						Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelenggaraan promosi penanaman modal		370.350.000	0	1.485.000	0	0	3	0	0	0		0	1.485.000									
						Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembuatan buku unggulan daerah dan potensi investasi daerah, Terlaksananya penyusunan banner x	1 tahun	50.000.000		1.485.000			3	0				1.485.000										
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pameran Investasi Even Nasional dan Regional	2 kali	320.350.000		0		0		0														
						Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat		610.000.000		4.755.000		40.000.000	0%	0	0%	0		4.755.000			DPMPTSP							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu dibidang penanaman modal		610.000.000	0	4.755.000	1.100	40.000.000	0	0	0	0		0	4.755.000									
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	3 aplikasi	179.000.000	-	-	0		0					-	-	-								
						Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan BerusahaBerbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1150 dokumen	166.000.000		4.755.000	1100	40.000.000		0				4.755.000		0,029								
						Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasisrisiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15 pengadaan	100.000.000	-	-	0								-	-								
						Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	36 survei	165.000.000	-	-	0		0					-	-	-								
						Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Realisasi Investasi		1.157.130.000	0	764.629.600	410	120.000.000	0	0	0	0		0	764.629.600			DPMPTSP						
						Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan,Pemantuan dan Pengawasan Penanaman Modal;		1.157.130.000	0	764.629.600	410	120.000.000	0	0	0	0		0	764.629.600									
						Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalammerealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	70 investor	234.266.000		45.100.000	60	30.000.000	-	0				45.100.000	-	0,19								
						Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	200 perusahaan	576.000.000		485.829.600	200	40.000.000	0	0				485.829.600	5,45	0,84								
						Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	105 perusahaan	346.864.000		233.700.000	150	50.000.000	-	0				233.700.000	1,25	0,67								
						Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Jumlah Data Laporan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal		397.604.880	0	4.100.000	2	10.000.000	0	0	0	0		0	4.100.000			DPMPTSP						
						Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Diolah Dikaji dimanfaatkan		397.604.880	0	4.100.000	2	10.000.000	0	0	0	0		0	4.100.000									
						Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Adanya Laporan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang sudah diterbitkan	19 laporan	397.604.880		4.100.000	2	10.000.000		0				4.100.000										
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL									41.043.357.354		4.605.273.010		4.534.101.488	617%	935.690.809	0%	935.690.809			5.540.963.819									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
							1	2				3	4	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.	K		Rp.
	2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
	2	19			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																			
	2	19	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.926.635.000		869.973.000		4.926.635.000	2%	80.599.661	2%	80.599.661			2%	950.572.661			DISPARPORA	
	2	19	01	2.01	Kegiatan Perencanaan,Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			57.160.000		45.504.000		57.160.000		14.852.000	0	14.852.000			0	60.356.000				
	2	19	01	2.01	01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	12 bulan	14.000.000	12 bulan	10.535.000	12 bulan	14.000.000	33	4.550.000	33	4.550.000			45	15.085.000			
	2	19	01	2.01	02	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA Dinas Parpora	12 bulan	15.535.000	12 bulan	9.971.000	12 bulan	15.535.000	37	5.752.000	37	5.752.000			49	15.723.000			
	2	19	01	2.01	03	Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen perubahan RKA Dinas Parpora	12 bulan	12.000.000	12 bulan	8.570.000	12 bulan	12.000.000	0	0	0	0			12	8.570.000			
	2	19	01	2.01	04	Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD	Tersedianya DPA SKPD	12 bulan	0															
	2	19	01	2.01	05	Koordinasi dan penyusunan DPA perubahan SKPD	Tersedianya DPA Perubahan	12 bulan	0															
	2	19	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan itiksar realisasi kinerja SKPD	Tersedianya lembur bagi pegawai Dinas Parpora	12 bulan	15.625.000	12 bulan	16.428.000	12 bulan	15.625.000	29	4.550.000	29	4.550.000			41	20.978.000			
	2	19	01	2.01	07	Evaluasi kinerja perangkat daerah		12 bulan	0															
	2	19	01	2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			4.473.427.000		380.322.000		4.473.427.000		932.661	0	932.661			0	381.254.661				
	2	19	01	2.02	01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Tersedianya gaji bagi pegawai Parpora	12 bulan	4.463.289.000	12 bulan	373.818.000	12 bulan	4.463.289.000	21	926.046	21	926.046			33	374.744.046			
	2	19	01	2.02	05	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Tersedianya lembur bagi pegawai Dinas Parpora	12 bulan	10.138.000	12 bulan	6.504.000	12 bulan	10.138.000	65	6.615	65	6.615			77	6.510.615			
	2	19	01	2.02	06	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	Tersedianya bahan persiapan pemeriksaan	12 bulan	0															
	2	19	01	2.02	07	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semester an SKPD	Tersedianya lembur bagi pegawai Dinas Parpora	12 bulan	0															
	2	19	01	2.05	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																			
	2	19	01	2.05	02	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tersedianya dokumen laporan Barang Milik daerah pada SKPD																	
	2	19	01	2.05	03																			
	2	19	01	2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			154.433.000		149.723.000		154.433.000		12.619.000	0	12.619.000			0	162.342.000				
	2	19	01	2.06	01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen listrik	60 bulan	3.401.000	12 bulan	8.200.000	12 bulan	3.401.000	10	340.000	10	340.000			10	8.540.000			
	2	19	01	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	60 bulan	8.604.000	12 bulan	8.620.000	12 bulan	8.604.000	10	860.000	10	860.000			10	9.480.000			
	2	19	01	2.06	03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	60 bulan		12 bulan		12 bulan			0	0			0	0				
	2	19	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Tersedianya bahan logistik kantor	60 bulan	5.000.000	12 bulan	4.058.000	12 bulan	5.000.000	6	314.000	6	314.000			6	4.372.000			
	2	19	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	9.870.000	12 bulan	11.991.000	12 bulan	9.870.000	20	2.000.000	20	2.000.000			20	13.991.000			
	2	19	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya majalah dan surat kabar	60 bulan	0	12 bulan		12 bulan	0	0	0	0			0	0				
	2	19	01	2.06	08	Fasilitas kunjungan tamu	Tersedianya fasilitas untuk tamu	60 bulan	3.900.000	12 bulan	10.500.000	12 bulan	3.900.000	51	2.000.000	51	2.000.000			51	12.500.000			
	2	19	01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Tersedianya biaya perjalanan dinas SKPD	60 bulan	123.658.000	12 bulan	106.354.000	12 bulan	123.658.000	6	7.105.000	6	7.105.000			6	113.459.000			
	2	19	01	2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																			
	2	19	01	2.07	01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Tersedianya kendaraan dinas																	
	2	19	01	2.07	06	Pengadaan mebel	Tersedianya mebeler kantor																	
	2	19	01	2.07	07	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan kantor																	
	2	19	01	2.08	Kegiatan Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.200.000		130.000.000		109.200.000		30.321.000	0	30.321.000			0	160.321.000				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	19	01	2,08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	60 bulan	1.000.000	12	2.400.000	12	1.000.000	0	0	0	0			0	2.400.000								
	2	19	01	2,08	02	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Tersedianya jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	60 bulan	38.000.000	12	38.600.000	12	38.000.000	21	7.821.000	21	7.821.000			21	46.421.000								
	2	19	01	2,08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	tersedianya jasa pelayanan kantor	60 bulan	70.200.000	12	89.000.000	12	70.200.000	32	22.500.000	32	22.500.000			32	111.500.000								
	2	19	01	2,09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			132.415.000		164.424.000		132.415.000		21.875.000	0	21.875.000			0	186.299.000								
	2	19	01	2,09	01	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terpeliharanya kendaraan dinas	5 tahun	127.485.000	4	153.924.000	4	127.485.000	17	21.375.000	17	21.375.000			17	175.299.000								
	2	19	01	2,09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	5 tahun	4.930.000	4	10.500.000	4	4.930.000	10	500.000	10	500.000			10	11.000.000								
	2	19	01	2,09	07	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Terciptanya suasana gedung kantor yang memadai	5 tahun	0	4		4	146.000.000		0														
	2	19	02			Program Pengembangan Daya Saing Kepemudaan			336.750.000		685.101.000		336.750.000	25%	13.865.000	25%	13.865.000			25%	698.966.000			DISPARPORA					
	2	19	02	2,01		Kegiatan Penyadaran,Pemberdayaan,dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,Wirausaha Muda Pemuda,dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			773.000.000		0		773.000.000		5.000.000	0	5.000.000			0	5.000.000								
	2	19	02	2,01	01											0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	02	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader	Terlaksananya peningkatan kapasitas para pemuda kabupaten lima puluh kota			1		1				0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	03	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing wirausaha pemuda	Terlaksananya peningkatan kapasitas para wirausaha muda kabupaten lima puluh kota			1		1				0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	04	Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan peningkatan kapasitas daya saing pemuda kader										0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	07	Pemenuhan hak setiap pemuda melalui perlindungan pemuda,advokasi,akses pengembangan diri,partisipasi pemuda dalam proses perencanaan,pelaksanaan evaluasi dan pengambilan keputusan program strategis kepemudaan	Terlaksananya penyuluhan bagi pemuda			1		1				0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	08	Pemberian penghargaan pemuda dan organisasi pemuda yang berjasa atau berprestasi	Tersedianya penghargaan atau reward bagi pemuda yang berprestasi			1		1				0	0			0	0								
	2	19	02	2,01	09	Peningkatan kepemimpinan,kepeloporan dan kesukarelawan pemuda	Terlatihnya calon pemimpin masa depan dari generasi pemuda			1		1				0	0			0	0								
						Penyelenggaraan seleksi dan pelatihan pasukan pengibar bendera	Terlaksananya seleksi dan pengiriman pasukan paskibra			4		4				0	0			0	0								
						Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepemimpinan Pemuda Tingkat Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas para pemuda kabupaten lima puluh kota	5	525.000.000	1	0	1	525.000.000			0	0			0	0								
						Pelaksanaan Koordinasi dan sinkronisasi pemenuhan hak pemuda di tingkat Kab/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas para wirausaha muda kabupaten lima puluh kota	5	110.000.000	1	0	1	110.000.000	5	5.000.000	5	5.000.000			5	5.000.000								
						Koordinasi,sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor tingkat Kab/Kota			138.000.000		0		138.000.000			0	0			0	0								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8											9		10	
							1	2				3	4	K	Rp.	K			Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K
	2	19	02	2.02	Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			68.000.000		0		68.000.000		8.865.000	0	8.865.000			0	8.865.000							
	2	19	02	2.02	02	Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota	Meningkatnya organisasi pemuda kabupaten/kota																				
						Koordinasi sinkronisasi dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kab/kota	Meningkatnya organisasi pemuda kabupaten/kota	5	68.000.000	4	0	4	68.000.000	8.865.000	0	8.865.000			0	8.865.000							
	2	19	03			Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan		4.475.190.000		700.683.000		4.484.191.000		31.500.000		31.500.000				732.183.000			DISPARPORA				
	2	19	03	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada jenjang Penedidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		3.992.191.000		1.197.000		3.992.191.000		13.500.000	0	13.500.000			0	14.697.000							
	2	19	03	2.01	03	Koordinasi,sinkronisasi dan pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana olahraga kabupaten/kota	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga								0	0			0	0							
						Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan sarana dan prasarana melalui perencanaan pengadaan pemanfaatan pemeliharaan dan pengawasan prasarana olahraga di tingkat kab/kota	Tersedianya peningkatan sarana dan prasarana olahraga	5	3.992.191.000	4	1.197.000	4	3.992.191.000	0	13.500.000	0	13.500.000			0	14.697.000						
	2	19	03	2.02		Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota		342.999.000		640.236.000		352.000.000		18.000.000	0	18.000.000			0	658.236.000							
	2	19	03	2.02	01	Penyelenggaraan kejuaraan dan olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kab/Kota		5	342.999.000		0	5	342.999.000	5	18.000.000	5	18.000.000			5	18.000.000						
	2	19	03	2.02	02	Penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya berbagai kejuaraan olahraga tingkat kabupaten/kota								0	0			0	0							
	2	19	03	2.03		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah/Provinsi		55.000.000		59.250.000		55.000.000		0	0	0			0	59.250.000							
	2	19	03	2.03	01	Pemusatan latihan daerah,ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (suort science)	Terlaksananya pelatihan bagi tenaga olahraga	1	55.000.000	1	59.250.000	1	55.000.000	0	0	0	0		0	59.250.000							
	2	19	03	2.03	02	Pembinaan dan Pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota	Terbinanya atlet berprestasi							0													
	2	19	03	2.03	03	Koordinasi,sinkronisasi penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga								0													
	2	19	03	2.04		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga		50.000.000		0		50.000.000		0	0	0			0	0							
	2	19	03	2.04	02	Peningkatan kerjasama organisasi keolahragaan kab/Kota dengan lembaga terkait	Tersedianya berbagai organisasi pemuda lima puluh kota	1	50.000.000	1	0	1	50.000.000	0	0	0	0		0	0							
	2	19	03	2.05		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi		35.000.000		0		35.000.000		0	0	0			0	0							
	2	19	03	2.05	01	Penyelenggaraan,pengemban dan pemasangan festival dan olahraga rekreaso	Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi								0	0			0	0							
	2	19	03	2.05	05	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Terlaksananya pengembangan olahraga tradisional	5	35.000.000	4	0	4	35.000.000	0	0	0	0		0	0							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								5		6		7		8						9		10			11	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
	2	19	04			Program Kapasitas Kepramukaan			10.000.000		10.000.000		10.000.000	0%	0	0%	0			0%	10.000.000			DISPARPORA		
	2	19	04	2.01		Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			10.000.000		10.000.000		10.000.000		0	0	0			0	10.000.000					
	2	19	04	2.01	05	Penyelenggaraan kegiatan kepramukaan tingkat daerah	Terlaksananya kegiatan pramuka tingkat daerah	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	0	0	0	0			0	10.000.000					
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA									9.748.575.000		2.265.757.000		9.757.576.000		125.964.661		125.964.661				2.391.721.661					
	2					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK																				
						Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	89	3.326.349.000							0%	0			0%	0	0%	0%	KOMINFO		
						Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	89	3326349000																	
						Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		946871000																	
						Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang dihimpun		560000000																	
						Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik sektoral yang dihimpun		909478000																	
	2	20	02			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Pemanfaatan data/ Informasi/ Statistik Daerah	89	-	83	-	85%	25.977.400		-	-	-			-		-	Diskominfo			
	2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkungan Daerah Kabupaten/ Kota	89	-	83	-	85%	25.977.400		-	-	-			-		-	Diskominfo			
	2	20	02	2.01	000	Peningkatan peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penyusunan kebijakan.	-		0	-	100%	3.995.000		-					-		-	Diskominfo			
	2	20	02	2.01	000	Peningkatan kapasitas Data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan Statistik Sektoral yang rilis tepat waktu	-		0	-	80%	14.137.000		-					-		-	Diskominfo			
	2	20	02	2.01	001	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan Statistik Sektoral yang telah dilengkapi metadata	-		0	-	29%	7.845.400		-					-		-	Diskominfo			
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK											0	25.977.400		0		0			0							
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN																				
	2	21	02			Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	49,93%	1.253.500.000	35,83%	673.782.475	41,88%	230.000.000	-	0	41,88%			27,51%	673.782.475	55	37	DINAS KOMINFO			
	2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.	Persentase Pemahaman Perangkat Daerah akan Penyelenggaraan Urusan Persandian	49,93%	1253500000	35,83%	673.782.475	41,88%	230.000.000	-	0	41,88%			27,51%	673782475	55	54				
		02	2	2.01	000	Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/ kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan kemanan informasi.	43 Perangkat Daeah	1253500000	43 Perangkat Daerah	673.782.475	43 Perangkat Daerah	230.000.000	-	0	-			Perangkat Daerah	673782475	100	54				
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									1.253.500.000		673.782.475		230.000.000		0		0			673.782.475						
	2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN																				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5		6		7		8					9		10		
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Program pengembangan kebudayaan	Persentase pengembangan kebudayaan	86%	1.336.023.726		5.088.079.058	-	1.796.750.000	-	-				5.088.079.058		14,14	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		186.108.672		816.700.504	86	77.890.000	-	-				816.700.504		8,62		
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	1	81.711.421	19	301.392.904	4	77.890.000	-	0			19	301.392.904	19,28	3,69	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	1	104.397.251	66	515.307.600	-	-	-	0			66	515.307.600	65,94	4,94	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
						Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota		886.319.688		1.791.842.604	-	948.860.000	-	-				1.791.842.604		4,01		
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1	533.086.663	19	1.111.743.314	8	750.000.000	-	0			19	1.111.743.314	18,91	2,09	Sub-Substansi Kesenian	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1	353.233.025	13	680.099.290	1	198.860.000	-	0			13	680.099.290	12,61	1,93	Sub-Substansi Kesenian	
						Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten / kota		263.595.366		2.479.535.950	-	770.000.000	-	-				2.479.535.950		1,51		
						Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	0	0	1	-	-	-	-	0			1	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
						Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	1	263.595.366	153	397.196.300	220	320.000.000	-	0			153	397.196.300	153,00	1,51	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
						Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	0	0	3	2.082.339.650	4	450.000.000	-	0			3	2.082.339.650	0,00	0,00	Sub-Substansi Sejarah dan Nilai Tradisi	
						Program pengembangan kesenian tradisional	Persentase pengembangan kesenian tradisional	89%	152.911.935		1.614.997.883	-	474.894.000	-	-				1.614.997.883		6,93	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten / kota		152.911.935		1.614.997.883	89	474.894.000	-	-				1.614.997.883		6,93		
						Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	1	0	99	555.691.600	-	-	-	0			99	555.691.600	99,32	0,00	Sub-Substansi Kesenian	
						-	-	1	0	-	-	-	-	-	0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Kesenian	
						Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	152.911.935	47	1.059.306.283	7	474.894.000		0			47	1.059.306.283	46,99	6,93	Sub-Substansi Kesenian	
						Program pembinaan sejarah	Persentase pembinaan sejarah	90%	174.540.685		84.999.900	-	-	-	-				84.999.900		0,49	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
						Pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pembinaan sejarah lokal dam 1 daerah kabupaten / kota		174.540.685		84.999.900	-	-	-	-				84.999.900		0,49		
						Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	1	174.540.685	1	84.999.900	-	-	-	0			1	84.999.900	1,00	0,49	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
						-	-	1	0	-	-	-	-	-	0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	
						-	-	1	0	-	-	-	-	-	0			0	0	0,00	0,00	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	90%	333.647.626		676.644.308	-	302.120.000		-	-				676.644.308		6,98	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
					Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen penetapan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		195.385.210		305.334.406	90	192.120.000		-	-				305.334.406		2,66							
					Pendaftaran objek diduga cagar budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	1	79.588.210	1	5.113.900	20	40.480.000		-	0			1	5.113.900	1,00	0,06	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
					Penetapan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	1	115.797.000	112	300.220.506	15	151.640.000		-	0			112	300.220.506	112,00	2,59	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
					Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten / kota		138.262.417		371.309.902	90	110.000.000		-	-				371.309.902		4,32							
					Perlindungan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	1	38.266.250	2	37.881.300	20	35.000.000		-	0			2	37.881.300	2,30	0,99	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
					-	-	1	0	-	-	-	-		-	0			0	0	-	-	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
					Pemanfaatan cagar budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	1	99.996.167	5	333.428.602	2	75.000.000		-	0			5	333.428.602	4,58	3,33	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
					Program pengelolaan permuseuman	Persentase pengelolaan permuseuman	90%	30.250.000		113.046.298	-	105.000.000		-	-				113.046.298		3,74	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						
					Pengelolaan museum kabupaten/kota	Jumlah pemenuhan komponen pengelolaan museum kabupaten/kota		30.250.000		113.046.298	90	105.000.000		-	-				113.046.298		3,74							
					Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	0	30.250.000	2	113.046.298	40	105.000.000		-	0			2	113.046.298	0,00	3,74	Sub-Substansi Cagar Budaya dan Permuseuman						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN													0%	0	0%	0		0%	7.577.767.447	0,00	6,46							

	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		70.782.000.755	100,00%	25.253.045.762	100%	5.228.564.039	18,48%	892.958.966	18,48%	892.958.966			83,70%	26.146.004.728	69,75	36,94		
	2	23	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	61.781.850.755	100,00%	21.744.078.473	100%	3.677.580.539	37,41%	827.273.966	37,41%	827.578.966			87,48%	22.571.657.439	72,90	36,53	Dispusip
	2	23	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85%	1.087.594.000	100,00%	29.279.700	100%	11.742.550	44,44%	1.670.400	44,44%	1.670.400			88,89%	30.950.100	74,07	2,85	
	2	23	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	24 Dokumen	452.268.000	16 Dokumen	13.425.100	4 Dokumen	5.202.000	1 Dokumen	308.000	1 Dokumen	308.000			17 Dokumen	13.733.100	70,83	3,04	
	2	23	01	2.01	0001		Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					4 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen								
	2	23	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun	6 Dokumen	121.990.000	4 Dokumen	4.863.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	4.863.000	83,33	3,99	
							Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen								
	2	23	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD yang disusun	6 Dokumen	130.180.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-			4 Dokumen	-	66,67	-	
							Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen							
	2	23	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD yang disusun	6 Dokumen	112.482.000	4 Dokumen	2.884.600	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	2.884.600	83,33	2,56	
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen			1 Dokumen		1 Dokumen								
	2	23	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA SKPD yang disusun	6 Dokumen	131.592.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-			4 Dokumen	-	66,67	-	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
														1										
								5		6		7		8					9		10	11		12
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.			
							Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			1 Dokumen	0	0 Dokumen		0 Dokumen										
	2	23	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun	6 Dokumen	139.082.000	4 Dokumen	8.107.000	1 Dokumen	6.540.550	1 Dokumen	1.362.400	1 Dokumen	1.362.400			5 Dokumen	9.469.400	83,33	6,81	
	2	23	01	2.01	0006		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan								
	2	23	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	100%	19.341.144.655	100,00%	9.772.085.655	100%	3.376.871.325	34,09%	802.481.655	34,09%	802.481.655			86,82%	10.574.567.310	72,35	54,67	
	2	23	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN, Jumlah pejabat penanggungjawabn pengelola keuangan	150 ASN, 108 Pejabat	18.904.274.655	113 ASN, 24 Pejabat	9.759.188.755	30 ASN, 2 Pejabat	3.372.894.842	30 ASN, 2 Pejabat	802.114.655	30 ASN, 2 Pejabat	802.114.655			143 ASN, 26 Pejabat	10.561.303.410	95,33	55,87	
	2	23	01	2.02	0001		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					420 Orang/ Bulan		117 Orang/ Bulan		117 Orang/ Bulan								
	2	23	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 dokumen	212.020.000	48 dokumen	9.756.900	12 dokumen	3.976.483	3 dokumen	367.000	3 dokumen	367.000			51 dokumen	10.123.900	70,83	4,77	
	2	23	01	2.02	0003																			
	2	23	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Akuntansi SKPD yang disusun	24 dokumen	71.230.000	16 dokumen	306.000	4 dokumen	0	4 dokumen	0	4 dokumen	-			20 dokumen	306.000	83,33	0,43	
							Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					4 dokumen		4 dokumen		4 dokumen								
	2	23	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD yang disusun	6 Dokumen	86.490.000	4 Dokumen	2.834.000	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	2.834.000	83,33	3,28	
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan								
	2	23	01	2.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	25.400.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	-	83,33	-	
							Jumlah dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					1 Dokumen		1 Dokumen		1 Dokumen								
	2	23	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	JumlahLaporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD yang disiapkan	78 dokumen	27.680.000	52 dokumen	0	13 dokumen	0	3 dokumen	0	3 dokumen	-			55 dokumen	-	70,51	-	
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					13 Laporan		3 Laporan		3 Laporan								
	2	23	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan Prognosis yang disusun	6 Dokumen	14.050.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	0 Dokumen	0	0 Dokumen	-			4 Dokumen	-	66,67	-	
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran					1 Dokumen		0 Dokumen		0 Dokumen								
	2	23	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	100%	132.170.000	100%	0	100%	0	100%	0	100%	-			100%	-	83,33	-	
	2	23	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	6 Dokumen	90.540.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	-	83,33	-	
	2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen		1 Dokumen	0	1 Dokumen								
	2	23	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang disusun	6 Dokumen	41.630.000	4 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	-			5 Dokumen	-	83,33	-	
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan		1 Laporan		1 Laporan								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	2	23	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	1.722.285.500	100,00%	4.037.000	100%	650.000	33,33%	305.000	33,33%	305.000			86,60%	4.342.000	72,22	0,25						
	2	23	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	9 unit	92.300.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-		0 unit	-	-	-						
	2	23	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas (Kuning Khaki)	175 stel	483.913.500	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-	-						
						Jumlah kokarde pakaian dinas	110 buah	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
						Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (hitam Putih)	60 stel	0 stel		0 stel		0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0	0	0	-							
						Jumlah stel pengadaan Pakaian Dinas Harian (Pakaian Daerah)	195 stel	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
						Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas KORPRI	90 stel	0 stel		0 stel		0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0 stel	0	0	0	-							
						Jumlah stel Pengadaan Pakaian Dinas Olah Raga	175 stel	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-							
	2	23	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian yang dikelola	18 Dokumen		141.750.000		12 Dokumen	4.037.000	3 Dokumen	650.000	1 Dokumen	305.000	1 Dokumen	305.000		13 Dokumen			4.342.000	72,22	3,06		
	2	23	01	2.05	0003		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen			1 Dokumen	1 Dokumen													
	2	23	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan yang diikuti	58 Kali	286.994.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	-		0 Kali	-	-	-						
	2	23	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	36 Kali	717.328.000	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	-		0 Kali	-	-	-						
	2	23	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	3.268.092.300	100,00%	332.562.951	100%	28.799.800	25,00%	5.061.000	25,00%	5.061.000			85%	337.623.951	70,83	10,33						
	2	23	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	319 buah	110.868.400	29 buah	1.582.000	0 buah	0	0 buah	0	0 buah	-		29 buah	1.582.000	9,09	1,43						
	2	23	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	82 unit	770.150.000	1 unit	250.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-		1 unit	250.000	1,22	0,03						
	2	23	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga	1 set, 95 buah, 18 lusin	192.476.000	0	0	0	0	0	0	0	-		0	-	-	-	-					
						Jumlah Pengisian Racun Api	72 tabung	0 tabung		0 tabung		0 tabung		0 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabung	0	0	0	-						
	2	23	01	2.06	0003	Jumlah Pengisian Tabung Gas	72 tabung	0 tabung		0 tabung		0 tabung		0 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabung	0 tabung	0	0	0	-						
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 paket																		
	2	23	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor dan Alat Kebersihan Kantor	72 bulan	373.791.400	48 bulan	65.004.200	12 bulan	11.802.000	3 bulan	3.270.000	12 bulan	3.270.000		51 bulan	68.274.200	70,83	18,27						
	2	23	01	2.06	0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 paket				2 paket													
	2	23	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	347,780 Lembar, 360 Buah,320 buku, 146 meter	253.492.500	80990 Lembar, 135 Buah, 60 buku, 42 meter	33.491.800	5556 Lembar, 3 Buah, 40 buku, 0 meter	2.811.800	850 Lembar, 1 Buah, 10 buku, 0 meter	566.000	850 Lembar, 1 Buah, 10 buku, 0 meter	566.000		81840 Lembar, 136 Buah, 70 buku, 42 meter	34.057.800	23,53	13,44						
	2	23	01	2.06	0005		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket			0 paket	0 paket													
	2	23	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan penyediaan bahan bacaan (surat kabar dan majalah)	60 bulan	72.000.000	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	0	0 bulan	-		0 bulan	-	-	-						
	2	23	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi Penyediaan Makanan dan Minuman tamu	5150 porsi makan, 5150 porsi minum	141.625.000	825 porsi makan, 825 porsi minum	21.250.000	100 porsi makan, 100 porsi minum	1.500.000	0 porsi makan, 0 porsi minum	0	0 porsi makan, 0 porsi minum	-		825 porsi makan, 825 porsi minum	21.250.000	16,02	15,00						
	2	23	01	2.06	0008		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan			3 Laporan	3 Laporan													
	2	23	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5300 porsi makan, 5300 porsi minum, 335 kali	1.265.455.000	1030 porsi makan, 1030 porsi minum, 67 kali	204.306.451	0 porsi makan, 0 porsi minum, 4 kali	9.990.000	0 porsi makan, 0 porsi minum, 1 kali	1.225.000	0 porsi makan, 0 porsi minum, 1 kali	1.225.000		1030 porsi makan, 1030 porsi minum, 68 kali	205.531.451	19,43	16,24						
	2	23	01	2.06	0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan			3 Laporan	3 Laporan													
	2	23	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan Pelaksanaan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	60 bulan	88.234.000	24 bulan	6.678.500	12 bulan	1.256.000	3 bulan	0	3 bulan	-		24 bulan	6.678.500	40,00	7,57						
	2	23	01	2.06	0010		Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen			0 Dokumen	0 Dokumen													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													1										
							5		6		7		8					9		10			11
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		K	Rp.	K	Rp.			
	2	23	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	28.323.996.000	50,00%	9.890.407.799	0%	0	0%	0	0%	-		40,00%	9.890.407.799	33,33	34,92		
	2	23	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Kendaraan Dinas/ Operasional	18 unit	2.506.116.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	-	-		
	2	23	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah unit Mebeleur kantor	438 buah, 1 paket	1.710.695.000	266 unit	397.996.510	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	266 unit	397.996.510	60,59	23,27		
	2	23	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan gedung Kantor	30 unit	654.150.000	17 unit	111.321.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-	17 unit	111.321.000	56,67	17,02		
	2	23	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah dokumen DED, Jumlah pembangunan gedung kantor/ bangunan lainnya	2 Dokumen, 4 unit	20.800.000.000	0 Dokumen, 1 unit	9.381.090.289	0	-	0	-	0	-	0 Dokumen, 1 unit	9.381.090.289	16,67	45,10		
	2	23	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	33 buah	2.653.035.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	-		
	2	23	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3.686.184.300	100,00%	1.566.892.583	100%	240.350.000	25,00%	18.060.911	25,00%	18.060.911		85,00%	1.584.953.494	83,33	43,00	
	2	23	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materi 10000 dan biaya pengiriman	5300 lembar, 104 kali	65.625.000	295 lembar, 4 kali	3.082.000	50 lembar, 0 kali	500.000	50 lembar, 0 kali	500.000	50 lembar, 0 kali	500.000	345 lembar, 4 kali	3.582.000	6,38	5,46		
	2	23	01	2.08	0001		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 laporan		3 Laporan		3 Laporan								
	2	23	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	623.050.300	48 Bulan	238.141.325	12 Bulan	77.850.000	3 Bulan	17.560.911	3 Bulan	17.560.911	51 Bulan	255.702.236	70,83	41,04		
	2	23	01	2.08	0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan		3 Laporan		3 Laporan								
	2	23	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan Penyediaan Honor Pengurus Barang, PTT dan Non PNS Lainnya	72 Bulan	2.997.509.000	48 Bulan	1.325.669.258	12 Bulan	162.000.000	3 Bulan	0	3 Bulan	-	51 Bulan	1.325.669.258	70,83	44,23		
	2	23	01	2.08	0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan		3 Laporan		3 Laporan								
	2	23	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berondisi baik	100%	4.220.384.000	100,00%	148.812.785	100%	19.166.864	0,00%	0	0,00%	-		80,00%	148.812.785	66,67	3,53	
	2	23	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	31 Unit	2.202.695.000	15 Unit	133.360.185	7 Unit	17.076.864	0 Unit	0	0 Unit	-	15 Unit	133.360.185	48,39	6,05		
	2	23	01	2.09	0002		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				7 unit		0 Unit		0 Unit								
	2	23	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah unit Pemeliharaan Mebel	6 unit	25.000.000	0	0	0	0	0	0	-		0	-	0	-		
	2	23	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	165 unit	155.225.000	16 unit	10.740.600	4 unit	2.090.000	0 Unit	0	0 Unit	-	16 unit	10.740.600	9,70	6,92		
	2	23	01	2.09	0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 unit		0 Unit		0 Unit								
	2	23	01	2.09	09	Pemeliharaan Rutin/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	4 unit	237.464.000	1 unit	4.712.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-	1 unit	4.712.000	25,00	1,98		
	2	23	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan rutin/ berkala Sarana dan Prasarana Pendukung gedung kantor	2 unit	1.600.000.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	-	0 unit	-	0	-		
	2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN		5.415.360.000		3.106.390.775		1.520.000.000	0,00%	65.380.000	0,00%	65.380.000			3.171.770.775		58,57		
	2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang dikelola, ditata dan dibina	46,40%	4.378.140.000	5 Layanan	2.991.980.075	7,49%	1.455.000.000	0	65.380.000	0%	65.380.000		0	3.057.360.075	26,22%	69,83	Disusip
	2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten	156 perpustakaan		81 perpustakaan	26 perpustakaan		0 perpustakaan		0 perpustakaan			81 perpustakaan		51,92			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								1	2					3	4	5		6		7		8			9
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		
							Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah	16.362 judul/ 38.316 eksemplar	2.300.640.200	10.906 judul/ 25.975 eksemplar	1.349.358.603	10.982 judul/ 26.275 eksemplar	506.749.000	10.906 judul/ 25.975 eksemplar	19.880.000	10.906 judul/ 25.975 eksemplar	19.880.000			10.906 judul/ 25.975 eksemplar	1.369.238.603	67,79	59,52		
							Jumlah Pustakawan / pengelola perpustakaan yang bersertifikat	9 orang		9 orang		11 orang		9 orang		9 orang			9 orang		100,00				
	2	23	02	2.01	01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	NA	-	5 Layanan	308.141.000	0 Layanan	16.678.700	0 Layanan	-	0 Layanan	-			5 Layanan	308141000	100,00	-		
		2	23	02	2.01	0020	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK					1 Perpusta kaan		0 Perpusta kaan		0 Perpusta kaan									
		2	23	02	2.01	02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perpustakaan umum yang dikembangkan	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 60, tbm = 3 (64 perpustakaan)	217.249.000	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 61, tbm = 2 (64 perpustakaan)	54.133.950	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 61, tbm = 3 (65 perpustakaan)	11.650.000	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 61, tbm = 2 (64 perpustakaan)	-	Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 61, tbm = 2 (64 perpustakaan)	-			Pustaka daerah =1, Pustaka kec=0,Pustaka nagari = 61, tbm = 2 (64 perpustakaan)	54.133.950	100,00	24,92	
		2	23	02	2.01	0011	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya					26 Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan									
		2	23	02	2.01	03	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koleksi Bahan pustaka khas perpustakaan daerah tingkat daerah kabupaten	25 judul/ 500 examplar	228.799.950	28 judul/ 680 examplar	190.915.673	2 judul/ 2 examplar	273.816.300	0 judul/ 0 examplar	0	0 judul/ 0 examplar	-			28 judul/ 680 examplar	190.915.673	136,00	83,44	
		2	23	02	2.01	0019	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan					2 examplar		0 examplar		0 examplar									
		2	23	02	2.01	04	Pembinaan Perpustakaan Pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/ Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah perpustakaan pendidikan dasar yang dibina sesuai dengan standar nasional perpustakaan	26 perpustakaan	439.377.600	91 perpustakaan	313.577.520	26 perpustakaan	79.650.000	0 perpustakaan	12.000.000	0 perpustakaan	12.000.000			91 perpustakaan	325.577.520	87,50	74,10	
							Jumlah event perlombaan perpustakaan sekolah	3 kali		2 kali		0 kali		0 kali		0 kali				2 kali		0			
		2	23	02	2.01	0004	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan					26 perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan									
		2	23	02	2.01	06	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah tenaga perpustakaan/ pustakawan yang dilatih	270 orang	392.000.000	60 orang	77.539.668	50 orang	30.500.000	0 orang	0	0 orang	-			60 orang	77.539.668	22,22	19,78	
		2	23	02	2.01	0016	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					3 orang		0 orang		0 orang									
		2	23	02	2.01	07	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka model	18 sekolah	260.000.000	6 sekolah	57.668.763	12 sekolah	21.550.000	0 sekolah	0	0 sekolah	-			6 sekolah	57.668.763	33,33	22,18	
		2	23	02	2.01	0012	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi					30 Layanan		0 Layanan		0 Layanan									
		2	23	02	2.01	001	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan				1 Dokumen	37.904.000	0 Dokumen	7.880.000	0 Dokumen	7.880.000			0 Dokumen	7.880.000	0,00	#DIV/0!		
		2	23	02	2.01	09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah penambahan koleksi perpustakaan daerah	3195 judul/ 16176 eksemplar	763.213.650	862 judul/ 3276 eksemplar	347.382.029	76 judul/ 300 eksemplar	35.000.000	0 judul/ 0 eksemplar	0	0 judul/ 0 eksemplar	-			862 judul/ 3276 eksemplar	347.382.029	20,25	45,52	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								5	6	7	8	9	10	11	12	13							
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K			K	Rp.	K	Rp.	
	2	23	02	2.01	0018		Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan					300 eksemplar		0 examplar		0 examplar							
	2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	2.586 pengunjung	2.077.499.800	9.136 pengunjung	1.642.621.472	11.000 pengunjung	948.251.000	1843 pengunjung	45.500.000	1843 pengunjung			1843 pengunjung	1.688.121.472	71,27	81,26	
							Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	13,25%		79,67%		79,67%		79,67%		79,67%			79,67%		79,67		
	2	23	02	2.02	01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat	Jumlah kunjungan pustaka kelling ke satuan pendidikan dasar, pendidikan khusus dan masyarakat	330 x kunjungan	1.037.327.300	220 x kunjungan	462.080.579	60 x kunjungan	348.164.000	0 x kunjungan		0 x kunjungan			220 x kunjungan	462.080.579	66,67	44,55	
							Jumlah event perlombaan budaya baca dan literasi	19 Kali		4 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali			4 Kali		21,05		
							Jumlah publikasi dan sosialisasi budaya baca dan literasi	19 Kali		5 Kali		1 Kali		1 Kali		1 Kali			6 Kali		31,58		
	2	23	02	2.02	001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat					60 Lokus		0 Lokus	44.700.000	0 Lokus							
	2	23	02	2.02	000	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat Kabupaten/Kota					600 Orang	298.617.000	0 orang		-	0 orang						
	2	23	02	2.02	02	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pustaka yang mendapat bantuan dan pemeliharaan sarana perpustakaan di tempat umum	12 perpustakaan	319.042.500	3 perpustakaan	682.228.000	1 perpustakaan	220.820.000	0 perpustakaan	800.000	0 perpustakaan	800.000		3 perpustakaan	683.028.000	25,00	214,09	
	2	23	02	2.02	0008		Jumlah sarana perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota					1 perpustakaan		0 perpustakaan		0 perpustakaan							
	2	23	02	2.02	04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah masyarakat yang dilibatkan dalam kegiatan layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial	360 orang	376.130.000	502 orang	412.637.799	100 orang	66.150.000	0 orang	-	0 orang	-		502 orang	412.637.799	139,44	109,71	
	2	23	02	2.02	0007		Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/ Kota yang Dikembangkan					13 Perpustakaan		0 Perpustakaan		0 Perpustakaan							
	2	23	02	2.02	05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan Pemilihan duta baca tingkat daerah Kabupaten/ Kota	4 kegiatan	345.000.000	2 Kegiatan	85.675.094	1 Kegiatan	14.500.000	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	-		2 Kegiatan	85.675.094	50,00	24,83	
	2	23	02	2.02	0006		Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatan					2 Orang		0 Orang		0 Orang							
	2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Naskah Kuno milik daerah yang dilestarikan	100%	1.037.220.000	100,00%	114.410.700	100%	65.000.000	0%	-	0%	-		100%	114.410.700	66,67	11,03	Dispusip
	2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan	100%	1.037.220.000	100%	114.410.700	100%	65.000.000	0%	-	0%	-		100%	114.410.700	66,67	11,03	
	2	23	03	2.01	01	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah naskah kuno yang dirawat, dilestarikan dan didaftarkan	12 naskah	556.180.000	8 naskah	81.685.000	2 naskah	50.000.000	0 naskah	-	0 naskah	-		8 naskah	81685000	66,67	14,69	
	2	23	03	2.01	0003		Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno					1 Orang		0 orang		0 orang							
	2	23	03	2.01	02	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah dokumen naskah kuno yang dikembangkan, diolah dan dialihmediakan untuk dilestarikan dan didayagunakan daerah	10 naskah	481.040.000	4 naskah	32.725.700	2 naskah	15.000.000	0 naskah		0 naskah	-		4 naskah	32.725.700	40,00	6,80	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													1										
							5		6		7		8					9		10			11
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
	2	23	03	2.01	0004	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan					2 Exemplar		0 exemplar		0 exemplar								
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN								67.197.210.755		28.359.436.537		6.748.564.039		958.338.966		958.338.966				29.317.775.503			

	2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			3.584.790.000		388.246.414		22.590.500	18,03%	-	18,03%	-			58,03%	388.246.414		10,83	
	2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari yang menerapkan arsip secara baku	100%	1.938.250.000	36,07%	296.671.314	40,16%	22.590.500	36,07%	-	36,07%	-			36,07%	296.671.314	36,07	15,31	DISPUSIP
	2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengolahan dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	44 Unit	820.740.000	10 Unit	204.017.764	6 Unit	10.791.500	0 Unit	-	0 Unit	-			10 Unit	204.017.764	22,73	24,86	
	2	24	02	2.01	01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah unit penataan arsip/dokumen daerah	44 unit	270.516.200	10 unit	161.823.414	6 unit	8.941.500	0 unit	-	0 unit	-			10 unit	161.823.414	22,73	59,82	
	2	24	02	2.01	0001		Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan					6800 Berkas		1525 arsip		1525 arsip								
	2	24	02	2.01	02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah peraturan penyusutan arsip	27 Peraturan	286.683.800	11 draf/ perbup	42.194.350	0 draf/ peraturan	-	0 draf perbup	-	0 draf perbup	-			11 draf/ perbup	42.194.350	40,74	14,72	
							Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan					1100 Berkas		0 berkas		0 berkas								
	2	24	02	2.01	03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah OPD/ Nagari yang dilakukan pengawasan penyelenggaraan kearsipan	61 OPD/ Nagari	263.540.000	30 OPD/ Nagari	-	15 OPD/ Nagari	1.850.000	0 OPD/ Nagari	-	0 OPD/ Nagari	-			30 OPD/ Nagari	-	98,36	-	
	2	24	02	2.01	0003		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan							
	2	24	2	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-			2 unit	7.130.000	7,41	6,24	
	2	24	2	2.02	2	Akuistisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah unit arsip yang diakuisisi	27 unit	114.190.000	2 unit	7.130.000	0 unit	0 unit	0 unit	-	0 unit	-			2 unit	7.130.000	7,41	6,24	
							Jumlah pengguna akses arsip statis per tahun	6 Pengguna		0 Pengguna		0 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0 Pengguna	0,00							
							Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis																	
	2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/ Kota	Penerapan e-Arsip Terintegrasi	1 Instansi	1.003.320.000	1 Instansi	85.523.550	1 Instansi	11.799.000	1 Instansi	-	1 Instansi	-			1 Instansi	85.523.550	66,67	8,52	
	2	24	02	2.03	01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	Jumlah kegiatan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah kab/kota Melalui JIKN	1 kali	509.320.000	1 kali	22.768.500	1 kali	9.799.000	1 kali	-	1 kali	-			1 kali	22.768.500	66,67	4,47	
							Jumlah arsip yang masuk dalam JIKN	74 arsip		7 arsip		81 arsip	38 arsip	38 arsip	38 arsip		69 arsip	93,24						
	2	24	02	2.03	0001		Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Melalui JIKN				10 Pengguna		5 Pengguna		5 Pengguna									
	2	24	02	2.03	02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah kabupaten yang dibina, dievaluasi dimonitoring dan diawasi	40	494.000.000	32 Unit	62.755.050	15 Unit	2.000.000	0 Unit	-	0 Unit	-			32 Unit	62.755.050	80,00	12,70	
							Jumlah event perlombaan kearsipan	6		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali		0 kali	0 kali	0				
	2	24	02	2.03	0002		Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				15 Laporan		0 Laporan		0 Laporan		0 Laporan							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase OPD/ Nagari dan instansi lainnya yang telah dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	100%	1.536.690.000	100,00%	91.575.100	100%	-	0%	-	0%	-		80,00%	91.575.100	66,67	5,96	DISPUSIP						
	2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	19 unit	236.121.000	7 unit	22.351.800	1 unit	-	0 unit	-	0 unit	-		7 unit	22.351.800	36,84	9,47							
	2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah unit arsip usul musnah	19 unit	142.862.000	6 unit	13.963.800																		
	2	24	03	2.01	02	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun					0 Berkas		0 Berkas		0 Berkas													
	2	24	03	2.01			Jumlah unit arsip musnah	19 unit	93.259.000	5 unit	8.388.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-		5 unit	8.388.000	26,32	8,99							
							Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan																						
	2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip akibat bencana yang berskala Kabupaten/Kota	Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip	40 instansi	236.121.000	14 instansi	22.351.800	8 instansi	-	0 instansi	-	0 instansi	-		14 instansi	22.351.800	35,00	9,47							
	2	24	03	2.02	01	Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	Jumlah kegiatan Evakuasi dan identifikasi arsip akibat bencana	19 unit	142.862.000	6 unit	13.963.800																		
							Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana					0 Berkas		0 Berkas		0 Berkas													
	2	24	3	2.02	02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah kegiatan penyelamatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana	19 unit	93.259.000	5 unit	8.388.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-		5 unit	8.388.000	26,32	8,99							
	2	24	3	2.02	0002		Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana																						
	2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/ Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	6 unit	79.816.000	3 unit	7.872.000	0 unit	-	0 unit	-	0 unit	-		3 unit	7.872.000	50,00	9,86							
	2	24	03	2.03	01	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian Serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip bernilai dari perangkat daerah yang digabungkan	6 unit	79.816.000	3 unit	7.872.000	0 unit	-	0 unit		0 unit	-		3 unit	7.872.000	50,00	9,86							
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota					0 Daftar		0 Daftar		0 Daftar													
	2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	22 kegiatan	591.308.000	6 kegiatan	38.999.500	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-		6 kegiatan	38.999.500	27,27	6,60							
	2	24	03	2.05	01	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian dan penilaian arsip statis yang dinyatakan hilang	6 kegiatan	296.970.000	2 kegiatan	16.755.000	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-		2 kegiatan	16.755.000	33,33	5,64							
							Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan					0 arsip		0 arsip		0 arsip													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								5		6		7		8		9				10		11			12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2	24	03	2.05	02	Evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan evaluasi dan penetapan hasil alih media yang dinyatakan Hilang	16 kegiatan	294.338.000	4 kegiatan	22.244.500	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-	0 kegiatan	-			4 kegiatan	22.244.500	25,00	7,56					
							Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang			0 arsip			0 arsip		0 arsip													
	2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Regulasi Izin Penggunaan arsip yang bersifat tertutup di daerah Kabupaten	100%	109.850.000	0%	-	0%	-	0%	-	0%	-			0%	-	0	-	DISPUSIP				
	2	24	04	2.01		Pelayanan Izin penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/ Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-			0 SOP	-	0	-					
	2	24	04	2.01		Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP penggunaan arsip yang dikeluarkan	5 SOP	109.850.000	0 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-	0 SOP	-			0 SOP	-	0	-					
							Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapan			0 SOP			0 SOP		0 SOP				0 SOP									
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN									3.584.790.000		388.246.414		22.590.500							388.246.414								

						URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																	
	3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA																	
	3	26	02			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			555.101.000		1.222.000.000		555.101.000	15%	85.029.000		85.029.000			1.307.029.000			DISPARPORA
	3	26	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			383.101.000		1.050.000.000		383.101.000		59.409.000	0	59.409.000		0	1.109.409.000			
	3	26	02	2.01	02	Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis paariwisata kabupaten/kota	Terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan objek wisata	5	383.101.000	4	1.050.000.000	4	383.101.000		59.409.000	0	59.409.000		4	1.109.409.000			
	3	26	02	2.02		Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			172.000.000		172.000.000		172.000.000		25.620.000	0	25.620.000		0	197.620.000			
	3	26	02	2.02	04	Pengembangan destinasi pariwisata kabupaten/kota	Terkelolanya OW dengan baik	5	172.000.000	4	172.000.000	4	172.000.000		25.620.000	0	25.620.000		4	197.620.000			
	3	26	02	2.03	03	Pengadaan/pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana dalam pengelolaan destinasi pariwisata	Terpeliharanya sarana dan prasarana kawasan objek wisata								0	0			0	0			
	3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase peningkatan pemasaran pariwisata yang berkualitas				1.966.470.000					0%	0		0%	1.966.470.000			DISPARPORA
	3	26	03	2.01		Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota					1.966.470.000												
	3	26	03	2.01	01	Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik, dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	Terlaksananya promosi wisata melalui media cetak			1	0												
	3	26	03	2.01	02	Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri pariwisata kabupaten/kota	Tersedianya fasilitas kegiatan pemasaran pariwisata			1	1.838.470.000												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
														I									
								5		6		7		8					9		10		
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	3	26	03	2,01	03	Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata Kabupaten/Kota, Baik dalam maupun luar negeri	Terjalannya kerjasama yang baik antar pelaku pariwisata			1	128.000.000												
	3	26	03	2,01	04	Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri	Terjalannya kerjasama yang baik antar pelaku pariwisata			1	0												
	3	26		05		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase peningkatan kualitas sumberdaya pariwisata yang berstandar (Pokdarwis dan Pemandu Wisata)		44.708.000		549.495.000		44.708.000		1.500.000		1.500.000			0%	550.995.000		DISPARPORA
	3	26		05	2,01	Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Dsumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Meningkatnya SDM pelaku wisata dan ekonomi kreatif		44.708.000		549.495.000		44.708.000		1.500.000		0	1.500.000			0	550.995.000	
	3	26		05	2,01	02	Fasilitasi pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata								0	0			0	0		
	3	26		05	2,01	03	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata								0	0			0	0		
						Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya SDM dalam pengembangan pariwisata	5	44.708.000	4	549.495.000	4	44.708.000	3	1.500.000	3	1.500.000			7	550.995.000		
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA									599.809.000		3.737.965.000		599.809.000		86.529.000		86.529.000				3.824.494.000		

						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN																				
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	90.357.609.611	100%	13.224.771.762	100%	13.317.627.336	25%	2.215.387.977	100%	2.215.387.977									DISTANHORBUN
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				306.982.900		134.339.300													
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			100	23.048.500	2 dokumen	15.594.000	0	0		-					23.048.500,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			100	13.281.200	1 dokumen	8.777.500	0	0		-					13.281.200,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			100	13.891.900	1 dokumen	9.647.700	0	0		-					13.891.900,00				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			100	8.885.100	1 dokumen	3.481.000	0	0		-					8.885.100,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			100	9.067.600	1 dokumen	3.781.000	0	0		-					9.067.600,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			100	70.859.800	14 laporan	21.260.700	0	4.468.000,00		4.468.000,00					75.327.800,00				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100	167.948.800	1 laporan	59.612.400	0	2.234.000,00		2.234.000,00					170.182.800,00				
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					10.602.140.762		12.009.813.239		2.215.387.977							12.777.528.839,00				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan			100	10.562.140.862	170 orang	13.626.013.780	170	2.215.387.977,00		2.215.387.977,00					12.777.528.839,00				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir			100	14.000.000	1 laporan	12.403.800	0	0		-					-				
						Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tanggapan Pemeriksaan			100	4.999.900	1 dokumen	1.849.000	0	0		-					-				
						Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Laporan Keuangan Bulanan			100	17.500.000	12 laporan	2.455.000	0	0		-					-				
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan Prognosis			100	3.500.000	2 dokumen	1.177.000	0	0		-					-				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1											
								5	Rp.	6	Rp.	7	Rp.	8	Rp.				9	Rp.	10	Rp.		11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				17.500.000		5.621.400								17.500.000						
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	100	3.000.000	1 laporan	1.700.000									3.000.000						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokymen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerahpada SKPD	100	14.500.000	1 laporan	4.179.000									14.500.000						
					Administarsi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			4.000.000		730.000									76210000						
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan Pengelolaan Retryribusi Daerah	100	4.000.000	1 Dokumen	2.125.000									4.000.000						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			76.210.000		21.595.000									76.210.000						
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah data administrasi pegawai	100	15.000.000	0 Dokumen	0									15.000.000						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Hasil Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	100	22.800.000	1 Dokumen	4.950.000									22.800.000						
					Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Aparatur yang dinilai kinerjanya	100	28.960.000	168 orang	5.240.000									28.960.000						
					Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	100	900.000	0 orang	0									900.000						
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	8.550.000	0 orang	0									8.550.000						
					Adminstrasi Umum Perangkat Daerah			665.067.000		319.432.400					2.750.000				667.817.000						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	fasilitas penerangan komponen listrik/penerangan bangunan kantor	100	22.570.000	1 paket	12.078.000					0				22.570.000						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	sarana dan perlengkapan gedung kantor/kebutuhan kantor	100	22.924.000	1 paket	10.300.000					0				22.924.000						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Facilitasi ATK Dinas, PPT dan BPP (19 gedung kantor)	100	103.427.000	1 paket	80.001.000					0				103.427.000						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Peneandaan	fasilitasi barang cetakan dan oeneadaan (19 gedung kantor)	100	96.150.000	1 paket	24.828.095					0				96.150.000						
					Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang dilayani	100	21.000.000	12 laporan	7.000.000					0				21.000.000						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	100	398.996.000	50 laporan	129.999.000			2.750.000,00		2.750.000				401.746.000						
					Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			244.000.000		0									244.000.000						
					Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100	60.000.000	0 unit	0									60.000.000						
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yng disediakan	100	30.000.000	0 unit	0									30.000.000						
					Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin lainnya yang Disediakan	100	154.000.000	3 unit	24.000.000									154.000.000						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			915.710.000		487.700.000									915.710.000						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	fasilitasi jasa surat menyurat	100	14.000.000	1 laporan	5.000.000	0	0							14.000.000						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	fasilitasi jasa komunikasi, sumber air dan listrik (19 gedung kantor)	100	163.710.000	19 laporan	146.000.000	3	9.673.797,00							163.710.000						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	100	738.000.000	47 laporan	260.400.000	0	32.800.000,00							738.000.000						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			393.161.100		338.395.997									393.161.100						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	100	318.539.100	154 unit	104.445.000	0	380.100,00							318.539.100						
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan peralatan gedung kantor	100	19.690.000	60 unit	45.190.000	0	0							19.690.000						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	pemeliharaan rutin gedung kantor (19 gedung kantor)	100	54.932.000	19 unit	49.215.000	0	320.000,00							54.932.000						
					PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	% peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	65%	114.108.950.000	100%	6.317.477.935	827.187.000	0%	0	0%	0							DISTANHORBUN			
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			3.862.807.935		819.187.000		0							3.862.807.935						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi		100	1.209.801.000	1 laporan	536.427.500								1.209.801.000									
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian		100	2.653.006.935	1 laporan	85.000.000								2.653.006.935									
					Kegiatan: Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				2.454.670.000		8.000.000					0		0	2.454.670.000									
					Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian Penyediaan Benih Sumber Varietas Banang Pulau Kelas Benih NS, BS, BD dan BP Penyediaan Benih Sumber Varietas Junjuang Kelas Benih BR Penyediaan Benih Sumber Varietas Junjuang Kelas Benih NS, BS, BD dan BP		100	212.945.000	2 Varietas unggul baru (VUB)	60.000.000								212.945.000									
					Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Jumlah pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman Penyediaan Benih Jagung Hibrida Penyediaan Benih Padi Inbrida Penyediaan Tanaman Hortikultura		100	2.241.725.000	1 Dokumen	25.000.000								2.241.725.000									
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	% penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	80%	30.657.000.000	100%	13.363.835.000	26.000.000			100%	0							DISTANHORBUN						
					Kegiatan : Pengembangan Prasarana Pertanian				568.835.000		26.000.000								568.835.000									
					Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan /LCP2B	Pengawasan Penerapan LP2B		100	169.009.500	1 Dokumen	300.000.000								169.009.500									
					Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Masterplan Pengembangan Jagung		100	399.825.500	1 Dokumen	916.873.100								399.825.500									
					Kegiatan : Pembangunan Prasarana Pertanian				12.795.000.000	0	654.030.751				6.000.000			-	12.801.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Pembangunan/Rehab JTUT		100	2.800.000.000	2 unit	200.000.000	0	0		-				2.800.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan/Rehab Embung		100	600.000.000	0 unit	0	0	0		-				600.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/Rehab Jalan Usaha Tani		100	950.000.000	4 unit	454.030.751	0	6.000.000,00		6.000.000				956.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan/Rehab DAM Parit		100	425.000.000	0 unit	0	0	0		-				425.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah BPP yang Direhab dan Dipelihara		0	1.420.000.000	0 unit	0	0	0		-				1.420.000.000									
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Pengembangan dan Penyediaan prasarana pertanian yang berkualitas		0	6.600.000.000	0 unit	0	0	0		-				6.600.000.000									
					PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	%fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	12%	10.172.830.000	100%	614.591.000	16.000.000			0%	0							DISTANHORBUN						
					Kegiatan : Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota				614.591.000		16.000.000				0			0	614.591.000	0	0							
					Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Luas Serangan OPT yang dikendalikan		100	368.827.000	3 ha	30.000.000				0				368.827.000									
					Penanganan Dampak perubahan iklim (DPI) Tanaman Pangan,Hortikultura dan Perkebunan	Luas Area terdampak perubahan iklim (DPI)		100	127.511.500	3 Ha	30.000.000				0				127.511.500									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultur, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Penanggulangan Pasca Bencana Alam		100	118.252.500	0 laporan	0			0				118.252.500										
						PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	%Penerbitan Izin Usaha Pertanian	100%	752.680.000	100%	173.858.400	8.000.000	0%	0	0%	0							DISTANHORBUN						
						Kegiatan : Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/ kota				173.858.400	8.000.000		0		0				173.858.400										
						Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Tani	Standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian		100	60.908.400	0 dokumen	0	0	0		0			100	60.908.400									
						Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izi usaha pertanian	Jumlah Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis		100	10.160.000	0 dokumen	0	1		0				100	10.160.000									
						Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi		100	102.790.000	1 laporan	25.000.000	0	0		0			100	102.790.000									
						Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor)	Persentase Penyediaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan																						
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen																						
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		12%	8.854.670.000	100%	5.923.041.310	5.677.344.900		0	0%	0			0	0			DISTANHORBUN						
						Kegiatan : Pelaksanaan Penyuluh Pertanian				5.923.041.310	5.677.344.900				12.000.000,00				5.935.041.310										
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	peningkatan penyuluh pertanian lapangan		100	1.010.230.778	13 unit	214.000.000	0	0		-			100	1.010.230.778									
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Pengembangan kelembagaan petani/ kelompok tani		100	810.782.500	0 unit	0	0	0		-			100	810.782.500									
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian		100	2.682.028.032	0 unit	0	0	0		-			100	2.682.028.032									
						Pembentukan dan peyeleenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	Jumlah SL yang terbentuk dan beroperasi		100	1.420.000.000	16 unit	652.865.100	0	12.000.000,00		12.000.000,00			100	1.432.000.000									
TOTAL DISTANHORBUN								254.903.739.611		39.617.575.407	19.872.159.236	5%	2.215.387.977	40%	2.215.387.977														
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	90.357.609.611		8.892.369.935	1	9.046.997.003	26%	2.324.960.018	26%	2.324.960.018						KESWAN						
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	398.601.293	4.050.000	1	4.050.000		1.094.000															
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	47.807.153	0	0																		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	22.990.620	0	0																		
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	23.466.945	0	0		0		0														
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	23.381.207	0	0																		
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1	24.859.719	0	0																		
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	56.206.350	4.050.000	12 Laporan	30.000.100																	
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	61.604.700	0	2 Laporan	0																	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	1	66.201.867.076	8.656.925.987	100 %	9.155.640.826		2.264.350.092		2.264.350.092			10.921.276.079		6,06								
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1	66.109.920.473	8.656.925.987	96 Orang/bulan	9.155.640.826	91 Orang/Bulan	2.264.350.092,16	98 Orang/Bulan	2.264.350.092			10.921.276.079		6,05								
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1	9.526.500	4.930.000	0	0																	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	14.353.260		3.710.000		0																
					Koordinasi dan Pelaksnaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1	12.130.410		5.605.000		0																
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	8.367.443		2.057.600		0																
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1	22.228.500		3.625.000		0																
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester an SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	1	12.670.245		3.130.000		0																
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	12.670.245		875.000		0																
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1	86.134.388		9.590.000	1	0		0														
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	10.606.170		1.735.000		0																
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1	11.431.800		2.145.000		0																
					Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1	6.986.100		1.530.000		0																
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	9.717.030		1.735.000		0																
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	8.700.870		2.445.000		0																
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersediannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	1.047.515.128	1	47.809.145	1	0		0														
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kerengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1	317.550.000		0		0																
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	51.601.875		6.440.000		0																
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1	152.512.914		41.369.145		0																
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	3.405.154.733		77.527.844	100 %	177.692.300	1.200.000		1.200.000			78.727.844		43,25								
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	1.207.595.018		6.485.000	5 Paket	0			0													
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	355.405.136		16.066.950	12 Paket	77.633.000		12 Paket	0			16.066.950		22,12								
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	177.002.370		10.546.600	12 Paket	20.468.300	2 Paket	1.200.000	12 Paket	1.200.000		11.746.600		15,07								
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	15.242.400		0		0		0	0			-		#DIV/0!								
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	47.632.500		1.560.000	12 Laporan	1.440.000		12 Laporan	0			1.560.000		30,53								
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	2.251.296.129		42.869.294	12 Laporan	78.151.000		12 Laporan	0			42.869.294		52,52								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	1	8.982.316.700		0	100 %	0		0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1	2.500.039.395		0		0																
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	720.330.000		0	1 Unit	0																
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1.165.034.200	1	49.302.545	100 %	163.562.100	22.711.126	22.711.126				72.013.671			16,18							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	22.228.500		500.000	12 Laporan	660.000			12 Laporan	0			500.000			44,46						
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	466.258.665	0,9966	36.802.545	12 Laporan	36.902.100	3 Laporan	7.111.126	12 Laporan	7.111.126			43.913.671			10,62						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	650.850.480	0,9988	12.000.000	12 Laporan	126.000.000	3 Laporan	15.600.000	12 Laporan	15.600.000			27.600.000			23,58						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpelihara	1	5.615.086.885		104.563.559	100 %	182.652.300		35.604.800		35.604.800			140.168.359			40,06						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	3.206.619.900	1	96.613.559	47 Unit	164.500.000	21 Unit	34.404.800	3 Unit	34.404.800			131.018.359			24,47						
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				7.950.000	30	18.152.300		1.200.000	18 Unit	1.200.000												
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2.236.225.206		0	1 Unit	0																
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	0,12	20.793.592.392		401.470.000	4 %	472.660.800	0%		0%	0						KESWAN						
					Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	0,12	2.429.263.851		0		0		0														
					Pengawasan Penggunaan sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1	94.991.907		0		0																
					Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1	2.334.271.944	1	0		0																
					Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan mutu dan peredaran benih/ bibit ternak dalam daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	0,12	6.015.660.849		98.494.000	8%	157.660.800		0														
					Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	1	5.765.990.337		98.494.000	36 Laporan	157.660.800																
					Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	1	249.670.512	1	0	15 Laporan	0																
					Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penggunaan Sarana Peternakan	0,12	2.026.824.372		0	2%	0		0					-									
					Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	1	94.604.496	0,9989	0		0							-									
					Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	1	496.721.872		0	36 Laporan	0							-									
					Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Tersedia	1	1.435.498.004	1	0	20 Laporan	0							-									
					Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Persentase Penyediaan Benih/ Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	0,12	10.144.974.600	0,9983	302.976.000	8%	315.000.000		2.000.000				302.976.000										

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1	44.217.180		0		0								-								
					Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya DAri Daerah Kabupaten Kota Lain	1	10.100.757.420		302.976.000		315.000.000		2.000.000						302.976.000								
					Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain						0																
					Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain						0																
					PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Penyediaan Prasarana dan Pengawasan Perizinan	0,12	42.642.927.983		21.539.200	4 %	21.551.000	0%	0	0%	0				21.539.200			1.979,78	KESWAN				
					Pembangunan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Pembangunan Prasarana Pertanian	0,12	40.695.978.617		21.539.200	4%	21.551.000		0						21.539.200			1.889,39					
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara	1	3.324.600.000		0		0								-								
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terlaksananya pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya	1	35.709.078.617		21.539.200	1 Unit	21.551.000								21.539.200			1.657,86					
					Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1	1.662.300.000		0		0								-								
					Pengembangan Lahan Pengembalaan Umum	Persentase penetapan Lahan Penggembalaan Umum yang bisa dikembangkan	0,12	1.946.949.366		0	2%	0		0						-			#DIV/0!					
					Identifikasi dan Penetapan Lahan Pengembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan Terlaksananya identifikasi dan penetapan lahan pengembalaan umum Tersedianya Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	1	1.108.200.000		0	1 Ha	0								-			#DIV/0!					
					Pengelolaan Lahan Pengembalaan Umum	Terkelolanya Luas Lahan Penggembalaan Umum yang ditetapkan				0		0																
					PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	0,12	23.562.950.273		139.215.350	2 %	80.677.700	0%	0	83%	67.218.400				206.433.750			114,14	KESWAN				
					Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah wabah penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengendalian dan penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	7.739.258.739		3.210.000	2%	34.527.800		0						3.210.000			2.410,98					
					Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	1	5.299.191.837		0		0																
					Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Wilayah yang Mengalami Penurunan Kasus Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1	1.220.033.451		0		0																
					Penanggulangan Daerah Terdampak wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1	1.220.033.451		0		0																
					Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali																						
					Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Jumlah kader zoonosis					79 Orang	0																
					Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveillans dan zoonosis pada Hewan					13 Wilayah	0																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				810.000	30 Kasus	3.928.000																
					Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis						0																
					Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota			2.400.000		12 Laporan	30.599.800																
					Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	0,12	3.500.398.107		0	2%	6.149.900																
					Penilaian Resiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	Jumlah Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan	1	1.545.979.473		0		0																
					Pengawasan Atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan Dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	1	1.072.801.394		0		6.149.900																
					Pemeriksaan Kesehatan hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1	881.617.241		0		0																
					Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM					12 Laporan	0																
					Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriks HPM																						
					Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya					10 Laporan	0																
					Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	0,12	9.247.799.067		0	2%	0		0														
					Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	1	264.074.580		0	1 Laporan	0																
					Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1	8.983.724.487		0	12 Laporan	-																
					Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner	0,12	3.075.494.360		136.005.350	2%	40.000.000		0					136.005.350		22,61							
					Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1	67.447.620		0		0																
					Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	1	3.008.046.740		0																		
					Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				136.005.350	12 Unit Usaha	40.000.000																
					PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Peningkatan, Penyediaan Prasarana Pertanian dan Pengawasan Perizinan	0,12	1.193.270.550		0	4 %	20.059.200	0%	0		0%	0											
					Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Persentase Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	0,12	1.059.782.822		0	4%	20.059.200																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	1	610.394.610		0		0																
						Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	1	44.442.216		0	600 Dokumen	20.059.200																
						Izin Usaha Pengencer (Toko, Retail, Sub Distributor)	Persentase Penyediaan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan	0,12	108.636.528		0	4%	0		0														
						Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengencer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengencer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	1	108.636.528		0		0																
						PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pembinaan Kelembagaan Petani dan Kinerja Penyuluh Pertanian	0,12	5.505.265.872		1.153.780.092	2 %	45.984.650	0%		0%	0			1.153.780.092		4,77	KESWAN						
						Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Persentase Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	0,12	5.505.265.872		1.153.780.092	2 %	45.984.650							1.153.780.092		4,77							
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan penyuluhan pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1.263.724.788		0																		
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	1.908.392.937		0		0																
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1	1.047.530.765		0																		
						Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	1	423.008.355		0																		
						Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	1	862.609.028		1.153.780.092	60 Unit	45.984.650							1.153.780.092									
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESWAN									184.055.616.680		10.608.374.577		9.687.930.353	0	2.324.960.018	25%	2.392.178.418			0%	136.005.350	0%	754%						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN									438.959.356.291		50.225.949.984		29.560.089.589	0	4.540.347.995	32%	4.607.566.395												
Faktor pendorong keberhasilan kinerja																													

	3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN																	
					Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Persentase Peningkatan Perusahaan yang dikeluarkan izinnnya		998.310.000														DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN
					Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan		98.310.000														
					Sub Kegiatan Fasilitas Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus rekomendasi TDG		98.310.000														
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi									0%	0		0%	0			DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN
					KegiatanPembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Jumlah Pasar yang Direvitalisasi																
					Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksanya Revitalisasi Pasar Nagari																
					Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Meningkatnya persentase pengelola pasar yang dilatih																
					Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pelatihan untuk pengelola pasar																
					Program Stabilisasi Harga Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Harga Barang Pokok dan Barang Penting	20%	287.860.000	5%	66.341.400		213.360.000		4.999.990		4.999.990		100%	71.341.390	500%	25	DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Kegiatan Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok & penting lainnya	9 Jenis sembako	137.860.000	9	29.943.500	25.000.000	3 Jenis sembako	535.000	3 Jenis sembako	535000		9 Jenis sembako	30478500	100 Jenis sembako	22								
						Sub Kegiatan Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Termonitornya terhadap harga dan jenis barang penting yang beredar dipasar	9 Jenis sembako	137.860.000		29.943.500	25.000.000	3 Jenis sembako	535.000	3 Jenis sembako	535000		9 Jenis sembako	30478500	100 Jenis Sembako	22								
						Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya	4 Kali	80.000.000		36.397.900	188.360.000	1 Kali	4.464.990		4.464.990			40.862.890										
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasi pasar untuk bahan kebutuhan pokok	4 Kali	80.000.000		36.397.900	188.360.000	1 Kali	4.464.990		4.464.990		2 kali	40.862.890										
						Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisda Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi		70.000.000			0							0										
						Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi		70.000.000			0							0										
						Program pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten		25.000.000													DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN							
						Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yan terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilakukan		25.000.000																				
						Sub Kegiatan Pameran dagang Lokal	Jumlah event pameran daan lokal yang diikuti		25.000.000																				
						Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisda Bersubsidi di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi	4 Kali	70.000.000																				
						Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Terlaksananya monitoring pupuk bersubsidi Terlaksananya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi	4 Kali	70.000.000																				
						Program pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan pembinaan dan pengembangan usaha produk ekspor unggulan kabupaten	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan					1 kegiatan			1 kegiatan											
						Kegiatan Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yan terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilakukan	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	-				1 kegiatan			1 kegiatan											
						Sub Kegiatan Pameran dagang Lokal	Jumlah event pameran daan lokal yang diikuti	1 Kegiatan	25.000.000	1 Kegiatan	-				1 kegiatan			1 kegiatan											
						Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase fasilitasi pelaksanaan metrologi legal berupa tera, Tera Ulang dan Pengawasan	100%	575.280.000	100%	41.972.000	26.000.000	100%	26.000.000				100%	41.972.000	100%		DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN							
						Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	13 Pasar	575.280.000	13 Pasar	41.972.000	26.000.000	3 Pasar		4 Pasar			17 Pasar	41972000	131 Pasar									
						Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Terlaksananya pelayanan tera dan tera ulang	13 Pasar	320.280.000	5 Pasar	41.972.000	26.000.000	3 Pasar		8 Pasar			7 Pasar	41972000	54 Pasar	13								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1					Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTTP yang sudah terstandardisasi	13	200.000.000							0			1	0	7,692307692								
					Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri	13															DINAS KOPERASI DAN PERDAGANGAN						
					Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	13																					
					Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat kab/ kota	Terlaksananya sosialisasi pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	13																					
					Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya promosi pemasaran produk daerah, adanya sosialisasi SRG, Adanya Gerbang promosi prosuk unggulan	13																					
					Sub Kegiatan Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Terlaksananya pengawasan UTTP yang sudah terstandardisasi	13 Pasar	200.000.000										1 Pasar		8 Pasar								
					Program Penggunaan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Promosi, pemasaran dan peningkatan penggunaan produk Dalam Negeri	100%	205.620.000	1																			
					Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi Produk Dalam Negeri yang dilaksanakan	4 Kegiatan	205.620.000																				
					Pemasaran dan peningkatan produk dalam negeri di tingkat kab/ kota	Terlaksananya sosialisasi pembinaan organisasi pedagang kaki lima dan asongan	2 Kegiatan	100.000.000	0																			
					Peningkatan sistem jaringan informasi perdagangan	Terlaksananya promosi pemasaran produk daerah, adanya sosialisasi SRG, Adanya Gerbang promosi prosuk unggulan	2 Kegiatan	105.620.000	0																			
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN								1.093.760.000	108.313.400		239.360.000	4.999.990	4.999.990			113.313.390												
	3	31	02		Program : Perencanaan dan pembangunan industri	Meningkatnya perencanaan dan pembangunan industri	100%	15.571.250.000	-	484.037.366	-	37.000.000							484.037.366			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA						
	3	31	02	2,01	Kegiatan; Penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri Kab/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab. 50 Kota	100%	15.571.250.000	-	484.037.366	-	37.000.000							484.037.366									
	3	31	02	2,01	03	Penyusunan rencana pembangunan industri Kab/Kota	1. Adanya perda RPIK 2. Terlaksananya sosialisasi perda RPIK	1 dokumen	20.000.000							-			-									
	3	31	02	2,01	05	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	1. Terlaksananya konsultasi, koordinasi dan fasilitasi terkait kegiatan dengan pemerintah pusat, provinsi serta Kab/Kota 2. Terlaksananya pelatihan fashion ready to wear 3. Terlaksananya pelatihan pembuatan gambir murni 4. Terlaksananya pelatihan peningkatan mutu makanan berbahan jeruk panen	25 merek/halal, 60 IKM	375.000.000							-			-									
	3	31	02	2,01	06	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri	11 kelompok	13.300.000.000	1 dokumen, 5 bulan	111.307.616	1 dokumen	2.000.000	-	-	-			111.307.616		0,84							
					Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	138 Merek/Halal, 340 IKM	1.975.000.000	1 dokumen, 16 IKM	320.060.950	1 dokumen	22.700.000	-	-	-	-			320.060.950		16,21							
					Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	6 dokumen	296.250.000	5 bulan, 1 dokumen	52.668.800	1 dokumen	12.300.000	-	-	-	-			52.668.800		17,78							
	3	31	03		Program : Pengelolaan sistem informasi industri nasional	Meningkatnya pengelolaan dan ketersediaan sistem informasi industri nasional	100%	2.050.020.000	-	1.223.869.179	-	128.000.000							1.223.869.179			DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	3	31	03	2,01		Kegiatan: Penyediaan Informasi untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabuatrn/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI di Kab. 50 Kota	100%	2.050.020.000	-	1.223.869.179	-	128.000.000							1.223.869.179									
	3	31	03	2,01	01	Facilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan industri serta data lain lingkup kab/kota melalui sistem informasi industri nasional (SIINas)	Jumlah fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan serta data lain lingkup Kab/Kota melalui SIINas	6 dokumen	319.180.000	24 unit izin	45.093.300	1 dokumen	4.000.000	0	-		-			45.093.300			14,13						
	3	31	03	2,01	02	Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	Facilitasi pameran/kegiatan Dekranasda, jumlah sosialisasi akses permodalan IKM, jumlah temu bisnis IKM dengan swasta/BUMN	18 event, 180 IKM, 6 kali	1.730.840.000	1 dokumen, 4 event	1.178.775.879	1 dokumen	124.000.000	0	-		-			1.178.775.879			68,10						
						Diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	Jumlah dokumen hasil diseminasi, publikasi data informasi dan analisa industri kab/kota melalui SIINas	event. 30 IKM, 1 kali																					
TOTAL PERINDUSTRIAN								100%	17.621.270.000	0%	1.707.906.545	0%	165.000.000	0%	0	0%	0			0%	1.707.906.545								

	3	32			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI																				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
		3	32	04		Program : Pengembangan kawasan transmigrasi	Meningkatnya Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	245.970.000	-	316.449.521	-	15.000.000								316.449.521				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
		3	32	04	2,01	Kegiatan: Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase Pengembangan Wilayah Transmigrasi	100%	245.970.000	-	316.449.521	-	15.000.000								316.449.521				DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA
		3	32	04	2,01	01	Penguatan SDM dalam rangka kemandirian satuan pemukiman	Jumlah sosialisasi untuk penguatan SDM transmigrasi	1 laporan	245.970.000	3 pelatihan, 44 KK	316.449.521	20 kepala keluarga	15.000.000	-	-	-				316.449.521			128,65	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGAKERJA

					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	251.978.172.617		24.865.032.466	100%	24.865.032.466	5	1.330.893.637	4%	1.327.849.637			-	26.192.882.103		10,39%	
					PERENCANAAN PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah daerah	100%	0		47.625.400	100%	47.625.400	9,58	42.264.000		42.264.000				89.889.400			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat darah	100%	0		21.252.000	5 dok	21.252.000	4 dok	30.200.000	4 dok	30.200.000				51.452.000			Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA, SKPD	100%	0		26.373.400	4 dok	26.373.400	1 dok	12.064.000	1 dok	12.064.000				38.437.400			Bagian Perencanaan dan Keuangan
					ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan Laporan OPD	100%	87.883.964.852	97%	12.257.184.522	100%	12.257.184.522	0,34%	50.718.196	0%	50.718.196			-	12.307.902.718		14,00%	
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	100%	82.031.894.951	99%	11.977.396.922	126 org/bln	11.977.396.922	126 org/bln	27.869.196	126 org/bln	27.869.196				12.005.266.118		14,63%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%	4.338.685.792	99%	137.935.400	120 dok	137.935.400	39 dok	6.063.000	93 dok	6.063.000				143.998.400		3,32%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	4 dok	439.835.489	99%	18.317.000	1 Dok	18.317.000	1 Dok	8.256.000	1 dok	8.256.000				26.573.000		6,04%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	80 dok	754.315.806	99%	103.443.700	17 Laporan	103.443.700	1 lap	8.530.000	10 lap	8.530.000				111.973.700		14,84%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					Penyusunan Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah dokumen Pelaporan Dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4 dok	319.232.814	94%	20.091.500	1 Dok	20.091.500	-	-	100%	-				20.091.500		6,29%	Bagian Perencanaan dan Keuangan
					ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Persentase tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	3.528.039.684	0%	0	100%	0	-	-	-	-			-	-		0,00%	
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase terlaksananya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	100%	2.341.631.686	0%	0	100%	0				-				-		0,00%	Bagian Umum

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					2	3	4																					
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100%	0	0%	0					-				-	0,00%	Bagian Umum						
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan	100%	768.509.358	0%	0	200 org	0	-	-					-	0,00%	Bagian Hukum						
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Peraturan PerundangUndangan	100%	417.898.640	0%	0	80 org	0	-	-					-	0,00%	Bagian Hukum						
						ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD						0	3.044.000															
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0	3.044.000															
						ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Persentase pelaksanaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	30.099.328.083	0%	1.557.344.200	100%	1.557.344.200	13%	201.983.522	14%	201.983.522		-	1.759.327.722	5,85%							
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	100%	1.013.448.637	0%	77.683.000	3 pkt	77.683.000	1 pkt	3.875.000	2 pkt	3.875.000			81.558.000	8,05%	Bagian Umum						
						Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	100%	683.721.568	0%	40.640.200	12 pkt	40.640.200	-	4.049.400	3 pkt	4.049.400			44.689.600	6,54%	Bagian Umum						
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%	10.803.857.158	0%	885.000.000	12 laporan	885.000.000	2 lap	116.009.124	4 lap	116.009.124			1.001.009.124	9,27%	Bagian Umum						
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	100%	17.598.300.720	0%	554.021.000	1 laporan	554.021.000	-	74.700.998	1 lap	74.700.998			628.721.998	3,57%	Bagian Umum						
						Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokuemen Penatausahaan Arisp Dinamin pada SKPD	100%	0	0%	0	10 dok	0	2 dok	3.349.000	3 dok	3.349.000			3.349.000								
						PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100%	44.936.214.154	0%	2.601.804.800	100%	2.601.804.800	1,484	49.490.000	1%	49.490.000		-	2.651.294.800	5,90%							
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	100%	16.108.789.417	0%	1.909.844.400	4 unit	1.909.844.400		-	0%	-			1.909.844.400	11,86%	Bagian Umum						
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan yang disediakan	100%	24.946.569.687	0%	230.279.500	4 unit	230.279.500		-	-	-			230.279.500	0,92%	Bagian Umum						
						Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	100%	3.880.855.050	0%	461.680.900	3 unit	461.680.900	-	49.490.000		49.490.000			511.170.900	13,17%	Bagian Umum						
						PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	20.320.887.551	0%	2.746.260.250	100%	2.746.260.250	6%	146.212.484	4%	146.212.484		-	2.892.472.734	-	14,23%						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	147.448.800	0%	2.000.000	1 laporan	2.000.000		500.000		500.000			2.500.000	1,70%	Bagian Umum						
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik yang disediakan	100%	7.298.491.200	0%	666.891.000	12 laporan	666.891.000	3 lap	50.524.484	6 lap	50.524.484			717.415.484	9,83%	Bagian Umum						
						Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	100%	4.387.364.326	0%	69.626.000	12 laporan	69.626.000	3 lap	7.310.000	6 lap	7.310.000			76.936.000	1,75%	Bagian Umum						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	100%	8.487.583.225	0%	2.007.743.250	12 laporan	2.007.743.250	3 lap	87.878.000	6 lap	87.878.000			2.095.621.250	24,69%	Bagian Umum						
						PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase barang milik daerah yang ber kondisi baik	100%	31.790.296.633	0%	1.718.662.500	100%	1.718.662.500	21%	355.605.605	12%	355.605.605		0%	2.074.268.105	6,52%							
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	100%	5.398.926.272	0%	295.550.000	6 unit	295.550.000	6 unit	46.878.000	6 unit	46.878.000			342.428.000	6,34%	Bagian Umum						
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	8.731.157.142	0%	863.280.000	72 unit	863.280.000	72 unit	91.735.605	72 unit	91.735.605			955.015.605	10,94%	Bagian Umum						
						Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	100%	5.077.872.616	0%	8.108.500	18 unit	8.108.500	18 unit	-	18 unit	-			8.108.500	0,16%	Bagian Umum						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8					9		10	11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
					Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	829.378.696	0%	32.230.000	4 unit	32.230.000	4 unit	5.755.000	4 unit	5.755.000			37.985.000		4,58%	Bagian Umum				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor Dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	4.207.826.048	0%	197.857.000	3 unit	197.857.000	3 unit	20.479.000	3 unit	20.479.000			218.336.000		5,19%	Bagian Umum				
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	5.042.081.875	0%	148.550.000	3 unit	148.550.000	3 unit	63.880.000	3 unit	63.880.000			212.430.000		4,21%	Bagian Umum				
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	2.503.053.984	0%	173.087.000	30 unit	173.087.000	30 unit	126.878.000	30 unit	126.878.000			299.965.000		11,98%	Bagian Umum				
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	100%	0	0%	0	10 ha	0	-	-	-	-	-		-							
					ADMINISTRASI KEUANGAN DAN OPERASIONAL KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	Persentase terlaksananya administrasi Keuangan dan Operasional KDH	100%	4.809.732.870	0%	846.509.194	100%	846.509.194	13%	105.975.900	11%	105.975.900		-	952.485.094		19,80%					
					Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Gaji Dan Tunjangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	1.177.676.464	0%	181.389.194	2 org/bln	181.389.194	2 org/bln	-	-	-	-		181.389.194		15,40%	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	231.100.000	0%	165.120.000	20 pkt	165.120.000	5pkt	58.695.900	15pkt	58.695.900			223.815.900		96,85%	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
					Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Medical Check Up bagi KDH dan Wakil KDH	100%	680.191.281	0%	100.000.000	2 org/bln	100.000.000		-		-			100.000.000		14,70%	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
					Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah orang yang menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	100%	2.720.765.125	0%	400.000.000	2 org/bln	400.000.000	2 org/bln	47.280.000	2 org/bln	47.280.000			447.280.000		16,44%	Bagian Perencanaan dan Keuangan				
					FASILITASI KERUMAHTANGGAAN SEKRETARIS DAERAH KDH dan Sekda	Persentase terpenuhinya fasilitas kerumahtanggaan KDH, Wakil KDH dan Sekda	100%	23.791.913.945	0%	1.284.586.000	100%	1.284.586.000	17%	217.246.400	15%	217.246.400		-	1.501.832.400		6,31%					
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	100%	10.740.622.618	0%	428.228.000	3 paket	428.228.000	3 paket	59.651.800	3 paket	59.651.800			487.879.800		4,54%	Bagian Umum				
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	100%	9.107.530.737	0%	267.780.000	2 paket	267.780.000	2 paket	25.227.100	2 paket	25.227.100			293.007.100		3,22%	Bagian Umum				
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	100%	3.943.760.590	0%	588.578.000	2 paket	588.578.000	2 paket	132.367.500	2 paket	132.367.500			720.945.500		18,28%	Bagian Umum				
					PENATAAN ORGANISASI	OPD yang memiliki dokumen Analisis Jabatan Persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	100%	2.584.722.107	0%	164.999.600	100%	164.999.600	-	-	0%	-	-		-	164.999.600	-	6,38%				
					Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan Dan Analisis Jabatan	100%	917.441.320	0%	46.733.100	5 dok	46.733.100	-	-	-	-	-		46.733.100		5,09%	Bagian Organisasi				
					Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	100%	461.811.789	0%	47.226.000	2 lap	47.226.000	-	-	-	-	-		47.226.000		10,23%	Bagian Organisasi				
					Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja Dan Reformasi Birokrasi	100%	325.838.151	0%	17.077.000	1 dok	17.077.000	-	-	-	-	-		17.077.000		5,24%	Bagian Organisasi				
					Monitoring, Evaluasi Dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik Dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	100%	233.745.013	0%	17.592.000	1 dok	17.592.000	-	-	-	-	-		17.592.000		7,53%	Bagian Organisasi				
					Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	100%	645.885.834	0%	36.371.500	2 dok	36.371.500	1 dok	-	1 dok	-	-		36.371.500		5,63%	Bagian Organisasi				
					PELAKSANAAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	Terfasilitasi dan Terlayaninya kegiatan KDH / WKDH	100%	2.233.072.738	0%	1.640.056.000	100%	1.640.056.000	9%	158.353.530	9,46%	158.353.530		-	1.798.409.530	-	80,54%					
					Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	100%	819.149.599	0%	1.401.156.000	360 lap	1.401.156.000	50 lap	135.385.030	100 lap	135.385.030			1.536.541.030		187,58%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
					Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	100%	691.932.063	0%	121.405.000	360 lap	121.405.000	30 lap	7.285.500	40 lap	7.285.500			128.690.500		18,60%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				
					Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	100%	721.991.076	0%	117.495.000	100%	117.495.000	20%	15.683.000	40%	15.683.000			133.178.000		18,45%	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	100%	53.807.790.686	0%	9.683.069.400	100%	9.683.069.400	1,19%	119.875.000	1%	119.875.000			-	9.802.944.400		18,22%						
					ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN	Persentase terlaksananya koordinasi bidang Pemerintahan	100%	6.725.566.103	0%	141.902.600	100%	141.902.600	0%	-	0%	-			-	141.902.600		2,11%						
					Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	100%	1.558.920.195	0%	39.194.200	4 dok	39.194.200	-	-	2 dok	-			39.194.200		2,51%	Bagian Pemerintahan						
					Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	100%	1.825.142.981	0%	29.194.000	4 dok	29.194.000	-	-	1 dok	-			29.194.000		1,60%	Bagian Pemerintahan						
					Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	100%	3.341.502.927	0%	73.514.400	6 dok	73.514.400	-	-	4 dok	-			73.514.400		2,20%	Bagian Pemerintahan						
					PELAKSANAAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	100%	40.719.675.888	0%	8.990.400.000	100%	8.990.400.000	1,28%	119.875.000	1%	119.875.000			-	9.110.275.000		22,37%						
					Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental dan Spiritual	3386 orang	34.232.391.000		8.990.400.000	12 dokumen	8.990.400.000	1 dok	119.875.000	5 dok	119.875.000			9.110.275.000		26,61%	Bagian Kesejahteraan Rakyat						
						Jumlah Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) yang terfasilitasi	5 kali																					
						Jumlah Lomba LDS Tk. Kab dan Provinsi yang dibina dan dinilai	14 LDS																					
						Jumlah pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten dan Jumlah kafilah yang terfasilitasi untuk mengikuti even MTQ Nasional Tk Provinsi	1 kegiatan																					
						Jumlah masjid/ mushalla dan lembaga keagamaan yang diberi hibah oleh Pemerintah Daerah	masid dan 5 lembaga																					
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah rapat koordinasi yang dilaksanakan dan dihadiri pada tingkat provinsi dan pusat	10 kali	1.428.637.779																				
						Jumlah UKS yang dibina dan dinilai pada sekolah untuk LSS tingkat Kab. Dan Provinsi	56 sekolah																					
						Jumlah Wirid dan Senam Pagi yang terselenggara	li wirid, 20 kali senam																					
					Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Jamaah Haji dan TPHD yang difasilitasi pemberangkatan dan pemulangannya	390 orang	5.058.647.109																				
						Jumlah masjid yang dikunjungi oleh Tim Safari Ramadhan Kabupaten	79 masjid																					
					FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase pelaksanaan fasilitas dan Koordinasi Hukum	100%	3.858.456.463	0%	277.870.300	100%	277.870.300	0%	-	0%	-			-	277.870.300		7,20%						
					Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk hukum Daerah yang disusun	100%	1.928.585.791	0%	108.287.300	300 dok	108.287.300		-	213 dok	-			108.287.300		5,61%	Bagian Hukum						
					Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	100%	1.639.299.079	0%	144.302.000	3 kasus	144.302.000		-	1 kasus	-			144.302.000		8,80%	Bagian Hukum						
					Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah produk hukum dan pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasikan	100%	290.571.594	0%	25.281.000	20 dok	25.281.000		-	10 dok	-			25.281.000		8,70%	Bagian Hukum						
					FASILITASI KERJASAMA DAERAH	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Kerjasama Daerah	100%	2.504.092.233	0%	272.896.500	100%	272.896.500	0%	-	0%	-			-	272.896.500		10,90%						
					Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah dokumen hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	100%	2.032.391.823	0%	237.966.000	16 dok	237.966.000	-	-	11 dok	-			237.966.000		11,71%	Bagian Administrasi Pembangunan						
					Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	100%	471.700.410	0%	0	1 dok	0		-	-	-			-		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan						
					Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Dokumen hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	100%		0%	34.930.500	2 lap	34.930.500	-	-		-			34.930.500		0,00%	Bagian Administrasi Pembangunan						
					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	PersentaseTerlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bidang Perekonomian	100%	8.742.982.927	0%	557.019.700	100%	557.019.700	5%	25.750.000	3%	25.750.000			-	582.769.700		6,67%						
					PELAKSANAAN KEBIJAKAN PEREKONOMIAN	Persentase Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitas bidang Perekonomian	100%	1.311.233.301	0%	148.479.000	100%	148.479.000	11%	13.200.000	7%	13.200.000			0%	161.679.000		12,33%						
					Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah dokumentasi hasil koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	1 Lap	355.521.019		39.730.000	1 Lap	39.730.000	-	4.400.000		4.400.000			44.130.000		12,41%	Bagian Perekonomian dan SDA						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Laporan Penunjang Kegiatan	1 Lap			0	1 Lap	0	-	-					-		0,00%	Bagian Perekonomian dan SDA						
					Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Lap	603.691.528		63.955.000	1 Lap	63.955.000	-	6.825.000					70.780.000		11,72%	Bagian Perekonomian dan SDA						
					Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah dokumen hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Lap	352.020.754		44.794.000	1 Lap	44.794.000	-	1.975.000					46.769.000		13,29%	Bagian Perekonomian dan SDA						
					Koordinasi,Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD				0	0		0	-	-					-		0,00%							
					PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	Persentase Pelaksanaan Administrasi Pembangunan Daerah	100%	3.195.651.644	0%	169.898.700	100%	169.898.700	0%	-	0%	-		-	169.898.700		5,32%	-						
					Fasilitasi Peyusunan Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Peyusunan Program Pembangunan	1 dok	1.627.322.951		48.100.000	1 dok	48.100.000	-	-					48.100.000		2,96%	Bagian Administrasi Pembangunan						
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	800 Data Kontra	1.473.484.089		68.798.900	1 Lap	68.798.900	-	-	1 lap	-			68.798.900		4,67%	Bagian Administrasi Pembangunan						
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	100%	94.844.605	0%	52.999.800	1 Lap	52.999.800	-	-					52.999.800			Bagian Administrasi Pembangunan						
					PENGLOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku	97%	3.233.361.356		162.500.000	100%	162.500.000	4%	7.800.000	3%	7.800.000		-	170.300.000		5,27%							
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan jasa	1 Lap	1.184.383.749		57.130.600	3 dok	57.130.600	4,07	3.000.000					60.130.600		5,08%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Lap	1.024.406.840		43.988.000	2 dok	43.988.000	2,83	1.800.000					45.788.000		4,47%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan jasa	1 Lap	1.024.570.767		61.381.400	52 org	61.381.400	2,65	3.000.000					64.381.400		6,28%	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa						
					PEMANTAUAN KEBIJAKAN SUMBER DAYA ALAM	Tersusunnya laporan sebagai penunjang kegiatan	1 Lap	1.002.736.626		76.142.000	100%	76.142.000	11%	4.750.000	4%	4.750.000		-	80.892.000		8,07%							
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman modal, Tenaga Kerja	1 Lap	466.017.412		63.259.500	1 dok	63.259.500	-	4.750.000					68.009.500		14,59%	Bagian Perekonomian dan SDA						
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup, kominfo, perhubungan, statistik, persandian	1 Lap	239.207.629		8.360.500	1 dok	8.360.500	-	-					8.360.500		3,50%	Bagian Perekonomian dan SDA						
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, pertanian	1 Lap	297.511.585		4.522.000	1 dok	4.522.000	-	-					4.522.000		1,52%	Bagian Perekonomian dan SDA						
TOTAL URUSAN BIDANG SEKRETARIS DAERAH								314.528.946.231	-	35.105.121.566		35.105.121.566		1.476.518.637		1.473.474.637			36.578.596.203									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Lancarnya administrasi Perkantoran	100%	182.310.413.721	100%	54.249.770.088	100%	22.123.010.185	18%	3.993.208.720	18%	3.993.208.720			118%	58.242.978.808			SEKWAN					
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	1.169.419.800	201%	54.741.250	100%	88.830.000	71%	0	71%	0			91%	54.741.250								
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8	123.901.800	6	8.800.000	1	16.920.000	1	0	0	0			6	8.800.000								
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	196.459.200	3	4.194.500	1	8.460.000	1	0	0	0			3	4.194.500								
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	164.514.900	3	9.275.000	1	16.920.000	0	0	0	0			3	9.275.000								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1											
								5		6		7		8					9		10	11		12	
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	240.224.400	3	9.196.250	1	21.150.000	1	0	0	0			3	9.196.250				
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	189.921.000	3	4.976.000	1	4.230.000	0	0	0	0			3	4.976.000				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6	127.299.100	3	9.684.750	1	12.690.000	1	0	0	0			3	9.684.750				
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah aporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	127.099.400	3	8.614.750	1	8.460.000	1	0	0	0			3	8.614.750				
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	23.547.078.911	252%	9.047.376.653	100%	3.840.639.256	8,76%	857.807.181	8,76%	857.807.181			87%	9.905.183.834				
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	156	21.406.874.169	832	7.757.276.003	490	2.905.017.456	108	743.207.181	108	743.207.181			940	8.500.483.184				
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	72	1.639.725.000	36	1.144.794.000	12	844.455.700	3	114.600.000	3	114.600.000			39	1.259.394.000				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28800	171.518.700	15699	108.662.500	4800	46.800.000	330	0	330	0			16029	108.662.500				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	6	104.579.700	3	11.148.000	1	8.460.000	1	0	1	0			4	11.148.000				
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	18	93.729.600	7	9.451.750	3	4.230.000	1	0	1	0			8	9.451.750				
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	78	82.927.200	39	7.369.000	13	26.857.500	3	0	3	0			42	7.369.000				
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6	47.724.542	3	8.675.400	1	4.818.600	0	0	0	0			3	8.675.400				
						Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	3.186.699.900	118%	388.176.850	100%	95.477.300		0	0%	0			59%	388.176.850				
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	6	1.076.200.000	9	276.042.660	1	70.680.000	0	0	0%	0			9	276.042.660				
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	48	766.000.000	4	74.900.900	8	12.774.800	0	0	0%	0			4	74.900.900				
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	136	1.344.499.900	1	37.233.290	18	12.022.500	0	0	0%	0			1	37.233.290				
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.271.338.700	81%	3.279.541.513	100%	797.726.700		42.776.501	0%	42.776.501			40%	3.322.318.014				
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	6	5.427.266.000	8	1.690.454.479	1	348.990.600	0	0	0	0			8	1.690.454.479				
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	6	917.789.200	8	382.642.450	1	72.321.600	0	0	0	0			8	382.642.450				
						Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan	1800	313.186.000	100	19.403.375	300	10.700.000	0	0	0	0			100	19.403.375				
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	72	2.016.922.500	36	768.179.609	12	241.675.000	3	32.530.101	3	32.530.101			39	800.709.710				
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	72	2.596.175.000	24	418.861.600	12	124.039.500	3	10.246.400	3	10.246.400			27	429.108.000				
						Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	4.755.854.400	101%	543.312.330	100%	2.078.151.900		0	0%	0			51%	543.312.330				
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4	2.276.320.000	0	0	4	1.803.700.000	0	0	0	0			0	0				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	54	35.635.434.800	23	9.549.128.994	9	1.419.077.000	3	970.404.016	3	970.404.016		26	10.519.533.010									
					Penyelenggaraan kajian Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-undangan	30	171.238.800	18	7.759.150	5	9.103.000	1	0	1	0		19	7.759.150									
					Fasilitasi penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	18	642.728.500	4	61.419.600	3	63.141.000	0	0	0	0		4	61.419.600									
					Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang disusun	6	853.708.900	201	10.351.200	1	44.810.000	1	0	1	0		202	10.351.200									
					Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	5.797.355.035	101%	307.669.950	100%	130.647.900	0	0	0%	0		101%	307.669.950									
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	12	228.588.147	6	37.000.000	2	11.250.000	0	0	0	0		6	37.000.000									
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	12	226.737.739	6	22.980.000	2	27.000.000	0	0	0	0		6	22.980.000									
					Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	6	4.670.191.987	3	46.953.050	1	22.500.000	0	0	0	0		3	46.953.050									
					Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	6	226.631.917	3	70.028.800	1	27.147.900	0	0	0	0		3	70.028.800									
					Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD per Semester	6	222.265.317	3	27.383.600	1	19.500.000	0	0	0	0		3	27.383.600									
					Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	6	222.939.928	3	103.324.500	1	23.250.000	0	0	0	0		3	103.324.500									
					Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	5.294.101.890	101%	127.859.350	100%	73.113.000	9%	0	9%	0		110%	127.859.350									
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah laporan Hasil Pengawasan urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	18	2.382.044.361	30	85.944.750	3	41.725.000	0	0	0	0		30	85.944.750									
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	18	1.870.219.827	3	1.994.000	3	3.668.000	0	0	0	0		3	1.994.000									
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	18	417.046.765	3	1.874.500	3	4.569.600	0	0	0	0		3	1.874.500									
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	18	49.259.674	3	2.308.000	3	4.177.000	0	0	0	0		3	2.308.000									
					Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	18	48.919.674	3	3.766.000	3	3.837.000	0	0	0	0		3	3.766.000									
					Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Oleh BPK	18	259.821.471	9	19.950.500	3	4.718.000	1	0	1	0		10	19.950.500									
					Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	18	219.098.044	3	8.280.000	3	6.609.400	0	0	0	0		3	8.280.000									
					Pengawasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	6	47.692.074	2	3.741.600	1	3.809.000	1	0	1	0		3	3.741.600									
					Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	31.645.582.300	101%	5.478.973.858	100%	1.189.045.400	17%	45.800.000	17%	45.800.000		118%	5.524.773.858									
					Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	1	343.401.000	1	321.547.600	0	0	0	0	0	0		1	321.547.600									
					Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	72	19.286.055.800	36	2.607.831.358	12	513.463.800	3	0	3	0		39	2.607.831.358									
					Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	144	806.997.900	0	0	2	0	0	0	0	0		0	0									
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	576	1.854.035.000	288	669.926.600	96	229.750.000	16	36.800.000	16	36.800.000		304	706.726.600									
					Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	18	1.882.960.000	9	71.160.000	3	17.700.000	0	0	0	0		9	71.160.000									
					Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	6	69.998.600	1	303.485.600	1	4.998.600	0	0	0	0		1	303.485.600									
					Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah , Publikasi dan Dokumentasi Dewan	18	7.402.134.000	9	1.505.022.700	3	423.133.000	1	9.000.000	1	9.000.000		10	1.514.022.700									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)	Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)	Realisasi Kinerja Pada Triwulan	Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)	Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
										1											
							5		6		7		8		9		10	11	12		13
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
					Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	9.832.587.700	97%	2.225.788.000	100%	790.020.000	11%	0	11%	0		108%	2.225.788.000		
					Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	72	2.240.225.300	36	101.687.100	12	30.010.000	0	0	0	0		36	101.687.100		
					Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD	72	1.282.125.000	34	71.657.500	12	21.625.000	3	0	3	0		37	71.657.500		
					Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	18	6.310.237.400	7	2.052.443.400	3	738.385.000	0	0	0	0		7	2.052.443.400		
					Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	1.174.998.800	0%	3.324.000	100%	11.372.000	50%	0	50%	0		50%	3.324.000		
					Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	6	1.030.498.800	1	0	1	4.997.000	1	0	1	0		2	0		
					Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	6	144.500.000	1	3.324.000	1	6.375.000	0	0	0	0		1	3.324.000		
					Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Pembahasan Kerjasama Daerah	100%	1.031.876.500	101%	21.067.100	100%	18.727.500	23%	0	23%	0		124%	21.067.100		
					Fasilitasi Verifikasi Dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	6	869.077.100	4	11.549.100	1	9.077.500	0	0	0	0		4	11.549.100		
					Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen bahan komunikasi dan publikasi yang disusun	72	162.799.400	36	9.518.000	12	9.650.000	3	0	3	0		39	9.518.000		
					Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	100%	64.405.863.188	101%	31.429.337.915	100%	7.320.532.200	23%	1.008.621.961	23%	1.008.621.961		124%	32.437.959.876		
					Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	72	58.640.688.800	36	28.743.648.103	12	6.430.738.000	3	802.404.484	3	802.404.484		39	29.546.052.587		
					Penyusunan laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang disusun	6	463.212.288	1	4.202.000	1	4.830.000	0	0	0	0		1	4.202.000		
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	72	219.300.500	12	20.098.300	1	6.825.200	0	6.650.000	0	6.650.000		12	26.748.300		
					Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	72	5.082.661.600	25	2.661.389.512	12	878.139.000	3	199.567.477	3	199.567.477		28	2.860.956.989		
TOTAL URUSAN BIDANG SEKRETARIS DPRD								338.841.394.134		103.475.833.205		33.196.599.185		6.018.034.697		16.385.000			109.493.867.902		
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			50.000.000		89.526.000		16.083.900		0		0			89.526.000	179%	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan yang disusun	100	50.000.000	179%	89.526.000	100	16.083.900	0%	0	0%	0		179%	89.526.000	179%	Sekretariat
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			3.800.000.000		10.914.976.484		4.916.210.383		1.224.204.572		1.224.204.572			12.139.181.056	319%	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terbayarkannya gaji, honorarium dan tunjangan pegawai	100	3.800.000.000	287%	10.914.976.484	100	4.916.210.383	25%	1.224.204.572	25%	1.224.204.572		319%	12.139.181.056	319%	Sekretariat
					Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah			20.000.000		0		0		0		0			0	0%	
					Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Tertaksananya penatausahaan barang	100	20.000.000	0%	0	100	0		0	0%	0		0%	0	0%	Sekretariat
					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			791.000.000		922.812.228		224.300.500		2.012.000		2.012.000			924.824.228	117%	
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya alat kebersihan dan pembersih	100	25.000.000	118%	29.404.580	100	8.179.000	0%	0	0%	0		118%	29.404.580	118%	Sekretariat
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100	150.000.000	125%	187.784.362	100	53.990.000	0%	0	0%	0		125%	187.784.362	125%	Sekretariat
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	100	150.000.000	124%	186.112.056	100	54.216.500	0%	172.000	0%	172.000		124%	186.284.056	124%	Sekretariat
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah kali pembayaran bahan bacaan	100	16.000.000	146%	23.312.000	100	10.395.000	0%	0	0%	0		146%	23.312.000	146%	Sekretariat
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi makan rapat dan makan tamu	100	150.000.000	37%	55.449.500	100	20.370.000	0%	0	0%	0		37%	55.449.500	37%	Sekretariat
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tertaksananya koordinasi dan konsultasi ke instansi terkait	100	300.000.000	147%	440.749.730	100	77.150.000	2%	1.840.000	2%	1.840.000		148%	442.589.730	148%	Sekretariat
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			900.000.000		88.251.932		63.000.000		0		0			88.251.932	10%	
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	100	100.000.000	0%	0	100	0	0%	0	0%	0		0%	0	0%	Sekretariat
					Pengadaan Mebel	Tersedianya mebel kantor	100	300.000.000	0%	0	100	30.000.000	0%	0	0%	0		0%	0	0%	Sekretariat
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	500.000.000	18%	88.251.932	100	33.000.000	0%	0	0%	0		18%	88.251.932	18%	Sekretariat

Tabel 163																								
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan																								
Kabupaten Lima Puluh Kota																								
No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)	Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
													1											
							1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.					K	Rp.		K	Rp.	K
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		700.000.000		1.079.817.905		145.478.000		26.691.680		26.691.680				1.106.509.585	158%					
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya benda pos dan terkirimnya surat/paket	100	25.000.000	34%	8.520.000	100	4.200.000	0%	0	0%	0		34%	8.520.000	34%			Sekretariat		
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik	Terbayarkannya telpon dan internet	100	25.000.000	313%	78.357.905	100	53.078.000	14%	7.491.680	14%	7.491.680		343%	85.849.585	343%			Sekretariat		
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarkannya honorarium dan gaji PHL	100	650.000.000	153%	992.940.000	100	88.200.000	22%	19.200.000	22%	19.200.000		156%	1.012.140.000	156%			Sekretariat		
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah		450.000.000		566.739.439		205.650.000		13.750.000		13.750.000				580.489.439	129%					
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Tersedianya dana pajak, perawatan dan operasional kendaraan dinas/operasional	100	400.000.000	131%	523.950.040	100	174.900.000	8%	13.750.000	8%	13.750.000		134%	537.700.040	134%			Sekretariat		
				Pemeliharaan Paralatan dan Mesin Lainnya	Rata-rata perbaikan peralatan kerja	100	50.000.000	86%	42.789.399	100	30.750.000	0%	0	0%	0		86%	42.789.399	86%			Sekretariat		
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		100%	15.500.000.000		6.813.187.399		494.920.700		3.210.000		3.210.000			6.816.397.399						
				Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		3.300.000.000		1.916.344.646		76.856.000		3.210.000		3.210.000				1.919.554.646	58%					
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Tersedianya dokumen kebutuhan/formasi CPNS	100	250.000.000	39%	96.319.583	100	12.242.000	0%	0	0%	0		39%	96.319.583	39%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Pelaksanaan seleksi pengadaan ASN dan PPPK	100	2.000.000.000	65%	1.296.465.168	100	34.274.000	9%	3.210.000	9%	3.210.000		65%	1.299.675.168	65%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK pensiun yang diterbitkan	100	250.000.000	105%	263.413.863	100	20.148.000	0%	0	0%	0		105%	263.413.863	105%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Fasilitas Korpri	100	350.000.000	3%	9.092.500	100	0	0%	0	0%	0		3%	9.092.500	3%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya informasi kepegawaian secara online	100	350.000.000	50%	173.634.133	100	6.653.000	0%	0	0%	0		50%	173.634.133	50%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Pengelolaan Data Kepegawaian	Adanya daftar normatif, daftar urut kepangkatan, bezteng dan data kepegawaian lainnya	100	100.000.000	77%	77.419.399	100	3.539.000	0%	0	0%	0		77%	77.419.399	77%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
				Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN		1.450.000.000		1.274.379.012		272.091.000		0		0				1.274.379.012	88%					
				Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya pelantikan dan mutasi pegawai	100	250.000.000	59%	146.635.944	100	18.330.000	0%	0	0%	0		59%	146.635.944	59%			Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
				Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya kenaikan pangkat PNS	100	200.000.000	120%	240.068.210	100	44.126.000	0%	0	0%	0		120%	240.068.210	120%			Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
				Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karir PNS	100	1.000.000.000	89%	887.674.858	100	209.635.000	0%	0	0%	0		89%	887.674.858	89%			Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
				Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		9.750.000.000		3.064.238.601		75.496.000		0		0				3.064.238.601	31%					
				Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti workshop, sosialisasi, bimbingan teknis dan diklat teknis lainnya	100	1.500.000.000	69%	1.034.417.251	100	0	0%	0	0%	0		69%	1.034.417.251	69%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Bantuan pendidikan bagi ASN tugas belajar dan terlaksananya ujian dinas dan ujian penyusunan ijazah	100	750.000.000	48%	363.654.980	100	75.496.000	0%	0	0%	0		48%	363.654.980	48%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar/diklat prajabatan	100	3.500.000.000	43%	1.492.906.805	100	0	0%	0	0%	0		43%	1.492.906.805	43%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Diklat Kepemimpinan	100	1.000.000.000	16%	162.754.565	100	0	0%	0	0%	0		16%	162.754.565	16%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Diklat Fungsional	100	3.000.000.000	0%	10.505.000	100	0	0%	0	0%	0		0%	10.505.000	0%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		1.000.000.000		558.225.140		70.477.700		0		0				558.225.140	56%					
				Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya keputusan standar dan tata cara pemberian tunjangan kinerja	100	150.000.000	39%	58.038.900	100	7.140.000	0%	0	0%	0		39%	58.038.900	39%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan sasaran kinerja pegawai	100	150.000.000	66%	99.559.243	100	16.800.000	0%	0	0%	0		66%	99.559.243	66%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Terlaksananya pemberian penghargaan satya lencana karya satya	100	150.000.000	42%	62.984.114	100	9.737.700	0%	0	0%	0		42%	62.984.114	42%			Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN		
				Pembinaan Disiplin ASN	Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan tingkat disiplin ASN	100	200.000.000	61%	121.489.283	100	17.850.000	0%	0	0%	0		61%	121.489.283	61%			Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
				Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya proses penanganan kasus pelanggaran disiplin	100	200.000.000	61%	122.662.400	100	8.405.000	0%	0	0%	0		61%	122.662.400	61%			Bidang Pengembangan dan Disiplin ASN		
				Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya proses izin perceraian	100	150.000.000	0%	93.491.200	-	10.545.000	0%	0	0%	0		62%	93.491.200	62%			Bidang Informasi, Pengadaan dan Status ASN		
TOTAL URUSAN BIDANG KEPEGAWAIAN							#REF!		#REF!		#REF!	#REF!	#REF!		#REF!			#REF!						
				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																				
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Indeks Merit Sistem Indeks Profesionalitas ASN	100%	1.500.000.000		15.290.000		19.110.000		1.825.000		1.825.000			17.115.000				BKPSDM		

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis			1.500.000.000		15.290.000		19.110.000		1.825.000		1.825.000					17.115.000							
					Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat daerah, Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya keputusan standar dan tata cara pemberian tunjangan kinerja	100	1.500.000.000		15.290.000		19.110.000	10%	1.825.000	10%	1.825.000		1%	17.115.000		1%		Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Penilaian Kinerja ASN					
TOTAL URUSAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								1.500.000.000		15.290.000		19.110.000		1.825.000		1.825.000			17.115.000									
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																							
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaksanaan penunjang urusan Pemerintah Daerah	0%	75.062.712.833	100	28.000.783.946	100,0	7.495.835.424	28	2.061.394.701	28	2.061.394.701		-	30.062.178.647	66,67%	40,05%	Inspektorat Daerah						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54 Dokumen	1.238.124.950	67	196.148.550	85,00	61.179.300	16	11.408.000	16	11.408.000		67	207.556.550	66,67%	16,76%	Inspektorat Daerah						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen Renstra, Renja, dan Renja Perubahan yang disusun	9 Dokumen	322.651.750	7	47.816.550	2	15.805.000	1	4.048.000	1	4.048.000		8	51.864.550	66,67%	16,07%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dokumen	169.081.550	4	28.789.000	1	6.703.000		0	-	-		4	28.789.000	66,67%	17,03%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	6 Dokumen	140.997.475	4	26.773.000	1	6.599.000		0	-	-		4	26.773.000	66,67%	18,99%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6 Dokumen	171.448.950	4	26.702.000	1	6.392.300		0	-	-		4	26.702.000	66,67%	15,57%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen peubahan DPA yang disusun	6 Dokumen	119.050.000	4	24.973.000	1	6.466.000		0	-	-		4	24.973.000	66,67%	20,98%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Evaluasi yang disusun (LKIP, SPIP, LKPJ, SPBE)	30 Dokumen	169.177.850	19	11.776.000	5	6.000.000	1	2.208.000	1	2.208.000		20	13.984.000	66,67%	8,27%	Inspektorat Daerah						
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (INSPEKTORAT)	Jumlah laporan triwulan pengendalian dan evaluasi	6 Dokumen	145.717.375	5/ 1	28.965.000	1	13.214.000	1	5.152.000	1	5.152.000		5	34.117.000	66,67%	23,41%	Inspektorat Daerah						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Beserta Penyusunan Laporan OPD	0,95	42.573.994.759	100	22.047.140.341	95,00	5.827.654.724	0,34	1.972.886.592		1.972.886.592			24.020.026.933	66,67%	56,42%	Inspektorat Daerah						
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (INSPEKTORAT)	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya	339 Orang	41.124.732.533	224	20.921.359.228	60	5.800.165.024	60	1.970.234.592	60	1.970.234.592		284	22.891.593.820	66,67%	55,66%	Inspektorat Daerah						
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah Dokumen SPJ yang diverifikasi	6000 Dokumen	336.885.625	3.000	9.260.000	100	5.998.000		0	-	-		3.000	9.260.000	16,67%	2,75%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen Penatausahaan Keuangan	6 Dokumen	274.411.875	0	0	0	0		0	-	-		-	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Inspektorat yang disusun	6 Laporan	245.421.200	4	29.080.000	1	7.998.000		2.652.000	-	2.652.000		4	31.732.000	66,67%	12,93%	Inspektorat Daerah						
					Pengelolaan dan Penyiaapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan (INSPEKTORAT)	Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6 Dokumen	194.521.250	4	6.264.000	1	5.491.000		0	-	-		4	6.264.000	16,67%	3,22%	Inspektorat Daerah						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan dan Semesteran yang disiapkan	108 Laporan	185.104.150	18	2.512.000	18	4.993.000		0	-	-		18	2.512.000	16,67%	1,36%	Inspektorat Daerah						
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Hasil Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	1/10	212.918.126	0	0	0	0		0	-	-		-	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Anaratur	0,95	14.625.765.896	100	2.521.346.637	95	834.522.000	0	0	-	-			2.521.346.637	66,67%	17,20%	Inspektorat Daerah						
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya (INSPEKTORAT)	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	790 stel	598.508.719	65	30.000.000	0	0		0	-	-		65	30.000.000	16,67%	5,01%	Inspektorat Daerah						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																													
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen	69.450.000	3	3.984.000	0	0	K	0	-	-		3	3.984.000	16,67%	5,74%	Inspektorat Daerah						
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (INSPEKTORAT)	Jumlah APIP yang Mengikuti Pelatihan, Ujian Fungsional, Bimtek, Workshop, Sosialisasi	445/200	7.373.132.745	265	1.663.543.697	90	615.000.000		0	-	-		265	1.663.543.697	66,67%	22,56%	Inspektorat Daerah						
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (INSPEKTORAT)	Jumlah Peserta Sosialisasi	1050 Orang	2.422.295.833	257	633.821.520	150	134.522.000		0	-	-		257	633.821.520	66,67%	26,17%	Inspektorat Daerah						
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (INSPEKTORAT)	Jumlah APIP yang Mengikuti Bimbingan Teknis dan Pemantapan (INSPEKTORAT)	170/3	4.162.378.599	60	136.095.000	1	85.000.000		0	-	-		60	136.095.000	16,67%	3,27%	Inspektorat Daerah						
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	0,95	6.709.427.251	100	1.489.973.383	95,00	263.571.400	5,76	15.993.100	6	15.993.100			1.505.966.483	66,67%	22,45%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (INSPEKTORAT)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	6/ 20/ 144	406.503.125	6	18.389.500	48	5.000.000		0	-	-		6	18.389.500	16,67%	4,52%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (INSPEKTORAT)	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	3/ 60/ 96	904.921.876	33	258.853.600	32	17.000.000		0	-	-		33	258.853.600	66,67%	28,61%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (INSPEKTORAT)	Jumlah Jenis Alat perlengkapan kantor dan bahan kegiatan kantor lainnya	63/ 102	376.386.375	54	29.568.091	30	3.994.400		0	-	-		54	29.568.091	66,67%	7,86%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor (INSPEKTORAT)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	205	536.477.200	65	153.976.600	35	27.748.000	1	120.000	1	120.000		66	154.096.600	66,67%	28,72%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (INSPEKTORAT)	Jumlah barang cetakan yang disediakan	24/ 15.000	407.836.175	20	162.143.182	0	0		0	-	-		20	162.143.182	66,67%	39,76%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (INSPEKTORAT)	Jumlah Bahan Bacaan, Buku Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	1100/ 100/ 36	181.568.125	1.100	1.050.000	12	2.000.000		0	-	-		1.100	1.050.000	16,67%	0,58%	Inspektorat Daerah						
						Fasilitasi Kunjungan Tamu (INSPEKTORAT)	Jumlah tamu yang dilayani	11600	772.121.875	1.622	106.926.889	1.200	10.500.000	200	1.955.000	200	1.955.000		1.822	108.881.889	66,67%	14,10%	Inspektorat Daerah						
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (INSPEKTORAT)	Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	50/ 400/ 150	3.123.612.500	62	758.665.521	50	197.329.000	3	13.918.100	3	13.918.100		65	772.583.621	66,67%	24,73%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0,95	4.294.013.000	90	146.956.000	95	41.400.000		0	-	-			146.956.000	66,67%	2,82%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (INSPEKTORAT)	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	27	2.438.012.500	0	0	0	0		0	-	-		-	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Mebel (INSPEKTORAT)	Jumlah Jenis Mebel yang Diadakan	1/ 12	1.349.307.500	2	146.956.000	0	0		0	-	-		2	146.956.000	33,33%	10,89%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen DED Pembangunan gedung kantor	2	281.693.000		0	1 Paket	41.400.000			-	-		-	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perengkapan gedung kantor	3	225.000.000		0	1	41.400.000		0	-	-		-	-	0,00%	0,00%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Dokumen DED Pembangunan gedung kantor			3	751.300.073					-	-				66,67%	43,73%	Inspektorat Daerah						
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Baneunan Lainnya	Jumlah Perengkapan gedung kantor			1.997	8.919.000					-	-				50,00%	14,19%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.809.676.250	66	751300073	95	234.720.000	16	40.022.900	16	40.022.900			791.322.973	66,67%	43,73%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat (INSPEKTORAT)	Jumlah Pengiriman Surat dan Dokumen	8850	62.838.750	10	8.919.000	1.800	1.020.000		0	-	-		10	8.919.000	16,67%	0,46%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (INSPEKTORAT)	Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan (zoom meeting)	24	0		162.901.073	12	34.500.000	3	1.602.900	3	1.602.900		3	164.503.973	66,67%	#DIV/0!	Inspektorat Daerah						
							Jumlah rekening tagihan telepon/ fax yang dibayarkan	12 Rekening	0		0					-	-		-	-	66,67%	0,00%	Inspektorat Daerah						
							Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	12 Bulan	526.070.000	2	1.068.755					-	-		2	1.068.755	66,67%	39,47%	Inspektorat Daerah						
							Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	36.000 KWH	0	4	35.778.500					-	-		4	35.778.500	66,67%	10,18%	Inspektorat Daerah						
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (INSPEKTORAT)	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia	12 Bulan	1.220.767.500	81	579.480.000	12	199.200.000	3	38.420.000	3	38.420.000		84	617.900.000	66,67%	35,41%	Inspektorat Daerah						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.872.473.750	80	864.018.962	100	232.788.000	9,06	21.084.109	9	21.084.109			885.103.071	66,67%	30,82%	Inspektorat Daerah						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan (INSPEKTORAT)	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	265	1.895.258.125	177	592.696.234	45	198.600.000	4	21.084.109	4	21.084.109		181	613.780.343	66,67%	35,17%	Inspektorat Daerah						
						Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya									-	-				66,67%	43,04%	Inspektorat Daerah						
						Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara									-	-				66,67%	38,66%	Inspektorat Daerah						
						Jumlah Unit Pemeliharaan Mebel	3	90.000.000	4	410.000	1	1.056.000			-	-		4	410.000	66,67%	46,28%	Inspektorat Daerah						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (INSPEKTORAT)	Jumlah bangunan gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	6	548.870.000	117	216.628.056	1	26.532.000		0	-	-		117	216.628.056	66,67%	39,22%	Inspektorat Daerah						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (INSPEKTORAT)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	3/5	338.345.625	16	34.437.000	1	6.600.000		0	-	-		16	34.437.000	66,67%	8,17%	Inspektorat Daerah						
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB di Wilayah I, II, III, IV	86%	20.617.179.761	8	7.013.213.822	83,0	3.421.616.000	6,95	286.550.000	7	286.550.000			7.299.763.822	66,67%	35,41%	Inspektorat Daerah						
					Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Terlaksananya Pengawasan Internal	0,8	16.324.337.261	95	5.634.979.790	80,0	2.996.608.000	7,01	262.700.000	7	262.700.000			5.897.679.790	66,67%	36,13%	Inspektorat Daerah						
					Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT)	LHP Kinerja dan LHE yang diterbitkan	384	3.185.937.500	4	133.590.700	4	375.000.000	1	18.450.000	1	18.450.000		178	152.040.700	66,67%	4,77%	Inspektorat Daerah						
					Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah (INSPEKTORAT)	LHP yang diterbitkan	104	3.156.447.500	73	1.246.843.332	20	750.000.000	2	78.600.000	2	78.600.000		76	1.325.443.332	66,67%	41,99%	Inspektorat Daerah						
					Reviu Laporan Kinerja (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	510	3.397.598.136	3	1.212.077.622	115	675.000.000	3	52.200.000	3	52.200.000		373	1.264.277.622	66,67%	37,21%	Inspektorat Daerah						
					Reviu Laporan Keuangan (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Reviu yang Diterbitkan	54	234.198.125	95	312.941.325	1	52.050.000	1	21.800.000	1	21.800.000		5	334.741.325	66,67%	142,93%	Inspektorat Daerah						
TOTAL					Pengawasan Desa (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Kerjasama Pengawasan Internal yang Dilaksanakan	170	2.387.391.000	129/4	205.616.925	20	655.200.000	2	51.450.000	2	51.450.000		119	257.066.925	66,67%	10,77%	Inspektorat Daerah						
					Kerjasama Pengawasan Internal (INSPEKTORAT)	Jumlah kegiatan kerjasama pengawasan internal	22	984.928.250	4	107.324.400	4	188.158.000	1	1.250.000	1	1.250.000		17	108.574.400	66,67%	11,02%	Inspektorat Daerah						
					Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP (INSPEKTORAT)	Monitoring dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Dilaksanakan	18	2.977.836.750	95	899.136.297	4	301.200.000	2	39.150.000	2	39.150.000		10	938.286.297	66,67%	31,51%	Inspektorat Daerah						
					Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95	4.292.842.500	95	1.380.434.032	95	425.008.000	5	23.850.000	5	23.850.000			1.404.284.032	66,67%	32,71%	Inspektorat Daerah						
					Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah yang Dilaksanakan	14	1.233.962.500	4	133.590.700	4	75.008.000		0	-	-		4	133.590.700	66,67%	10,83%	Inspektorat Daerah						
					Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu (INSPEKTORAT)	Jumlah Laporan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu yang diterbitkan	240	3.058.880.000	73	1.246.843.332	40	350.000.000	2	23850000	2	23.850.000		75	1.270.693.332	66,67%	41,54%	Inspektorat Daerah						
					PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Kapabilitas APIP	Level 4	6.142.966.000	3	1.212.077.622	3	381.013.000	3%	34.950.000		34.950.000			1.247.027.622	66,67%	20,30%	Inspektorat Daerah						
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	0,95	1.661.449.550		312.941.325	95	106.108.000			-	-			312.941.325	66,67%	18,84%	Inspektorat Daerah						
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	258	881.218.750	129 OPD	205.616.925	43	60.322.000			-	-			205.616.925	66,67%	23,33%	Inspektorat Daerah						
					Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	6	780.230.800	4 Dokumen	107.324.400	1	45.786.000			-	-			107.324.400	66,67%	13,76%	Inspektorat Daerah						
					Pendampingan dan Asistensi	Persentase Terlaksananya kegiatan Pendampingan dan Asistensi	95	4.481.599.150	0,95	899.136.297	95	274.905.000	12%	34.950.000		34.950.000			934.086.297	66,67%	20,84%	Inspektorat Daerah						
					Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan yang Dilaksanakan	5	811.408.875	2	190.163.000	1	50.108.000	1	13650000	1	13.650.000		2	203.813.000	66,67%	25,12%	Inspektorat Daerah						
					Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan Pendampingan yang Dilaksanakan	10	1.509.412.750	2	258.433.259	2	50.142.000		0	-	-		6	258.433.259	66,67%	17,12%	Inspektorat Daerah						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
													I									
							5		6		7		8					9		10	11	
1					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.		
					Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang Dilaksanakan	5	946.439.625	2	282.280.859	1	124.216.000	1	21300000	1	21.300.000	3	303.580.859	66,67%	32,08%	Inspektorat Daerah	
					Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas (INSPEKTORAT)	Jumlah Kegiatan Penegakan Integritas yang Dilaksanakan	5	1.214.337.900	2	168.269.179	1	50.439.000		0	-	-	2	168.269.179	66,67%	13,86%	Inspektorat Daerah	
TOTAL URUSAN BIDANG PENGAWASAN								101.822.858.594		36.226.075.390		11.298.464.424		2.382.894.701	-	2.382.894.701		-	38.608.970.091	67%	31,92%	

7	01				KECAMATAN																	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	72%	12.882.228.385	48	6.450.147.748	12%	1.704.412.830	3%	355.396.908	3	355.396.908		51	6.805.544.656	70,83	52,83	KEC AKABILURU
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru		144.595.000		22.608.500		7.356.000		0	3	-		51	22.608.500	70,83	15,64	KEC AKABILURU
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah RENSTRA, RENJA	72	15.095.000	48	4.956.000	12	3.662.000	3%	0	3	-		51	4.956.000	70,83	32,83	
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	72	15.125.000	24	2.075.000	12	0	3%	0	3	-		27	2.075.000	37,50	13,72	
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	72	15.125.000	24	2.075.000	12	0	3%	0	3	-		27	2.075.000	37,50	13,72	
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERUBAHAN RKA	72	14.250.000	24	2.177.000	12	0	3%	0	3	-		27	2.177.000	37,50	15,28	
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	72	14.250.000	24	2.172.000	12	0	3%	0	3	-		27	2.172.000	37,50	15,24	
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	72	70.750.000	48	9.153.500	12	3.694.000	3%	0	3	-		51	9.153.500	70,83	12,94	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	PERUBAHAN DPA	72	9.177.635.085	24	5.617.226.202	12	1.544.348.830	3%	340.630.908	3	340.630.908		51	5.957.857.110	70,83	64,92	KEC AKABILURU
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	72	8.989.007.085	48	5.606.320.202	12	1.540.032.830	3	340.630.908	3	340.630.908		51	5.946.951.110	70,83	66,16	
7	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	LKJIP,LKPI,LPPD, SPIP, SAKIP dan LAKIP	72	17.514.000	48	2.785.000	12	4.316.000	3	0	3	-		51	2.785.000	70,83	15,90	
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	18.957.000	24	2.378.000	12	0	3	0	3	-		27	2.378.000	37,50	12,54	
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semes teran SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	72	136.151.000	24	4.078.000	12	0	3	0	3	-		27	4.078.000	37,50	3,00	
7	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Pembayaran Gaji PNS, tambahan penghasilan PNS, Honorium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	70	16.006.000	24	1.665.000	12	0	3	0	3	-		27	1.665.000	38,57	10,40	
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen SPJ	72	70.151.900	48	14.056.000	12	2.422.000	3	0	3	-		51	14.056.000	70,83	20,04	KEC AKABILURU
7	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	72	70.151.900	48	14.056.000	12	2.422.000	3	0	3	-		51	14.056.000	70,83	20,04	
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Laporan Keuangan	72	47.999.200	48	9.220.000	12	2.450.000	3	0	3	-		51	9.220.000	70,83	19,21	KEC AKABILURU

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								5		6		7		8					9		10			11	
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	7		01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD Laporan Realisasi Fisik da Keuangan Bulanan, Lapor Pertanggung Jawaban Bu (SPJ Fungsional) dan Hon Pegawai Kontrak	72	24.000.000	48	7.500.000	12	0	3	0	3	-		51	7.500.000	70,83	31,25			
	7		01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	72	23.999.200	48	1.720.000	12	2.450.000	3	0	3	-		51	1.720.000	70,83	7,17			
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan Prognosis	72	949.063.700	48	236.999.496	12	38.224.000	3%		3	-		51	236.999.496	70,83	24,97			
	7		01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	32.998.000	48	5.050.000	1200 %	1.280.000	3	0	3	-		51	5.050.000	70,83	15,30			
	7		01	2.06	02	Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Pelaksanaan Jasa, Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBBMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	72	212.500.000	12	7.500.000	12		3	0	3	-		15	7.500.000	20,83	3,53			
	7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	96.299.900	48	48.195.500	1200 %	6.564.000	3	0	3	-		51	48.195.500	70,83	50,05			
	7		01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DUK, Karis, Karsu, Taspem, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	72	63.568.800	48	13.271.100	12	3.885.000	3	0	3	-		51	13.271.100	70,83	20,88			
	7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	62.005.000	24	3.285.000	1200 %	0	3		3	-		27	3.285.000	37,50	5,30			
	7		01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik	72	481.692.000	48	159.697.896	12	26.495.000	3	0	3	-		51	159.697.896	70,83	33,15			
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Alat tulis kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	72	980.700.000	48	42.227.000		21.000.000		0	3	-		51	42.227.000	70,83	4,31	KEC AKABILURU		
	7		01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Per	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan Penggandaan surat- surat Dinas	72	298.500.000	48	0	12	21.000.000	3	0	3	-		51	-	70,83	0,00			
	7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu Terfasilitasinya Tamu	72	159.700.000	48	0	12	0	3	0	3	-		51	-	70,83	0,00			
	7		01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	72	122.500.000	48	0	12	0	3	0	3	-		51	-	70,83	0,00			
	7	01	01	2.07	07	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		72	400.000.000		42.227.000			3		12	-								
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	72	569.285.500	24	242.992.600	12	21.262.000	25%	5.266.000	3	5.266.000		51	248.258.600	70,83	43,61	KEC AKABILURU		
	7		01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	9.450.000	48	1.160.000	1200 %	500.000	3	0	3	-		51	1.160.000	70,83	12,28			
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Materai Rp. 10.000	72	65.830.000	48	74.160.600	12	6.762.000	3	1.266.000	3	1.266.000		51	75.426.600	70,83	114,58			
	7		01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar	72	82.760.000	48	2.740.000	12		3		3	-		51	2.740.000	70,83	3,31			
	7		01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang	72	411.245.500	48	164.932.000	12	14.000.000	3	4.000.000	3	4.000.000		51	168.932.000	70,83	41,08			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Akabiluru	72	942.798.000	24	264.817.950	12	67.350.000	14%	9.500.000	3	9.500.000		51	274.317.950	70,83	29,10	KEC AKABILURU						
	7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	72	442.600.000	48	236.270.950	12	63.900.000	3	9.500.000	3	9.500.000		51	245.770.950	70,83	55,53						
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	72	63.970.000	48	13.915.000	12	3.450.000	3	0	3	-		51	13.915.000	70,83	21,75						
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	72	333.128.000	48	14.632.000	1200 %	0	3	0	3	-		51	14.632.000	70,83	4,39						
	7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kepuasan Masyarakat	72	103.100.000	48	0		0	3		12	-		60	-	83,33	0,00						
	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan PATEN	72%	164.019.600	48	7.732.200	12%	930.000	3	0	3	-		51	7.732.200	70,83	4,71	KEC AKABILURU					
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Nagari yang meningkat partisipasi masyarakatnya	72	42.065.000	48	1.715.000	12 %	0	3		3	-		51	1.715.000	70,83	4,08	KEC AKABILURU					
	7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	lah Nagari yang berstatus maju dan berkembang	72	42.065.000	48	1.715.000	12	0	3	0	3	-		51	1.715.000	25,00	4,08						
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Musrenbang Tingkat Kecamatan	72	121.954.600	48	6.017.200	12	930.000	3	0	3	-		51	6.017.200	70,83	4,93	KEC AKABILURU					
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring	72	121.954.600	48	6.017.200	12	930.000	3		3	-		51	6.017.200	70,83	4,93						
	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		72%	444.255.000	48	148.875.200	12	12.462.000	3	700.000	3	700.000		51	149.575.200	70,83	33,67	KEC AKABILURU					
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	72	344.255.000	48	134.913.700	12	8.140.000	3	700.000	3	700.000		51	135.613.700	70,83	39,39	KEC AKABILURU					
	7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda di Kecamatan	72	70.061.000	48	19.112.500	12	5.810.000	3	700.000		3	700.000		51	19.812.500	70,83	28,28					
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terjaganya Hubungan Baik dengan Tokoh Agama dan Masyarakat	72	274.194.000	48	115.801.200	1200 %	2.330.000	3	0	3	-		51	115.801.200	70,83	42,23						
	7	01	03	2.01		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat	72	100.000.000	24	13.961.500	12	4.322.000	3	0	3	-		51	13.961.500	70,83	13,96	KEC AKABILURU					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	7	01	03	2.01	01	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat		72	100.000.000	48	13.961.500	12	4.322.000	3	0	3	-		51	13.961.500	70,83	13,96							
	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		72%	261.920.000	48	7.720.000	12	0			3	-		51	7.720.000	70,83	2,95	KEC AKABILURU						
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	72	66.020.000	48	6.005.000	12	0			3	-		51	6.005.000	70,83	9,10	KEC AKABILURU						
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase nagari yang berkinerja baik	72	54.000.000	48	0					-			48	-	66,67	0,00							
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Produk Hukum Nagari	72	12.020.000	48	6.005.000	12 %	0	3		3	-		51	6.005.000	70,83	49,96							
	7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Pengakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	72	195.900.000	48	1.715.000	12	0			12	-		60	1.715.000	83,33	0,88	KEC AKABILURU						
	7	01	04	2.02	01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	72	195.900.000	48	1.715.000	12	0	3	0	12	-		60	1.715.000	83,33	0,88							
	7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	72%	147.707.500	24	74.582.900	12	46.850.000	5%	2.250.000	5%	2.250.000		2.250.000				KEC AKABILURU						
	7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		72	147.707.500	48	74.582.900	12	46.850.000	3	2.250.000	3	2.250.000		51	76.832.900	70,83	52,02	KEC AKABILURU						
	7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional		72	60.000.000	48	0	12	6.100.000	3	0	3	2.250.000		51	76.832.900	70,83	52,02							
	7	01	05	2.01	08	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		72	45.000.000	48	14.280.000	12	0	3	0	3	-		51	-	70,83	0,00							
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		72	42.707.500	48	60.302.900	#REF!	40.750.000	3	2.250.000	3	-		51	14.280.000	70,83	31,73							
	7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	72	591.350.000	48	16.505.000	12	3.960.000	3	0	3	0		51	16.505.000	70,83	2,79	KEC AKABILURU						
	7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu	72	591.350.000	48	16.505.000	12	3.960.000	3	-	3	-		51	16.505.000	70,83	2,79	KEC AKABILURU						
	7	01	06	2.01	01	Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari	72	40.910.000	48	2.800.000	12	-	3	-	3	-		51	2.800.000	70,83	6,84							
	7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi	72	40.610.000	48	1.715.000	12	2.330.000	3	-	3	-		51	1.715.000	70,83	4,22							
	7	01	06	2.01	03	Fasitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Supervisi dan pengawasan dana desa	72	40.900.000	48	-	12	-	3	-	3	-		51	-	70,83	0,00							
						Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Supervisi dan pengawasan tugas Wali	72	60.000.000	48	-	12	-	3	-	3	-		51	-	70,83	0,00							
	7	01	06	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari	72	250.000.000	48	-	12		3	-	3	-		51	-	70,83	0,00							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														1											
								5		6		7		8					9		10			11	
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
	7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum	72	36.000.000	48	-	12	1.630.000	3	-	3	-			51	-	70,83	0,00		
	7	01	06	2.01	13	Fasitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	72	40.905.000	48	3.780.000	12	-	3	-	3	-			51	3.780.000	70,83	9,24		
	7	01	06	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi	72	41.115.000	48	1.610.000	12		3	-	3	-			51	1.610.000	70,83	3,92		
	7	01	06	2.01	18	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari	72	40.910.000	48	6.600.000	12	-	3	-	3	-			51	6.600.000	70,83	16,13		
TOTAL KECAMATAN AKABILURU								72	14.065.540.885	168	6.690.110.848	36	1.767.684.830	6	358.346.908	9	358.346.908			153	6.973.874.856	70,83	48,75		
UNSUR KEWILAYAHAN																									
KECAMATAN																									
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak	100%	2.079.390.000	100%	1.204.531.504	100%	1.720.097.793	18%	302.896.120	98%	1.690.614.562			198%	3.410.712.355				
						Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		17.850.000		1.467.000		2.022.000	3	378.000										
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA		2.200.000		1.017.000		1.001.000	0											
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA		1.750.000		0		1.021.000	0						0		0			
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	RKA		1.750.000		0														
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA		2.100.000		0														
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA		1.650.000		0			3											
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ		5.800.000		450.000														
						Evaluasi Kinerja Perangkat Derah			2.600.000		0														
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		1.664.040.000		1.100.311.424		1.480.457.464	3	275.997.820										
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK		1.650.000.000		1.098.619.024		1.480.457.464	3	400.913.323					1.098.619.024		66,58			
						Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SPJ Fungsional		7.040.000		1.692.400														
						Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan		2.900.000		0			0											
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semester SKPD			2.000.000		0														
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			2.100.000		0														
						Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		3.200.000		0														
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	komponen instalasi listrik		3.200.000		0														
						Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		5.300.000		0														
						Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	komponen instalasi listrik		0		0														
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	komponen instalasi listrik		5.300.000		0														
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		182.000.000		11.052.600		43.970.500	3											

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		3.200.000		522.000		2.000.000	0						522.000		16,31							
					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		45.800.000		0		2.000.000							0		0							
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		10.500.000		4.335.000		6.996.000	3						4.335.000		41,29							
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas		12.500.000		2.070.600		5.724.500	3						2.070.600		16,56							
					Penyediaan Bahan Bacaan	Koran		0		0		-							0									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman		110.000.000		4.125.000		27.250.000	3						4.125.000		3,75							
					Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		65.000.000		0																		
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas labatan	Kendaraan Dinas Roda 2		0		0																		
					Pengadaan Mebel	Lemari dan Kursi Pimpinan		20.000.000		0																		
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			45.000.000																				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		91.000.000		39.685.480		20.680.000	3	3.450.150														
					Penyediaan jasa surat menyurat	Matrai Rp 10.000,-		2.000.000		0		600.000																
					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik		12.000.000		2.802.000		2.080.000	3	450.150					2.802.000		23,35							
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang		77.000.000		36.883.480		18.000.000	3	3.000.000					36.883.480		47,90							
					Belanja Alat/untuk Kegiatan Kantor- Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya			0		0																		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Guguak		51.000.000		52.015.000		69.550.000	3	8.950.000														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		46.500.000		49.255.000		64.900.000	3	8.950.000					49.255.000		105,92							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi		4.500.000		2.760.000		4.650.000	0	0														
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Loteng dan keramik Kantor		0		0				0														
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	75.000.000	100%	2.875.000		1.355.000		0	0%	0		5	2.875.000									
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		75.000.000		2.875.000		1.355.000	3	0														
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		75.000.000		2.875.000		1.355.000	3		5	0		5	2.875.000		3,83							
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	80%	106.000.000	100%	4.137.500		83.362.500		0	0%	0		5	4.137.500									
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		106.000.000		4.137.500		4.375.000	3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan						4.375.000	3															
TOTAL					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring		92.500.000		0			3															
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan				5.000.000		4.399.500																
					Peningkatan dan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya saing					5.000.000		4.399.500																
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	62.700.000																				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		17.500.000																				
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Pelaksanaan rapat dan koordinasi		17.500.000																				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		107.800.000	100%	27.000.000																		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		107.800.000		0		27.000.000																
					Fasilitasi,koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman		35.000.000																				
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Urusan Pemerintah Umum		55.000.000																				
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Pelaksanaan rapat dan koordinasi		17.800.000		27.000.000		27.000.000	0															
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		275.797.500	100%	4.987.500			0															
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		275.797.500		4.987.500			3	0														
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa			3.500.000																				
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi		13.500.000		1.500.000			0	0														
					Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa		34.500.000		0				0														
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Daerah			35.400.000																				
					Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala Desa	pemilihan wali nagari		105.000.000		0				0														
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa			12.500.000																				
					Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	monotoring dan evaluasi		26.797.500		0				0														
					Fasitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu		73.000.000		2.737.500			3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13					
					Koordinasi pendampingan desa diwilayahnya	Rapat monitoring dan evaluasi	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan pemerintah Nagari		10.500.000		750.000				0														
								12.500.000		0																		
								2.706.687.500		1.243.531.504			1.666.209.464	4%	413.313.473	24,81	413.313.473				1.656.844.977							
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP						1.532.883.550	11%	172.869.568	98%	1.505.754.632								KEC BUKIT BARISAN				
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD						12.921.000	3	432.000														
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA						3.493.000	3	432.000	12,37	432.000				432.000		72000						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA						0	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA						1.180.000	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA						1.970.000	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA						1.940.000	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP						4.338.000	0	0														
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						1.333.220.531	9	250.856.939	27	250.856.939		0	250.856.939	0	41.809.490							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK						1.325.180.531	3	250.186.939	18,88	250.186.939			250.186.939		41697823,17							
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ						8.040.000	3	670.000	8,33	670.000			670.000		111666,6667							
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan						0	3	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Triwulan SKPD	Laporan Keuangan/rekon						0		0														
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						8.040.000	3	670.000														
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMd, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD						8.040.000	3	670.000	8,33	670.000			670.000		111666,6667							
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						0	3	0														
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP						1.000.000	3	0														
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						20.055.701	3	0														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik						0	3	0														
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus						0	0	0														
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor						0	3	0														
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas						3.000.000	3	0														
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang Undangan							0	3	0														
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman						17.055.701	3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						26.297.298	0	0														
						Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan						0	0	0														
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Alat Studio dan Komputer						26.297.298	3	0														
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						3.135.000	3	216.136														
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-						0	3	0														
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar						3.135.000	3	216.136	6,89	216.136		216.136		36022,66667								
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kebersihan							3	0														
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Bukik Barisan						71.840.000	3	7.991.100														
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak , dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2						68.750.000	3	7.991.100	11,62	7.991.100		7.991.100		1331850								
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi						3.090.000	3	0														
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	201.000.000				48.000.000	17%	8.000.000	16,67	8.000.000		8.000.000		1333333,333		KEC BUKIT BARISAN						
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat						48.000.000	3	8.000.000														
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN						48.000.000	3	8.000.000	16,67	8.000.000		8.000.000		1333333,333								
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan	80%	246.470.000				15.406.000	0	0	0%	0						KEC BUKIT BARISAN						
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan						11.756.000	3	0														
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan						5.036.000	3	0														
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, pembayaran jasa operator komputer						6.720.000	3	0														
						Pemberdayaan DAN Kesejahteraan Keluarga Tk. Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Bukik Barisan						3.650.000																
						Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masy. Akan Pentingnya Penghatayan dan Pengamalan Pancasila	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Keluarga dan Kesadaran Masyarakat						3.650.000																
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	57.570.000				0	0	0								KEC BUKIT BARISAN						
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						0	3	0														
						Harmonisasi Hubungan Dengan tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi Jembaqa dan tokoh keagamaan						0	3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								5		6		7		8		9				10		11			12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13				
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							0	0													
						Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat							0	3	0												
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	35.400.000					27.400.000	25%	6.750.000	100%	27.400.000							KEC BUKIT BARISAN			
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)							27.400.000	3													
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kursus, pelatihan sosialisasi, bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan							0														
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring							27.500.000	0													
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu							5.000.000	3	0									KEC BUKIT BARISAN			
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu							5.000.000	3	0												
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi							5.000.000	0	0												
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi							0	0	0												
						Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendavagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa							0	0	0												
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari							0	0	0												
						Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum							0	0	0												
						Fasitasi penyusunan Perencanaan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu							0	3	0												
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi							0	3	0												
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari							0	0	0												
TOTAL KECAMATAN BUKIT BARISAN								540.440.000	0	0	0	1.628.689.550	4	187.619.568	466%	1.541.154.632		0%	8.000.000	0%	33333333%							
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP		1.310.944.363		1.538.873.765		1.592.496.269	18%	283.787.208	97%	578.776.634								KEC SULIKI			
						Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD		2.531.800	6.782.700		2.168.600	0%	0	0	0	0											
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA		2.531.800	1.582.500		2.168.600	0	0	0	0	0											
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA		0	1.017.200		0	0	0	0	3	0											
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA		0	0		0	0	0	0	0	0											
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA		0	1.122.700		0	0	0	0	3	0											
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA		0	1.248.900		0	0	0	0	3	0											
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP		0	1.811.400		0	0	0	0	3	0											
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		1.215.310.263		1.297.052.665		1.428.410.601	3	262.068.288	12	531852666											

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK		1.215.310.263		1.294.201.565		1.425.780.201	3	262.068.288														
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ		0		0		0	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan		0		1.409.700		2.630.400	0	0														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Laporan Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)		0		1.441.400		0		0														
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		0				0		0														
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD		0				0		0														
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		0		7.500.000		0	0	0														
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya 22 stel		0		7.500.000		0	0	0														
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspem, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP		0				0	0	0														
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		46.761.800		108.237.400		62.573.100	3	2.060.000														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		0		0		0		0														
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Gorden gedung kantor		0		0		0		0														
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		5.971.800		11.509.800		10.179.100	3	800.000														
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas		3.300.000		5.726.600		3.350.000	3	500.000														
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu		0		0		0	0	0														
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman		37.490.000		91.001.000		49.044.000	3	760.000														
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		0				0		0														
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2		0				0		0														
					Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan		0				0		0														
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		14.673.000		45.241.000		44.101.968	3	8.408.920														
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materal Rp. 10.000		0		510.000		0	0	0														
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar		8.468.000		6.890.000		8.000.000	3	1.308.920														
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Printer,Laptop,AC, Komputer, Televisi dan Infokus,		0		0		0		0														
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 1 (satu) orang		6.205.000		37.841.000		36.101.968	3	7.100.000														
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan suliki		31.667.500		74.060.000		55.242.000	3	11.250.000														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		30.937.500		72.860.000		55.242.000	3	11.250.000														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.								
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi		730.000		1.200.000		0	0%	0														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Atap, kuda-kuda dan plafon gedung kantor cmat		0		0		0		0														
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Kamar Mandi (WC) Kantor Camat		0		0		0		0														
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	36.000.000		18.400.000		0	0%	0		0%	0					KEC SULIKI						
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		0				0	0%	0		0	0											
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan		0				0	0%	0		0	0											
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		36.000.000	0	18.400.000		0	0%	0		0	0											
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		36.000.000		18.400.000		0	0%	0		0	0											
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan suliki	80%	32.495.000		71.325.000		58.447.000	0%	0		100%	6.500.000					KEC SULIKI						
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan suliki		32.495.000		71.325.000		56.500.000	3	0		6	6500000											
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan		8.495.000		5.000.000			0	0		3	6500000											
						Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pembinaan PKK Kecamatan dan PKK Nagari		24.000.000		66.325.000		1.947.000	0	0		3	0											
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	0		0		0	0%	0		0%	0					KEC SULIKI						
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0		0		0		0		0	0											
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	terfasilitasi kegiatan organisasi Jembaga dan tokoh keagamaan		0		0		0	0%	0		0	0											
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		0		0		0	0%	0		0	0											
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat		0		0		0	0%	0		0	0											
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	33.825.000		8.575.000		43.160.000	0%	0		100%	13.750.000					KEC SULIKI						
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		33.825.000		8.575.000		43.160.000	0%	0		0	13750000											
						Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Belanja Barang dan Jasa	Pelaksanaan Rapat dan fasilitasi upacara		0		8.575.000		10.160.000		0		6	0											
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring		33.825.000				33.000.000		0		0	13750000											

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80	0	2.805.000		0	300%	0									KEC SULIKI						
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu		0	2.805.000		0	300%	0															
					Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari		0			0		0															
					Fastasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu		0	2.805.000		0	0%	0															
TOTAL KECAMATAN SULIKI								1.413.264.363			1.842.606.288	6%	283.787.208	99%	599.026.634			0%	0									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	75%	14.891.397.578	1.538.631.000	0	1.568.588.065	10	362.710.594	0	349.903.850			0	1.798.876.920	0%	12%	KEC SITUJUH						
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD		68.970.000	0	3.300.000	0	4.005.000	0	0	0	0		0	3.300.000									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	75	Rp 8.600.000	Rp 1.196.000	0	Rp 1.100.000		0					Rp 1.196.000										
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	75	Rp 8.600.000	Rp -	0	Rp 1.285.000		0					Rp -										
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	75	Rp 8.600.000	Rp 1.285.000	0	Rp -		0					Rp 1.285.000										
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	75	Rp 8.600.000	Rp 819.000	0	Rp 820.000		0					Rp 819.000										
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	75	Rp 8.600.000	Rp -	0	Rp 800.000		0					Rp -										
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	75	Rp 25.970.000	Rp -	0	Rp -		0					Rp -										
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	75%	9.739.988.978	25	1.428.668.270	25	1.430.213.065	6	349.137.850	0	349.137.850		0	1.777.806.120									
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	75	Rp 9.584.488.978	25	Rp 1.425.578.270	25	Rp 1.429.119.065	6	Rp 349.137.850		Rp 349.137.850		Rp 1.774.716.120										
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi dan Penata Usahan Keuangan	75	Rp 12.400.000	-	Rp -	-	Rp -				Rp -		Rp -										
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	75	Rp 7.300.000	-	Rp 1.996.000	-	Rp -				Rp -		Rp 1.996.000										
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi triwulan dan Semesteran SKPD	75	Rp 123.500.000	-	Rp 1.094.000	-	Rp 1.094.000				Rp -		Rp 1.094.000										
					Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	75	Rp 12.300.000			0	0		0		Rp -		Rp -										
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset semester dan akhir tahun	75	9.010.000	0	0		0		0				Rp -										
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKMD, RKPBMd, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD	75	Rp 9.010.000	0	0	0	0		0				Rp -										
					Administrasi Kepegawaian Daerah	Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya		131.300.000	0	0	0	0		0				Rp -										
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut kelengkapannya	Pakaian Dinas	75	Rp 124.000.000	0	0	0	0						Rp -										
					Pendataan dan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegaian ASN	75	Rp 7.300.000	0	0	0	0						Rp -										

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Situjuh Limo Nagari		1.400.346.600	36	17.004.800	36	30.915.000	0	766.000	0	766.000			0	17.770.800								
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	75	Rp 11.700.000	-	Rp 500.000	-	Rp 500.000		0		0			Rp 500.000									
					Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus	75	Rp 550.000.000	-	Rp -	-	Rp 7.366.000		Rp 766.000		766.000			Rp 766.000									
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	75	Rp 98.197.000	12	Rp 6.002.000	12	Rp -	0%	0		0			Rp 6.002.000									
					Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Perundangan	Majalah dan Surat Kabar Lainnya	75	Rp 12.364.000	-	Rp -	-	Rp -		0		0			Rp -									
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan pengadaan	75	Rp 73.085.600	12	Rp 1.732.800	12	Rp 1.800.000		0		0			Rp 1.732.800									
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu	75	Rp 55.000.000	-	Rp -	-	Rp -		0		0			Rp -									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	75	Rp 600.000.000	12	Rp 8.770.000	12	Rp 21.249.000		0		0			Rp 8.770.000									
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administراس umum		1.775.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0								
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya kendaraan dinas	75	Rp 1.040.000.000		0						0												
					Pengadaan Meubeler	Tersedianya meubeler	75	Rp 290.000.000		0																		
					Pengadaan perlatan mesin dan lainnya	Tersedianya peralatan mesin dan lainnya	75	Rp 170.000.000		0																		
					Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Portal, taman, tempat parkir	75	Rp 275.000.000		0		0		0														
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administراس umum		707.932.000	36	36.697.930	36	40.565.000	4	7.306.744	0	0			0	0	0							
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedinaya:Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-materai 10000	75	Rp 12.100.000	12	Rp -	12	Rp -	0	Rp -														
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran tagihan rekening listrik dan air	75	Rp 77.200.000	12	Rp 4.700.000	12	Rp 6.455.000	2	Rp 1.306.744														
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang	75	Rp 618.632.000	12	Rp 31.997.930	12	Rp 34.110.000	2	Rp 6.000.000														
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administراس umum		1.058.850.000	22	52.960.000	22	62.890.000	0	5.500.000	0	0			0	0								
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Keluaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	75	Rp 483.600.000	22	Rp 51.480.000	22	Rp 60.050.000	0	Rp 5.500.000														
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keluaran: terpeliliharana,Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	75	Rp 43.250.000		Rp 1.480.000		Rp 2.840.000		Rp -														
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Banguan Lainnya	keluaran: terpelihara gedung kantor	75	Rp 350.000.000				Rp -																
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	75	Rp 182.000.000				Rp -																
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80%	239.782.700	0	0	0	1.996.000		0	0%	0		0%	0	0%	0%	KEC SITUJUJH						
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	71.650.000	-	-		0		0														
					Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keluaran: adanya pelayanan prima	80	Rp 71.650.000						0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	168.132.700	-	-	-	1.996.000		0														
					Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	80	Rp 168.132.700		Rp -		Rp 1.996.000		0														
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80%	667.986.800	72	15.610.000	72	11.890.000	60	1.575.000	0	0			0	0	0%	0%	KEC SITUJUJH					
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat		667.986.800	72	15.610.000	72	11.890.000	60	1.575.000	0	0			0	0	0							
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah tahapan forum musrenbang di nagari	80	Rp 80.135.000	60	Rp 7.910.000	60	Rp 4.190.000	60	Rp 1.575.000														
					Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	80	Rp 587.851.800	12	Rp 7.700.000	12	Rp 7.700.000	0	Rp -														
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan					0				0														
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerjasama antar-keluarga, warga, dan kelompok Masyarakat					0	60		0%	0														
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda	80%	174.062.500		0		0		0	0%	0			0%	0	0%	0%	KEC SITUJUJH					
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Teresdianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari		115.062.500	0	0		0		0														
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketentraman	80	Rp 73.062.500				0		0														
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	Rp 42.000.000		0		0		0														
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari		59.000.000		0		0		0														
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	Rp 59.000.000		0		0		0														
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	80%	210.650.000		22.500.000		32.500.000	0	0	0	0			0	0	0%	0%	KEC SITUJUJH					
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum		210.650.000	85	22.500.000	85	32.500.000	0	0	0	0			0	0	0	0	0					
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	80	Rp 71.100.000		Rp -		Rp -		0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan instansi vertikal	Terciptanya ketertiban umum dimasyarakat dan pembinaan terhadap masyarakat	80	Rp	45.000.000		Rp	-		Rp	-		0											
						Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	80	Rp	36.000.000		Rp	-		Rp	-		0											
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkopinca yang dilasanakan	80	Rp	58.550.000	85	Rp	22.500.000	85	Rp	32.500.000	0%	0											
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang yang berkinerja baik	80%		614.312.500	60		0			0		0	0%		0		6000%	0	7500%	0%	KEC SITUJUJH		
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	100%		614.312.500	0		0			0		0											
						Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	keluaran: produk hukumi Nagari	100	Rp	56.000.000			0			0		0											
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keluaran: supervisi dan pengawasan administrasi nagari	100	Rp	60.000.000			0			0		0											
						Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keluaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	100	Rp	68.000.000			0			0		0											
						Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keluaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	100	Rp	22.000.000			0			0		0											
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keluaran : terlaksanya pilwwana	100	Rp	193.812.500			0			0		0											
						Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superfisi dan pengawasan pemberhentian perangka t nagari	100	Rp	18.000.000			0			0		0											
						Fasitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	100	Rp	94.500.000			0			0		0											
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	100	Rp	47.000.000			0			0		0											
						Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	keluaran :percepatan pembangunan Pemerintah Nagari	100	Rp	55.000.000			0			0		0											
TOTAL KECAMATAN SITUJUJAH									16.798.192.078			1.576.741.000			1.612.978.065		2333%	364.285.594		0%	349.903.850			0%	1.798.876.920		0%	4%	
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	1909	14.009.617.188			2.581.611.716		100%	1.566.504.549		17%	273.308.373		99%	1.545.268.311			99%	4.126.880.027		0%	29%	KEC PANGKALAN
						Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD					21.584.000	0		5.687.000	0%	0												
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA					3.646.000	0		2.573.000	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA					2.855.000	0		0	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA					3.866.000	0		0	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA					4.150.000	0		0	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA					2.962.000	0		0	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPI LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP					4.105.000	0		3.114.000	0%	0												
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					2.269.935.724	12		1.397.002.643	300%	249.065.109												
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK					2.265.944.724	12		1.397.002.643	3	249.065.109												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								5		6		7		8						9		10			11		12	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ					0		0	0%	0												
						Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan					0		3.991.000		0												
						Administrasi Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					0		0	0%	0												
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa penatausahaan Barang Milik Daerah, Penyusunan RKBMD, pemanfaatan Aset					0		0		0												
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					0		1.200.000	0%	0												
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian Dinas beserta kelengkapannya					0		0	0%	0												
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, rekomendasi TPP dan SKP					0		1.200.000	0%	0												
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					38		84.931.500	3	8.644.500												
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik					0		0	0	0												
						Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer					0		6.000.000	0	0												
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					12		8.947.100	3	1.381.000												
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas					12		4.990.400	3	753.500												
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman					12		64.994.000	3	6.510.000												
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					0		0		0												
						Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2					0		0		0												
						Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan					0		0		0												
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					39		23.473.406	11	3.612.764												
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000					840.000		15		150.000	5											
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar					21.952.111		12		8.620.000	3											
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 5 (lima) orang					98.429.481		12		14.703.406	3											
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru					102.910.350		12		54.210.000	3											
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2					102.910.350		12		51.480.000	3											
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop					0		2.730.000		0												
						Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Pemeliharaan Gedung kantor					0		0		0												
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	186.040.000	62.003.437	0	0	0%	0	0%	0		0%	62.003.437	0%	33%	KEC PANGKALAN						
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat			0	0	0	0%	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab					
							1	2				3	4	5				6		7			8		9		10
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan				0		0		0%	0												
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat				62.003.437		0		0		0%	0										
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN				62.003.437		0		0		0%	0										
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Pangkalan Koto Baru	80%		230.490.000		63.860.000	46%		73.980.300	1%	637.500	100%		73.955.300			100%		137.815.300	125%	60%	KEC PANGKALAN
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau				61.585.000		40		68.160.000	0%	0											
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan				7.865.000		40		4.410.000	0%	0											
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring				53.720.000		0		63.750.000		0											
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				2.275.000		6		5.820.300	0%	637.500											
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan sehat	Terlaksananya Program dan kegiatan PKK				2.275.000		6		5.820.300	0%	637.500											
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%		61.410.000		0		0	0%	0	0%	0			0%		0	0%	0%		KEC PANGKALAN	
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				0		0		0	0%	0											
					Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring				0		0		0		0											
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				0		0		0	0%	0											
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring						0		0	0%	0											
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%		81.180.000		33.000.000	60%		34.237.500	0%	0	100%		34.100.000			100%		67.100.000	124%	83%	KEC PANGKALAN
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)				33.000.000		6		34.237.500	0%	0											
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring				33.000.000		6		34.237.500	0%	0											
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80%		440.340.000		21.687.500	0		0	0%	0										KEC PANGKALAN	
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu				21.687.500		0		0	0%	0											

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13					
					Facilitasi Penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi																						
					Facilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi				7.071.000	0	0	0%															
					Facilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Pemilihan Wali Nagari				0	0	0	0%	0														
					Facilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terjaganya ketertiban umum				7.087.000	0	0	0%	0														
					Fasitasi penyusunan pembangunan partisipatif	APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu				0	0	0	0%	0														
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rapat , Monitoring dan evaluasi				0	0	0	0%	0														
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Koordinasi dengan Pemerintah Nagari				7.529.500	0	0	0%	0														
TOTAL KECAMATAN PANGKALAN									15.009.077.188			2.762.162.653		1.674.722.349	6%	273.945.873	99%	1.653.323.611			99%	4.393.798.764	83%	57%				
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP						1.240.445.040	25%	159.347.538	100%	2.561.542.693								KEC. MUNGKA				
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD																						
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA																						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA																						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PERUBAHAN RKA																						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DPA																						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau					1.074.820.260			136.354.482														
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK					1.074.820.260		3	136.354.482														
					Pelaksanaan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ																						
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau																						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMd, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD																						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau																						
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya 22 stel																						
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspem, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP																						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau					50.554.100			2.534.200														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik																						
					Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, CCTV																						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor					12.027.200		3	1.630.900														
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas					3.821.900		3	393.300														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
1						3	4																						
						Facilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu																						
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman					34.705.000	3	510.000															
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau					60.125.680		9.358.856															
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000																						
						Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar					10.300.000	3	1.358.856															
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 4 orang					49.825.680	4	8.000.000															
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau					54.945.000		11.100.000															
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2					54.945.000	3	11.100.000															
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi																						
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Atap, kuda-kuda dan plafon gedung kantor cmat																						
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Kamar Mandi (WC) Kantor Camat																						
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																						
						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat																						
						Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan																						
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan																						
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat																						
						Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN																						
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau					54.827.700	0%	0	100%	54.817.700							KEC. MUNGKA						
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau					54.827.700	0%	0															
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan					4.827.700																	
						Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring					50.000.000																	
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					27.000.000	0%	0	100%	27.000.000							KEC. MUNGKA						
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentrman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)																						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi																						
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring						27.000.000																
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi						27.000.000																
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						18.767.500	0%	0	100%	18.767.500						KEC. MUNGKA						
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						18.767.500																
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi						18.767.500																
TOTAL KECAMATAN MUNGKA												1.341.040.240	6%	159.347.538	100%	2.662.127.893												
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP	75%	12.452.784.195		1.567.695.226	0	1.774.984.043		455.278.341	0	Rp 455.278.341			0	Rp 2.230.262.384	0%	18%	KEC LUAK					
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD	75	354.989.000		2.304.000	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran :RENSTRA, RENJA	75	25.459.000		0	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA	75	17.553.000		576.000	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA	75	13.035.000		576.000	0%	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA	75	13.075.000		576.000	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA	75	13.115.000		576.000	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPPD , SPIP, SAKIP dan LAKIP	75	215.702.000		0	0	0		0	0	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	75	57.050.000		0		0		0		Rp -			Rp -									
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	75	8.146.278.495		1.443.114.566	0	1.650.613.143	3	436.805.621	3	Rp 436.805.621		3	Rp 2.087.418.764	4%	26%							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS Sebanyak 17 Orang, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK	75	8.001.428.195	12	1.442.154.566		1.650.613.143	3	436.805.621	3	Rp -		3	Rp 1.650.613.143	4%	21%							
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen Verifikasi dan Penata Usahan Keuangan	75	51.560.300		0	0	0		0	-	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi ,konsultasi	75	12.000.000		0		0		0		Rp -			Rp -									
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan Akhir Tahun	75	15.743.000		576.000	0	0		0	-	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen Pemeriksaan	75	10.255.000		0		0		0		Rp -			Rp -									
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulan/Semesteran SKPD	Dokumen Realisasi triwulan dan Semesteran SKPD	75	45.645.000		384.000	0	0		0	-	Rp -		0	Rp -	0%	0%							
					Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis	75	9.647.000		0	0	0		0	-	Rp -		0	Rp -	0%	0%							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan Aset semester dan akhir tahun	75	83.669.400	0	308.000		0	K	Rp.	-			0	Rp	-	0%	0%						
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen RKBMD,Dokumen RKPBMd	75	12.747.000		0		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%						
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Koordinasi, Laporan Barang Milik Daerah	75	17.622.000		308.000		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan BMD	75	53.300.400	0	0	0	0		-				0	Rp	-	0%	0%						
					Administrasi Kepegawaian Daerah	Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	75	110.782.500		0	0	0		-				0	Rp	-	0%	0%						
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Artibut kelengkapannya	Pakaian Dinas	75	83.000.000	0	0	0	0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Pendataan dan Pengelolaan Adminstrasi Kepegawaian	Dokumen Kepegaian ASN	75	27.782.500	0	0	0	0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Luak	75	1.008.716.700		23.290.700	0	33.096.900	3	2.588.000	6	Rp	2.588.000	6	Rp	35.684.900	8%	4%						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik	75	33.336.000		682.000	0 %	0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, Infokus	75	159.250.000		0	0	0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Peralatan Rumah tangga	75	74.600.000				0		Rp	-				Rp	-	0%	0%						
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor	75	87.952.700	12	9.356.200		9.571.000	3	1.713.000	3	Rp	1.713.000	3	Rp	11.284.000	4%	13%						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pelaksanaan cetak dan penggandaan surat - surat dinas	75	105.899.000	12	2.250.000		2.250.900		Rp	-				Rp	-	0%	0%						
					Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang Perundangan	Majalah dan Surat Kabar Lainnya	75	6.000.000		0	0	0		-				0	Rp	-	0%	0%						
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman	75	541.679.000	12	11.002.500		21.275.000	3	875.000	3	Rp	875.000	3	Rp	22.150.000	4%	4%						
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administrasi umum	75	1.096.234.100		0	0	12.100.000	0%	0	-			0	Rp	12.100.000	0%	1%						
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Tersedianya kendaraan dinas	75	523.659.900		0		0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Pengadaan Mebelier	Tersedianya meubeler	75	256.194.500		0		0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Pengadaan peralatan mesin dan lainnya	Tersedianya peralatan mesin lainnya	75	30.000.000		0		12.100.000		-	Rp	-		0	Rp	12.100.000	0%	40%						
					Pengadaan Sarana dan prasarana Gedung Kantor Lainnya	Portal, taman, tempat parkir	75	286.379.700		0		0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administrasi umum	75	567.864.000		45.697.960		13.864.000	3	2.468.720	3	Rp	2.468.720	3	Rp	16.332.720	4%	3%						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedinaya:Materai Rp. 3.000,- Materai Rp. 6.000,-materai 10000	75	10.900.000		0		0	0	-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	Pembayaran tagihan rekening listrik dan air	75	111.815.000	12	8.864.000		8.864.000	3	2.468.720	6	Rp	2.468.720	6	Rp	11.332.720	8%	10%						
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya :Honor Pelaksana Kegiatan dan Honor Tenaga Kontrak	75	445.149.000	12	36.833.960		5.000.000		-	Rp	-		0	Rp	5.000.000	0%	1%						
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi administras umum	75	1.084.250.000		52.980.000	0	65.310.000	3	13.416.000	3	Rp	13.416.000	3	Rp	78.726.000	4%	7%						
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Keluaran terpeliharanya kendaraan dinas roda dua dan empat	75	429.800.000	12	51.480.000		63.950.000	3	13.416.000	3	Rp	13.416.000	3	Rp	77.366.000	4%	18%						
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	keluaran: terpelliharana,Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi	75	103.150.000		1.500.000		1.360.000		-	Rp	-		0	Rp	1.360.000	0%	1%						
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	keluaran: terpelihara gedung kantor	75	226.300.000		0		0		-	Rp	-		0	Rp	-	0%	0%						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	terpeliharanya : sarana dan prasarna gedung Kantor Camat	75	325.000.000		0		0		0	-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%				
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Keluaran :Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik	80%	729.945.000		0		15.188.000		8.000.000	-	Rp	8.000.000		0	Rp	8.000.000	0%	1%	KEC LUAK				
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	91.415.000		0		0		0	-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%				
					Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	keluaran: adanya pelayanan prima	80	6.000.000		0		0		0	-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%				
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	80	85.415.000		0		0		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat	80	473.530.000		0		15.188.000		8.000.000	-	Rp	8.000.000		0	Rp	23.188.000	0%	5%					
					Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Keluaran : 'Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	80	45.000.000		0		0		0	-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%				
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN	80	428.530.000	12	0		15.188.000	3%	8.000.000		Rp	-				Rp	-	0%	0%				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Meningkatnya Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	165.000.000		0		0																
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	80	45.000.000		0		0		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	80	60.000.000		0		0		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%				
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring dan Sosialisasi	80	60.000.000		0		0		0		Rp	-				Rp	-	0%	0%				
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80%	142.635.000		6.680.000	0	1.865.000	0%	0	-	Rp	-			0	Rp	1.865.000	0%	1%	KEC LUAK			
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rata2 Nilai swadaya masyarakat	80	142.635.000		4.617.500	0	1.865.000		0	-	Rp	-			0	Rp	1.865.000	0%	1%				
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah tahapan forum musrenbang di nagari	80	50.160.000	12	4.617.500		1.865.000		0	-	Rp	-			0	Rp	1.865.000	0%	4%				
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase masyarakat miskin yang di berdayakan	80	92.475.000		0		0%	0		-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%				
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			0		2.062.500		0		0		Rp	-				Rp	-						
					Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas			0		2.062.500		0	0%	0		Rp	-				Rp	-						
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan kasus kriminal dan pelanggaran perda	80%	180.220.000		0		0		0	-	Rp	-			0	Rp	-	0%	0%	KEC LUAK			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keterlibatan Umum Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Teresdianya koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	80	99.835.000	0	0	0	0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara nasional Republik Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Persentase terlaksananya monitoring dan sosialisasi ketenteraman	80	53.185.000		0	0	0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	46.650.000		0	0	0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	tersedianya koordinasi penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan pemerintah nagari	80	80.385.000		0	0	0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terjaganya hubungan baik dengan TNI polri dan Instansi vertikal	80	80.385.000	12	0	0	0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	80%	350.935.000	0	36.003.000		34.255.000	0%	4.500.000	-	Rp 4.500.000		0	Rp 38.755.000	0%	11%	KEC LUAK						
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	terlaksananya urusan pemerintahan umum	80	350.935.000	0	36.003.000		34.255.000		4.500.000	0	Rp 4.500.000		0	Rp 38.755.000	0%	11%							
						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah pembinaan (Bimtek, sosialisasi dan konsultasi) yang dilaksanakan	80	92.185.000		0		0	0	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Jumlah kegiatan PHBN	80	174.175.000		9.003.000		6.975.000		0	0	Rp -		0	Rp 6.975.000	0%	4%							
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi forkopinca yang dilaksanakan	80	84.575.000		27.000.000		27.280.000	300%	4.500.000	3	Rp 4.500.000		3	Rp 31.780.000	4%	38%							
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang berkinerja baik	80%	697.702.500	60	0		0	0	Rp -			0	Rp -	0%	0%	KEC LUAK							
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari	80	697.702.500	60	0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	keluaran: produk hukumi Nagari	80	52.550.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	keluaran: supervisi dan pengawasan administrasi nagari	80	55.510.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	keluaran : supervisi dan pengawasan dana nagari	80	100.235.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasilitasi Pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat daerah	keluaran : superfisi dan pengawasan tugas wali nagari dan perangkat	80	60.000.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	keluaran : terlaksanya pilwwana	80	272.827.500		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	keluaran : superfisi dan pengawasan pemberhentian perangkat nagari	80	19.000.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Keluaran : Pelaksanaan Rapat , Pelaksanaan Monitoring	80	37.000.000		0		0		Rp -				Rp -	0%	0%								
						Fasitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	keluaran :APB Nagari, Laporan keuangan tepat waktu	80	83.800.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								
						Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	keluaran : tersedianya koordinasi dengan pemerintahan nagari	80	16.780.000		0		0	-	Rp -			0	Rp -	0%	0%								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8					9		10			11		12		13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13			
		TOTAL KECAMATAN LUAK				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
							14.554.221.695		1.610.378.226		1.811.104.043	0%	467.778.341	-	Rp 467.778.341			0	Rp 2.278.882.384			15,66%			
						PRORAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten pada Perangkat Daerah		18.459.795.351		5.233.850.255		1.891.200.895	18%	333.675.573	97%	1.832.132.655			97%	7.065.982.910			KEC KAPUR IX	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		275.064.950		38.052.000		7.966.000		745.000										
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		29.827.590		11.386.800		3.623.000		0										
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		34.571.440		6.205.700		0		0										
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		40.448.520		5.023.100		0		0										
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		35.581.660		5.684.400		1.876.000		745.000										
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		36.701.430		3.678.500		1.876.000		0										
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		97.934.310		6.073.500		591.000		0										
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		12.609.202.566		4.397.967.356		1.721.204.917		324.222.249										
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		12.454.555.506		4.390.768.356		1.716.122.917		324.222.249										
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		47.077.510		1.985.000		843.000		0										
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		31.424.540		2.127.000		746.000		0										
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semestera n SKPD		44.424.870		2.307.000		3.493.000		0										
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		31.720.140		780.000		0		0										
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		57.818.610		676.000		837.000												
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		57.818.610		676.000		837.000												
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu		122.376.565		2.305.000		1.005.000												
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75.127.500		0		0												
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		47.249.065		2.305.000		1.005.000												
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah		1.668.693.180		280.954.630		61.473.050		120.000										

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4																						
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		48.734.300		2.896.000		874.000		0														
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		450.448.000		46.350.000		9.011.950		120.000														
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		106.921.060		37.153.780		0		0														
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		72.639.420		12.780.100		2.998.100		0														
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		91.522.500		6.575.000		1.750.000		0														
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		898.427.900		175.199.750		46.839.000		0														
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah		1.813.054.000		20.300.000		0																
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		484.000.000		0		0																
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		330.854.000		13.500.000		0																
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				6.800.000		0																
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		998.200.000		0		0																
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah		1.223.371.280		355.136.869		35.729.928		5.528.324														
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		21.809.730		2.552.800		0		0														
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		122.370.000		50.449.719		10.254.000		1.485.124														
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		160.971.950		61.392.350		0		0														
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		918.219.600		240.742.000		25.475.928		4.043.200														
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah		690.214.200		138.458.400		62.985.000		3.060.000														
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		492.519.500		113.560.400		56.085.000		3.060.000														
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		83.157.300		10.390.000		6.900.000		0														
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		52.532.000		14.508.000		0		0														
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		62.005.400		0		0		0														
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di Tingkat Kecamatan	80%	801.122.840		171.123.000		15.009.000			80%	469.000		80%	171.592.000	100%	21%	KEC KAPUR IX						
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif		123.795.840		5.901.600		1.933.000																
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		123.795.840		4.100.000		1.933.000																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1.801.600		0																
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan		677.327.000		165.221.400		13.076.000																
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		677.327.000		165.221.400		13.076.000																
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Efektifitas Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari di Tingkat Kecamatan	80%	588.434.940		156.659.200		91.220.000			89%	81.436.500			89%	238.095.700	112%	40%	KEC KAPUR IX					
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksannya koordinasi kegiatan pemberdayaan desa/nagari di tingkat kecamatan yang efektif		588.434.940		156.659.200		91.220.000																
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		121.979.550		23.727.500		6.202.000																
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		466.455.390		132.931.700		85.018.000																
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	107.569.280		0					0%	0			0%	0	0%	0%	KEC KAPUR IX					
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		65.831.780		0																		
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran: terfasilitasi kegiatan organisasi Jembaa dan tokoh masyarakat		65.831.780		0																		
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		41.737.500																				
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran: Pelaksanaan Rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman Masyarakat		41.737.500		0																		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Kecamatan	80%	94.779.290		29.000.000		27.000.000	17%	4.500.000	100%	27.000.000			100%	56.000.000	125%	59%	KEC KAPUR IX					
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya urusan pemerintahan umum		94.779.290		29.000.000		27.000.000		4.500.000														
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah rapat,monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan		61.799.500		0		0		0														
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forkopimca yang dilaksanakan		32.979.790		29.000.000		27.000.000		4.500.000														
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang berkinerja baik	80%	1.207.577.960		10.885.000		3.627.000			80%	308.000			80%	11.193.000	100%	1%	KEC KAPUR IX					
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Produk Hukum Nagari		1.207.577.960		10.885.000		3.627.000																
					Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Keluaran : Peraturan Nagari,peraturan Wali Nagari		35.531.780		1.425.000		1.006.000																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					3	4																						
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran: Rapat , Monitoring dan evaluasi		40.153.770		2.555.000		1.183.000	K															
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari		46.175.000		2.915.000		1.438.000																
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terpilihnya Wali Nagari		932.950.360		0		0																
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : monitoring dan evaluasi		56.910.630		1.400.000		0																
					Fasilitasi penyusunan pembangunan partisipatif	Keluaran:APB Nagari, Laporan keuangan		32.553.900		0		0																
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran :Rapat , Monitoring dan evaluasi		43.045.490		2.080.000		0																
					Koordinasi Pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayah Kecamatan	Keluaran :terlaksananya Koordinasi dengan Pemerintah Nagari		20.257.030		510.000		0																
TOTAL KECAMATAN KAPUR IX								21.259.279.661		5.601.517.455		2.028.056.895	17%	338.175.573	96%	1.941.346.155		74%	7.542.863.610	73%	20%							
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP					100%	1.880.370.336	21%	390.755.694	99%	1.858.008.220		99%	1.858.008.220			KEC HARAU						
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan laporan OPD		7.851.000				3	4.290.000															
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA				2.776.000		3	2.768.000															
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA				1.114.000		0	0															
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PERUBAHAN RKA				0		0	0															
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	DPA				1.525.000		3	1.522.000															
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Perubahan DPA				1.154.000		0	0															
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKJIP, LKPJ LPDP , SPIP, SAKIP dan LAKIP				1.282.000		0	0															
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau				1.680.732.076		3	354.259.800															
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK				1.677.987.076		3	352.764.800															
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen SPJ				0		0	0															
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan				1.495.000		3	1.495.000															
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Bulanan, Laporan pertanggung jawaban bulanan (SPJ Fungsional)				0																		
					Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis realisasi anggaran	Laporan Prognosis				1.250.000		0	0															
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau				0		0	0															
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pelaksanaan Jasa Penatausahaan Barang Milik Daerah , Penyusunan RKBMD, RKPBMMD, Pemanfaatan Asset, Laporan BMD				0		0	0															
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau				879.000		3	63.000															
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya	Pakaian dinas beserta kelengkapannya 22 stel				0		0	0															
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	DUK, Karis, Karsu, Taspen, NPWP, Rekomendasi TPP dan SKP				879.000		3	63.000															

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4																						
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau						74.107.300	K	3		6.264.500												
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik						1.715.000		3		740.000												
					Penyedian peralatan dan perlengkapan kantor	Laptop , Printer,Komputer , AC, CCTV						20.000.000				0												
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor						12.331.400		3		1.619.500												
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas						8.867.900		0		0												
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya tamu						8.750.000		3		1.430.000												
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman						22.443.000		3		2.475.000												
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau						0		0		0												
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Kendaraan Dinas Roda 2						0				0												
					Pengadaan Mebel	Meja dan kursi Pimpinan						0				0												
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau						58.425.960		3		14.328.394												
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Materai Rp. 10.000						500.000		3		300.000												
					Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik dan surat kabar						5.340.000		3		1.338.394												
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Printer,Laptop,AC, Komputer, Televisi dan Infokus,						0				0												
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang						52.585.960		3		12.690.000												
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Harau						58.375.000		3		11.550.000												
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2						54.945.000		3		11.100.000												
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi						3.430.000		3		450.000												
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rehab Atap, kuda-kuda dan plafon gedung kantor cmat						0				0												
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rehab Kamar Mandi (WC) Kantor Camat						0				0												
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	154.130.000				0		0%	0	0%	0		0%	0	0%	0%	KEC HARAU					
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat						0		0%	0													
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan						0		0%	0													
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan						0		0%	0													
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat						0		0%	0													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/ Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/ Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/ Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
							5		6		7		8					9		10	11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4																				
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN						0	0%	0												
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau	80%	215.210.000			100%	65.936.600	0%	0	86%	56.857.100		86%	56.857.100	108%	26%	KEC HARAU				
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus berkembang dan maju di Kecamatan Harau						57.007.100	0%	0												
					Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan						7.005.000	0%	0												
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring						50.002.100	0%	0												
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga tingkat Kecamatan dan Kelurahan	PKK						8.929.500	0%	0												
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Perilaku Hidup bersih dan Sehat	PKK						8.929.500	0%	0												
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)					100%	27.000.000	25%	6.750.000	100%	27.000.000		100%	27.000.000	#DIV/0!	#DIV/0!	KEC HARAU				
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						27.000.000	3	6.750.000												
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan /atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan pelaporan						27.000.000	3	6.750.000												
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	120.790.000			100%	27.000.000	25%	6.750.000	100%	27.000.000		100%	27.000.000	125%	22%	KEC HARAU				
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)						27.000.000	3	6.750.000												
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Pelaksanaan Rapat, Monitoring dan Sosialisasi						0		0												
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Rapat dan Monitoring						27.000.000	3	6.750.000												
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang menetapkan APB-Nagari tepat waktu	80%	344.710.000				0	0%	0	0%	0		0%	0	0%	0%	KEC HARAU				
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Nagari yang menetapkan APBD tepat waktu						0	0%	0												
					Fasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa	Peraturan Nagari dan Peraturan Wali Nagari						0		0												
					Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi						0		0												
					Fasitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa						0		0												
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Supervisi dan pengawasan tugas Wali						0		0												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
				5		6		7		8					9		10			11		12		13	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
										</															

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23						
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan		9.500.000	12	2.702.000		3.716.800	3	700.000					3.402.000									
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran : Terfasilitasi Kunjungan Tamu		6.875.000	12	-		-	3	-					-									
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah		103.052.000	12	38.778.359		42.720.000	3	875.000					39.653.359									
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			33.753.100	12	27.488.732		29.044.000	3	4.302.163					31.790.895									
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya matrai 10.000.		3.000.000	12	0		0	3	0					0									
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlalsananya pembayaran tagihah rekening air dan listrik		7.000.000	12	2.103.732		2.574.000	3	302.163					2.405.895									
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang		23.753.100	12	25.385.000		26.470.000	3	4.000.000					29.385.000									
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			108.750.000	12	64.024.550	0	71.460.000	3	9.616.000					73.640.550									
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua		68.750.000	12	61.874.550		64.900.000	3	9.616.000					71.490.550									
					Pemeliharaan Mebel	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor		-		-		3.300.000	3	0					-									
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Gunuang OmeH		-	12	2.150.000		3.260.000	3	0					2.150.000									
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Keluaran : Terpeliharanya gedung kantor Camat		40.000.000		0		0	3	0					-									
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		80%	48.367.700				0	3	0	1200%	0		1200%	1.272.000	1500%	3%	KEC GUNUNG OMEH						
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			18.765.000		0		0	3	0														
					Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		18.765.000		0		0	3	0														
					Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan			29.602.700		0		0	3	0					1.272.000									
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima		29.602.700		1.272.000		0	3	0					1.272.000									
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		80%	73.500.000	24	63.690.000	0	16.950.000	9	0	3600%	0		6000%	63.690.000	7500%	87%	KEC GUNUNG OMEH						
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			73.500.000	24	63.690.000	0	16.950.000	6	0					63.690.000									
					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : Terlaksananya pelayanan prima		8.500.000	12	2.440.000		3.450.000	3	0					2.440.000									
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari Honorarium tenaga kontrak		65.000.000	12	61.250.000		13.500.000	3	0					61.250.000									
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan							0	3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1																												
					Penumbuhan dan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Kelarg dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluaran : terlaksanananya Kegiatan TP-PKK di Kecamatan dan Nagari						0	3	0														
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		80%	16.792.800		0				0%	0			0%	0	0%	0%	KEC GUNUNG OMEH						
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			10.892.800		0																		
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Persentase terlaksananya monitoring ketentraman umum di Nagari		10.892.800		0																		
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			5.900.000		0																		
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran : Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal		5.900.000		0																		
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		80%	11.230.000	12	27.000.000	0	27.875.000	6	0	1200%	0		2400%	27.000.000	3000%	240%	KEC GUNUNG OMEH						
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			11.230.000	12	27.000.000	0	27.875.000	6	0		0		0	27.000.000	0	0							
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 3 Nagari		5.530.000			0		3	0		0			0									
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait		5.700.000	12	27.000.000		27.875.000	3	0		0			27.000.000									
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		80%	61.986.900		0					0%	0		0%	0	0%	0%	KEC GUNUNG OMEH						
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			61.986.900		0																		
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari		7.506.100		0																		
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Supervisi dan Pengawasan dana Nagari		16.106.100		0																		
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terlaksananya Pilwanag Nagari		-		0																		
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum -Patroli siaga ketertiban		7.786.100		0																		
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Keluaran : APB dan laporan Keuangan Nagari		7.103.600		0																		
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari		12.125.000		0																		
					Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari		11.360.000		0																		
TOTAL KECAMATAN GUNUNG OMEH								2.075.738.736		1.306.332.323		1.285.833.783	1900%	286.225.398		286.225.398		2800%	1.589.557.721									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/DESA	Nilai AKIP	70%	1.719.216.590		1.192.081.031		1.495.445.047	18%	271.760.879	100%	1.586.235.999			100%	2.778.317.030	143%	162%	KEC LAREH SAGO HALABAN					
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan OPD		33.497.100		782.000		6.257.200		0														
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Keluaran : Dokumen Renstra dan Renja Kecamatan	2 Dok	4.410.000	2 Dok	762.200	12 bln	1.578.000	3 bln	0					762.200			127.033						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Keluaran : Dokumen RKA	2 Dok	4.400.000	2 Dok	1.116.000	12 bln	1.133.338	3 bln						1.116.000			186.000						
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Keluaran : RKA Perubahan	2 Dok	2.095.000	2 Dok	1.204.000	12 bln	1.389.328	3 bln	0					1.204.000			200.667						
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Keluaran : DPA SKPD	2 Dok	5.465.000	2 Dok	1.388.000	12 bln	1.618.000	3 bln	1.601.500					1.388.000			231.333						
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Keluaran : Perubahan DPA SKPD	2 Dok	3.735.000	2 Dok	1.342.000	12 bln	1.026.738	3 bln	0					1.342.000			223.667						
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Keluaran : Laporan Realisasi Kinerja SKPD	4 Dok	13.392.100	4 Dok	445.000	12 bln		3 bln	0					445.000			74.167						
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dinas	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN serta Penyusunan laporan OPD		1.315.806.690		1.112.061.947		1.361.569.747		245.378.113					374.869.361		62478226,83							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Keluaran : Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan PNS sebanyak 15 orang	12 bln	1.307.621.890	12 bln	1.465.396.153		1.556.590.217	3 Bln	374.869.361					374.869.361									
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Keluaran : Dokumen Verifikasi dan penata usahaan Keuangan	12 bln	750.500	12 bln			0		0					0									
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Keluaran : laporan Keuangan Akhir tahun	1 Dok	4.309.300	1 Dok	646.000				0														
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Keluaran : Laporan Realisasi Kinerja SKPD	24 Dok	1.325.000	24 Dok	0		0		0														
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Keluaran: Terlaksananya Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dok	1.800.000	2 Dok	0				0														
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan asset semester dan akhir tahun																						
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Keluaran : Persentase realisasi laporan asset semester dan tahunan																						
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		2.280.000																				
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Keluaran : Dokumen kepegawaian ASN	15 Org	2.280.000																				
					Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Keluaran: Terlaksananya pembelian Pakaian Dinas Pegawai		0																				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan Administrasi umum		166.786.900		18.351.500		37.753.100		700.000														
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran : Tersedianya barang listrik penerangan kantor	12 bln	2.482.000	12 bln			1.000.000		0					-			-						
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Keluaran : Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor Camat Lareh Sago Halaban	7 Unit	45.100.000	7 Unit	4.500.000		22.900.000		0					4.500.000		750.000							
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Keluaran: Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun		1 Tahun	1.500.000		1.500.000							1.500.000		250.000							
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor	1 Paket	14.037.000	1 Paket	8.599.186		6.138.662		500.000					8.599.186		1.433.198							
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bln	11.885.900	12 Bln	4.300.000		6.230.933	3 Bln	500.000					4.300.000		716.667							
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Keluaran : Terfasilitasi Kunjungan Tamu	12 Bln	2.875.000	12 Bln	-		-		0					-			-						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Keluaran : Tersedianya makanan dan Minuman harian PNS tamu dan rapat serta Perjalanan Dinas Luar dan dalam daerah	12 Bln	90.407.000	12 Bln	26.825.000		28.375.000						26.825.000		4.470.833								
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan pengadaan Baang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		35.460.000																				
					Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas atau jabatan	Keluaran: Tersedianya Kendaraan dinas berupa mobil atau motor		0																				
					Pengadaan Mebel	Keluaran: Tersedianya mebelier kantor berupa kursi, meja kerja, lemari arsip, dll		35.460.000																				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95.855.900		28.985.584		39.600.000		18.617.766														
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Keluaran : Tersedianya matrai 10.000,	12 bln	3.170.000	12 bln	200.000	12 bln	200.000	3 bln	-				200.000										
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran : Terlalsananya pembayaran tagihan rekening air dan listrik	12 bln	4.000.000	12 bln	2.741.444	12 bln	4.278.914	3 bln	578.204				2.741.444										
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Keluaran : Tersedianya honor petugas kebersihan kantor dan penyediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan honorarium pengelola barang	12 bln	88.685.900	12 bln	72.000.000	12 bln	72.000.000	3 bln	10.000.000				72.000.000										
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		68.750.000		64.024.550		71.460.000		9.616.000		9.616.000		71.490.550										
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Keluaran : Terpeliharanya kendaraan dinas roda empat dan roda dua	12 bln	68.750.000	12 bln	61.874.550		64.900.000		9.616.000		9.616.000		71.490.550										
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Keluaran : Tersedianya Mebeleur Kantor	12 bln	-	12 bln	-		3.300.000				-												
					Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Keluaran : Tersedianya Peralatan Gedung kantor Camat Lareh Sago Halaban	12 bln	-	12 bln	2.150.000		3.260.000		0		-												
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase IKM	80%	40.000.000		-		-			0%	0		0%	0	0%	0%	KEC LAREH SAGO HALABAN						
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		3.940.000		0																		
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Keluaran: Terlaksananya koordinasi dengan pemerintahan nagari		1.740.000		0																		
					Peningkatan Efektifitas Pemerintahan di tingkat Kecamatan	Keluaran : Adanya Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		2.200.000		0																		
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di kecamatan	Persentase Terlaksana Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yng Tidak Dilaksankan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		55.560.000		16.500.000																		
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Keluaran : Adanya Pelayanan Prima		55.560.000		16.500.000																		
					PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase Pemberdayaan Masyarakat	80%	47.995.000		11.120.000		6.477.500	25%	0	100%	0		100%		125%	0%	KEC LAREH SAGO HALABAN						
					Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemeberdayaan Desa		73.500.000		63.690.000		16.950.000				0			63.690.000									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Keluaran : Terlaksananya pelayanan prima		8.500.000	12	2.440.000		3.450.000				0			2.440.000									
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat, PHBN dan pemberdayaan perangkat Nagari Honorarium tenaga kontrak		65.000.000	12	61.250.000		13.500.000				0			61.250.000									
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tk Kecamatan dan Kelurahan		25.000.000		2.980.000		2.062.500																
					Peningkatan Kesadarn Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas	Keluaran: Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Ketermapilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas		12.120.000		0		2.062.500																
					Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluaran : Jumlah Keluarga yang MengikutiPenumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	8 Nag	12.880.000		2.980.000																		
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase IKM	80%	3.025.000							0%	0		0%	0	0%	0%	KEC LAREH SAGO HALABAN						
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peresentase Terlaksananya Koordiansi Upaya Penyelenggaraan Kententram dan Ketertiban Umum		3.025.000																				
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Keluaran: Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, TNI dan instansi vertikal	12 Bln	1.650.000	12 Bln																			
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Keluaran : Persentase terlaksananya monitoring ketentraman umum di Nagari dan terfasilitasinya kegiatan organisasi, lembaga dan tokoh kemasyarakatan	1X	1.375.000	1 X																			
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah																						
					Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Keluaran : Terjaganya hubungan baik dengan kepolisian, tni dan instansi vertikal	1 Keg		1 Keg																			
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Presentase IKM	80%	31.650.000		27.000.000		27.875.000	0%	0	0%	0		0%	27.000.000	0%	85%	KEC LAREH SAGO HALABAN						
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		11.230.000		27.000.000		27.875.000							27.000.000		240%							
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Keluaran : Terlaksananya pembinaan terhadap masyarakat 3 Nagari		5.530.000	1 Keg	0		0							0		0%							
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Keluaran: Pelaksanaan Rapat dan Monitoring	1 X	5.700.000	1 X	27.000.000	12 X	27.875.000							27.000.000		#REF!							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Jumlah Nagari yang menetapkan APBN Nagari yang Tepat Waktu	80%	61.986.900							0%	0		0		0%	0%	KEC LAREH SAGO HALABAN						
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya fasilotai, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan Pemerintah Desa		61.986.900																				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.						
					Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Keluaran : Produk Hukum Nagari	8 Nag	7.506.100																				
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Keluaran: Terlaksananya rapat, monitoring dan evaluasi	8 Nag	16.106.100																				
					Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Keluaran : Superfisi dan Pengawasan dana Nagari	1 Keg	-				2.000.000																
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Keluaran : Terlaksananya Pilwanag Nagari	8 Nag	7.786.100																				
					Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Keluaran : Terjaganya ketertiban umum -Patroli siaga ketertiban	8 Nag	7.103.600																				
					Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Keluaran : APB dan laporan Keuangan Nagari	8 Nag	12.125.000																				
					Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Keluaran : tersedianya Koordinasi dengan Pemerintahan Nagari	8 Nag	11.360.000																				
TOTAL KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN								1.903.873.490		1.230.201.031		1.529.797.547	14%	271.760.879	67%	1.586.235.999		67%	2.805.317.030									
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh	100%	2.788.488.700	0	2.260.652.397	0	2.212.752.076		549.976.676	0	549.976.676		0	2.810.629.073	0%	101%	KEC. PAYAKUMBUH						
					Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		27.500.000	-	4.956.000	-	5.010.000		-					4.956.000									
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	RENSTRA, RENJA		4.000.000		2.478.000		2.505.000	-						2.478.000		61,95							
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	RKA		5.000.000		-	0	-							-		0							
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	RKA		2.500.000		-									-		0							
					1.958.132.490	DPA		5.000.000		-									-		0							
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	DPA		5.000.000		-	0	3							-		0							
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	LKjIP, LKPJ		6.000.000		2.478.000		2.505.000	3						2.478.000		41,3							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		1.958.132.490	0	2.106.852.168	0	2.060.982.076	3	528.794.045	0	528.794.045		0	2.635.646.213	0	0							
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran Gaji PNS, Tambahan Penghasilan PNS, Honorarium Bendahara Pengeluaran, PA, PPTK, PPK		1.953.473.990		2.106.852.168		2.060.982.076	3	528.794.045		528.794.045			2.635.646.213									
					Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian Verifikasi Keuangan SKPD	SPJ Fungsional		4.658.500		-	0					-			-									
					Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan Keuangan				0		-	-			-			-									
					Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		3.993.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0								
					Penyusunan perencanaan Barang Milik Daerah	komponen instalasi listrik		1.996.500																				
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	komponen instalasi listrik		1.996.500																				
					Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		15.500.000																				
					Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas haian tersedia		11.000.000																				
					Bimbingan teknis Implementasi peraturan Perundang undangan	Pelaksanaan Bintek		4.500.000																				
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		258.702.110	0	24.417.700	0	34.068.000	9	0	0	0		0	24.417.700									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	komponen instalasi listrik		3.000.000				1.500.000		-						-	0							
					Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor		49.000.000		-										-	0							
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor		17.000.000												-	0							
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Alat Tulis Kantor		25.146.600		10.037.900		7.052.000	3						10.037.900		39,92							
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	penggandaan surat - surat dinas		7.485.000		2.459.800		1.851.000	3						2.459.800		32,86							
					Penyediaan Bahan Bacaan	Koran		2.000.000		-		0							-		0,00							
					Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasnya tamu kantor		8.532.250				1.875.000							-		0,00							
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi , Makanan dan minuman		146.538.260		11.920.000		21.790.000	3						11.920.000		8,13							
					Pengadaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		177.910.000																				
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Kendaraan Dinas Roda 2		25.410.000																				
					Pengadaan Mebel	Lemari dan Kursi Pimpinan		35.300.000																				
					Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Tersedianya peralatan gedung Kecamatan Payakumbuh		19.200.000																				
					Pengadaan sarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Lemari dan Kursi Pimpinan		49.000.000																				
					Pengadaan sarana pendukung gedung kantor atau	Lemari dan Kursi Pimpinan		49.000.000																				
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		133.540.100	0	63.098.179	0	44.942.000	6	6.982.631	0	6.982.631		0	70.080.810									
					Penyediaan jasa surat menyurat	Matrai Rp 10.000,-		3.630.000		-			0	0														
					Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Listrik dan Air	pembayaran tagihan rekening listrik		13.213.000		5.968.179		6.662.000	3	982.631		982.631			6.950.810		116,46							
					Penyediaan jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor	Terlasananya perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor		25.000.000								-			-		#DIV/0!							
					Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Peralatan Kebersihan dan Honor Tenaga Kotrak 3 (tiga) orang		91.697.100		57.130.000		38.280.000	3	6.000.000		6.000.000			63.130.000		110,50							
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Payakumbuh		213.211.000	0	61.328.350	0	67.750.000	6	14.200.000	0	14.200.000		0	75.528.350	0	#DIV/0!							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	BBM, Suku Cadang, Service dan Pajak kendaraan Dinas Roda 4 dan Roda 2		91.506.000		58.408.350		67.750.000	3	14.200.000		14.200.000			72.608.350		124%							
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	perbaikan Printer, Komputer, Laptop, Infokus dan Televisi		6.050.000		2.920.000			3	-		-			2.920.000		100%							
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Loteng dan keramik Kantor		66.655.000		-		0		-		-			-		#DIV/0!							
					Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor camat		49.000.000								-			-		#DIV/0!							
					PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	73.000.000	0	0	0	3.450.000	0%	0	100%	2.750.000		100%	2.750.000	125%	4%	KEC. PAYAKUMBUH						
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada Di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat		73.000.000	0	0	0	3.450.000	3	0														
					Peningkatan efektifitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		36.500.000				1.750.000	3	0														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						Peningkatan efektivitas pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan PATEN		36.500.000		-		1.700.000	3															
						PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	80%	56.779.070	0	500.588.500	0	6.904.000	9	0	0	0		0	0	0%	0%	KEC. PAYAKUMBUH						
						Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		56.779.070	0	500.588.500	0	6.904.000	9	0	0	0		0	0									
						Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Musrenbang Tingkat Kecamatan		16.779.070		4.910.000		4.974.000	3															
						Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring		20.000.000		494.303.500			3	0														
						Penumbuhan Kesadaran keluarga dalam peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan menerapkan Prilaku hidup sehat	Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat, MTQ, Hari hari Besar lainnya dan Monitoring		20.000.000		1.375.000		1.930.000	3	0														
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	8.000.000							0%	0		0%	0	0%	0%	KEC. PAYAKUMBUH						
						Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		8.000.000																				
						Koordinasi/ Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/ atau kepolisian negara republik Indonesia	pelaksanaan rapat dan monitoring ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		8.000.000																				
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH UMUM	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80%	19.948.331		39.420.000		39.420.000	17%	6.750.000	72%	28.485.000		72%	67.905.000	90%	340%	KEC. PAYAKUMBUH						
						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		19.948.331	0	39.420.000	0	39.420.000	0	6.750.000	0	0		0										
						Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan diKecamatan	Pelaksanaan rapat dan koordinasi		19.948.331		39.420.000		39.420.000		6.750.000														
						PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan	80%	118.476.450							0%	0		0%	0	0%	0%	KEC. PAYAKUMBUH						
						Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Kecamatan		118.476.450																				
						Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rapat , Monitoring dan evaluasi		5.363.000																				
						Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset	Supervisi dan pengawasan dana desa		14.800.000																				
						Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala	pemilihan wali nagari		58.564.000																				
						Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Daerah	Produk Hukum Nagari		6.104.450																				
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	22.620.841.916	100%	2.376.989.588		3.065.166.631	25%	517.332.291	25%	517.332.291		125%	2.894.321.879	125%	122%	DINAS PANGAN						
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	0,85	572.839.000	1			0																
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Perencanaan OPD (Renstra, Renja Awal, Renja Perubahan dan RUP)	17 Doukmen	65.000.000	4		-	0																

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2					3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13					
						Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen	70.000.000	2		-	0	K		Rp.		K		Rp.									
						Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKAP-	6	70.000.000	2		-	0																
						Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA-SKPD	6	70.000.000	2		-	0																
						Koordinasi dan penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPAP-SKPD	6	70.619.000	1		-	0																
						Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	72	53.000.000	18		-	0																
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya evaluasi kinerja OPD	72	174.220.000	18		-	0																
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	1	12.099.688.616		2.119.195.305	100%	2.356.264.031	15%		268.539.959													
						Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	72	11.890.690.016	36	2.119.195.305	12	2.356.264.031	3		268.539.959													
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	Tersedianya dokumen administrasi pelaksanaan tugas ASN	1206	34.999.800	204	0	-	0			0													
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					-	0			0													
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya laporan akuntansi dan pelaporan keuangan OPD	144	46.499.900	36		-	0			0													
						Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	6	47.499.500	1	0	-	0			0													
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan					-	0			0													
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya laporan keuangan bulanan dan semesteran OPD	96	53.999.500	7		-	0			0													
						Penyusunan Pelapooan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan Prognosis realisasi anggaran	6	25.999.900	2		-	0			0													
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	120.000.000																				
						Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Tersedianya pakaian Dinas Bagi ASN	240	120.000.000	0		-	0			0													
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0			-	0			0													
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0			-	0			0													
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0			-	0			0													
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi Umum Perangkat Daerah	1	3.544.675.000		101.749.700	1	222.398.600	5%		222.398.600													
						Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	72	70.000.000	18		-	-			-													
						Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat listrik dan elektronik kantor	72	350.000.000	18	14.995.000	-	85.300.000																
							Pengadaan peralatan kebersihan kantor																						
							Terpeliharanya peralatan kerja kantor dan Perbaikan peralatan Kantor																						
							Tersedianya perlengkapan alat tulis kantor																						
							Tersedianya perlengkapan gedung dinas :						-																
							Komputer	27	405.000.000		14.995.000		-	-															
							Laptop	19	270.000.000				1	-	0														
							Printer Brother	23	115.000.000				-	-															
							Printer	8	125.000.000				-	-															

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Penyediaan Infrastruktur dan seluruh pendukung Kemandirian pangan sesuai kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	100	4.162.328.000				0																
					Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Meningkatnya Penyediaan Pangan Masyarakat Yang Didukung dengan adanya Infrastruktur dan Sarana Pendukung untuk Kemandirian dan Ketahanan Pangan	7	2.924.508.000	1		-	-	0															
					Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Terlaksananya Pembangunan Warung Pangan Mandiri (PAMAN) di setiap Nagari	17	833.570.000	2		-	-	0															
					Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka penyediaan infrastruktur logistik	Meningkatnya Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	28	201.700.000	153		-	-	0															
					Penyusunan Rencana dan Peta jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Terlaksananya penyediaan sarana pendukung warung Pangan Mandiri	17	202.550.000	2		-	-	0															
					Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	100%	3.647.572.588		674.364.260		223.763.000	4%	19.250.000	4%	19.250.000		4%	693.614.260	4%	103%	DINAS PANGAN						
					Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi Pasokan dan harga pangan	Meningkatnya penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok Masyarakat dalam Menstabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1	1.996.309.544		604.930.360		99.281.000	9%	19.250.000														
					Penyediaan informasi harga pangan dan Neraca Bahan Makanan	Tersedianya laporan analisa ketersediaan pangan berdasarkan NBM tingkat Kabupaten	6	84.027.500	1		-	0	-	0														
					Penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal	Terlaksananya festival menu B2SA dan pangan lokal penunjang pariwisata dalam rangka pameran/festival/HPS	6	1.261.853.544	0		18.317.200	115	21.292.000															
						Terlaksananya lomba cipta menu lunbox B2SA dan pengolahan pangan lokal Tk.Provinsi Sumbar	6		0					0														
						Terlaksananya pembinaan pelaku/keompok usaha pengolahan pangan lokal	13		0																			
						Terlaksananya Pengadaan Alat Pengolahan Pangan Lokal	6		1																			
						Bimtek Pengolahan Pangan Lokal	180		0																			
						Terlaksananya pengadaan media informasi pangan lokal	6		0																			
						Terlaksananya pengadaan outlet pangan lokal penunjang pariwisata	6		0																			
					Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Lainnya	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi kelompok LDPM, Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya TK. Provinsi dan Pusat	5	305.382.000	0		140.129.500	1	77.989.000		13.850.000													
					Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	0	0	0		-	0	-	0														
					Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan	0	0	0		-	-	-	0														
					Pengembangan Kelembagaan Pangan Usaha Masyarakat Toko Tani Indonesia	Terlaksananya Gebyar pekan bazar murah	79	345.046.500	13		-	-	-	0														
					Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	0	0	0		446.483.660	3387	-	5.400.000														

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengelolaan dan keseimbangan cadangan pangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	166			0	80,4	44.730.000																
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	0	0	0	0			0															
					Pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/Kota	Terlaksananya pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten	127	1.859.251.000	153				0															
					Pemeliharaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Stock Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten	166	75.000.000	153			44.730.000	0															
					Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Tercapainya Skor Pola Pangan Harapan (PPH) berdasarkan Angka Kecukupan Gizi (AKG)	92,5	1.957.029.412		69.433.900	92,5	79.752.000	0															
					Penyusunan dan penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	Tercapainya Skor PPH berdasarkan AKG	82	297.081.847	82	-	0	14.136.000	0															
					Pemberdayaan Masyarakat dan PenganeKaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	- Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari	6	1.440.120.490	0	69.433.900	20	40.000.000	0															
						- Terlaksananya pendampingan kelompok KRPL, pertemuan kelompok sekolah lapang dan pembinaan	19		6																			
						- Terlaksananya penyaluran bantuan rumah pembibitan, sarana dan benih, bibit	19		6																			
						- Tersedianva promosi	6		0																			
					Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per Kapita per Tahun	- Terlaksananya kegiatan advokasi optimalisasi pemanfaatan di Nagari		219.827.075	9	-	0	25.616.000	0															
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan dalam meujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat	83%	1.370.303.000		14.600.000	0	15.989.000	0%	0	0%	0		0%	14.600.000	0%	100%	DINAS PANGAN						
					Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Teridentifikasi Wilayah Kecamatan yang Rawan Pangan dan Tahan Pangan	6	238.400.000		0	1	15.989.000																
					Penyusunan Pemutakhiran dan analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Teridentifikasi wilayah kecamatan yang rentan rawan pangan berdasarkan peta FSVA	3	238.400.000	1		0	15.989.000	0															
					Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Teratasinya Kerawanan Pangan Daerah	50	1.131.903.000		14.600.000	1																	
					Koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi penanganan kerawanan pangan Kabupaten	20	260.800.000	10		0	-	0															
					Pelaksanaan Pengadaan Pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terdistribusinya bantuan makanan untuk penanggulangan kejadian rawan pangan	750	871.103.000	150	14.600.000	1		0															
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi , Seimbang dan Aman	100%	2.651.258.576		18.154.844	1	39.999.700	0%	0	0%	0		0%	18.154.844	0%	100%	DINAS PANGAN						
					Pelaksanaan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Keamanan Pangan Segar yang dikonsumsi Masyarakat di Kabupaten	100	2.651.258.576		18.154.844	1	39.999.700																
					Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar Derah Kabupaten/Kota	Terlaksanya pemantauan dan pengawasan pangan segar	13	352.589.300	13	14.039.844	1	-	0															
					Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Registrasi Pangan Segar Untuk Penerbitan Izin Edar Pangan Segar	35	428.000.000	35	-	0	-	0															

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								5		6		7		8					9		12			13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
						Rekomendasi Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya uji labor dan uji petik pangan segar	540	650.670.000	540	4.115.000	1	10.530.000		0										
						Penyediaan sarana dan prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan segar asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya perlengkapan (alat/bahan) keperluan uji sampel pangan segar (rapit test)	32	1.219.999.276	32	-	0	7.500.000		0										
						Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan segar asal tumbuhan							15.529.700												
						Rekomendasi Perizinan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan							6.440.000												
TOTAL PANGAN									34.452.304.080	1	3.084.108.692		3.344.918.331	7%	536.582.291	7%	536.582.291		32%	3.620.690.983	32%	106%			

					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	41.490.712.992	399	12.191.169.361	100%	5.082.188.860	20	1.322.001.146	20	1.322.001.146		419	13.513.170.507			PMDESA
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	85	1.180.745.246	255	188.567.600	85	0	0	0	0	0		255%	188.567.600			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	9	411.068.600	6	42.794.100	0	0	0	0	0	0		6	42.794.100			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6	106.251.711	3	28.827.000	0	0	0	0	0	0		3	28.827.000			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	85.661.058	2	12.933.000	0	0	0	0	0	0		2	12.933.000			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA yang disusun	6	74.477.711	4	10.715.000	0	0	0	0	0	0		4	10.715.000			
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA yang disusun	6	83.022.670	2	7.907.000	0	0	0	0	0	0		2	7.907.000			
					Koordinasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi yang disusun (LKIP, SPIP, LKP, SPBE, dan PK)	29	284.631.563	17	65.108.500	0	0	0	0	0	0		17	65.108.500			
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Peneendalian dan Evaluasi	24	135.631.934	8	20.283.000	0	0	0	0	0	0		8	20.283.000			
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100	23.835.287.546	400	10.626.219.167	100	4.827.239.580	25	1.294.031.996	25	1.294.031.996		425	11.920.251.163			
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya	143	22.925.693.801	107	10.555.389.367	28	4.827.239.580	30	1.294.031.996	30	1.294.031.996		137	11.849.421.363			
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi tugas ASN	60	469.980.000	12	22.200.000	0	0	0	0	0	0		12	22.200.000			
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Yang diverifikasi	15000	92.296.700	12	1.170.000	0	0	0	0	0	0		12	1.170.000			
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi akuntansi SKPD/ DPMDN	60	63.798.295	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan Keuangan akhir tahun DPMDN yang disusun	6	74.978.750	3	14.423.000	0	0	0	0	0	0		3	14.423.000			
					Pengelolaan dan Penyiajan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen LHP yang ditindak lanjuti	26	77.764.720	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan yang disusun	60	57.825.280	27	33.036.800	0	0	0	0	0	0		27	33.036.800			
						Jumlah laporan keuangan semesteran yang disusun	6		2		0	0	0	0	0	0		2	0			
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang disusun	5	72.950.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100	254.895.700	300	14.841.000	100	0	0	0	0	0		300	14.841.000			
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	9	77.990.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Penilaian BMD SKPD	5	48.300.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	13	96.877.700	6	14.841.000	0	0	0	0	0	0		6	14.841.000			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8						9		10			11	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
		</																				

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
										1												
				5		6		7		8					9		10	11		12		13
1	2					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10		11		K	Rp.	K	Rp.	
					Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah benda pos yang disediakan	24	26.880.000	12	2.673.000	0	0	0	0				12	2.673.000			
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	72	344.804.000	57	82.679.765	12	12.291.640	3	2.775.388	3	2.775.388		60	85.455.153			
						Jumlah tagihan air (PDAM) yang dibayarkan	2160		608	0	168	0	40	0	40	0		648	0			
						Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	72000		48000	0	12000	0	3000	0	3000	0		51000	0			
					Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	155	142.550.000	61	12.059.500	0	0	0	0	0	0		61	12.059.500			
					Penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang tersedia	105	1.380.480.000	108	209.370.000	0	0	0	0	0	0		108	209.370.000			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya pemeliharaan BMD	100	2.803.476.700	400	701.534.829	100	209.697.640	25	24.443.762	25	24.443.762		425	725.978.591			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas labatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	114	1.196.205.000	64	329.316.090	19	166.861.000	5	24.443.762	5	24.443.762		69	353.759.852			
						Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	84		28	0	14	0	0	0	0	0		28	0			
						Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	30		10	0	5	0	0	0	0	0		10	0			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara	5	38.000.000	38	248.596.694	19	0	0	0	0	0		38	248.596.694			
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah pemeliharaan mebel/inventaris kantor	625	65.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan alat rumah tangga/ kantor lainnya	30	90.523.700	8	1.868.000	0	0	0	0	0	0		8	1.868.000			
						Jumlah pemeliharaan komputer/ laptop/ printer	115		2	0	0	0	0	0	0	0		2	0			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	6	184.840.000	1	41.160.000	1	42.836.640	0	0	0	0		1	41.160.000			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara	51	879.308.000	2	80.594.045	0	0	0	0	0	0		2	80.594.045			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Baneunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang dipelihara	60	349.600.000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			61.962.436.400		5.672.493.164		2.043.023.050		227.390.850		227.390.850		0	5899884014			
					PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa/Nagari yang difasilitasi dalam Penataan Desa	12,5	1.437.188.600	3	30.634.200	0,00	0	0	0	0	0		3	30.634.200			
					Penyelenggaraan Penataan Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam penataan desa	12,5	1.437.188.600	3	30.634.200	0,00	0	0	0	0	0		3	30.634.200			
					Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Persentase nagari yang difasilitasi dalam Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	12,5	1.437.188.600	3	30.634.200	0,00	0	0	0	0	0		3	30.634.200			
					PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Kerjasama antar Nagari/Desa	100%	2.723.884.200	0	3.245.000	0	0	0	0	0%	0		0,01	3.245.000			
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dan pihak ketiga serta pembangunan kawasan pedesaan	158	2.723.884.200	1	3.245.000	0	0	0	0	0	0		1	3.245.000			
					Fasilitasi Kerja sama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam kerjasama antar nagari/desa dalam Kabupaten	79	1.074.117.100	1	2.775.000	0	0	0	0	0	0		1	2.775.000			
					Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah nagari yang terfasilitasi dalam pembinaan kerjasama dengan pihak ketiga	79	792.447.000	1	0	0	0	0	0	0	0		1	0			
					Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang terbentuk	1	857.320.100	0	470.000	0	0	0	0	0	0		0	470.000			
					PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Nagari yang dibina dan diawasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	68	34.607.388.400	300	2.813.867.492	0	93.958.000	0	18.473.000	0	18.473.000		300	2.832.340.492			
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Adminitrasi Pemerintahan Desa	68	34.607.388.400	300	2.813.867.492	0	93.958.000	0	18.473.000	0	18.473.000		300	2.832.340.492			
					Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Wali Nagari yang mengikuti rapat kerja penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	79	150.000.000	0	0	79	73.958.000	0	18.473.000	0	18.473.000		0	18.473.000			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
							Persentase Bamus Nagari yang menyampaikan Kinerja Bamus Nagari Tepat Waktu dan Sesuai Ketentuan berlaku	100		60	0	0	0	0	0	0			60	0									
						Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Nagari Cepat berkembang pada tahun berjalan	54	918.412.600	44	77.364.000	0	0	0	0	0	0			44	77.364.000								
							Jumlah nagari berkembang pada tahun berjalan	33		35	0	0	0	0	0	0	0			35	0								
							Jumlah Nagari terbaik pada penilaian lomba nagari tingkat kabupaten	3		3	0	0	0	0	0	0	0			3	0								
							Jumlah pembinaan yang dilakukan terhadap nagari yang mengikuti Perlombaan Nagari /Desa & Kelurahan Tingkat Propinsi /Regional	48		5	0	0	0	0	0	0	0			5	0								
							Jumlah Inovasi dan Produk Unggulan Nagari yang ditampilkan pada temu karya dan pekan inovasi desa dan kelurahan Pendiskel Tk. Nasional	18		3	0	0	0	0	0	0	0			3	0								
						PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Nagari/Adat	75	23.193.975.200	230	4.852.565.596	65	1.260.132.000	65	68.423.185	65	68.423.185			295	4.920.988.781								
						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Nagari yang difasilitasi Pemberdayaannya	75	23.193.975.200	230	4.852.565.596	65	1.260.132.000	65	68.423.185	65	68.423.185			295	4.920.988.781								
						Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat. lembaga Adat (Lembaga Adat Aktif)	6	1.121.690.200	2	23.551.900	0	0	0	0	0	0			2	23.551.900								
						Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah kader posyandu yang mendapatkan pembinaan	711	5.569.848.400	316	248.097.800	0	0	0	0	0	0			316	248.097.800								
							Jumlah Lembaga Adat yang mendapatkan pembinaan	8		24	0	0	0	0	0	0	0			24	0								
							Jumlah KPM, RDS, yang mendaatkan pembinaan	95		285	0	0	0	0	0	0	0			285	0								
							Jumlah Rakor Pokjanal Posyandu Tk Kabupaten	11		5	0	0	0	0	0	0	0			5	0								
							Persentase Posyandu Aktif Mandiri	20		45	0	0	0	0	0	0	0			45	0								
							Jumlah kegiatan KKN PT yang difasilitasi	15		42	0	0	0	0	0	0	0			42	0								
							Jumlah Lembaga PKK, Nagari yang mendaatkan pembinaan	20		60	0	0	0	0	0	0	0			60	0								
							Jumlah Pokia Posyandu Aktif	5		15	0	0	0	0	0	0	0			15	0								
							Jumlah Regulasi yang dibuat Tentang Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendagunaan Lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Desa tk Kabupaten	1		2	0	0	0	0	0	0	0			2	0								
						Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah KPMD yang mengikuti pelatihan	359	4.697.452.600	165	3.212.875.384	65	1.200.000.000	0	68.423.185	0	68.423.185			165	3.281.298.569								
							Persentase LPM aktif	80		320	0	70	0	0	0	0	0			320	0								
							Jumlah kelompok BP- SPAMS dan KPP-FASUM yang mendapatkan pembinaan, penilaian, dan monev	141		347	0	120	0	0	0	0	0			347	0								
							Jumlah Rakor F3MD yang dilaksanakan terkait Pendampingan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	11		3	0	2	0	0	0	0	0			3	0								
						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Kelompok Kerja Kredit Mikro Yang dibina	40	440.217.000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0								
						Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	JumLah Posyantek Yang Terbentuk	79	575.941.400	3	99.599.200	0	0	0	0	0	0			3	99.599.200								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	18	740.000.000	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0										
						Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Gelar TTG yang diikuti	79	1.236.535.800	158	64.045.000	0	60.132.000	0	0	0	0	158	64.045.000										
							Jumlah Nagari yang terfasilitasi pelaksanaan dan monitoring kegiatan BBGRM	6		2	0	0	0	0	0	0	0	2	0										
							Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pencanangan BBGRM	3		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0										
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Nagari yang terfasilitasi Pelaksanaan Kegiatan TMMN	93	8.812.289.800	279	1.204.396.312	0	0	0	0	0	0	279	1.204.396.312										
							Jumlah kelompok PPK Se kab. Lima Puluh Kota yang mendapatkan pembinaan																						
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PMDESA									103.453.149.392		19.891.481.649		6.436.278.860		1.408.897.331	0%	1.408.897.331			21.300.378.980									
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																							
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																						
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintan daerah	100 %	8.325.307.394	400%	13.535.086.998	100%	4.507.166.344	25%	1.053.127.523	25%	1.053.127.523	425%	14.588.214.521		175,23%	DINAS PERIKANAN							
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintan daerah	95 %	873.412.487	280	150.663.400	100	41.210.000	25%	0	0,25	0	305%	150.663.400		17,25%								
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	12 Dok	122.665.416	4	18.871.200				0	0	0	4	18.871.200		15,38%								
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	6 Dok	59.900.015	2	6.248.000				0	0	0	2	6.248.000		10,43%								
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA perubahan Dinas Perikanan yang disusun	8 Dok	57.640.181	4	5.721.400				0	0	0	4	5.721.400		9,93%								
						Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah DPA Dinas Perikanan yang disusun	6 Dok	52.654.532	2	5.079.000				0	0	0	2	5.079.000		9,65%								
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA perubahan Dinas Perikanan yang disusun	6 Dok	52.806.741	2	5.150.000				0	0	0	2	5.150.000		9,75%								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD selama 1 tahun kinerja termasuk juga LAKIP, LPPD dan LKPJ	54 Dok	392.425.745	17	102.277.800	5	41.210.000		0	0	0	17	102.277.800		26,06%								
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24 Dok	135.319.857	8	7.316.000	0	0		0	0	0	8	7.316.000		5,41%								
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	19.403.234.872	275	11.080.096.338	100	4.013.706.344	25%	1.038.127.523	25%	1.038.127.523	400%	12.118.223.861		62,45%								
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	72 bulan	19.072.483.479	153	11.061.953.138	38	4.013.706.344	38 orang/bulan	1.038.127.523	40	1.038.127.523	193	12.100.080.661		63,44%								
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		72 bulan	44.609.035	12	0	0	0		0	0	0	12	0		0,00%								
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen akuntansi SKPD yang disusun	72 bulan	39.580.333	60	1.911.000	0	0		0	0	0	60	1.911.000		4,83%								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan yang disusun	6 Dok	73.831.414	2	8.033.800	0	0		0	0	0	2	8.033.800		10,88%								
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disiapkan	72 Dok	57.782.942	22	4.072.400	0	0		0	0	0	22	4.072.400		7,05%								
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Bulanan/Triwulan/Semes teran		84 Dok	49.008.492	14	0	0	0		0	0	0	14	0		0,00%								
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Menyusun laporan dan melakukan analisis prognostis realisasi anggaran	6 Dok	65.939.178	2	4.126.000	0	0		0	0	0	2	4.126.000		6,26%								
										0	0																		

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								1	2	3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.	K	Rp.	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	1.191.184.104	175	120.750.000	0	0		0	25%	0		175%	120.750.000		10,14%			
					Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			6.500.000	1	6.500.000		0		0	0	0		1	6.500.000		100,00%			
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		75 stel	398.185.186	0	19.750.000		0		0	0	0		0	19.750.000		4,96%			
					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah aparaturng yang mengikuti diklat	6 Kali	689.369.338	101	94.500.000	0	0		0	0	0		101	94.500.000		13,71%			
					Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		6 Kali	97.129.581	1	0		0		0	0	0		1	0		0,00%			
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	12 Bulan	2.408.984.542	112	681.967.601	100	88.318.000	0%	0	25%	0		237	681.967.601		28,31%			
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	72 bulan	41.374.850	15	5.096.000	1	2.303.000			0	0		15	5.096.000		12,32%			
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	72 bulan	539.700.104	214	167.337.450	1	23.205.000			0	0		214	167.337.450		31,01%			
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		72 bulan	34.304.250	12	1.620.000	0				0	0		12	1.620.000		4,72%			
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	72 bulan	96.365.522	15	16.128.200	1	2.000.000			0	0		15	16.128.200		16,74%			
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan penggandaan yang disediakan	72 bulan	253.573.384	15	68.895.400	1	11.286.000			0	0		15	68.895.400		27,17%			
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	72 bulan	40.641.784	48	13.120.000	12	2.082.000			0	0		48	13.120.000		32,28%			
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitaso kunjungan tamu'	72 bulan	76.183.950	36	18.424.900	12	5.985.000			0	0		36	18.424.900		24,18%			
					Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	72 bulan	1.326.840.698	66	391.345.651	12	41.457.000			0	0		66	391.345.651		29,49%			
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2.629.403.973	93	19.000.000	0	0		0	0%	0		93	19.000.000		0,72%			
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		5 unit	2.240.682.150	0	0		0		0	0	0		0	0		0,00%			
					Pengadaan Mebel	Jumlah mobilier kantor	72 bulan	388.721.823	15	19.000.000	0	0		0	1	0		16	19.000.000		4,89%			
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	90 %	3.845.578.200	280	718.983.973	100	157.860.000	25%	15.000.000	25%	15.000.000		3	733.983.973		19,09%			
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	72 bulan	28.913.822	4036	8.596.000	12	1.000.000			0	0		4036	8.596.000		29,73%			
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	72 bulan	289.759.139		146.090.941	12	48.860.000			0	0		0	146.090.941		50,42%			
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga pelayanan umum kantor yang tersedia dibayarkan	72 bulan	3.526.905.240	50	564.297.032	0	108.000.000		15.000.000	3	15.000.000		53	579.297.032		16,43%			
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah	100%	3.724.246.351	3,75	763.625.686	100	206.072.000		0	25%	0		4	763.625.686		20,50%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dn dibayarkan pajak dan perizinananya	72 bulan	2.528.737.546	168	641.285.250	49	149.650.000			49	0		217	641.285.250		25,36%			
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah biaya operasional escavator	72 bulan	295.456.791	13	53.745.000	0				0	0		13	53.745.000		18,19%			
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	72 bulan	214.584.378	116	14.045.000	39	1.510.000			0	0		116	14.045.000		6,55%			
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau rehab	72 bulan	685.467.636	13	54.550.436	0	54.912.000			0	0		13	54.550.436		7,96%			
					PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase peningkatan produksi tangkap	25 %	5.991.570.000	35,66	918.413.749	5	1.855.000.000	0%	0	0%	0		36%/tahun	918.413.749		15,33%	DINAS PERIKANAN		

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi tangkap	4.500 ton/ Tahun	5.447.751.873	35,66	607.987.099	5	0	0	0	%	0		36%/tahun	607.987.099	11,16%								
						Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	-Tersedianya penunjang kegiatan -Tersedianya perahu dan sarana alat penangkap ikan untuk meningkatkan hasil tangkapan -Tersedianya prasarana perikanan tangkap -Tersedianya sarana perikanan tangkap	4.500 ton/ Tahun	969.782.577	3545	7.085.000		0	0	0	0	0		3545	7.085.000	0,73%								
						Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	-Bantuan pengadaan pakan dan benih ikan untuk perairan umum daratan POKMASWAS lubuk larangan -Tersedianya dana CPCL an movev konsultasi dan koordinasi kegiatan -Tersedianya penunjang Kegiatan (Honor pengelolaan kegiatan) -Tersedianya sarana perikanan tangkap	4.500 ton/ Tahun	2.751.574.987		389.845.000	0	0	0	0	0	0		0	389.845.000	14,17%								
						Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah sarana usaha perikanan tangkap yang terjamin dan tersedia	4.500 ton/ Tahun	1.726.394.309		211.057.099	0	0	0	0	0	0		0	211.057.099	12,23%								
						Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produksi tangkap	87%	543.818.127	88	310.426.650	5	1.855.000.000			18%	0		124%/tahun	310.426.650	57,08%								
						Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah nelayan kecil meningkat kapasitasnya	87 %	159.692.170	230	289.581.450	70	1.855.000.000			0	0		230	289.581.450	181,34%								
						Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil		89 Kelompok	384.125.958	79	20.845.200		0			0	0		79	20.845.200	5,43%								
						PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase peningkatan produksi budidaya	15 %/ tahun	25.263.937.000	15,86000	8.725.496.512	3	75.000.000	0%	0	0%	0		8.725.496.512		34,54%	DINAS PERIKANAN							
						Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		25 buah	159.822.680	0	0		0	0	18%	0		0	0		0,00%								
						Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Insentif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing		25 buah	159.822.680	0	0		0	0		0		0	0		0,00%								
						Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Persentase peningkatan produksi budidaya	87%	6.519.904.027	88,36%	3.297.448.592	85	75.000.000		0	2,3%	0		91 %/tahun	3.297.448.592	50,58%								
						Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok pembudidaya ikan kecil yang mengikuti pengembangan kapasitas	574 Kelompok	877.790.352	614	1.042.887.307	10	75.000.000			0		614	1.042.887.307	118,81%									
						Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	-Jumlah kelembagaan perikaknan yang dibina	574 Kelompok	728.555.420		802.713.290					0		0	802.713.290	110,18%									
						Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Tersedianyan bantuan untuk kelompok pembudidaya ikan	0,87	2.259.478.840	86	583.336.040					0		86	583.336.040	25,82%									

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/ Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/ Kota s/ d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan teknologi informasi serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	574 Kelompok	2.654.079.415	664	868.511.955					0			664	868.511.955		32,72%								
					Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		25 buah	466.242.789	5	4.978.000		0		0	0 buah	0			5 buah	4.978.000		1,07%							
					Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		30 buah	316.638.889	5	4.978.000		0		0		0			5	4.978.000		1,57%							
					Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		30 buah	149.603.900	0	0		0		0		0			0	0		0,00%							
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan		51.597 ton/tahun	18.117.967.504	48634	5.423.069.920		0		0	0 buah	0		48635 to/tahun		5.423.069.920		29,93%							
					Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		490 juta ekor bu	3.132.444.752	450	869.314.415		0		0		0			450	869.314.415		27,75%							
					Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya prasarana pembudidayaan ikan	51.597 ton/tahun	3.813.456.510	44514	1.034.684.320	0	0		0		0			44514	1.034.684.320		27,13%							
					Penjaminan Ketersediaan Pembudidaya Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pembudidayaan ikan	51.597 ton/tahun	1.577.191.499	44518	540.173.678	0	0		0		0			44518	540.173.678		34,25%							
					Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berkurangnya jumlah penyakit ikan	0,2	504.624.940	21	151.125.438	0	0		0		0			21	151.125.438		29,95%							
					Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya CPCL dan movev dan monitoring kegiatan perikanan	51.597 ton/tahun	219.959.804	0	44.022.500	0	0		0		0			0	44.022.500		20,01%							
					Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Meningkatnya produksi benih ikan dan luas lahan perikanan	20 Ha	8.254.474.016	91056000	2.737.767.769	0	0		0		0			91056000	2.737.767.769		33,17%							
					Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidaya Ikan di Darat		20 Ha	615.815.983	5	45.981.800	0	0		0		0			5	45.981.800		7,47%							
					PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		25 %	402.980.000	0	0		0		0	0 buah	0			ton/tahun	0		0,00%	DINAS PERIKANAN						
					Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota		89 kelompok	402.980.000	0	0		0		0	0 buah	0			ton/tahun	0		0,00%							
					Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		97 Kelompok	181.341.000	0	0		0		0		0			0	0		0,00%							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota.	97 Kelompok	221.639.000	0	0	0	0	0	0				0	0		0,00%								
					PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Tingkat konsumsi makan ikan dan persentase peningkatan produksi hasil perikanan	41,5 KG/ Kapita	3.606.320.000	40,24 25,34	1.245.270.688	-39,5 -5	10.000.000		40,24 Kg/Kapita/ta hun 25,34 %	0		40,24 Kg/Kapita/ta hun 25,34 %	1.245.270.688		34,53%	DINAS PERIKANAN							
					Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Tingkat konsumsi makan ikan dan persentase peningkatan produksi hasil perikanan	405 Ton/tahun	833.391.461	40,24 25,34	506.083.121	40	10.000.000		40,24 Kg/Kapita/ta hun 25,34 %	0		ton/tahun	506.083.121		60,73%								
					Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Derah Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan berdasarkan skal usaha dan resiko	405 Ton/tahun	833.391.461	389375	506.083.121	12	10.000.000		6	0		389381	506.083.121		60,73%								
					Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		405 Ton/tahun	475.743.420	389375	22.525.000		0	0	0 ton/tahun	0		389375 ton/tahun	22.525.000		4,73%								
					Pelaksanaan Bimbingan dan Penarapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil		405 Ton/tahun	475.743.420	389.375	22.525.000		0	0	6	0		389381	22.525.000		4,73%								
					Penyediaan dan Peyaluran Bahan Baku Industri Penglahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota		41,5 Kg/ Kapita	3.014.895.119	40,24	716.662.567		0	0	0 ton/tahun	0		40,24 Kg/kapita/ta hun	716.662.567		23,77%								
					Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		41,5 Kg/ Kapita	1.559.984.879	40,24	364.073.139		0	0	0	0		40,24	364.073.139		23,34%								
					Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menigkatkan konsumsi makan ikan	41,5 Kg/ Kapita	1.454.910.240	40,24	352.589.428	0	0	0	0	0		40,24	352.589.428		24,23%								
TOTAL URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN								70.058.561.529		24.424.267.947	10	6.447.166.344	6%	1.053.127.523	6%	1.053.127.523		0%	25.477.395.470	0%	36,37%							

					Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah inovasi daerah	105%	5.069.560.000	145%	1.047.324.194	85%	1.608.131.400	25%	183.252.419	59%	533.215.275			211%	1.230.576.613	63%	24%	Bapelitbang
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan	Jumlah buku profil kelitbangan	95	5.069.560.000	18	314.317.322	15	652.894.700	0,00	78.550.603	0,00	78.550.603			18,00	392.867.925	18,95	84,62	Bapelitbang
					Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	-	1	139.360.192	0	5.700.000	-	-			-	-			-	5.700.000	-	4,09	Bapelitbang
					Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah buku profil kelitbangan	95	324.904.453	30	175.199.882	15	53.158.000	0	1.100.000	-	18.436.903			18	134.702.338	18,95	41,46	Bapelitbang
						Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	-	-	-	-	1		0		-	-			-	-	-	-	Bapelitbang
					Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	-	-	2	214.856.169	1		0		-	1.800.000		1	110.093.201	-	-	Bapelitbang	
					Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	-	-	2	378.393.840	1		0		-	58.313.700		1	142.372.386	-	-	Bapelitbang	
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penerapan kajian Bidang Sosial dan Kependudukan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30	420.535.000	30	724.631.998	-	555.236.700	0		30	94.141.816		30	476.904.082	100,00	113,40	Bapelitbang	

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1							0	-	2	161.085.930	1	156.961.700	-	-	-	15.028.816		1	95.352.743	-	-	Bapelitbang						
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					1	84.425.000																
					Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak																						
					Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	0	-	2	95.262.288	1		0	-	21.814.000			1	69.757.404	-	-	Bapelitbang						
					Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Kajian Penelitian tentang Pengembangan Bidang Pariwisata	2	420.535.000	2	110.312.418	-		0	-	-			2	110.312.418	100,00	26,23	Bapelitbang						
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	0	-			-		-	-	-					-	-							
					Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	0	-	2	357.971.362	1	244.425.000	0	-	33.332.000			1	177.514.517	-	-	Bapelitbang						
					Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penerapan kajian Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang telah dilaksanakan pada perangkat daerah	30	1.126.070.000	10	154.194.050	30		0		30	10.560.000		13	164.754.050	44,44	14,63	Bapelitbang						
					Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Rakor Litbang Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	2	420.535.000	1	54.020.950	-	-	0	-	-	-		1	54.020.950	50,00	12,85	Bapelitbang						
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	0	-			-				0,00													
					Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Kajian tentang Penelitian/ Pengembangan Bidang Perikanan	1	285.000.000	0	-	1		-	0	-	-	-	-	-	-	-	-						
					Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Kajian tentang Penelitian/ Pengembangan Bidang Persampahan	2	420.535.000	1	100.173.100	-		-	0	-	-		1	100.173.100	50,00	23,82							
						Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	0	-			-				-													
					Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman					1																	
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Meningkatnya nilai indeks Inovasi Daerah & terfasilitasinya pengembangan inovasi dan teknologi di daerah	1700	3.058.690.355	630,67	196.050.556	1.200		-	0	-	631	-	631	196.050.556	37,10	6,41	Bapelitbang						
											(Inovatif)				(Inovatif)	-												
					Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Koordinasi kegiatan Kelitbang/ kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintah yang bersifat Inovatif yang diikuti / dilaksanakan	135	1.425.226.924	15	28.136.056	25		-	0	-	-		15	28.136.056	11,11	1,97	Bapelitbang						
						Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	0	-			-		0	-	-													
					Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah sosialisasi/bimtek diseminasi kelitbang	25	1.633.463.431	4	167.914.500	4		-	0	-	-		4	167.914.500	16,00	10,28	Bapelitbang						
						Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	0	-	1		-		0	-	-			1		-	-							
TOTAL URUSAN BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							105%	5.069.560.000	145%	1.047.324.194	85%	1.608.131.400	25%	183.252.419	59%	533.215.275			211%	1.230.576.613	63%	24%						
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	39.010.586.001	95	12.678.862.117	100%	5.896.577.466	26%	1.257.135.621	63%	4.614.611.887			47%	17.289.687.500	44%	35%						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah	100	1.246.169.300	100	303.896.935	100	119.673.000	0,00	-	0,00	20.129.000		50,00	324.025.935	69,93	26,00							
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renstra dan Renja yang disusun	11	528.461.100	9	77.677.000	1	15.732.000	0		-	-		9	77.677.000	81,82	14,70							
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2		1		0		-	-		2										
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	55.759.900	4	21.031.000	1	5.802.000	0	-	-	-		4	21.031.000	66,67	37,72							
						Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1		0		-	-													
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	55.759.900	4	32.334.000	1	8.703.000	0	-	-	-		4	32.334.000	66,67	57,99							
						Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1		0		-	-													
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	55.759.900	4	16.252.000	1	5.802.000	0		-	-		4	16.252.000	66,67	29,15							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								5		6		7		8						9		10			11	
								1	2	3	4	5	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K		Rp.	K
							Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1		0														
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		6	55.759.900	4	21.944.000	1	8.568.000	0	-	-	-			4	21.944.000	66,67	39,35			
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1		0														
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		25	380.691.900	13	179.155.135	5	69.264.000	2	-	2	-			14	179.155.135	56,00	47,06			
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5		0		-												
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		20	113.976.700	14	51.283.800	4	5.802.000	2	-	2	-			17	51.283.800	85,00	44,99			
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4		2		2		2										
						Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan		6	-	6	-	0		-	-	-	-			6	-	100,00	-			
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	100	21.158.091.090	100	8.909.418.257	100	4.438.284.333	0,00	1.131.553.803	0,00	3.685.335.839			50,00	12.594.754.096	73,51	59,53			
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN dan calon ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangan	84	20.443.087.902	56	13.097.361.534	14	4.408.136.757	4	1.130.281.491	7	2.185.914.881			63	15.283.276.415	75,00	74,76			
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42		42			43										
						Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah non ASN yang mendapatkan luran jaminan/Asuransi	84	237.149.272	50	75.017.844	12	12.741.576	3	1.272.312	9	1.272.312			59	76.290.156	70,24	32,17			
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1		0		-		-									
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bapelitbang	6	189.712.827	4	35.119.400	1	5.802.000	0	-	-	-			4	35.119.400	66,67	18,51			
							Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1		0		-		-									
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan dan semesteran yang disiapkan	72	184.029.087	48	32.543.000	12	5.802.000	3	-	9	-			57	32.543.000	79,17	17,68			
							Jumlah laporan keuangan semesteran yang disiapkan	6	-	4	-	1	-	0		-	-			4	-	66,67	-			
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD				12		1		1		1									
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan hasil analisis prognosis realisasi anggaran yang disusun	6	104.112.002	4	22.265.000	1	5.802.000	0	-	1	-			5	22.265.000	83,33	21,39			
							Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1		0		-		-									
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi barang milik daerah	100	173.452.339	100	53.049.900	100	12.860.000	0,00	-	0,00	9.484.000			50,00	62.533.900	85,71	36,05			
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan barang milik daerah	7	173.452.339	5	76.956.900	1	12.860.000	1		1	-			6	76.956.900	85,71	44,37			
							Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1		1		1		1									
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	300.000.000	75	28.000.000	100	-	0,00	-	0,00	-			37,50	28.000.000	20,59	9,33			
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribusi kelengkapannya	340	300.000.000	70	28.000.000	70		0	-	-	-			70	28.000.000	20,59	9,33			
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				-		0		-		-									
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	100	3.844.543.177	100	1.109.559.890	100	378.003.743	0,00	23.832.779	67,00	178.069.759			83,50	1.287.629.649	62,86	33,49			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	2				3	4	36	123.841.602	24	30.834.560	6	10.660.000	0	-	-	-		24	30.834.560	66,67	24,90							
					Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan					6		0															
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan							0															
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	10	1.161.450.000	4	42.233.500	2	11.030.000	0	-	-	-		4	42.233.500	40,00	3,64							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan					3		0															
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	30	259.289.523	23	162.337.102	5	52.700.000	1	1.000.000	1	1.000.000		25	163.337.102	83,33	62,99							
						-	1	-	1	-	-	-	1		1	-		2	-	200,00	-							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan					5		1		1													
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	36	359.631.352	24	137.303.411	6	81.962.743	0	-	2	-		26	137.303.411	72,22	38,18							
						Jumlah Penggandaan yang disediakan	390.000	-	260.000	-	65.000		0		-	-		260.000	-	66,67	-							
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan					1		0		-	-												
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	12	114.302.000	12	40.300.000	-	11.400.000	0	-	-	-		12	40.300.000	100,00	35,26							
						Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	5500	-	2200	-	1.100		0		-	-		2.200	-	40,00	-							
						Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					1		0		-	-												
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	300	236.157.700	300	100.019.586	300	25.005.000		2.000.000	-	2.000.000		300	102.019.586	100,00	43,20							
						Jumlah tamu yang dilayani	1300	-	600	-	200				-	-		600	-	46,15	-							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu					1				-	-												
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	491	1.589.871.000	491	937.305.175	491	185.246.000	100	20.832.779	100	20.832.779		591	958.137.954	120,37	60,27							
						Jumlah laporan hasil koordinasi dan konsultasi	120	-	72	-	24		6		6	-		78	-	65,00	-							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					24		6		6													
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	100	5.998.425.100	87,5	264.236.397	100	8.200.000	0,00	-	25,25	380.265.000		56,38	644.501.397	56,38	10,74							
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan dinas roda 2 yang diadakan	19	2.494.380.000	0	365.000.000	0		0		-	-		-	365.000.000	-	14,63							
						Jumlah Kendaraan dinas roda 4 yang diadakan	5	-	2	-	1		0		-	-		2	-	40,00	-							
						Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan					1		0															
					Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang disediakan	30	2.569.550.000	12	215.977.297	6		0		-	-		12	215.977.297	40,00	8,41							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					27		0															
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang disediakan	10	808.925.750	6	116.056.000	2	8.200.000	0	-	-	-		6	116.056.000	60,00	14,35							
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					2		1		1													
					Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang disediakan	5	112.944.350	1	-	1		0		-	-		1	-	20,00	-							
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	1	12.625.000	1	9.968.100	-		-		-	-		1	9.968.100	100,00	78,96							
						Jumlah paket pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	-	1	-	-		-		-	-		1	-	100,00	-							
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	2.720.183.020	100	933.824.758	100	335.947.000	0,00	53.796.139	21,08	164.781.615		60,54	1.098.606.373	35,56	40,39							
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	12	831.689.000	12	57.115.989	-				-	-		12	57.115.989	100,00	6,87							
						Jumlah tagihan Air (PDAM) yang dibayarkan	1500	-	1500	220.970.162	1500	83.947.000	375	15.596.139	375	15.596.139		375	236.566.301	25,00	-							
						Jumlah tagihan listrik (PLN) yang dibayarkan	36000	-	36000	-	36.000		9.000		9.000	-		9.000	-	25,00	-							
						Jumlah kapasitas tagihan internet yang dibayarkan	12	-	12	-	12		3		3	-		3	-	25,00	-							
						Jumlah rekening tagihan telepon/fax yang dibayarkan	12	-	12	-	12		3		3	-		3	-	25,00	-							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	0				12		3		3	-												

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	72	230.933.920	15	46.154.280	-				-	-		15	46.154.280	20,83	19,99							
					Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara		72	-	24	22.054.600	12		0		-	-		24	22.054.600	33,33	-							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						-		0		-													
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	600	1.657.560.100	600	206.100.000	600		0		-	-		600	206.100.000	100,00	12,43							
					Jumlah Tenaga Pelayanan umum kantor yang tersedia		60	-	36	664.397.264	12	252.000.000	12	38.200.000	12	38.200.000		48	702.597.264	80,00	-							
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						1		0		-													
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah yang berkategori baik	100	3.569.721.975	95,835	1.076.875.980	100	603.609.390	0,00	47.952.900	#VALUE!	172.760.170		#VALUE!	1.249.636.150	44,26	35,01							
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan roda 2 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya	72	2.216.203.000	47	943.352.679	12	236.700.000	2	46.958.200	2	46.958.200		49	990.310.879	68,06	44,69							
						-	7	-	7	-	-		-		-	-		7	-	100,00	-							
						-	100	-	100	-	-		-		-	-		100	-	100,00	-							
					Jumlah kendaraan roda 4 yang dibiayai pembayaran pajak dan perizinannya		35	-	20	-	7		2		2	-		22	-	62,86	-							
					Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara		95	-	57	-	19		5		5	-		62	-	65,26	-							
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya						12		3		3													
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					3	41.710.000	1	994.700														
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	5	122.102.000	0	-	1				-	-		-	-	-	-							
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	5	960.600.000	2	406.353.135	1	325.199.390	0		-	-		2	406.353.135	40,00	42,30							
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1		1															
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	17	270.816.975	6	112.096.071	3		0		-	-		5	112.096.071	29,41	41,39							
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						-		0		-													
					Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	85%	15.342.780.000	91%	1.569.489.842	78%	301.593.695	3%	8.285.000	74%	28.225.000		47%	1.512.177.004	44%	35%							
					Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	85	10.050.722.000	98,08	1.220.943.858	78	289.163.695	0,00	8.285.000	0,00	28.225.000		0,00	1.249.168.858	-	12,43							
					Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisa kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan	1	1.077.699.000	1	28.035.380	1		0		-	-		1	28.035.380	100,00	2,60							
					Jumlah Dokumen IKU Kepala Daerah		1	-	1	-	-		0		-	-		1	-	100,00	-							
					Jumlah Dokumen Indikator Kinerja Daerah		1	-	1	-	-		0		-	-		1	-	100,00	-							
					Julah Perbup IKU Kepala Daerah		1	-	1	-	-		0		-	-		1	-	100,00	-							
					Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah dokumen integrasi rancangan RKPD dengan rencana pembangunan lainnya (Renstra OPD,RPJMD, RKPD Provinsi, RTRW, KLHS, SDG	1	1.228.165.000	1	61.852.074	1		0		-	-		1	61.852.074	100,00	5,04							
					Jumlah dokumen integrasi rancangan RPJMD dengan rencana pembangunan lainnya (Renstra OPD,RPJMN, RPJPD,RPJMD Provinsi, RTRW, KLHS, SDG		1	-	1	-	-		0		-	-		1	-	100,00	-							
					Jumlah dokumen integrasi rancangan RPJPD dengan rencana pembangunan lainnya (RPJPD Nasional,RPJMN, RPJPD Daerah tetangga RPJPD		1	-	0	-	1		0		-	-		-	-	-	-							
					Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah konsultasi publik RKPD	1	1.123.614.000	1	129.827.332	1	30.000.000	1	2.240.000	1	2.240.000		1	132.067.332	100,00	11,75							
					Jumlah konsultasi publik RPJMD		1	-	-	-	-		1		1	-		#VALUE!	-	#VALUE!	-							
					Jumlah konsultasi publik RPJPD				1	-	-		0		-	-		1	-	-	-							
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				2				2		2													
					Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ Lintas SKPD	Jumlah forum gabungan RKPD/ Lintas SKPD	1	589.009.000	2	7.307.900	1		1		1	-		3	7.307.900	300,00	1,24							
					Jumlah forum RPJMD		1	-	1	-	-		1		1	-		2	-	200,00	-							
					Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Musrenbang RKPD tingkat Kabupaten yang difasilitasi pelaksanaannya	3	506.536.000	1	141.096.100	1	44.996.920	1		1	-		1	141.096.100	33,33	27,86							
						-		-	-	-	-		0		-	-		-	-	-	-							
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota						2		2		2													

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
													1											
							5		6		7		8					9		10			11	12
1	2				3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
					Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan yang didampingi pelaksanaannya	13	368.638.000	13	35.395.050	13		13		13	-		13	35.395.050	100,00	9,60			
						Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan										-								
					Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD	3	5.157.061.000	3	858.977.022	3	214.166.775	1	6.045.000	1	6.045.000		3	865.022.022	100,00	16,77			
						Jumlah Perbup RKPD Kab. Lima Puluk Kota yang diterbitkan	1	-	1	-	1		0			-	-	1	-	100,00	-			
						Jumlah dokumen perubahan RKPD	1	-	1	-	1		0			-	-	1	-	100,00	-			
						Jumlah Perbup perubahan RKPD Kab. Lima Puluh Kota yang diterbitkan	1	-	1	-	1		0			-	-	1	-	100,00	-			
						Jumlah tenaga operator perencanaan/e-planning	2	-	2	-	2		0			-	-	2	-	100,00	-			
						Jumlah dokumen RPJMD (Rancangan Awal, Rancangan, Rancangan Akhir)	3	-	3	-	3		0			-	-	3	-	100,00	-			
						Jumlah Perda RPJMD	1	-	1	-	1		0			-	-	1	-	100,00	-			
						Jumlah dokumen RPJPD (Rancang Awal, Rancangan, Rancangan Akhir)	3	-	6	-	3		0			-	-	6	-	200,00	-			
						Jumlah Perda RPJPD	1	-	2	-	-		0			-	-	2	-	200,00	-			
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPd/RPJMD/RKPD)					3		0			-								
					Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)	85	1.768.139.000	103,54	90.769.898	78	12.430.000	0,00	-	0,00	-		0,00	90.769.898	-	5,13			
					Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis data	1	409.618.000	1	16.115.300	1	12.430.000	0	-	-	-		1	16.115.300	100,00	3,93			
						Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) yang Ditetapkan(RPJPd/RPJMD/RKPD)					1		0			-								
					Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Dokumen SIPD Database	1	689.234.000	1	38.889.398	1		0	-	-	-		1	38.889.398	100,00	5,64			
						Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi					-		-		#VALUE!									
					Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen profil daerah	1	669.287.000	1	35.765.200	1		0	-	-	-		1	35.765.200	100,00	5,34			
						Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan					-		-		#VALUE!									
					Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks kualitas perencanaan pada dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi perencanaan dan penganggaran, capaian kinerja dan serapan anggaran)	85	3.523.919.000	72,27	257.776.086	78	-	0,00	-	0,00	-		0,00	257.776.086	-	7,32			
					Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen capaian kinerja RPJMD	2	1.248.932.000	2	109.903.514	2		-	-	-	-		2	109.903.514	100,00	8,80			
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RKPD (triwulan dan akhir)	4	-	4		4		1	-	1	-		4	4	100,00	-			
						Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi RPJMD dan evaluasi RPJPD					-		-											
						Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan					-		-		#VALUE!									
					Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1	998.197.000	1	-	1		1	-	1	-		2	-	200,00	-			
					Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan DAK	1	1.276.790.000	1	147.872.572	1		-	-	-	-		1	147.872.572	100,00	11,58			
						Jumlah dokumen evaluasi DAK	4	-	12	-	4		1	-	1	-		13	-	325,00	-			
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah					-		-		#VALUE!									
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	85%	16.167.040.000	82%	1.787.291.359	78%	451.865.562	30%	3.386.000	62%	44.449.146		47%	71.095.078.163	44%	35%			
					Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	85	6.382.130.960	91,1	696.912.869	78	199.070.585	0,00	1.200.000	91,10	10.000.000		91,10	706.912.869	107,18	11,08			
					Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan	14	1.051.995.300	12	224.671.249	1	50.000.000	0	1.200.000	-	10.000.000		12	234.671.249	85,71	22,31			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1						3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	-	5	599.951.400	5	7.242.880	-	0	-	-	-		5	7.242.880	100,00	1,21								
						Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		6	-	1	-	1	0	-	-	-		1	-	16,67	-								
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		6	509.876.800	2	2.016.500	1	0	-	-	-		2	2.016.500	33,33	0,40								
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	-	1	555.879.800	1	65.200.440	-	0	-	-	-		1	65.200.440	100,00	11,73								
						Jumlah laporan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi program-program prioritas nasional		6		3	75.368.030	1	0	-	-	-		3	75.368.030	50,00	-								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan					-	-		#VALUE!															
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		14	1.035.554.100	10	97.953.800	1	0	-	-	-		10	97.953.800	71,43	9,46								
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	-	5	546.858.800	5	8.000.851	-	0	-	-	-		5	8.000.851	100,00	1,46								
						Jumlah laporan Asistensi penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia		6	-	1	-	1	0	-	-	-		1	-	16,67	#DIV/0!								
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		6	502.406.800	2	1.508.700	1	0	-	-	-		2	1.508.700	33,33	0,30								
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		6	579.913.800	4	262.396.966	1	0	-	-	-		4	262.396.966	66,67	45,25								
						Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan kabupaten sehat		5	388.962.240	3	-	1	0	-	-	-		3	-	60,00	-								
						Jumlah laporan pelaksanaan konvergensi stunting kabupaten Lima Puluh Kota		5	610.731.920	3	-	1	0	-	-	-		3	-	60,00	-								
						Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia					-	-		-		#VALUE!													
						Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		85	3.959.389.500	77,04	266.057.261	78	106.998.000	0,00	-	0,00	5.766.893	0,00	271.824.154	-	6,87								
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)		0	1.093.836.000	0	104.929.950	-	56.000.000	-	-	-	-	-	104.929.950	-	9,59								
						Jumlah laporan Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Lap.)		6				1	0		-														
						Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						1	0		-														
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		6	785.264.000	2	61.318.858	1	0	-	-	-	-	2	61.318.858	33,33	7,81								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian (Lap.)	5	438.965.500	1	-	1	-	0	-	-	-		1	-	20,00	-							
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)			648.393.000	0	70.478.953	-	50.998.000	-	-	-	-		-	70.478.953	-	10,87							
							Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Lap.)	6				1		0	-	-													
							Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					1		0	-	-													
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang SDA (Lap.)	6	643.753.000	2	29.329.500	1		0	-	-	-		2	29.329.500	33,33	4,56							
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (Lap.)	5	349.178.000	1	-	1		0	-	-	-		1	-	20,00	-							
						Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indeks kualitas perencanaan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	85	5.825.519.540	78,71	938.086.182	78	145.796.977	0,00	2.186.000	0,00	28.682.253		0,00	966.768.435	-	16,60							
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (lap.)	6	702.790.500	2	27.650.564	1		0	-	-			2	27.650.564	33,33	3,93							
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (lap.)	6	656.229.800	2	22.181.736	1		0	-	-			2	22.181.736	33,33	3,38							
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah dibawah koordinasi bidang infrastruktur (lap.)	6	510.515.000	2	20.942.650	1		0	-	-	-		2	20.942.650	33,33	4,10							
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi (lap.) dan Dokumen pemutakhiran SSK	6	1.279.114.000	4	597.798.970	1	73.000.000	0	550.000	-	550.000		4	598.348.970	66,67	46,78							
							Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pengelolaan Irigasi Partisipatif (lap.)	6	-	4	-	1		0	-	-	-		4	-	66,67	-							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1		0	-	-	-													
						Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah laporan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan (lap.)	6	515.560.000	2	22.229.900	1		0	-	-			2	22.229.900	33,33	4,31							
						Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan perangkat daerah bidang kewilayahan (lap.)	6	487.898.740	2	50.583.800	1		0	-	-	-		2	50.583.800	33,33	10,37							
						Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah bidang kewilayahan dan lingkungan hidup (lap)	6	839.112.000	4	77.279.074	1		0	-	-	-		4	77.279.074	66,67	9,21							
							Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan monitoring dan evaluasi dalam penyusunan Renstra/Renja bidang Kewilayahan				-		0	-	-	-													
						Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (lap.)	6	834.299.500	4	151.195.741	1	72.796.977	0	1.636.000	-	1.636.000		4	152.831.741	66,67	18,32							
							Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1		0	-	-	-													
TOTAL URUSAN BIDANG PERENCANAAN								90%	70.520.406.001	3224%	16.035.643.318	85%	6.650.036.723	20%	1.268.806.621	66%	4.687.286.033		47%	89.896.942.667	44%	35%	-						
	5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																							
	5	02				KEUANGAN																							

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
													1										
							1	2				3	4	K				Rp.	K	Rp.	K		Rp.
	5	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Skor IKM Badan Keuangan	85	206.958.202.884	85	72.154.439.620	85	19.999.744.652	85	2.100.774.787	85	Rp2.100.774.787			85	74.255.214.407	100%	36%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5	02	01	2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	711.555.703	85	343.647.000	85	116.968.600	85	31.660.000	85	Rp31.660.000			85	375.307.000	100%	53%	
	5	02	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	95.560.405	11	48.830.000	4	16.999.900	1	13.068.000	1	Rp13.068.000		12	61.898.000			
	5	02	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6	90.509.260	4	40.828.800	1	14.969.000	1	2.990.000	1	Rp2.990.000		5	43.818.800			
	5	02	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	85.885.715	3	38.570.000	1	16.999.900	0	0	0	Rp0		3	38.570.000			
	5	02	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6	74.498.301	5	42.610.400	1	16.999.800	1	2.798.000	1	Rp2.798.000		6	45.408.400			
	5	02	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	151.485.043	4	60.848.800	2	19.000.000	1	0	1	Rp0		5	60.848.800			
	5	02	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	115.150.057	30	53.973.000	12	13.000.000	3	5.374.000	3	Rp5.374.000		33	59.347.000			
	5	02	01	2,01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12	98.466.923	36	57.986.000	12	19.000.000	3	7.430.000	3	Rp7.430.000		39	65.416.000			
	5	02	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	85	189.658.262.798	85	66.038.738.003	85	17.380.519.572	85	1.765.676.825	85	Rp1.765.676.825			85	67.804.414.828	100%	36%	
	5	02	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64	189.392.906.567	256	65.880.483.803	64	17.317.182.072	64	1.739.526.825	0	Rp1.739.526.825		256	67.620.010.628			
	5	02	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	56.231.234	1	39.287.000	1	12.999.800	0	3.570.000	0	Rp3.570.000		1	42.857.000			
	5	02	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuanga Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan La Koordinasi Penyusunan L. Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	13	132.094.529	22	103.706.200	13	40.337.900	3	22.580.000	3	Rp22.580.000		25	126.286.200			
	5	02	01	2,02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	77.030.468	2	15.261.000	1	9.999.800	0	0	0	Rp0		2	15.261.000			
	5	02	01	2,05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	917.392.928	85	360.270.000	85	78.500.000	85	0	85	Rp0			85	360.270.000	100%	39%	
	5	02	01	2,05	9	pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	tersedianya pakaian dinas beserta atribut dan kelengkapannya	194	276.281.563	106	97.000.000	0	54.000.000	0	0	0	Rp0		106	97.000.000			
	5	02	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	7	278.491.815	3	23.000.000	7	12.000.000	0	0	0	Rp0		3	23.000.000			
	5	02	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6	362.619.551	4	240.270.000	1	12.500.000	0	0	0	Rp0		4	240.270.000			
	5	02	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	3.720.317.038	85	1.648.994.608	85	357.215.800	0	44.147.250	0	Rp44.147.250			68	1.693.141.858	80%	46%	
	5	02	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	232.940.998	4	68.650.000	1	12.755.000	0	0	0	Rp0		4	68.650.000			
	5	02	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	203.011.830	16	43.900.500	1	6.524.000	0	218.000	0	Rp218.000		16	44.118.500			
	5	02	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	71.119.847	4	28.983.000	1	5.985.000	0	240.000	0	Rp240.000		4	29.223.000			
	5	02	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	523.196.191	6	199.527.900	1	52.678.800	1	2.630.000	1	Rp2.630.000		7	202.157.900			
	5	02	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Pengendaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengandaan yang Disediakan	1	600.100.545	5	189.597.600	1	27.000.000	1	4.196.750	1	Rp4.196.750		6	193.794.350			
	5	02	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	135	28.528.005	52	4.560.000	24	1.215.000	0	0	0	Rp0		52	4.560.000			
	5	02	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	24	391.629.115	33	177.503.640	12	76.000.000	3	11.615.000	3	Rp11.615.000		36	189.118.640			
	5	02	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	1.669.790.507	185	936.271.968	60	175.058.000	20	25.247.500	20	Rp25.247.500		205	961.519.468			
	5	02	01	2,07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Skor IKM Badan Keuangan	85	3.561.214.084	85	411.917.648	85	835.470.000	0	0	0	Rp0			68	411.917.648	80%	12%	
	5	02	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	5	2.407.793.817	0	0	3	533.860.000	0	0	0	Rp0		0	-			
	5	02	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	tersedianya mebel	5	95.731.561	6	73.300.000	25	20.350.000	0	0	0	Rp0		6	73.300.000			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab							
										I																
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.			
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		
	5	02	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	15	1.057.688.706	11	338.617.648	7	281.260.000	K	0	0	0	Rp0			11	338.617.648				
	5	02	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100%	4.956.868.853	100	2.077.157.287	100	678.315.980	25%	190.119.710	25%	Rp190.119.710			85%	2.267.276.997	85%	46%			
	5	02	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat,	1	64.986.065	5	11.615.550	12	6.291.000	3	0	3	Rp0			8	11.615.550					
	5	02	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya kjasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	1.247.411.255	33	406.378.425	12	153.999.980	3	30.404.944	3	Rp30.404.944			36	436.783.369					
	5	02	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tersedianya jasa pelayanan umum kantor	12	3.644.471.533	33	1.659.163.312	12	518.025.000	3	159.714.766	3	Rp159.714.766			36	1.818.878.078					
	5	02	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	100%	3.432.591.479	100	1.273.715.074	100	552.754.700	25%	69.171.002	25%	Rp69.171.002			85%	1.342.886.076	85%	39%			
	5	02	01	2,09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	33	2.287.346.107	94	873.058.382	37	425.675.000	20	66.147.002	20	Rp66.147.002			114	939.205.384					
	5	02	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	35	406.081.680	100	199.510.000	35	26.979.700	25	2.839.000	25	Rp2.839.000			125	202.349.000					
	5	02	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Baneunan Lainnya	terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1	739.163.692	2	201.146.692	1	100.100.000	0	185.000	0	Rp185.000			2	201.331.692					
	5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	1.009.209.563.306	WTP	396.777.337.463	WTP	178.637.654.816		529.017.820	WTP	Rp529.017.820			WTP	Rp397.306.355.283	83%	39,37%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH		
	5	02	02	2,01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Opini Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	11.147.704.321	WTP	3.558.110.583	WTP	1.311.225.200		134.151.000	WTP	Rp134.151.000			WTP	3.692.261.583	83%	33%			
	5	02	02	2,01	01	Koordinasi dan Penyusunan KIA dan PPAS	"1. KIA dan PPAS (2 dok) 2. Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah"	2	1.513.445.783	8	417.892.200	4	181.739.000	4	0	4	Rp0			12	417.892.200					
	5	02	02	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KIA dan Perubahan PPAS	1. KIA-P dan PPAS-P 2. Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2	1.289.735.048	8	397.729.900	4	177.384.000	0	0	0	Rp0			8	397.729.900					
	5	02	02	2,01	03	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Dokumen RKA SKPD Fasilitas Tim Anggaran Pemerintah Daerah Perubahan RKA SKPD	46	1.092.211.828	227	252.852.000	43	74.300.000	43	0	43	Rp0			270	252.852.000					
	5	02	02	2,01	04	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	46	1.062.539.105	181	382.524.500	43	117.400.000	0	49.400.000	0	Rp49.400.000			181	431.924.500					
	5	02	02	2,01	05	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	48	722.641.005	187	272.122.900	43	73.211.000	43	59.506.000	43	Rp59.506.000			230	331.628.900					
	5	02	02	2,01	06	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	1. Dokumen Perubahan DPA SKPD (46 DPPA)	46	834.953.273	135	302.452.400	43	135.688.000	0	0	0	Rp0			135	302.452.400					
	5	02	02	2,01	07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1.817.148.649	18	768.018.635	6	201.833.100	6	11.965.000	6	Rp11.965.000			24	779.983.635					
	5	02	02	2,01	08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1.437.939.689	18	552.538.548	6	191.260.100	0	6.108.000	0	Rp6.108.000			18	558.646.548					
	5	02	02	2,01	09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	4	694.152.453	13	163.134.500	4	158.410.000	1	7.172.000	1	Rp7.172.000			14	170.306.500					
	5	02	02	2,01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Koordinasi Penerimaan Bagi Hasil	2	167.889.951	2	12.620.000	0	0	0	0	0	Rp0			2	12.620.000					
	5	02	02	2,01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja	4	185.614.795	8	20.265.000	4	0	0	0	0	Rp0			8	20.265.000					
	5	02	02	2,01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Koordinasi Perencanaan Pembiayaan	2	121.213.562	2	15.960.000	0	0	0	0	0	Rp0			2	15.960.000					
	5	02	02	2,01	13	Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Sosialisasi dan Workshop	2	208.219.180	2	0	0	0	0	0	0	Rp0			2	-					
	5	02	02	2,02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Pelaksanaan Perbendaharaan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu	WTP	5.773.313.140	WTP	1.389.110.123	WTP	392.000.000	WTP	62.714.900	WTP	Rp62.714.900			WTP	1.451.825.023	83%	25%			
	5	02	02	2,02	01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12	2.380.988.980	33	485.173.558	12	60.000.000	4	5.268.000	4	Rp5.268.000			37	490.441.558					
	5	02	02	2,02	03	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	172	147.947.616	388	62.472.000	172	20.000.000	50	0	50	Rp0			438	62.472.000					
	5	02	02	2,02	04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	12	152.880.403	24	58.447.300	12	40.000.000	4	17.862.000	4	Rp17.862.000			28	76.309.300					

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				5		6		7		8					9		10			11	
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
	5	02	02	2.02	05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi , Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana transfer Lainnya	12	971.630.093	33	262.583.836	12	26.000.000	4	0	4	Rp0	37	262.583.836		
	5	02	02	2.02	06	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Pelaksanaan Koordinasi dengan instansi	4	276.281.563	0	0	2	39.000.000	1	18.499.000	1	Rp18.499.000	1	18.499.000		
	5	02	02	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1. Data realisasi tunjangan profesi guru 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru 3. Data realisasi tunjangan khusus guru 4. Data realisasi DAU 5. Data realisasi DAK 6. Data realisasi DBH	18	501.906.072	48	88.841.000	18	20.000.000	0	0	0	Rp0	48	88.841.000		
	5	02	02	2.02	08	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1. Koordinasi Piutang dan Utang Daerah 3 (Catur Wulan) 2. Dokumen Piutang dan Utang Daerah 2 (SMT) 3. Penempatan Deposito Pemda 4 (Tahapan)	9	133.153.899	18	35.965.513	9	20.000.000	1	3.890.000	1	Rp3.890.000	19	39.855.513		
	5	02	02	2.02	09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi terkait	86	669.922.504	93	266.615.600	86	60.000.000	30	8.134.000	30	Rp8.134.000	123	274.749.600		
	5	02	02	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	8	538.602.010	4	129.011.316	8	107.000.000	2	9.061.900	2	Rp9.061.900	6	138.073.216		
	5	02	02	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten /Kota	Sosialisasi, Bimtek											-			
	5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang tepat waktu dan tepat mutu	WTP	4.096.002.193	WTP	1.342.123.013	WTP	350.000.000	WTP	39.184.000	WTP	Rp39.184.000	WTP	1.381.307.013	83%	34%
	5	02	02	2.03	01	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan 3. laporan Keuangan Semester 4. laporan Prognosis														
	5	02	02	2.03	02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban,Ekuitas, Penadapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-Lo dan Beban	2	415.010.823	6	99.729.800	12	30.000.000	3	2.926.000	3	Rp2.926.000	9	102.655.800		
	5	02	02	2.03	03	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	-Konsultasi Ke BPK	4	109.867.342	12	85.313.400	4	25.000.000	1	0	1	Rp0	13	85.313.400		
							-Penyampaian Laporan ke Propinsi	3		9		3	0	0	0	0	Rp0	9	-		
	5	02	02	2.03	04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1. Konsolidasi Laporan Keuangan OPD (43 OPD)	43	206.578.266	130	174.964.369	65	42.000.000	0	22.227.000	0	Rp22.227.000	130	197.191.369		
							2. Konsolidasi Laporan Keuangan BLUD (23 mekanisme, 1 RSUD)	24		72		24	0	0	0	0	Rp0	72	-		
							3. Rekonsiliasi data BLUD (4 Kali)	4		12		4	0	0	0	0	Rp0	12	-		
							4. Rekonsiliasi data Keuangan dengan BUMD	1		3		1	0	0	0	0	Rp0	3	-		
	5	02	02	2.03	05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku)	60	854.633.361	180	298.532.470	2	76.000.000	0	0	0	Rp0	180	298.532.470		
							2. Nota Penyampaian LPP APBD (60 buku)	60		180		60	0	0	0	0	Rp0	180	-		
							3. Perda APBD (60 buku)	60		180		60	0	0	0	0	Rp0	180	-		

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab				
								5		6		7		8					9		10	11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.
1						3	4. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali)	4		8		4	0	0	0	0	Rp0		8		-						
							5. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali)	4		8		4	0	0	0	0	Rp0		8		-						
							6. Penyampaian Evaluasi (1 kali)	1		2		1	0	0	0	0	Rp0		2		-						
							7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	1		2		1	0	0	0	0	Rp0		2		-						
5	02	02	2.03	06	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	- Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut LHP BPK (4 dok)	4	325.592.323	12	42.618.900	4	0	0	0	0	Rp0		12	42.618.900								
							- Penyampaian LHP ke BPK (4 dok)	4		12		4	0	0	0	0	Rp0		12		-						
5	02	02	2.03	07	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	- Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi dengan Inspektorat	2	188.094.532	0	-	0	0	0	0	0	Rp0		0		-							
							- Terlaksananya tindak lanjut TPTGR	1		0		0	0	0	0	Rp0		0		-							
							- Tersedianya data TPTGR dari OPD	2		0		0	0	0	0	Rp0		0		-							
5	02	02	2.03	08	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	1.Laporan Analisis Pertanggungjawaban APBD	1	48.721.563	1	11.558.500	0	0	0	0	0	Rp0		1	11.558.500								
							2.Laporan Evaluasi Gubernur atas Ranperda LPP APBD	1		1		0	0	0	0	Rp0		1		-							
5	02	02	2.03	09	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	60	390.958.414	150	114.969.500	60	47.000.000	0	0	0	Rp0		150	114.969.500								
							2. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah	60		180		60	0	0	0	Rp0		180		-							
							3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku)	60		180		60	0	0	0	Rp0		180		-							
							4. Konsultasi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI (2 kali)	2		4		2	0	0	0	Rp0		4		-							
							5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	1		2		1	0	0	0	Rp0		2		-							
5	02	02	2.03	10	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1.Perubahan Sistem dan prosedur akuntansi	60	304.030.675	60	30.748.800	0	0	0	0	0	Rp0		60	30.748.800								
5	02	02	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	1. laporan keuangan daerah (Buku)	1	783.918.487	2	458.424.774	50	130.000.000	0	14.031.000	0	Rp14.031.000		2	472.455.774								
							2. Peningkatan SDM Penyusunan laporan keuangan daerah	2		4		2	0	0	0	Rp0		4		-							
							3. Bimtek penyusunan laporan keuangan (2 kali)	2		4		2	0	0	0	Rp0		4		-							
							4. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah (1 paket)	1		2		1	0	0	0	Rp0		2		-							
5	02	02	2.03	12	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	1. Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan BLUD RSUD dan BLUD Puskesmas	1	192.314.844	1	25.262.500	1	0	0	0	0	Rp0		1	25.262.500								
							2. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan BLUD	3		3		3	0	0	0	Rp0		3		-							
							3. Konsultasi ke Komite Standar Akuntansi	1		1		1	0	0	0	Rp0		1		-							
5	02	02	2.03	13	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Laporan Realisasi Anggaran	12	276.281.563	0	-	0	0	0	0	0	Rp0		0		-							
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK Terhadap LKPD	WTP	985.450.855.555	WTP	389.435.762.594	WTP	176.246.781.616	WTP	273.546.870	WTP	Rp273.546.870		WTP	389.709.309.464	83%	40%						
5	02	02	2.04	08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Dana BH Pajak dan Retribusi II	12	941.352.837.032	27	380.631.663.255	79	167.040.752.500	79	66.703.750	79	Rp66.703.750		106	380.698.367.005								
							Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBD	79		79		79	0	79	0	Rp0		158		-							
							Teralokasikannya Dana Desa ke 79 Nagari yang bersumber dari APBN	79		79		79	0	79	0	Rp0		158		-							
							Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79		79		79	0	0	0	Rp0		79		-							
							Tersalurinya DD dan ADD	79		79		79	0	79	0	Rp0		158		-							
							Terwujudnya pelaksanaan bantuan keuangan untuk Partai Politik	79		79		79	0	79	0	Rp0		158		-							
5	02	02	2.04	09	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Tersedianya Belanja Tidak Terduga	13	20.306.694.844	16	3.634.930.709	12	2.500.000.000	0	206.843.120	0	Rp206.843.120		16	3.841.773.829								
5	02	02	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bagi Hasil Pajak dan retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	79	23.791.323.679	277	5.169.168.630	79	6.706.029.116	0	0	0	Rp0		277	5.169.168.630								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	5	02	02	2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah secara elektronik	95%	2.741.688.098	95	1.052.231.150	95	337.648.000	19.421.050	0%	Rp19.421.050			47,5	1.071.652.200	39%								
	5	02	02	2.05	02	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	12	1.631.172.976	33	725.687.850	12	191.679.000	3	19.421.050	3	Rp19.421.050		36	745.108.900								
	5	02	02	2.05	03	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Pemeliharaan SIPD Bidang Keuangan SIPD	176	1.110.515.122	246	326.543.300	105	145.969.000	0	0	0	Rp0		246	326.543.300								
	5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Opini BPK atas LKPD	WTP	6.301.336.826	WTP	1.844.552.579	WTP	690.610.700		86.787.000	0%	Rp86.787.000		WTP	1.931.339.579	83%	31%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan BMD diselenggarakan sesuai dengan regulasi (Perda, Perkada, dan SK Kada), transparan, akuntabel, efisien, berkepastian hukum,dan memberikan nilai tambah bagi Pemda	100%	6.301.336.826	100	1.844.552.579	100	690.610.700		86.787.000	0%	Rp86.787.000		50	1.931.339.579	31%							
	5	02	03	2.01	01	Penyusunan Standar Harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	55	364.776.122	165	160.486.300	55	70.160.900	0	0	0	Rp0		165	160.486.300								
	5	02	03	2.01	02	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku standar kebutuhan Barang Milik Daerah	1	135.706.741	2	23.597.500	1	10.000.000	0	0	0	Rp0		2	23.597.500								
	5	02	03	2.01	03	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD	55	329.154.118	165	104.596.200	55	45.000.000	0	0	0	Rp0		165	104.596.200								
	5	02	03	2.01	04	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKPMD	55	220.865.476	55	57.798.900	0	0	0	0	0	Rp0		55	57.798.900								
	5	02	03	2.01	05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku lampiran aset 20 buku)	20	626.651.258	20	180.244.866	0	110.513.000	0	0	0	Rp0		20	180.244.866								
	5	02	03	2.01	06	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan Keuangan Daerah (Buku inventaris aset 20 buku)	20	441.404.885	20	125.417.733	0	10.004.800	0	0	0	Rp0		20	125.417.733								
	5	02	03	2.01	07	Pengamanan Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	15	1.064.643.459	110	495.661.485	45	230.029.000	5	33.323.000	5	Rp33.323.000		115	528.984.485								
							- pancang tanah	34	0	78	0	34	0	0	0	0	Rp0		78	-								
	5	02	03	2.01	08	Pemilaian Barang Milik Daerah	- Sertifikasi tanah	48	822.384.009	248	69.359.000	0	10.000.000	0	0	0	Rp0		248	69.359.000								
							- pancang tanah	34		34	0	0	0	0	0	0	Rp0		34	-								
							- penghapusan	30		30	0	0	0	0	0	0	Rp0		30	-								
							- penilaian gedung	30		30	0	0	0	0	0	0	Rp0		30	-								
	5	02	03	2.01	09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	80	502.025.591	190	113.631.800	80	24.504.000	0	0	0	Rp0		190	113.631.800								
	5	02	03	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Pemindahtanganan BMN	1	215.706.415	1	51.313.900	0	10.007.800	0	0	0	Rp0		1	51.313.900								
	5	02	03	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Rekonsiliasi BMD (laporan semester I dan II	20	466.838.730	60	184.810.152	20	62.011.200	0	0	0	Rp0		60	184.810.152								
	5	02	03	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Konsolidasi Penyusunan Laporan BMD dari OPD (Laporan Tahunan)	20	353.620.204	50	251.105.479	20	108.380.000	5	53.464.000	5	Rp53.464.000		55	304.569.479								
	5	02	03	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Bimtek terhadap 43 OPD	43	757.559.817	43	26.529.264	0	0	0	0	0	Rp0		43	26.529.264								
	5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	0Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	8.000.628.900	10	3.803.693.086	0,8	1.908.755.282	0,8%	325.783.624	0,8%	Rp325.783.624		0,8%	4.129.476.710	83%	52%	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH					
	5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	0,8%	8.000.628.900	0,80	3.803.693.086	0,8	1.908.755.282	0,8%	325.783.624	0,8%	Rp325.783.624		0,8%	4.129.476.710		52%						
	5	02	04	2.01	01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	- Tersusunnya potensi pajak daerah	1	728.860.656	3	155.571.271	1	36.100.156	1	1.608.000	1	Rp1.608.000		4	157.179.271								
							- Tersusunnya ranperbup pajak daerah	2		7		2	0	0	0	0	Rp0		7	-								
	5	02	04	2.01	02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Terbentuknya kerjasama dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	1	752.569.012	4	379.351.967	1	102.374.000	1	9.274.000	1	Rp9.274.000		5	388.625.967								
							- Terlaksanya koordinasi dengan pihak terkait dalam optimalisasi pajak daerah	10		25		10	0	1	0	1	Rp0		26	-								
							- Tersusunnya ranperbup/ranperda Pajak Daerah	4		8		4	0	0	0	0	Rp0		8	-								
							- Tersusunnya SOP Pajak Daerah	4		12		4	0	0	0	0	Rp0		12	-								
	5	02	04	2.01	03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya sosialisasi terhadap WP dan aparat	4	672.830.423	13	359.937.751	4	92.307.326	0	33.173.124	0	Rp33.173.124		13	393.110.875								

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
1	5	02	04	2.01	04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya alat dan SPM penunjang pendataan dan penilaian	2	1.421.836.480	7	803.856.300	2	302.045.000	0	160.957.500	0	Rp160.957.500	7	964.813.800										
	5	02	04	2.01	05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Melakukan Pendataan OP dan WP	45	476.929.417	130	226.793.600	45	157.968.000	20	26.394.000	20	Rp26.394.000	150	253.187.600										
	5	02	04	2.01	06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	- Tersedianya Basis Data Pajak Daerah	1	284.441.677	4	89.862.800	1	224.570.000	1	2.000.000	1	Rp2.000.000	5	91.862.800										
							- Tersusunnya Laporan Basis Data Pajak Daerah	2		6		2	0	0	0	0	Rp0	6	-										
							- Tersedianya Software/aplikasi pajak daerah	1		3		1	0	0	0	0	Rp0	3	-										
	5	02	04	2.01	07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Penilaian objek pajak dan wajib retribusi (100 OP)	100	543.349.135	320	304.636.560		155.028.000	25	22.905.000	25	Rp22.905.000	345	327.541.560										
	5	02	04	2.01	08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (250 OP)	250	313.345.646	750	206.967.199	250	100.062.000	0	0	0	Rp0	750	206.967.199										
	5	02	04	2.01	09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlayannya keberatan/keluhan wajib pajak	40	135.184.569	72	27.412.900	40	12.000.000	0	0	0	Rp0	72	27.412.900										
	5	02	04	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen hasil penelitian dan verifikasi data SP dan OP	5	408.320.638	20	175.659.100	5	288.004.000	0	0	0	Rp0	20	175.659.100										
	5	02	04	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Laporan hasil Penagihan Pajak	4	555.927.682	11	559.482.665	4	281.204.000	1	57.965.000	1	Rp57.965.000	12	617.447.665										
	5	02	04	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terfasilitasnya keberatan wajib pajak	40	159.625.126	10	6.928.100	0	0	0	0	0	Rp0	10	6.928.100										
	5	02	04	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	- Terlaksanya pembinaan dan penerbitan pajak daerah	8	773.704.220	64	290.178.200	8	85.389.800	1	3.748.000	1	Rp3.748.000	65	293.926.200										
							- Terlaksanya pemeriksaan pajak daerah	5		15		5	0	0	0	0	Rp0	15	-										
							- Terlaksanya monitoring pajak daerah	20		55		20	0	0	0	0	Rp0	55	-										
	5	02	04	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	- Terlaksanya monitoring Retribusi Daerah	12	773.704.220	33	176.109.600	12	34.000.000	3	4.607.000	3	Rp4.607.000	36	180.716.600										
							- Terlaksanya rapat movev Retribusi Daerah	4		11		4	0	1	0	1	Rp0	12	-										
	5	02	04	2.01	15	Elektronifikasi Transakssi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	12	0	21	40.945.073	12	37.703.000	3	3.152.000	3	Rp3.152.000	24	44.097.073										
TOTAL URUSAN BIDANG KEUANGAN									1.230.469.731.916		474.580.022.748		201.236.765.450		3.042.363.231	0%	3.042.363.231		0%	477.622.385.979									

					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	24.053.298.082	95%	3.180.263.056	95%	3.640.107.412	95%	824.786.334	1	824.786.334		95%	4.005.049.390	95,00%	0,17%	Badan KeshangPol
					Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Peranskat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	237886508	95%	-	95%	17.420.950	95%	9.120.000	#VALUE!	9.120.000		95%	9.120.000	95%	0,04	Badan KeshangPol
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja yang disusun	7	36231610			6	17.420.950	3	9.120.000	4 #	9.120.000		4 #	9.120.000	5 4	25,2	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang disusun	6	33193118							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang disusun	6	33183487							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	6	32891139							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang disusun	6	32695370							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah LKJIP, LKPI, LPPD, SPIP yang disusun	27	33901959							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Triwulan Pengendalian dan Evaluasi	6	35789825							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	18847812087	95%	2.707.462.441	95%	2.955.660.273	95%	711.288.704	1	711.288.704		0%	3.418.751.145	0,0	18,1	Badan KeshangPol
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan	168	18630502708	28	2.707.462.441	24	2.955.660.273	28	711.288.704	28	711.288.704		56	3.418.751.145	33,3	18,4	Badan KeshangPol
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan yang tersusun	108	68038490							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen keuangan akhir tahun Badan Keshangpol	6	34885637							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan dan Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen laporan SPJ Fungsional dan Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik	144	81608311							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen laporan pronogsis realisasi anggaran	6	32776941							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KeshangPol

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
														I											
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.
1	2					3	4	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	10	11	K	Rp.	K	Rp.				
						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	32614607		-		-		-			0%		-	0,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Aset	24	32614607						-		-	-		-	0,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	556591892				95%	-	1		-	1		-	95,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah stel pakaian dinas yang diadakan	200	221025250						-		-	-		-	0,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kali mengikuti diklat	18	127249810						-		-	-		-	0,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah sosialisasi	5	103906732		-				-		-	-		-	0,0	0,0	Badan KesbangPol		
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kali mengikuti bimtek	12	104410100						-		-	-		-	0,0	0,0	Badan KeshangPol		
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	2264567243	95%	190.589.115	95%	221.586.689	95%	39.984.680	1	39.984.680		190%	230.573.795	190,0	10,2	Badan KesbangPol		
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis alat listrik yang diadakan	6	68949603	6	8.649.645	12	11.100.000	3	1.005.000	3	1.005.000		9	9.654.645	150,0	14,0	Badan KesbangPol		
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan dan perlengkapan kantor yang diadakan	10	165768938	1	6.250.000	12	19.725.280		-		-	1	6.250.000	10,0	3,8	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis ATK yang diadakan	2200	189879542	12	35.740.870	12	35.740.000	3	5.977.000	3	5.977.000	2200	41.717.870	2200	22,0	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Barang Cetakan dan Pengandaan	Jumlah Jenis Barang yang dicetak	720157	222685156	707867	12.702.100	12	13.853.409	3	1.999.200	707867	1.999.200	707867	14.701.300	707867	6,6	Badan KesbangPol			
						Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Lembar Pengandaan	3.600	107672916	600	4.550.000	334	5.010.000	26	320.000	26	320.000	626	4.870.000	17,4	4,5	Badan KesbangPol			
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah porsi makan dan minum rapat yang disediakan	1824	1509611088	365	122.696.500	199	136.158.000		30.683.480	-	30.683.480	365	153.379.980	20,0	10,2	Badan KesbangPol			
							Jumlah oh yang mengikuti Rapat Koordinasi dan Konsultasi	1800		24		24		6		6		30		1,7		Badan KesbangPol			
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	760313314	95%	13.875.000	95%	142.670.000		-	-	-	95%	13.875.000	95,0	1,8	Badan KesbangPol			
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Roda 2 yang diadakan	1200292	261025250			1	37.500.000		-		-	-	-	0	0,0	Badan KesbangPol			
						Pengadaan Mebel	Jumlah kursi tunggu dan kursi tamu yang diadakan	12	113983788			3	45.718.000		-		-	-	-	0,0	0,0	Badan KesbangPol			
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	72	385304276	1	13.875.000	4	59.452.000		-		-	1	13.875.000	1,4	3,6	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1464789648	95%	85.310.500	95%	85.510.500	95%	29.777.950	-	29.777.950	95,00%	115.088.450	95,0	7,9	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Buku Cek yang disediakan, jumlah Lembar Materai yang disediakan	1200292	25058424	12	800.000	12	1.000.000	3	100.000	3	100.000	341	900.000	1200292	3,6	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kali Pembayaran Rekening Telfon, Listrik, Air, Surat Kabar dan TV berlangganan	72	330933183	1200600930	12.510.500	12	12.510.500	3	2.677.950	300600930	2.677.950	300600930	15.188.450	72	4,6	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan pembayaran honor Tenaga Kontrak Khusus dan Tenaga Kontrak Biasa	72	1108798041	6	72.000.000	6	72.000.000	6	27.000.000	6	27.000.000	12	99.000.000	16,7	8,9	Badan KesbangPol			
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang UrusanPemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1	1353512431	95%	183.026.000	95%	217.259.000	95%	34.615.000	1	34.615.000	190%	217.641.000	190,0	16,1	Badan KesbangPol			
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Roda 2 yang dibiayai pembayaran Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4 yang dibiayai Pajak dan Perizinannya Jumlah Kendaraan Dinas yang dibiayai Pemeliharaan, Penggantian Suku Cadang dan Servisnya	00002	1124301008	120000	158.980.000	12	179.900.000	12	34.615.000	120000	34.615.000	120000	193.595.000	120000	17,2	Badan KesbangPol			
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	72	121590712	12	6.210.000	4	12.015.000	-	-	-	-	12	6.210.000	16,7	5,1	Badan KesbangPol			
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor	6	107620711	1	17.836.000	2	25.344.000		-		-	1	17.836.000	16,7	16,6	Badan KesbangPol			
						PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase terlaksananya Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebanesaan	83%	6.933.448.452	80%	884.757.396	80%	814.306.600	80%	147.150.101	1	147.150.101	160%	1.031.907.497	192,8%	14,9%	Badan KesbangPol			
						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebanesaan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	0,85	6933448452	80%	884.757.396	80%	814.306.600	80%	147.150.101	1	147.150.101	160%	1.031.907.497	188,2	14,9	Badan KesbangPol			

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
							5		6		7		8					9		10			11		12		13	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	bimtek, sosialisasi, FPK, GNRM	98	4328548057							-	-		8	-	8,2	0,0	Badan KesbangPol						
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Peringatan 7 Titik	48	2148296811	8	162.234.200	7	182.234.100	2	75.586.396	2	75.586.396		10	237.820.596	20,8	11,1	Badan KesbangPol						
					Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air	180	456603584							-	-		-	-	0,0	0,0	Badan KesbangPol						
					Pembentukan Paskibarak	Meningkatnya pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air			54	722.523.196	54	592.072.500	54	71.563.705	54	71.563.705		108	794.086.901	#DIV/0!	#DIV/0!	Badan KesbangPol						
					Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Jumlah Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka					6	40.000.000																
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	83%	11.402.030.878	75%	27.415.978.436	75%	2.399.922.194	75%	2.225.000	1	2.225.000		150%	27.418.203.436	180,7%	240,5%	Badan KesbangPol						
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	0,83	11402030878	75%	27.415.978.436	75%	2.399.922.194	75%	2.225.000	1	2.225.000		150%	27.418.203.436	180,7	240,5	Badan KesbangPol						
					Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	23	1115379700	4	25.759.228.000	390	1.360.600.000		2.225.000	-	2.225.000		4	25.761.453.000	17,4	2309,7	Badan KesbangPol						
					Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah sosialisasi banpol dan verifikasi banpol	66	9052547078	101	1.043.775.436	101	1.039.322.194			32	-		43	1.043.775.436	65,2	11,5	Badan KesbangPol						
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah bulan dilakukan monitoring Jumlah Kecamatan dilakukan Monitoring	72	1234104100	12	612.975.000					-	-		25	612.975.000	34,7	49,7	Badan KesbangPol						
					PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	0,83	1.497.721.200	75%	-	75%	19.595.000		-	-	-		28%	-	33,7	0,0	Badan KesbangPol						

Tabel 163
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target RPJMD Kabupaten/Kota pada tahun 2026(Akhir periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten/Kota sampai dengan RKPD Kabupaten/Kota Tahun Lalu N-2(2024)		Target kinerja dan anggaran RKPD Kabupaten/Kota Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Kabupaten/Kota yang dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RKPD s/d Tahun n-1	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d Tahun 2025 (akhir tahun pelaksanaan RKPD Tahun 2025)		Tingkat capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kabupaten/Kota s/d tahun 2025 (%)		Perangkat Daerah Penanggung Jawab						
								5		6		7		8					9		10			11		12		13	
								K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	83%	1.497.721.200	75%	-	75%	19.595.000	-	-	-	-		28%	-	33,7%	0,0%	Badan KeshangPol							
					Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah ormas yang terdaftar, dibina dan diawasi	200	1497721200	30	-	30	19.595.000			92	-		122	-	61,0	0,0	Badan KeshangPol							
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	0,85	4.633.839.813	75%	89.010.000	75%	59.998.000	950.000	-	950.000		75%	89.960.000	88,2	1,9	Badan KeshangPol								
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	85%	4.633.839.813	75%	89.010.000	75%	59.998.000	950.000	-	950.000		75%	89.960.000	88,2%	1,9%	Badan KeshangPol								
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	144	4633839813	24	89.010.000	24	39.998.000	950.000	-	950.000		22	89.960.000	15,3	1,9	Badan KeshangPol								
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Rekomendasi / Notulen yang dihasilkan Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan					360	20.000.000																	
					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	0,85	6.674.153.393	75%	254.900.000	75%	423.342.000	75%	18.250.000	1	18.250.000		775%	273.150.000	911,5	4,1	Badan KeshangPol							
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	85%	6.674.153.393	75%	254.900.000	75%	423.342.000	75%	18.250.000	1	18.250.000		150%	273.150.000	176,5%	4,1%	Badan KeshangPol							
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Rekomendasi/Notulen yang dihasilkan	132	1829681217	24	147.340.000	24	65.782.000	3	17.600.000,0	3	17.600.000		27	164.940.000	20,5	9,0	Badan KeshangPol							
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	72	4844472176	12	107.560.000	14	357.560.000		650.000	-	650.000		12	108.210.000	16,7	2,2	Badan KeshangPol							
TOTAL URUSAN BIDANG KESBANGPOL									55.194.491.818		31.824.908.888		7.357.271.206	61%	993.361.435	61%	993.361.435		6	32.818.270.323	#DIV/0!	59,5%							

2.5.1 Evaluasi RKPD Sampai dengan Akhir Tahun 2024

Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2024 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program dan kegiatan pada setiap Perangkat Daerah yang menangani bidang urusan sesuai Perangkat Daerah masing-masing yang telah dicapai sampai dengan akhir tahun 2024 untuk mendapatkan target sasaran yang di rencanakan oleh pemerintah daerah dalam tahun berjalan yang terdapat dalam RPJMD tahun 2021-2026. Evaluasi RKPD sampai dengan akhir tahun 2024 ini dilakukan terhadap 42 Perangkat Daerah yang menjalankan urusan/bidang urusan pemerintahan daerah yang di dukung dengan program dan kegiatan.

Selain itu, evaluasi terhadap dokumen perencanaan ini juga dilihat dari tingkat konsistensi antara jumlah Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada dokumen perencanaan RKPD tahun 2024 dan APBD tahun 2024 seperti yang terlihat pada tabel di 2.164 berikut:

Tabel 2. 164
Rekap Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Pada RKPD dan APBD Tahun 2024

NO	OPD	RKPD 2024				APBD 2024				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	7	19	103	531,907,895,248	6	18	104	521,382,458,031	86%	95%	101%	100%
2	DINAS KESEHATAN	5	24	115	106,546,107,983	5	24	118	221,907,873,864	100%	100%	103%	100%
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	8	15	55	56,491,017,595	5	12	51	19,844,921,642	63%	80%	93%	100%
4	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	2	10	38	8,038,892,835	2	10	38	8,467,545,102	100%	100%	100%	100%
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2	10	42	6,509,249,746	2	10	42	7,848,346,365	100%	100%	100%	100%
6	DINAS SOSIAL	6	14	51	8,278,634,914	4	12	46	7,894,587,370	67%	86%	90%	101%
7	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	9	20	65	6,871,861,095	3	18	40	4,615,648,528	33%	90%	62%	101%
8	DINAS PANGAN	5	14	60	2,220,390,064	1	7	36	3,253,327,210	20%	50%	60%	101%
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16	33	79	10,796,026,564	5	17	41	10,977,586,006	31%	52%	52%	101%
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	17	42	4,210,887,742	5	17	43	4,394,724,648	125%	100%	102%	100%
11	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI	5	12	75	4,016,517,510	1	8	50	5,439,200,385	20%	67%	67%	100%
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	10	26	60	9,632,268,423	9	25	68	10,872,573,923	90%	96%	113%	100%
13	DINAS PERHUBUNGAN	2	24	93	12,919,376,741	2	24	93	13,698,255,091	100%	100%	100%	101%
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5	12	51	5,287,547,428	5	12	51	8,766,578,268	100%	100%	100%	100%
15	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	10	20	41	4,200,251,405	4	12	30	4,816,331,930	40%	60%	73%	101%
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	26	42	4,937,279,608	2	9	32	4,740,513,713	33%	35%	76%	100%
17	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA	7	21	62	13,365,901,460	7	21	63	8,033,815,783	100%	100%	102%	100%
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	6	20	70	4,428,127,393	5	19	70	4,037,789,680	83%	95%	100%	101%
19	DINAS PERIKANAN	5	17	59	4,986,636,866	4	16	57	5,695,156,298	80%	94%	97%	101%
20	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	6	16	58	19,872,159,236	6	16	58	19,708,362,084	100%	100%	100%	127%
21	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6	22	73	11,826,602,142	5	20	70	10,732,634,003	83%	91%	96%	101%
22	SEKRETARIAT DAERAH	3	18	68	35,105,121,566	3	18	68	37,441,525,894	100%	100%	100%	100%
23	SEKRETARIAT DPRD	2	18	77	25,813,960,855	2	18	77	39,782,668,631	100%	100%	100%	100%
24	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	4	17	71	6,919,390,129	4	18	79	7,427,175,559	100%	106%	111%	100%
25	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	4	14	98	184,436,790,016	4	14	98	21,339,349,628	100%	100%	100%	99%

NO	OPD	RKPD 2024				APBD 2024				KONSISTENSI RKPD TERHADAP APBD (%)			
		PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU PERUBAHAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU
26	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3	13	38	5,518,160,350	3	13	38	5,791,252,988	100%	100%	100%	100%
27	INSPEKTORAT DAERAH	3	11	50	9,831,563,649	3	11	50	11,557,841,347	100%	100%	100%	100%
28	KECAMATAN GUNUANG OMEH	6	15	32	1,151,536,223	4	13	29	1,312,118,075	67%	87%	91%	100%
29	KECAMATAN BUKIK BARISAN	6	16	36	1,290,208,144	4	12	27	1,670,354,350	67%	75%	75%	100%
30	KECAMATAN SULIKI	6	14	44	1,512,736,360	4	11	38	1,694,103,269	67%	79%	86%	100%
31	KECAMATAN GUGUAK	5	10	26	1,371,971,705	5	10	26	1,833,210,293	100%	100%	100%	100%
32	KECAMATAN MUNGKA	6	15	28	1,201,974,027	3	11	23	1,341,040,240	50%	73%	82%	100%
33	KECAMATAN AKABILURU	6	14	33	1,563,175,260	4	12	29	1,805,144,283	67%	86%	88%	100%
34	KECAMATAN PAYAKUMBUH	4	10	33	1,828,910,950	4	11	34	2,759,012,965	100%	110%	103%	100%
35	KECAMATAN LUAK	4	14	37	1,431,019,432	4	14	37	1,872,164,892	100%	100%	100%	100%
36	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN	6	14	42	1,479,383,001	4	12	34	1,733,694,953	67%	86%	81%	100%
37	KECAMATAN SITUJUJAH LIMO NAGARI	6	14	48	1,515,157,614	3	10	40	1,552,022,045	50%	71%	83%	100%
38	KECAMATAN HARAU	5	13	37	1,818,602,937	3	10	30	1,953,306,936	60%	77%	81%	100%
39	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU	5	11	25	1,460,285,273	3	9	20	1,668,722,349	60%	82%	80%	100%
40	KECAMATAN KAPUR IX	6	16	48	1,770,734,202	5	14	48	2,015,556,895	83%	88%	100%	100%
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	13	43	18,010,322,760	6	13	43	31,809,393,888	100%	100%	100%	100%
42	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	11	44	5,059,810,420	2	11	44	5,044,345,671	100%	100%	100%	101%
	Total	233	692	2309	1,147,434,446,871	167	599	2121	1,090,532,235,075	72%	87%	92%	95%

Rincian program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 yaitu sebanyak 233 program, 692 kegiatan dan 2309 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.147.434.446.871,-. Sedangkan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD tahun 2024 Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebanyak 167 program, 599 kegiatan dan 2121 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.090.532.235.075,-. Dilihat dari jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat pada RKPD tahun 2024 dengan APBD tahun 2024 maka terdapat perbedaan atau terjadi *inkonsistensi* jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan RKPD tahun 2024 lebih besar dibandingkan dengan jumlah pada APBD tahun 2024.

Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2024 dan APBD tahun 2024 dilihat dari jumlah program yaitu sebesar 72%, dilihat dari jumlah kegiatan sebesar 87%, dilihat dari jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 92% dan dilihat dari pagu anggaran yaitu sebesar 95%. Terdapat perbedaan terhadap jumlah program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran dengan selisih sebanyak 66 untuk program, 93 untuk kegiatan, 188 untuk sub kegiatan. Dengan adanya *inkonsistensi* ini perlu dilakukan penyesuaian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2026. Rincian jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan dilihat dari tingkat konsistensi nya yaitu:

- a. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2024 dengan APBD tahun 2024 yang paling tinggi untuk jumlah program yaitu 125% terdapat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sedangkan tingkat konsistensi yang paling rendah yaitu sebesar 20% terdapat pada Dinas Pangan. Program yang sudah konsisten 100% antara RKPD tahun 2024 dengan APBD 2024 terdapat sebanyak 18 Perangkat Daerah.
- b. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2024 dengan APBD tahun 2024 yang paling tinggi untuk jumlah kegiatan yaitu sebesar 110% terdapat pada Kecamatan Payakumbuh, sedangkan tingkat konsistensi yang paling rendah yaitu sebesar 35% terdapat pada Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD 2024 tahun dengan APBD tahun 2024 terdapat sebanyak 17 Perangkat Daerah.
- c. Tingkat konsistensi antara RKPD tahun 2024 dengan APBD tahun 2024 yang paling tinggi untuk jumlah sub kegiatan yaitu sebesar 113% terdapat pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sedangkan tingkat konsistensi paling rendah sebesar 47% terdapat pada RSUD Ahmad Darwis. Sub Kegiatan yang konsisten 100% antara RKPD tahun 2024 dan APBD tahun 2024 terdapat sebanyak 16 Perangkat Daerah.

Realisasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan RKPD untuk seluruh OPD dengan 40 urusan di Kabupaten Lima Puluh Kota sampai dengan triwulan IV tahun 2024 yaitu sebesar 93% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 1,024,551,743,477,-. Dilihat dari angka capaian baik itu secara kinerja maupun secara keuangan tergolong sangat tinggi, Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi RKPD ini yaitu dengan menghitung capaian kinerja program dan kegiatan dengan menggunakan kategori interval nilai realisasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan berkenaan. Penggunaan kategori interval ini akan membantu pengklasifikasian penilaian realisasi kinerja program dan kegiatan berdasarkan target rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Kategori interval yang digunakan adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 165
Kriteria Penilaian dan Interval Nilai
Realisasi Kinerja Evaluasi Hasil RKPD

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
1.	Sangat Tinggi	ST	91% ≥ 100%
2.	Tinggi	T	76% ≤ 90 %
3.	Sedang	S	66% ≤ 75%

No.	Kriteria Penilaian	Simbol	Interval Nilai
4.	Rendah	R	$51\% \leq 65\%$
5.	Sangat Rendah	SR	$\leq 50\%$

Untuk rekap capaian per masing-masing urusan dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini dan rincian evaluasi RKPD sampai akhir tahun 2024 sesuai Permendagri nomor 86 tahun 2017 tabel E.60 dapat dilihat pada lampiran dibawah ini

Tabel 2. 166
Rekapitulasi Program/Kegiatan/Subkegiatan
Bidang Urusan pada Perubahan RKPD 2024

No	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	2	11	89	518,615,099,431	95%	482,787,553,222	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	24	117	221,907,873,864	94%	208,472,210,109	Dinas Kesehatan RSUD Achmad Darwis
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	9	16	71	19,653,221,642	98%	19,197,679,994	DPUPR
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	5	9	17	4,579,622,680	94%	4,578,514,314	DLHPKP
5	Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	4	19	88	17,109,446,967	94%	16,623,662,911	1. Dinas Damkar dan Penyelamatan 2. Satpol PP 3. BPBD
6	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	6	14	55	7,894,587,370	95%	7,497,867,460	Dinas Sosial
7	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	4	9	19	4,075,608,472	83%	3,965,615,021	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	12	18	1,127,547,100	91%	887,018,623	DPPKB P3A
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	14	60	3,253,327,210	80%	3,037,113,692	Dinas Pangan

No	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan	2	2	3	191,700,000		191,105,300	DPUPR
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	11	23	59	6,397,963,326	86%	6,109,913,756	DLHPKP
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	17	42	4,394,724,648	95%	4,242,038,761	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	5	12	75	5,439,200,385	99%	5,386,286,604	DPMD/N
14	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	14	42	9,745,026,823	86%	8,371,603,222	DPPKB P3A
15	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	24	93	13,698,255,091	98%	13,191,787,501	Dinas Perhubungan
16	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	9	41	8,423,671,743	96%	7,844,897,382	Dinas Komunikasi Dan Informatika
17	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah	8	16	33	4,719,425,230	76%	4,600,350,529	Dinas DagKop dan UKM
18	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	6	13	42	4,740,513,713	87%	4,605,273,010	DPMPSTP
19	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	4	16	51	6,559,595,783	98%	6,487,829,473	Dinas Parpora
20	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	5	87,905,625	98%	85,922,646	Dinas Komunikasi Dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan	1	2	5	255,000,900	100 %	254,974,071	Dinas Komunikasi

No	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
	n Bidang Persandian							Dan Informatika
22	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5	8	14	2,767,358,600	92%	2,420,012,958	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	3	11	55	4,027,789,680	100%	3,989,770,555	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	3	9	15	10,000,000	100%	9,995,000	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	5	17	59	5,695,156,298	100%	5,637,054,477	Dinas Perikanan
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	3	5	11	1,474,220,000	98%	1,465,501,734	Dinas Parpora
27	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	7	27	96	30,440,996,087	87%	28,616,984,891	1. Dinas Tanhorbun 2. Disnakeswan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	6	8	16	96,906,700	97%	93,773,200	Dinas DagKop dan UKM
29	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	4	10	44	531,521,356	91%	513,262,235	Dinas Perinaker
30	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	2	8,518,700	100%	8,008,400	Dinas Perinaker
31	Sekretariat Daerah	3	18	68	37,441,525,894	97%	35,810,820,424	Sekretariat Daerah
32	Sekretariat DPRD	2	18	77	39,782,668,631	100%	36,111,592,830	Sekretariat Dprd
33	Perencanaan	3	14	67	5,907,318,159	96%	5,659,308,660	Bappelitbangda
34	Keuangan	4	14	98	21,339,349,628	95%	20,086,491,315	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
35	Kepegawaian	2	12	37	5,773,052,988	96%	5,693,698,358	BKPSDM
36	Pendidikan dan Pelatihan	1	1	1	18,200,000	84%	15,290,000	BKPSDM
37	Penelitian Dan Pengembangan	1	3	4	1,519,857,400	57%	867,250,975	Bappelitbangda
38	Inspektorat Daerah	3	11	50	11,557,841,347	70%	10,483,632,538	Inspektorat Daerah
39	Kecamatan	6	19	73	23,210,451,545	99%	22,825,893,222	13 Kecamatan

No	BIDANG URUSAN	PROG	KEG	SUB KEG	PAGU	REALISASI		PERANGKAT DAERAH
						K	Rp	
40	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	43	36,060,184,059	100 %	35,824,184,104	Badan Kesbangpol
	JUMLAH	166	496	1855	1,090,532,235,075	93%	1,024,551,743,477	

Untuk evaluasi terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan bidang urusan masing-masing sampai dengan triwulan IV tahun 2024 adalah sebagai berikut:

I. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dimana pada Perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 2 program, 11 kegiatan dan 89 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 518,615,099,431,-. Realisasi kinerja untuk urusan pemerintahan bidang pendidikan sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.482,787,553,222,- sampai triwulanIV.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Achmad Darwis dimana pada perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 5 program, 22 kegiatan dan 107 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 221,907,873,864. Realisasi fisik sebesar xx% dan realisasi keuangan baru Rp. xx,- sampai triwulan IV.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimana pada Perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 9 program, 16 kegiatan dan 71 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 19,653,221,642,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar xx% dan realisasi keuangan sebesar Rpxx,- sampai triwulan IV.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat danPermukiman dimana pada Perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 5 program, 9 kegiatan dan 17 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 4,579,622,680,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 94% dan realisasi keuangan sebesar Rp4,578,514,314,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Terdapat 3 (tiga) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat ini yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah(BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja. Berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 4 program, 19 kegiatan dan 88 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 17,109,446,967,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 94% dan realisasi keuangan sebesar Rp.16,623,662,911,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial dimana berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2024 terdapat 6 program, 14 kegiatan dan 55 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp 7,894,587,370,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7,497,867,460,-.

II. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat sebanyak 4 program, 9 kegiatan dan 19 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4,075,608,472,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 83% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,965,615,021,-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebanyak 6 program, 12 kegiatan dan 18 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1,127,547,100,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 91% dan realisasi keuangan sebesar Rp.887,018,623,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pangan terdapat sebanyak 5 program, 14 kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.3,253,327,210,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,037,113,692,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang terdapat sebanyak 2 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.191,700,000,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.191,105,300,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Dan Kawasan Permukiman terdapat sebanyak 11 program, 23 kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6,397,963,326,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 86% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6,109,913,756,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdapat sebanyak 5 program, 17 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4,394,724,678,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,242,038,761,-.

G. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari sebanyak 5 program, 12 kegiatan dan 75 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5,439,200,385,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5,386,286,604,-.

H. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak terdapat sebanyak 4 program, 14 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.9,745,026,823,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 86% dan realisasi keuangan sebesar Rp.8,371,603,222,-.

I. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan terdapat 2 program, 24 kegiatan dan 93 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.13,698,255,091,-. Realisasi sampai Triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.13,191,787,501,-.

J. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 41 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp8,423,671,743,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.7,844,897,382,-.

K. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah terdapat program sebanyak 8, kegiatan 16 dan sub kegiatan 33 dengan pagu anggaran sebesar Rp.4,719,425,230,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 76% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,600,350,529,-.

L. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdapat sebanyak 6 program, 13 kegiatan dan 42 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4,740,513,713,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 87% dan realisasi keuangan sebesar Rp.4,605,273,010,-.

M. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga terdapat sebanyak 4 program, 16 kegiatan dan 51 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.6,559,595,783,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.6,487,829,473,-.

N. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat sebanyak 1 program, 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.87,905,625,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.85,922,646,-.

O. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika terdapat sebanyak 1 program, 2 kegiatan, 5 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.255,000,000,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.254,974,071,-.

P. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat sebanyak 5 program, 8 kegiatan, dan 14 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2,767,358,600,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 92% dan realisasi keuangan sebesar Rp.2,420,012,958,-.

Q. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan terdapat 3 program, 11 kegiatan, dan 55 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4,027,789,680,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.3,989,770,555,-.

R. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan terdapat sebanyak 3 program, 9 kegiatan dan 15 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.10,000,000. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.9,995,000,-.

III. URUSAN PILIHAN

A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perikanan terdapat 5 program, 17 kegiatan dan 59 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5,695,156,298,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5,695,156,298,-.

B. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga terdapat 3 program, 5 kegiatan, dan 11 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1,474,220,000,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 98% dan realisasi keuangan sebesar Rp.1,465,501,734,-.

C. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Perkebunan Dan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan terdapat 7 program, 27 kegiatan dan 96 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.30,440,996,087,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 87% dan realisasi keuangan sebesar Rp.28,616,984,891,-.

D. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah terdapat 6 program, 8 kegiatan, dan 16 sub kegiatan dengan pagu

anggaran sebesar Rp.96,906,700,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.93,773,200,-.

E. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdapat 4 program, 10 kegiatan dan 44 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.531,521,356,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 91% dan realisasi keuangan sebesar Rp.513,262,235,-.

F. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.8,518,700,-. Realisasi fisik sebesar 100% dan realisasi keuangan sampai Triwulan IV sebesar 8,008,400,-.

IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

A. SEKRETARIAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah terdapat 3 program, 18 kegiatan dan 68 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.37,441,525,894,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 97% dan realisasi keuangan sebesar Rp.35,810,820,424,-.

B. SEKRETARIAT DPRD

Urusan ini dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD terdapat sebanyak 2 program, 18 kegiatan dan 77 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.39,782,668,631,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.36,111,592,830,-.

V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. PERENCANAAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 3 program, 14 kegiatan dan 67 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp.5,907,318,159,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5,659,308,660,-.

B. KEUANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terdapat 4 program, 14 kegiatan dan 98 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.21,339,349,628,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 95% dan realisasi keuangan sebesar Rp.20,086,491,315,-.

C. KEPEGAWAIAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 2 program, 12 kegiatan dan 37 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.5,773,052,988,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 96% dan realisasi keuangan sebesar Rp.5,693,698,358,-.

D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terdapat 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.18,200,000,-. Realisasi fisik sampai triwulan IV sebesar 84% dan realisasi keuangan sampai Triwulan IV sebesar Rp.15,290,000,-.

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdapat 1 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.1,519,857,400,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 57% dan realisasi keuangan sebesar Rp.867,250,975,-.

VI. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

A. INSPEKTORAT DAERAH

Urusan ini dilaksanakan oleh Inspektorat terdapat 3 program, 11 kegiatan dan 50 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.11,557,841,347,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 70% dan realisasi keuangan sebesar Rp.10,483,632,538,-.

VII. UNSUR KEWILAYAHAN

A. KECAMATAN

Urusan ini dilaksanakan oleh 13 Kecamatan terdapat sebanyak 6 program, 19 kegiatan dan 73 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.23,210,451,545,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 99% dan realisasi keuangan sebesar Rp.22,825,893,222,-.

VIII. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

A. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Urusan ini dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik terdapat 6 program, 13 kegiatan dan 43 sub kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.36,060,184,059,-. Realisasi fisik sampai Triwulan IV sebesar 100% dan realisasi keuangan sebesar Rp.35,824,184,104,-.

Tabel 2. 167
Berdasarkan Indikator Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
1.	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berbudaya dan berdaya saing berlandaskan keimanan	Tujuan :											
		1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	69,47	69,85	69,68	70,23	70,28	70.61	72.05	70,98	72,51	BPS
		Sasaran :											
		1.1. Meningkatnya kualitas dan akses Pendidikan Masyarakat	Rata-rata lama sekolah	7,99	8,16	8,07	8,23	8,08	8.3	8.12	8,37	8,13	BPS
			Harapan lama sekolah	13,29	13,48	13,3	13,76	13,4	13.35	13.41	14,13	13,42	BPS
		1.2. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka harapan hidup	69,79	69,86	69,84	69,93	70,08	70	73.25	70,07	73,42	BPS
			Angka prevalensi stunting	8,29	7,29	8,36	6,29	8,64	5.29	8.72	4,29	8,59	
		2. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah adat basandi	Indeks ABS-SBK	NA	NA	NA	1,5	1,76	1.7	1.84	1,9	1,95	SEKRETAR IAT DAERAH (BAGIAN KESRA)

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
		syara',syarak basandi Kitabullah											
		Sasaran :											
		1.1. Optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS SBK	NA	NA	NA	1,5	1,76	1.7	1.84	1,9	1,95	SEKRETAR IAT DAERAH (BAGIAN KESRA)
2.	Mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan ditingkat lokal dan regional	Tujuan :											
		Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat	Pertumbuhan ekonomi	-1,16	2,39	3,33	2,99	4,04	4.28	4.55	4,62	4,03	BPS
			PDRB per- kapita ADHK (Rp. Juta)	28,84	29,67	29,64	30,49	30,62	31.32	31,36	32,14	32,24	BPS
			PDRB per- kapita ADHB (Rp. Juta)	40,53	42,36	41,99	44,19	46.09	46.02	49,45	47,85	51,98	BPS
		Sasaran :											
		1.1. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke	Tingkat capaian kunjungan wisatawan	32,75	33,74	36,67	40,49	47.74	47.24	56.71	53,98	54,41	PARPORA

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
		Kabupaten Lima Puluh Kota											
		1.2. Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Pertanian dan Perikanan	Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	26,81	27,64	26,14	28,47	25,43	29.31	25,02	30,14	25,43	BPS
			Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB	3,61	3,67	3,65	3,72	3,67	3.78	3,64	3,83	3,52	BPS
		1.3. Meningkatnya Pengembangan Industri Kecil Menengah	Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB	6,36	6,49	6,49	6,62	6,47	6.75	6.51	6,88	6,66	BPS
		1.4. Meningkatnya pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan	6,4	7,78	6,33	8,53	6,77	8.53	8,08	9,67	7,92	BK
3.	Mendorong Potensi Nagari Sebagai Poros	Tujuan :											
		1. Mendorong Potensi Nagari di sektor ekonomi,	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7398	0,7562	0,7627	0.772	0.7848	0,7878	0,8107	DPMDN

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
	Pembangunan Daerah	sosial dan lingkungan											
		Sasaran :											
		1.1 Meningkatnya status nagari	Indeks desa membangun	0,7246	0,7404	0,7398	0,7562	0,7627	0.772	0.7848	0,7878	0,8107	DPMDN
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya	Tujuan :											
		1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks reformasi birokrasi	42,50 (C)	47,92 (C)	48,85 (C)	53,33 (CC)	51,81 (CC)	58,75 (CC)	58,5 (CC)	64,17	70,81	Bagian Organisasi
		Sasaran :											
		1.1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	60,23 (B)	61,71 (B)	61,14 (B)	64,37 (B)	61,02 (B)	67,02 (B)	61,71 (B)	69,68 (B)	62,16 (B)	Bagian Organisasi
			Indeks inovasi daerah	197	510	480	700	791.17	1.000	631 (Inovatif)	1.200	714,4	Bappelitb angda
		1.2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,99	85,98	84,09	87,98	86,55	89.97	87.26	91,97	86,40	Bagian Organisasi

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
5.	Meningkatkan pembangunan infrastruktur secara terpadu Yang mendorong Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Kehidupan Masyarakat yang Lebih Baik	Tujuan 1 :											
		Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Infrastruktur	71,4	73,93	66,21	75,88	76.68	77.78	73.508	79,75	74,19	PUPR
		Sasaran :											
		1.1. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan bangunan strategis	Persentase gedung strategis yang terbangun	71,74	76,09	71,74	80,43	71,74	84.78	71.74	89,13	76,09	PUPR
		1.2. Meningkatnya Kualitas Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten	54.79	55.81	55,73	57.05	58,02	58.65	59.57	59,95	60,14	PUPR
			Indeks Kelancaran Lalu Lintas	0,58	0,53	Data belum tersedia	0,53	0,23	0.52	0.42	0,51	0,34	DISHUB
		1.3. Meningkatnya Layanan Akses Air Minum dan Sanitasi Masyarakat	Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan	79,4	81,62	80,7	83,12	81,70	84.72	81.7	86,42	76,26	PUPR

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
			terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten										
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	76,45	78,45	76,65	80,5	83,75	81.65	66.44	83,35	67,75	PUPR
		1.4. Tercukupinya Persediaan Air Irigasi Untuk Pertanian Rakyat Terhadap Sistem Irigasi yang Ada	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	74,63	77,52	11,77	78,32	88,19	79.12	88.09	79,92	86,91	PUPR
		1.5. Meningkatnya ketersediaan perumahan permukiman yang layak bagi masyarakat	Rasio rumah layak huni	0,153	0,157	0,173	0,16	0,202	0.163	0.197	0,166	0.1773	DLHPKP
		Tujuan 2 :											

NO	MISI	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN								SUMBER
				2020	2021		2022		2023		2024		
					TARGET	CAPAIAN	TARGET	TARGET	TARGET	CAPAIAN	TARGET	CAPAIAN	
		Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	70,51	71,46	71,87	71.86	71.63	72,27	74,88	DLHPKP
		Sasaran :											
		2.1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,13	71,05	70,51	71,46	71,87	71.86	71.63	72,27	74,88	DLHPP
		2.2. Meningkatkan kinerja Penataan ruang wilayah	Persentase ketaatan terhadap RTRW	60	65	70	70	70	75	75	80	78	PUPR
		2.3. Menurunnya risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	119,2	85-79	80,45	79-73	93,2	73-67	119.2	67-61	119,20	BPBD

Jumlah IKU dari tahun 2021 sampai 2024 sebanyak 33. pada tahun 2021 jumlah data realisasi IKU yang masuk sebanyak 32 dari 33. jumlah IKU yang tercapai pada tahun 2021 sebanyak 9 indikator dan yang tidak tercapai sebanyak 23 indikator. Pada tahun 2022 jumlah IKU yang masuk sebanyak 33 dari 33 indikator. Jumlah IKU yang tercapai pada tahun 2022 sebanyak 19 indikator dan jumlah IKU yang tidak tercapai sebanyak 14 indikator. Pada tahun 2023 jumlah realisasi IKU yang masuk sebanyak 33 indikator dari 33. jumlah IKU yang mencapai target sebanyak 17 indikator dan jumlah IKU yang tidak mencapai target sebanyak 17 indikator. Pada tahun 2024 jumlah data realisasi IKU yang ada sebanyak 33 indikator dari 33 indikator. Jumlah IKU yang mencapai target sebanyak 17 indikator dan jumlah IKU yang tidak mencapai target sebanyak 16 indikator. Dari data tersebut dapat dilihat dari tahun 2021-2022 realisasi IKU yang mencapai target meningkat kemudian dari 2022-2024 terus mengalami penurunan. Berdasarkan Pencapaian Indikator IKU Tahun 2024 dapat disampaikan sebagai berikut:

- a. IKU yang mendukung misi 1 sebanyak 6 indikator yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks ABS-SBK, Rata-rata lama sekolah, Harapan lama sekolah, Angka harapan hidup, Angka Prevalensi stunting. Dari 6 indikator tersebut tingkat capaian pada akhir tahun 2024 sebesar 83%. pada akhir 2024 5 indikator sudah mencapai target dan terdapat 1 indikator yang tidak mencapai target yaitu angka prevalensi stunting.
- b. IKU yang mendukung misi 2 sebanyak 8 indikator yaitu Pertumbuhan ekonomi, PDRB per-kapita ADHK (Rp. Juta), PDRB per-kapita ADHB (Rp. Juta), Tingkat capaian kunjungan wisatawan, Persentase kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB, Persentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, Persentase kontribusi industri pengolahan terhadap PDRB, Persentase PAD terhadap Pendapatan. Tingkat capaian IKU pada misi 2 sebesar 37.5%. Dari 8 indikator tersebut terdapat 3 indikator yang sudah mencapai target pada akhir 2024, 3 indikator datanya belum rilis dan 2 indikator yang tidak mencapai target.
- c. IKU yang mendukung misi 3 yaitu indeks desa membangun. Sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 indikator indeks desa membangun selalu mencapai target.
- d. IKU yang mendukung misi 4 sebanyak 4 indikator yaitu Indeks reformasi birokrasi, Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Indeks inovasi daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Terdapat 1 indikator yang mencapai target pada tahun 2024 yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Untuk 3 indikator lainnya pada tahun 2024 realisasinya tidak ada yang mencapai target.
- e. IKU yang mendukung misi 5 sebanyak 12 indikator yaitu Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase gedung strategis yang terbangun, Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten, Indeks Kelancaran Lalu Lintas, Persentase Jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten, Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi, Rasio rumah layak huni, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup.

2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah

2.6.1 Permasalahan Pembangunan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Daerah

1. Pembinaan Agama dan Adat serta Kerukunan antar Umat Beragama

Masih rendahnya penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat yang diukur melalui penerapan ABS-SBK di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2023 Nilai dari Indeks ABS-SBK adalah 1,84 dan pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,11 atau nilainya menjadi 1,95, namun dengan memperhatikan komponen pembentuk Indeks ABS-SBK, masih terdapat permasalahan antara lain:

- Masih rendahnya APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 Tahun. Pada Tahun 2022 APK Murid Belajar Agama Usia 5-14 tahun turun dari 76,39 pada tahun 2021 menjadi 72,69 pada tahun 2022, akan tetapi hal ini masih jauh dari target yang diharapkan, dimana masih ada 23 persen anak usia 7-15 tahun yang belum mendapatkan pendidikan Agama, sebagai generasi muda tentu saja hal ini akan berakibat kepada pembentukan

karakternya. Pada tahun 2023 kembali meningkatkan menjadi 77,52. Diharapkan setiap tahunnya APK murid belajar agama terus mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- Belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, hal ini tergambar dari masih banyaknya kasus- kasus gangguan kamtibmas di Kabupaten Lima Puluh Kota pada tahun 2023 yaitu 76 kasus dan tahun 2024 meningkat menjadi 482 kasus yang terlapor. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap norma agama, hukum dan adat serta belum seimbangnnya kapasitas penegak hukum dalam mengatasi masalah kamtibmas, baik dari sisi kuantitas, maupun kualitas.
- Rendahnya pengelolaan kesenian di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilihat dari tidak adanya peningkatan jumlah sanggar seni dan jumlah gedung kesenian dari tahun ke tahun. Belum adanya gedung seni yang representatif menghambat ruang apresiasi masyarakat terhadap seni.
- Belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz, TPQ/MDTA/Surau/Masjid. Salah satu icon pelaksanaan ABS-SBK adalah tumbuhnya rumah tahfidz di setiap nagari, sehingga sampai akhir periode 2026 diharapkan setiap nagari sudah memiliki rumah tahfidz yang dilengkapi dengan guru tahfidz yang dibiayai honornya oleh pemerintah. Sampai tahun 2022 baru terbentuk 20 rumah tahfidz dan ada sekitar 3.400 guru tahfidz, guru TPQ, MDTA, Imam dan gharin yang perlu dibiayai operasionalnya.
- Belum optimalnya pengumpulan zakat. Sampai tahun 2022, dari potensi zakat yang terdata, tingkat penerimaan zakat belum maksimal, dengan angka capaian 62,19%, sehingga ke depan peningkatan penerimaan dan pendistribusian zakat perlu ditingkatkan.

2. Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

i. Kinerja Pelayanan Publik Yang Belum Responsif, Informatif dan Bernuansa Birokratis

Dalam undang-undang pelayan publik, institusi penyelenggara negara adalah salah satu penyelenggara publik. Pemerintah daerah sebagai bagian dari institusi tersebut berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. Pelayanan publik merupakan salah satu unsur Penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik.

Kinerja pelayanan publik menjadi substansi nilai yang menjadi fokus utama penilaian dalam pelayanan publik. Kinerja pelayanan publik menjadi sorotan utama dalam kerangka memastikan apakah pelayanan publik berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk perilaku dan sikap dari aparatur pelayanan publik. Jika diperhatikan berbagai permasalahan penyelenggaraan pelayanan, maka permasalahan utama pelayanan publik sekarang ini adalah berkaitan dengan peningkatan kualitas dari pelayanan itu sendiri. Menurut Albrecht dan Zemke (1990), kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Dilihat dari sisi pola penyelenggaraannya, pelayanan publik di kabupaten lima puluh kota masih memiliki berbagai kelemahan antara lain:

- 1) Kurang responsif.
Kondisi ini terjadi pada hampir semua tingkatan unsur pelayanan, mulai pada tingkatan petugas pelayanan (front line) sampai dengan tingkatan penanggung jawab instansi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan sama sekali.
- 2) Kurang informatif.
Berbagai informasi yang seharusnya disampaikan kepada masyarakat lambat atau bahkan tidak sampai kepada masyarakat.

3) Terlalu Birokratis.

Pelayanan (khususnya pelayanan perizinan) pada umumnya dilakukan dengan melalui proses yang terdiri dari berbagai level, hal ini menyebabkan penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Birokrasi pemerintah sering kali mendapat sorotan tajam dari warga atau masyarakat luas. Hal ini karena fungsi pelayanan publik yang menjadi tanggung jawabnya, yang semestinya dijalankan dengan penuh tanggung jawab moral dan sikap profesional yang tinggi, justru menjadi salah satu titik lemah yang krusial dalam birokrasi pelayanan publik itu sendiri. Kultur birokrasi pemerintahan yang seharusnya lebih menekankan pada pelayanan publik ternyata tidak dapat dilakukan secara efektif oleh birokrasi pemerintah di Indonesia. Kondisi tersebut merupakan implikasi dari sistem politik yang menempatkan birokrasi lebih sebagai instrumen politik kekuasaan daripada sebagai agen pelayanan publik.

ii. Perlunya Regulasi yang Efektif

Regulasi adalah proses pengaturan, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah atau regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat, memiliki berbagai jenis, seperti regulasi ekonomi, lingkungan, dan teknologi. Ada tiga strategi dalam regulasi, yaitu *self-regulation*, *regulation* oleh pihak independen, dan *regulation* melalui pihak ketiga sebagai auditor independen, juga melibatkan aspek *entry* dan *exit*, serta memperhatikan biaya, konten, kecenderungan, dan kinerja. Dalam pengaplikasiannya, regulasi perlu mengakomodasi berbagai kepentingan dan mencapai keseimbangan antara tujuan dan dampak terhadap masyarakat.

Regulasi memiliki beberapa fungsi yang sangat penting bagi keberlangsungan suatu masyarakat atau negara. Beberapa fungsi di antaranya adalah:

- 1) Mencegah Monopoli: Dapat digunakan untuk mencegah terjadinya monopoli atau oligopoli yang merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan membatasi kekuatan dan pengaruh perusahaan besar dan mendorong persaingan yang sehat di antara perusahaan.
- 2) Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Dapat digunakan untuk menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat. Contohnya: kesehatan dapat mengatur tentang standar keamanan makanan dan obat-obatan serta kualitas produk kesehatan lainnya.
- 3) Melindungi Konsumen: Digunakan untuk melindungi konsumen dari praktek bisnis yang merugikan. Hal ini dilakukan dengan mengatur tentang persyaratan pengungkapan informasi produk dan layanan yang jelas, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
- 4) Menjaga Stabilitas Keuangan: Digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan. Regulasi ini mengatur tentang tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
- 5) Mendorong Inovasi: Dapat digunakan untuk mendorong inovasi dan perkembangan teknologi. Regulasi ini menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru dan mengatur tentang kekayaan intelektual sehingga mendorong perusahaan untuk melakukan riset dan pengembangan produk yang lebih baik.
- 6) Melindungi Lingkungan Hidup: Digunakan untuk melindungi lingkungan hidup. Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Dengan adanya regulasi yang efektif, dapat memastikan keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi di daerah. Hal tersebut menyebabkan banyaknya pengujian materil, yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat umum.

Kondisi ini disebabkan karena masih kuatnya ego sektoral, lemahnya pemantauan atas dampak keberlakuan regulasi, belum memadainya kualitas dan kuantitas SDM di bidang regulasi, masih tersebarnya kewenangan pengelolaan regulasi, serta belum optimalnya partisipasi yang

bermakna dalam penyusunan regulasi. Jika aturan-aturan hukum yang dikeluarkan Indonesia tidak sinkron, salah satu akibatnya adalah tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat, selain itu pemerintah akan tersandera peraturan yang dibuatnya sendiri karena jumlahnya yang terlalu banyak.

iii. Tata Kelola Pemerintahan yang Belum Adaptif

Pemerintahan adaptif adalah pemerintahan yang mau mengerti kebutuhan rakyatnya secara progresif. Pemerintahan ini mampu melihat berbagai masalah dengan berbagai sudut pandang sehingga dapat menemukan penanganan yang lebih efektif dan mengena bagi rakyat. Tata kelola pemerintah daerah diharapkan beradaptasi dalam waktu singkat untuk menghadapi perubahan yang mungkin mengganggu jika tidak ditangani secara memadai. Namun masih banyak yang belum mampu beradaptasi secara efektif dan cepat karena pengaturan kelembagaan dan pola pengambilan keputusan dan tata kelola yang sudah mapan. Tata kelola yang adaptif harus meningkatkan kapasitas organisasi untuk menghadapi dan beradaptasi terhadap perubahan, sekaligus melindungi organisasi agar tidak menjadi tidak stabil. Strategi tata kelola adaptif mencakup pemanfaatan kemampuan internal dan eksternal, desentralisasi kekuasaan pengambilan keputusan, dan upaya memberikan masukan bagi pengambilan keputusan di tingkat yang lebih tinggi dari bawah ke atas.

Perubahan lingkungan, ekspektasi dari konstituen, ekonomi global, dan perkembangan teknologi seperti *big data*, analisis data, data terkait terbuka, web semantik mempengaruhi nilai-nilai sosial, privasi, dan keamanan siber mengharuskan organisasi untuk beradaptasi. Ada banyak perkembangan yang mungkin mengganggu masyarakat kita, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang harus ditangani oleh pemerintah. Tata kelola diperlukan dalam pengambilan keputusan yang diperlukan dan menyikapi perkembangan tersebut. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengantisipasi dan mengembangkan kebijakan yang baik serta layanan baru. Namun pemerintah sering kali tertinggal. Pemerintah harus menyadari perubahan-perubahan dan perlu menyesuaikan kebijakan, undang-undang, sistem dan bahkan struktur internal untuk menghadapinya.

Dalam kondisi saat ini, teknologi memberikan banyak peluang bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pemerintah berusaha mengelola perkembangan baru dengan menggunakan mekanisme tata kelola yang sudah mapan, dengan stabilitas dan akuntabilitas sebagai nilai utama. Namun, mekanisme ini sebagian besar tidak dikembangkan untuk beradaptasi terhadap perubahan. Penggunaan mekanisme yang ada berarti meningkatkan kontrol dan prosedur, agar dapat memahami perkembangan baru dan mengambil tanggung jawab. Namun, masyarakat semakin berkembang, sedangkan prosedurnya tidak fleksibel.

iv. Perlunya Penguatan Talenta ASN dan Meritokrasi Manajemen ASN di Seluruh Instansi

Manajemen talenta aparatur sipil negara (ASN) menjadi salah satu prioritas nasional dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. Manajemen Talenta ASN bertujuan untuk meningkatkan pencapaian tujuan strategis pembangunan nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selain itu, manajemen talenta bertujuan untuk menemukan dan mempersiapkan talenta terbaik untuk mengisi posisi kunci yang mendukung urusan inti organisasi (*core business*) sehingga dapat mendorong pencapaian strategis pembangunan nasional dan optimalisasi pelayanan publik. Manajemen talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit yang mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dari mulai perencanaan ASN, pengembangan kompetensi dan karir, hingga kompensasi. Untuk itu di dalam pelaksanaan manajemen talenta dibutuhkan dukungan penuh dari seluruh pihak, salah satunya pemangku kepentingan yang menangani manajemen SDM atau kepegawaian di setiap instansi pemerintah.

Aparatur Sipil Negara adalah penggerak utama sekaligus objek dari reformasi birokrasi itu sendiri menuju tata pemerintah yang baik, dan salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menekankan manajemen sumber daya manusia berbasis sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang diberlakukan secara adil.

Meritokrasi dimaknai sebagai kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur serta kondisi kecacatan. Dalam pengertian khusus, meritokrasi sering dipakai untuk menentang birokrasi yang sarat KKN terutama pada aspek nepotisme. Karena nepotisme lebih mengutamakan hubungan yang tidak didasarkan pada prestasi atau kemampuan.

Penerapan sistem merit (Meritokrasi) yang mengedepankan kompetensi dan kinerja sesuai dengan ideologi Pancasila sila kedua Keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, yang memberikan kesempatan kepada setiap individu yang mempunyai kompetensi dan kinerja untuk menduduki suatu jabatan tertentu. Penerapan dari sistem merit itu sendiri yaitu untuk memastikan bahwa jabatan yang ada di birokrasi pemerintah diduduki oleh pegawai yang memang memenuhi persyaratan kualifikasi dan juga kompetensi. Sehingga tujuan dari pembangunan terutama pada bidang SDM Aparatur untuk mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, berintegritas dan menjunjung tinggi netralitas dapat terwujud. Agar dapat menjalankan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan tertentu, Pegawai ASN harus memiliki profesi dan Manajemen ASN yang berdasarkan pada Sistem Merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan oleh jabatan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dimiliki oleh calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan yang dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif, sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Banyak tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam mengakselerasi penerapan sistem merit ini, pola pikir dan perilaku sebagai penguasa bagi ASN dan bukan pelayanan publik yang dimulai dari tingkat pimpinan, kecenderungan menempatkan seseorang pada posisi atau jabatan karena mempunyai afiliasi tertentu seperti politik, keluarga dan mengabaikan pertimbangan dasar kompetensi dan kinerja, ikatan persaudaraan dan motif ASN untuk mendapatkan karir yang lebih baik serta Ikatan persaudaraan menjadi penyebab utama pelanggaran netralitas ASN menjadi tantangan yang terus harus di kawal dimonitoring, dievaluasi oleh pemerintah.

v. Perlunya Penguatan Ekosistem Digitalisasi Pelayanan Publik

Dengan adanya digitalisasi pelayanan publik, memungkinkan pemerintah dapat menyediakan informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien serta mudah di akses oleh masyarakat. Salah satu yang menjadi aspek penting dalam pelayanan publik era digitalisasi ini adalah komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Ilmu komunikasi yang membantu dalam merancang strategi komunikasi yang tepat untuk menyampaikan informasi pelayanan publik yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam konteks ini Pemerintah daerah perlu memperhatikan bahasa yang digunakan, penyampaian pesan yang mudah dipahami, dan penggunaan media yang efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Melalui interaksi yang aktif dan ketertiban masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, model komunikasi interaktif juga dapat memperkuat rasa memiliki masyarakat terhadap kebijakan dan layanan publik. Hal ini dapat meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik telah diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Hal ini memberikan gambaran bahwa interaksi antara pemerintah sebagai penyelenggara layanan dan masyarakat sebagai pengguna layanan sangat dibutuhkan.

Dalam praktiknya, pemerintah dapat menggunakan berbagai metode komunikasi interaktif, seperti *focus group discussion*, forum publik, atau konsultasi publik, untuk mendengarkan dan merespon kebutuhan serta masukan dari masyarakat. Penting bagi pemerintah untuk menjaga komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif agar dapat membangun hubungan yang baik dengan masyarakat dalam konteks pelayanan publik. Namun, dalam pelayanan publik era digitalisasi juga terdapat tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah aksesibilitas. Meskipun digitalisasi telah memperluas akses ke layanan publik, masih ada sebagian masyarakat yang tidak memiliki akses ke internet atau tidak memiliki keterampilan digital yang memadai.

Pemerintah perlu memperhatikan kesenjangan akses ini dan mencari solusi agar pelayanan publik digital dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan privasi juga menjadi isu penting dalam pelayanan publik era digitalisasi. Pemerintah perlu memastikan bahwa data pribadi masyarakat yang dikumpulkan dalam pelayanan publik digital aman dan tidak disalahgunakan. Keamanan data dan privasi masyarakat harus dijaga dengan baik melalui kebijakan dan sistem yang tepat. Mengamati hal tersebut di atas, pelayanan publik di era digitalisasi membutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan mekanisme partisipasi publik yang inklusif. Dengan memanfaatkan ilmu komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan memastikan bahwa pelayanan tersebut dapat diakses oleh semua masyarakat.

vi. Masih Rendahnya Pendapatan Asli Daerah

Rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari berbagai sumber seperti pajak restoran, hotel/penginapan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), dan retribusi daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak yang Rendah: Banyak wajib pajak yang tidak melaporkan atau membayar pajak mereka secara benar dan tepat waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya kesadaran atau pengetahuan tentang kewajiban pajak, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah.
- 2) Masih lemahnya Sistem administrasi pajak yang tidak efisien atau kurangnya teknologi yang memadai dapat mengakibatkan proses pengumpulan pajak yang lambat dan tidak akurat. Data yang tidak lengkap atau tidak akurat juga dapat menghambat upaya pengumpulan pajak.
- 3) Masih Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak patuh dapat mengurangi efektivitas pengumpulan pajak. Jika sanksi terhadap pelanggaran pajak tidak diberlakukan dengan tegas, wajib pajak mungkin akan lebih cenderung untuk tidak memenuhi kewajibannya.
- 4) Perekonomian yang Lemah: Kondisi ekonomi yang kurang baik, seperti rendahnya tingkat kunjungan wisatawan atau turis (untuk pajak restoran dan hotel/penginapan), dapat berdampak langsung pada pendapatan dari sektor-sektor tersebut. Kurangnya Inovasi dan Diversifikasi Sumber Pendapatan: Bergantung pada sumber pendapatan yang terbatas tanpa mengembangkan sumber pendapatan baru atau alternatif dapat menyebabkan stagnasi atau penurunan PAD.
- 5) Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi: Sosialisasi dan edukasi yang kurang tentang pentingnya pajak dan retribusi daerah bagi pembangunan daerah dapat mengakibatkan minimnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya seperti memperbaiki sistem administrasi pajak, meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum, meningkatkan kesadaran dan edukasi masyarakat tentang pajak, serta mencari sumber-sumber pendapatan baru yang potensial.

3. Penguatan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

i. Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk meningkatkan pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Karena dalam pembangunan nasional diperlukan manusia yang berkualitas dalam segala hal. Setelah diidentifikasi dari data capaian di sektor pendidikan, tabel berikut ini memperlihatkan permasalahan pembangunan pada faktor tingkat pendidikan:

Tabel 2. 168
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Tingkat Pendidikan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Tingkat Pendidikan	Rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dimana tahun 2024 sebesar 8,13 yang artinya belum menuntaskan wajib belajar 9 tahun	Disebabkan oleh: • Kemiskinan • Kemampuan fiskal daerah yang masih rendah • Sulitnya akses ke lokasi sekolah • Rendahnya kesadaran penduduk terhadap pendidikan • Tingkat ketersediaan ruang kelas
	Rendahnya angka partisipasi sekolah bagi penduduk berumur 16-18 tahun dan masih berada di bawah capaian provinsi (78,28%, Tahun 2024).	Disebabkan oleh: • Motivasi remaja yang kurang untuk melanjutkan pendidikan lebih lanjut. • Kapasitas keluarga yang belum optimal untuk mendukung pendidikan lebih lanjut
	Jumlah Anak Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SMP	Ditunjukkan oleh: • Jumlah APS SD tahun 2022 adalah 15 orang. • Jumlah APS SMP tahun 2022 adalah 9 orang. Dapat disebabkan oleh: • Motivasi untuk melanjutkan pendidikan yang kurang bagi remaja. • Tantangan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. • Kondisi ekonomi keluarga.
	Angka melanjutkan sekolah belum mencapai 100% untuk jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA	Rendahnya tingkat pendidikan erat kaitannya dengan faktor ekonomi. Terjadi rendahnya partisipasi sekolah pada rumah tangga miskin, terutama miskin ekstrem disebabkan oleh keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga lebih memilih untuk bekerja daripada melanjutkan sekolah.
	Terdapat ruang kelas jenjang SD dan SMP dengan kondisi bangunan rusak	Disebabkan oleh: • Kurangnya pemeliharaan ruang kelas oleh sekolah. • Kurangnya pemerataan perbaikan fasilitas pendidikan.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

ii. Kesehatan

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh periode sebelumnya. Tabel dibawah ini menjelaskan kondisi permasalahan Pembangunan yang disebabkan karena faktor derajat kesehatan:

Tabel 2. 169
Permasalahan Pembangunan pada Faktor Derajat Kesehatan

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Derajat Kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2024 sebesar 11,8 masih di atas target yang ditetapkan. Selain itu, pada tahun 2022 jumlah kematian bayi sebesar 64.	Disebabkan oleh: • Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. • Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak. • Kurangnya cakupan tenaga medis.

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
	Masih terdapat kasus kematian ibu.	Angka kematian ibu disebabkan: - Kualitas pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang kurang. - Kapasitas internal ibu dan keluarga. - Pemenuhan gizi yang belum optimal. - Ibu hamil yang tidak menetap dan berpindah fasilitas kesehatan. - Ibu hamil bekerja yang menyulitkan pemantauan
	Rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil K4 menuju posyandu.	Hal ini dapat disebabkan: - Kurangnya fasilitas posyandu. - Kurang meratanya posyandu yang ada.
	Masih ditemukannya kasus stunting dan balita gizi buruk. (Prevalensi stunting 8,59% Tahun 2024) masih di atas target yang ditetapkan.	Dapat disebabkan oleh: - Upaya dan pengetahuan tentang pemenuhan gizi yang belum optimal. - Pola asuh balita. - Kualitas pelayanan kesehatan yang belum optimal.
	Cakupan tenaga medis bidan dan perawat yang belum optimal	Ditunjukkan oleh: Disebabkan oleh: Kurangnya sumber daya manusia di bidang kesehatan
	Jumlah kasus TBC masih cukup tinggi	Pada tahun 2020, Kabupaten Lima Puluh Kota berada di urutan kelima dalam kasus TBC se-Provinsi Sumatera Barat yaitu 441 kasus.
	Masih tingginya kasus DBD	Disebabkan oleh: - Kondisi lingkungan perumahan di musim penghujan menjadi faktor adanya nyamuk penyebab DBD. - Kurangnya usaha preventif kasus DBD seperti pemeliharaan lingkungan perumahan untuk pencegahan adanya nyamuk penyebab DBD. - Fenomena tiba terlambat masih terjadi, yakni terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat.
	Kabupaten Lima Puluh Kota ditetapkan sebagai Lokus Stunting Nasional	Berdasarkan surat dari Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor B.240/M.PPN/D.5/PP.01.01/04/2019 tanggal 29 April 2019 hal Penyampaian Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2020. Dari surat tersebut, ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Nagari Prioritas Penanganan Stunting Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2020 pada tanggal 21 Januari 2020. Dari SK tersebut disebutkan Nagari dan Kecamatan Prioritas Penanganan Stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota. Walaupun penanganan stunting di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah cukup baik, namun masalah stunting belumlah usai di Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga penanganan Stunting tetap menjadi Prioritas di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025, Hasil Analisis

4. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

Investasi Usaha Berdasarkan Kategori Usaha dan Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2022 telah mencapai Rp. 186.790.411.868,- yang terdiri dari Investasi Usaha Mikro sebesar Rp. 72.706.044.363,-, usaha kecil Rp. 64.521.867.505,-, usaha menengah Rp. 8.600.000.000,-, dan usaha besar Rp. 40.962.500.000,- dengan investasi terbesar di Kecamatan Harau yaitu Rp. 51.016.310.001,- terdiri dari Usaha Mikro Rp. 22.523.710.000,-, Usaha Kecil Rp. 11.530.100.001,-, dan usaha besar Rp. 16.962.500.000,-. Investasi usaha ini belum merata di setiap Kecamatan, seperti di Kecamatan Situjuh Limo Nagari, Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Gunuang Omeh dan Kecamatan Kapur IX baru ada investasi usaha mikro sedangkan investasi usaha kecil, menengah dan besar belum ada. Selain itu investasi usaha menengah hanya ada di Kecamatan Akabiluru dengan nilai Rp. 600.000.000,-. Sementara itu investasi usaha besar hanya ada pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Harau, Kecamatan Mungka dan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dengan total investasi untuk ke 3 kecamatan tersebut sebesar Rp. 40.962.500.000,-. Meskipun pencapaian realisasi investasi di Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020 hingga 2021 selalu melebihi target namun pada tahun 2022 investasi mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp. 375.762.954.820,-. Melalui investasi usaha diharapkan adanya penciptaan lapangan kerja untuk masyarakat lokal. Namun karena belum optimalnya investasi usaha di kabupaten Lima Puluh Kota tentu dapat menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja.

5. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil

Terkait dengan rendahnya pengembangan industri kecil menengah, permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya pengembangan industri pengolahan tekstil, pengembangan industri pengolahan pangan, pengembangan industri pengolahan non pangan, pengembangan industri aneka kerajinan dan pemanfaatan sumberdaya dan penggunaan teknologi. Selanjutnya terbatasnya akses pasar bagi pelaku IKM dan permodalan untuk meningkatkan skala usaha.

6. Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

i. Pariwisata

Wisata dan kuliner di Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi besar untuk berkembang. Hal ini disebabkan karena Lima Puluh Kota memiliki berbagai tempat wisata yang indah dan mayoritas kuliner yang beragam. Namun demikian, potensi yang dimiliki tidak akan dapat berkembang dengan maksimal jika tidak dikelola dengan benar. Permasalahan pengembangan Wisata dan kuliner yang dihadapi, antara lain: (1) kurangnya atraksi wisata, (2) kurang terkelolanya destinasi wisata, (4) kurangnya sarana prasarana pendukung pariwisata (4) belum optimalnya tata kelola baik dari segi SDM dan destinasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Wisatawan nusantara memiliki ketertarikan yang tinggi untuk berwisata ke Lima Puluh Kota. Namun, tanpa upaya pengembangan pariwisata terutama dalam hal fasilitas akomodasi, restoran, atraksi, kemudahan akses dan branding wisata yang unik, tentu ini dapat mengurangi daya tarik kunjungan wisatawan ke Lima Puluh Kota.

ii. Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang terus berkembang dan menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Konsep ekonomi kreatif sendiri merupakan gabungan antara kegiatan ekonomi dengan kreativitas, inovasi, dan teknologi, yang menghasilkan produk atau layanan yang memiliki nilai tambah. Sebagai contoh, industri kreatif seperti seni, desain, perfilman, musik, penerbitan, dan fashion dapat dianggap sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Momentum globalisasi dan pasar bebas hendaknya memberikan sebuah kesempatan yang sangat baik bagi ekonomi kreatif namun jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi risiko bagi pihak yang tidak mempersiapkan kompetensinya secara maksimal. Pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah ada namun masih sedikit dan belum terkelola dan terdata dengan baik. Ada beberapa hal yang menghambat pengembangan ekonomi kreatif diantaranya kurangnya kualitas sumber daya manusia, ketersediaan bahan baku, daya saing, akses pasar, dan kesulitan permodalan.

7. Penguatan Kelembagaan, Redistribusi Lahan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi

Rendahnya produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan perikanan disebabkan oleh lahan terlantar belum optimal dimanfaatkan untuk peningkatan produksi jagung, padi, perikanan budidaya dan peningkatan populasi ternak sapi serta kambing. Selanjutnya ketersediaan air pada jaringan irigasi juga belum mencukupi untuk mengalir ke luas areal pertanian dan perikanan. Disamping itu belum cukup tersedia jalan usaha tani dan jalan produksi, masih kurangnya ketersediaan dan distribusi benih unggul padi, jagung, dan masih kurangnya jaminan ketersediaan pupuk bersubsidi. Terhadap bidang perikanan dan peternakan masih kurangnya benih dan induk ikan unggul, belum optimalnya Pengendalian OPT (Organisme Pengganggu Tanaman), penyakit hewan ternak dan penyakit pada ikan, belum optimalnya kualitas, jumlah penyuluh pertanian, peternakan dan perikanan serta sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, peternakan dan perikanan, dan masih kurangnya alsintan, peternakan dan perikanan serta kurangnya SDM pengelola alsintan.

8. Pemerataan Infrastruktur Dasar, Pelesarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana

i. Infrastruktur Dasar

- Air Minum**

Cakupan layanan air minum Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 81,70. Pada tahun 2024 nilainya menurun menjadi 76,26, Kondisi capaian yang menurun ini mengindikasikan banyaknya tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam menyediakan akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan. Tantangan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam meningkatkan capaian akses air minum adalah pembangunan pengelolaan infrastruktur tampungan air dan belum terintegrasinya pengelolaan SPAM serta pengamanan dan pengawasan kualitas air minum. Beberapa tantangan dalam penyediaan air minum ini adalah sumber air yang jauh dari rumah masyarakat dan belum dimanfaatkan disamping itu infrastruktur air minum masih kurang, terutama sambungan dari intake ke rumah masyarakat.

- Sanitasi**

Cakupan layanan sanitasi Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 66,64 persen, tahun 2024 sebesar 67,75 persen. Antara tahun 2023 dan 2024 terjadi kenaikan capaian sanitasi ini dikarenakan kegiatan pemucuan dari dinas kesehatan, bantuan CSR dan pembangunan sanitasi dari PD. Kenaikan capaian sanitasi ini masih belum optimal disebabkan masih rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat, tingginya persentase saluran pembuangan air limbah masyarakat yang tidak sesuai standar, terbatasnya jumlah kelembagaan pengelolaan sarana sanitasi di tingkat masyarakat dan rendahnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan rencana program sanitasi.

- Perumahan**

Rasio rumah layak huni Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 0,197, tahun 2024 adalah 0,177. Target capaian rasio rumah layak huni tahun 2024 adalah 0,166. Walaupun sudah mencapai target, namun kebutuhan akan rumah layak merupakan sesuatu yang sangat penting. Untuk itu perlu ditingkatkan rasio rumah layak huni untuk kedepannya, adapun akar permasalahan terhadap ketersediaan rumah yang layak huni adalah antara lain: 1) Rendahnya progress penanganan rumah tidak layak huni; 2) Belum optimalnya pembangunan dan pengembangan rumah yang layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR); 3) Kondisi jalan dan drainase lingkungan belum memadai; 4) Fasilitas umum dan fasilitas sosial belum memadai; 5) Sistem proteksi kebakaran belum memadai; 6) Layanan sistem pengelolaan sampah di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman masih rendah; dan 7) Belum optimalnya penyediaan air minum dan sanitasi di lingkungan perumahan dan kawasan permukiman.

- Lingkungan Hidup**

Rendahnya kualitas lingkungan hidup disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya 1) Pembukaan lahan pertanian, Perkebunan, dan permukiman yang menyebabkan hilangnya hutan alam serta penebangan liar yang tidak terkendali; 2) Limbah domestik dan industri yang tidak

dikelola dengan naik mencemari sungai dan sumber air lainnya serta penggunaan pestisida dan pupuk kimia secara berlebihan dalam pertanian yang mencemari aliran sungai; 3) Sistem pengolahan sampah yang tidak memadai serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur untuk daur ulang sampah; dan 4) praktik pertanian yang tidak berkelanjutan dan penggundulan hutan yang menyebabkan tanah kehilangan lapisan pelindungnya.

• **Persampahan**

Permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu menjadi tantangan yang signifikan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Berikut ini permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan persampahan belum terpadu dan belum memiliki nilai ekonomi, yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 170
Pengelolaan Persampahan Belum Terpadu (Belum Memiliki Nilai Ekonomi)

Faktor	Permasalahan	Penjelasan
Pengelolaan persampahan	Kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah yang memadai	Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, seperti tempat pembuangan akhir (TPA) yang terbatas atau tidak sesuai standar, menyebabkan penumpukan sampah yang berlebihan di berbagai lokasi. Hal ini tidak hanya merusak estetika lingkungan, tetapi juga dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menyebabkan pencemaran lingkungan.
	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan	Kurangnya kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah yang benar dan minimnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah juga menjadi hambatan dalam upaya pengelolaan sampah yang terpadu. Tanpa dukungan aktif dari masyarakat, implementasi kebijakan dan program pengelolaan sampah akan sulit untuk berhasil.

Sumber: Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, Hasil Analisis

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur pengelolaan sampah, kampanye penyuluhan dan edukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah yang baik, serta penerapan kebijakan yang mendukung praktik pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dengan upaya bersama dan komitmen yang kuat dari semua pihak, diharapkan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat mengatasi permasalahan pengelolaan persampahan yang belum terpadu dan menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

9. Penataan Infrastruktur Strategis dan Terpadu

Pemindahan IKK dari wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak sudah dilaksanakan sejak tahun 2004. Namun sampai saat ini, IKK Sarilamak belum didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang cukup dan memadai. Beberapa bangunan strategis yang seharusnya ada di kawasan IKK belum dapat diwujudkan, seperti : beberapa kantor pemerintah yang masih berada di wilayah Kota Payakumbuh, pasar sebagai pusat transaksi ekonomi kabupaten, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial lainnya. Dan jika dilihat dari sisi penataan ruang, banyak terjadi tumpang tindih fungsi ruang, tidak tampak batasan yang jelas antara kawasan permukiman, pusat perdagangan dan perkantoran. Melihat kondisi tersebut, pembangunan IKK harus lebih ditingkatkan sehingga kawasan pemerintahan terpadu yang diharapkan. Dengan peningkatan pembangunan IKK Sarilamak maka akan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan perekonomian dan infrastruktur di Kawasan IKK Sarilamak yang merupakan pusat pemerintahan daerah.

10. Perwujudan Kemandirian Nagari Berbasis Potensi Nagari

Diukur melalui Indeks Desa Membangun, status nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota terdiri atas 44 nagari mandiri, 33 nagari maju, 1 nagari berkembang dan 1 nagari tertinggal. Artinya pengelolaan nagari masih perlu ditingkatkan dan dioptimalkan. Untuk realisasi indeks desa membangun pada tahun 2024 sebesar 0,8107 sudah melewati dari target yaitu 0,7878. Hal utama yang mempengaruhi belum optimalnya penyusunan profil nagari adalah belum adanya batas nagari di semua nagari, saat ini masih dalam proses pengukuran dan penetapan batas nagari.

2.6.2 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Urusan Pemerintah Daerah

2.6.2.1 Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

Pertama, kualitas dan kapasitas layanan pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum merata. Banyak sekolah menghadapi keterbatasan kemampuan dalam memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yang tercermin dari rendahnya capaian akreditasi A. Akar permasalahan ini seringkali terletak pada keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai, terutama di daerah-daerah terpencil dan tertinggal. Selain itu, kebutuhan akan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan mencukupi masih menjadi isu krusial. Kualitas pembelajaran juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan berkelanjutan bagi guru, yang berdampak pada kemampuan mereka dalam mengimplementasikan metode pembelajaran inovatif dan melakukan asesmen yang komprehensif, termasuk dalam mengukur dan meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi siswa.

Kedua, tantangan eksternal dari kondisi sosial dan ekonomi masyarakat turut mempengaruhi capaian pendidikan. Masih terdapat sebagian masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya wajib belajar 12 tahun. Faktor-faktor seperti keterbatasan ekonomi keluarga, rendahnya minat anak untuk bersekolah, kurangnya perhatian dan dukungan orang tua terhadap pendidikan anak, serta pengaruh lingkungan sosial dapat menjadi penghalang bagi tercapainya target wajib belajar. Kondisi ini diperparah oleh masih ditemukannya sarana dan prasarana di beberapa sekolah yang belum lengkap dan memenuhi standar, menciptakan lingkungan belajar yang kurang kondusif dan berpotensi menurunkan motivasi belajar siswa.

Secara keseluruhan, permasalahan bidang pendidikan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya keterkaitan yang kompleks antara ketersediaan data yang akurat, kapasitas dan kualitas layanan di tingkat sekolah, tantangan implementasi kebijakan dan kurikulum, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Permasalahan mendasar terkait sarana prasarana sekolah yang belum memadai, kualitas dan kuantitas SDM pendidik yang belum memenuhi standar, serta jumlah siswa yang belum ideal sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) menjadi isu sentral yang memerlukan solusi holistik dan berkelanjutan.

B. Urusan pemerintahan bidang Kesehatan

Bidang kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, yang berpotensi menghambat upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh dan merata. Permasalahan ini mencakup aspek ketersediaan layanan, kualitas pelayanan, sumber daya kesehatan, perilaku masyarakat, hingga tantangan kesehatan spesifik.

Pertama, aksesibilitas dan pemerataan layanan kesehatan masih menjadi isu krusial. Meskipun upaya perluasan jangkauan layanan telah dilakukan, keterbatasan geografis dan infrastruktur transportasi di beberapa wilayah, terutama daerah terpencil, masih menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan yang memadai. Selain itu, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, dengan kecenderungan penumpukan di wilayah perkotaan, menyebabkan kekurangan tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di daerah pelosok.

Kedua, kualitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan. Meskipun standar pelayanan minimal telah ditetapkan, variasi kualitas layanan antar fasilitas kesehatan masih ditemukan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap hal ini antara lain keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, terutama peralatan medis yang canggih dan

pemeliharaannya. Selain itu, kompetensi dan profesionalisme tenaga kesehatan perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas. Implementasi standar mutu pelayanan secara konsisten di seluruh fasilitas kesehatan juga menjadi tantangan yang perlu diatasi.

Keempat, perilaku hidup sehat masyarakat dan kesadaran akan pentingnya kesehatan masih perlu ditingkatkan. Prevalensi penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, dan kanker terus meningkat, sebagian disebabkan oleh pola makan tidak sehat, kurangnya aktivitas fisik, merokok, dan konsumsi alkohol. Kesadaran masyarakat akan pentingnya pencegahan penyakit dan deteksi dini masih rendah. Selain itu, perilaku mencari pengobatan yang terlambat juga berkontribusi terhadap tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tertentu.

Secara keseluruhan, bidang kesehatan di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi tantangan multidimensi yang memerlukan respons strategis dan kolaboratif dari berbagai pihak. Peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan sumber daya kesehatan, perubahan perilaku masyarakat ke arah yang lebih sehat, penanganan masalah kesehatan spesifik, dan pengembangan sistem informasi kesehatan yang kuat menjadi prioritas utama untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota yang sehat dan produktif. Penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan terhadap permasalahan ini akan berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sejumlah kendala signifikan menghambat optimalisasi pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pertama, masih rendahnya komitmen dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum menjadi perhatian utama. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkait infrastruktur yang layak dan aman. Kedua, terbatasnya dukungan anggaran dalam pembangunan jalan, jembatan, cipta karya, serta pengairan secara keseluruhan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Keterbatasan ini membatasi kemampuan daerah dalam mengatasi kekurangan dan pemerataan infrastruktur serta memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat.

Permasalahan krusial lainnya terkait dengan tidak adanya pengawasan yang intensif terhadap kendaraan dengan muatan yang melebihi batas ketentuan. Praktik ini mengakibatkan kerusakan jalan yang prematur, memperpendek umur ekonomis jalan, dan meningkatkan biaya pemeliharaan. Selain itu, berkurangnya kapasitas jalan akibat guna lahan yang tidak terkendali maupun pemanfaatan ruang jalan yang tidak sesuai peruntukan juga memperparah kondisi lalu lintas dan mengurangi efisiensi transportasi. Dalam aspek perencanaan tata ruang, belum adanya Keputusan/Penetapan Hukum terkait dengan penetapan rencana detail tata ruang yang menghambat kepastian investasi dan pengembangan wilayah yang terarah sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah.

Ketiadaan data yang akurat dan terpadu menyulitkan perencanaan pengembangan infrastruktur yang akan mempengaruhi perencanaan. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan, peningkatan alokasi anggaran yang proporsional, penguatan koordinasi antar sektor dan tingkatan pemerintahan, pemanfaatan teknologi dan inovasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Lima Puluh Kota

D. Urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Di Kabupaten Lima Puluh Kota, urusan pemerintahan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman menghadapi serangkaian permasalahan kompleks yang saling terkait dan membutuhkan penanganan yang terintegrasi. Salah satu tantangan utama adalah tingginya angka rumah tidak layak huni (RTLH) yang tersebar di berbagai wilayah. Kondisi ini tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan penghuninya. Permasalahan kawasan kumuh ini bukan hanya sekadar fisik bangunan yang tidak sesuai, namun juga mencakup keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar yang memadai, seperti air bersih, sanitasi layak, drainase yang

berfungsi, dan pengelolaan sampah yang teratur. Kondisi ini diperparah oleh pengendalian pemanfaatan ruang dan pengembangan perumahan yang belum optimal, di mana pembangunan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang ada, memicu munculnya permukiman ilegal dan tidak terencana.

Di sisi lain, kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan perumahan terjangkau semakin terasa. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak diimbangi dengan ketersediaan rumah yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini diperburuk oleh keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk sektor perumahan dan kawasan permukiman, sehingga upaya pemerintah daerah dalam menyediakan perumahan layak dan menata kawasan permukiman menjadi terbatas. Selain itu, Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai wilayah yang rawan bencana, seringkali dihadapkan pada dampak bencana seperti gempa bumi, banjir, dan longsor yang merusak perumahan dan infrastruktur permukiman. Kondisi ini menambah beban pemerintah daerah dalam upaya pemulihan dan pembangunan kembali hunian yang aman dan layak.

Efektivitas penanganan permasalahan ini juga terkendala oleh kurangnya koordinasi berbagai pihak terkait, termasuk pengembang, sektor swasta, dan partisipasi masyarakat. Ketersediaan data dan informasi yang terintegrasi mengenai kondisi perumahan, kawasan permukiman, dan kebutuhan masyarakat juga masih menjadi tantangan, menghambat perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat sasaran. Lebih lanjut, partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman belum maksimal, padahal keterlibatan mereka sangat penting untuk keberlanjutan dan keberhasilan program. Permasalahan lain yang mungkin timbul adalah terkait isu kepemilikan lahan dan sengketa, yang dapat menghambat proses pembangunan dan penataan. Terakhir, pengawasan terhadap kualitas pembangunan perumahan subsidi perlu diperkuat untuk memastikan bahwa rumah yang dibangun benar-benar layak huni dan memenuhi standar yang ditetapkan.

E. Urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga menghadapi sejumlah tantangan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah. Terdapatnya gangguan ketentraman dan ketertiban umum (*trantibum*) yang memerlukan waktu penyelesaian yang cukup panjang menunjukkan adanya kompleksitas permasalahan dan potensi keterbatasan dalam penanganan yang efektif dan efisien. Selain itu, masih adanya Perangkat Daerah (PD) yang belum berkoordinasi atau kurang bersinergi dengan Satpol PP menghambat efektivitas penegakan peraturan daerah dan penanganan gangguan *trantibum* yang seringkali melibatkan lintas sektor. Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi kendala bagi Satpol PP, terutama terbatasnya tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk melakukan penegakan Perda. Jumlah PPNS yang tidak sebanding dengan banyaknya Perda yang harus ditegakkan dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum di daerah. Secara umum, Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP masih terbatas dari sisi jumlah dan kualitas, yang mempengaruhi kemampuan operasional dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Keterbatasan ini diperparah dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, seperti kendaraan operasional, peralatan pengamanan, dan fasilitas pendukung lainnya. Terakhir, minimnya anggaran yang tersedia, sedangkan Perda yang ditegakkan cukup banyak, menjadi kendala dalam pelaksanaan operasi penertiban dan penegakan hukum secara optimal.

Beberapa permasalahan bersifat lintas tupoksi dan memerlukan sinergi yang lebih kuat antara BPBD dan Damkar terutama dalam konteks penanganan kebakaran. Belum memadainya jumlah dan kualitas SDM serta sarana dan prasarana pemadam kebakaran (Damkar) menjadi ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat dan aset daerah. Selain itu, belum tersedianya peta daerah rawan kebakaran menghambat upaya pencegahan dan perencanaan respons yang efektif terhadap kejadian kebakaran. Mengatasi berbagai permasalahan ini memerlukan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan koordinasi antar instansi dan tingkatan pemerintahan, peningkatan kesadaran masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan data dan

informasi. Sinergi yang kuat antara BPBD dan damkar, didukung oleh komitmen anggaran yang memadai, menjadi kunci untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang optimal di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Dalam penanggulangan bencana, terbatasnya kewenangan BPBD, terutama dalam penentuan status bencana, dapat menghambat respons cepat dan alokasi sumber daya yang optimal. Proses penetapan status yang berjenjang dan memerlukan persetujuan dari pihak lain berpotensi menunda tindakan yang krusial pada fase awal bencana. Selain itu, terbatasnya kapasitas Sumber Daya aparatur BPBD yang benar-benar memahami teknis penanggulangan bencana menjadi kendala signifikan. Kurangnya tenaga ahli di berbagai bidang kebencanaan dapat mengurangi efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program penanggulangan bencana.

Kesiapsiagaan juga menjadi perhatian utama, di mana belum memadainya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang Program Penanggulangan Bencana. Keterbatasan peralatan evakuasi, logistik, komunikasi, dan peralatan pendukung lainnya dapat menghambat respons cepat dan efisien saat terjadi bencana. Lebih lanjut, masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk pengurangan risiko bencana, seperti jalur evakuasi yang jelas dan memadai, serta shelter atau tempat pengungsian yang aman dan layak, meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap dampak bencana. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana juga menjadi tantangan. Sebagian besar masyarakat yang berada di daerah risiko bencana masih belum paham terkait upaya dan tindakan dalam pengurangan risiko bencana. Kurangnya edukasi dan sosialisasi yang efektif menyebabkan rendahnya kesiapsiagaan individu dan komunitas dalam menghadapi ancaman bencana.

Manajemen data dan informasi kebencanaan juga perlu pembenahan. Belum adanya database khusus yang menyimpan history atau riwayat bencana, baik skala kecil maupun besar, menyulitkan analisis tren bencana, identifikasi wilayah rawan, dan perencanaan mitigasi yang berbasis data. Selain itu, laporan bencana yang disampaikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang akan menindaklanjuti bencana, mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem komunikasi dan koordinasi. Keterlambatan dalam penyampaian data bencana yang terjadi juga menghambat proses asesmen kebutuhan dan penyaluran bantuan yang tepat waktu. Lebih lanjut, validasi dan keakuratan data bencana masih diragukan, yang dapat mempengaruhi ketepatan pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Terakhir, sistem database penyimpanan arsip dan dokumentasi kebencanaan yang belum memadai berpotensi menghilangkan informasi penting untuk pembelajaran dan perbaikan di masa depan.

F. Urusan pemerintahan bidang Sosial

Pertama, keterbatasan anggaran menjadi kendala struktural dalam pemenuhan kewajiban pemerintah daerah di bidang sosial. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah untuk mendukung pemenuhan SPM Bidang Sosial, khususnya untuk mencapai target 100%. menunjukkan adanya tantangan fiskal yang signifikan dalam mewujudkan target-target pelayanan sosial yang telah ditetapkan. Kedua, Data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang masih jarang diverifikasi dan divalidasi secara berkala. Kondisi ini berpotensi menyebabkan ketidakakuratan data penerima bantuan, inefisiensi penyaluran, dan ketidakadilan dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Secara keseluruhan, urusan pemerintahan bidang sosial dihadapkan pada permasalahan multidimensi yang memerlukan solusi yang terkoordinasi, terencana, dan melibatkan komitmen yang kuat dari seluruh tingkatan pemerintahan serta partisipasi aktif dari berbagai pihak terkait. Peningkatan kapasitas, alokasi anggaran yang memadai, penguatan regulasi, pemanfaatan potensi filantropi, perbaikan tata kelola data, serta peningkatan pemahaman dan implementasi SPM menjadi langkah-langkah krusial untuk mengatasi permasalahan ini dan mewujudkan kesejahteraan sosial yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota.

2.6.2.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

A. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor strategis yang menjadi indikator utama dalam menilai tingkat kesejahteraan dan kemajuan suatu daerah. Namun, di Kabupaten Lima Puluh Kota, sektor ini masih dibayangi oleh berbagai persoalan yang saling berkaitan dan berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah. Salah satu persoalan mendasar adalah efektivitas tenaga kerja yang belum optimal. Rendahnya pemanfaatan teknologi oleh pencari kerja mengindikasikan kesenjangan keterampilan yang signifikan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tuntutan dunia kerja saat ini. Hal ini juga diperparah oleh rendahnya budaya kerja dan minimnya kesadaran terhadap pentingnya pelatihan serta sertifikasi kompetensi.

Di sisi kelembagaan, terbatasnya jumlah fungsional pengawas ketenagakerjaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota menjadi tantangan serius dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Idealnya, satu orang pengawas menangani maksimal lima perusahaan. Namun, fakta menunjukkan rasio tersebut jauh dari memadai. Akibatnya, banyak pelanggaran yang luput dari pantauan dan sulit dikenai sanksi. Masalah lainnya terletak pada belum optimalnya mekanisme pelaporan ketenagakerjaan di tingkat daerah. Banyak kabupaten/kota yang belum menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), yang seharusnya menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan dan program ketenagakerjaan yang kontekstual dan terarah.

Dalam sektor usaha kecil (UK), pemahaman terhadap peraturan ketenagakerjaan masih rendah. Banyak pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maupun penerapan struktur dan skala upah yang sesuai regulasi. Padahal, perlindungan terhadap tenaga kerja adalah pilar penting dalam menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan berkelanjutan. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja dalam mengikuti pelatihan dan sertifikasi juga masih rendah karena kurangnya kesadaran serta akses yang terbatas, baik karena faktor usia, pendidikan, maupun birokrasi administratif.

B. Urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tantangan signifikan dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota terletak pada keterbatasan alokasi anggaran yang menghambat berbagai aspek penanganan, mulai dari pendampingan korban, advokasi kasus, hingga upaya pencegahan. Kurangnya anggaran ini diperparah dengan minimnya koordinasi antar berbagai elemen pemerintahan dan masyarakat, birokrasi yang rumit, serta keterbatasan fasilitas dan tenaga profesional yang kompeten. Akibatnya, implementasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi tidak optimal, tercermin dari tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan terhadap anak yang seringkali tidak terdeteksi dan kurang tertangani secara efektif. Akar permasalahan ini lebih dalam dari sekadar keterbatasan sumber daya. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat melanggengkan ketidaksetaraan gender dan stigma terhadap korban kekerasan, menyulitkan korban untuk melapor dan mendapatkan dukungan yang memadai. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program-program yang ada masih rendah, dan kurangnya sosialisasi serta edukasi memperburuk situasi. Dengan demikian, penanganan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lima Puluh Kota memerlukan pendekatan yang holistik dan melibatkan komitmen anggaran yang lebih besar, penguatan koordinasi antarlembaga, penghapusan birokrasi yang menghambat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta upaya berkelanjutan dalam mengubah norma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat.

C. Urusan pemerintahan Bidang Pangan

Daerah yang rawan pangan, diperparah dengan kualitas pangan yang rendah, menjadi isu utama. Meskipun pemerintah daerah telah berupaya melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), usaha ini belum optimal dan belum menyentuh seluruh masyarakat. Di tingkat masyarakat, permasalahan dan kesadaran terkait diversifikasi pangan dan gizi masih rendah, sehingga intervensi yang dilakukan belum efektif mengatasi balita stunting, gizi buruk, ibu hamil, dan ibu menyusui. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaksana di lapangan, minimnya penguatan komitmen pemerintah daerah, edukasi masyarakat yang kurang, intervensi yang tidak

terintegrasi, serta kapasitas pengawasan yang lemah semakin memperburuk situasi ketahanan pangan.

Faktor-faktor tersebut meliputi kerentanan terhadap bencana alam yang dapat merusak infrastruktur pertanian dan mengganggu produksi pangan, perubahan iklim yang memengaruhi pola tanam dan produktivitas pertanian, keterbatasan anggaran untuk pengawasan dan penjaminan mutu pangan, serta kerentanan terhadap iklim ekstrem yang menyebabkan gagal panen dan ketidakstabilan ketersediaan pangan. Selain itu, tingginya tingkat kerentanan terhadap kerawanan pangan akibat produksi pangan lokal yang lebih rendah dibanding kebutuhan, prevalensi balita stunting yang tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk miskin yang tinggi turut memperburuk keadaan. Inflasi harga pangan, terutama pada cabai, juga semakin menekan aksesibilitas dan ketersediaan pangan bagi masyarakat. Permasalahan ini diperparah dengan preferensi masyarakat terhadap satu jenis bahan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi, perubahan iklim dan bencana alam yang mengganggu produksi dan distribusi pangan, ketergantungan pada satu jenis pangan pokok, keterbatasan akses pangan bergizi di beberapa wilayah, keterbatasan SDM pengawas keamanan pangan, keterbatasan infrastruktur pengujian keamanan pangan, serta kurangnya sinergi antar instansi terkait dalam menangani masalah keamanan pangan

D. Urusan pemerintahan bidang Pertanahan

Permasalahan urusan pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya kompleksitas yang signifikan dalam pengelolaan dan penyelesaian isu-isu terkait lahan. Permasalahan ini tidak hanya terbatas pada aspek teknis dan administratif, tetapi juga melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Keterbatasan sumber daya, inefisiensi sistem perizinan. Di sisi lain, konflik kepentingan, tumpang tindih kepemilikan, dan sengketa lahan yang melibatkan berbagai pihak menunjukkan adanya tantangan dalam aspek legal dan sosial. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme penyelesaian sengketa serta keterbatasan tenaga ahli di BPN daerah semakin memperumit upaya penyelesaian masalah pertanahan secara komprehensif.

Beragam dan saling terkaitnya isu-isu yang dihadapi dalam sektor pertanahan di Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran untuk pengawasan lahan, hingga kompleksitas sengketa yang melibatkan banyak pihak. Semua faktor ini berkontribusi pada lambatnya proses penyelesaian masalah dan potensi terhambatnya investasi. Keterlambatan anggaran proyek pengadaan tanah dan inefisiensi sistem perizinan menambah beban administratif dan operasional. Lebih lanjut, konflik kepentingan antara pembangunan dan konservasi, ketidakseimbangan infrastruktur yang menyulitkan pengawasan, serta kurangnya sosialisasi mekanisme penyelesaian sengketa kepada masyarakat memperparah kondisi ini. Dengan demikian, penanganan urusan pertanahan memerlukan pendekatan holistik dan terkoordinasi yang melibatkan berbagai pihak terkait untuk mencapai solusi yang berkelanjutan

E. Urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup

Sektor lingkungan hidup, memiliki banyak tantangan meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, terutama di daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten, yang melemahkan upaya pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, dan restorasi lingkungan. Praktik pembakaran sampah yang masih umum, kerusakan lahan yang meluas akibat aktivitas ilegal dan kurangnya restorasi, serta biaya pengelolaan limbah yang tinggi, memperparah degradasi lingkungan. Perubahan iklim meningkatkan risiko bencana hidrologi, sementara penegakan hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan celah bagi pelanggaran dan pencemaran.

Kabupaten Lima Puluh Kota secara menyeluruh menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan lingkungan. Ketidakmampuan pemerintah daerah untuk secara efektif mengelola limbah, melindungi lahan, dan menegakkan hukum lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem dan terhambatnya pembangunan. Partisipasi masyarakat yang rendah, baik dalam pengelolaan sampah semakin memperumit situasi. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,

penguatan kerangka regulasi, investasi dalam infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan koordinasi yang efektif antar semua pemangku kepentingan.

F. Urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil memegang peranan krusial dalam penyelenggaraan daerah dan pelayanan publik, termasuk di Kabupaten Lima Puluh Kota. Urusan ini bertanggung jawab untuk memberikan identitas resmi kepada setiap penduduk dan mencatat peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan mereka, seperti kelahiran hingga kematian. Fokus utamanya adalah memastikan setiap penduduk memiliki dokumen kependudukan yang sah dan akurat, seperti KTP, KK, Akta Kelahiran, dan Akta Kematian.

Penyelenggaraan urusan ini terus berkembang di Kabupaten Lima Puluh Kota, terutama dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti SmartDuk Capil. Data kependudukan yang akurat sangat penting untuk perencanaan pembangunan di berbagai sektor dan penyelenggaraan Pemilihan Umum serta penegakan hukum. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat dalam urusan ini. Keterbatasan infrastruktur, teknologi, dan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola menjadi kendala. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan juga menjadi permasalahan yang perlu diatasi.

G. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Daerah-daerah terjauh menghadapi serangkaian permasalahan yang menghambat pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Keterbatasan Sumber Daya dan Manusia menjadi kendala utama, menghambat pengembangan ekonomi lokal. Keterbatasan Infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, juga memperparah kondisi ini, meskipun ada peningkatan di beberapa daerah. Selain itu, Keterbatasan Anggaran dan Pendanaan, dengan ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, memperlambat percepatan pembangunan daerah. Lembaga kemasyarakatan pun terdampak, dengan keterbatasan sumber daya, infrastruktur pendukung, dan akses informasi yang menghambat pengembangan program dan layanan yang efektif. Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan ini menciptakan lingkaran tantangan yang kompleks dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan daerah.

H. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai permasalahan mendasar. Di daerah pedesaan, tingginya angka usia pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan pada remaja menjadi isu krusial, yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan serta lemahnya ekonomi masyarakat. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam menggunakan Alat Kontrasepsi (Alkon) masih kurang. Koordinasi pelaksanaan tugas antara berbagai tingkatan pemerintahan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) belum optimal karena belum samanya persepsi dalam pelaksanaan urusan PPPKB. Permasalahan ini berkontribusi pada rendahnya capaian indeks kebahagiaan dan ketentraman keluarga, yang dipengaruhi oleh minimnya interaksi antar anggota keluarga, pola pengasuhan yang kurang baik, terbatasnya waktu rekreasi keluarga, serta kurangnya kepemilikan dokumen kependudukan yang sah.

Lebih lanjut, pemahaman masyarakat tentang pembangunan kependudukan masih rendah, diperparah oleh terbatasnya analisa dan kajian yang mendalam tentang isu-isu kependudukan. Hal ini mengakibatkan pembangunan kurang berorientasi pada kebutuhan penduduk. Minat dan akses masyarakat terhadap alat atau obat kontrasepsi juga terbatas, disebabkan oleh kekhawatiran akan efek samping, kurangnya informasi yang memadai, penolakan dari keluarga, pertimbangan agama, masalah kesehatan, serta keterbatasan akses layanan. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka kehamilan yang tidak direncanakan (KTD) akibat kurangnya kesadaran pasangan usia subur tentang risiko KTD dan manfaat kontrasepsi. Pernikahan dini juga menjadi masalah serius, terutama di daerah pedesaan, yang meningkatkan risiko kehamilan tidak direncanakan dan stunting pada anak.

I. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

Salah satu faktor utama yang menghambat optimalisasi urusan pemerintahan bidang Perhubungan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah rendahnya wawasan, pemahaman serta kesadaran masyarakat terhadap keselamatan berlalu lintas, angkutan penumpang dan angkutan

barang yang tidak sesuai dengan ketentuan uji layak jalan, Umur kendaraan yang lebih dari 15 tahun Fasilitas perlengkapan jalan yang belum memadai diantaranya Penerangan Jalan Umum, rambu-rambu perilaku pengendara kendaraan bermotor yang tidak mematuhi peraturan dalam berlalu lintas. Belum tersedianya fasilitas parkir yang memadai sehingga masih adanya parkir pada badan jalan yang menyebabkan menurunnya kapasitas jalan sehingga menyebabkan kemacetan pada pusat-pusat kegiatan Belum tersedianya sarana dan Prasarana angkutan umum/Angkutan Umum Massal yang memadai seperti angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan dan Terminal yang teintegrasi dan terpadu dalam kabupaten menyebabkan tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi.

J. Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika

Urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah kendala dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan TIK menjadi tantangan utama, mengingat mahalnya biaya pengadaan sarana dan prasarana. Selain itu, implementasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum berjalan optimal. Beberapa Perangkat Daerah (PD) masih kurang memahami atau enggan mematuhi ketentuan yang ada. Transformasi digital dalam pelayanan publik juga belum sepenuhnya terwujud. Belum semua layanan publik diselenggarakan secara daring dan terintegrasi, sehingga masyarakat masih harus berurusan secara manual untuk beberapa layanan.

Kabupaten Lima Puluh Kota masih terdapat wilayah blankspot atau minim infrastruktur hotspot, yang menyulitkan masyarakat di daerah tersebut untuk mengakses informasi dan layanan digital. Perbedaan generasi juga menjadi faktor penghambat, di mana tidak semua kelompok masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Kesenjangan ini menciptakan tantangan dalam menyosialisasikan dan memanfaatkan layanan berbasis teknologi secara merata. Pengelolaan TIK di Kabupaten Lima Puluh Kota terkendala oleh terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten di bidang teknologi informasi. Kekurangan tenaga ahli ini dapat menghambat pengembangan, pemeliharaan, dan keamanan sistem informasi pemerintah.

K. Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat perkembangannya. Permasalahan akses internet yang belum merata dan rendahnya kemampuan anggota koperasi dalam memanfaatkan teknologi informasi menjadi kendala signifikan di era digital ini. Keterbatasan ini menghambat adopsi sistem informasi modern dalam pengelolaan koperasi dan pemasaran produk UKM. Lebih lanjut, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola koperasi yang masih terbatas, terutama dari segi pengetahuan dan keterampilan manajerial, turut menjadi penghambat dalam pengembangan koperasi yang profesional dan berdaya saing.

Pengembangan koperasi dan UKM di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan usaha. Kekurangan ini dapat menghambat efisiensi produksi dan kualitas produk yang dihasilkan. Di sisi lain, inovasi produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UKM masih terbatas, sehingga produk-produk tersebut belum mampu bersaing secara efektif di pasar yang semakin kompetitif. Akses koperasi dan UKM terhadap pasar dan permodalan juga menjadi permasalahan krusial. Terbatasnya jaringan pemasaran dan kesulitan dalam mendapatkan sumber pembiayaan yang terjangkau menghambat pertumbuhan dan ekspansi usaha.

Sebaran UKM yang cukup luas di seluruh wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjangkau dan memantau keseluruhan unit usaha secara efektif. Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur pendukung menyulitkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan yang merata. Selain itu, belum adanya sanksi yang tegas bagi koperasi yang tidak mengurus izin usaha menunjukkan lemahnya penegakan hukum dan pengawasan terhadap legalitas operasional koperasi. Hal ini berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam persaingan usaha dan menghambat upaya pemerintah dalam menata dan memberdayakan sektor koperasi secara keseluruhan.

Permasalahan lain yang menghambat kemajuan koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah kurangnya pemahaman SDM koperasi mengenai kelengkapan kelembagaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat berimplikasi pada tata kelola koperasi yang kurang baik dan rentan terhadap permasalahan hukum. Lebih lanjut, kurangnya minat pengurus koperasi untuk mengikuti pelatihan dan meningkatkan kapasitas diri menghambat transfer pengetahuan dan adopsi praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan koperasi. Pada akhirnya, rendahnya nilai tambah dan daya saing produk-produk UKM, diperparah dengan terbatasnya fasilitas sertifikasi halal dan merek secara gratis, menjadi kendala utama dalam menembus pasar yang lebih luas dan meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi serta pelaku UKM.

L. Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal

Urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi sejumlah kendala signifikan yang menghambat pertumbuhan investasi. Ketersediaan data yang tidak lengkap terkait potensi dan realisasi investasi menjadi hambatan awal dalam merumuskan strategi dan menarik minat investor. Ketidakpastian regulasi dan aturan yang mengatur investasi, terutama dengan adanya transisi akibat Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya terkait OSS, menciptakan kebingungan dan menunda proses pelaksanaan investasi. Lebih lanjut, status kepemilikan lahan yang didominasi oleh sistem kaum dan tanah ulayat seringkali dianggap sebagai sumber ketidakpastian hukum bagi investor, menghambat proses pembebasan lahan dan realisasi proyek investasi.

Proses perizinan juga masih menyisakan sejumlah tantangan. Meskipun sistem Online Single Submission (OSS) telah diterapkan, masih terdapat beberapa perizinan dan non-perizinan yang diproses secara manual di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Selain itu, jangka waktu pelayanan PTSP yang terkadang melampaui standar yang ditetapkan, belum seluruhnya jenis perizinan dipetakan, dan adanya jenis perizinan yang belum dapat dilaksanakan karena menunggu regulasi dari kementerian/lembaga terkait, menunjukkan inefisiensi dalam sistem perizinan. Rendahnya pemahaman pelaku usaha dan masyarakat terhadap perizinan elektronik atau berbasis web juga menjadi kendala dalam implementasi sistem OSS secara efektif. Keterbatasan jumlah aparatur penyelenggara perizinan turut memperlambat proses pelayanan.

Permasalahan tata ruang atau Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi penghalang serius bagi realisasi investasi. Ketidakesesuaian antara rencana investasi dengan tata ruang yang berlaku menyebabkan banyak investor mengurungkan niatnya. Sistem OSS yang masih dalam tahap pengembangan dan penyempurnaan juga menimbulkan kendala teknis dalam pelaksanaan perizinan di daerah. Perubahan sistem pelaporan investasi ke OSS-RBA juga menjadi tantangan baru, di mana banyak perusahaan belum memahami mekanisme pelaporan yang baru, diperparah dengan keterbatasan SDM perusahaan dan OPD di kabupaten/kota dalam memahami dan memverifikasi laporan.

Faktor penghambat signifikan lainnya adalah minimnya investasi baru yang tumbuh dan tersendatnya proyek-proyek strategis. Tidak adanya investasi baru yang signifikan selama tahun 2022 dan selesainya proyek-proyek sebelumnya pada tahun 2021 mengindikasikan perlambatan pertumbuhan investasi. Terhambatnya progres proyek jalan tol yang tidak sesuai dengan perencanaan investasi menjadi perhatian serius, mengingat infrastruktur ini merupakan salah satu daya tarik utama bagi investor. Selain itu, permasalahan RTRW yang belum mengakomodir potensi investasi secara optimal semakin memperburuk iklim investasi. Belum adanya data calon investor baru yang serius juga menjadi indikasi kurangnya upaya proaktif dalam menarik investasi.

M. Urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga

Partisipasi aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan di Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi kendala besar. Keinginan dan daya tarik generasi muda untuk terlibat dalam wadah organisasi masih minim. Situasi ini diperburuk oleh langkanya program pelatihan, pengembangan kemampuan, dan pendidikan tentang esensi organisasi yang dapat diakses oleh pemuda, terutama akibat keterbatasan sumber daya keuangan pemerintah daerah. Lebih lanjut, pengelolaan organisasi kepemudaan yang belum solid serta kurangnya dukungan dana untuk menjalankan operasional dan berbagai aktivitas organisasi menjadi penghalang dalam upaya menarik dan mempertahankan keterlibatan pemuda secara berkelanjutan.

Faktor penghambat lainnya adalah masih minimnya minat pemuda untuk menjadi entrepreneur atau wirausahawan, dengan kecenderungan yang lebih kuat untuk berorientasi menjadi pegawai atau pekerja. Kurangnya dorongan dan fasilitasi kewirausahaan di kalangan pemuda menghambat potensi pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Di era digital ini, semakin banyaknya media sosial dan sumber informasi lainnya tanpa adanya pembatasan yang efektif terhadap arus informasi, baik yang positif maupun negatif (*hoax*), berpotensi menyebabkan pemuda salah langkah dalam mengambil tindakan, seperti terjerumus dalam investasi bodong, perjudian online, pinjaman online, hingga prostitusi online.

Sebagian besar pemuda di Kabupaten Lima Puluh Kota juga masih menghadapi kendala dalam kesiapan kerja dan memasuki dunia kerja. Minimnya pengalaman praktis, kurangnya penguasaan kemampuan teknis, kesulitan dalam memvisualisasikan usaha, serta keterbatasan dalam mengkoordinasikan dan mengelola sumber daya yang ada menjadi hambatan bagi mereka untuk bersaing di pasar tenaga kerja. Di bidang olahraga, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung olahraga yang representatif menjadi kendala dalam meningkatkan prestasi atlet. Keterbatasan anggaran daerah juga mengakibatkan banyak kejuaraan atau event olahraga sebagai ajang evaluasi perkembangan olahraga tidak dapat terselenggara secara rutin.

Pengembangan prestasi olahraga di Kabupaten Lima Puluh Kota juga terhambat oleh minimnya uji coba atlet ke tingkat internasional dan nasional. Tidak adanya kompetisi yang memadai sebagai ajang uji coba sebelum mengikuti kompetisi utama serta tidak terpusatnya pelatihan atlet sejak awal menjadi kendala dalam mencapai performa maksimal. Selain itu, kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran masih kurang. Tingginya pengaruh telepon genggam (HP) dalam kehidupan masyarakat juga mengubah pola hidup menjadi kurang aktif bergerak. Terakhir, partisipasi aktif pemuda dalam kegiatan kepramukaan setelah tamat sekolah juga menurun karena kesibukan perkuliahan, pindah ke luar kota, atau berwirausaha.

N. Urusan pemerintahan bidang Statistik

Penguatan sistem statistik yang handal di Kabupaten Lima Puluh Kota terkendala oleh beberapa faktor mendasar. Salah satunya adalah terbatasnya jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan posisi Jabatan Fungsional Statistisi yang memiliki keahlian dan pendidikan yang relevan. Kekurangan personel yang kompeten ini menghambat upaya maksimalisasi proses pengumpulan, pemrosesan, analisis, serta penyebarluasan data yang bermutu tinggi. Di samping itu, tanggung jawab dan pelaksanaan fungsi pengelolaan data belum secara merata diemban oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat Kabupaten. Kondisi ini mengakibatkan adanya sekat-sekat dalam pengumpulan data dan mempersulit terwujudnya data yang menyeluruh dan terpadu di seluruh jajaran organisasi pemerintah.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat Kabupaten Lima Puluh Kota melibatkan berbagai pihak dan memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh elemen pemerintahan. Kompleksitas koordinasi antar Perangkat Daerah, instansi vertikal, dan pihak terkait lainnya menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan integrasi data yang efektif. Perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ritme kerja antar pihak dapat memperlambat implementasi SDI secara menyeluruh. Lebih lanjut, penyelenggaraan SDI belum sepenuhnya menjadi prioritas utama dalam agenda pelaksanaan pembangunan di beberapa sektor. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa urusan statistik bukan merupakan pekerjaan yang secara langsung terlihat dampaknya atau dianggap kurang menarik dibandingkan dengan program-program pembangunan fisik atau layanan publik lainnya. Kurangnya pemahaman akan pentingnya data yang akurat sebagai landasan pengambilan kebijakan yang efektif menghambat alokasi sumber daya dan perhatian yang memadai terhadap penguatan sistem statistik daerah

O. Urusan pemerintahan bidang Persandian

Kabupaten Lima Puluh Kota saat ini menghadapi tantangan serius dalam hal persandian dan keamanan informasi. Permasalahan ini bersifat multidimensi, mencakup aspek regulasi, sumber daya manusia, infrastruktur, serta manajemen risiko informasi yang belum tertata secara optimal. Regulasi yang ada belum cukup kompleks dan belum maksimal dalam mengatur pengamanan informasi di tingkat daerah, sehingga memberikan ruang yang cukup besar bagi celah-celah keamanan. Di sisi lain, perangkat daerah dan aparatur sipil negara belum maksimal

dalam menjalankan fungsi pengamanan informasi karena minimnya pemahaman terhadap prinsip dan praktik persandian serta keamanan informasi. Hal ini diperparah dengan rendahnya tingkat edukasi dan diseminasi informasi tentang pentingnya pengamanan informasi, yang menyebabkan kebijakan atau instruksi yang ada belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan oleh aparaturnya di lapangan.

Permasalahan lainnya muncul dari aspek tata kelola dan manajemen risiko. Pengelolaan keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah belum menyentuh aspek strategis seperti kerangka kerja keamanan informasi dan mitigasi risiko secara menyeluruh. Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana teknis, termasuk perangkat pendukung untuk keamanan data serta infrastruktur statistik, juga menjadi kendala dalam penerapan pengamanan data yang andal, yang tak kalah penting adalah belum dimilikinya *Security Operation Center (SOC)*, yang berfungsi sebagai pusat layanan keamanan siber secara terpusat. Ketiadaan SOC ini menyebabkan pemerintah daerah belum memiliki sistem yang tanggap dan terintegrasi dalam memantau serta merespons insiden keamanan siber, terutama yang berkaitan dengan perlindungan server dan data pemerintahan.

Secara keseluruhan, tantangan persandian di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan kebutuhan akan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur pendukung, serta pembentukan pusat kendali keamanan siber. Tanpa adanya intervensi strategis, kondisi ini berpotensi menghambat kelancaran administrasi pemerintahan dan mengancam kerahasiaan serta integritas informasi milik daerah

P. Urusan pemerintahan bidang Kebudayaan

Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai luak nan tigo merupakan daerah yang kaya akan warisan budaya Minangkabau, menghadapi tantangan besar dalam melaksanakan urusan wajib kebudayaan secara optimal. Salah satu tantangan mendasar adalah keterbatasan jumlah dan rendahnya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang kebudayaan. Kondisi ini berdampak langsung pada kurang maksimalnya pelaksanaan fungsi perlindungan, pengembangan, pembinaan, dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan. Dari sisi sarana dan prasarana, masih banyak kekurangan yang menghambat upaya pelestarian budaya, mulai dari terbatasnya fasilitas pendukung hingga minimnya ruang publik untuk ekspresi budaya dan seni. Selain itu, keterbatasan data dan informasi mengenai objek kebudayaan juga menghambat proses perencanaan dan pengambilan kebijakan yang berbasis bukti.

Di sisi ekonomi, kebudayaan yang ada belum sepenuhnya mendukung sektor ekonomi kreatif. Belum ada keterpaduan dan keberlanjutan program yang menjadikan warisan budaya sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Akibatnya, potensi budaya belum tergarap maksimal sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Masih banyaknya objek kebudayaan yang belum terkelola dengan baik menunjukkan lemahnya tata kelola dan kurangnya komitmen dalam memanfaatkan kebudayaan sebagai aset strategis pembangunan. Penyelenggaraan urusan kebudayaan juga belum terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, sehingga sering kali terpinggirkan dari prioritas pembangunan utama.

Tantangan lainnya adalah minimnya minat dan apresiasi generasi muda terhadap budaya lokal. Perkembangan teknologi dan arus informasi global membuat generasi muda cenderung lebih akrab dengan budaya luar, sehingga ketertarikan untuk mempelajari dan melestarikan budaya sendiri menjadi rendah. Secara keseluruhan, permasalahan urusan kebudayaan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan perlunya upaya serius dan terarah, termasuk peningkatan kapasitas SDM, penyediaan infrastruktur budaya, pemutakhiran data budaya, penguatan partisipasi masyarakat, integrasi kebudayaan dalam pembangunan ekonomi, dan edukasi budaya untuk generasi muda. Tanpa penanganan strategis, warisan budaya Minangkabau terancam mengalami degradasi nilai dan kehilangan relevansi di tengah perubahan zaman

Q. Urusan pemerintahan bidang Perpustakaan

Dalam upaya meningkatkan literasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat, Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi berbagai tantangan signifikan dalam penyelenggaraan urusan wajib perpustakaan. Salah satu tantangan utama adalah menurunnya

minat masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan, yang disebabkan oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi. Akses informasi kini dapat diperoleh secara mudah melalui internet tanpa harus secara fisik datang ke perpustakaan, sehingga keberadaan perpustakaan mulai kehilangan daya tarik utamanya di mata masyarakat, terutama generasi muda. Di samping itu, ketersediaan koleksi buku-buku bacaan yang terbatas dan kurang beragam menjadi kendala lain yang memperburuk daya saing perpustakaan sebagai pusat referensi dan sumber ilmu.

Keterbatasan tenaga pustakawan yang bersertifikasi dan profesional juga menjadi permasalahan mendasar. Masih banyak perpustakaan yang dikelola oleh tenaga non-profesional, sehingga manajemen, pelayanan, dan pengembangan perpustakaan belum berjalan secara optimal dan sesuai standar. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan perlunya strategi peningkatan kapasitas kelembagaan perpustakaan, penyediaan SDM profesional, peningkatan kualitas dan kuantitas koleksi, serta transformasi digital layanan perpustakaan agar mampu bersaing dan relevan dengan kebutuhan zaman. Tanpa pembenahan menyeluruh, perpustakaan berisiko semakin terpinggirkan dari peran strategisnya dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat.

R. Urusan pemerintahan bidang Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan dan berdampak langsung terhadap tertib administrasi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu persoalan mendasar adalah belum optimalnya pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip oleh perangkat daerah (PD) sebagai pencipta arsip. Banyak PD belum melaksanakan pengelolaan arsip secara menyeluruh, sehingga arsip yang seharusnya menjadi bukti dan indikator kinerja kelembagaan tidak terdokumentasi dengan baik dan belum sepenuhnya tercatat atau terkelola secara sistematis. Lebih lanjut, minimnya pembinaan langsung dalam bentuk pendampingan teknis kepada PD, termasuk dalam hal penyediaan ruang arsip yang layak serta klinik arsip sebagai sarana konsultasi dan pembelajaran, menyebabkan rendahnya kualitas pengelolaan arsip di tingkat perangkat daerah. Hal ini semakin diperparah dengan belum adanya pemahaman dan keterampilan memadai mengenai tata kelola arsip sesuai dengan kaidah dan peraturan kearsipan yang berlaku.

Permasalahan lain yang cukup krusial adalah rendahnya kesadaran PD dalam melaksanakan kegiatan penyusutan arsip, yang mencakup pemindahan, pemusnahan, dan penyerahan arsip statis kepada lembaga kearsipan sesuai Jadwal Retensi Arsip (JRA). Kondisi ini menyebabkan penumpukan arsip yang tidak berguna dan menghambat pengelolaan arsip yang efisien dan efektif. Secara keseluruhan, permasalahan kearsipan di Kabupaten Lima Puluh Kota mencerminkan perlunya peningkatan kapasitas kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, serta penguatan komitmen seluruh PD untuk menjadikan arsip sebagai instrumen strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

2.6.2.3 Urusan Pilihan

A. Urusan pemerintahan Bidang Perikanan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki potensi perikanan yang sangat besar, dengan memiliki potensi dan sumber daya alam yang tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi. Terbatasnya anggaran untuk membeli bibit induk ikan unggul yang berkualitas dan pakan untuk program bantuan. Selain bibit dan bantuan di Kabupaten Lima Puluh Kota juga mengalami permasalahan terhadap air, dimana pada musim kemarau kolam-kolam menjadi kering dan dijadikan menjadi lahan perkebunan.

Kurangnya enterprenuership khususnya bidang perikanan karena kekurangan tertarik pelaku-pelaku pemula atau pelaku non perikanan untuk mulai berusaha di bidang perikanan juga perlu menjadi perhatian bersama. Terbatasnya sarana dan prasarana kolam sebagai tempat pendaratan hasil tangkapan ikan dan juga sebagai tempat pelelangan ikan nelayan juga perlu dibenahi oleh Pemerintah Daerah.

B. Urusan pemerintahan Bidang Pariwisata

Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana pra sarana dimiliki) sehingga belum memiliki pola perjalanan dengan berbagai pilihan seperti wisata budaya, wisata belanja, wisata alam, wisata minat khusus, wisata edukasi, agro dan ekowisata. Masih terbatasnya

kerjasama antar instansi, stakeholder dan masyarakat sekitar dalam mendukung pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DTW) unggulan yang dapat mendongkakan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Lima Puluh Kota. Koordinasi Lintas Sektoral (Lembaga) belum berjalan maksimal, hal ini sangat penting mengingat Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait: (pemerintah: instansi pariwisata dan ekonomi kreatif, instansi pekerjaan umum, instansi perhubungan, instansi pertanian, instansi perindustrian perdagangan); (2) swasta; (3) BUMN/BUMD; (4) masyarakat di objek wisata.

Belum optimalnya pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang ada untuk kenyamanan para pengunjung, begitu juga dengan peranan dari Kelompok Sadar wisata juga belum maksimal. Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif dalam pengembangan dan mempromosikan kegiatan pariwisata didaerahnya, sehingga informasi daerah tujuan wisata belum tersampaikan secara maksimal. Permasalahan lain yang sangat mempengaruhi kunjungan wisatawan adalah kurangnya keramahan masyarakat dalam melayani wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata sehingga mengurangi minat wisatawan dan memberikan image yang buruk terhadap promosi pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota.

C. Urusan pemerintahan bidang Pertanian

Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian antara lain belum optimalnya peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, masih terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian seperti pembangunan kawasan perumahan dan industri. Lahan persawahan yang sebelumnya produktif beralih menjadi perumahan sehingga mengakibatkan berkurangnya lahan di area tanam dan menurunnya produksi pangan. Selanjutnya masalah ketersediaan pupuk masih belum memenuhi prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, mutu, lokasi, waktu, dan harga yang disebabkan alokasi pupuk bersubsidi belum sesuai dengan kebutuhan petani yang tertuang dalam RDKK.

Pemanfaatan teknologi pertanian oleh petani belum optimal, kemampuan petani untuk mengakses teknologi, informasi, dan permodalan masih rendah. Hal ini juga mempengaruhi pola, tenaga dan lamanya hasil panen yang dihasilkan. Belum optimalnya proses hilirisasi dan peningkatan nilai tambah bagi petani juga menjadi permasalahan jika terjadinya panen yang melimpah dan turunnya harga. Permasalahan lain yakni adanya bencana alam yang melanda kawasan tanaman pangan sehingga mengurangi pasokan produksi pertanian. Selanjutnya masalah serangan hama dan penyakit tanaman menjadi ancaman yang serius bagi petani seperti hama wereng pada padi dan penyakit busuk akar pada tanaman cabai, hama lalat buah sehingga menurunkan hasil panen.

Adanya penyakit ternak menular yang menyebabkan berkurangnya produksi ternak sehingga mempengaruhi jumlah penjualan dan peredaran daging di masyarakat pengguna. Terbatasnya ketersediaan data terkait dengan keluar masuknya daging yang beredar untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Kebutuhan daging saat ini yang cukup tinggi belum sepenuhnya terpenuhi oleh peternak sapi lokal. Selain itu kurangnya motivasi petani/pekebun untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan. Adanya perubahan minat petani terhadap komoditi yang di tanam seperti peralihan minat dari petani kakao ke komoditi pertanian lainnya.

D. Urusan pemerintahan bidang Perdagangan

Adanya keterbatasan infrastruktur menjadi salah satu hambatan terbesar dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, kurangnya pemahaman tentang dinamika pasar membuat banyak pelaku usaha lokal sulit dalam membangun kemitraan dagang yang menguntungkan sehingga memperburuk pengembangan sektor usaha. Tantangan besar dalam meningkatkan produk, yaitu kurangnya inovasi dan diversifikasi produk. Produk unggulan seperti kopi, gambir, tembakau dan hasil pertanian lainnya masih diproduksi dalam bentuk yang sama tanpa adanya perkembangan yang lebih baik.

Fluktuasi harga komoditas yang tajam sering mengalami ketidakstabilan harga, sehingga pengaruhnya terhadap daya saing produk di pasar. Sumber daya manusia yang terbatas juga menjadi salah satu hambatan utama, kurang terampilnya dalam mengelola proses produksi dalam memenuhi standar. Kurangnya pelatihan dan pendidikan untuk berkembang dengan maksimal,

kurangnya tenaga ahli di bidang riset dan pengembangan produk membuat tidak dapat berkembang secara maksimal. Salah satu permasalahan lainnya adalah proses perizinan dan regulasi yang rumit serta tidak konsisten menjadi penghambat dalam mendapatkan izin ekspor dan syarat yang tidak terpenuhi untuk memasuki pasar nasional maupun internasional. Hal ini menjadi penghambat bagi pelaku usaha di untuk mengoptimalkan potensi ekspor.

E. Urusan pemerintahan bidang Perindustrian

Kendala dan hambatan dalam pembangunan perindustrian sering menjadi masalah dalam pencapaian sasaran pembangunan industri di Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih perlu menjadi perhatian. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas yang belum memadai, masih ada beberapa perbaikan seperti pembangunan jalan dan jembatan. Lokasi industri yang berada didaerah yang jauh dari pusat distribusi sering mengalami kesulitan dalam akses pasar dan bahan baku sehingga memperlambat pencapaian sasaran. Industri yang baru berkembang kesulitan mendapatkan modal dari lembaga keuangan karena terbatasnya akses pembiayaan bagi industri kecil di Kabupaten Lima Puluh Kot. Tenaga kerja yang masih kurang menjadi penghambat, diperlukan tenaga kerja yang terampil di sektor industri yang memenuhi standar kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan.

F. Urusan pemerintahan bidang Transmigrasi

Kabupaten Lima Puluh Kota sampai saat ini tidak lagi menjadi daerah tujuan untuk proyek Perluasan Transmigrasi. Hal ini disebabkan karena adanya indikasi penyelewengan saat pengerjaan proyek Transmigrasi di Nagari Galugua ditahun 2010. Akibat dari permasalahan hukum tersebut Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lagi menjadi daerah tujuan Transmigrasi dan sampai saat ini lahan yang dulu dibuka untuk proyek tersebut di Nagari Galugua masih terbengkalai Program tidak bisa dijalankan dan kondisi ini juga menyebabkan tidak adanya dukungan maupun bantuan berupa dana dari pemerintah pusat untuk urusan transmigrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota

2.6.2.4 Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

A. Sekretariat Daerah

a) Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemerintahan Daerah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, Permasalahan administratif keterlambatan pemrosesan dokumen kerja sama akibat kelengkapan persyaratan yang masih kurang. Selain itu, belum adanya pemetaan kerja sama yang terstruktur menjadi kendala dalam penyusunan Memorandum of Understanding (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Dalam hal pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), perhatian terhadap aspek ini masih kurang dibandingkan dengan prioritas pembangunan lainnya. Kesulitan dalam menentukan target pencapaian SPM, terutama dalam bentuk prediksi dan proyeksi, semakin memperumit keadaan. Bahkan, banyak pemerintah kabupaten/kota yang belum sepenuhnya memprioritaskan pencapaian SPM dalam implementasi pembangunan daerah. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi oleh Bagian Tata Pemerintahan mencerminkan perlunya peningkatan dalam aspek perencanaan, administrasi, serta pemahaman regulasi guna memastikan efektivitas pelaksanaan tugas dan pencapaian target pembangunan daerah

b) Bagian Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kesejahteraan Rakyat, Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal koordinasi dan fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat. Pelaksanaan koordinasi antar instansi pemerintah maupun dengan lembaga non-pemerintah belum optimal akibat keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana pendukung, serta terbatasnya dukungan teknis dari PD terkait dan minimnya sumber daya manusia.

Selain itu, kapasitas dan kualitas SDM pengelola rumah ibadah masih sangat bervariasi, sehingga belum mampu menjamin pelayanan keagamaan yang merata dan optimal. Bagian Kesejahteraan juga menghadapi tantangan dalam pengelolaan rumah ibadah yang kapasitasnya belum seragam dan belum memenuhi standar layanan. Di sisi lain, banyak target pembangunan

dan peningkatan kualitas rumah ibadah yang telah difasilitasi namun tidak sebanding dengan besaran anggaran yang tersedia, sehingga belum semua kebutuhan dapat dipenuhi secara optimal.

c) Bagian Hukum

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugasnya, terutama dalam hal penyusunan dan fasilitasi produk hukum. Proses fasilitasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat juga memerlukan waktu yang cukup panjang, sehingga menunda penyelesaian sejumlah produk hukum. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya manusia (SDM) menjadi penghambat dalam pelaksanaan fasilitasi produk hukum dan legal drafting. Tidak hanya itu, keterbatasan anggaran akibat kebijakan refocusing menyebabkan Bagian Hukum tidak dapat memenuhi seluruh permintaan bantuan hukum yang diajukan oleh perangkat daerah. Permasalahan lainnya adalah masih belum optimalnya kualitas usulan produk hukum dari PD, baik dari sisi prosedur maupun dari aspek substansi atau materi muatan hukum. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas dan pembinaan dalam proses penyusunan produk hukum.

d) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas koordinasi dan pengendalian sektor perekonomian dan sumber daya alam. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya pelaksanaan koordinasi pengendalian inflasi daerah. Hal ini disebabkan oleh belum terjalannya sinergi yang baik antara pemerintah daerah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi, serta belum adanya pemetaan potensi produksi sumber pangan secara menyeluruh di Kabupaten Lima Puluh Kota. Kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan efektivitas penyertaan modal pemerintah daerah juga masih belum menunjukkan hasil yang maksimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari segi dividen maupun manfaat ekonomi lainnya.

e) Bagian Administrasi Pembangunan

Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota masih dihadapkan pada berbagai kendala dalam menjalankan tugas pengendalian dan monitoring pembangunan daerah. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman dari PD terkait proses penginputan capaian realisasi fisik dan keuangan ke dalam RFK (*excel*), yang berdampak pada keterlambatan data dan analisis capaian pembangunan. Proses pengumpulan data dari PD juga berjalan lambat karena keterbatasan kapasitas masing-masing PD dalam menyajikan data secara tepat waktu dan akurat, sehingga menghambat analisis yang komprehensif. Di sisi lain, belum tersedianya regulasi khusus yang mengatur secara teknis mengenai pengendalian administrasi pembangunan turut memperumit pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan.

Permasalahan lainnya mencakup lemahnya perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Kurangnya koordinasi antar pihak yang terlibat, terutama dalam pelaksanaan pekerjaan yang didanai oleh APBN, menjadi salah satu penyebab ketidakefisienan pelaksanaan kegiatan di lapangan. Terakhir, kualitas pengelolaan kegiatan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) juga masih terbatas, terutama dalam proyek konstruksi yang tidak dikerjakan oleh dinas teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Hal ini berdampak pada hasil pembangunan yang belum optimal baik dari sisi mutu maupun ketepatan waktu.

f) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, masih menghadapi beberapa tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan pengadaan di lingkungan pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah belum adanya kebijakan yang secara tegas mengatur kewajiban pemanfaatan proses e-pengadaan langsung. Ketidakjelasan regulasi ini mengakibatkan implementasi e-pengadaan belum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh unit kerja. Selain itu, jumlah sumber daya manusia yang tersedia masih belum memadai dibandingkan dengan beban kerja yang ada. Kurangnya SDM berdampak langsung terhadap kelancaran proses pengadaan dan kualitas pelayanan yang diberikan. Permasalahan lainnya

adalah tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) yang belum mencapai level optimal. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola, serta penguatan peran strategis UKPBJ sebagai pusat keunggulan pengadaan di tingkat daerah.

g) Bagian Umum

Bagian Umum Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi beberapa kendala dalam mendukung kelancaran operasional pemerintahan, khususnya dalam aspek pelayanan dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM). Salah satu permasalahan utama adalah terbatasnya kualitas sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan di lingkungan kantor Bupati, Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati, serta Sekretariat Daerah. Fasilitas yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu mendukung efektivitas pelayanan pemerintahan di tingkat daerah. Selain itu, intensitas aktivitas di Kantor Bupati yang semakin tinggi, baik dari kegiatan yang melibatkan perangkat daerah maupun masyarakat, belum diimbangi dengan ketersediaan SDM yang memadai. Hal ini menyebabkan beban kerja yang lebih besar bagi tenaga pelayanan, sehingga bisa berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya, kualitas SDM Pramuka Tamu di Kantor Bupati masih belum optimal dalam memberikan layanan kepada tamu-tamu pimpinan. Kurangnya pelatihan atau standar pelayanan yang efektif berpotensi memengaruhi citra serta profesionalisme layanan di lingkungan pemerintahan. Tak hanya itu, kendala lain yang dihadapi adalah terbatasnya SDM dalam proses pencairan keuangan, yang dapat menghambat efisiensi dalam pengelolaan anggaran serta pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang membutuhkan pendanaan tepat waktu. Secara keseluruhan, tantangan yang dihadapi Bagian Umum Kabupaten Lima Puluh Kota ini menuntut adanya peningkatan kualitas infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, serta perbaikan sistem manajemen agar pelayanan kepada pimpinan dan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

h) Bagian Organisasi

Permasalahan yang dihadapi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan penyederhanaan birokrasi masih cukup kompleks. Regulasi serta petunjuk teknis yang ada belum sepenuhnya jelas dan terpadu, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaannya, khususnya dalam penyederhanaan struktur organisasi perangkat daerah. Di samping itu, ketidakseimbangan antara beban kerja dengan ketersediaan anggaran turut menghambat pelaksanaan kegiatan, seperti perjalanan dinas dan verifikasi/pembahasan produk hukum terkait penataan kelembagaan. Kurangnya keterlibatan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dalam proses perumusan perencanaan kinerja juga menjadi kendala tersendiri. Selain itu, dokumen kinerja belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan, yang berimplikasi pada tidak optimalnya capaian kinerja.

Permasalahan lainnya adalah minimnya data dan informasi pendukung dari perangkat daerah dalam menunjang indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini menyebabkan analisis yang dilakukan menjadi kurang akurat dan tidak menyeluruh. Di sisi lain, masih terdapat keterbatasan pemahaman di kalangan ASN terhadap urgensi manajemen perubahan sebagai bagian dari peningkatan nilai Reformasi Birokrasi. Masih banyak Unit Kerja Pelayanan Publik (UKPP) yang belum mengoptimalkan teknologi digital dalam pelayanan, sehingga proses pelayanan menjadi kurang efisien. Beberapa perangkat daerah juga belum melaksanakan review SOP dan penyusunan Peta Proses Bisnis secara menyeluruh. Di tingkat kabupaten/kota, banyak usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang belum memenuhi persyaratan standar SOP, sehingga usulan tersebut belum dapat diproses lebih lanjut.

i) Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota masih menghadapi sejumlah kendala dalam penyelenggaraan layanan keprotokolan dan dukungan administrasi kepada pimpinan daerah. Salah satu permasalahan utama adalah masih kurangnya SDM yang profesional dalam memberikan layanan keprotokolan, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini berdampak pada belum maksimalnya layanan dan koordinasi, baik secara internal maupun dengan stakeholder eksternal. Selain itu, keterbatasan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tidak sebanding dengan banyaknya jumlah tamu pimpinan yang harus dilayani. Hal ini mengakibatkan pelayanan kepada tamu belum dapat dilakukan secara optimal.

Sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan pimpinan, khususnya dalam hal pendokumentasian kegiatan, juga masih belum memadai, sehingga menghambat kelancaran tugas-tugas dokumentatif dan administratif. Permasalahan lain yang dihadapi adalah penyusunan perencanaan dan penganggaran di lingkup Sekretariat Daerah yang masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing bagian. Kurangnya integrasi antar bagian mengakibatkan tidak sinkronnya program kerja dan penggunaan anggaran, yang berujung pada kurang efektifnya pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh.

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan unsur sekretariat DPRD adalah belum optimalnya pelayanan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini pelayanan untuk anggota DPRD dan masyarakat. Pelayanan terhadap anggota DPRD yang belum optimal terutama mencakup ketepatan dan kecepatan dalam penyiapan rapat-rapat, seperti rapat internal komisi, rapat lainnya (selain persidangan), penyampaian masukan aspirasi dari Perangkat Daerah kepada anggota DPRD serta belum optimalnya pelayanan staf terhadap penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan. Hal ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD untuk mewujudkan Sekretariat DPRD sebagai institusi yang kapabel di bidangnya, rendahnya tingkat kedisiplinan ASN Sekretariat DPRD dalam pelaksanaan pekerjaan, serta belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana terutama sarana teknologi informasi yang tersedia, sehingga penyampaian aspirasi kepada anggota DPRD sering terlambat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain yaitu belum optimalnya kualitas dan kuantitas koordinasi, integrasi, fasilitasi dan sinkronisasi tugas serta fungsi DPRD dengan lembaga pemerintah daerah dan lembaga sosial kemasyarakatan termasuk LSM. Dalam hal ini, Sekretariat DPRD sebagai jembatan yang menghubungkan anggota DPRD dengan lembaga pemerintah daerah termasuk Perangkat Daerah serta lembaga sosial kemasyarakatan harus lebih cepat tanggap sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang menghambat kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD terutama dalam mengimplementasikan pokok-pokok pikiran DPRD

2.6.2.5 Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

A. Unsur Perencanaan

Permasalahan utama dari unsur perencanaan adalah masih perlunya mendorong kinerja perencanaan pembangunan daerah agar lebih berkualitas sehingga target pembangunan daerah yang diukur melalui ketercapaian IKU dan IKD dalam dokumen perencanaan tercapai dengan maksimal. Permasalahan kualitas perencanaan pembangunan daerah bisa dilihat dari 3 aspek yaitu aspek tahapan perencanaan, aspek kualitas dokumen perencanaan serta aspek pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Saat ini proses tahapan perencanaan belum berjalan dengan maksimal. Salah satu hal yang mempengaruhi proses tahapan perencanaan adalah partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan masih rendah sehingga menyebabkan persentase rencana kerja pembangunan yang seharusnya mengakomodir masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan berkurang, hal ini menyebabkan kualitas perencanaan pembangunan daerah tidak maksimal dan kurang tepat sasaran.

Dari segi aspek kualitas dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang, menengah, maupun tahunan, rendahnya kualitas dokumen dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya:

- keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan atau isu strategis Pembangunan masih rendah sehingga prioritas pembangunan yang didanai tidak tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan daerah.
- Penjenjangan indikator tujuan dan sasaran belum tepat dan belum sepenuhnya dapat mengukur kinerja pembangunan.
- Dokumen perencanaan belum disusun berdasarkan hasil evaluasi capaian dan permasalahan daerah pada tahun sebelumnya.
- Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam dokumen perencanaan dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) masih belum maksimal.

- Evaluasi terhadap kinerja capaian pembangunan masih belum menjadi dasar penyusunan arah kebijakan tahun selanjutnya.
- Keterkaitan output dan outcome inovasi dengan permasalahan pembangunan dalam dokumen perencanaan belum tergambar dengan jelas.
- Terbatasnya SDM terutama Fungsional Perencana yang mampu untuk berkontribusi dalam melakukan Analisa capaian serta arah kebijakan Pembangunan Daerah.

Sebagaimana diketahui, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah merupakan alat utama untuk memastikan bahwa proses pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dari pengendalian dan evaluasi didapatkan umpan balik untuk perbaikan program dan arah kebijakan disetiap periode pembangunan yang dilakukan. Saat ini proses pengendalian dan evaluasi masih belum terlaksana dengan maksimal sehingga target pembangunan yang telah direncanakan banyak yang belum tercapai. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal yaitu :

- Pengendalian dan evaluasi terhadap terhadap capaian indikator kinerja daerah belum sepenuhnya dilakukan;
- Minimnya data dan informasi dari Perangkat Daerah terutama dalam penyusunan faktor pendorong dan penghambat sebagai bahan Analisis data capaian kinerja pembangunan daerah;
- hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat perangkat daerah untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya belum dimanfaatkan dengan optimal;
- Keterbatasan sumber daya yang kompeten dalam perencanaan dan evaluasi sehingga hasil analisis terhadap capaian kinerja daerah tidak maksimal;
- Minimnya partisipasi publik dan stakeholder terkait dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, sehingga perspektif terhadap keberhasilan dan kegagalan program pembangunan berikut permasalahan-permasalahan mendasar yang terjadi dimasyarakat sangat sedikit diketahui;
- Kurang optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengendalian dan evaluasi.

Disamping ketiga aspek diatas (Proses Perencanaan, Kualitas Dokumen Perencanaan serta pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah), mandatory spending yang mempengaruhi kebijakan belanja daerah menjadi terbatas dan sempit serta dinamika kebijakan pemerintah pusat juga mempengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah. Dalam hal ini sangat dibutuhkan sekali peningkatan kapasitas perencana daerah agar mampu menganalisis kebutuhan pembangunan daerah dan mampu merancang perencanaan pembangunan yang adaptif, inovatif dan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

B. Unsur Keuangan

Dalam menjalankan fungsi penunjang urusan keuangan tidak terlepas dari ketercapaian kinerja pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi penganggaran, penatausahaan dan pelaporan keuangan daerah serta pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota. Pajak daerah menjadi kontributor terbesar pendapatan asli daerah, terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Air Permukaan (PAP). Kepatuhan wajib pajak dan mengurangi jumlah kendaraan yang belum daftar ulang perlu diupayakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.

Perubahan kebijakan ekonomi nasional, seperti insentif pajak dan perubahan regulasi fiskal, dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Oleh karena itu, diperlukan strategi adaptasi yang fleksibel untuk menjaga stabilitas pendapatan. Kurangnya Inovasi dalam sumber pendapatan baru menjadi permasalahan bagi daerah karena masih mengandalkan sumber pendapatan tradisional, padahal ada peluang dari ekonomi kreatif, digitalisasi, dan sektor jasa yang bisa digarap lebih jauh.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang belum optimal merupakan permasalahan yang dihadapi. Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya penggunaan sistem informasi baik dalam pengelolaan keuangan maupun aset daerah. Kurangnya kualitas sumber daya pengelola keuangan

dan barang daerah di seluruh PD menyebabkan banyak terjadi kesalahan/kekeliruan baik dalam penyusunan, penatausahaan maupun pelaporan baik keuangan maupun barang milik daerah. Perubahan regulasi dari pemerintah pusat sangat berpengaruh terhadap perumusan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hal ini menuntut BPKPD harus bisa berakselerasi untuk segera melakukan penyesuaian dokumen pengelolaan keuangan dan aset daerah. Pengamanan dan pemanfaatan aset belum optimal, karena belum tertibnya bukti kepemilikan tanah milik pemerintah daerah, belum ditetapkannya batok dan batas tanah milik pemerintah provinsi serta kasus tanah negara yang dikuasai pihak lain. Pemanfaatan aset perlu dioptimalkan dengan pemetaan dan penilaian terhadap aset-aset yang berpotensi mendatangkan pendapatan.

C. Unsur Kepegawaian

Fungsi penunjang urusan kepegawaian dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota dengan komitmen untuk melaksanakan perubahan paradigma pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur di bidang kepegawaian yang difokuskan pada aspek percepatan reformasi birokrasi sehingga nantinya akan terlaksana pengelolaan administrasi kepegawaian yang efektif dan efisien, dan terwujudnya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten, berkinerja tinggi dan profesional dalam melaksanakan tupoksinya serta dapat memberikan ide-ide kreatif dan inovatif. Kualitas sumber daya manusia (ASN) yang belum merata, terutama dalam hal kompetensi teknis menjadi permasalahan untuk terwujudnya ASN yang kompeten. Belum semua ASN memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan sebagai jaminan profesionalisme ASN. Kompetensi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi jabatan yang diduduki dan tidak terdayagunakan secara optimal.

Sistem rekrutmen, mutasi dan promosi ASN belum sepenuhnya berbasis sistem merit. Belum optimalnya meritokrasi terutama dipengaruhi oleh distribusi ASN yang belum sesuai kebutuhan dan kompetensi. Masih terdapatnya penempatan ASN yang kompetensinya tidak sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diduduki. Transformasi digital yang paripurna juga diperlukan dalam pengelolaan manajemen SDM aparatur sehingga layanan kepegawaian menjadi lebih cepat dan terintegrasi. Perlunya penguatan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja ASN dengan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas ASN sesuai jabatan yang diduduki serta mengoptimalkan pengelolaan kesejahteraan dan perlindungan ASN.

D. Unsur Pendidikan Dan Pelatihan

Permasalahan utama dalam unsur pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah belum optimalnya kompetensi ASN Kabupaten Lima Puluh Kota yang ditandai dengan belum terpenuhinya hak pengembangan kompetensi ASN dan belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten. Sebagaimana diketahui, pengembangan kompetensi merupakan hak dan kewajiban bagi ASN yang harus dipenuhi agar kualitas pelayanan publik dan profesionalisme birokrasi dapat berjalan, namun hal tersebut masih terkendala disebabkan beberapa hal yaitu masih adanya pimpinan organisasi yang tidak komitmen memberikan dorongan kepada bawahannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan; kurangnya perencanaan pengembangan kompetensi SDM pada organisasi; Pelatihan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tidak sebanding dengan jumlah ASN yang ada, sehingga banyak ASN yang tidak dapat mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan; serta sulitnya untuk mendapatkan data pengembangan kompetensi dari beberapa perangkat daerah akibat kurangnya kepedulian perangkat daerah dan belum pahamnya perangkat daerah bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan pencapaian IP ASN yang juga akan berimbas pada reformasi birokrasi.

Permasalahan yang juga menjadi perhatian adalah belum terpenuhinya ASN yang berpredikat kompeten di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya masih kurangnya program pengembangan kompetensi berkelanjutan, seperti coaching, mentoring, dan pelatihan yang berbasis kinerja bagi ASN; belum berjalannya dengan optimal integrasi pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta, dimana pengembangan kompetensi dengan manajemen talenta tidak direncanakan dengan baik sebelumnya sehingga program pelatihan yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan ASN; belum maksimalnya monitoring

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan kompetensi; serta Sumber Daya Manusia (SDM) penyelenggara diklat belum dapat memenuhi perkembangan standar kompetensi penyelenggara diklat.

Disamping permasalahan utama tersebut, terdapat beberapa permasalahan lain pada unsur pendidikan dan pelatihan yang juga perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih banyaknya Gedung dan sarana prasarana diklat yang memerlukan rehabilitasi sehingga belum terpenuhinya standar akreditasi kediklatan; Masih tingginya kesenjangan (gap) antara kebutuhan kompetensi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan kualifikasi pejabat pengembannya; dan masih banyak PNS yang belum memiliki sertifikasi kompetensi untuk Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional tertentu

E. Unsur Penelitian Dan Pengembangan

Permasalahan utama dari unsur penelitian dan pengembangan adalah belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, termasuk inovasi daerah yang belum sepenuhnya bisa diterapkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya 1) isu dan tema kelitbangan yang diangkat tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah karena kajian kebutuhan riset dan inovasi yang belum dilakukan; 2) belum optimalnya SDM kelitbangan baik secara kuantitas dan kapasitas serta masih minimnya sarana dan prasarana kelitbangan juga mempengaruhi hasil penelitian; serta 3) belum optimalnya jejaring dan kerjasama penelitian dan pengembangan dengan perguruan tinggi dan lembaga litbang di daerah yang bisa memperkuat kualitas dan relevansi hasil riset terhadap kebutuhan daerah.

Disamping belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, belum optimalnya dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan juga menjadi salah satu permasalahan sehingga masih terdapat beberapa produk rekayasa yang dihasilkan masih butuh pengembangan pada tahun berikutnya sehingga belum bisa segera dimanfaatkan.

2.6.2.6 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan

Inspektorat dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan yang harus segera dituntaskan. Salah satu masalah utama adalah terbatasnya jumlah dan kualitas aparat pengawas yang profesional dibandingkan dengan beban kerja pemeriksaan yang semakin meningkat. Hal ini berdampak langsung terhadap efektivitas dan akurasi pengawasan. Di samping itu, juga belum terdapat pembaharuan metode pengawasan yang inovatif, komprehensif, dan adaptif yang memanfaatkan sistem informasi dan kerjasama lintas sektor yang semestinya dapat meningkatkan kualitas pengawasan. Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya peran Inspektorat dalam pengawasan terhadap implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

Selain itu, pengawasan, pembinaan, dan pendampingan terhadap perangkat daerah juga belum berjalan optimal, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan, ini terlihat pada beberapa hal, seperti masih terbatasnya pemahaman Perangkat Daerah tentang pelaksanaan pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan masih terbatas pada administrasi belum pada budaya kerja dan outcome suatu kegiatan.

2.6.2.7 Urusan Kewilayahan

Kabupaten Lima Puluh Kota memiliki 13 Kecamatan, secara umum permasalahan pokok di Kecamatan adalah kurang optimalnya pelayanan publik dan manajemen pelayanan. Kurang optimalnya pelayanan publik dan manajemen publik dikarenakan terbatasnya jumlah dan kualitas pegawai di kecamatan. Dalam menjalankan tugas urusan pemerintah umum kecamatan memiliki keterbatasan dalam hal sarana dan prasarana sehingga belum optimalnya kualitas penanganan dan pengaduan masyarakat.

2.6.2.8 Urusan Pemerintahan Umum

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah untuk mendukung terwujudnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota masih menemukan tantangan dan permasalahan. Salah satu permasalahan utama adalah belum optimalnya fungsi Puskomin (Pusat Komunikasi dan Informasi) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat untuk mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah dalam memberikan laporan secara cepat, tepat dan akurat terkait masalah politik, ekonomi dan keamanan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal, keberadaan Puskomin sangat vital dalam mendukung Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk menyampaikan laporan secara cepat, tepat, dan akurat atas dinamika politik, ekonomi, dan keamanan di wilayah ini.

Disamping itu, rasa toleransi ditengah masyarakat pun masih mengalami degradasi yang dipicu oleh perbedaan latar belakang dan keyakinan serta kesenjangan ekonomi, hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan dan nilai-nilai luhur Pancasila pun juga masih rendah. Hal ini diperparah juga oleh masih rendahnya tingkat pemahaman politik terutama dikalangan generasi muda. Minimnya pengetahuan politik ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi serta meningkatnya kerentanan terhadap isu-isu yang dapat memecah belah kesatuan. Hal ini mengindikasikan perlunya strategi edukasi politik yang lebih menyentuh dan berkelanjutan di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Permasalahan lain yang juga perlu untuk diatasi adalah belum maksimalnya fungsi deteksi dini dan cegah dini terhadap masalah sosial kemasyarakatan. Hal ini turut dipengaruhi oleh masih terbatasnya jumlah aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi. Kabupaten Lima Puluh Kota masih belum optimal dalam penetapan forum-forum strategis lainnya sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan sehingga output yang diharapkan dari keberadaan forum-forum ini belum tercapai secara maksimal dalam penanganan dan pencegahan konflik sosial di daerah.

Lebih lanjut, masih lemahnya sistem pelaporan dari beberapa PD dalam penyusunan Rencana Aksi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial juga menjadi persoalan. Akibatnya, kualitas dokumen rencana aksi yang dihasilkan belum mencerminkan kondisi nyata di lapangan dan belum dapat diimplementasikan secara efektif. Permasalahan terakhir yang tak kalah penting untuk mendapat perhatian adalah belum optimalnya peran Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dalam meningkatkan nilai dan kualitas IDI di Kabupaten Lima Puluh Kota. Padahal sebagaimana diketahui IDI merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sejauh mana demokrasi dijalankan secara substantif dan prosedural di suatu wilayah.

2.7 Isu Strategis

2.7.1 Isu Strategis Nasional

1. Rendahnya Tingkat produktivitas di tengah meningkatnya persaingan global;
2. Pentingnya komitmen untuk peningkatan kapasitas IPTEK dan Inovasi Daerah;
3. Masih Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM peneliti;
4. Belum Optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata;
5. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi;
6. Rendahnya efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan
7. Percepatan penanganan stunting
8. Masih Lemahnya Pemahaman dan Pengamalan Nilai-Nilai Ajaran Agama
9. Infrastruktur Pelayanan Dasar
10. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup
11. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim
12. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
13. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

2.7.2 Isu Strategis Provinsi

1. Pembangunan Manusia
2. Perlindungan Anak
3. Disabilitas Sektor Formal

4. Pembangunan Kebudayaan
5. Produktivitas dan Nilai Tambah Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
6. Berkembangnya Perdagangan Komersial dan Tumbuhnya Wirausahawan Muda
7. Pengembangan pariwisata dan Ekonomi Kreatif
8. Infrastruktur yang handal dan Berkualitas
9. Desa Mandiri
10. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.7.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis menyangkut permasalahan pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

A. Peningkatan IPM untuk Menciptakan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Berdaya Saing

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2023 adalah 72,05 masih rendah dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan nasional. Rendahnya IPM ini disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan usia harapan hidup. Disamping itu juga masih tingginya angka prevalensi stunting. Dengan meningkatkan IPM ini kedepannya, maka dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas.

B. Peningkatan Penerapan Nilai-Nilai Agama, Adat dan Budaya dalam Masyarakat

Saat ini, penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat yang berdasarkan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah di Kabupaten Lima Puluh Kota masih sangat kurang, akibat perkembangan zaman serta mulai lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) murid belajar agama usia 7-15 tahun, belum optimalnya pendidikan dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, belum terpenuhinya sarana dan prasarana tahfidz serta masih belum optimalnya pengumpulan zakat. Dengan peningkatan penerapan nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam masyarakat, diharapkan akan dapat mengurangi kasus-kasus ketertiban dan keamanan di tengah-tengah masyarakat.

C. Mendorong Potensi Nagari sebagai Poros Pembangunan Dengan Penyusunan Profil Nagari dan Penetapan Batas Nagari serta Meningkatkan Status Nagari Mandiri

Status nagari, profil nagari dan batas nagari merupakan hal pokok yang harus dipenuhi oleh nagari guna meningkatkan status nagari. Hal ini belum optimal dan disebabkan oleh belum tersusunnya profil nagari yang akurat dan komprehensif serta belum selesainya pengukuran dan penetapan batas nagari. Dengan menata hal ini, kedepannya akan dapat digali dan dikembangkan secara komprehensif potensi yang ada di masing-masing nagari.

D. Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik

Tujuan dari reformasi birokrasi adalah birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas dengan penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik. Namun hal ini belum optimal dan disebabkan oleh masih rendahnya nilai akuntabilitas kinerja daerah dan Indeks Reformasi Birokrasi. Melalui penekanan dan peningkatan hal pokok penyebab tersebut kedepannya akan dapat dioptimalkan pelayanan publik di daerah.

E. Optimalisasi Tingkat Pertumbuhan Dan Perkembangan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2022 adalah 4,04%, tahun 2023 meningkat menjadi 4,55%. nilai pertumbuhan ekonomi ini sudah meningkat dari tahun 2021. Naiknya pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota perlu terus didukung dan dioptimalkan dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada dari seluruh sektor ekonomi. Diharapkan kedepannya pertumbuhan ekonomi kita akan terus membaik sehingga Kesejahteraan masyarakat akan terwujud.

F. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan pada, maka peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu perhatian yang lebih serius di masa yang akan datang. Beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan pada 2025 adalah:

- i. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan fokus utama pada peningkatan indeks kualitas air;
- ii. Peningkatan cakupan layanan pengelolaan sampah dengan pengurangan dan penanganan timbulan sampah; dan
- iii. Peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang, dengan fokus utama pada kawasan perkotaan.

Apabila isu-isu tersebut dapat ditangani dengan baik, maka akan mendukung kepada keberlanjutan pembangunan yang sudah, sedang dan yang akan dilakukan. Jika indeks kualitas air menurun dan tidak diperhatikan maka dapat berdampak kepada kesehatan manusia, estetika lingkungan dan berdampak pada kehidupan biota air. Untuk itu perlu dilakukan optimalisasi pengawasan dan pemantauan lingkungan terhadap usaha/ kegiatan yang memiliki izin PPLH.

Pelayanan sampah di Kabupaten Lima Puluh Kota sudah menjadi isu yang cukup serius dirasakan mengingat volume sampah yang kian hari kian bertambah, sementara kemampuan aparat pemerintah dalam melayani sangat terbatas. Saat ini penanganan sampah Kabupaten Lima Puluh Kota bekerjasama dengan TPA Regional Payakumbuh. Diperkirakan kapasitas TPA Regional Payakumbuh cukup menampung volume sampah untuk 2 (dua) tahun ke depan. Untuk itu perlu strategi dan kebijakan khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah dengan lebih mengoptimalkan sistem 3R dan meningkatkan cakupan layanan sampah sampai dengan Ibukota Kecamatan.

Disamping itu, perlu juga dipertimbangkan untuk pengaplikasian konsep Kota Hijau, yang salah satu diantaranya adalah keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan. Untuk itu perlu diwujudkan yaitu perencanaan kota yang sensitif terhadap kota hijau, penyempurnaan RTH dan peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengembangan kota hijau.

G. Peningkatan Kapasitas Manajemen Pengurangan Risiko Bencana

Mengingat Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang tingkat kerawanan bencananya “Menengah–Tinggi”, serta cukup sering mengalami berbagai jenis bencana, maka dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana 5 tahun kedepan menjadikan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai isu strategis yang harus mendapat prioritas penanganan.

Perubahan paradigma Penanggulangan Bencana yaitu dari paradigma tanggap darurat ke paradigma pengurangan risiko bencana harus dapat diimplementasikan di daerah. Penanggulangan bencana tidak lagi dipahami dan dilaksanakan hanya sebagai kegiatan tanggap darurat pada saat terjadi bencana, melainkan harus dipahami dan dilaksanakan dengan memberi prioritas pada pengurangan risiko bencana. Karena itu penanggulangan bencana harus dilaksanakan pada prabencana, saat bencana dan pasca bencana serta menempatkan masyarakat sebagai subyek yang harus ditingkatkan kapasitasnya menghadapi ancaman bencana. Dalam konteks ini, ada 2 (dua) isu penting yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- i. Optimalisasi perencanaan dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan dalam pengurangan risiko bencana; dan
- ii. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penanganan bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana dengan paradigma baru ini dilaksanakan melalui kelembagaan yang kuat, pengkajian dan pemantauan risiko bencana serta pengembangan sistem peringatan dini, pengurangan faktor- faktor mendasar penyebab timbulnya/ meningkatnya risiko bencana, penguatan kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat menghadapi bencana dan peningkatan kapasitas sistem informasi kebencanaan. Dengan meningkatkan kapasitas manajemen pengurangan risiko bencana akan mampu nantinya menurunkan risiko bencana daerah.

2.8 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal, hal ini termaktub dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya

ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Kementerian Teknis lainnya. Pencapaian SPM Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan angka capaian yang tertinggi adalah Kota Padang, Sedangkan Kabupaten/Kota dengan angka capaian terendah adalah Kabupaten Pasaman. Bidang dengan Angka Capaian 100% terbanyak adalah bidang Sosial dan Perumahan Rakyat. Untuk Kabupaten Lima Puluh Kota, bidang SPM dengan capaian 100% pada tahun 2024 adalah bidang Pekerjaan Umum, dan bidang Sosial. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 85
Capaian SPM Seluruh Bidang Kab/Kota Se-Sumatera Barat 2024



Sumber: Sekber SPM Ditjen Bina Bangsa

Pada urusan pendidikan terdapat 3 jenis pelayanan dasar dimana tiga pelayanan dasar tersebut telah mencapai 100% pada tahun 2024. Ada 12 indikator pencapaian SPM untuk urusan kesehatan. Dari 12 indikator tersebut hanya ada 6 indikator yang mencapai target lebih dari 100 %. SPM untuk urusan ketentraman umum, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di laksanakan oleh 3 OPD yaitu Satpol PP, BPBD dan Damkar. Ada 6 indikator SPM yang harus dipenuhi oleh tiga OPD tersebut. Untuk pencapaiannya sudah ada 3 Indikator dengan hasil 100% oleh BPBD dan 3 lagi masih belum memenuhi capaian indikator untuk tahun 2024.

Tabel 2. 171
Capaian Indikator SPM Urusan Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	48.988	48.988	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	7.357	7.357	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	7.174	7.174	100

Sumber: spm.bangda

Tabel 2. 172
Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di faskes pemerintah atau swasta	5.258	4.703	91,38
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan sesuai standar di faskes	5.246	4.832	93,69
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapat pelayanan bayi baru lahir sesuai standar	5.000	4.536	92,58
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan balita sesuai standar	24.000	24.000	100
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	13.110	13.110	100
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah pengunjung usia 15-59 tahun yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	86.060	86.060	100
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah pengunjung usia 60 tahun keatas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	38.250	38.250	100
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	21.250	15.949	79,29
9	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	2.165	2.165	100
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan ODGJ berat (psikotik)	Jumlah ODGJ berat (psikotik) di wilayah kerja kab yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun satu tahun	837	837	100
11	pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapat pelayanan TB sesuai standar dalam kurun satu tahun	7.646	5.080	73,15
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapat pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun	6.569	5.639	88,67

Sumber: spm banda

Tabel 2. 173
Capaian Indikator SPM Urusan Pekerjaan Umum
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	2087	2087	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	49	49	100

Sumber: spm bangda

Tabel 2. 174
Capaian Indikator SPM Urusan Perumahan Rakyat
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	%
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah rumah korban bencana yang berhak memperoleh rumah layak huni	2	0	0
2	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	-	-	-

Sumber: spm bangda

Tabel 2. 175
Capaian Indikator SPM Urusan Ketentraman Umum, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)	OPD
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	40 Jiwa	40 Jiwa	99,96	Satpol PP
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	36.080 jiwa	36.080 jiwa	100	BPBD
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	1.353	1.353	100	BPBD
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan	180.403	180.403	100	BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)	OPD
		evakuasi korban bencana.				
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	208	208	98,33	Dinas Damkar

Sumber: spm bangda

Tabel 2. 176
Capaian Indikator SPM Urusan Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	Realisasi	Hasil (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18	18	100
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial di luar panti	41	41	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	705	705	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Di luar Panti	4	4	100
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten Kabupaten	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	359	359	100

Sumber: spm bangda

2.9 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/SDGs 2030

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/*Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun (Tanpa Kemiskinan);
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan (Tanpa Kelaparan);
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera);
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua (Pendidikan Berkualitas);
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan (Kesetaraan Gender);

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan (Air Bersih dan Sanitasi Layak);
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua (Energi Bersih dan Terjangkau);
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi (Industri, Inovasi dan Infrastruktur);
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar negara (Berkurangnya Kesenjangan);
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan);
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab);
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya (Penanganan Perubahan Iklim);
14. Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudra untuk Pembangunan Berkelanjutan (Ekosistem Lautan);
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Ekosistem Daratan);
16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh);
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari tujuan pembangunan milenium (*Millennium Development Goals* / MDGs) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara maju maupun berkembang, memperluas sumber pendanaan, menekankan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan media, Filantropi dan Pelaku Usaha, serta Akademisi dan Pakar. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

2.9.1 Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Lima Puluh Kota

Analisis pencapaian pembangunan berkelanjutan secara umum bermaksud untuk menganalisis ketercapaian Tujuan, Target, dan Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 tahun 2017. Implementasi TPB/SDGs di Indonesia untuk pencapaian 17 *goals* dengan pengembangan indikator TPB/SDGs 169 target dan 319 indikator yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintahan provinsi, pemerintah kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

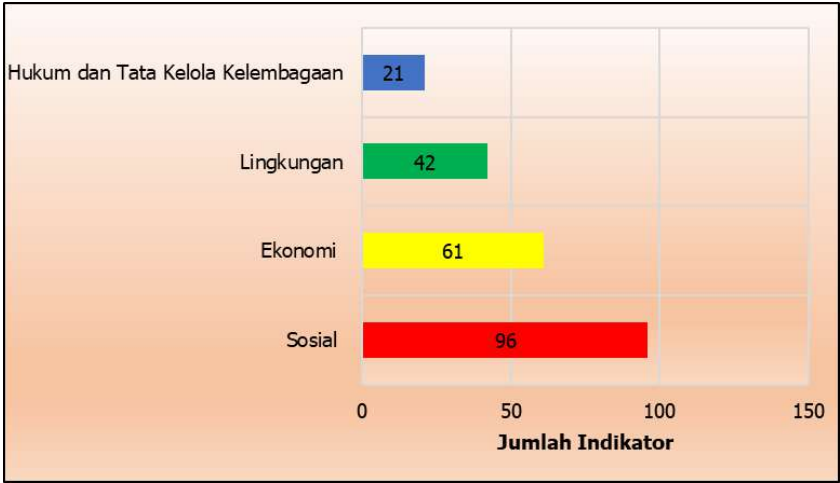
Analisis pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Lima Puluh Kota dilakukan dengan menyandingkan antara target indikator TPB/SDGs yang tertuang dalam Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 dengan data TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota sehingga diperoleh klasifikasi penilaian capaian indikator TPB/SDGs yang terbagi dalam 3 (tiga) kategori :

- a. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target (SS);
- b. Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target (SB); dan
- c. Indikator TPB yang tidak ada/belum ada data (NA)

Berdasarkan hasil analisis capaian TPB yang sesuai dengan kewenangan kabupaten adalah 15 TPB kecuali TPB 7 (Energi bersih dan terjangkau) dan TPB 14 (Ekosistem Lautan). Jumlah indikator dari 15 TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kabupaten adalah 220 indikator. Indikator

TPB/SDGs dibedakan dalam 4 (empat) pilar, yakni pilar pembangunan sosial, pilar pembangunan ekonomi, pilar pembangunan lingkungan dan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan. Pada gambar berikut dapat dilihat jumlah indikator kewenangan kabupaten berdasarkan pilar pembangunan.

Grafik 2. 86
Jumlah Indikator Menjadi Kewenangan Kabupaten Berdasarkan Pilar Pembangunan



Dari 220 indikator tersebut, terdapat 17 indikator khusus. Indikator tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 177
Indikator Khusus yang Bukan Menjadi Kewenangan Kabupaten

No	Indikator TPB	Kekhususan	Keterangan
1	1.5.1.(e) Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	khusus untuk 120 kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan berisiko tinggi	Kabupaten Lima Puluh Kota tidak termasuk ke dalam 120 kabupaten/kota yang menjadi pusat pertumbuhan berisiko tinggi
2	6.3.2.(a) Kualitas air danau.	Khusus untuk daerah yang terdapat salah satu dari 15 danau prioritas dan 5 wilayah Sungai	Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki danau
3	7.2.1* Bauran energi terbarukan	Kewenangan provinsi	
4	7.3.1* Intensitas energi primer	Kewenangan provinsi	
5	9.1.1.(b) Panjang Pembangunan jalan tol	Kewenangan pusat	
6	9.1.2.(b) Jumlah dermaga penyeberangan		Kabupaten Lima Puluh Kota tidak memiliki dermaga penyeberangan
7	9.1.2.(c) Jumlah pelabuhan strategis.	Khusus daerah yang terdapat 24 pelabuhan tol laut	Tidak terdapat Pelabuhan strategis di Kabupaten Lima Puluh Kota
12	11.1.1.(b) Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	khusus daerah yang menjadi/memiliki kawasan perkotaan metropolitan	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Indikator TPB	Kekhususan	Keterangan	
13	11.3.1.(b) Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	khusus kab/kota di luar jawa yang ditetapkan sebagai kawasan metropolitan baru sbg PKN	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
14	11.4.1.(a) Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Khusus untuk kabupaten kota yang menjadi kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang, dan kota kecil	Tidak ada kawasan cagar budaya di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
15	11.6.1.(b) Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan <i>green waste</i> di kawasan perkotaan metropolitan.	khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK
16	11.7.1.(a) Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	khusus untuk daerah yang memiliki kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang	Tidak ada Kawasan perkotaan metropolitan di Kabupaten Lima Puluh Kota	BK

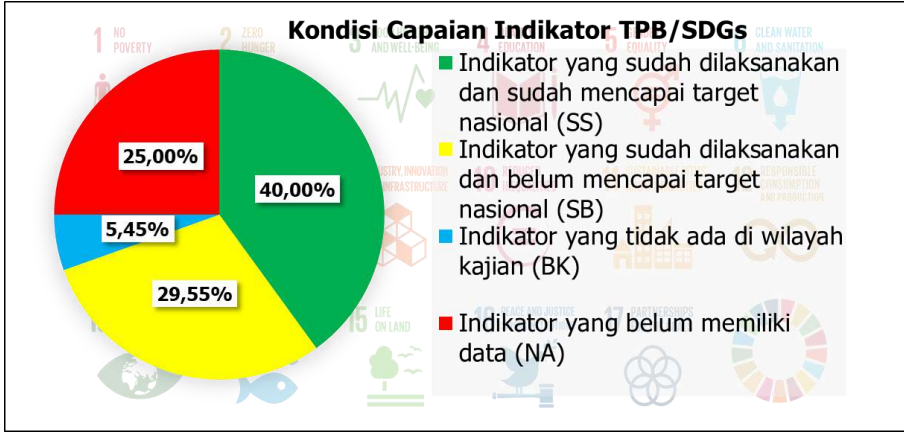
Kondisi Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pembiayaan maupun terkait optimalisasi sistem pendokumentasian kegiatan kegiatan terkait yang belum optimal. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 88 indikator (40,00%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 65 indikator (29,55%), dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 55 indikator (25,00%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 2. 178
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	88	40,00%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	65	29,55%
3.	Indikator yang tidak ada di wilayah kajian (BK)	12	5,45 %
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	55	25,00%
TOTAL		220	100%

Sumber : Analisis, 2023

Gambar 2. 10
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs Terhadap Target Nasional



Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 179
Ketercapaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs)
Kabupaten Lima Puluh Kota

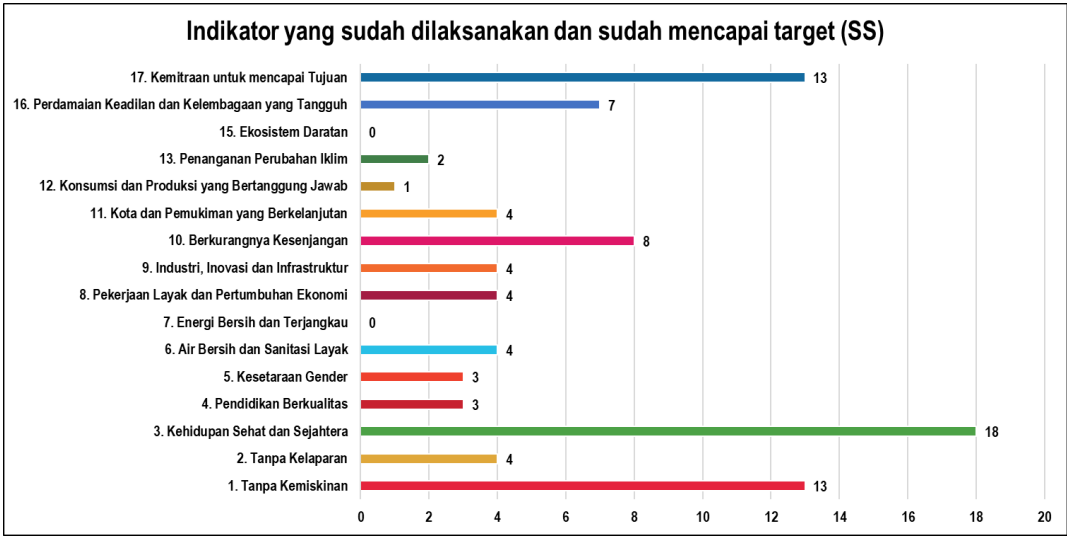
No.	TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator	Ketidaktercapaian
1	Tanpa Kemiskinan	13	7	3	1	24	29,17
2	Tanpa Kelaparan	4	3	4	0	11	27,27
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	10	6	0	34	29,41
4	Pendidikan Berkualitas	3	8	2	0	13	61,54
5	Kesetaraan Gender	3	7	4	0	14	50,00
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	11	2	1	18	61,11
7	Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2	0,00
8	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	12	0	19	15,79
9	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	3	3	13	23,08
10	Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11	0,00
11	Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	5	13	15,38
12	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5	60,00
13	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2	0,00
15	Ekosistem Daratan	0	0	4	0	4	0,00
16	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	6	8	0	21	28,57
17	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16	12,50
		88	64	56	12	220	
	Ketercapaian			40,00			

Sumber : Pengolahan Data Indikator TPB, 2023

2.9.1.1 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Sudah Mencapai Target (SS)

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 88 indikator atau dengan persentase 40,00%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target dapat dilihat Grafik 2.86.

Grafik 2. 87
Jumlah Indikator pada Setiap TPB/SDGs yang Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target Nasional di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 180
Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan dan Mencapai Target

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS SOSIAL	Menurun menjadi 6-7%	6,8	7,29	6,86
1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	3%	2%	3%
1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 70%	100%	100%	100%
1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 63%.	39%	44%	64%
1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat menjadi 94,78%	99,1	99,1	99,6
1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat menjadi 82,2%	80,2	81,2	80,5

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkat menjadi 77,4%.	85%	85%	88%
1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,01	0,00	0,00
1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	BPBD	Meningkat menjadi 39 daerah	69 nagari (KSB)	72 nagari (KSB)	75 nagari (KSB)
1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	DINAS SOSIAL	Meningkat menjadi 151 ribu	0	0	0
1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	DINAS SOSIAL	Meningkat menjadi 81,5 ribu	34	42	50
1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	4.357.695.000	1.852.850.000	836.000.000
1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	1	1
2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 17%	11%	9%	10%
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 28%	5,38	5,44	5,41
2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 28%	15%	11%	11%
2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 50%	77%	76%	78%
3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 95%	100%	100%	100%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.					
3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 85 %	100%	100%	100%
3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 24	9,7	8,5	12,0
3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi <0,5%	0,000%	0,000%	0,002%
3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	DINAS KESEHATAN	Menurun	0	0	0
3.3.3.(a)	Jumlah kecamatan/nagari yang mencapai eliminasi malaria.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 300	79	79	79
3.3.4.(a)	Persentase kecamatan/nagari yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	DINAS KESEHATAN	Meningkat	79	79	79
3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	DINAS KESEHATAN	Menurun	PF = 0 Pkusta= 60	PF = 0 Pkusta= 100	PF = 0 Pkusta= 50
3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 34 provinsi	0,13	0,03	0,05
3.3.5.(b)	Jumlah kecamatan/nagari dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 35.	Sudah eliminasi	sudah eliminasi	sudah eliminasi

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 24,3%	3%	5%	4%
3.4.2.(a)	Jumlah kecamatan/nagari yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 280	79	79	79
3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun menjadi 38	13,82	15,73	16,18
3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun menjadi 2,28	0,06	0,06	0,05
3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Meningkat	71%	81%	84%
3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	DINAS KESEHATAN	Menurun	0	0	0
3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINAS KESEHATAN	Meningkat	100%	100%	100%
3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Meningkat	975	1093	1231
4.1.1.(a)	Persentase SD/MI terakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 84,2%	97%	95%	96%
4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	DINAS KOMINFO	Meningkat	36,22	52,22	56,15
4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat	83	79	81

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DINAS SOSIAL	bertambah sebanyak 16	2	6	8
5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat menjadi 70%	100	100	100
5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	DINAS KOMINFO	Meningkat	75,82	85,15	83,03
6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DINAS PUPR	Meningkat	2%	2%	3%
6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	DINAS PUPR	Meningkat	56	53	56
6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ada	1440	2280	2280
6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	DINAS PUPR	10 WS (skala nasional)	220	360	450
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	BAPPELITB ANGDA	Meningkat	0,995	1,041	1,106
8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Menurun	43,07	44,03	39,80
8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	679	0	105

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	DINAS PARIWISATA , PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkat	654334	624155	749034
9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat	12%	11%	17%
9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	DINAS KOMINFO	Meningkat	21	26	29
9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	DINAS KOMINFO	Meningkat	76	85	83
9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	DINAS KOMINFO	Meningkat	36,22	52,22	56,15
10.1.1*	Koefisien Gini.	BAPPELITB ANGDA	Menurun menjadi 0,36	0,222	0,244	0,208
10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BAPPELITB ANGDA	Menurun menjadi 7-8%	6,8	7,29	6,86
10.1.1.(b)	Jumlah daerah tertinggal yang terentaskan.	DINAS PMDN	80 Kabupaten (skala nasional)	0	0	1 Nagari : Koto Lamo
10.1.1.(c)	Jumlah desa tertinggal.	DINAS PMDN	Berkurang sebanyak 5.000 desa (skala nasional)	2 Nagari: Galugua dan Koto lamo	2 Nagari: Galugua dan Koto lamo	1 Nagari : Galugua
10.1.1.(d)	Jumlah Desa Mandiri.	DINAS PMDN	Meningkat paling sedikit 2.000 desa	4 Nagari: Guguak VIII Koto, Taram, Sarilamak, Situjuah Batua	5 Nagari: Guguak VIII Koto, Taram, Sarilamak, Muaro Paiti, Situjuah Batua	9 Nagari: Situjuah Batua, Pangkalan, Sarilamak, Tujuah Koto Talago, Muaro Paiti, Taram, Guguak VIII Koto, Labuah

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
						Gunung, Koto Tuo
10.1.1.(f)	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal.	DINAS PMDN	Menurun menjadi 14%	19	19	14
10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	ada	0	0	0
10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	2,67%	2,47%	2,86%
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,005214784	0,00077794	0
11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	BPBD	ada	0	0	1
11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	BPBD	Menurun	4357695000	1852850000	836000000
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	BPBD	ada	0	1	1

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
12.5.1.(a)	Jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. (kg)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	20 ton per hari (skala nasional)	NA	6263,55	10629,05
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	ada	0	1	1
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Menurun	0,005	0,001	0,000
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	DINAS SOSIAL	Menurun	PR = 16% LK=0%	PR = 11% LK=3%	PR = 11% LK=1%
16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkat menjadi: Kementerian/ Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten: 60%, Kota: 65%	WTP	WTP	WTP
16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkat	91,3	93,2	95
16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkat menjadi 77,4%	85	85	88

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkat menjadi 85%	91,3	93,2	95,0
16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	ada	0	0	0
17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkat	0,218067405	0,213199026	0,226201229
17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Di atas 12%	15%	13%	15%
17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkat	2%	2%	13%
17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	DINAS KOMINFO	Meningkat	36,22	52,22	56,15
17.8.1.(a)	Persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet.	DINAS KOMINFO	100%	50%	50%	0%
17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	ada	ada	ada	ada

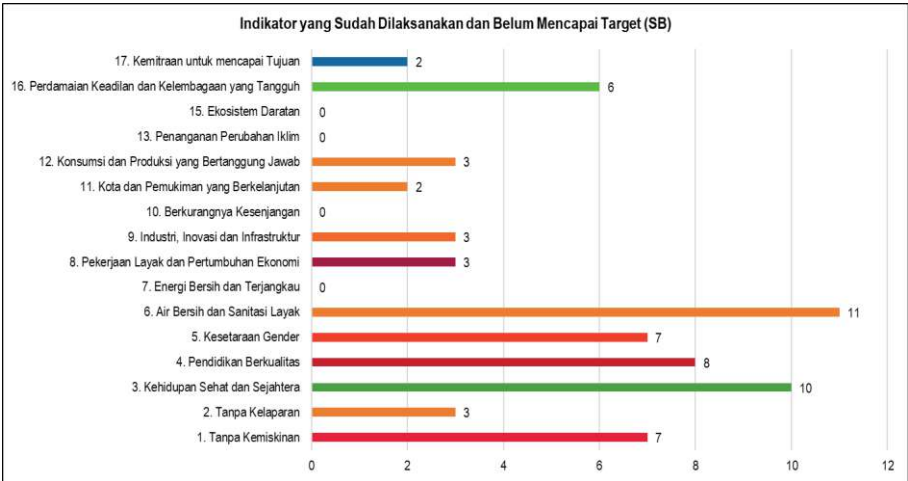
NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
17.17.1 .(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	ada	ada	ada	ada
17.18.1 .(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	BPS	Meningkat	86%	95%	97%
17.18.1 .(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	BPS	Meningkat	83%	84%	90%
17.18.1 .(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	BPS	Meningkat	NA	9	21
17.19.2 .(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ada	ada	ada	ada
17.19.2 .(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	BPS	Meningkat	14031	13701	17713
17.19.2 .(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	BPS	Meningkat	-	100	100

Sumber : OPD Kabupaten Lima Puluh Kota , 2023

2.9.1.2 Indikator yang Sudah Dilaksanakan dan Belum Mencapai Target (SB)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang sudah dilaksanakan tapi belum mencapai target nasional (SB) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebanyak 64 indikator atau dengan persentase 29,55%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

Grafik 2. 88
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Sudah Dilaksanakan Tapi Belum Mencapai Target di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 181
Indikator TPB/SDGs Sudah Dilaksanakan Belum Mencapai Target (SB)

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 95%	20%	13%	11%
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	DINAS SOSIAL	Meningkat menjadi 17,12%	2%	13%	1%
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	DINAS SOSIAL	Menurun menjadi 2,8 juta	22415	25616	39564
1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 100%	53,86	55,69	64,19

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 100%	74,75	68,93	71,33
1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 450	0	0	0
1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkat	20% pendidikan 10% kesehatan 5% perlindungan sosial	20% pendidikan 10% kesehatan 5% perlindungan sosial	20% pendidikan 10% kesehatan 5% perlindungan sosial
2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINAS KESEHATAN	Menurun	12%	8%	9%
2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	DINAS KESEHATAN	Menurun	7	4	5
2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi	NA	85,00	92,00

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.		ikan 54,5 kg/kapita/tahun			
3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 306	0,10%	0,17%	0,21%
3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Menurun	10,7	8,5	13,6
3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINAS KESEHATAN	Menurun	6,5	4,8	6,9
3.2.2.(b)	Persentase kecamatan/nagari yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 95%	14%	44%	64%
3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 245	81	86	116
3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	DINAS KESEHATAN	Menurun	NA	NA	0,606278185
3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	KESBANGPOL	Menurun	0,001	0,002	0,006
3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat menjadi 66%	62%	74%	64%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.					
3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNG AN ANAK	Meningkat menjadi 23,5%	19%	22%	18%
3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi minimal 95%	71%	81%	84%
4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 81%	72%	71%	71%
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 114,09%	102,3	105,5	95,8
4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 106,94%	108,1	86,0	92,1
4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥ 15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 8,8 tahun	8	8,07	8,08
4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 77,2%	32,22	32,35	43,35
4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥ 15 tahun.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat menjadi 96,1%	99	99	74
4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat	19,6	19,9	19,7

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	DAN KEBUDAYAAN				
4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat	Listrik : 370 Internet : 185	Listrik : 370 Internet : 288	Listrik : 372 Internet : 219
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun	-	-	0,019%
5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	-	-	0,135%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNG AN ANAK	Menurun	-	-	0,012%
5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNG AN ANAK	Meningkat menjadi 21 tahun	NA	NA	2,22
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	DINAS SOSIAL	Meningkat	6%	6%	6%
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	BKPSDM	Meningkat	27%	24%	19%
5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNG AN ANAK	Menurun menjadi 9,9%	13,64	13,93	22,88
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 100%	79%	80%	83%
6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN	Meningkat menjadi 100%	81%	80%	81%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	minum aman dan berkelanjutan.	KAWASAN PERMUKIMAN				
6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	DINAS KESEHATAN	Meningkat	-	-	43%
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 100%	64%	61%	66%
6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	DINAS KESEHATAN	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	238	264	12
6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	DINAS KESEHATAN	Meningkat	16	3	0
6.3.1.(a)	Jumlah kecamatan/nagari yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	DINAS PUPR	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	0	0	0
6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DINAS PUPR	Meningkat	0	0	0
6.5.1.(a)	Jumlah Rencana	DINAS PUPR	ada	0	0	0

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).					
6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	DINAS PUPR	8 WS	2	2	2
6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	DINAS PUPR	ada	2	2	NA
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	BAPPELITBAN GDA	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	40.522.784	41.963.295	46.091.437
8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat	46,49	45,65	42,50
8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Menurun	3,028	2,251	3,723
9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Dinas Perhubungan	Bertambah 3.258 km	0	0	0,00
9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM	Meningkat	6,36	6,49	6,47
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	2	2,97	2,24

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	DINAS PUPR	Ada	0	0	0
11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	BPBD	Menurun menjadi 30%	119,2	119,2	64,33
12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat	0	0	0
12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat	0	0	0
12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP,PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat	0	0	0
16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	KESBANGPOL	Menurun	0,109	0,047	0,057
16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	DINAS SOSIAL	Menurun	LK=0,00021 PR = 0,0015	LK=0,0004 PR = 0,00117	LK=0,00048 PR = 0,0011
16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Meningkat	51,7623606	48,04089706	52,25
16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement	PBJ SETDAKAB	Menjadi menjadi 80%	75	61	62

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
	terhadap belanja pengadaan.					
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	DINAS SOSIAL	Meningkat	5,71	5,71	5,71
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Meningkat	26,7	24,1	18,8
16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	DINAS KOMINFO	Meningkat	0	0	0
17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	DINAS KOMINFO	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	20,62	22,43	20,14

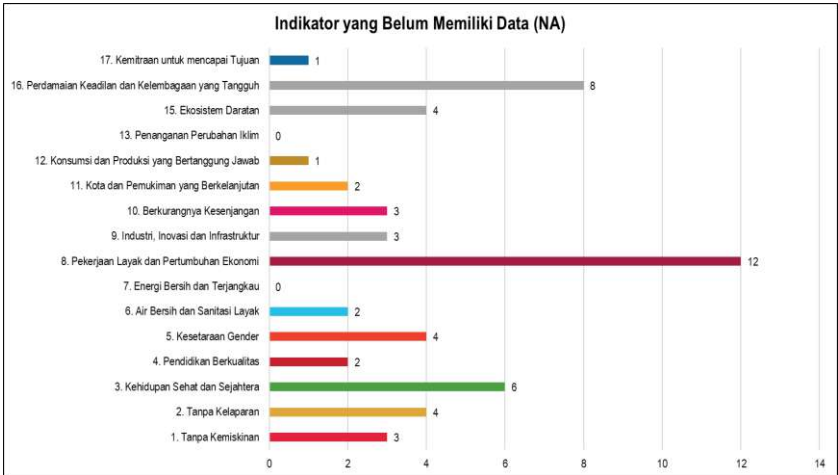
NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	2020	2021	2022
17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	DINAS KOMINFO	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	21	26	29

Sumber : Analisis Data OPD, 2023

2.9.1.3 Indikator yang Tidak Memiliki Data (NA)

Hasil penilaian dan analisis terhadap capaian indikator TPB yang tidak memiliki data adalah sebanyak 56 indikator atau 24,45%. Lebih jelasnya, jumlah indikator dengan capaian pada setiap TPB/SDGs yang tidak memiliki data dapat dilihat pada Grafik 2.89.

Grafik 2. 89
Jumlah Indikator Pada Setiap TPB yang Tidak Memiliki Data di Kabupaten Lima Puluh Kota



Tabel 2. 182
Indikator TPB/SDGs Belum Memiliki Data

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan
1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat menjadi 65%
1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	DINAS SOSIAL	Meningkat menjadi 100%
1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	BAPPELITBANGDA	Meningkat

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) ringkasan
2.1.1*	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Menurun
2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Menurun
2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Menurun menjadi 8,5 %
2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	DINAS PERTANIAN	Meningkat
3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 5,4%
3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi angka 0,02%
3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	DINAS KESEHATAN	Menurun
3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat menjadi 65%
3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	DINAS KESEHATAN	Menurun menjadi 9,91%
3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	DINAS KESEHATAN	Menurun
4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat
4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/ sederajat; (2) SMP/MTs/ sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Meningkat
5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan
5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Menurun menjadi 38 tahun
5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat
5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkat menjadi 85%
6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik
6.2.1.(e)	Jumlah kecamatan/nagari yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	DINAS PUPR	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota. --> perlu ditetapkan target lokal
8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	BAPPELITBANGDA	Meningkat
8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	51%
8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UMKM	25%
8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	DINAS PENDIDIKAN	Meningkat
8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB (PDRB).	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkat menjadi 8%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) ringkasan
8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Meningkat
8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Meningkat
8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	DINAS PMPTSP	Meningkat
8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	DINAS PMPTSP	Menurun (mendekat)
8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Meningkat
9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Meningkat
9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Meningkat
9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	BAPPELITBANGDA	Meningkat
10.1.1.(e)	Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal.	DINAS PMN	Meningkat
10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	DINAS SOSIAL	Menurun
10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	KESBANGPOL	Meningkat menjadi 87
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	3,7 juta rumah tangga
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani. (ton)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 80%
12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). (kg)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)

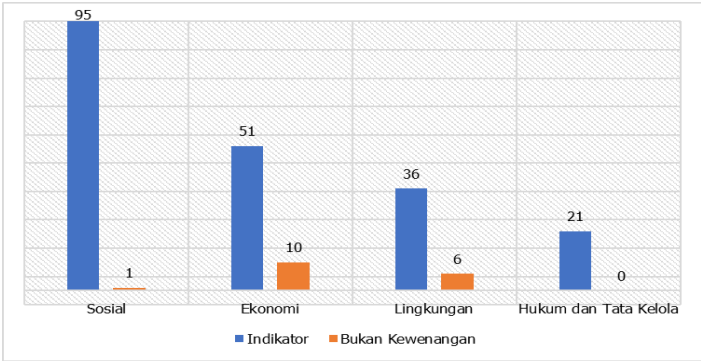
NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) ringkasan
15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat
15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5,5 juta ha (skala nasional)
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	ada
15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Meningkat
16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	KESBANGPOL	Menurun
16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	KESBANGPOL	Menurun
16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	KESBANGPOL	Meningkat
16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	DINAS SOSIAL	Menurun
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	INSPEKTORAT DAERAH	Meningkat menjadi 4,0
16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Meningkat menjadi: Kementerian/Lem baga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%
16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lem baga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%
16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%

NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	OPD	TARGET (PERPRES 59/2017) ringkasan
17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	BAPPELITBANGDA	Meningkat

2.9.2 Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Pilar

Capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan dikelompokkan menjadi 4 (empat) pilar pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 96 indikator pilar sosial, 61 indikator pilar ekonomi, 42 indikator pilar lingkungan serta 21 indikator termasuk ke dalam pilar hukum dan tata Kelola. Indikator TPB/*SDGs* berdasarkan pilar dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 90
Indikator TPB Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan Pilar



2.9.2.1 Pilar Sosial

Pilar pembangunan sosial mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 1, Tujuan 2, Tujuan 3, Tujuan 4 dan Tujuan 5. Jumlah indikator pilar sosial yakni 96 indikator dan 1 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/*SDGs* dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 183
Capaian Indikator TPB/*SDGs* Pada Pilar Sosial

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
1. Tanpa Kemiskinan	13	7	3	1	24
2. Tanpa Kelaparan	4	3	4	0	11
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera	18	10	6	0	34
4. Pendidikan Berkualitas	3	8	2	0	13
5. Kesenjangan Gender	3	7	4	0	14
Jumlah	41	35	19	1	96

2.9.2.2 Pilar Ekonomi

Pilar pembangunan ekonomi mencakup lima tujuan, yaitu Tujuan 7, Tujuan 8, Tujuan 9, Tujuan 10 dan Tujuan 17. Jumlah indikator pilar ekonomi yakni 61 indikator dan 10 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/*SDGs* dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 184
Capaian Indikator TPB/*SDGs* Pada Pilar Ekonomi

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
7. Energi Bersih dan Terjangkau	0	0	0	2	2
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	4	3	12	0	19
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur	4	3	3	3	13

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
10. Berkurangnya Kesenjangan	8	0	3	0	11
17. Kemitraan untuk mencapai Tujuan	13	2	1	0	16
Jumlah	29	8	19	5	61

2.9.2.3 Pilar Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan mencakup enam tujuan, yaitu Tujuan 6, Tujuan 11, Tujuan 12, Tujuan 13, Tujuan 14 dan Tujuan 15. Jumlah indikator pilar sosial yakni 42 indikator dan 6 diantaranya bukan merupakan kewenangan. Capaian indikator untuk masing-masing TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 185
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Lingkungan

TPB	SS	SB	N A	BK	Total Indikator
6. Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	11	2	1	18
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	4	2	2	5	13
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	3	1	0	5
13. Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
14. Ekosistem Lautan					
15. Ekosistem Daratan	0	0	4	0	4
Jumlah	11	16	9	6	42

2.9.2.4 Pilar Hukum dan Tata Kelola

Indikator yang merupakan pilar hukum dan tata Kelola adalah Tujuan 16, yakni Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh). Capaian indikator untuk TPB/SDGs 16 ini dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 186
Capaian Indikator TPB/SDGs Pada Pilar Hukum dan Tata Kelola

TPB	SS	SB	NA	BK	Total Indikator
16. Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	7	6	8	0	21

2.9.3 Capaian Indikator Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Indikator TPB/SDGs kabupaten yang merupakan SPM adalah sebanyak 61 indikator dari 220 indikator yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten atau sebanyak 27,73 %, yang termasuk ke dalam 6 (enam) SPM sebagai berikut.

- SPM Pendidikan
SPM Pendidikan sebanyak 13 indikator atau 5,91 % dari seluruh indikator TPB dan 21,31 % dari indikator SPM.
- SPM Kesehatan
SPM Kesehatan sebanyak 26 Indikator atau 11,82 % dari seluruh indikator TPB dan 42,62 % dari indikator SPM
- SPM Pekerjaan Umum
SPM Pekerjaan Umum sebanyak 7 indikator atau 3,18 % dan 11,48 % dari indikator SPM
- SPM Perumahan Rakyat
SPM Perumahan Rakyat sebanyak 1 indikator atau 0,45 % dari seluruh indikator TPB dan 1,64 % dari indikator SPM

- 5. SPM Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
SPM ini sebanyak 10 indikator atau 4,55% dari seluruh indikator TPB dan 16,39 % dari indikator SPM
 - 6. SPM Sosial
SPM Sosial sebanyak 4 indikator atau 1,82 % dari seluruh indikator TPB dan 6,56 % dari indikator SPM
- Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 187
Capaian Indikator TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota Berdasarkan SPM

No	SPM	SS		SB		NA		Total
1	Kesehatan	14	54%	9	35%	3	12%	26
2	Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat	7	70%	1	10%	1	10%	9
3	Pekerjaan Umum	0	0%	5	71%	2	29%	7
4	Pendidikan	0	0%	8	62%	5	38%	13
5	Perumahan Rakyat	0	0%	0	0%	1	100%	1
6	Sosial	3	75%	1	25%	0	0%	4
		24		24		12		60

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota , 2023

2.9.4 Peran Para Pihak dalam Pencapaian TPB/SDGs

TPB/SDGs merupakan kesatuan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi, lingkungan, yang komprehensif serta saling terkait atau integration. Kemajuan salah satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. TPB/SDGs merupakan suatu aksi dan katalis global untuk kemitraan internasional dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan, dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat pada semua orang, khususnya kelompok rentan dan disabilitas. Prinsip ini dikenal dengan “*No one left behind*” atau “Tidak ada seorangpun yang Tertinggal”. Untuk melaksanakan TPB/SDGs, Indonesia menjalankan prinsip inklusif dengan melibatkan 4 (empat) platform partisipasi.

Platform partisipasi tersebut terdiri atas Pemerintah (Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota) dan Parlemen, Akademisi dan Pakar, Filantropi dan Pelaku Usaha, Organisasi Masyarakat Sipil dan Media dengan focus pada kelompok rentan dan kaum disabilitas, termasuk kelompok anak, perempuan dan pemuda. Setiap platform ini memberikan peran masing-masing, namun saling terkait. Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, memiliki peran untuk menetapkan kebijakan peraturan, memformulasikan perencanaan dan alokasi anggaran, melaksanakan dan memonitor, mengevaluasi dan melaporkan hasil pencapaian. Sementara fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk mengawasi anggaran, pelaksanaan dan pemantauan TPB/SDGs. Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 188
Peran OPD Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Pencapaian Target TPB/SDGs

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Tujuan 1, 16, 17
2	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDAKAB	Tujuan 17
3	BAGIAN HUKUM SETDAKAB	Tujuan 10, 16
4	BAGIAN ORGANISASI SETDAKAB	Tujuan 16
5	BAPPELITBANGDA	Tujuan 1, 8, 9, 10, 17
6	BKPSDM	Tujuan 5, 16
7	BPBD	Tujuan 1, 11, 13
8	BPS	Tujuan 17

No	Organisasi Perangkat Daerah dan Para Pihak	Fungsi Sesuai Indikator TPB/SDGs
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Tujuan 1, 16, 17
10	DINAS KESEHATAN	Tujuan 1, 2, 3, 6
11	DINAS KOMINFO	Tujuan 4, 5, 9, 16, 17
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN PERMUKIMAN	Tujuan 1, 6, 11, 12, 15
13	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Tujuan 8
14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, KB DAN PERLINDUNGAN ANAK	Tujuan 1, 3, 5
15	DINAS PENDIDIKAN	Tujuan 1, 4, 8
16	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI UKM	Tujuan 8, 9
17	DINAS PERHUBUNGAN	Tujuan 9
18	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	Tujuan 1, 8, 9, 10
19	DINAS TANAMAN PANGAN HOLTIKUTURA DAN PERKEBUNAN	Tujuan 2
20	DINAS PMN	Tujuan 10
21	DINAS PMPTSP	Tujuan 8
22	DINAS PUPR	Tujuan 6, 11
23	DINAS SOSIAL	Tujuan 1, 5, 10, 16
24	DINAS PANGAN	Tujuan 2
25	INSPEKTORAT	Tujuan 16
26	KESBANGPOL	Tujuan 3, 10, 16
27	PBJ SETDAKAB	Tujuan 16

Sumber : Analisis TPB/SDGs Kabupaten Lima Puluh Kota, 2023

Filantropi dan pelaku usaha, berperan untuk melakukan advokasi di antara para pelaku usaha dan sektor bisnis, memfasilitasi dan melaksanakan program, meningkatkan kapasitas masyarakat, serta memberikan dukungan pendanaan. Filantropi berperan besar dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya mereka yang masih tertinggal dalam kehidupan sosial, pendidikan dan kesehatan. Dana filantropi juga memainkan peran dalam kegiatan pengenalan dan penguatan demokrasi, HAM, pemberdayaan gender, perubahan sosial lainnya. Untuk menggerakkan filantropi dan pebisnis, diperlukan fasilitasi aktif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil. Filantropi dan bisnis setidaknya dapat memberikan peran dalam pelaksanaan TPB/SDGs baik dalam pengembangan bisnis (ekonomi) maupun bantuan sosial serta lingkungan. Organisasi masyarakat sipil dan media berperan untuk mendiseminasikan dan melakukan advokasi tentang TPB/SDGs, membangun kesadaran masyarakat, memfasilitasi program dan pelaksanaannya serta turut serta dalam pemantauan dan evaluasi.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah menguraikan kondisi perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026. Beberapa indikator pembangunan ekonomi yang ditelaah meliputi indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah ini, selanjutnya diuraikan ke dalam 2 (dua) garis besar yaitu terkait Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah mengemukakan tentang arahan nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan juga kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat serta kebijakan di bidang ekonomi dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah ditujukan untuk mengimplementasikan program dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah dan penyelesaian permasalahan daerah, sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026.

3.1.1. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional Tahun 2026

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 merupakan perencanaan lima tahun yang menjadi tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045. Dengan mempertimbangkan arahan presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis serta kesinambungan pembangunan, maka ditetapkan tema RKP Tahun 2025 adalah: “Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Indeks Modal Manusia, menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Selanjutnya akan dijelaskan capaian indikator makro tahun 2024 dan target yang ditetapkan untuk tahun 2025.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2024, berdasarkan publikasi BPS sebesar 5,03% dan berdasarkan RKP tahun 2024, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%-5,6%, artinya pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 berada dibawah target dengan gap sebesar 0,27%. Adapun target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2025 ini, berdasarkan RKP Tahun 2025 berada pada angka sebesar 5,3% dan untuk target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2026 berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2026 adalah sebesar 5,8%-6,3%.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2024, berdasarkan publikasi BPS sampai dengan Bulan Agustus Tahun 2024 berada pada angka 4,91% dan berdasarkan RKP tahun 2024 TPT ditargetkan sebesar 5,0%-5,7%, artinya sampai dengan bulan agustus tahun 2024 angka TPT Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan target yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa target TPT tahun 2024 dapat diwujudkan sebagaimana target yang direncanakan. Adapun target TPT tahun 2025 ini, berdasarkan data RKP tahun 2025 adalah sebesar 4,5%-5,0% dan untuk target TPT tahun 2029, berdasarkan RPJMN 2025-2029 adalah sebesar 4,00%-4,71%, adapun untuk Tahun 2026, berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2026 target TPT tahun 2026 adalah sebesar 4,44%-4,96%.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka kemiskinan nasional pada tahun 2024, berdasarkan publikasi BPS Tahun 2024 berada pada angka 8,57% dan berdasarkan RKP tahun 2024 angka kemiskinan nasional ditargetkan sebesar 6,5%-7,5%, artinya Pemerintah belum berhasil mewujudkan target angka kemiskinan tahun 2024, dimana didapatkan deviasi sebesar 1,07%. Ini berarti angka kemiskinan tetap harus menjadi perhatian penting pemerintah, mengingat target angka kemiskinan yang juga telah dicanangkan melalui RKP Tahun 2025, yakni di kisaran 7-8%. Adapun untuk tahun 2026, berdasarkan RPJMN 2025-2029 target yang didapatkan adalah target tahun 2029 dengan angka pada 4,5-5%, sementara pada Rancangan RKP Tahun 2026 target angka kemiskinan tahun 2026 sebesar 6,5-7,5%

Beberapa upaya akan tetap dilakukan pemerintah untuk terus menurunkan jumlah penduduk miskin khususnya miskin ekstrem. Salah satu permasalahan utama yang saat ini dihadapi adalah rendahnya tingkat akurasi atau ketepatan sasaran penerima program perlindungan sosial yang menyebabkan masih tingginya inclusion dan exclusion error dalam penyaluran program. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah melaksanakan Reformasi Sistem Perlindungan Sosial yang telah dimulai sejak tahun 2021, beberapa aspek akan diperkuat pelaksanaannya, yaitu (i) perluasan pendataan penduduk miskin dan rentan dengan pengembangan Registrasi Sosial Ekonomi dan Digitalisasi Monografi Desa/Kelurahan, khususnya di lokasi penghapusan kemiskinan ekstrem; (ii) pengembangan skema perlindungan sosial adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam; (iii) pengembangan mekanisme penyaluran bantuan melalui pemanfaatan berbagai platform pembayaran digital; (iv) reformasi skema pembiayaan yang inovatif, ekspansif dan berkesinambungan; (v) integrasi program untuk meningkatkan kecukupan manfaat dan efektivitas dampak terhadap kemiskinan; dan (vi) pengembangan mekanisme graduasi terintegrasi dan berkelanjutan untuk program-program bantuan sosial. Melalui pelaksanaan agenda pembangunan reformasi perlindungan sosial yang didukung pemulihan kondisi ekonomi.

d. Gini Rasio

Rasio Gini pada Tahun 2024, berdasarkan publikasi BPS Tahun 2024 berada pada angka 0,381 dan berdasarkan RKP tahun 2024 pemerintah menargetkan rasio gini sebesar 0,374-0,377. Dari data capaian dan target yang direncanakan, dapat dilihat bahwa angka gini rasio lebih tinggi dari target sebesar 0,004, artinya kinerja untuk mewujudkan target gini rasio belum sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun untuk tahun 2025, dalam RKP Tahun 2025 rasio gini tahun 2025 ditargetkan sebesar 0,375-0,378 dan target rasio gini tahun 2026 didapatkan dari data target RPJMN 2025-2029, dimana untuk tahun 2029 rasio gini ditargetkan sebesar 0,372-0,375, adapun untuk target Tahun 2026, berdasarkan Rancangan RKP target rasio gini tahun 2026 sebesar 0,377-0,380. Untuk mencapai target tersebut, kebijakan terus diarahkan tidak hanya pada kelompok masyarakat pendapatan menengah ke bawah, tetapi juga pada masyarakat pendapatan menengah ke atas. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah diharapkan akan memperkecil jarak ketimpangan antara kelompok pendapatan.

Untuk menurunkan ketimpangan, pemerintah melakukan kebijakan afirmasi empat strategi utama yaitu, (i) mempermudah kepemilikan asset berupa lahan dan modal, mendorong inklusi keuangan, memberikan pendampingan dan pelatihan kapasitas masyarakat secara berkelanjutan; (ii) meningkatkan investasi yang mendorong penciptaan lapangan kerja dan akses kegiatan ekonomi produktif masyarakat melalui pengaturan akses kepemilikan lahan dan hak intelektual untuk mendukung ekonomi kreatif; (iii) mempertajam kebijakan fiskal baik belanja maupun pendapatan yang berkeadilan; dan (iv) memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik dan ekonomi.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2024, berdasarkan publikasi BPS capaian dari Indeks Pembangunan Manusia adalah 75,02. Mulai tahun 2025 pemerintah mulai menggunakan indeks modal manusia (IMM), dimana IMM ini dihitung dari kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas pekerja. Dalam RPJMN 2025-2029, tertera bahwa untuk tahun 2025 ini telah ditetapkan Baseline data IMM sebesar 0,56 dan ditargetkan sebesar 0,59 pada tahun 2029. Sementara untuk Tahun 2026, berdasarkan Rancangan RKP Tahun 2026 target IMM pada tahun 2026 sebesar 0,57.

3.1.2. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Perekonomian Sumatera Barat tahun 2026 akan sangat dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat terutama pada lapangan usaha perdagangan sebagai penyumbang utama pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Berdasarkan data BPS Provinsi Sumatera Barat, pertumbuhan ekonomi tahun 2024 sebesar 4,04%, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 4,76%, capaian pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat tahun 2024 belum memenuhi target yang ditetapkan, dengan deviasi sebesar 0,72%. Untuk tahun 2025 ini, dalam RKPD Tahun 2025 ditetapkan target pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 5,05%.

Untuk tahun 2026, pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sesuai dengan RKPD 2025 sebesar 5,2-5,7 persen. Hal ini didorong oleh trend positif harga CPO dan karet dunia yang akan mendorong pertumbuhan di sektor pertanian dan perkebunan. Kondisi lain yang berpengaruh adalah pembangunan jalan Tol Padang – Pekanbaru yang mendorong investasi di koridor pertumbuhan ekonomi utama Sumatera Barat. Proyeksi indikator makro daerah tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

	INDIKATOR MAKRO DAN PEMBANGUNAN	Realisasi	Target	
		2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,04	5,05	5,7
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	54,33	62,29	69,59
3	TPT (%)	5,75	5,55	5,44
4	IPM	76,43	77,41	77,48
5	Kemiskinan (%)	5,42	5,65	5,49
6	Gini Rasio	0,287	0,289	0,281

Sumber: BPS Provinsi dan RKPD Provinsi Sumatera Barat 2026

Tingkat pengangguran diharapkan bisa turun ke angka 5,55% pada Tahun 2025 dan di tahun 2026 ditargetkan turun menjadi 5,16-5,59%. Sementara itu tingkat kemiskinan diharapkan mampu turun ke angka 5,65% di tahun 2025 dan secara bertahap turun ke angka 4,39-5,39% di tahun 2026.

Untuk mencapai target-target pada proyeksi Makro Daerah Tahun 2026 maka terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan ekonomi Sumatera Barat ke depannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 akan sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa pusat kegiatan nasional dan wilayah.
2. Transformasi struktural ekonomi daerah menjadi titik krusial dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat secara nasional. Ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi menjadi prasyarat penting agar tidak terjebak dalam *middle income trap*. Berkaca pada sektor industri pengolahan yang tidak menjadi sektor ekonomi unggulan di Sumatera Barat, maka penting bagi Pemerintah Daerah untuk bertumpu pada sektor pariwisata yang memiliki *backward* dan *forward linkage* yang besar.
3. Tingkat inflasi akan terjaga pada level yang sama dalam 5 tahun terakhir. Beberapa program pengendalian inflasi selama pandemi COVID-19 terbukti mampu menahan laju inflasi. Program ini akan berlanjut di tahun 2024 dan 2025 untuk menjaga tingkat inflasi tetap stabil.
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas diarahkan untuk meningkatkan nilai IPM dan menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran serta ketimpangan pendapatan dan wilayah.

Untuk mewujudkan target-target makro ekonomi Provinsi Sumatera Barat sebagaimana tersebut di atas, maka Provinsi Sumatera Barat mengangkat Tema Pembangunan pada RKPD Tahun 2026: “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan prioritas sebagai berikut:

1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
3. Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan
4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana
6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas
7. Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM
8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.1.3. Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 disusun dengan mempedomani Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029, dimana Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan RPJMD tersebut. Adapun visi RPJMD 2025-2029 adalah **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”**.

Untuk mewujudkan visi daerah di atas, maka ditetapkanlah 8 (delapan) misi pembangunan, yaitu:

1. Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif
4. Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan
5. Meningkatkan pertanian yang unggul dan berdaya saing
6. Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan
7. Membangun Kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK)
8. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari

Dari rumusan visi dan misi tersebut dapat dilihat bahwa muatan yang sangat penting adalah kualitas sumber daya manusia, perbaikan perekonomian daerah, dan pembangunan kawasan ibu kota kabupaten (IKK). Dalam rumusan tersebut sangat jelas bahwa untuk lima tahun ke depan, diupayakan perkembangan ekonomi lintas sektoral yang memiliki keunggulan di tingkat lokal dan regional dengan didukung peningkatan fungsi IKK.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 4,03%, capaian pertumbuhan ekonomi ini belum memenuhi target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pada RKPD tahun 2024, yaitu sebesar 4,62%, artinya ada deviasi sebesar 0,59%. Untuk target pertumbuhan ekonomi tahun 2025, berdasarkan RKPD 2025, ditetapkan sebesar 4,72%. Adapun pada Dokumen RPJPD 2025-2045, basis pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 ini ditetapkan sebesar 5,35%, artinya ada deviasi sebesar 0,63% yang harus dipacu agar basis pertumbuhan ekonomi kabupaten lima Puluh Kota sesuai dengan basis data yang ditetapkan.

Adapun untuk tahun 2026, sesuai RPJPD 2025-2045, Kabupaten Lima Puluh Kota menargetkan pertumbuhan ekonomi tahun 2030 sebesar 5,95%. Dengan metoda perataan, maka diperoleh target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 adalah sebesar 5,47%.

Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2026 akan didasarkan kepada Optimalisasi potensi yang ada, dimana dalam hal ini, berdasarkan data yang ada, maka sektor pertanian dan pariwisata akan dijadikan basis dan didukung dengan penyediaan SDM yang kompeten serta infrastruktur pendukung yang memadai. Sektor pertanian adalah sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam menyumbang angka pada PDRB Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan data dari BPS, untuk tahun 2024, Sektor Pertanian menyumbang 31,45% dari total PDRB, sementara itu Sektor Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, sangat potensial untuk dikembangkan mengingat begitu banyaknya objek-objek wisata yang dimiliki oleh Lima Puluh Kota, jika hal ini bisa dikelola dengan baik, akan berdampak kepada peningkatan perekonomian Kabupaten Lima Puluh Kota. Pengembangan Sektor Pertanian dan Pariwisata ini perlu didukung dengan ketersediaan SDM dan infrastruktur pendukung yang memadai.

b. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2024, berdasarkan Data Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 3,68 persen, jika dibandingkan dengan target capaian TPT pada RKPD Tahun 2024 adalah sebesar 2,44%, capaian TPT tahun 2024 ini cukup jauh di bawah target yang dicantumkan, yakni ada deviasi sebesar 1,24%. Sementara itu, untuk target TPT tahun 2025, sebagaimana tertuang pada RKPD tahun 2025 adalah sebesar 3,71%, sementara dari basis data RPJPD 2025-2045, TPT Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,71%, dari sini diketahui bahwa basis data RPJPD 2025-2045, sama dengan target TPT 2025 yang ada di RKPD 2025, harapannya target tersebut dapat terwujud dan basis data RPJPD 2025-2045 untuk TPT dapat terpenuhi. Adapun untuk target TPT tahun 2026, datanya diambil dari RPJPD 2025-2045, dimana untuk tahun 2030 TPT ditargetkan sebesar 3,31%, artinya dengan proses perataan, didapatkan target TPT tahun 2026 adalah sebesar 3,63%.

Disamping TPT, untuk Penduduk Usia Kerja (PUK) atau penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, dapat digambarkan bahwa pada tahun 2024, PUK laki-laki lebih besar dari PUK perempuan, dari data Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025, PUK laki-laki sebanyak 201.140 orang dan PUK Perempuan sebanyak 199.950 orang, dengan total 401.090 orang.

Dari sisi Angkatan kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (berusia 15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran, dimana untuk tahun 2024, AK Kabupaten Lima Puluh Kota didominasi oleh laki-laki, dimana AK laki-laki sebanyak 129.777 orang dan AK perempuan sebanyak 99.950 orang dengan total 229,727 orang.

Untuk target TPT tahun 2025, berdasarkan dokumen RKPD 2025, adalah sebesar 3,71%, sementara dalam RPJPD 2025-2045, ditetapkan sebagai basis data, TPT tahun 2025 sebesar 1,32%. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa basis data TPT Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 yang ditetapkan dengan RPJPD ternyata berada dibawah target RKPD 2025, dari sini dapat disimpulkan bahwa akan ada deviasi target yang mesti diwujudkan sebesar 2,39%. Adapun TPT tahun 2026, berdasarkan RPJPD 2025-2045, data target TPT yang diperoleh adalah target tahun 2030 sebesar 1,21%, sehingga dengan proses perataan didapatkan terget TPT tahun 2026 sebesar 1,30%.

c. Tingkat Kemiskinan

Angka Kemiskinan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 6,92%. Dibandingkan tahun 2023, dimana angka kemiskinan sebesar 6,8%, artinya angka kemiskinan di Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,12% pada tahun 2024. Untuk Tahun 2025, pada RKPD 2025, Tingkat Kemiskinan ditargetkan pada angka 6,52%, sementara dalam RPJPD 2025-2045, angka kemiskinan 2025 sebagai basis data RPJPD, ditetapkan sebesar 5,19%-5,88%, sehingga jika dibandingkan antara target tahun 2025 pada RKPD 2025 dengan basis data RPJPD 2025-2045, terdapat deviasi sebesar 0,64% terhadap batas atas basis data RPJPD 2025-2045 (5,88%).

Disamping jumlah atau persentase penduduk miskin yang harus dikendalikan, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan juga harus diperhatikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 0,77, lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat yang P1 nya sebesar 0,74. Artinya, bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota, pada tahun 2024 mempunyai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan lebih panjang dibandingkan dengan Provinsi, sehingga diperlukan usaha yang lebih banyak agar masyarakat miskin bisa diangkat dari bawah garis kemiskinan menjadi di atas garis kemiskinan.

Selanjutnya Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2023, Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) adalah 0,16, sedikit lebih tinggi dari Provinsi, dimana angka P2 nya sebesar 0,15. Artinya, bahwa penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin di Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lebih baik dari Provinsi Sumatera Barat.

d. Rasio Gini

Pendapatan merupakan salah satu ukuran kesejahteraan penduduk, walaupun besarannya relatif. Data pendapatan penduduk didekati dengan data pengeluaran/konsumsi rumah tangga, dengan asumsi pendapatan sama dengan pengeluaran. Data pengeluaran biasanya dikumpulkan tiap tahun lewat Susenas Kor dan Susenas Modul Konsumsi.

Rasio gini mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Semakin kecil nilai Gini Rationya semakin kecil ketimpangannya. Gini Ratio Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 0,22. Jika dibandingkan dengan Nilai Gini Ratio tahun 2023, dimana Gini Ratio sebesar 0,194, terjadi kenaikan sebesar 0,006 persen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2024 ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota naik sebesar 0,006 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk Tahun 2025, berdasarkan RKPD 2025, target Gini Rasio Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 0,207, sementara pada RPJPD 2025-2045, basis data Gini Rasio tahun 2025 adalah sebesar 0,207, artinya target yang ditetapkan untuk tahun 2025 sama dengan basis data RPJPD 2025-2045. Adapun untuk target Gini Rasio tahun 2026, berdasarkan RPJPD 2025-2045 dimana target tahun 2030 sebesar 0,184, sehingga dengan hitungan rata-rata, didapatkan target tahun 2026 adalah sebesar 0,202.

e. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 72,51, meningkat dibandingkan IPM tahun 2023, sebesar 0,46, dimana IPM tahun 2023 adalah sebesar 72,05. Kenaikan IPM ini didorong oleh peningkatan dari seluruh dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Dimensi pendidikan yang mempengaruhi IPM adalah: rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, dan dari dimensi kesehatan adalah angka harapan hidup, serta

dimensi ekonomi adalah pengeluaran perkapita.

Untuk Tahun 2025, target pencapaian IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang dituangkan dalam RKPD 2025 adalah sebesar 71,36, sementara sebagai basis data pada RPJPD 2025-2045, IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 ditetapkan sebesar 72,27. Artinya basis data pada RPJPD 2025-2045 menetapkan angka IPM tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan target IPM pada RKPD 2025, dengan deviasi sebesar 0,91.

Untuk perbandingan dimensi pendidikan (rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah), kesehatan (angka harapan hidup) dan ekonomi (pengeluaran perkapita yang disesuaikan) yang membangun terhadap IPM antara Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dan nasional dapat dilihat pada uraian di bawah ini:

1. Angka Harapan Hidup

Angka harapan hidup Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 73,42, angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2023 yaitu 73,25. Adapun target angka harapan hidup tahun 2025, berdasarkan RKPD 2025 ditargetkan sebesar 70,14, kalau dilihat basis data RPJPD 2025-2045, angka harapan hidup tahun 2025 ditetapkan sebesar 73,59, dimana angka basis 2025 ini berada di atas capaian 2024. Adapun untuk tahun 2026, berdasarkan Target RPJPD 2025-2045, dimana untuk tahun 2030 ditetapkan sebesar 75,29, sehingga dengan proses perataan, didapatkan target tahun 2026 adalah sebesar 73,93.

2. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 adalah sebesar 8,13 tahun, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 yang sebesar 8,12 tahun, ada mengalami sedikit peningkatan, yaitu sebesar 0,01 tahun. Adapun target Tahun 2025, berdasarkan RKPD 2025 rata-rata lama sekolah ditargetkan sebesar 8,44 tahun, sementara basis data RPJPD 2025-2045, angka rata-rata lama sekolah ditetapkan sebesar 8,35 tahun, dimana angka basis data yang ditetapkan kecil dibandingkan dengan target pada RKPD, sehingga harapannya target RKPD tahun 2025 bisa direalisasikan. Untuk tahun 2026, berdasarkan target capaian RPJPD 2025-2045 diperoleh data bahwa target rata-rata lama sekolah tahun 2030 adalah sebesar 9,32 tahun, dengan melakukan perataan, didapatkan target tahun 2026 sebesar 8,54 tahun.

3. Harapan Lama sekolah

Pada tahun 2024, berdasarkan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka Tahun 2025 angka harapan lama sekolah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 13,42 tahun, angka ini sedikit naik dibandingkan dengan angka harapan lama sekolah tahun 2023 yaitu sebesar 13,41 tahun. Jika dilihat dari target RKPD 2025, Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2025 adalah 14,32 tahun, sedangkan basis data RPJPD 2025-2045, tahun 2025 ditetapkan sebesar 13,64 tahun, artinya ada gap sebesar 0,23 tahun antara rencana di RKPD 2025 dengan basis data RPJPD 2025-2045, yang mesti ditutupi.

Untuk mewujudkan target-target ekonomi makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, maka ditetapkanlah tema pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, yaitu “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur untuk Mendukung Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing” dengan merumuskan arah kebijakan Ekonomi sebagai berikut:

1. Optimalisasi potensi ekonomi di sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan peternakan.
2. Peningkatan kapasitas SDM sektor pertanian, pariwisata, perikanan dan peternakan.
3. Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif.
4. Mendorong investasi dan akses permodalan bagi pelaku usaha.
5. Memfasilitasi akses pasar bagi pelaku IKM dan produk unggulan daerah.
6. Membangun destinasi wisata utama dan membuka destinasi-destinasi wisata baru.
7. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian.

Disamping merumuskan arah kebijakan khusus ekonomi, Kabupaten Lima Puluh Kota juga merumuskan kebijakan lain yang mendukung terlaksananya kebijakan ekonomi makro yaitu :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.
2. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan Infrastruktur Ibu Kota Kabupaten.
3. Menjamin stabilitas politik dengan mewujudkan pelaksanaan pilkada Tahun 2024 yang aman dan kondusif.

3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2026 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2021-2026 di tahun keenam, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh pemerintah daerah. Untuk itu, kebutuhan belanja pembangunan daerah selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi RKPD, yang akan selalu berdampingan dengan sumber-sumber pendanaan non APBD, seperti APBN.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan salah satu indikator untuk menganalisis kemampuan keuangan daerah diukur melalui kontribusi realisasi PAD terhadap APBD. Kesenambungan penyelenggaraan pembangunan di masa datang ditentukan oleh bagaimana kemandirian dan kemampuan pembiayaan yang tersedia untuk melaksanakan pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota periode tahun 2020-2024, dapat dilihat pada Tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2 Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024			
Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	DOFD (%)
2020	77.429.483.703,61	1.209.471.396.990,61	6,40
2021	79.852.144.928,96	1.260.792.546.305,96	6,33
2022	82.986.337.456,64	1.225.539.476.814,64	6,77
2023	102.021.562.494,68	1.262.130.918.657,68	8,08
2024	103.887.436.990,99	1.311.095.932.506,99	7,92

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota Tahun 2025

Dari Tabel 3.2 di atas tampak bahwa DOFD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 masih di bawah 10 persen. Angka ini menunjukkan masih sangat rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap realisasi pendapatan daerah. Ini menjadi catatan penting bagi Kabupaten Lima Puluh Kota untuk terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Kemampuan fiskal daerah yang terbatas, menuntut pemerintah daerah merumuskan kebijakan fiskal yang tepat agar dapat mengalokasikan belanja secara cermat sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan wajib dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengamanatkan pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah. Strategi dan sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tahun 2006 telah tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2026.

Merujuk pada KEM PPKF 2026, strategi kebijakan fiskal daerah tahun 2026 antara lain :

- a) Memperkuat ketahanan pangan;
- b) Mendorong ketahanan energi;
- c) Meningkatkan kualitas layanan pendidikan;
- d) Meningkatkan kualitas layanan kesehatan;
- e) Mendukung efektivitas Makan Bergizi Gratis (MBG);
- f) Pembangunan desa, koperasi dan UMKM; dan
- g) Akselerasi investasi

Dalam rangka pelaksanaan strategi kebijakan tersebut, kualitas pengelolaan APBD harus terus ditingkatkan melalui kebijakan Transfer ke daerah berbasis kinerja yang sinergis dan adaptif, optimalisasi PAD, peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan daerah yang semakin kreatif dan inovatif

3.2.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

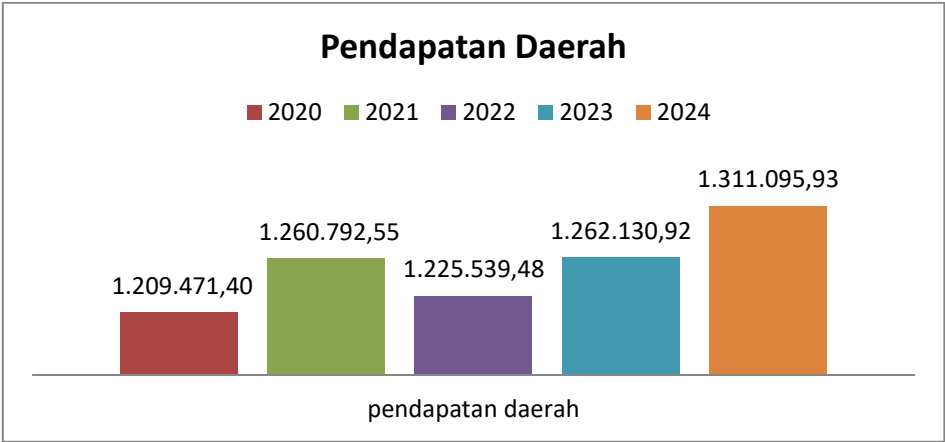
A. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Kabupaten Lima Puluh Kota berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2. Pendapatan Transfer yang meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; dan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah.

Untuk kondisi tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, perkembangan realisasi pendapatan daerah dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.1
Perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024 (dalam juta rupiah)



Sumber: LRA Lima Puluh Kota, Tahun 2020-2024

Realisasi Pendapatan Daerah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 mengalami fluktuasi. Pendapatan tertinggi dicapai pada tahun 2024 dimana pendapatan daerah sebesar Rp 1.311.095,93 juta. Pada tahun 2020 capaian pendapatan daerah berada di titik terendah sebagai dampak pandemi Covid-19. Pendapatan daerah meningkat pada tahun 2021, seiring mulai membaiknya perekonomian daerah. Namun pada tahun 2022 realisasi pendapatan kembali turun menjadi Rp 1.225.539,48 juta. Pada tahun 2023 dan 2024 realisasi pendapatan daerah kembali naik menjadi berturut-turut Rp 1.262.130,92 juta dan Rp 1.311.095,93 juta.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain PAD yang Sah.

- a. Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehingga pajak sifatnya mengikat objek pajak, jika tidak dibayar maka wajib pajak akan menerima sanksi sebagaimana di atur oleh peraturan perundang-undangan. Selain sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*), pajak juga berfungsi sebagai alat pengatur (*regulatory*) untuk berbagai kebijakan daerah.
- b. Retribusi Daerah, merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan sumber PAD yang berasal objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta maupun kelompok masyarakat.
- d. Lain-lain PAD yang Sah merupakan jenis PAD yang disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak, retribusi, maupun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan ini juga merupakan penerimaan

daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah, seperti jasa giro, pendapatan bunga bank atas deposito, pelayanan air minum, pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) serta dana kapitasi jaminan kesehatan nasional (JKN).

Pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah tahun 2020 sampai dengan 2024 menunjukkan fluktuasi. Pendapatan daerah dari sumber ini sebesar Rp. 23.556,95 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 32.888,91 pada tahun 2024. Dengan demikian, dalam periode 2020-2024 terjadi pertumbuhan rata-rata 8,70% per tahun.

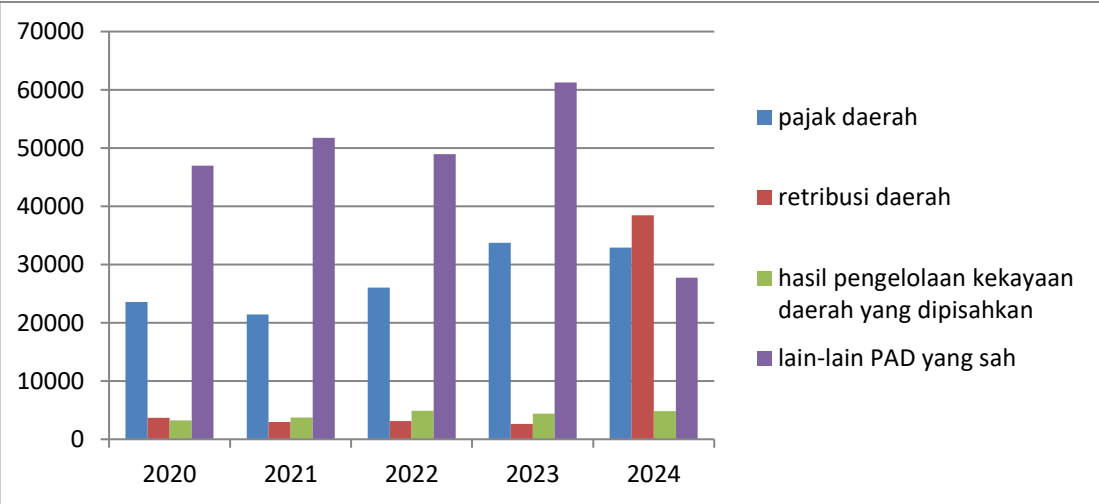
Sama halnya dengan pajak daerah, pendapatan yang berasal Retribusi Daerah juga berfluktuasi. Retribusi Daerah tahun 2020 berjumlah Rp3.691,60 juta. Tahun berikutnya, yaitu Tahun 2021 turun menjadi, Rp 2.975,1 juta. Pada tahun 2022 penerimaan retribusi naik menjadi Rp.3.124,55 juta, untuk kemudian turun lagi menjadi Rp.2.653,76 pada tahun 2023. Pada tahun 2024 pendapatan Retribusi Daerah naik signifikan menjadi Rp 38.434,14. Kenaikan ini berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Dalam kurun waktu 2020-2024 terjadi pertumbuhan rata-rata sebesar 79,63% per tahun.

PAD yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan relatif kecil namun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. PAD dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mengalami peningkatan dari Rp.3.226,73 juta pada Tahun 2020 menjadi Rp.4.828,16 juta tahun 2024. Berarti dalam kurun waktu tersebut terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 10,60%. Sumber utama dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini berasal dari Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat atau lebih dikenal dengan Bank Nagari.

Sedangkan pendapatan yang berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir Lain-lain Pad yang Sah mengalami pertumbuhan negatif dengan nominal sebesar Rp 46.954,16 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 27.736,22 juta pada tahun 2024. Dengan demikian lima tahun terakhir Lain-lani Pendapatan Asli Daerah yang sah tumbuh sebesar -12,32%.

Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 3.2
Realisasi Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (Rp Juta)

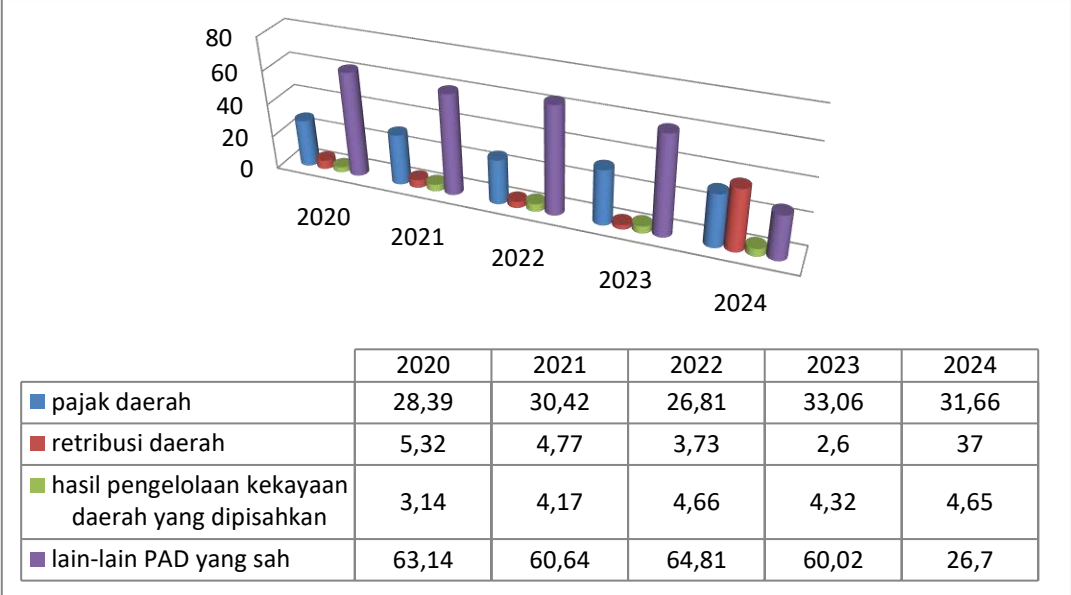


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Ditinjau dari kontribusi dari masing-masing sumber PAD terhadap PAD, diuraikan sebagaimana berikut. Kontribusi terbesar dari komponen Pendapatan Asli Daerah sampai tahun 2020-2023 berasal dari penerimaan Lain-lain PAD yang sah, dimana sumber penerimaan ini menyumbang lebih dari 60 persen dari total PAD. Namun tahun 2024, kontribusi terbesar Pendapatan Asli Daerah berasal dari Retribusi Daerah sebesar 37%. Kenaikan signifikan penerimaan retribusi daerah berasal dari Retribusi pelayanan Kesehatan yang merupakan penerimaan yang bersumber dari BLUD RSUD dan Puskesmas. Penyumbang terbesar kedua terhadap PAD pada tahun 2024 adalah pajak daerah dengan kontribusi sebesar 31,66%. Sedangkan lain-lain PAD yang Sah pada urutan ketiga dengan kontribusi sebesar 26,7%. Terakhir pendapatan yang bersumber dari Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan menyumbang sebesar 4,65% pada tahun 2024.

Perkembangan kontribusi sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 3.3
Kontribusi Sumber Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (%)



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

Analisis perbandingan realisasi dengan anggaran (efektivitas penerimaan) PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota kurang efektif, karena dalam periode tahun 2020-2022 dibawah 90%. Dalam kurun waktu tiga tahun tersebut, efktivitas tertinggi pada tahun 2020 sebesar 89,34 persen. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan efektivitas menjadi sebesar 101,74 persen, Artinya, secara total penerimaan PAD melebihi dari target yang ditetapkan. Pada tahun 2024 efektivitas sedikit turun menjadi 90,90 persen, dengan efektivitas tertinggi pada penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 99,98 persen dan efektivitas terendah penerimaan yang bersumber dari Lain-lain PAD Yang Sah dengan efektivitas 87,00 persen. Perkembangan efektivitas penerimaan PAD dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3.3
Efektivitas Penerimaan PAD Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2020-2024 (%)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN ASLI DAERAH	89,34	71,32	71,80	101,74	90,90
Pendapatan Pajak Daerah	77,90	52,32	56,01	89,27	92,44
Pendapatan Retribusi Daerah	77,02	39,72	40,74	42,91	91,51
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	96,21	93,66	88,20	99,33	99,98
Lain-lain PAD Yang Sah	97,26	86,84	87,57	118,05	87,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer terdiri atas Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer antar Daerah, dimana masing-masingnya diuraikan sebagaimana berikut:

a) Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari: Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, dan Dana Desa, masing-masing diuraikan sebagaimana berikut:

1) Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari APBN/dana pusat yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan terdiri dari Dana Transfer Umum (DTU) dan Dana Transfer Khusus (DTK). Termasuk dalam DTU adalah dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak dan dana alokasi umum (DAU). Sedangkan Dana Transfer Khusus adalah dana alokasi khusus (DAK) yang dibagi atas DAK fisik dan non fisik.

DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH bukan pajak. DBH pajak berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPND), dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Sedangkan DBH bukan pajak atau disebut juga dengan DBH sumber daya alam (SDA) terdiri dari Kehutanan, Pertambangan Umum, Perikanan, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi; dan Pertambangan Panas Bumi.

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Secara nasional Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Netto dan ditetapkan dalam APBN.

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Setiap tahun pemerintah menetapkan jenis DAK sekaligus menetapkan bidang-bidang yang akan dibiayai melalui dana pusat sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun bersangkutan. Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Sedangkan besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Khusus untuk DAK Fisik besarnya ditentukan setelah adanya persetujuan pemerintah atas usulan kegiatan yang diusulkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi Krisna yang dikoordinasikan oleh Bappenas dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait. Perkembangan realisasi dana perimbangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4
Perkembangan Realisasi Dana Perimbangan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata pertumbuhan (%)
Dana Perimbangan	948.966,94	942.371,89	980.520,26	1.010.133,59	1.051.489,43	2,60
Dana Transfer Umum	712.027,72	706.681,46	700.950,81	755.215,49	783.238,68	2,41
Bagi hasil	15.160,74	20.012,59	18.194,63	35.066,01	29.065,60	17,67
Dana Alokasi Umum (DAU)	696.866,98	686.668,87	682.756,18	720.149,48	754.173,08	2,00

Dana Transfer Khusus	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	254.918,10	1,85
Dana Alokasi Khusus (DAK)	236.939,22	235.690,43	279.569,45	254.918,10	254.918,10	1,85

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Dari Tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa realisasi dana perimbangan lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,60%. Pertumbuhan ini bersala dari pertumbuhan Dana Transfer Umum sebesar 2,41% dari sebesar Rp 712.027,72 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 783.238,68 juta pada tahun 2024 serta pertumbuhan Dana Transfer Khusus dari Rp 236.939,22 juta pada tahun 2020 menjadi Rp 254.928,10 pada tahun 2024.

2) Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID)atau yang sekarang disebut Insentif Fiskal adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja tertentu. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima DID sejak tahun 2017 dengan jumlah berfluktuasi. Perkembangan DID dalam kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 3.5. Fluktuasi penerimaan DID sebagaimana tergambar pada tabel 3.5 menunjukkan bahwa penerimaan DID merupakan dana pusat yang sulit diprediksi. Ini disebabkan karena alokasi sumber dana ini bergantung kepada kinerja daerah yang bersangkutan dan kinerja daerah lain karena alokasi menggunakan total kinerja daerah sebagai pembagi.

3) Dana Desa

Dana desa merupakan dana diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Perkembangan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.5. berikut ini:

Tabel 3.5
Perkembangan realisasi Dana Insentif Daerah dan Dana Desa Tahun 2020-2024 (Rp juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan (%)
DID/Insentif Fiskal	250,00	30.442,55		-	-	
Dana desa	77.575,70	81.722,35	74.850,45	83.887,36	84.689,97	2,22

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Berdasarkan data sebagaimana Tabel di atas, dana desa menunjukkan pertumbuhan yang cukup bagus dengan angka pertumbuhan rata-rata 2,22% per tahun.

b) Transfer Antar Daerah

Transfer antar Daerah merupakan dana yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara total Transfer Antar Daerah tumbuh sebesar 9.09 persen per tahun dalam kurun waktu 2020-2024 dari Rp.45.117,45 juta tahun 2020 menjadi Rp. 63.905,44 juta tahun 2024. Perkembangan realisasi pendapatan yang berasal dari transfer antar daerah tergambar pada tabel 3.6 di bawah ini:

Tabel 3.6
Perkembangan Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2020-2024 (Rp juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata pertumbuhan (%)
Transfer antar daerah	45.117,45	56.165,91	72.667,91	57.181,14	63.905,44	9,09
Pendapatan bagi hasill	45.117,45	56.165,91	64.667,91	55.552,29	63.905,44	9,09
Bantuan Keuangan			8.000,00	1.628,85		

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer, yang terdiri atas Hibah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah. Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dapat dilihat pada Tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7
Perkembangan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2020-2024(Rp juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	60.131,83	70.237,69	14.514,51	3.080,01	-
Hibah	10.334,00	13.091,61	14.474,51	3.080,01	-
BOS	49.797,83	53.475,19	-	-	-
Pendapatan atas pengembalian hibah	-	3.670,89	40,00	40,00	-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Sampai tahun 2021, dana BOS dicatat pada akun Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sejak tahun 2022 pencatatan BOS pada DAK Non Fisik sehingga masuk kategori Dana Perimbangan, sehingga sejak tahun 2022 penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah relatif berkurang. Namun di tahun 2024, tidak ada realisasi dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

B. Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan 4 kelompok, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Oleh sebab itu, analisis kinerja pengelolaan belanja didasarkan kepada klasifikasi tersebut. Untuk memahami kinerja Belanja Daerah dan kontribusinya perlu disajikan perkembangan, pertumbuhan rata-rata pertahun masing-masing jenis Belanja Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tersebut.

Realisasi Belanja Operasi dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Belanja Operasi tahun 2020 sebesar Rp.874.999,82 juta, naik menjadi Rp.918.683,99 juta pada tahun 2021. Tahun 2022 belanja operasi naik lagi menjadi Rp.921.225,90 juta. Pada tahun 2023 belanja operasi turun menjadi Rp. 885.101,85. Penurunan belanja operasi ini disebabkan berkurangnya anggaran pada belanja pegawai dan belanja barang dan jasa karena kondisi keuangan daerah. Pada tahun 2024 Belanja operasi naik cukup signifikan menjadi Rp 1.012.245,96 juta. Secara rata-rata, dalam lima tahun terakhir belanja operasi mengalami pertumbuhan sebesar 3,71% per tahun.

Belanja modal menunjukkan besaran yang terus berkurang dengan nilai Rp. 152.712,09 juta pada tahun 2020 menjadi Rp. 116.565,58 juta pada tahun 2024 dengan rata-rata pertumbuhan minus 6,53 persen. Belanja Tak Terduga menunjukkan pertumbuhan negatif sebesar minus 49,21 persen dengan nilai Rp.36.111,74 juta tahun 2020 menjadi Rp.2.402,55 juta pada tahun 2024. Sedangkan Belanja Transfer menunjukkan besaran per tahun yang berfluktuasi. Namun dalam lima tahun terakhir belanja transfer mempunyai pertumbuhan rata-rata sebesar 2,12 persen dengan nilai Rp. 153.293,93 juta pada tahun 2020 menjadi Rp.166.735,51 pada tahun 2024.

Perkembangan realisasi Belanja Daerah berdasarkan klasifikasi Belanja Daerah dalam Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.8
Realisasi Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024 (Rp. juta)

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata Pertumbuhan
Belanja						
Belanja Operasi	874.999,82	918.683,99	921.225,90	885.101,85	1.012.245,96	3,71
Belanja Pegawai	614.520,24	648.801,43	643.786,70	625.076,11	757.173,81	5,36
Belanja Barang dan Jasa	209.732,77	265.227,16	239.491,48	210.101,44	206.209,54	-0,42
Belanja Hibah	47.055,18	34.067,82	31.416,71	45.239,12	41.486,03	-3,10

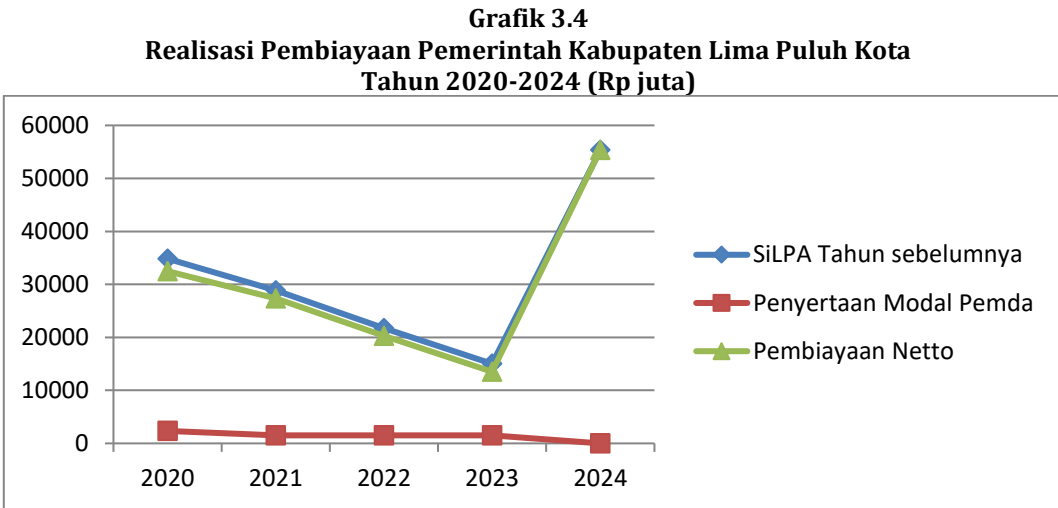
Belanja Bantuan Sosial	3.691,63	8.605,10	6.531,01	4.685,18	7.376,58	18,89
Belanja Modal	152.712,09	141.199,55	149.956,37	124.599,67	116.565,58	-6,53
Belanja Tak Terduga	36.111,74	776,54	708,97	1.697,29	2.402,55	-49,21
Belanja Transfer	153.293,93	161.270,96	158.703,49	162.095,52	166.735,51	2,12

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan dikelompokkan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sehingga selisihnya akan menghasilkkan Pembiayaan Netto. Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota selama periode Tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari Rp.32.493,99 juta tahun 2020 menjadi Rp.55.365,91 juta tahun 2024.

Penerimaan Pembiayaan berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Pengeluaran Pembiayaan berupa Penyertaan Modal pada BUMD. Pada tahun 2024 tidak ada pengeluaran pembiayaan karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Perkembangan realisasi pembiayaan ini dapat dilihat pada grafik berikut ini:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Lima Puluh Kota, Tahun 2025

3.2.2. Neraca Daerah

Neraca menggambarkan tentang aset, kewajiban, dan ekuitas yang dimiliki oleh suatu organisasi, termasuk organisasi pemerintah daerah. Secara umum, transaksi yang mempengaruhi neraca daerah adalah transaksi yang berasal dari belanja modal dan pembiayaan. Jika ada belanja modal maka terjadi peningkatan aset tetap. Sedangkan jika ada pengeluaran pembiayaan maka terjadi peningkatan investasi jangka panjang, pembentukan dana cadangan dan atau penurunan kewajiban. Jika ada penerimaan pembiayaan maka perhitungan anggaran dan atau kenaikan kewajiban.

Secara keseluruhan Total Aset atau Total Kewajiban dan Ekuitas Dana mengalami peningkatan dari Rp.1.744.237,074 juta tahun 2020 menjadi Rp.1.903.991,66 juta tahun 2024, sehingga pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 2,22%. Kecuali aset lainnya, semua jenis aset menunjukkan pertumbuhan positif dalam lima tahun terakhir.

Dari 4 kelompok aset Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota tersebut, pertumbuhan jumlah aset tetap lebih tinggi dibandingkan kelompok aset lainnya. Pertumbuhan rata-rata per tahun aset tetap adalah 2,30%, yaitu dari Rp.1.617.261,31 juta juta tahun 2020 menjadi Rp.1.771.012,98 juta tahun 2024. Pertumbuhan rata-rata pertahun tertinggi kedua adalah aset lancar dengan tingkat pertumbuhan sebesar 1,73%, yaitu dari Rp.66.727,36 juta tahun 2020 menjadi Rp.71.478,90 juta tahun 2024. Investasi Jangka Panjang tumbuh tidak signifikan sebesar berturut-turut 0,85%, sementara aset lainnya mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,24%.

Jumlah aset harus sama dengan jumlah kewajiban dan ekuitas. Oleh sebab itu, pertumbuhan jumlah aset harus sama dengan pertumbuhan jumlah kewajiban dan ekuitas. Tabel berikut menyajikan perkembangan jumlah pos-pos neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun.

Tabel 3.9
Perkembangan Jumlah Pos-Pos Neraca Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Pertahun Tahun 2020-2024 (Rp juta)

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
A	ASET						
a.	ASET LANCAR	66.727,36	58.285,85	48.485,24	105.467,11	71.478,70	1,73
b.	Investasi Jangka Panjang	50.254,02	55.190,86	544964,27	54.088,79	51.989,89	0,85
c.	ASET TETAP	1.617.261,31	1.641.412,96	1.675.294,44	1.659.564,99	1.771.012,98	2,30
c.	ASET LAINNYA	9.995,04,00	13.077,08	11.750,58	11.956,02	9.510,09	-24
	JUMLAH ASET DAERAH	1.744.237,73	1.767.966,76	1.790.494,54	1.831.076,92	1.903.991,66	2,22
B	KEWAJIBAN	2.086,80	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,00	88,1 3
a.	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,086,80	12.691,34	40.546,42	10.364,00	26.140,00	88,1 3
b.	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-				
C	EKUITAS DANA	1.742.150.94,00	1.755.275,42	1.749.948,11	1.820.712,91	1.877.851,66	1,89
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	1.744.237,74	1.767.966,76	1.790.494,54	1.831.076,92	1.903.991,66	2,22

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Untuk memahami kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio keuangan. Ada 2 macam analisis rasio keuangan yang dapat digunakan, meliputi rasio likuiditas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas

Rasio Likuiditas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya pada saat jatuh tempo. Semakin tinggi rasio likuiditas berarti semakin tinggi kemampuan organisasi dalam melunasi hutangnya. Analisis rasio likuiditas dapat dilakukan berdasarkan rasio lancar dan rasio quick. Kedua rasio sama-sama bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam membayar hutang lancarnya pada saat jatuh tempo.

2. Rasio Solvabilitas

Analisis solvabilitas bertujuan untuk melihat kemampuan organisasi dalam melunasi seluruh hutangnya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Analisis solvabilitas ini secara tidak langsung juga dapat dilakukan melalui rasio leverage, dimana rasio leverage ini bertujuan untuk melihat sejauh mana organisasi menggunakan dana pinjaman (hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang) dalam menjalankan roda organisasinya. Analisis rasio solvabilitas dapat dihitung berdasarkan perbandingan total hutang dengan total aset, dan atau total hutang dengan modal. Kedua rasio ini sama-sama bertujuan untuk menilai kemampuan pemerintah daerah dalam melunasi seluruh kewajibannya seandainya seluruh aset dan atau modal digunakan.

Rasio likuiditas dan rasio solvabilitas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada Tabel 3.10 berikut:

Tabel 3.10
Rasio Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
	RASIO LIKUIDITAS					
1	Rasio lancar (<i>Current Ratio</i>) = <i>Aset lancar/Hhutang lancar (jk Pendek)</i>	40,82	4,59	1,19	10,42	2,73
2	Rasio cepat (<i>Quick Ratio</i>) = <i>(Aset lancar-persediaan)/hhutang lancar</i>	33,56	3,41	0,86	8.92	2,11
	RASIO SOLVABILITAS					
3	Rasio total hhutang terhadap total aset	0,001	0,007	0,023	0,005	0,013

4	Rasio hhutang terhadap modal	0,001	0,007	0,023	0,005	0.013

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

Tabel 3.10 memperlihatkan beberapa rasio kualitas pengelolaan keuangan daerah. Rasio likuiditas terdiri dari rasio lancar (Current Ratio) dan rasio cepat (Quick Ratio) memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah dalam membayar kewajiban jangka pendek. Rasio lancar pada tahun 2020 sebesar 40,82 turun menjadi 2,73 pada tahun 2024. Ini berarti pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek sebanyak 2,73 kali. Hal yang sama juga terjadi pada Rasio cepat (Quick ratio). Rasio ini turun dari 33,56 pada tahun 2020 menjadi 2,11 pada tahun 2024. Jika nilai rasio likuiditas lebih dari satu, menunjukkan daerah mempunyai kemampuan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset likuid. Dapat dilihat pada tahun 2024 rasio likuiditas pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota cukup baik.

Rasio solvabilitas yang diukur dengan rasio total hhutang terhadap total aset memperlihatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membayar kewajiban baik itu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang dengan total aset yang dimiliki. Dapat dilihat, rasio total hutang terhadap ekuitas dan atau total aset sampai tahun 2024 kurang dari 1% kecuali pada tahun 2022 sebesar 2,3% dan pada tahun 2024 sebesar 1,3%. Angka tersebut menunjukkan persentase hutang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap jumlah aset atau ekuitas. Nilai rasio ini masih cukup aman, ini menunjukkan kemampuan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang cukup baik dalam melunasi seluruh hutangnya.

3.2.3. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan dan urusan bersama. Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026.

A. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Untuk pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah 3) Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang antara lain terdiri dari pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan pendapatan lainnya. Selanjutnya untuk pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).

Perencanaan pendapatan daerah pada Tahun 2024 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- 1) Proyeksi Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer pada tahun 2024 diproyeksi sama dengan tahun sebelumnya.

Berdasarkan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka rincian atas Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 s/d Tahun 2027 dapat dilihat pada Tabel 3.11. Untuk mewujudkan peningkatan Pendapatan Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, dilakukan Strategi dan Kebijakan sebagai berikut:

Strategi

1. Meningkatkan penerimaan pajak daerah dengan meminimalisir kebocoran
2. Peningkatan basis data perpajakan
3. Memperluas basis penerimaan retribusi daerah
4. Melakukan efisiensi pemungutan
5. Meningkatkan penerimaan dengan memperbaiki perencanaan
6. Meningkatkan pengawasan dan sinergisitas dengan instansi terkait
7. Melakukan penyesuaian tarif berdasarkan perkembangan dan ketentuan perundang-undangan yang terbaru

Kebijakan

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pendapatan melalui perbaikan system dan prosedur antara lain dengan pengembangan sistem pembayaran pajak dan retribusi secara online.
2. Melakukan pengembangan pengawasan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah (Tapping Box/CCTV/Cash Register Online/e-money), kalau memungkinkan melibatkan pihak kepolisian/TNI untuk pengawasan retribusi tempat rekreasi dan pariwisata.
3. Melakukan Pemantauan wajib pajak secara silent operation.
4. Melakukan Penegakan Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama OPD terkait dan Aparat Penegak Hukum.
5. Memberikan reward dan punishment kepada petugas pajak dan wajib pajak.
6. Melakukan koordinasi dan bersinergi dengan Provinsi Sumbar dalam rangka optimalisasi opsen PKB dan BBNKB serta optimalisasi penerimaan pajak MBLB.
7. Melakukan pemutakhiran Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
8. Penetapan tarif PBB P2 lebih rendah untuk lahan produksi pangan daripada tarif untuk lahan lainnya
9. Mengefektifkan sosialisasi tentang pajak daerah melalui pamflet dan banner yang dipajang di setiap Kantor Wali Nagari.

Tabel 3.11
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi		Target 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027
	2023	2024			
PENDAPATAN	1.262.125.884.491,68	1.311.095.932.506,99	1.357.905.038.595,00	1.360.521.575.144,00	1.374.843.517.917,00
Pendapatan Asli Daerah	102.016.528.328,68	103.887.436.990,99	137.846.254.440,00	140.462.790.989,00	154.784.733.762,00
a. Pajak Daerah	33.726.801.369,44	32.888.914.143,00	61.932.116.163,00	62.453.461.306,00	68.698.807.437,00
b. Retribusi Daerah	2.653.763.935,50	38.434.136.973,00	40.316.844.857,00	41.051.601.755,00	45.156.761.930,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg dipisahkan	4.409.098.147,00	4.828.157.875,00	4.659.098.147,00	5.513.273.477,00	6.340.264.499,00
d. Lain-lain PAD	61.226.864.876,74	27.736.227.999,99	30.938.195.27300	31.444.454.451,00	34.588.899.896,00
Pendapatan Transfer	1.157.029.256.763,00	1.207.208.495.516,00	1.220.058.784.155,00	1.220.058.784.155,00	1.220.058.784.155,00
a. Transfer Pemerintah Pusat	1.099.848.116.525,00	1.143.303.052.012,00	1.176.167.519,00	1.176.167.519,00	1.176.167.519,00
1. Dana Perimbangan	1.010.133.587.525,00	1.051.489.428.012,00	1.089.537.980.000,00	1.089.537.980.000,00	1.089.537.980.000,00
a) Dana Transfer Umum	700.950.811.428,00	700.950.811.428,00	803.610.829.000,00	803.610.829.000,00	803.610.829.000,00
1) DBH	35.066.007.971,00	29.065.598.000,00	27.382.245.000,00	27.382.245.000,00	27.382.245.000,00
2) DAU	720.149.476.100,00	754.173.082.348,00	776.228.584.000,00	776.228.584.000,00	776.228.584.000,00

Uraian	Realisasi		Target 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027
	2023	2024			
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaanya		625.809.097.000,00	629.953.136.000,00	629.953.136.000,00	629.953.136.000,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya		128.363.985.348,00	146.275.448.000,00	146.275.448.000,00	146.275.448.000,00
b) Dana Transfer Khusus	279.569.451.384,00	268.250.747.664,00	285.927.151.000,00	285.927.151.000,00	285.927.151.000,00
1) DAK Fisik		43.139.289.223,00	50.443.326.000,00	50.443.326.000,00	50.443.326.000,00
2) DAK Non Fisisk		225.111.458.441,00	235.483.825.000,00	235.483.825.000,00	235.483.825.000,00
2. Dana Desa	74.850.449.000,00	84.689.970.000,00	86.629.539.000,00	86.629.539.000,00	86.629.539.000,00
3. Insentif fiskal		7.123.654.000,	-	-	-
b.Transfer Antar Daerah	72.667.913.776,00	63.905.443.504,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00
Pendapatan Bagi Hasil	64.667.913.776,00	63.905.443.504,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00	43.891.265.155,00
Bantuan Keuangan	8.000.000.000,00	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	14.514.513.770,00	-	-	-	-
Hibah	14.474.513.770,00	-	-	-	-
Bantuan Operasional Sekolah	-	-	-	-	-
Pendapatan atas pengembalian hibah	40.000.000,00	-	-		

B. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer, dimana semuanya diarahkan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, untuk melihat gambaran dari belanja Daerah dari Tahun 2021 sampai dengan proyeksi Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.12.

Sebagaimana diuraikan di atas dan dengan mempertimbangkan kondisi pendapatan serta dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Peningkatan alokasi belanja fungsi ekonomi dalam mengembangkan hilirisasi produk pertanian
3. Meningkatkan belanja infrastruktur untuk peningkatan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta mengalokasikan earmarking opsen Pajak Kendaraan bermotor sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Mengalokasikan belanja untuk peningkatan kapasitas tenaga kerja
5. Mengalokasikan belanja untuk mendukung pembinaan kelembagaan dan penguatan SDM desa serta penyediaan infrastruktur dasar dalam rangka mendukung pengembangan desa mandiri.
6. Mengalokasikan belanja untuk infrastruktur akses layanan kesehatan dasar dengan meningkatkan kapasitas puskesmas, posyandu dan rumah sakit daerah serta mendukung program kesehatan preventif seperti imunisasi dan pemberantasan penyakit menular.
7. Mengalokasikan belanja untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan vokasi, pengembangan UMKM dan infrastruktur layanan dasar untuk meningkatkan kualitas kesempatan kerja dan menekan angka pengangguran.
8. Mengalokasikan belanja untuk memastikan ketertiban dan keamanan masyarakat melalui peningkatan Penerangan jalan Umum (PJU), pengelolaan sistem dan mitigasi bencana serta kerja sama dengan aparat penegak hukum.
9. Menjaga kepatuhan pemenuhan kewajiban earmarking pajak rokok untuk dukungan pembayaran PBI untuk mengurangi beban masyarakat
10. Penguatan belanja untuk perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian dan perikanan.
11. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar pendidikan dan mempertahankan kinerja layanan dasar pendidikan
12. Memprioritaskan belanja daerah dan pemanfaatan Transfer ke Daerah untuk penyediaan layanan dasar kesehatan dengan peningkatan kualitas kesehatan untuk penanganan stunting, imunisasi dasar lengkap serta penguatan layanan kesehatan.
13. Mengalokasikan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung peningkatan pendapatan daerah.
14. Memenuhi mandatory spending sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
15. Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Mengalokasikan belanja pemenuhan target Standar Pelayanan Minimum.

Tabel 3.12
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2023-2027

Uraian	Realisasi		Target 2025	PROYEKSI	PROYEKSI
	2023	2024		2026	2027
BELANJA	1.217.754.255.709,37	1.297.949.602.220,13	1.379.588.285.556,00	1.360.521.575.144,00	1.374.843.517.917,00
a. Belanja Operasi	924.052.206.322,37	1.012.245.957.802,13	1.062.469.226.205,00	1.023.709.774.427,00	964.947.947.062,00
1. Belanja Pegawai	629.197.295.328,90	757.173.806.009,34	794.085.945.585,00	807.157.081.490,00	707.157.081.489,00
2. Belanja Barang dan Jasa	235.485.410.876,47	206.209.541.333,79	240.110.907.143,00	189.552.692.938,00	230.790.865.573,00
3. Belanja Bunga	-	-	-	-	-
4. Belanja Hibah	54.684.322.635,00	41.486.034.642,00	25.947.023.477,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
5. Belanja Bantuan Sosial	4.685.177.482,00	7.376.575.817,00	2.325.350.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
b. Belanja Modal	129.909.236.428,00	116.565.581.127,00	140.954.469.735,00	160.606.482.611,00	233.690.252.750,00
Belanja Modal Tanah	3.574.816.620,00	157.817.558,00	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.068.218.560,00	31.338.591.004,00	33.670.553.268,00	25.000.000.000,00	45.000.000.000,00
Belanja Modal Bangunan Gedung	41.443.308.419,00	45.086.271.445,00	33.521.971.666,00	40.000.000.000,00	70.000.000.000,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.681.000.464,00	38.019.493.475,00	59.999.513.700,00	81.817.051.511,00	98.640.252.750,00
Belanja Moda Aset Tetap Lainnya	4.141.892.365,00	1.963.407.645,00	13.739.431.101,00	13.739.431.101,00	20.000.000.000,00
Belanja Moda Aset Lainnya	-	-	23.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
c. Belanja Tidak Terduga	1.697.290.835,00	2.402.553.872,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
d. Belanja Transfer	162.095.522.124,00	166.735.509.419,00	173.664.589.616,00	173.705.318.105,00	173.705.318.105,00
1. Belanja Bagi Hasil	4.218.163.061,00	3.707.411.919,00	6.706.029.116,00	6.714.696.205,60	6.714.696.205,00
2. Belanja Bantuan Keuangan	157.877.359.063,00	163.028.097.500,00	166.958.560.500,00	166.990.621.900,00	166.990.621.900,00

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Tahun 2025

C. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembiayaan itu terdiri dari 2 komponen yaitu komponen penerimaan dan komponen pengeluaran. Dengan demikian, kebijakan pembiayaan daerah juga ditinjau dari dua komponen pembiayaan tersebut.

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan pembiayaan daerah dari sisi penerimaan mencakup beberapa kebijakan, antara lain: kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Dan sesuai dengan sifatnya, penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran pemerintah daerah atau merupakan suatu penerimaan yang akan dibayar kembali dimana sumbernya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Untuk kepentingan penyusunan RKPD tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menggambarkan perencanaan pengeluaran pembiayaan pada tahun anggaran 2023 untuk penyertaan Modal sebesar Rp.1.500.000.000,00,-, hal ini dilakukan untuk meningkatkan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) dari kepemilikan saham di Bank Nagari Sumatera Barat, sementara untuk Tahun 2024 dan Tahun 2025 tidak ada dianggarkan. Adapun terkait dengan pembiayaan secara keseluruhan, untuk Tahun 2023 realisasi dari jumlah penerimaan pembiayaan sebesar Rp.15.213.452.902,00,- dan Tahun 2024 dengan realisasi sebesar Rp.55.365.911.950,89,-

Adapun untuk target untuk Tahun 2026 dan proyeksi di Tahun 2027, baik untuk penyertaan modal maupun untuk jumlah penerimaan pembiayaan direncanakan 0 (nol), artinya struktur APBD direncanakan berimbang tanpa adanya defisit anggaran.

Untuk melihat realisasi, target, dan proyeksi pembiayaan tahun 2023 sampai dengan tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13
Tabel Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah tahun 2023-2027

No	Uraian	Jumlah (Rp.)				
		Realisasi		Target	Target	Proyeksi
		2023	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	15.213.452.902,00	55.365.911.950,89	21.683.246.961,00	-	-
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3.1.3	Hasill penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-	-	-
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	-	-	-	-
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman	-	-	-	-	-
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	15.213.452.902,00	55.365.911.950,89	21.683.246.961,00	-	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	-	-
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	1.500.000.000,00	-	-	-	-
3.2.3	Pembayaran pokok hutang	-	-	-	-	-
3.2.4	Pemberian pinjaman daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	-	-	-

	Jumlah Pembiayaan Netto	13.713.452.902,00	55.365.911.950,89	21.683.246.961,00	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2025

Pada Tahun 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tidak lagi melakukan penganggaran berimbang dimana total belanja diproyeksi sama dengan total pendapatan. Sehingga SILPA tahun sebelumnya diproyeksi nol, sehingga penerimaan pembiayaan nol. Pembiayaan bersih juga nol, karena dengan keterbatasan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah Daerah tidak merencanakan anggaran untuk pengeluaran pembiayaan.

3.2.4. Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2024 Tentang Peta kapasitas Fiskal Daerah, yang dimaksud dengan Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu dan pengeluaran pembiayaan tertentu.

Berdasarkan definisi diatas, perhitungan kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 3.14

Tabel 3.14
Kapasitas Fiskal Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Uraian	2026
I	Proyeksi Capaian Pendapatan Daerah	1.360.521.575.144,00
II	Penerimaan pembiayaan tertentu	-
	SILPA tahun sebelumnya	-
	Total Pendapatan + Pembiayaan Tertentu	1.360.521.575.144,00
III	Pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya	-
	Belanja Otonomi Khusus	-
IV	Belanja Tertentu	980.862.399.595,00
a	Belanja Pegawai	807.157.081.490,00
b	Belanja bunga	-
g	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota & Pemerintahan Desa	6.714.696.206,00
h	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik	166.990.621.900,00
V	Pengeluaran pembiayaan tertentu	-
	Pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah	-
	Kapasitas Fiskal Daerah	379.659.175.549,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2025

Selanjutnya berdasarkan pasal 7 PMK Nomor 65 tahun 2024, dapat dihitung Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{RKFD} &= \frac{\text{KFD}}{\text{Belanja Pegawai}} \\
 &= \frac{379.659.175.549,00}{807.157.081.490,00} \\
 &= \mathbf{0,470}
 \end{aligned}$$

Nilai RKFD Kabupaten Lima Puluh Kota lebih rendah dari 0,905, artinya Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dikelompokkan dalam kategori Sangat Rendah.

Secara umum gambaran pendapatan, pembiayaan dan belanja pada tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.15
Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2026

No	Uraian	2026
4	PENDAPATAN	1.360.521.575.144
4.1	Pendapatan Asli Daerah	140.462.790.989
4.1.01	Pajak Daerah	62.453.461.306
4.1.02	Retribusi Daerah	41.051.601.755
4.1.03	Hasill Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.513.273.477
4.1.04	Lain-lain PAD	31.444.454.451
4.2	Pendapatan Transfer	1.220.058.784.155
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.167.519.000
4.2.01.05	Dana Desa	86.629.539.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasill	27.382.245.000
4.2.01.07.01	DBH Pajak	8.462.969.000
4.2.01.07.02	DBH SDA	16.702.934.000
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.216.342.000
4.2.01.08	DAU	776.228.584.000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	629.953.136.000
4.2.01.08.02	DAU Ditentukan Penggunaannya	110.495.996.000
4.2.01.08.02.0001	DAU Dukungan Pendanaan P3K	13.938.826.000
4.2.01.08.02.0002	DAU Ditentukan Bidang Pendidikan	67.320.090.000
4.2.01.08.02.0003	DAU Ditentukan Bidang Kesehatan	29.237.080.000
4.2.01.08.02.0004	DAU Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	35.779.452.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	285.927.151.000
4.2.01.09.01	DAK Fisik	50.443.326.000
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	235.483.825.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.891.265.155,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasill	43.891.265.155,00
5	BELANJA	1.360.521.575.144
5.1	Belanja Operasi	1.023.709.774.427
5.1.01	Belanja Pegawai	807.157.081.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.552.692.938
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000
5.2	Belanja Modal	160.606.482.611
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	81.817.051.510
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.739.431.101
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	173.705.318.105,00
5.4.01	Belanja Bagi hasill	6.714.696.205,00

5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.990.621.900,00
	Surplus(deisit)	0,00
	PEMBIAYAAN	0
	Penerimaan pembiayaan	0
	Pengeluaran pembiayaan	0

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2025

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2026 dilakukan berdasarkan pada analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan serta memperhatikan arahan Bupati dan Wakil Bupati.

Selain itu, penyusunan sasaran dan prioritas pembangunan daerah juga memperhatikan usulan-usulan Perangkat Daerah berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun sebelumnya dengan memperhatikan:

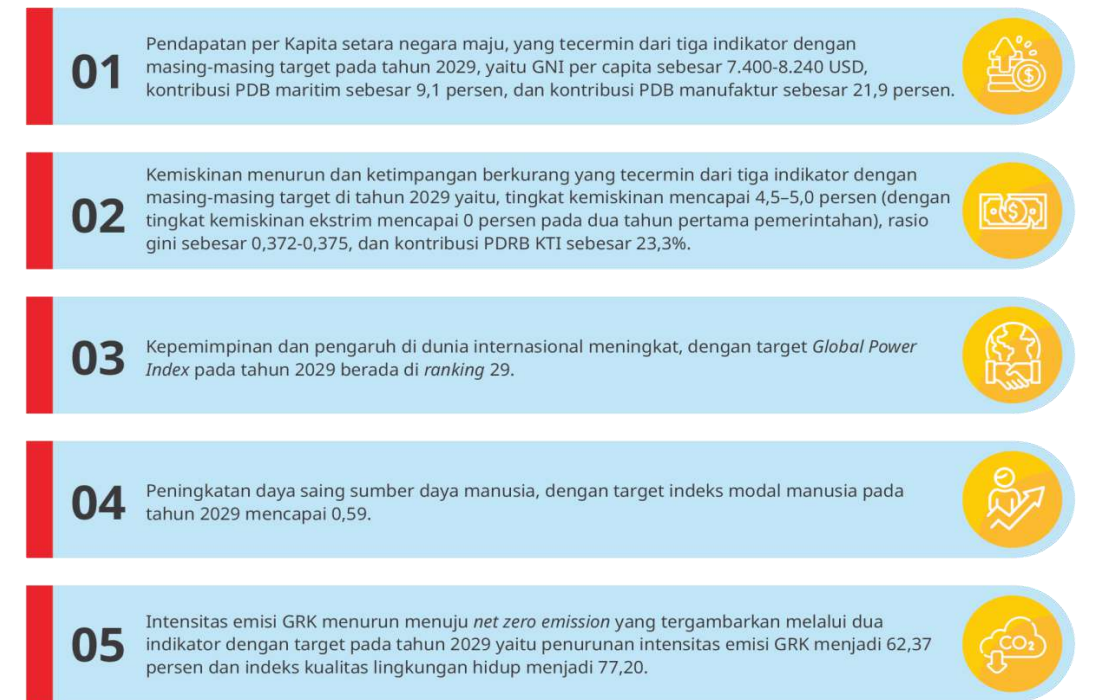
1. Pencapaian terhadap target Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada 6 Bidang yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sosial.
2. Permasalahan dan isu strategis Nasional dan Provinsi yang terkait dengan permasalahan dan isu strategis kabupaten, seperti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia, Layanan infrastruktur dasar yang masih terbatas dan belum menyeluruh. Daya saing, nilai tambah dan produktifitas UMKM dan kegiatan pariwisata relatif rendah dan daya saing dan nilai tambah komoditas unggulan pertanian dan perkebunan relative rendah.
3. Keterkaitan terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan sesuai dengan misi RPJMD yang di fokuskan pada pengembangan sumber daya manusia, infrastruktur dan lingkungan hidup, ekonomi makro dan optimalisasi kelembagaan dan tata Kelola pemerintahan.
4. Upaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan stabil, dengan tetap difokuskan pada sektor utama distribusi PDRB di Lima Puluh Kota, yakni sektor pertanian, industri pengolahan dan perdagangan serta pariwisata.
5. Keterkaitan terhadap isu strategis daerah dan isu sektoral.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026

4.1.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan, ditetapkan **tema RKP Tahun 2026** adalah: **"Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi yang Produktif dan Inklusif"**

Merujuk pada RPJMN, sasaran utama pembangunan nasional RPJMN Tahun 2025–2029 ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung pencapaian sasaran RPJPN Tahun 2025–2029. Agar kinerja pembangunan menjadi terukur, ditetapkan target 2029 untuk setiap sasaran utama pembangunan nasional sebagai berikut:



Untuk mewujudkan sasaran utama pembangunan tersebut maka ditetapkan tiga sasaran yang akan menjadi fokus utama untuk dicapai, yang pencapaiannya dapat mengakselerasi pencapaian sasaran utama pembangunan yang lainnya. Sasaran utama pembangunan tersebut adalah: pertumbuhan ekonomi mencapai 8 persen; menurunnya tingkat kemiskinan 4,5–5,0 persen (tingkat kemiskinan ekstrim 0 persen di tahun kedua), dan indeks modal manusia mencapai 0,59.

Adapun target dari sasaran utama pembangunan nasional untuk Tahun 2026 yang ditetapkan dalam RKP 2026, masing-masingnya sebesar: pertumbuhan ekonomi berkisar (5,8-6,3) persen; tingkat kemiskinan (6,5-7,5) persen (tingkat kemiskinan ekstrim 0 persen), dan indeks modal manusia mencapai 0,57.

Untuk membangun fondasi yang kuat dalam merealisasikan sasaran pembangunan nasional, disusun Program Hasil Terbaik Cepat (*Quick Wins*) yang mampu menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur.

- 

01 Memberi makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
- 

02 Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap.
- 

03 Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
- 

04 Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
- 

05 Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
- 

06 Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara.
- 

07 Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
- 

08 Mendirikan Badan Penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

4.1.2. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 telah menetapkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 yaitu:

“Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan”

Dalam mewujudkan Visi tersebut juga telah ditetapkan Misi, tujuan dan sasaran untuk pelaksanaan masing-masing misi yang diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Hubungan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 1: PENDIDIKAN MERATA, KESEHATAN BERKUALITAS	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia
		Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
Misi 2: LUMBUNG PANGAN NASIONAL DAN EKONOMI BERKELANJUTAN	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan keberlanjutan
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
Misi 3: NAGARI/DESA SEBAGAI BASIS KEMAJUAN	Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal
		Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan
Misi 4: SUMATERA BARAT PUSAT PERDAGANGAN DAN BISNIS SUMATERA BAGIAN BARAT	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
		Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
		Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil- menengah sebagai pilar ekonomi daerah
Misi 5: MEMBANGUN INFRASTRUKTUR BERKEADILAN DAN SIAP TANGGAP BENCANA	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
		Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
		Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
Misi 6: MEMBANGUN KEHIDUPAN BERADAT DAN BERBUDAYA BERBASIS AGAMA, KEARIFAN LOKAL MELALUI DUKUNGAN KELUARGA YANG BERKUALITAS	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
		Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender
		Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas

VISI		
Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Maju & Berkeadilan		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Misi 7: TINGKATKAN DAYA SAING PARIWISATA DAN AKSELERASI EKONOMI KREATIF UNTUK UMKM	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM
Misi 8: TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERSIH DAN PELAYANAN PUBLIK YANG EFEKTIF	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif.	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
		Meningkatnya kualitas layanan publik dan kinerja keuangan daerah

Sumber : RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional dan Sumatera Barat serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengusung Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 yakni: **“Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**

Adapun penjelasan Tema Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Perkuatan Fondasi
Dimaksudkan untuk memperbaiki dan memperkuat dasar-dasar yang menjadi landasan pengembangan sektor strategis, seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM). Upaya ini diharapkan dapat menyediakan basis yang kokoh untuk mendukung pelaksanaan program dan inisiatif pembangunan di sektor-sektor utama.
2. Transformasi Sektor Strategis
Mengubah dan memodernisasi sektor-sektor kunci perekonomian yang memiliki dampak besar terhadap pembangunan nasional atau daerah. Seperti halnya sektor pertanian dan perikanan yang diitransformasikan dengan pendekatan berbasis teknologi (pertanian cerdas atau smart farming). Sektor pariwisata yang dikembangkan ke arah berbasis ekowisata dan budaya lokal. Sektor industri Kecil/UMKM yang diarahkan pada penguatan industri kecil/UMKM berbasis nilai tambah lokal dan ramah lingkungan. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya saing sektor-sektor tersebut di tingkat nasional maupun internasional sekaligus memastikan bahwa sektor tersebut memberikan manfaat luas kepada masyarakat.
3. Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif
Pertumbuhan ekonomi yang memberikan manfaat secara merata kepada seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan, seperti masyarakat miskin, perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya sehingga dapat mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi dan memastikan setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap peluang dan hasil pembangunan.
4. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan
Pembangunan yang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan, keseimbangan sosial, dan kesinambungan ekonomi jangka panjang.
 - Aspek kelestarian lingkungan : Mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem melalui pendekatan ramah lingkungan (*green economy*).
 - Aspek sosial: Menjaga stabilitas dan harmoni sosial melalui pemerataan manfaat pembangunan.
 - Aspek ekonomi: Mengembangkan model bisnis dan kebijakan yang mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan yang tidak hanya menguntungkan saat ini tetapi juga menjamin keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanat pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Provinsi Sumatera Barat tahun 2026, diuraikan sebagaimana berikut: Tingkat pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 5,2-5,7%, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,16- 5,69%, Indeks Pembangunan Manusia ditargetkan sebesar 77,48, tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 4,39- 5,39%, dan Gini Rasio ditargetkan sebesar 0,269-0,279.

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Untuk menjaga konsistensi dan keterkaitan antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2026 disusun dengan berpedoman kepada RPJMD dan hasil evaluasi RKPD periode sebelumnya.

Secara teknis tujuan dapat diartikan sebagai pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode jangka menengah.

Kriteria suatu rumusan tujuan pembangunan adalah, diturunkan secara lebih operasional dari masing- masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi dan isu-isu strategis. Sedangkan kriteria suatu sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan dengan tetap mengacu kepada isu-isu strategis.

Sebelum melangkah kepada tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2026, perlu kiranya disampaikan apa yang menjadi Visi dan misi daerah yang tertuang dalam RPJMD, dimana telah dirumuskan visi daerah dalam RPJMD 2025-2029 adalah: **“Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera Berkelanjutan”**. Adapun untuk perwujudan visi tersebut, juga telah dirumuskan misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan Daerah
VISI: Lima Puluh Kota Bermartabat, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO BERMARTABAT"	1. Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah	1.1. Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya
		2. Meningkatkan ketahanan dan kontribusi budaya dalam kehidupan masyarakat	2.1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan
		3. Meningkatkan pembangunan keluarga yang sejahtera, adil, dan inklusif	3.1 Meningkatnya keluarga yang berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif
2.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik	1.1 Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah
			1.2 Meningkatnya kualitas pelayanan publik
			1.3 Meningkatnya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		2. Menegakkan keamanan dan ketertiban daerah	2.1 Optimalnya penegakan keadilan, keamanan dan demokrasi substansial
3.	Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	1. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif	1.1 Meningkatnya intelektual dan karakter anak usia sekolah 1.2 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat 1.3 Meningkatnya standar hidup masyarakat
		2. Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja	2.1 Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif
4.	Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO SEJAHTERA"	1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan	1.1 Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal 1.2. Meningkatnya stabilitas ekonomi makro yang terintegrasi dengan ekonomi domestik dan regional
		2. Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota	2.1 Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota 2.2 Optimalisasi ekonomi kreatif
5.	Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	1. Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota	1.1. Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau
6.	Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"	1. Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan	1.1 Membangun infrastruktur strategis 1.2 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
7.	Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	1. Meningkatkan status nagari	1.1 Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan kemandirian nagari

Sejalan dengan arah pembangunan dalam RPJMD dan dengan memperhatikan pemulihan pertumbuhan ekonomi nasional, Sumatera Barat, dan Lima Puluh Kota serta dukungan terhadap pencapaian Tema Pembangunan RKP Tahun 2026, maka Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mengusung Tema Pembangunan Tahun 2026 yakni:

“Peningkatan Kualitas SDM dan Infrastruktur Untuk Mendukung Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing”

Pemilihan tema Pembangunan Tahun 2026 merupakan pemilihan terhadap fokus prioritas pembangunan yang akan dilakukan pada tahun 2026, dengan tetap tidak mengabaikan upaya pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib dipenuhi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 18 dan pasal 298 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun proyeksi Target Indikator Makro Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026, diuraikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.3
Proyeksi Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No	Indikator Makro Pembangunan	2026			
		RPJMD	RKP	RKPD Prov	RKPD
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,47	5,8 - 6,3	5,2 - 5,7	5,47
2	PDRB ADHB Per Kapita (Rp. Juta)	65,96	5.870	69,59	65,96
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,63	4,44 - 4,96	5,16 - 5,69	3,63
4	IPM	72,66		77,48	72,66
	- Usia Harapan Hidup (Tahun)	73,93		74,83	73,93
	- Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,75		14,62	13,75
	- Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	8,54		9,58	8,54
	- Pengeluaran per Kapita (Rp. Ribu)			12.074	
5	Tingkat Kemiskinan (%)	5,01-5,18	6,5-7,5	4,39 - 5,39	5,01-5,18
5	Gini Rasio	0,202	0,377-0,380	0,269 - 0,279	0,202
6	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	-	37,14	52,62 - 62,27	-

Sumber: RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029

4.2. PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2026

Prioritas Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan penajaman dan sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi. Prioritas pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan pemenuhan target kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah dan penuntasan permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang relevan, melalui kolaborasi semua Perangkat Daerah dan stakeholder. RKPD tahun 2026 merupakan penjabaran tahun ke-2 (kedua) RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029. Dalam Penyusunan RKPD tahun 2026 memperhatikan keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat yang dituangkan dalam RKPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2026 dengan tidak melupakan aspek pelayanan dasar dan prioritas unik yang di daerah sendiri.

Perumusan prioritas pembangunan daerah dilakukan dengan mengevaluasi permasalahan pembangunan di setiap urusan sehingga terlihat upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Prioritas pembangunan tersebut dirumuskan ke dalam fokus prioritas tahun rencana yang berisi program-program unggulan yang paling tinggi daya dukungnya untuk mengatasi permasalahan yang ada atau untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan untuk mencapai target sasaran pembangunan daerah. Fokus prioritas pembangunan pada tahun rencana tersebut, mendukung tema pembangunan yang telah ditetapkan yang merupakan benang merah menuju sasaran pembangunan.

Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan daerah menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan di tahun sebelumnya yang telah berhasil dicapai tidak lagi diprioritaskan di masa berikutnya, akan tetapi tetap dijaga kesinambungannya. Suatu prioritas pembangunan dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategis daerah mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunan.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Berdasarkan Teknokratik RPJMN Tahun 2025-2029 adalah "Inovasi dan Hilirisasi Industri Berkelanjutan". Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

Tabel 4.4
Prioritas Pembangunan, Sasaran dan Arah Kebijakan Nasional 2025-2029

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)			
1	Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan HAM		1	Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Ketahanan Nasional
a	Indeks Demokrasi Indonesia	2,12 – 85,66	2	Penguatan Komunikasi Publik dan Media
b	Indeks HAM	2,80	3	Penguatan Lembaga Demokrasi
			4	Pengarusutamaan, Pemajuan, dan Penegakan HAM
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru			
1	Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan Pembangunan			Kedaulatan Negara Dan Stabilitas Keamanan Nasional
a	Asia Power Index (Military Capability)	17,0	1	Pembangunan postur pertahanan
b	Asia Power Index (Diplomatic Influence)	65,8	2	Pembangunan dan pengembangan industri pertahanan
c	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	68,00	3	Penguatan komponen Cadangan dan komponen pendukung
d	Global Cybersecurity Index	95	4	Penguatan intelijen dan keamanan dalam negeri
e	Indeks Keamanan Laut Nasional	61	5	Peningkatan keamanan siber, sandi, dan sinyal
2	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) – Pangan		6	Peningkatan keamanan laut dan hidro oseanografi
a	Indeks Ketahanan Pangan	75,4	7	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat
b	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	2,38	8	Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian
c	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU)	6,55	9	Penguatan diplomasi asta cita dan diplomasi ekonomi.

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
3	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) – Energi			Swasembada Pangan, Energi, Dan Air
a	Indeks Ketahanan Energi	6,82	10	Pengembangan KSPP/lumbung pangan
b	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	20,00	11	Penguatan cadangan pangan nasional
4	Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus) – Air		12	Pengembangan pangan hewani
a	Indeks Ketahanan Air Nasional	3,50	13	Pengembangan pangan akuatik (blue food)
b	Kapasitas tampungan air	60,16	14	Pengembangan pangan lokal dan nabati
c	kses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	42,24	15	Fortifikasi dan biofortifikasi pangan
d	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	17,00	16	Pengembangan kelembagaan ekonomi, regenerasi sumber daya manusia, riset, inovasi, modernisasi dan digitalisasi pertanian dan perikanan yang adaptif dan inklusif;
5	Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan		17	Penguatan produksi komoditas pertanian bernilai tambah tinggi.
a	Posisi Ekonomi Syariah Indonesia di Tingkat Global (peringkat)	2	18	Peningkatan penyediaan energi
b	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	41,26	19	Perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi;
c	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	41	20	Penguatan transisi energi berkeadilan dari energi fosil ke pemanfaatan energi bersih.
6	Terwujudnya transformasi ekonomi hijau		21	Penyediaan pasokan air berkelanjutan
a	Indeks Ekonomi Hijau	71,01	22	Konservasi sumber daya air
b	Indeks Kualitas Pengelolaan Sampah (IKPS)	60,00	23	Pengembangan SPAM terintegrasi hulu ke hilir
c	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	28 (17 terdaur ulang)	24	Penyediaan dan pengawasan sanitasi aman, berkelanjutan, dan berketahanan iklim berbasis CWIS (Citywide Inclusive Sanitation)
d	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif (%)	19,07	25	Pengembangan terpadu pesisir utara Jawa Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
e	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	27,35		Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Biru, Ekonomi Hijau
f	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	0,47	26	Penguatan industri dan UMKM halal
g	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,67	27	Penguatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi internasional
			28	Penguatan ekosistem halal
			29	Penguatan keuangan syariah
			30	Penguatan dana sosial syariah
			31	Penguatan faktor pendukung ekonomi digital serta penguatan ekonomi dan industri digital
			32	Penguatan tata kelola ekonomi biru
			33	Peningkatan pengelolaan konservasi perairan dan ekosistem pesisir
			34	Peningkatan produktivitas perikanan yang terintegrasi, modern, dan berkelanjutan
			35	Pengembangan industri garam dan produk olahan hasil 99 laut
			36	Penguatan industri transportasi laut
			37	Pengembangan pariwisata berbasis bahari dan danau; serta
			38	Pengembangan iptek, inovasi, dan SDM ekonomi biru
			39	Penguatan ekosistem ekonomi sirkular
			40	Penguatan pengelolaan keanekaragaman hayati ekosistem, spesies, dan genetik;
			41	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang
			42	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir
			43	Pembangunan rendah karbon
			44	Peningkatan pekerjaan hijau/green jobs
			45	Penguatan pengelolaan hutan lestari

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi			
1	Terwujudnya Pengembangan Infrastruktur yang Berkelanjutan		1	Pengembangan Konektivitas dan Layanan Transportasi Multimoda
a	Stok Infrastruktur terhadap PDB (%)	47,00	2	Peningkatan Konektivitas Digital dan Transisi Energi Listrik
2	Meningkatnya Total Aset Sektor Keuangan terhadap PDB		3	Pendalaman Sektor Keuangan
a	Total Aset Sektor Keuangan/PDB (%)	188,04	4	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi
b	Aset Perbankan/PDB (%)	64,51	5	Pembangunan Pariwisata Berkualitas dan Berkelanjutan
c	Aset Dana Pensiun/PDB (%)	7,63	6	Penguatan Ekosistem Ekonomi Kreatif Berbasis Kekayaan Intelektual
d	Aset Asuransi/PDB (%)	9,30		
e	Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%)	59,90		
f	Total Kredit/PDB (%)	38,46		
g	Inklusi Keuangan (%)	91,50		
3	Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas			
a	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	37,95		
b	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)	1,12		
c	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)	3,15		
d	Rasio Kewirausahaan (%)	3,18		
4	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata			
a	Rasio PDB Pariwisata (%)	4,60-4,70		
b	Devisa Pariwisata (miliar USD)	22,00-24,70		
5	Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif			
a	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)	7,40-8,00		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas			
1	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata			Pendidikan Berkualitas Yang Merata
a	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di atas 15 Tahun (Tahun)	9,45	1	Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah)
b	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,36	2	Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
c	Rata-rata Nilai PISA		3	Penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas
	(a) Membaca (b) Matematika (c) Sains	396 404 416	4	Penguatan pendidikan tinggi berkualitas yang merata dan pengembangan Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematic (STEAM)
d	Rata-rata Nilai Asesmen Tingkat Nasional:			Kesehatan Untuk Semua
	(a) Literasi Membaca (b) Numerasi	65,89 58,86	5	Peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat secara holistic berdasarkan siklus kehidupan
e	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%)	65,89 58,86	6	Pemberian makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi
f	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	11,49	7	Pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat
g	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	68,50	8	Penguatan pelayanan kesehatan dan tata Kelola
2	Terwujudnya Kesehatan untuk Semua			Iptek, Inovasi, Dan Produktivitas Tenaga Kerja
a	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	74,68	9	Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja
b	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata Kelahiran per Wanita Usia Subur 15–49 Tahun)	2,10	10	Peningkatan kontribusi iptek dan inovasi dalam pembangunan nasional
c	Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	109	11	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)
d	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita (%)	17,50		Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, Dan Masyarakat Inklusif
e	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 Penduduk)	252	12	Peningkatan Ketangguhan Keluarga

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
f	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	98,70	13	Peningkatan kualitas perlindungan anak
3	Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		14	Peningkatan Kualitas Pemuda
a	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,83	15	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan
b	Indeks Perlindungan Anak	72,33	16	Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lanjut usia
c	Indeks Pembangunan Pemuda	67,24		Prestasi Olahraga Indonesia Di Tingkat Dunia Dan Budaya Berolahraga Di Masyarakat
d	Indeks Ketimpangan Gender	0,421	17	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga;
e	Indeks Pembangunan Gender	92,11-92,21	18	Peningkatan pembinaan prestasi olahraga dan pengembangan kebudayaan olahraga yang inklusif.
f	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	94,50		
g	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	69,50		
4	Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja			
a	Peringkat Indeks Inovasi Global	52		
b	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44–4,96		
c	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)	0,31		
d	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,40–59,31		
5	Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat			
a	Peringkat pada Asian Games	9–11		
b	Peringkat pada Asian Para Games	5–7		
c	Peringkat pada ASEAN Para Games	1–2		
d	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Aktif Berolahraga	10,80–11,94		
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri			
1	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		1	Pengembangan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
a	Rasio PDB Industri Pengolahan (%)	21,20	2	Pengembangan aglomerasi industri di KI/KEK prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru
2	Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		3	Optimalisasi Backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional
a	Biaya Logistik (% PDB)	13,30	4	Peningkatan Investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global
b	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)	29,40	5	Peningkatan Perdagangan Domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global
c	Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)	22, 7	6	Optimalisasi Investasi Strategis Danantara
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan			
1	Mempercepat Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pemerataan		1	Sistem Pendataan Sosial Ekonomi Terintegrasi
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6,5-7,5	2	Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif
b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem (%)	0-0,5	3	Peningkatan Akses Lapangan Kerja dan Penumbuhan Usaha Berkelanjutan dan Inovatif
c	Proporsi Penduduk Kelas Menengah (%)	18,2	4	Percepatan Penyediaan Perumahan dan Permukiman
d	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	34,99	5	Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan
e	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal (%)	10,40	6	Pembangunan Perkotaan Berkelanjutan
2	Meningkatkan Akses Rumah Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan		7	Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)
a	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	68,66		
3	Mewujudkan Pembangunan Kemandirian Perdesaan dari Bawah sebagai Sumber Pendorong Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan			
a	Persentase Desa Mandiri (%)	23,91		
4	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi			
a	Proporsi PDRB Perkotaan terhadap PDB Nasional (%)	57,70		
b	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap PDB Nasional (%)	44,58		

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
5	Meningkatnya Usaha Inovatif dan Berkelanjutan di Tingkat Desa/Kelurahan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih			
a	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (%)	30		
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan			
1	Terwujudnya Supremasi Hukum yang Transparan, Adil, dan Tidak Memihak serta Sistem Politik yang Fungsional		1	Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu
a	Indeks Pembangunan Hukum	0,70	2	Reformasi Hukum
b	Indeks Persepsi Korupsi	40	3	Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum
c	Indeks Integritas Partai Politik	65,00 - 66,99	4	Transformasi Sistem Penuntutan dan Advocaat Generaal
2	Terwujudnya Birokrasi Pemerintahan yang Adaptif dan Melayani		5	Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)
a	Indeks Reformasi Birokrasi Nasional	72,8	6	Penerapan Prinsip Meritokrasi dan Reformasi Manajemen ASN
b	Indeks Pelayanan dan Pelindungan WNI di Luar Negeri	94	7	Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik dan Pembangunan
3	Terwujudnya Masyarakat yang Bebas dari Penyalahgunaan Narkoba		8	Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,70	9	Pemerintah Digital
4	Terwujudnya Tata Kelola BUMN yang Baik untuk Meningkatkan Kontribusi BUMN sebagai Agen Pembangunan		10	Pelindungan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri, termasuk pekerja migran Indonesia
a	Return on Asset (RoA) BUMN	3,26	11	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)
5	Tercapainya Peningkatan Pendapatan Negara yang Optimal dengan Tetap Menjaga Iklim Investasi, Didukung Upaya Mewujudkan Reformasi Fiskal Secara Komprehensif Melalui Optimalisasi Belanja Negara serta Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan		12	Peningkatan Produktivitas BUMN
a	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB	12,17-13,35	13	Optimalisasi Pendapatan Negara
b	Rasio Perpajakan terhadap PDB (%)	10,46-11,40	14	Optimalisasi Belanja Negara

NO	SASARAN/ INDIKATOR	TARGET 2026	ARAH KEBIJAKAN	
6	Tercapainya Tingkat Inflasi yang Rendah dan Stabil untuk Mendukung Stabilitas serta Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan		15	Perluasan Sumber dan Pengembangan Inovasi Pembiayaan
a	Tingkat Inflasi (persen)	2,5 ± 1,0	16	Pengendalian Inflasi.
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur			
1	Terwujudnya Kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju		1	Penguatan kerukunan umat beragama dan layanan keagamaan transformatif untuk mewujudkan kehidupan beragama maslahat
a	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	66,15	2	Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Penguatan Karakter Bangsa
b	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	58,99	3	Pembangunan Berketahanan Iklim
c	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	77,14	4	Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna.
2	Terwujudnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
a	Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)	0,136		

Sumber : RKP 2026

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPd Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut :

Tabel 4.5
Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2026

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	VOLUME
		SATUAN	
Prioritas 1 : Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Index Pembangunan Manusia	Indeks	77.98
	Indeks Modal Manusia	Indeks	0.59
Sasaran 1 : Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10.05
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	14.47
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	%	19.51

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	VOLUME
		SATUAN	
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74.54
	Angka Kematian Ibu	per 100.000 kelahiran hidup	121
	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	19.62
	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)	Persen	75.45
	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate)	Persen	92.34
	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	Persen	94.89
Prioritas 2 : Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan			
Tujuan : Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84.81
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5.5
Sasaran 1 : Meningkatnya produktivitas dan Cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan	Produktivitas PDRB lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan (Rp)	Rupiah	0
	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	persen	6.51
Sasaran 2 : Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	69.51
	Indeks Ekonomi Biru	Indeks	27.43
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0.615
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	Persen	53.614
Prioritas 3 : Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan			
Tujuan : Kota sebagai pusat pertumbuhan dengan nagari/desa sebagai basis kemajuan yang mandiri dan berdaya saing	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	8.63
	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	Persen	39.4
Sasaran 1 : Meningkatnya kemandirian ekonomi desa/nagari berbasis potensi lokal	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	persen	1.35
	Tingkat Pengangguran Terbuka	persen	5,18 - 5,66
	Tingkat Kemiskinan	persen	4,27 - 4,87
Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/nagari/kelurahan	Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	persen	66
	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	persen	10.57
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	persen	44.168
	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	persen	32.532
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	persen	14.966

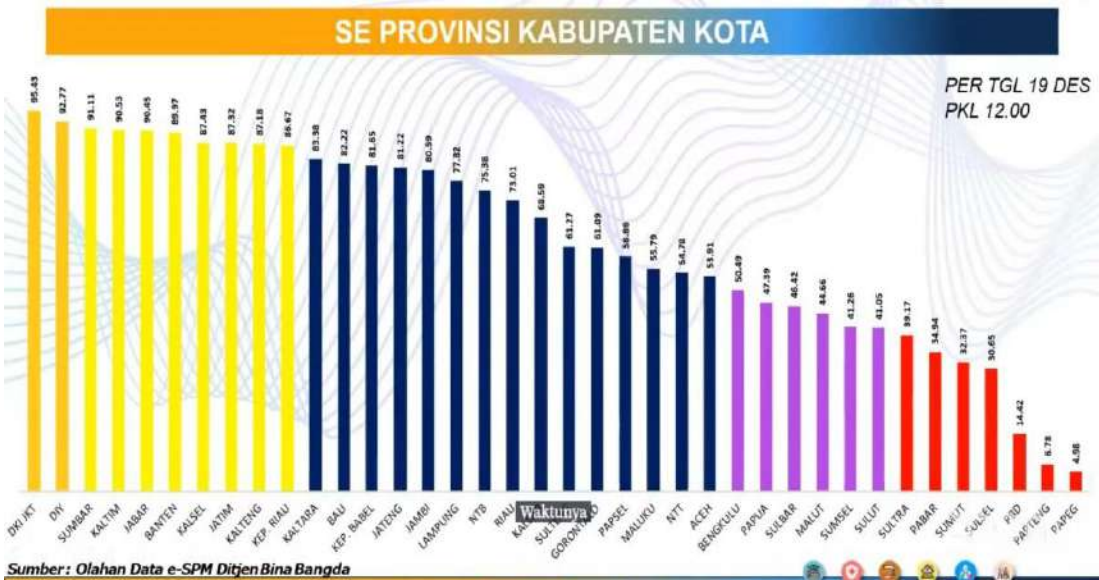
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	VOLUME
		SATUAN	
Prioritas 4 : Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat			
Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.65
	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	persen	4.576
	Tingkat Inflasi	Persen	2,71-3,56
	Pembentukan Modal Tetap Bruto	Persen per PDRB	30.154
	Ekspor Barang dan Jasa	Persen per PDRB	16.658
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	72.876
Sasaran 1 : Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	persen	8,61 - 8,70
	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	persen	18,01 19,814
	Total Kredit/PDRB	persen	24.4
	Nilai Transaksi Saham Per Kapita	rupiah	4,129,523
	Aset Dana Pensiun/PDR	persen	1.28
	Konsumsi listrik per kapita	kWh	801.85
	Intensitas Energi Primer	SBM/ Rp Miliar	158.5
Sasaran 2 : Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	persen	75.794
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	persen	34.506
	Persentase Penyandang Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal	persen	16.5
	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	persen	60.104
Sasaran 3 : Mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non-pertanian pada level provinsi	persen	11.248
	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	persen	3.608
	Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi	persen	87.35
Prioritas 5 : Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana			
Tujuan : Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, Pariwisata, kesejahteraan Masyarakat dan Mitigasi Bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	167.982
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78.16
	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	-
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca	persen	54.55
Sasaran 1 : Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	18.972
	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	persen	29.764
	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0
Sasaran 2 : Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan	Kapasitas Air Baku	m ³ /detik	1.428
	IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi)	Indeks	0

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	VOLUME
		SATUAN	
Sasaran 3 : Memperkuat Konektivitas Dan Aksesibilitas Wilayah, Kawasan pariwisata Serta Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembangunan Infrastruktur	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.162
	Rata-rata Waktu Tempuh pada Lintas Utama Jalan Provinsi	(jam/jarak tempuh)	2.85
Prioritas 6 : Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas			
Tujuan : Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.618
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	69,78 - 69,79
Sasaran 1 : Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,06 - 61,15
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	3.064
Sasaran 2 : Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan gender	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,55 - 72,67
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,39 - 0,37
	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	persen	73.908
Sasaran 3 : Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	persen	58.63
	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	66.25
	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	persen	94.3
Prioritas 7 : Tingkatkan Daya Saing Wisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif untuk UMKM			
Tujuan : Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	persen	1.48
Sasaran 1 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	orang	46.31
	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	orang	23,214,968
Sasaran 2 : Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan UMKM	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Kreatif Nasional (%)	persen	1.11
	Rasio kewirausahaan Provinsi	persen	3.88
Prioritas 8 : Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif			
Tujuan : Terwujudnya tata Kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Indeks Integritas Nasional	Indeks	73.91
Sasaran 1 : Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.96
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	71.53
	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	0
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.9
Sasaran 3 : Meningkatnya Pendapatan Daerah	Rasio Pajak Daerah PDRB	persen	1.2
	Return on Aset (ROA) BUMD	persen	2.06

4.2.3. Pemenuhan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Kabupaten

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan layanan dasar yang dijadikan sebagai salah satu tolok ukur Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana muara keberhasilan pelaksanaannya pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat (Pasal 8 Permendagri 59 tahun 2021). Laporan SPM digunakan sebagai dasar bagi pemerintah pusat untuk memberikan insentif atau disinsentif kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara (Pasal 9 Permendagri Nomor 59 Tahun 2021). Laporan Penerapan SPM disampaikan gubernur dan bupati/walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi serta penerapan menurut data olahan e-SPM Ditjen Bina Bangda, dengan data capaian sebagaimana berikut:

Grafik 4.1
Capaian IP SPM Seluruh Indonesia Tahun 2024



Grafik di atas merupakan data tanggal 19 Desember 2024, dalam IP SPM Nasional tersebut, untuk TW IV tahun 2024 Sumatera Barat menempati urutan ketiga se-Indonesia dengan total IP 91,11%. Sementara untuk data lingkup Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut:

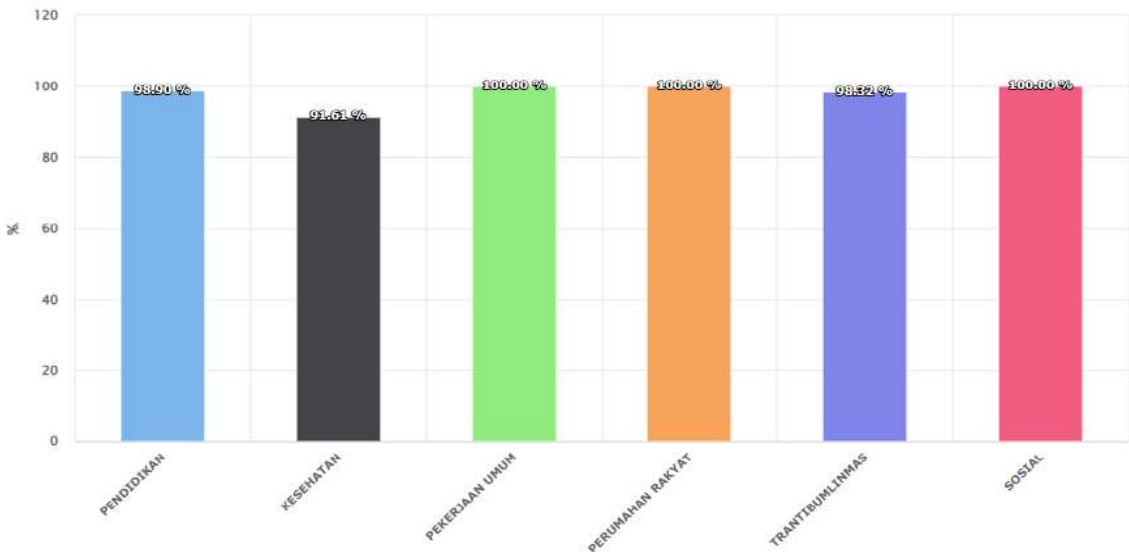
Grafik 4.2
Hasil Capaian IP SPM Seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Sumataera Barat Tahun 2024



Berdasarkan hasil capaian IP SPM tersebut, Kabupaten Lima Puluh Kota berada pada urutan ke 2 dari 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat dengan predikat tuntas utama.

Lebih rinci terkait capaian SPM di Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2024 Triwulan IV, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik 4.3
Persentase Realisasi Capaian SPM Tahun 2024



Dari grafik di atas, dapat kita simpulkan bahwa pencapaian SPM bidang pendidikan 98.90%, bidang kesehatan 91,61% ,bidang pekerjaan umum 100%, bidang perumahan rakyat 100%, bidang trantibumlinmas 98,32%, dan yang terakhir bidang sosial 100% . Dengan capaian total nilai SPM Kabupaten Lima Puluh Kota semua bidang adalah sebesar 98,14%.

Terkait dengan tingkat ketercapaian penerapan SPM terdapat hambatan dan kendala yang kerap ditemui, antara lain :

- 1. PD Pengampu sulit untuk menentukan kriteria penerima (contoh : warga yang benar-benar miskin).
- 2. Sulitnya berkoordinasi dengan pihak yang terkait dengan data yang dibutuhkan.
- 3. Kurangnya sumberdaya aparatur dan sarana prasarana pada saat pengumpulan data.
- 4. Penetapan sasaran belum berdasarkan data riil (by name by address) tetapi masih menggunakan estimasi berdasarkan jumlah penduduk.
- 5. Kondisi Geografis yang 85% pegunungan mengakibatkan terhambatnya proses pengumpulan data.
- 6. Target yang ditetapkan dalam e-SPM belum mengacu pada 4 (empat) tahapan penerapan e-SPM yaitu pada tahapan pendataan.
- 7. Penginputan capaian dan realisasi belum menggambarkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan.
- 8. Masih terdapat perubahan target pada layanan sekaligus melakukan pemutakhiran data di akhir triwulan.
- 9. Anggaran dalam kegiatan dan sub kegiatan belum spesifik terkait dengan SPM.

Untuk mewujudkan target-target capaian SPM Tahun 2026, berikut disampaikan program/ kegiatan pendukung pencapaian SPM:

Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	Program : Pengelolaan Pendidikan 1. Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Sub Kegiatan : 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 5. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 6. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 7. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 8. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 9. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 11. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 12. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 13. Pembangunan Ruang Kelas Baru 14. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 15. Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 17. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 18. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik 2. Kegiatan: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Sub Kegiatan: 1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Rehabilitasi Sedang/ Berat Ruang Kelas Sekolah 3. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 4. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 5. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 6. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 7. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 8. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 9. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			10.Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 11.Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 12.Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 13.Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 14.Pembangunan Ruang Kelas Baru 15.Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 16.Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 17.Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 18.Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 4. Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 8. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 9. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi 10. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 11. Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik 12. Pembangunan Ruang Kelas Baru 13. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 14. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 15. Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik 16. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan 17. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6	Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD 3. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 4. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 5. Pengembangan konten digital untuk pendidikan 6. Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan 7. Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan 8. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan 9. Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 10. Pembangunan Ruang Kelas Baru 11. Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan 12. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 13. Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik 14. Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 15. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD 16. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Bidang Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan Daerah Kab/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah warga negara usia pendidikan yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan usia lanjut
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapat layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan hipertensi

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Layanan SPM	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah warga negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan diabetes melitus
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat (ODGJ) yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah warga negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	Program : Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV

Bidang Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM 2. Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan 3. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan 1. Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik 2. Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Bidang Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan 2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 5. Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia 6. Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum 7. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 8. Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 2. Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Kegiatan : Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota 3. Kegiatan : Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota Sub Kegiatan : Pengembangan kapasitas dan karier PPNS

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 2. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiap-siagaan Terhadap bencana Sub Kegiatan : 1. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota 2. Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota 3. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Program : Penanggulangan Bencana Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan : Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program : Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1.Kegiatan : Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan : 1. Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 2. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 3. Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran 4. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 5. Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri 6. Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
			7. Pembinaan aparatur pemadam kebakaran 8. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 2.Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran Sub Kegiatan : Investigasi Kejadian Kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 3.Kegiatan : Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan : 1. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat 2. Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran 3. Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana 4.Kegiatan : Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran Sub Kegiatan : 1. Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran 2. Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran 5.Kegiatan : Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Sub Kegiatan : 1. Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang menimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/ penyelamatan dan evakuasi

Bidang Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Pemberian Layanan Rujukan 5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 6. Penyediaan Alat Bantu 7. Penyediaan Permakanan 8. Penyediaan Sandang
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak terlantar diluar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh Rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Pemberian Layanan Rujukan 5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 6. Penyediaan Alat Bantu 7. Penyediaan Permakanan 8. Penyediaan Sandang
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah warga Negara Lanjut Usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
			3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Pemberian Layanan Rujukan 5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 6. Penyediaan Alat Bantu 7. Penyediaan Permakanan 8. Penyediaan Sandang
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan Pengemis yang memperoleh Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Diluar Panti	Program : Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti sosial Sub Kegiatan : 1. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 2. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 3. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat 4. Pemberian Layanan Rujukan 5. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 6. Penyediaan Alat Bantu 7. Penyediaan Permakanan 8. Penyediaan Sandang
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Jumlah Perlindungan dan Jaminan korban Sosial Pada Saat Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten	Program : Penanganan Bencana Kegiatan : Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten / kota Sub Kegiatan : 1. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 2. Penyediaan Makanan 3. Penyediaan Sandang 4. Pelayanan Dukungan Psikososial 5. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 6. Penyediaan Makanan 7. Penyediaan Sandang

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah. Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman

Bidang Urusan Perumahan Rakyat

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan
1	Fasilitasi Penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni	Program Pengembangan Perumahan Kegiatan Pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota Sub Kegiatan Pembangunan rumah bagi korban bencana

Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah yang harus dilayani	Program : Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kegiatan : Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan 2. Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa 3. Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota 4. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum 5. Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Sub Kegiatan 1. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 2. Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota 3. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi bencana Kabupaten/Kota
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	Program Penanggulangan Bencana Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten Kota Sub Kegiatan 1. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 2. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 3. Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota 4. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 5. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran 2. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Sub Kegiatan 1. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 2. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 3. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia Sub kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia

4.2.4. Lima Puluh Kota-The Central of Agro

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian dan perkebunan yang sangat besar. Keanekaragaman hasil pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kopi, dan tanaman hortikultura lainnya serta potensi peternakan seperti telur, ayam dan sapi termasuk potensi perikanan seperti nila, patin dan gurame sago menjadikan daerah ini layak dikembangkan sebagai sentra agro (The Central of Agro) di Sumatera Barat. Namun demikian, potensi ini belum dimaksimalkan secara optimal dalam konteks pemasaran, identitas daerah (branding), dan pengembangan kawasan agro berbasis pariwisata serta ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan strategi branding yang kuat untuk membentuk identitas “The Central of Agro” sebagai kawasan unggulan yang dikenal secara regional maupun nasional. Hal ini didukung dengan data produksi komoditi tersebut di atas sebagai berikut :

Tabel 4.6
Produksi Komoditas Pertanian di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis data	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
		Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)	Luas Panen (Ha)	Produksi (ton)
1	Padi	30.791,00	134.375,00	52.351,00	232.018,75	50.577,00	228.015,60	50.839,00	228.523,00	44.915,20	185.283,10
2	Jagung	6.678,00	39.290,00	6.220,00	43.351,01	6.884,00	50.277,78	8.614,00	63.180,00	7.646,10	56.276,82
3	Jeruk	965,27	58.193,00	1.140,20	38.368,39	1.217,87	31.323,39	753,14	24.127,75	642,24	30.332,00
4	Cabe Besar	789,00	19.819,00	1.045,00	8.814,10	1.048,75	10.498,28	909,95	9.469,57	825,70	9.080,00
5	Manggis	974,45	20.981,00	1.210,79	29.815,30	1.239,31	26.818,40	188,40	816,00	179,41	670,60
6	Kopi	455,00	332,57	384,00	363,84	436,00	389,28	394,00	202,27	350,00	161,37
7	Kakao	3.279,00	1.728,42	3.099,00	2.003,97	3.292,00	1.590,41	3.144,00	388,65	2.692,75	1.016,62
8	Gambir	16.605,00	7.826,69	16.623,00	7.845,89	16.692,00	7.776,42	33.631,00	38.642,66	16.815,50	19.321,33

Sumber: Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kab. Lima Puluh Kota Tahun 2025

Tabel 4.7
Jumlah Populasi Ternak di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No	Komoditi	Jumlah Populasi (Ekor) pada Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sapi	45.071	48.451	51.030	52.561	54.681
2	Kerbau	9.992	8.843	9.040	9.042	9.304
3	Kuda	98	117	106	106	108
4	Kambing	29.379	30.342	31.752	33.592	34.900
5	Ayam Buras	385.790	405.016	413.643	427.139	436.063
6	Ayam Ras Petelur	7.748.600	8.364.679	8.425.873	8.503.810	8.719.014
7	Ayam Ras Pedaging	12.848.250	12.547.240	12.645.718	12.848.331	13.049.705
8	Itik	145.232	142.959	139.950	189.895	192.719
9	Burung Puyuh	680.038	623.810	635.018	635.018	663.050

Sumber: BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 4.8
Jumlah Produksi Komoditi Peternakan di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020 - 2024

No	Komoditi	Jumlah Produksi (Kg)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Daging Sapi Potong	1.180.290,58	1.283.339,60	1.263.757,84	1.279.668,00	1.816.934,12
2	Daging Kerbau	143.152,35	195.830,53	197.247,88	196.776,00	264.301,76
3	Daging Kambing	70.154,28	33.624,76	35.232,12	35.800,00	36.416,25
4	Daging Ayam Buras	475.293,28	498.979,71	509.609,18	526.235,00	537.228,00
5	Daging Ayam Ras Petelur	5.671.975,20	9.898.761,13	6.167.739,04	6.224.789,00	6.486.947,00
6	Daging Ayam Ras Pedaging	12.604.133,25	14.239.862,68	14.351.625,36	526.235,00	14.810.110,00
7	Daging Itik	85.396,42	84.059,89	82.290,60	111.658,00	113.320,00
8	Daging Burung Puyuh	67.323,76	137.238,20	69.851,98	69.856,00	145.872,00
9	Telur Ayam Buras	247.098,50	259.412,75	264.938,34	273.583,00	279.298,30
10	Telur Ayam Ras Petelur	59.741.706,00	77.261.026,76	77.826.250,03	78.546.121,00	80.533.870,30
11	Telur Itik	797.323,68	784.844,91	768.325,50	1.042.524,00	1.058.025,60
12	Telur Burung Puyuh	693.638,76	1.081.686,54	1.101.121,21	1.101.177,00	1.149.728,70
13	Susu Sapi Perah	64.260,00	18.783,56	14.353,95	14.354,00	6.629,00
14	Susu Kerbau	99.920,00	88.430,00	90.402,58	90.423,00	93.040,00

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 4.9
Produksi Komoditas ikan budidaya di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020-2024

No	Jenis Produksi Komoditi Perikanan	Jumlah Produksi (ton) pada tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan mas	11.017,95	10.582,59	7.905,11	7.905,11	5.105,10
2	Ikan nila	13.594,77	12.847,67	7.878,07	7.878,07	12.679,65
3	Ikan gurami	6.831,05	7.880,60	3.556,73	3.556,73	7.590,60
4	Ikan lele	6.907,40	8.239,31	4.320,71	4.320,71	8.627,50
5	Ikan patin	2.759,14	2.765,41	7.551,87	7.551,87	1.252
6	Ikan nilem	2.064,10	953,39	1.017,22	1.017,22	2.469,60
7	Ikan lainnya	1.238,50	1.238,56	3.668,52	3.668,52	1.886,70
Jumlah		44.507,53	45.081,70	35.898,23	37.536,3	39.611,15

Sumber : BPS, Lima Puluh Kota Dalam Angka Tahun 2025

Dari data di atas dapat dilihat bahwa dengan produksi komoditi pertanian, peternakan dan perikanan yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka sangat pantaslah Kabupaten Lima Puluh Kota menasbihkan diri menjadi The Central of Agro.

Selain data pokok tentang berbagai komoditas/ produk yang dihasilkan oleh Kabupaten Lima Puluh Kota di atas, juga terdapat beberapa faktor pendukung dalam perwujudan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai “The Central Of Agro”. Salah satu faktor pendukung tersebut adalah dengan terbitnya Masterplan Integrated Area Development Harau Taram Terintegrasi dan Adaptif (IAD HATTA) atau Pengembangan Kawasan Perhutanan Sosial Terintegrasi di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai gambaran, luas Kawasan hutan di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebesar 172.304 Ha yang meliputi KSDA sebesar 29.136 Ha, Hutan Lindung seluas 116.629,94 Ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 20.476 Ha, dan Hutan Produksi Konversi seluas 11.163 Ha. Berdasarkan data PIAPS VII 2022 luas Kawasan Perhutanan Sosial baik yang definitive maupun yang indikatif ada seluas 63.570 Ha. Adanya kawasan perhutanan sosial yang sebagian besar yang dapat dikelola oleh masyarakat melalui Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari (LPHN). Di Kabupaten Lima Puluh Kota jumlah LPHN ini terdiri dari 38 Kelompok Perijinan/ Persetujuan Perhutanan Sosial yang berada di bawah koordinasi UPTD KPH Lima Puluh Kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pengembangan agroforestri yang merupakan bagian dari branding Kabupaten Lima Puluh Kota dengan “The Central of Agro”nya layak juga untuk dikembangkan. Agroforestri ini adalah sistem pengelolaan lahan yang mengkombinasikan tanaman berkayu (pohon, perdu, bambu, dll.) dengan tanaman pertanian dan/ atau hewan ternak untuk menghasilkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan. Selain agroforestry, dengan branding “The Central of Agro” ini Kabupaten Lima Puluh Kota juga dapat mewujudkan Agroindustri, Agrowisata dan Agroedukasi.

Diharapkan dengan adanya The Central of Agro ini akan terwujudnya:

- Peningkatan daya saing sektor pertanian, peternakan dan perikanan dan produk agro lokal.
- Terbangunnya citra positif Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pusat pertanian, peternakan dan perikanan serta sebagai kawasan agroindustri, agrowisata, agroforestry, agropolitan dan agroedutourism.
- Terdorongnya pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pengembangan agroindustri, pariwisata, agroforestry, agropolitan dan agroedutourism.
- Perkuatan ekosistem UMKM berbasis hasil pertanian, peternakan dan perikanan lokal

4.2.5. Prioritas Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

Prioritas pembangunan tahun 2026 disesuaikan dengan Visi dan Misi RPJMD 2025-2029 yang tetap difokuskan kepada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Pembangunan Infrastruktur Strategis. Namun demikian prioritas pembangunan daerah tahun 2026 juga responsif dan tanggap terhadap upaya peningkatan Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan serta juga dalam upaya mitigasi terhadap ketidakpastian perkembangan ekonomi global, regional dan lokal serta guna mendukung pencapaian Tema RKP, yang juga menjadi penekanan dalam penentuan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah tahun 2026.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing- masing Prioritas yakni sebagai berikut.

Tabel 4.10
Perbandingan Prioritas Pembangunan Pada RPJMD dan RKPD
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMD)	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026 (RKPD)
1	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama
2	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah
3	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial
5	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil
6	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif
7	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi
8	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana
9	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu
10	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Dalam rangka perwujudan dari program prioritas dimaksud, berikut disampaikan sasaran dan target indikator sasaran dari setiap prioritas pembangunan tersebut. Penetapan indikator disetiap sasaran yang ingin dicapai dalam mewujudkan tujuan prioritas daerah tersebut merupakan hal penting yang harus diperhatikan secara fokus oleh pemerintah daerah, karena keberhasilan dari prioritas daerah tersebut merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan stakeholder serta masyarakat kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 4.11
Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN 2026	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN
1	Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama	Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	2.14	Indeks
2	Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		
			Indeks Pelayanan Publik	4,39	Indeks
3	Penguatan kualitas pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,54	Tahun
			Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,75	Tahun
			Usia Harapan Hidup	73,93	Tahun
			Indeks Pembangunan keluarga	63,4	Indeks
4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial	Meningkatnya daya saing masyarakat secara inklusif	Tingkat Produktivitas Tenaga kerja	Rp62,871,993	Rupiah
5	Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil	Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.953%	Persen
6	Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.95	Rasio
			Jumlah tamu wisatawan mancanegara (ribu orag)	1,5	Ribu orang
7	Penguatan Kelembagaan redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi	Meningkatnya penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	33.24%	Persen
8	Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana	Membangun infrastruktur strategis	RT dengan Akses Sanitasi Aman	9.852	Persen
			Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Perpipaan	15.5	
			Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	48.87	Persen
9	Penataan infrastruktur strategis dan terpadu	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks tutupan lahan	75.46	Indeks
			Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	16.83	Persen
10	Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah	Meningkatnya kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	7.93%	Persen

Sumber : Rancangan Akhir RPJMD 2025-2029

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025– 2029, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan. Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, dan penjabaran arah kebijakan pembangunan daerah per tahunnya akan dituangkan kedalam dokumen RKPD 2026, begitu juga dalam hal perencanaan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan di tahun 2026.

Adapun Prioritas Pembangunan RKPD Tahun 2026 dan arah kebijakan pembangunan pada masing-masing Prioritas yakni sebagai berikut:

Prioritas pembangunan 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama

Program ini bertujuan memperkuat nilai-nilai agama dan adat istiadat sebagai landasan moral dan budaya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Melalui pembinaan agama dan adat, diharapkan terwujud kesadaran kolektif dalam menjaga tradisi, norma sosial, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas daerah sekaligus memperkuat solidaritas sosial.

Dalam hal pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama yang merupakan prioritas utama di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka indikator untuk mencapai tujuan Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah dengan sasaran Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya, indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dari tujuan tersebut adalah indeks ABS-SBK. Dimana realisasi tahun 2025 untuk nilai Indeks ABS-SBK kabupaten Lima Puluh Kota adalah 1.95 dari target 1,9 dan sudah mencapai target yang ditetapkan. Pada tahun 2026 ini target yang ingin dicapai untuk Indeks ABS-SBK adalah sebesar 2,14. Dalam hal pencapaian indikator yang terkait dengan program prioritas ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah fokus pada pengembangan kerukunan antar umat beragama dengan mendorong dialog, kerja sama, dan kegiatan bersama antar komunitas keagamaan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana damai dan toleran yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah secara inklusif.. Anggaran untuk hibah ke mesjid ini telah disediakan dalam Dokumen Perencanaan Anggaran setiap tahunnya termasuk untuk tahun 2026.

Program ini bertujuan memperkuat nilai-nilai agama dan adat istiadat sebagai landasan moral dan budaya masyarakat yang harmonis dan berkeadaban. Melalui pembinaan agama dan adat, diharapkan terwujud kesadaran kolektif dalam menjaga tradisi, norma sosial, dan nilai-nilai luhur yang menjadi identitas daerah sekaligus memperkuat solidaritas sosial. Dalam hal pencapaian indikator yang terkait dengan program prioritas ini adalah indeks ABS-SBK, dimana untuk mencapai target di tahun 2026 sebesar 2,14 upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota adalah fokus pada pengembangan kerukunan antar umat beragama dengan mendorong dialog, kerja sama, dan kegiatan bersama antar komunitas keagamaan. Upaya ini bertujuan menciptakan suasana damai dan toleran yang mendukung stabilitas sosial dan pembangunan daerah secara inklusif.

Pelaksanaan program melibatkan tokoh agama, pemimpin adat, perguruan tinggi, serta lembaga sosial keagamaan sebagai mitra strategis dalam menanamkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat memperkuat kehidupan sosial yang harmonis, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, serta mendukung terciptanya lingkungan yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Adapun bentuk kegiatan dari pelaksanaan dari pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama ini adalah Perawatan Rumah Ibadah yang memiliki standarisasi akses air bersih dan sanitasi yang baik dan ramah anak.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada Prioritas Pembinaan Agama Dan Adat Serta Kerukunan Antar Umat Beragama Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.12
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas Pembinaan Agama Dan Adat Serta Kerukunan Antar Umat Beragama

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 1 : Pembinaan agama dan adat serta kerukunan antar umat beragama			
Tujuan : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah			
Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya	Indeks ABS-SBK	Indeks	2.14

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur dan optimalisasi fungsi kelembagaan keagamaan, adat dan budaya serta pengelolaan keuangan sosial
2. Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan yang berkelanjutan terhadap cagar budaya melalui penguatan kelembagaan, peningkatan partisipasi publik, serta pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten
3. Peningkatan kapasitas individu, pemberdayaan ekonomi, penguatan lingkungan sosial, penguatan kelembagaan, serta perlindungan dan pemenuhan hak seluruh lapisan Masyarakat.

Prioritas pembangunan 2 : Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

Program ini merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan potensi penerimaan keuangan daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri tanpa bergantung sepenuhnya pada dana dari pemerintah pusat. Selain itu, program ini juga menitikberatkan pada penguatan sistem manajemen kinerja yang berbasis hasil untuk memastikan setiap unit kerja dan individu aparatur dapat memberikan kontribusi optimal sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pengembangan budaya kerja yang profesional, etis, dan berorientasi pada pelayanan publik menjadi prioritas dalam membangun birokrasi yang responsif dan akuntabel.

Sementara itu, optimalisasi pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengelolaan aset, Pemerintah daerah juga didorong untuk menciptakan inovasi sumber-sumber pendapatan baru yang legal dan berkelanjutan. Sinergi antara reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah ini diharapkan dapat meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, memperkuat kemandirian fiskal, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat. Tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Untuk mewujudkan prioritas pembangunan yang terkait dengan reformasi birokrasi, terdapat 2 tujuan yaitu meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dengan indikator Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah dengan sasaran meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian dari kemenPan-Rb Pada Tahun 2024 pencapaian nilai Indeks reformasi birokrasi untuk Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 70,81 kategori BB dari target yang ditetapkan 64,17 dan jauh melebihi target yang telah ditetapkan. Pencapaian nilai yang baik ini sangat memberikan kesimpulan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai indeks dari tahun ke tahun. Untuk tahun 2026 ini, target yang ditetapkan untuk Indeks reformasi Birokrasi adalah di angka 75,00 untuk kategori B.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.13
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas Reformasi Birokrasi dan Optimalisasi Pendapatan Daerah

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 2 : Reformasi birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah			
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik			
Sasaran 1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas, akuntabel dan bebas korupsi dengan peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, inovasi berkelanjutan, monitoring dan evaluasi yang kuat, serta penguatan SDM dan kelembagaan berbasis digital untuk percepatan pembangunan daerah
2. Penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi strategis lintas sektor untuk mewujudkan keadilan, keamanan, dan demokrasi substansial secara berkelanjutan

Prioritas pembangunan 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Pembangunan manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong kemajuan suatu daerah. Prioritas pembangunan kedua dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2025–2029 ini menempatkan pendidikan dan kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak sebagai sektor kunci yang harus ditangani secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul, sehat, cerdas, dan kompetitif di tingkat nasional maupun global.

Adapun tujuan yang akan dicapai dari program prioritas daerah ini adalah meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia. IPM merupakan indikator yang merupakan indikator komposit untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM dipengaruhi oleh dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Dimensi pendidikan antara lain rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah selama kurun waktu lima tahun tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan begitu juga dengan dimensi kesehatan (angka harapan hidup) dan dimensi ekonomi (pengeluaran perkapita disesuaikan). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lima Puluh Kota dari tahun 2020-2024 masih berada pada posisi sedang (60-79), yaitu berada pada angka 70,82 sampai dengan 72,51. Untuk IPM Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2024 sebesar 72,51 naik 0,46 jika dibandingkan dengan IPM tahun 2023.

Peningkatan IPM ini harus menjadi perhatian penting dalam pembangunan, dan upaya yang dilakukan utuk dapat mendongkrak nilai IPM Kabupaten Lima Puluh Kota yang masih jauh dari IPM Provinsi, maka dalam proses perencanaan dan penganggaran dilakukan beberapa upaya antara lain :

1. Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah
2. Gerakan Bersama Peningkatan Pendidikan melalui Pendidikan Kesenjangan (Gebrak);
3. Pencegahan dan Penurunan Stunting (Menuju Lima Puluh Kota Bebas Stunting/MELIPUT STUNTING)
4. Peningkatan Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage)
5. Universal Health Coverage (UHC)

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.14
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 3 Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan
dan Perlindungan anak

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 3 : Peningkatan Kualitas Pendidikan, kesehatan, Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak			
Tujuan : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup masyarakat secara inklusif			
Sasaran 1 : Meningkatnya intelektualitas dan karakter anak usia sekolah	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Nilai	8.54
	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13.75
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73.93

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pendidikan formal dan nonformal melalui penguatan kurikulum berbasis karakter, pelatihan guru, penyediaan sarana-prasarana yang mendukung, penguatan peran keluarga dan masyarakat, serta pengembangan program ekstrakurikuler yang mendidik dan membentuk nilai-nilai moral, sosial, dan kebangsaan.
2. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, memperkuat promotif dan preventif, meningkatkan gizi masyarakat, memperluas cakupan jaminan kesehatan, serta memperkuat peran serta masyarakat dalam perilaku hidup bersih dan sehat.

Prioritas pembangunan 4 : Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau produk serta jasa baik untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri maupun masyarakat. Penduduk yang tergolong ke dalam tenaga kerja jika penduduk telah memasuki usia kerja, dimana batas usia kerja yang berlaku di Indonesia adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun. Produktivitas tenaga kerja adalah tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk. Tingkat produktifitas tenaga kerja dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2023 tingkat produktifitas tenaga kerja di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Rp58.363.161 dari jumlah yang bekerja 212.991 mengalami peningkatan di tahun 2024 sebesar Rp58.442.586 dari 221.277 orang yang bekerja.

Salah satu upaya yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan produktifitas tenaga kerja di tahun 2026 ini adalah dengan cara melakukan pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) bagi pekerja informal di Lima Puluh Kota. Dengan telah dikeluarkannya Surat Edaran No.17 Tahun 2025 tentang Gerakan Sakato Liko (Sejahterakan Pekerja Kito Lima Puluh Kota) melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sekaligus Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga kerja rentan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam hal ini tenaga kerja rentan yaitu pekerja yang memiliki kondisi kerja dibawah standar, berisiko tinggi, dan berpenghasilan minim, serta rentan terhadap gejolak ekonomi dan kesejahteraan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Peningkatan Produktifitas tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.15
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 4 Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 4 : Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja dan Perlindungan Sosial			
Tujuan : Meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja			
Sasaran 1 : Meningkatnya kesempatan dan produktivitas tenaga kerja secara inklusif	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Rupiah	Rp62,871,993

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin dan rentan.
2. Meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi pelatihan vokasi.
4. Memperluas akses pelatihan kerja bagi kelompok rentan dan marginal.
5. Mendorong kemitraan dunia usaha dan industri.
6. memperkuat sistem sertifikasi dan penempatan tenaga kerja berbasis kompetensi.

Prioritas pembangunan 5 : Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

Program ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kapasitas, dan memperkuat koperasi serta usaha mikro dan kecil melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, akses pembiayaan, dan pemanfaatan teknologi digital. Pendampingan teknis dan pengembangan pemasaran diarahkan untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing produk UMK di pasar lokal dan regional. Penguatan koperasi difokuskan sebagai sarana pemberdayaan anggota dan penggerak ekonomi kerakyatan yang inklusif. Dengan sinergi antara pengembangan kapasitas dan akses sumber daya, program ini mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Dalam periode 2020 hingga 2024, rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mengalami fluktuasi yang mencerminkan dampak pandemi serta proses pemulihan ekonomi koperasi di Kabupaten Lima Puluh Kota. Pada tahun 2020, rasio mencapai titik tertinggi sebesar 1,33804%, mencerminkan masih kuatnya peran koperasi dalam ekonomi lokal. Berbagai kondisi termasuk pandemi menyebabkan penurunan hingga mencapai titik terendah pada 2022 sebesar 0,64568%. Memasuki tahun 2023 dan 2024, rasio menunjukkan tren pemulihan, masing-masing naik menjadi 0,67453% dan 0,92009%. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas koperasi seiring meningkatnya mobilitas masyarakat, program pemberdayaan koperasi oleh pemerintah, serta adopsi teknologi digital.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian bangsa melalui swasembada pangan berkelanjutan sebagai perwujudan Asta Cita kedua dan Pembangunan dari desa untuk pemerataan ekonomi sebagai perwujudan Asta Cita keenam menuju Indonesia Emas 2045, perlu membentuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah putih melalui pendirian, pengembangan dan revitalisasi koperasi di desa/kelurahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu Langkah strategis, terpadu, terintegrasi dan terkoordinasi antara kementerian/lembaga dan pemerintahan daerah guna melakukan optimalisasi dan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih, begitu pula untuk pembentukan Koperasi Merah Putih pada tingkat nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Koperasi Merah Putih adalah inisiatif strategis Pemerintah Republik Indonesia untuk memperkuat ekonomi desa dan mengentaskan kemiskinan, sekaligus mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Koperasi Merah Putih dirancang sebagai pusat aktivitas ekonomi desa, mengelola berbagai sektor seperti distribusi sembako, apotek desa, klinik, unit simpan pinjam, cold storage, hingga logistik, guna mempersingkat rantai pasok dan menekan harga pangan agar lebih terjangkau.

Koperasi Merah Putih memiliki visi untuk menjadi lembaga ekonomi yang kuat dan mandiri, serta misi untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat melalui pelayanan yang prima dan profesional. Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih, terdapat beberapa instruksi yang diberikan kepada bupati/walikota terkait Koperasi Merah Putih yaitu Melakukan sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, serta pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa melalui camat dalam pembentukan dan pengelolaan Koperasi Merah Putih. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembangkan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Tabel 4.16
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 5 Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 5 : Penguatan Koperasi Usaha Mikro dan Kecil			
Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan			
Sasaran 1 : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Persen	0.953%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat peran UMK dalam Upaya pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui pelatihan dan fasilitasi bantuan modal.
2. Mendorong peningkatan kualitas produk-produk UKM agar dapat menembus pasar global.
3. Menciptakan kebijakan kemudahan dalam berinvestasi berbasis digital serta terjaganya stabilitas ekonomi makro.

Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif

Program ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan daya tarik pariwisata serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya alam, budaya, dan kreativitas lokal guna meningkatkan daya tarik pariwisata serta mendorong berkembangnya industri kreatif sebagai sektor ekonomi baru yang strategis. Dalam sektor pariwisata, program ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas dan aksesibilitas destinasi wisata, pengembangan produk wisata berbasis budaya dan ekowisata, serta promosi yang efektif melalui pemanfaatan teknologi digital. Penguatan kapasitas pelaku pariwisata dan masyarakat lokal juga menjadi bagian penting untuk memastikan partisipasi aktif dan manfaat ekonomi yang merata. Sementara itu, pengembangan ekonomi kreatif diarahkan pada peningkatan kapasitas kreator lokal melalui pelatihan, fasilitasi akses pasar, dan penguatan ekosistem inovasi. Pendampingan dalam hal pemasaran digital, pengembangan produk, dan kolaborasi antar pelaku usaha kreatif menjadi strategi utama untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Sinergi antara pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif diharapkan dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Dalam pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota, makan minum termasuk salah satu subsektor dengan peran yang cukup penting. Makanan dan minuman, atau kuliner, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, dan dapat menjadi faktor penentu dalam memilih destinasi wisata. Kuliner juga berkontribusi pada ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, dan melestarikan warisan budaya. Dalam lima tahun terakhir, kontribusi lapangan usaha akomodasi makan minum terhadap PDRB ADHB Kabupaten Lima Puluh Kota menunjukkan adanya tren peningkatan. Pada tahun 2020 kontribusi sektor akomodasi makan minum sebesar 0,71 persen dan terus meningkat hingga menjadi 0,83 persen pada tahun 2024.

Tabel 4.17
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 6 : Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif			
Tujuan : Menjadikan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sasaran 1 : Mengembangkan potensi pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota	Rasio PDRB Akomodasi Makan Minum	Persen	0.95

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong pengembangan potensi pariwisata dan peningkatan kontribusi industri pengolahan ekonomi kreatif di Kab. Lima Puluh Kota dengan melibatkan unsur masyarakat, nagari dan pemangku kepentingan.
2. Penguatan potensi wisata halal

Prioritas : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi

Program ini bertujuan memperkuat kelembagaan, mewujudkan pemerataan lahan, dan menjamin ketersediaan sarana serta prasarana produksi untuk mendukung produktivitas sektor pertanian dan pembangunan desa dengan menitikberatkan pada penguatan kelembagaan petani, dan pelaku usaha mikro agar lebih mandiri, adaptif, dan berdaya saing. Pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas kelembagaan diarahkan pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan serta penerapan teknologi ramah lingkungan.

Redistribusi lahan dilakukan dengan prinsip keadilan dan keberlanjutan, memberikan akses yang lebih merata terhadap lahan pertanian dan perikanan yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem. Kebijakan redistribusi ini diintegrasikan dengan pengelolaan lahan berbasis ekonomi hijau untuk memastikan keseimbangan antara produktivitas dan konservasi sumber daya. Selain itu, program ini menitikberatkan pada penyediaan sarana dan prasarana produksi yang memadai, seperti irigasi, alat pertanian, fasilitas penyimpanan dan pengolahan hasil, serta akses teknologi tepat guna yang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha. Pengembangan infrastruktur produksi ini diharapkan mampu menunjang pertumbuhan usaha pertanian, perikanan, dan usaha mikro secara berkelanjutan. Melalui penguatan kelembagaan yang kokoh, distribusi lahan yang adil, dan ketersediaan sarana serta prasarana yang memadai, program ini bertujuan menciptakan ekosistem produksi yang produktif, berkelanjutan, dan inklusif, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 4.18
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 7. Penguatan Kelembagaan, Redistribusi Lahan, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Produksi

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 7 : Penguatan kelembagaan, redistribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi			
Tujuan : Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota			
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Persen	33.24%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat dan mengembangkan sistem pertanian berbasis inovasi IPTEK, ekonomi kerakyatan dan ekonomi hijau.
2. Mendorong hilirisasi untuk komoditas pertanian, peternakan dan perikanan sehingga menjamin terlaksananya ketahanan pangan berkelanjutan.

Prioritas 8 : Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.

Kabupaten Lima Puluh Kota menghadapi berbagai tantangan terkait penyebaran infrastruktur yang merata. Disparitas penyebaran infrastruktur di wilayah ini mencakup aspek-aspek seperti aksesibilitas transportasi, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan,serta jaringan telekomunikasi. Disparitas terkait dengan pemerataan infrastruktur terlihat dari belum mampu Pemerintah Daerah untuk memindahkan bangunan strategis yang ada di luar wilayah administrasi kabupaten serta belum mampu untuk melakukan perawatan dan pemeriksaan secara berkala terhadap kelayakan gedung strategis yang ada yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran untuk pembangunan gedung strategis yang baru dan perawatan serta pemeriksaan gedung strategis secara berkala. Permasalahan lain adalah terkait dengan sarana dan prasarana umum yang masih belum dalam kondisi layak. Hal tersebut dikarenakan kemampuan pendanaan dan pembiayaan untuk infrastruktur yang masih rendah, belum terjaminnya akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar serta menata kawasan kumuh juga menjadi isu strategis daerah terkait infrastruktur. Ketaatan terhadap tata ruang yang masih rendah juga menjadi permasalahan yang harus menjadi pemikiran kedepan pemerintah daerah, sehingga penataan ruang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam kebijakan penataan ruang.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.19
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 8. Pemerataan infrastruktur Strategis, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 6 : Pemerataan infrastruktur strategis, pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana			
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan			
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Persen	29.08
	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Persen	16.83%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak
2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup
3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana

Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

Program ini fokus pada peningkatan kualitas dan pemerataan jaringan jalan serta fasilitas umum yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan publik di seluruh wilayah. Pembangunan dan pemeliharaan jalan utama, jalan kabupaten, serta fasilitas publik seperti pasar, taman, dan fasilitas kesehatan dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Penerapan prinsip ramah lingkungan dan desain inklusif menjadi prioritas untuk menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Sinergi antar pemangku kepentingan dan pengelolaan sumber daya yang efektif diharapkan mempercepat tercapainya pembangunan infrastruktur berkualitas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Penataan infrastruktur strategis dan terpadu** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.20
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 9. Penataan infrastruktur strategis dan terpadu

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 9 : Penataan infrastruktur strategis dan terpadu			
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan			
Sasaran 1 : Meningkatnya penataan dan Pembangunan infrastruktur di Kawasan Ibu Kota Kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	76.012

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan sinergitas dalam pembangunan infrastruktur dasar untuk pemenuhan pelayanan dasar dan terciptanya kawasan permukiman yang layak
2. Menciptakan regulasi dalam pengelolaan sumber daya alam dalam upaya menjaga kualitas lingkungan hidup
3. Memetakan wilayah yang berpotensi bencana dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung dan mendorong peran aktif masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola resiko bencana

Prioritas 10 Perwujudan Kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

Program ini bertujuan memperkuat kemandirian nagari dengan fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pengelolaan nagari diarahkan untuk memberdayakan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan, sehingga tercipta pemerintahan lokal yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warganya.

Selain itu, program ini berkomitmen meningkatkan kualitas dan pemerataan layanan dasar, sosial, ekonomi, dan lingkungan di seluruh nagari. Upaya ini meliputi peningkatan akses air bersih, sanitasi, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi lokal yang berbasis potensi wilayah. Aksesibilitas antar wilayah nagari juga diperkuat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat lokal. Adapun bentuk kegiatan dari perwujudan kemandirian nagari berbasis potensi wilayah adalah pemenuhan layanan dasar dan aksesibilitas nagari di nagari yang berstatus maju menuju nagari berstatus mandiri.

Pendekatan pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan tata kelola yang baik dan layanan yang merata, nagari diharapkan menjadi unit pemerintahan yang mandiri, berdaya saing, dan mampu menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Adapun sasaran dan indikator kinerja pada **Penataan infrastruktur strategis dan terpadu** Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Prioritas Tabel 4.21
Sasaran dan Target Indikator Kinerja Tahun 2026
Prioritas 10. Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah

URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		SATUAN	VOLUME
Prioritas 10 : Perwujudan kemandirian Nagari berbasis potensi wilayah			
Tujuan : Meningkatkan status nagari			
Sasaran 1 : Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dan kemandirian nagari	Persentase Desa Mandiri (%)	Persen	7.93%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029

Adapun arah kebijakan pada prioritas pembangunan tersebut pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sektor layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan tata kelola pemerintahan nagari

Program prioritas daerah adalah program utama pembangunan daerah yang bersifat lintas sektoral sebagai penjabaran operasional dari rencana pembangunan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk 5 (lima) tahun, dan dilaksanakan setiap tahun selama periode tersebut. Penjabaran program pembangunan daerah pendukung agenda prioritas daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.22
Program-Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju 2027

Prioritas Pembangunan/Misi/ Tujuan/ Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2025	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2026		2027		
			Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	
Prioritas Pembangunan 1 : Akselerasi penerapan nilai-nilai agama							
Misi 1 Memantapkan kehidupan Masyarakat yang berakhlaq dan berbudaya							
Tujuan 1 : Meningkatkan penerapan agama, adat dan budaya di masyarakat berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara', Syarak Basandi Kitabullah							
Sasaran 1 : Meningkatnya peran masyarakat dan fungsi kelembagaan agama, adat dan budaya							
Program pemerintahan dan kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100%	9.413.852.700	100%	10.265.230.000	SETDA (Bagian Kesra)
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	85,05 %	68%	5.000.000.000	70%	26.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	63%	67%	7.100.000.000	68%	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat kegemaran Membaca Masyarakat	79,67	80,25	1.355.000.000	80,75	1.382.100.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	725.000.000	60,9	739.500.000	Pengendalian Penduduk, Keluarga Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Indeks perlindungan khusus anak (ipka)	81,6	81,7		81,8		

Program Prioritas 2 : Reformasi Birokrasi dan optimalisasi pendapatan daerah							
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih							
Tujuan : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik							
Sasaran 1: Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah							
Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	100%	100%	414.426.276	100%	461.220.650	BAPELITBANG
	Persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	100%	100%		100%		
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penambahan Aset Tetap	100%	100%				BADAN KEUANGAN
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	96,7 %	97,3 %	173.429.183.500	97,8 %	179.309.259.999	BADAN KEUANGAN
Sasaran2 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik							
Program Penyelenggaraan Pengawasan	1. Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 2. Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun Anggaran N-1	in 83,5 eks 85	in 84 eks 86	1.273.804.144	in 84,5 eks 86,5	1.291.637.402	Inspektorat
Program penelitian dan pengembangan daerah	Persentase Hasil Kelitbangan yang Termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan	8%	10%	115.906.200	12%	368.000.000	BAPELITBANG
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%		100%		SETDA (BAGIAN ORGANISASI)

	terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
Program Pembinaan Keluarga Berencana	angka prevalensi kontrasepsi modern/modern contraceptive (mcpr)	63,81%	65,82%	3.399.554.000	68,40%	3.467.545.080	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Persentase kebutuhan ber kb yang tidak terpenuhi (unmet need)	13%	12%		11%		
	Persentase kampung keluarga berkualitas mandiri	63,20%	69,60%		75,90%		
Program Pengendalian Penduduk	Angka kelahiran total(total fertility rate/tfr)	2,35	2,34	186.481.000	2,33	190.210.620	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.9%	91,4%	134750000	91,9%	137.450.000	Dinas Pangan
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Peningkatan Rumah Tangga yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak dan Aman)	85,05 %	68%	5.000.000.000	70%	26.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	63%	67%	7.100.000.000	68%	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Makan Ikan	40 kg/kapita/tahun	1,24 kg/kapita/tahun	144.8340.500	41,82 kg/kapita/tahun	441.680.000	Dinas Perikanan
	Jumlah produksi hasil olahan perikanan (Ton)	395	400		405		
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	100%	725.000.000	60,9	739.500.000	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
	Indeks perlindungan khusus anak (ipka)	81,6	81,7		81,8		

Prioritas 4 : Peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perlindungan sosial							
Misi 3 : Meningkatkan Sumber daya Manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif							
Tujuan : Meningkatkan Produktivitas dan daya saing tenaga kerja							
Sasaran : Penguatan UKM dan Kewirausahaan Lokal							
Program perencanaan dan pembangunan industri	Persentase peningkatan produk IKM yang berkualitas (%)	13,32	10%	1.148.449.800	12%	1.090.000.000	Dinas perindustrian tenaga kerja dan transmigrasi
Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase peningkatan penempatan tenaga kerja (%)	55.%	60%	129.446.647	70%	830.000.000	Dinas perindustrian tenaga kerja dan transmigrasi
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Presentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	30%	35%	105.996.500	2,5%	520.000.000	Dinas perdagangan koperasi usaha kecil dan menengah
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Terlaksananya Koordinasi bidang kesejahteraan rakyat (%)	100	100%	9.413.852.700	100%	10.265.230.000	Setda (bagian kesra)
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Pelayanan Rehabilitasi Sosial	100%	100%	1.635.610.000	100%	2.367.806.403	Dinas sosial
Prioritas 5 : Penguatan koperasi, usaha mikro dan kecil							
Misi 4 : Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata Yang tangguh dan Berkeadilan							
Tujuan 1 :Meningkatkan pertumbuhan ekonomi kerakyatan							
Sasaran 1: Penguatan UMK dan Kewirausahaan Lokal							
Program Perizinan dan Pendaftaran perusahaan	Presentase Izin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi	0%	70%	10.000.000	70%	36.300.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1. Presentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	30%	35%	105.996.500	2,5%	520.000.000	DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
Program Pengembangan UMK	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor	1,8%	1,8%	26.001.100,00	2%	360.000.000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program koordinasi Dan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD Lingkup Bidang Koordinasi Perencanaan	100%	100%	778.582.278	100%	1.032.000.000	Bappelitbangda

Prioritas 6 : Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi kreatif							
Misi 4 : Membangun Ekonomi Kerakyatan dan Pariwisata yang tangguh dan berkeadilan							
Tujuan 2 : Menjadikan pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai sektor unggulan di Kabupaten Lima Puluh Kota							
Sasaran 1: Mengembangkan potensi pariwisata kabupaten Lima Puluh Kota							
Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan kunjungan wisatawan	13%	15%	1.022.000.000	17%	1.328.600.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang aktif dan tervalidasi	15%	16%	370.000.000	17%	850.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	0%	20%	320.000.000	20%	320.000.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Program Prioritas 7: Penguatan kelembagaan, Retribusi lahan, ketersediaan sarana dan prasarana produksi							
Misi 5 : Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing							
Tujuan 1 :Menjadikan komoditas pertanian dan perikanan sebagai unggulan Kabupaten Lima Puluh Kota							
Sasaran 1 : Meningkatnya produksi sektor pertanian dan perikanan sesuai penerapan ekonomi hijau							
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	109.11%	100%	176.250.000	100%	179.780.000	Dinas Pangan
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	8,86%	7,59%	19.920.000	6,39%	20.320.000	Dinas Pangan
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	90.9%	91,4%	134.750.000	91,9%	137.450.000	Dinas Pangan
Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	10%	2%	233.065.111	2%	345.700.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura	2%	2%		2%		
	Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan	2%	2%		2%		
	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	2%	7%	436.000.000	7%	800.000.000	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian	95,00	95,00	155.000.000	96,00	158.100.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim terhadap pertanian	95,00	95,00		96,00		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	100%	100%	5.250.000	100%	25.000.000	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
	Persentase Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan	2%	2%	15.881.700	2%	28.059.200	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan
Prioritas 8 : Pemerataan Infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan Penanggulangan Bencana							
Misi 6 : Meningkatkan Infrastruktur strategis yang berkelanjutan							
Tujuan 1 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan							
Sasaran 1 : Membangun infrastruktur strategis							
Program Pengelolaan Sumber daya Air	1. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	1. 41%	1. 41,36%	8.300.000.000	1. 43%	14.160.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	2. Persentase luas daerah irigasi dalam kondisi baik (%)	2. 49%	2. 51%		2. 52%		
Program penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	0 %	10%	100.000.000	10%	240.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penataan bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	77%	80%	1.350.000.000	82%	15.400.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	57.72%	59%	33.058.500.000	60%	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan penataan ruang	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran pemanfaatan Ruang di Daerah	100%	100%	1.900.000.000	100%	2.200.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Prioritas 9. Penataan Infrastruktur strategis dan terpadu							
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan							
Tujuan : Meningkatkan infrastruktur strategis yang berkelanjutan							
Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup							
Program Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	62,61	64,30	178.800.000	65,01	210.530.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program Pengelolaan sampah	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (indeks)	28,09	31,38	1.047.280.000	34,66	1.068.230.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman
Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	63%	67%	7.100.000.000	68%	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan	Persentase ruang terbuka hijau (RTH)	0,25	0,25	269.559.000	0,25	269.559.000	Dinas Lingkungan Hidup,

	sesuai standar, Persentase penderita Tuberkulosis mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar, Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memperoleh akses air minum (%)	63%	67%	7.100.000.000	68%	8.500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	57.72%	59%	33.058.500.000	60%	60.000.000.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Kawasan Permukiman	Persentase Berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (%)	0,83	1,66	308.000.000	2,49	314.160.000	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2026

Pelaksanaan pembangunan daerah tidak terlepas dari kerangka pendanaan yang diproyeksikan untuk tahun 2026. Kerangka pendanaan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2026 diproyeksikan akan mengalami peningkatan. Kebijakan belanja diarahkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan dan sasaran daerah terutama dalam meningkatnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM), kesejahteraan masyarakat, transformasi ekonomi yang berdaya saing, terwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik dan pembangunan wilayah berkelanjutan untuk keberdayaan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III, proyeksi kerangka pendanaan daerah tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.1
Kerangka Pendanaan Daerah pada RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026

No	Uraian	2026
1	2	3
4	PENDAPATAN	1.360.521.575.144
4.1	Pendapatan Asli Daerah	140.462.790.989
4.1.01	Pajak Daerah	62.453.461.306
4.1.02	Retribusi Daerah	41.051.601.755
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.513.273.477
4.1.04	Lain-lain PAD	31.444.454.451
4.2	Pendapatan Transfer	1.220.058.784.155
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.176.167.519.000
4.2.01.05	Dana Desa	86.629.539.000
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil	27.382.245.000
4.2.01.07.01	DBH Pajak	8.462.969.000
4.2.01.07.02	DBH SDA	16.702.934.000
4.2.01.07.03	DBH Lainnya	2.216.342.000
4.2.01.08	DAU	776.228.584.000
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	629.953.136.000
4.2.01.08.02	DAU Ditentukan Penggunaannya	110.495.996.000
4.2.01.08.02.0001	DAU Dukungan Pendanaan P3K	13.938.826.000
4.2.01.08.02.0002	DAU Ditentukan Bidang Pendidikan	67.320.090.000
4.2.01.08.02.0003	DAU Ditentukan Bidang Kesehatan	29.237.080.000
4.2.01.08.02.0004	DAU Ditentukan Bidang Pekerjaan Umum	35.779.452.000
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus	285.927.151.000
4.2.01.09.01	DAK Fisik	50.443.326.000
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	235.483.825.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.891.265.155,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	43.891.265.155,00
5	BELANJA	1.360.521.575.144
5.1	Belanja Operasi	1.023.709.774.427
5.1.01	Belanja Pegawai	807.157.081.490
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	189.552.692.938
5.1.05	Belanja Hibah	25.000.000.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000

No	Uraian	2026
1	2	3
5.2	Belanja Modal	160.606.482.611
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	25.000.000.000
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.000.000.000
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	81.817.051.510
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	13.739.431.101
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	173.705.318.105,60
5.4.01	Belanja Bagi hasil	6.714.696.205,60
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	166.990.621.900,00
	Surplus(deisit)	0,00
	PEMBIAYAAN	0
	Penerimaan pembiayaan	0
	Pengeluaran pembiayaan	0

5.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Alokasi Belanja Operasi digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja barang dan jasa, dan belanja subsidi. Sedangkan Belanja Transfer digunakan untuk belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Alokasi Belanja Daerah digunakan untuk membiayai program, kegiatan, dan sub kegiatan masing-masing Perangkat Daerah (PD) sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Urusan tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Rekapitulasi jumlah usulan anggaran untuk pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026 yang bersumber dana dari APBD Kabupaten, dan dana transfer pusat dapat diliast pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif RKPD Tahun 2026

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	2	3
A.	Sekretariat Daerah	38.327.341.595
B.	Sekretariat DPRD	32.167.776.925
C.	Inspektorat	12.439.115.885
D.	Dinas Daerah	
1.	Dinas Kesehatan	172.671.903.489
2.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	558.457.810.870
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.281.964.697
4.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	7.570.486.511
5.	Dinas Pemadam Kebakaran	8.373.529.226
6.	Dinas Sosial	7.495.335.832
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5.161.227.449

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	2	3
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.082.160.728
9.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.834.101.488
10.	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.471.888.553
11.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	6.855.123.504
12.	Dinas Komunikasi dan Informatika	8.014.652.264
13.	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	10.827.636.698
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari	6.736.278.860
15.	Dinas Perhubungan	16.527.683.989
16.	Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman	7.967.882.934
17.	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan	17.698.131.611
18.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.313.929.976
19.	Dinas Perikanan	7.947.166.344
20.	Dinas Pangan	3.144.918.211
21.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.128.564.039
E.	Badan Daerah	
1.	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	7.503.194.723
2.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.122.440.179
3.	Badan Keuangan	200.034.652.450
4.	Badan Kesbangpol	5.307.271.206
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.747.896.608
F.	Kecamatan	
1.	Kecamatan Gunuang Omeh	1.335.833.783
2.	Kecamatan Bukik Barisan	1.621.415.530
3.	Kecamatan Suliki	1.840.279.889
4.	Kecamatan Guguak	1.716.209.464
5.	Kecamatan Mungka	1.366.826.872
6.	Kecamatan Akabiluru	1.818.614.830
7.	Kecamatan Payakumbuh	2.314.464.076
8.	Kecamatan Luak	1.876.292.043
9.	Kecamatan Lareh Sago Halaban	1.842.689.130
10.	Kecamatan Situjuah Limo Nagari	1.664.974.065
11.	Kecamatan Harau	1.995.198.471
12.	Kecamatan Pangkalan Koto Baru	1.812.772.828

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pagu Anggaran
1	2	3
13.	Kecamatan Kapur IX	2.088.857.730
G.	Unit Pelaksana Teknis Dinas	
1.	RSUD Ahmad Darwis	70.281.964.697
	JUMLAH	1.360.521.575.344

Rencana program dan kegiatan yang diusulkan pendanaannya melalui sumber dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten telah dilaksanakan melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), berdasarkan hasil verifikasi dan kesepakatan antara masyarakat, para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, melalui pendekatan perencanaan yang komprehensif, meliputi pendekatan partisipatif, teknokratis, politik, dari atas ke bawah (top-down) dan dari bawah ke atas (bottom up).

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing OPD yang nantinya akan bermuara kepada program dan kegiatan prioritas daerah, juga mempertimbangkan perkembangan proporsi Belanja pada setiap OPD. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan prioritas daerah sesuai dengan hasil evaluasi pencapaian visi misi dan berubahnya RPJMD.

Untuk mewujudkan prioritas dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan, maka masing-masing OPD menjabarkannya kedalam bentuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Program, kegiatan dan sub kegiatan ini ditampilkan dalam bentuk matrik rumusan rencana program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2026. Dalam matriks ini juga digambarkan indikator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan, target kinerja, lokasi, kebutuhan dana / pagu indikatif dan sumber dana serta catatan penting untuk mendukung program, kegiatan, dan sub kegiatan tersebut. Kebutuhan pendanaan per program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perangkat Daerah Tahun 2026 di sajikan secara rinci pada tabel dibawah ini:

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KAB. LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2026

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN						558.457.810.870,00							595.884.356.347,40	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						554.652.810.870,00							592.045.371.519,40	
	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						554.652.810.870,00							592.045.371.519,40	
1.	1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						460.572.470.561,00						-	474.636.466.646,00	
	1.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	15.020.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	63.811.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	3.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.762.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	459.816.083.713,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	473.741.778.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				4300 Orang/bulan	459.810.099.713,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-TPG PNSD, DAK NON FISIK-TAMSIL GURU PNSD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		473.733.550.940,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.645.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.645.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.984.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.645.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.645.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.645.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	16.350.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	17.985.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	16.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		17.985.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	115.989.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	112.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		79.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	65.989.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	174.416.778,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	219.420.806,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	8.814.978,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		9.696.500,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	130.652.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		143.724.306,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	34.949.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	191.608.610,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	210.779.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.750.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	86.991.110,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		95.700.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	102.117.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		112.329.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	243.002.460,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	269.941.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	39.189.960,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		43.109.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	154.456.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		172.436.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	39.084.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		43.098.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	10.271.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.298.100,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						94.050.558.309,00						-	117.376.142.473,40	
	1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	-	-			-	56.145.760.707,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	68.435.792.472,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.451.590.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah														
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.210.616.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				39 Unit	3.410.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.463.802.780,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				4 Ruang	210.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		604.943.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.053.162.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0014	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia				5 Paket	2.160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.372.040.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				373 Peserta Didik	421.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		463.271.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.01.0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar				1 Orang	246.131.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		268.707.670,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				450 Orang	701.271.281,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		702.069.060,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														
			Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah				373 Satuan Pendidikan	453.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		422.375.503,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				373 Satuan Pendidikan	36.807.661.826,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		40.488.428.009,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar														
			Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun				7 Ruang	1.283.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		220.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		330.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				373 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	31.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	341.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		373.695.300,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				8 Ruang	2.426.670.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.950.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.630.600.483,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				373 Satuan Pendidikan	36.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				35 Ruang	5.501.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.312.369.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar														
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				100 Peserta Didik	39.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		332.419.945,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.01.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				25 Paket	1.916.191.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.554.699.622,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	-	-			-	23.139.982.174,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	31.267.899.821,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium														
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.098.888.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun				14 Unit	765.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				14 Ruang	1.431.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.420.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		824.127.370,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium														
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		935.580.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				7 Unit	870.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		170.948.800,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah														
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia				6 Paket	1.988.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.200.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				500 Peserta Didik	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		203.610.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa														
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik				100 Peserta Didik	383.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		644.604.510,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				10 Orang	28.037.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		32.817.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				250 Orang	246.223.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.848.620,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan				61 Satuan Pendidikan	224.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		248.431.700,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama														
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS				61 Satuan Pendidikan	16.835.418.174,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOS KINERJA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		18.135.147.991,40	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				51 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		39.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		253.427.900,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				3 Kegiatan	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		39.600.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar				61 Satuan Pendidikan	36.814.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		995.053.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		110.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		510.213.330,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	-	-			-	9.017.917.138,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	9.914.482.600,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun				4 Unit	109.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		124.876.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD														
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia				1 Paket	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				90 Orang	147.398.138,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		177.157.200,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD														
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				90 Satuan Pendidikan	49.190.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>				296 Satuan Pendidikan	5.437.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP PAUD KINERJA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.980.920.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD														
			<i>Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i>				65 Orang	93.490.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan				100 Orang	29.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		16.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan														
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan				2 Konten Digital	38.025.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	44.662.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	55.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun				0 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		531.366.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru														
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah				4 Ruang	593.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		653.125.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi				1 Kegiatan	87.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula														
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat				1 Ruang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		33.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia				1 Paket	109.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD														
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia				2 Paket	1.514.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.650.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar				296 Satuan Pendidikan	362.527.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		355.058.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah														
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat				6 Ruang	195.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ENDIDIKAN-RE GULER-PAUD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		188.980.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	5.746.898.290,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	7.757.967.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik				900 Peserta Didik	15.138.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.518.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi				30 Orang	39.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.731.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan														
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen				38 Satuan Pendidikan	167.643.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		172.466.580,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP				38 Satuan Pendidikan	5.085.700.490,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN REGULER, DAK NON FISIK-DANA BOSP-BOP KESETARAAN KINERJA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.594.270.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan				1 Dokumen	43.788.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		27.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah														
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		[Persentase Pengelolaan Pendidikan Dasar]	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan				120 Orang	93.465.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		-	-	-	-	-	-	94.050.558.309,00	-	-	-	-	-	-	117.376.142.473,40	-
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik														
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar				50 Peserta Didik	63.002.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia				2 Paket	228.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		275.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN						29.782.000,00						-	32.762.400,00	
	1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	-	-			-	29.782.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	32.762.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				1 Dokumen	29.782.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		32.762.400,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.805.000.000,00							3.838.984.828,00	
	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						3.805.000.000,00							3.838.984.828,00	
1.	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						2.947.000.000,00						-	2.992.539.558,00	
	2.22.02.2.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	460.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-	-	461.443.727,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan				4 Objek	460.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA B BAT"	-		461.443.727,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.187.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-	-	996.925.831,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya														
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan				2 Objek	710.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		825.000.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>				2 Laporan	477.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		171.925.831,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.300.000.000,00			-	-	-	-	1.534.170.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat														
			<i>Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina</i>				220 Orang	800.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		922.020.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.02.2.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>				4 Unit	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		612.150.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
2.	2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						300.000.000,00						-	349.003.490,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	300.000.000,00			-	Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-	-	349.003.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional														
			<i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				7 Lembaga	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		349.003.490,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
3.	2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						444.000.000,00						-	381.941.780,00	
	2.22.05.2.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	202.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-	-	211.332.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan				20 Objek	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		44.528.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan				15 Objek	187.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	-		166.804.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	-	-			-	242.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-	-	170.609.780,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi				20 Objek	31.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		38.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya														
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan				2 Objek	211.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		132.109.780,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4.	2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN						114.000.000,00						-	115.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.22.06.2.01	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	-	-			-	114.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-	-	115.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya				40 Orang	114.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Memantapk an kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya "SAKATO B ERMARTA BAT"	-		115.500.000,00	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						70.281.964.697,00							70.281.964.697,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						63.650.149.697,00						-	63.650.149.697,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	63.650.149.697,00	-	-	-	-	-	-	63.650.149.697,00	-
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Rumah Sakit	-			100 %	27.665.560.697,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis	-	27.665.560.697,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				300 Orang/bulan	27.665.560.697,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen- yangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis		27.665.560.697,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Rumah Sakit	-			100 %	123.634.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	123.634.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	4.170.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		4.170.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	13.790.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		13.790.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	105.674.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangu- nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		105.674.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
		-	-	-	-	-	-	63.650.149.697,00	-	-	-	-	-	-	63.650.149.697,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Tersedianya jasa penunjang rumah sakit</i>	-			100 %	754.805.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	754.805.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	741.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		741.085.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	13.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		13.720.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	-			100 %	106.150.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	106.150.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				4 Unit	106.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		106.150.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan Rumah Sakit	-			100 %	35.000.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	35.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	35.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	PENDAPATAN DARI BLUD, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangandang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		35.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						6.004.315.000,00						-	6.004.315.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sumber daya rumah sakit sesuai standar	-			70 %	5.679.315.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	5.679.315.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun				2 Unit	1.845.813.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.845.813.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit				3 Unit	1.833.502.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.833.502.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				3 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-PEN GUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit														
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit				2 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN-PENGUATAN SISTEM KESEHATAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		1.000.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator Mutu Nasional yang mencapai target Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target	-			75 % 84 %	325.000.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	325.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				12 Dokumen	325.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyanggah disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		325.000.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						627.500.000,00						-	627.500.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencapai target Terlaksananya Pemenuhan Sumber Daya Rumah Sakit sesuai standar	-			84 % 70 %	627.500.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota	-	627.500.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				12 Dokumen	627.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Suliki	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	RSUD dr. Achmad Darwis dan Masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota		627.500.000,00	BLUD RSUD DR. ACHMAD DARWIS
		DINAS KESEHATAN						134.721.029.489,00							136.815.606.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						134.721.029.489,00							136.815.606.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						134.721.029.489,00							136.815.606.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						98.368.000.000,00						-	99.475.606.000,00	
	1.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	33.516.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		33.516.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	97.565.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	98.110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1000 Orang/bulan	97.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA, PENDAPATAN BAGI HASIL, DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		98.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 dokumen Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	25.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		25.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	85.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		10.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	375.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	734.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	167.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	208.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		534.750.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	257.500.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	417.340.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				4 Unit	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		97.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				2 Unit	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		190.340.000,00	DINAS KESEHATAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						34.939.398.489,00						-	35.305.000.000,00	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sarana prasarana puskesmas yang memenuhi standar sesuai Pemenkes 43 tahun 2019	-			100 %	6.408.644.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	26.505.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000				1 Unit	1.250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.000.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas														
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar				2 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		750.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas														
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas				2 Unit	75.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya				2 Unit	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan				4 Unit	112.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar				22 Unit	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan														
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				2 Paket	4.250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan				22 Paket	301.644.000,00	-	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	28.240.754.489,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	8.240.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				615 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin														
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				612 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				573 Orang	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita														
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2694 Orang	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7883 Orang	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		350.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif														
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				20978 Orang	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				2016 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi														
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				3121 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				418 Orang	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				68 Orang	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				1149 Orang	450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		650.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV														
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				730 Orang	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				12 Dokumen	235.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	78.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				102.391 Orang	142.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	702.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		950.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat				1 Dokumen	22.941.754.489,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK ROKOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan				10 Paket	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				12 Laporan	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)				1 Unit	1.100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.250.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				1959 Orang	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-			-	210.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				5 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	110.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya														
			Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan				22 Unit	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
3.	1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						708.500.000,00						-	940.000.000,00	
	1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	-	-			-	263.500.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	425.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)				4 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan				1 Dokumen	158.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya				100 Orang	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
4.	1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						385.131.000,00						-	445.000.000,00	
	1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	-	-			-	63.730.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				1 Dokumen	63.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	-	-			-	137.387.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				1 Dokumen	137.387.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	-	-			-	184.014.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan				25 Unit	184.014.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-PENGA WASAN OBAT DAN MAKANAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		195.000.000,00	DINAS KESEHATAN
5.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						320.000.000,00						-	650.000.000,00	
	1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	235.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat				1 Dokumen	235.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		450.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	85.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	200.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat				250 Keluarga	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS TARAM						1.556.510.000,00							1.942.900.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.556.510.000,00							1.942.900.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.556.510.000,00							1.942.900.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.185.000.000,00						-	1.285.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.185.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.285.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.185.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.285.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						366.010.000,00						-	612.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	366.010.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	612.900.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				17 Orang	12.395.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				242 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				32 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		150.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	8.565.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				193 Orang	2.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Taram Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Bukik Limbuku Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Batu Balang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		150.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				93 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK DINAS-BOK KAB UPATEN/KOTA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		400.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5.500.000,00						-	45.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.500.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS TARAM
		PUSKESMAS SULIKI						1.741.100.000,00							1.945.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.741.100.000,00							1.945.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.741.100.000,00							1.945.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.200.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.300.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.300.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						534.600.000,00						-	637.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	534.600.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	637.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				22 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				262 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	16.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	5.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		200.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	25.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				156 Orang	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		97.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				79 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	15.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-AKREDI TASI PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	10.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS SULIKI
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						6.500.000,00						-	7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.500.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	7.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS SULIKI
		PUSKESMAS SITUJUJUH						1.942.850.000,00							2.114.150.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.942.850.000,00							2.114.150.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.942.850.000,00							2.114.150.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.450.000.000,00						-	1.550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.450.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.550.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.550.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						486.350.000,00						-	556.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	486.350.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	556.650.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				35 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				434 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				4 Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				65 Orang	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	14.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	12.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				113 Orang	3.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.300.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				234 Orang	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	17.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS SITUJUJH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						6.500.000,00						-	7.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.500.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	7.500.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS SITUJUJUH
		PUSKESMAS RIMBO DATA						813.540.000,00							967.400.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						813.540.000,00							967.400.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						813.540.000,00							967.400.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						354.000.000,00						-	450.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	354.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	450.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	354.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		450.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						455.100.000,00						-	512.400.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	455.100.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	512.400.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				6 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				92 Orang	5.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.300.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				12 Orang	14.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		160.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.800.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				22 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		400.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				45 Orang	150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		250.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	22.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		23.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4.440.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.440.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	5.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS RIMBO DATA
		PUSKESMAS BARUH GUNUANG						1.015.569.000,00							1.186.150.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.015.569.000,00							1.186.150.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.015.569.000,00							1.186.150.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						565.000.000,00						-	650.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	565.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	650.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	565.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		650.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						440.850.000,00						-	523.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	440.850.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	523.650.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				9 Orang	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				94 Orang	27.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		37.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	14.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				17 Orang	8.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	4.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.650.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				39 Orang	9.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	58.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				80 Orang	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	26.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						9.719.000,00						-	12.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.719.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	12.500.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	9.719.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS BARUH GUNUANG
		PUSKESMAS PANGKALAN						2.073.220.000,00							2.269.400.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.073.220.000,00							2.269.400.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.073.220.000,00							2.269.400.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.578.000.000,00						-	1.678.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.578.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.678.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.578.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.678.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						493.520.000,00						-	588.900.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	493.520.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	588.900.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				41 Orang	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				498 Orang	23.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		33.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				76 Orang	18.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.100.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.300.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				206 Orang	8.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.500.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	22.420.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		32.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.700.000,00						-	2.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.700.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	2.500.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS PANGKALAN
		PUSKESMAS BANJA LOWEH						1.068.242.000,00							1.255.700.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.068.242.000,00							1.255.700.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.068.242.000,00							1.255.700.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						615.000.000,00						-	715.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	615.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	715.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	615.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		715.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						448.900.000,00						-	534.600.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	448.900.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	534.600.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				221 Orang	26.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		36.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	6.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	10.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.300.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				66 Orang	5.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				32 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		22.500.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.250.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	21.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4.342.000,00						-	6.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.342.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	6.100.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.342.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.100.000,00	PUSKESMAS BANJA LOWEH
		PUSKESMAS TANJUNG PATI						2.821.796.000,00							3.002.750.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.821.796.000,00							3.002.750.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.821.796.000,00							3.002.750.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.250.000.000,00						-	2.350.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.250.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	2.350.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.350.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						566.766.000,00						-	646.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	566.766.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	646.750.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				42 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				589 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	11.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				78 Orang	11.189.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		150.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	9.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		14.500.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.650.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				388 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		85.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				186 Orang	524.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	14.928.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		16.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	3.375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5.030.000,00						-	6.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.030.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	6.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.000.000,00	PUSKESMAS TANJUNG PATI
		PUSKESMAS MUNGO						2.542.110.000,00							2.757.250.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.542.110.000,00							2.757.250.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.542.110.000,00							2.757.250.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.043.000.000,00						-	2.143.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.043.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	2.143.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.043.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.143.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						490.125.000,00						-	604.250.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	490.125.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	604.250.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				21 Orang	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				389 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.650.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				40 Orang	17.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		18.500.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	135.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		145.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	14.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	14.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				295 Orang	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		150.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			<i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>				142 Orang	900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	9.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						8.985.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.985.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	8.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS MUNGO
		PUSKESMAS PAKAN RABAA						2.152.240.000,00							2.342.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.152.240.000,00							2.342.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.152.240.000,00							2.342.500.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.685.000.000,00						-	1.785.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.685.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.785.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.685.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.785.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						462.850.000,00						-	551.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	462.850.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	551.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				50 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				624 Orang	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				95 Orang	19.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	16.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				248 Orang	4.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				119 Orang	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4.390.000,00						-	6.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.390.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	6.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.390.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS PAKAN RABAA	
		PUSKESMAS PILADANG						1.073.615.000,00								1.279.080.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.073.615.000,00							1.279.080.000,00		
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.073.615.000,00							1.279.080.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						650.000.000,00						-	750.000.000,00		
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	650.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	750.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		750.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						418.635.000,00						-	522.580.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	418.635.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	522.580.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				7 Orang	22.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				109 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				13 Orang	13.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		150.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	3.825.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		880.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				111 Orang	9.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.500.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	112.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				54 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	9.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		650.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	28.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PILADANG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						4.980.000,00						-	6.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	4.980.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	6.500.000,00	PUSKESMAS PILADANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	4.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS PILADANG
		PUSKESMAS BATU HAMPAR						1.843.530.000,00							2.065.950.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.843.530.000,00							2.065.950.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.843.530.000,00							2.065.950.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.385.000.000,00						-	1.438.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.385.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.438.500.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.385.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.438.500.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						451.800.000,00						-	617.450.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	451.800.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	617.450.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				26 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				348 Orang	22.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	13.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				48 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		97.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.800.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				181 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.500.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		85.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		98.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				87 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	9.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		52.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						6.730.000,00						-	10.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.730.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	6.730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS BATU HAMPAR
		PUSKESMAS HALABAN						1.441.375.000,00							1.633.600.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.441.375.000,00							1.633.600.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.441.375.000,00							1.633.600.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						970.000.000,00						-	1.070.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	970.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.070.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	970.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.070.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						463.025.000,00						-	553.600.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	463.025.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	553.600.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				28 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				343 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				3 Orang	14.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				51 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		19.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.100.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				156 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		100.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				75 Orang	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	10.375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						8.350.000,00						-	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	8.350.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	10.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	8.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS HALABAN
		PUSKESMAS MUARO PAITI						1.929.799.000,00							2.130.609.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.929.799.000,00							2.130.609.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.929.799.000,00							2.130.609.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.350.000.000,00						-	1.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.350.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.450.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.450.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						577.889.000,00						-	678.109.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	577.889.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	678.109.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				19 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				208 Orang	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	8.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				35 Orang	37.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		160.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	23.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	19.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	7.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.800.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				181 Orang	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		115.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				87 Orang	1.209.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.309.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	11.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	5.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						1.910.000,00						-	2.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.910.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	2.500.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	1.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.500.000,00	PUSKESMAS MUARO PAITI
		PUSKESMAS SIALANG						1.581.319.000,00							1.775.650.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.581.319.000,00							1.775.650.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.581.319.000,00							1.775.650.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						985.000.000,00						-	1.085.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	985.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.085.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	985.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.085.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						593.409.000,00						-	687.150.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	593.409.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	687.150.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				49 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				555 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	11.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				91 Orang	41.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	165.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		175.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	6.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				138 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				66 Orang	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		550.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		13.600.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.409.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS SIALANG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						2.910.000,00						-	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.910.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	3.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	2.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS SIALANG
		PUSKESMAS KOTO BARU SMLG						2.846.775.000,00							3.004.950.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.846.775.000,00							3.004.950.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.846.775.000,00							3.004.950.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.333.000.000,00						-	2.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	2.333.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	2.400.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	2.333.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.400.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						509.875.000,00						-	599.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	509.875.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	599.950.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				73 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				921 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				8 Orang	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.650.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				137 Orang	8.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	16.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		4.300.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				376 Orang	16.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi</i>				1 Dokumen	23.175.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			<i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i>				1 Dokumen	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	16.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						3.900.000,00						-	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.900.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	5.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS KOTO BARU SMLG
		PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG						2.343.480.000,00							2.509.100.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.343.480.000,00							2.509.100.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.343.480.000,00							2.509.100.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.895.000.000,00						-	1.995.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.895.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.995.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.895.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.995.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						442.780.000,00						-	507.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	442.780.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	507.400.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				44 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				606 Orang	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	2.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				83 Orang	10.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	9.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.750.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	14.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		16.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				287 Orang	7.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.650.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		70.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		105.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				138 Orang	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		2.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	12.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		14.500.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	6.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.500.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	5.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	29.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						5.700.000,00						-	6.700.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.700.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	6.700.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.700.000,00	PUSKESMAS DANGUNG-DANGUNG
		PUSKESMAS MUNGKA						2.392.455.000,00							2.595.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.392.455.000,00							2.595.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						2.392.455.000,00							2.595.500.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.885.000.000,00						-	1.988.500.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	1.885.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.988.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1.885.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.988.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						498.075.000,00						-	594.500.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	498.075.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	594.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				51 Orang	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				632 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				5 Orang	9.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				97 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		140.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	15.525.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	5.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				291 Orang	11.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		105.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				140 Orang	150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	10.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	18.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						9.380.000,00						-	12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	9.380.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	12.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	9.380.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS MUNGKA
		PUSKESMAS PADANG KANDIS						1.014.895.000,00							1.185.550.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.014.895.000,00							1.185.550.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.014.895.000,00							1.185.550.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						590.000.000,00						-	690.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	590.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	690.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	590.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		690.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						417.550.000,00						-	487.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	417.550.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	487.050.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				15 Orang	19.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		22.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				177 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		75.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				28 Orang	27.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	9.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	4.725.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	1.125.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				106 Orang	5.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		105.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	1.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.550.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7.345.000,00						-	8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.345.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	8.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	7.345.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.500.000,00	PUSKESMAS PADANG KANDIS
		PUSKESMAS KOTO TINGGI						1.374.245.000,00							1.486.500.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.374.245.000,00							1.486.500.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.374.245.000,00							1.486.500.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						920.000.000,00						-	970.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	920.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	970.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	920.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		970.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						450.700.000,00						-	511.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	450.700.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	511.500.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			<i>Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>				21 Orang	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				290 Orang	28.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				38 Orang	7.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	8.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.500.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	2.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		3.500.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				144 Orang	9.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		50.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		115.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				69 Orang	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	15.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		17.500.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						3.545.000,00						-	5.000.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	3.545.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	5.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	3.545.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS KOTO TINGGI
		PUSKESMAS MAEK						1.290.438.000,00							1.451.800.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.290.438.000,00							1.451.800.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.290.438.000,00							1.451.800.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						813.000.000,00						-	913.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	813.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	913.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	813.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		913.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						469.488.000,00						-	530.300.000,00	
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	469.488.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	530.300.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				4 Orang	28.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				44 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				1 Orang	21.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				8 Orang	21.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		135.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	5.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		6.500.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	10.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunung Omeh, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		800.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				104 Orang	9.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		12.500.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		45.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				50 Orang	150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		500.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	3.138.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		5.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	32.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	PUSKESMAS MAEK
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7.950.000,00						-	8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.950.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	8.500.000,00	PUSKESMAS MAEK
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i>				1 Dokumen	7.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		8.500.000,00	PUSKESMAS MAEK
		PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG						1.091.771.000,00							1.209.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.091.771.000,00							1.209.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						1.091.771.000,00							1.209.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						570.000.000,00						-	620.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	-	-			-	570.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	620.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	570.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		620.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						513.921.000,00						-	579.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	513.921.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	579.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil														
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				16 Orang	26.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				205 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		40.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar				2 Orang	18.025.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		20.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				1 Dokumen	110.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga				1 Dokumen	13.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				1 Dokumen	7.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)														
			Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan				76 Orang	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		10.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas														
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	105.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		115.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria				37 Orang	150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				1 Dokumen	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				1 Dokumen	946.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan														
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan				1 Dokumen	24.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		27.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi				1 Dokumen	34.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		40.000.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
3.	1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						7.850.000,00						-	9.500.000,00	
	1.02.05.2.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	7.850.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	9.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				1 Dokumen	7.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		9.500.000,00	PUSKESMAS GUNUNG MALINTANG
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						73.015.079.334,00							94.420.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						72.915.079.334,00							94.270.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						72.915.079.334,00							94.270.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						12.256.579.334,00						-	11.170.000.000,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	12.256.579.334,00	-	-	-	-	-	-	11.170.000.000,00	-
	1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.733.579.334,00			-	-	-	-	10.015.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				100 Orang/bulan	9.723.579.334,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	153.000.000,00			-	-	-	-	255.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				2 Paket	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				2 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>				4 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	600.000.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				3 Unit	600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	1.040.000.000,00			-	-	-	-	320.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		80.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	945.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	710.000.000,00			-	-	-	-	450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				10 Unit	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya				9 Unit	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	440.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)						8.300.000.000,00						-	0,00	
		[Persentase Luas Daerah Irigasi dalam Kondisi Baik]	-	-	-	-	-	8.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.881.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi				1 KM	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				2 Dokumen	178.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.01.0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya														
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun				1 Unit	203.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		-	-	-	-	-	-	8.300.000.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.419.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan				0.778 KM	1.111.234.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				3.469 KM	4.293.315.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				0.367 KM	532.731.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya				5 Lembaga	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun				2 Dokumen	231.719.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM						2.450.000.000,00						-	3.500.000.000,00	
	1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.450.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan														
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				100 SR	2.450.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL						1.200.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.04.2.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.200.000.000,00			-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.04.2.01.0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun				10 Ton/hari	1.200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						5.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	5.000.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman														
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun				20 M³/Hari	2.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.05.2.01.0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)														
			Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun				1 M³/Hari	2.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
6.	1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE						1.000.000.000,00						-	3.000.000.000,00	
	1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.000.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun				10 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG						1.350.000.000,00						-	2.750.000.000,00	
	1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	-	-			-	1.350.000.000,00			-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	2.750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1.100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG														
			Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				250 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN						39.058.500.000,00						-	67.800.000.000,00	
	1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	-	-			-	39.058.500.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	67.800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun				5 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				150 KM	3.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan				5 KM	1.500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala				7 KM	14.058.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		18.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan														
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian				30 Meter	5.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		9.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi				5 KM	15.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PEKERJAAN UMUM	-	Meningkatk an Pemb angun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI						400.000.000,00						-	0,00	
	1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	-	-			-	339.037.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi				60 Orang	289.588.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				25 Lembaga	49.448.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi														
			Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan				2 Perangkat Pendukung	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan				4 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	-	-			-	60.963.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan				15 Paket Pekerjaan	60.963.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk				25 Lembaga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha				15 Badan Usaha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG						1.900.000.000,00						-	2.950.000.000,00	
	1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	-	-	-	400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.01.0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.600.000.000,00			-	-	-	-	2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.02.0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>				2 Dokumen	1.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pemanfaatan tata ruang yang telah sesuai</i>	-			20 Lokasi	100.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>				12 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						100.000.000,00							150.000.000,00	
	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						100.000.000,00							150.000.000,00	
1.	2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENKETA TANAH GARAPAN						100.000.000,00						-	150.000.000,00	
	2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	-	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	2.10.04.2.01.0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN						8.373.529.226,00							16.472.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.373.529.226,00							16.472.000.000,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						8.373.529.226,00							16.472.000.000,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.644.929.226,00						-	9.192.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.221.429.226,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	8.395.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				69 Orang/bulan	5.203.429.226,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		8.300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				3 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	105.500.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	410.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				9 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		72.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				9 Paket	30.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		72.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				9 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		72.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				14 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		35.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material														
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				5 Paket	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		8.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		36.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		25.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	55.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		30.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		10.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	174.000.000,91			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	182.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		12.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				4 Laporan	100.000.000,91	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	133.999.999,09			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				21 Unit	115.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		115.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	12.999.999,09	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		20.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		15.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
2.	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						2.728.600.000,00						-	7.280.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	2.660.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	6.135.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen NSPM Pen cegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		2.000.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkannya falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		110.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkannya falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		50.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal				1 Dokumen	500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkannya falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		600.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran				500 Orang	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		375.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya				13 Desa/Kelu rahan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait				1 Unit	500.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		2.500.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga				50 Keluarga	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	-	-			-	4.000.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran	-	-			-	4.600.000,00			-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian				1 Dokumen	4.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		70.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	-	-			-	54.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	650.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat														
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya				500 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		200.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran														
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya				13 Desa/Kelu rahan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.04.0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran</i>				1 Unit	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	-	-			-	6.000.000,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	225.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia</i>				1 Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
	1.05.04.2.05.0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						7.570.486.511,00							19.272.472.120,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.209.845.447,00						-	11.481.762.401,00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			20 %	15.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	57.264.747,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		57.264.747,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.918.353.247,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	6.948.567.987,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76 Orang/bulan	5.912.093.247,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PENGGAJIAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.913.587.862,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	6.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		34.980.125,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	5.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.825.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				136 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				4 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		25.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	135.972.200,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	499.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	1.804.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	33.108.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		47.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	23.999.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	10.558.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	62.301.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		403.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.257.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				20 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		57.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	12.100.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	546.312.153,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.700.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	11.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		75.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				36 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		462.612.153,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	123.420.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	348.617.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	120.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		328.817.514,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2.970.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		19.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2.	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.360.641.064,00						-	7.790.709.719,00	
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Persentase Penurunan Kasus Pelanggaran PERDA	-			100 %	1.289.746.564,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	6.461.537.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				36 Dokumen	36.490.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		183.645.656,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				30 Dokumen	21.835.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		612.152.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				1 Dokumen	32.491.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.650.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.02.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional														
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja				136 Orang	1.086.301.064,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	-		1.800.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan				22 laporan	49.991.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				22 Laporan	39.995.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayanijumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				30 Laporan	12.655.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		115.740.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				10 Unit	9.987.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	-			100 %	64.166.600,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	996.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				24 Laporan	10.421.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				24 Laporan	43.745.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		367.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				20 Laporan	9.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		279.841.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran PERDA	-			100 %	6.727.900,00			-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	332.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah															
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah				7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		297.331.063,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS															
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				2 Laporan	6.727.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		DINAS SOSIAL						7.495.335.832,00							8.244.937.070,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						7.495.335.832,00							8.244.937.070,00	
	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL						7.495.335.832,00							8.244.937.070,00	
1.	1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.488.415.500,00						-	4.988.360.940,00	
	1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	37.700.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	49.470.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.700.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		21.670.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		2.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Laporan	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		19.800.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.963.300.100,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	4.407.150.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.956.800.100,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		4.400.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	3.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		3.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	3.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		3.300.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	3.479.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	3.850.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				2 Laporan	3.479.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		3.850.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	142.762.600,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	156.794.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.081.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		3.389.100,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	24.984.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		27.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	9.312.700,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		9.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		11.000.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	95.384.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		105.004.900,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	69.058.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	76.026.940,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				14 Unit	22.043.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		24.216.940,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	47.015.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		51.810.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	70.892.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	73.475.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.125.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	26.442.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		29.150.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	43.200.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		43.200.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	201.223.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	221.595.000,00	DINAS SOSIAL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	92.449.800,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		101.695.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				13 Unit	8.850.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		9.900.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	99.924.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
2.	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						481.062.800,00						-	498.000.000,00	
	1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	481.062.800,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	498.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		110.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)														
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota				13 Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkatkan Kapasitasnya				93 Orang	351.062.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		355.000.000,00	DINAS SOSIAL
3.	1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						1.635.612.807,00						-	1.800.851.930,00	
	1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	-	-			-	829.311.407,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	913.919.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Orang	23.532.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		25.885.530,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang														
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	58.611.875,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		65.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		55.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				60 Orang	39.798.232,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		44.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				15 Orang	84.185.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		93.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				550 Orang	537.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		591.550.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota				25 Orang	35.434.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		38.984.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	-	-			-	806.301.400,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	886.932.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	238.552.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		262.407.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA														
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	531.229.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		591.525.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.04.2.02.0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	36.520.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		33.000.000,00	DINAS SOSIAL
4.	1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						378.315.329,00						-	416.146.800,00	
	1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	378.315.329,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	416.146.800,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				251846 Orang	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		93.500.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				18226 Orang	293.315.329,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		322.646.800,00	DINAS SOSIAL
5.	1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA						478.561.896,00						-	507.577.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	-	-			-	449.861.896,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	476.007.400,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				173 Orang	209.713.096,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		211.810.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	149.974.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pengentas an Kemiskinan	-		164.972.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota				9 Orang	25.510.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		28.061.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	64.664.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		71.164.200,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	28.700.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	31.570.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Kampung	28.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		31.570.000,00	DINAS SOSIAL
6.	1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN						33.367.500,00						-	34.000.000,00	
	1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	-	-			-	33.367.500,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	34.000.000,00	DINAS SOSIAL
	1.06.07.2.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota				1 Dokumen	33.367.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		34.000.000,00	DINAS SOSIAL
		DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA						6.855.123.504,00							7.453.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						354.446.647,00							520.000.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA						354.446.647,00							520.000.000,00	
1.	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						225.000.000,00						-	400.000.000,00	
		[Persentase Peningkatan Pelatihan Tenaga Kerja]	-	-	-	-	-	225.000.000,00	-	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-
	2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase terlaksananya pelatihan berdasarkan kompetensi	-			100 %	225.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n				32 Orang	225.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						129.446.647,00						-	120.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	129.446.647,00	-	-	-	-	-	-	120.000.000,00	-
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pelayanan antar kerja di daerah Kab 50 Kota	-			100 %	129.446.647,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja														
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				16 Orang	129.446.647,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						6.500.676.857,00							6.933.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						6.439.184.357,00							6.833.000.000,00	
1.	3.31.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.731.144.557,00						-	4.833.000.000,00	
	3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase sinergitas perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	-			100 %	17.499.900,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	17.499.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		23.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya administrasi keuangan perangkat daerah	-			100 %	3.452.073.657,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	3.365.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				45 Orang/bulan	3.438.068.357,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.350.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	14.005.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Persentase tersedianya administrasi kepegawaian perangkat daerah</i>	-			100 %	13.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		15.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tersedianya administrasi pelayanan umum perangkat daerah	-			100 %	414.988.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	460.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		30.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	54.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	234.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	-			100 %	99.947.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	99.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah</i>	-			100 %	457.400.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	377.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		400.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	276.236.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	320.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				20 Unit	179.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	46.936.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		60.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI						1.148.449.800,00						-	1.300.000.000,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyusunan dan evaluasi pembangunan industri Kab 50 Kota	-			100 %	1.148.449.800,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	1.300.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				1 Dokumen	890.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.000.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	225.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	33.419.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		50.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL						559.590.000,00						-	700.000.000,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI di Kab 50 Kota	-			100 %	559.590.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	700.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	159.590.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		500.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						61.492.500,00							100.000.000,00	
1.	3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI						61.492.500,00						-	100.000.000,00	
	3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Persentase pengembangan wilayah transmigrasi	-			100 %	61.492.500,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina				10 Kepala Keluarga	61.492.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
		DINAS PANGAN						3.144.918.331,00							0,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						3.144.918.331,00							0,00	
	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						3.144.918.331,00							0,00	
1.	2.09.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.950.242.631,00						-	0,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			-				-	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
	2.09.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			-				-	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.356.264.031,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	2.356.264.031,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				40 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				24 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				25 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			0				0 0	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				40 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	222.398.600,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	85.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	19.952.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.993.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	13.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	94.003.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		-	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		-	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	80.580.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	72.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	291.000.000,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	141.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		-	-	-	-	-	-	2.950.242.631,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
2.	2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN						0,00						-	0,00	
		[Persentase Tingkat Kemandirian Pangan Daerah]	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya														
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.02.2.01.0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia				1 unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
3.	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						134.752.000,00						-	0,00	
		[Persentase Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan]	-	-	-	-	-	134.752.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	-	-			-	65.000.000,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya														
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota				1 laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota														
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0011	Pemantauan Stok Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Informasi Stok Pangan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota														
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)														
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
		-	-	-	-	-	-	134.752.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	-	-			-	30.000.000,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				48 Ton	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota				48 Ton	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.02.0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota														
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara				48 Ton	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	-	-			-	0,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	-	-			-	39.752.000,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun														
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	14.136.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun														
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Laporan	5.616.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.03.2.04.0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal														
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
4.	2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						19.924.000,00						-	0,00	
		[Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan dalam Mewujudkan Kemandirian dan Kedaulatan Pangan Masyarakat]	-	-	-	-	-	19.924.000,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	-	-			-	0,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	19.924.000,00			-	Pengentas an Kemiskinan	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	19.924.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Pengentas an Kemiskinan	-		0,00	DINAS PANGAN
5.	2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						39.999.700,00						-	0,00	
		[Persentase Peningkatan Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam. Bergizi. Seimbang dan Aman]	-	-	-	-	-	39.999.700,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	39.999.700,00			-	-	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen Dokumen	10.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan														
			Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				1 Dokumen	6.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	2.09.05.2.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan														
			<i>Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan</i>				1 Dokumen	15.529.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	DINAS PANGAN
	X	NON URUSAN						0,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						0,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						0,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	0,00	DINAS PANGAN
	X.XX.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		0,00	DINAS PANGAN
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN						7.967.882.934,00							8.614.242.934,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						1.016.000.000,00							1.166.000.000,00	
	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						1.016.000.000,00							1.166.000.000,00	
1.	1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN						260.000.000,00						-	264.000.000,00	
		[Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota]	-	-	-	-	-	260.000.000,00	-	-	-	-	-	-	264.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	48.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		50.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	22.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana														
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota				50 Orang	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	-	-			-	190.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.02.2.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana														
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun				3 Unit Rumah	190.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		190.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						306.000.000,00						-	384.000.000,00	
		[Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni]	-	-	-	-	-	306.000.000,00	-	-	-	-	-	-	384.000.000,00	-
	1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	56.000.000,00			-	Meningkatk an Pembangun an Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan PPD 8 Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan p enanggulan gan bencana	-	-	84.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/T ereview/Terlegalisasi				2 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pembangun an Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan PPD 8 Pemerataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan p enanggulan gan bencana	-		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.02.0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh														
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh				1 Dokumen	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pembangun an Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni														
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki				3 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh														
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan				12 Ha	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan PPD 8 Pem erataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan p enanggulan gan bencana	-		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha				3 Unit	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						250.000.000,00						-	300.000.000,00	
		[Persentase Areal Kawasan Kumuh]	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	300.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha														
			<i>Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki</i>				3 Unit Rumah	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru														
			<i>Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh</i>				3 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						200.000.000,00						-	218.000.000,00	
		[Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum)]	-	-	-	-	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	-	218.000.000,00	-
	1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan PPD 8 Pem erataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan p enanggulan gan bencana	-	-	218.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang				6 Laporan	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan PPD 8 Pem erataan infrastruktur dasar, pelestarian lingkungan hidup dan p enanggulan gan bencana	-		18.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan														
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum				1 Lokasi	182.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.951.882.934,00							7.448.242.934,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						6.951.882.934,00							7.448.242.934,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.221.515.934,00						-	5.120.680.227,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	5.221.515.934,00	-	-	-	-	-	-	5.120.680.227,00	-
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.390.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	7.390.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	7.390.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		7.390.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.643.470.934,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	4.567.585.227,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Orang/bulan	4.643.470.934,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		4.567.585.227,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	7.460.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	7.460.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	7.460.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		7.460.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	17.745.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		17.745.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	22.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				44 Paket	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	138.445.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	196.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				6 Paket	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		12.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				6 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		10.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				6 Paket	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				6 Paket	13.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		13.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		7.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	82.445.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		140.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	27.500.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				6 Unit	27.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		27.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	87.250.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		2.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	42.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		40.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		3.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		30.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	268.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	200.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	166.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	102.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		100.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						116.450.000,00						-	158.102.000,00	
		[Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup]	-	-	-	-	-	116.450.000,00	-	-	-	-	-	-	158.102.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	-	-			-	116.450.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	158.102.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.02.2.02.0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang														
			<i>Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun</i>				1 Dokumen	116.450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		158.102.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						178.800.000,00						-	228.360.000,00	
		[Indeks Kualitas Air (IKA)]	-	-	-	-	-	178.800.000,00	-	-	-	-	-	-	228.360.000,00	-
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-			-	178.800.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	228.360.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			<i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>				6 Dokumen	12.805.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		26.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				6 Dokumen	15.787.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		24.960.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun				1 Dokumen	18.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		42.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan														
			Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan				36 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota														
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan				24 Dokumen	116.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						269.559.000,00						-	362.900.000,00	
		[Persentase Kawasan Kehati yang Terkelola]	-	-	-	-	-	269.559.000,00	-	-	-	-	-	-	362.900.000,00	-
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-			-	269.559.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	362.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Dokumen	32.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		52.900.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				7,01 Ha	236.659.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		310.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						12.400.000,00						-	36.400.000,00	
		[Persentase Peningkatan Pengendalian B3. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)]	-	-	-	-	-	12.400.000,00	-	-	-	-	-	-	36.400.000,00	-
	2.11.05.2.02	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	12.400.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	36.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.05.2.02.0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota														
			jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina				12 Usaha	12.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		36.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						24.683.000,00						-	44.683.000,00	
		[Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha/Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup]	-	-	-	-	-	24.683.000,00	-	-	-	-	-	-	44.683.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumenizin lingkungan usaha/kegiatanyang layak lingkungan (dokumen)	-			220 Dokumen	24.683.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"	-	-	44.683.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH														
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan				6 Dokumen	12.275.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Meningkatkan an infrastruktur strategis yang berkel anjutan "SAKATO KUAT"	-		12.275.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				12 Badan Usaha	12.408.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		32.408.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
7.	2.11.07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						12.340.000,00						-	51.340.000,00	
		[Persentase Pendampingan Pengakuan Keberadaan MHA yang Terfasilitasi]	-	-	-	-	-	12.340.000,00	-	-	-	-	-	-	51.340.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.07.2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	-	-			-	12.340.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	51.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.07.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH</i>				1 Dokumen	12.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		51.340.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
8.	2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						36.580.000,00						-	46.680.000,00	
		[Persentase Cakupan Pendidikan Pelatihan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat]	-	-	-	-	-	36.580.000,00	-	-	-	-	-	-	46.680.000,00	-
	2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	36.580.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	46.680.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup														
			<i>Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i>				1 Dokumen	21.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		21.580.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.08.2.01.0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat				60 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		25.100.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
9.	2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						10.102.000,00						-	15.000.000,00	
		[Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Melaksanakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup]	-	-	-	-	-	10.102.000,00	-	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-
	2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	10.102.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.09.2.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				12 Entitas	10.102.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
10.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						22.175.000,00						-	43.375.000,00	
		[Persentase Pengaduan Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti]	-	-	-	-	-	22.175.000,00	-	-	-	-	-	-	43.375.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-			-	22.175.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	43.375.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.10.2.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola				12 Pengaduan	9.545.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		17.745.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.10.2.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota														
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota				12 Sanksi	12.630.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		25.630.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
11.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						1.047.278.000,00						-	1.340.722.707,00	
		[Persentase Pengurangan Sampah dan Persentase Penanganan Sampah]	-	-	-	-	-	1.047.278.000,00	-	-	-	-	-	-	1.340.722.707,00	-
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	-	-			-	1.047.278.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	1.340.722.707,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				24 Kelompok	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				1 Unit	56.105.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		57.105.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan				3 Dokumen	66.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		66.104.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan				7482,5 Ton	808.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		1.000.444.573,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah														
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah				10,39 Persentase	38.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		38.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				1825 Ton	44.069.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		144.069.134,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN
		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATATAN SIPIL						5.161.227.449,00							7.782.271.034,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.161.227.449,00							7.782.271.034,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.161.227.449,00							7.782.271.034,00	
1.	2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.486.229.449,00						-	5.619.771.034,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	4.486.229.449,00	-	-	-	-	-	-	5.619.771.034,00	-
	2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	11.120.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	18.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	5.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		5.300.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	3.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		8.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	3.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		-	-	-	-	-	-	4.486.229.449,00	-	-	-	-	-	-	5.619.771.034,00	-
	2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.799.181.849,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	4.179.100.034,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				0 Orang/bulan	3.799.181.849,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		4.179.100.034,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	32.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	32.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	231.691.600,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	525.121.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				7 Paket	2.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.121.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				7 Paket	166.724.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		455.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	5.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				10 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		5.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				30 Laporan	52.507.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		55.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	70.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				2 Unit	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.906.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	181.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.500.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.750.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	72.206.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	97.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	171.330.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	175.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				18 Unit	134.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		137.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	7.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		8.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		30.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						225.058.200,00						-	1.052.000.000,00	
	2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	179.004.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	345.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan				60 Dokumen	5.915.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		110.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk				50.000 Dokumen	173.089.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.01.0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk				50 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		35.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		5.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02	Penataan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	46.053.700,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.02.0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan														
			Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia				22000 Dokumen	46.053.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		500.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.02.2.03	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.03.0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		12.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	195.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk				48 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		75.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.02.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk														
			Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIIL						235.000.000,00						-	366.500.000,00	
	2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	-	-			-	120.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	94.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting														
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting				2.550 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		78.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan				12 Layanan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	15.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	126.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		19.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		7.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.02.0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	-	-			-	100.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	146.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil				7600 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		16.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan				4 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		25.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.03.2.03.0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil														
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil				2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		105.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN						158.940.000,00						-	705.000.000,00	
	2.12.04.2.01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	-	-			-	158.940.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	183.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan				180 Dokumen	158.940.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		143.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.01.0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		40.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.02.0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		250.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	172.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		10.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan														
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan				15 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		29.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.04.2.03.0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan														
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		53.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi														
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.03.0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat</i>				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.04.2.04.0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan</i>				2 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		100.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN						55.999.800,00						-	39.000.000,00	
	2.12.05.2.01	Penyusunan Profil Kependudukan	-	-			-	55.999.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	39.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		7.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	55.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		32.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						6.736.278.860,00							11.321.000.000,00	
1.	2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.334.573.260,00						-	5.751.000.000,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	5.334.573.260,00	-	-	-	-	-	-	5.751.000.000,00	-
	2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.891.729.760,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				34/12 Orang/bulan	4.891.729.760,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				35 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	166.177.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	496.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.287.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	26.263.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	14.089.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		25.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				240 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				215 Laporan	110.788.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	13.462.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	445.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		400.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		30.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				2 Unit	13.462.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		15.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	65.004.500,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	124.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		12.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	49.504.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	198.200.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	160.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				13 Unit	165.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	26.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		40.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
2.	2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA						0,00						-	320.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Nagari yang Difasilitasi dalam Penataan Nagari]	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	320.000.000,00	-
	2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa														
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa				4 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		320.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
3.	2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA						154.914.000,00						-	3.100.000.000,00	
		[Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan]	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	-	-			-	154.914.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	3.100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa				79 Dokumen	5.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		220.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		185.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa				79 Dokumen	76.664.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		350.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
		-	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa														
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				79 Orang	73.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
		[Persentase Nagari yang Dibina dan Diawasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan]	-	-	-	-	-	154.914.000,00	-	-	-	-	-	-	3.100.000.000,00	-
	2.13.04.2.01.0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		110.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				79 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		80.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		225.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		105.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD														
			Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas				158 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa				79 Desa	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		175.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.04.2.01.0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
4.	2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT						1.246.791.600,00						-	2.150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	1.246.791.600,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pengentas an Kemiskinan	-	-	2.150.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79 Dokumen	71.073.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pengentas an Kemiskinan	-		800.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				79 Lembaga	973.469.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pengentas an Kemiskinan	-		550.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat				79 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa				79 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				5 Laporan	78.067.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		100.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat				79 Laporan	100.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pengentas an Kemiskinan	-		200.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga				93 Dokumen	24.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		500.000.000,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
	2.13.05.2.01.0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/NAGARI
		DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						13.082.160.728,00							15.283.175.250,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						13.082.160.728,00							15.283.175.250,00	
	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						2.200.659.878,00							3.557.000.000,00	
1.	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						680.000.000,00						-	900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Indeks Pembangunan Gender (IPG)]	-	-	-	-	-	680.000.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	-
	2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	130.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG				43 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.01.0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				43 Lembaga	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	680.000.000,00	-	-	-	-	-	-	900.000.000,00	-
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi														
			Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi				30 Lembaga	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi				50 orang	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.02.0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan				100 Orang	240.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.02.2.03.0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan				30 Lembaga	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						295.659.878,00						-	541.000.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	150.519.878,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pendidikan yang Berkualitas	-	-	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pendidikan yang Berkualitas	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.01.0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota				25 Lembaga	145.519.878,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	80.140.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	91.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0003	&layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota				4 orang Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		18.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota				1 kegiatan Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		8.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	9.250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				4 orang Orang	24.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		25.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				10 orang orang	4.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		5.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	9.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		10.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.02.0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang orang	11.370.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	175.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek				200 orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.03.2.03.0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan				12 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						120.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	120.000.000,00			-	Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.04.2.02.0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan</i>				50 Lembaga	120.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						100.000.000,00						-	275.000.000,00	
	2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	275.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				14 Dokumen	95.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.05.2.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak</i>				14 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		150.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
5.	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						280.000.000,00						-	600.000.000,00	
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	270.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	350.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				25 Lembaga	265.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.01.0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota				12 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	10.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	250.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														
			jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek				325 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.06.2.02.0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)				14 Lembaga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
6.	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						725.000.000,00						-	1.091.000.000,00	
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	260.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota				8 Kegiatan	260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		225.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	416.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				70 orang 0	91.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		80.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota				70 orang Orang	71.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota				90 Layanan Orang	18.675.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		19.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota				1 kegiatan Orang	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Tarantang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			0				10 orang 0	51.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota				70 orang Orang	116.135.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		120.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota				8 orang Orang	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		35.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.02.0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota				15 orang Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	65.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	450.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota														
			Jumlah KIE Perlindungan khusus anak				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		75.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota														
			jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota				10 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</i>				8 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.08.07.2.03.0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai														
			<i>jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek</i>				100 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK FISIK-BIDANG P ERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK-PER LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						10.881.500.850,00							11.726.175.250,00	
1.	2.14.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.426.865.150,00						-	5.651.768.850,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	5.426.865.150,00	-	-	-	-	-	-	5.651.768.850,00	-
	2.14.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	8.292.000,00			-	-	-	-	14.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2.292.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				24 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	4.790.775.150,00			-	-	-	-	4.792.768.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bulan	4.788.775.150,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.788.768.850,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		-	-	-	-	-	-	5.426.865.150,00	-	-	-	-	-	-	5.651.768.850,00	-
	2.14.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	91.800.000,00			-	-	-	-	117.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	180.000.000,00			-	-	-	-	205.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>				1 Unit	36.759.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				20 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				10 Unit	93.241.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	151.200.000,00			-	-	-	-	157.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	115.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		115.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	204.798.000,00			-	-	-	-	365.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				15 Unit	183.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	11.708.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		45.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK						186.481.000,00						-	186.481.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	-	-			-	45.862.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	45.862.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan														
			<i>Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan</i>				13 Kegiatan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				13 Kegiatan	15.862.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.862.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.01.0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal														
			Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal				13 Satuan Pendidikan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		15.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	140.619.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	140.619.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga														
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga				26 Laporan	48.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		48.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				156 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		60.000.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana				13 Laporan	32.019.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		32.019.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
3.	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)						3.398.554.000,00						-	3.844.718.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	-	-			-	1.502.800.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataa n Layanan Kesehatan	-	-	1.502.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK				13 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Pemerataa n Layanan Kesehatan	-		0,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				156 Laporan	917.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		917.800.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)				130 Laporan	260.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		260.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang														
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				12 Dokumen	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		125.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				40 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		200.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	-	-			-	638.312.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	638.312.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				719 Orang	601.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		601.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)														
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)				13 Laporan	37.112.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		37.112.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	903.642.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	994.006.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Fasyankes Laporan	53.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		58.740.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				1743 Orang	699.242.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		769.166.200,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB														
			Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB				1 Dokumen	121.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN, DAK FISIK-BIDANG K ESEHATAN-KEL UARGA BERENCANA	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		133.100.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				26 Laporan	30.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		33.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	-	-			-	353.800.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	709.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				58 Kampung KB Kampung	324.800.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		649.600.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.03.2.04.0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB														
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB				12 Dokumen	29.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		60.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4.	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)						1.869.600.700,00						-	2.043.207.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	246.000.700,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	416.007.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				60 Keluarga	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		30.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				13 Laporan	85.000.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		85.007.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)														
			Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia				13 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		300.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)				4345 Orang	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		1.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	-	-			-	1.623.600.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	1.627.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				130 laporan	738.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		738.000.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	2.14.04.2.02.0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)														
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				130 laporan	885.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-BOKB-KB	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		889.200.000,00	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		DINAS PERHUBUNGAN						16.527.683.989,00							22.723.997.163,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						16.527.683.989,00							22.723.997.163,00	
	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						16.527.683.989,00							22.723.997.163,00	
1.	2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.647.720.989,00						-	19.155.433.821,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	15.647.720.989,00	-	-	-	-	-	-	19.155.433.821,00	-
	2.15.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi keuangan	-			100 %	5.811.247.832,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	7.035.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				77 Orang/bulan	5.788.072.232,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		7.000.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		20.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	8.175.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	15.647.720.989,00	-	-	-	-	-	-	19.155.433.821,00	-
	2.15.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi kepegawaaian perangkat daerah	-			0 %	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	233.218.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Paket	8.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	13.123.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		15.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				4 Paket	54.865.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		60.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	35.985.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.583.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		25.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	100.132.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaa n	-			100 %	190.448.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	690.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		161.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				94 Unit	35.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		250.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				30 Unit	154.918.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		279.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	15.647.720.989,00	-	-	-	-	-	-	19.155.433.821,00	-
	2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			100 %	8.713.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	10.097.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				4 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		3.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	7.903.570.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		8.500.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	8.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		10.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				7 Laporan	798.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		1.584.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	15.647.720.989,00	-	-	-	-	-	-	19.155.433.821,00	-
	2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik daerah yang berkondisi baik</i>	-			100 %	699.807.157,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	1.033.433.821,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				19 Unit	533.307.157,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		533.433.821,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	166.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		300.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
2.	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)						879.963.000,00						-	3.568.563.342,00	
		[Indeks Kelancaran Lalu Lintas dan Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan]	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase tercapainya pelaksanaan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	-			0 %	0,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	509.308.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		509.308.342,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Sarana Keselamtan Lalu Lintas Jalan di Jalan yang berfungsi dengan baik	-			75 %	200.080.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	750.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		350.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan														
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara				500 Unit	200.080.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		400.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Indeks Kelancaran Lalu Lintas dan Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan]	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase Tercapainya Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	-			100 %	49.920.000,00			-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				8 Dokumen	49.920.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		100.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Angkutan Umum dan Barang Yang Laik Jalan	-			95 %	250.000.000,00			-	Meningkatk an Pembangunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	490.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		150.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya				2 Orang	20.436.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		40.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor				5000 Dokumen	137.731.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		200.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara				9 Unit	43.926.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.05.0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>				12 Laporan	47.906.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		50.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		[Indeks Kelancaran Lalu Lintas dan Rasio Fatalitas Kecelakaan per 10.000 Kendaraan]	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase tercapainya Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan dan Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	184.642.000,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	781.297.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota</i>				12 Laporan	32.224.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		120.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.06.0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>				1 Laporan	152.418.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		661.297.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		-	-	-	-	-	-	879.963.000,00	-	-	-	-	-	-	3.568.563.342,00	-
	2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	<i>Persentase tercapainya pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</i>	-			100 %	77.859.500,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	253.623.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin</i>				6 Laporan	60.581.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		129.438.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.07.0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin														
			<i>Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi</i>				12 Laporan	17.278.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		124.185.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	<i>Persentase audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang terlaksana</i>	-			100 %	72.140.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	306.380.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i>				8 Laporan	41.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		110.430.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum														
			<i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>				2 Laporan	30.190.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		115.950.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.08.0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan														
			<i>Jumlah Auditor dan Inspektur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya</i>				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		80.000.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.08.0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor														
			<i>Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase tertibnya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota</i>	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	63.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		0,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		63.522.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) daerah kabupaten/k ota 1 (satu)	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	133.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.10.0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		133.470.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksanannya Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	-			0 %	0,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	138.889.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.11.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		138.889.000,00	DINAS PERHUBUNGAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tertibnya Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kot	-			100 %	45.321.500,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan	-	42.074.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
	2.15.02.2.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Laporan	45.321.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perhubungan		42.074.000,00	DINAS PERHUBUNGAN
		DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						8.014.652.264,00							8.821.621.889,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						8.014.652.264,00							8.821.621.889,00	
	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						7.724.654.864,00							8.497.120.349,00	
1.	2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.455.707.864,00						-	6.001.122.119,00	
	2.16.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi keuangan	-			12 Bulan	14.153.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	15.579.184,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	5.595.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.163.184,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	4.279.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		4.708.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.279.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		4.708.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	5.455.707.864,00	-	-	-	-	-	-	6.001.122.119,00	-
	2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi keuangan	-			12 bulan	4.881.926.145,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	5.370.119.860,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				52 Orang/bulan	4.877.647.145,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		5.365.411.860,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	4.279.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		4.708.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah peningkatan administrasi umum	-			12 Bulan	129.804.600,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	142.791.627,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.430.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.300.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	44.422.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		48.870.694,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	11.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				1 Laporan	2.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.805.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				2 Laporan	66.532.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		73.185.933,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.16.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terselenggaranya pengadaan barang milik daerah	-			100 %	50.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	55.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		44.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah peningkatan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	-			12 Bulan	274.624.119,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	301.911.448,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.570.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.732.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				3 Laporan	133.031.119,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		146.153.076,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	140.023.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		154.025.872,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase terselenggaranya pemeliharaan barang milik daerah</i>	-			80 %	105.200.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	115.720.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				6 Unit	97.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		106.920.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				20 Unit	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.800.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						404.873.000,00						-	445.509.130,00	
		-	-	-	-	-	-	404.873.000,00	-	-	-	-	-	-	445.509.130,00	-
	2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase peningkatan pengolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah kabupaten lima puluh kota</i>	-			75 %	404.873.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	445.509.130,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media														
			<i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i>				12 Laporan	351.085.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		386.203.730,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo				4 Komunitas	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik														
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan				2 Permohonan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		11.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik														
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah				12 Rekomendasi	21.888.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		24.105.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik														
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis				63 Media	21.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		24.200.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.	2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						1.864.074.000,00						-	2.050.489.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)]	-	-	-	-	-	1.864.074.000,00	-	-	-	-	-	-	2.050.489.100,00	-
	2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.01.0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	1.864.074.000,00	-	-	-	-	-	-	2.050.489.100,00	-
	2.16.03.2.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pengelolaan E-government di lingkungan pemerintah kabupaten lima puluh kota	-			74 %	1.864.074.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	2.050.489.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE														
			Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE				1 Dokumen	4.044.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		4.448.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Peningkatan Layanan Informasi dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)]	-	-	-	-	-	1.864.074.000,00	-	-	-	-	-	-	2.050.489.100,00	-
	2.16.03.2.02.0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota														
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota				43 Perangkat Daerah	1.812.494.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.993.751.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	1.864.074.000,00	-	-	-	-	-	-	2.050.489.100,00	-
	2.16.03.2.02.0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE														
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE				1 Aplikasi	55.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		60.500,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah														
			Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali				1 Laporan	46.281.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		50.909.100,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah				1 Aplikasi	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas														
			Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas				1 Dokumen	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.320.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						39.997.400,00							43.997.140,00	
1.	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						39.997.400,00						-	43.997.140,00	
	2.20.02.2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan daerah kabupaten/ kota	-			87 %	39.997.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	43.997.140,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia														
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk				100 %	9.042.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		9.946.750,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				3 0	22.280.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.508.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.20.02.2.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral														
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik				1 Orang	8.674.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		9.542.390,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						250.000.000,00							280.504.400,00	
1.	2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						250.000.000,00						-	280.504.400,00	
	2.21.02.2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan pemahaman OPD akan urusan persandian	-			47,48 %	250.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	280.504.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				1 Laporan	19.956.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.01.0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				1 Laporan	25.004.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		27.504.400,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		[Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah]	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	280.504.400,00	-
	2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian				43 Perangkat Daerah	205.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		253.000.000,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		-	-	-	-	-	-	250.000.000,00	-	-	-	-	-	-	280.504.400,00	-
	2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.21.02.2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	2.21.02.2.02.0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah														
			Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.				1 Kegiatan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
		DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						5.471.888.553,00							6.553.482.980,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.286.388.753,00							6.358.707.980,00	
	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						5.286.388.753,00							6.358.707.980,00	
1.	2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.064.391.153,00						-	6.138.207.980,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	5.064.391.153,00	-	-	-	-	-	-	6.138.207.980,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi daerah</i>	-			6 Dok	8.954.500,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa an Meng katkan an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	5.775.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	6.169.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa an Meng katkan an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		4.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	2.785.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		1.575.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terselenggaranya pengelolaan adminstrasi keuangan dinas</i>	-			100 %	4.466.962.153,00			Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	4.686.610.480,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				44 Orang/bulan	4.458.938.653,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		4.681.885.480,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	8.023.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n hilirisasi dan menge mbangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meni ngkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		4.725.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	17.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		17.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya pelayanan administrasi umum dinas	-			12 Bulan	111.524.500,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	86.550.750,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.17.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.548.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		1.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	24.172.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		21.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	13.271.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		8.400.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	3.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		2.520.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	69.432.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		53.580.750,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana kantor untuk PLUT dan Rumah digital</i>	-			100 %	37.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	811.900.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		793.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				20 Unit	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		4.305.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		14.595.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pelayanan administratur dinas	-			100 %	243.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	376.994.100,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		966.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	77.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		80.797.500,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		295.230.600,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpeliharanya barang milik daerah yang dikelola dinas</i>	-			100 %	196.950.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN	-	152.977.650,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				29 Unit	151.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		118.579.650,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	10.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisata Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Meningkatkan an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	ASN		34.398.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						30.000.000,00						-	31.500.000,00	
		[Persentase Peningkatan Koperasi yang Telah Diawasi]	-	-	-	-	-	30.000.000,00	-	-	-	-	-	-	31.500.000,00	-
	2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Meningkatnya jumlah koperasi sehat	-			80 Koperasi	30.000.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi	-	31.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.03.2.01.0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan				60 Unit Usaha	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi		31.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						10.000.000,00						-	10.500.000,00	
		[Persentase Peningkatan KSP/USP yang Sehat]	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	-
	2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya jumlah KSP/USP yang sehat	-			120 KSP/USP	10.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi	-	10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.04.2.01.0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan				10 Unit Usaha	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi		10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						35.000.000,00						-	36.750.000,00	
		[Persentase Peningkatan Anggota Koperasi yang Mengikuti Pelatihan]	-	-	-	-	-	35.000.000,00	-	-	-	-	-	-	36.750.000,00	-
	2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	35.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	36.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>				8 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		36.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						15.000.000,00						-	15.750.000,00	
		[Persentase Peningkatan Skala Usahanya]	-	-	-	-	-	15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	15.750.000,00	-
	2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>Meningkatnya jumlah koperasi yang diberdayakan dan dilindungi</i>	-			15 koperasi	15.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi	-	15.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.06.2.01.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				30 Keluarga	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Koperasi		15.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
6.	2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						105.996.500,00						-	100.800.000,00	
		[Persentase Usaha mikro dan Kecil yang Diberdayakan]	-	-	-	-	-	105.996.500,00	-	-	-	-	-	-	100.800.000,00	-
	2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terberdayakan, dan Terfasilitasinya pelaku usaha mikro.	-			4 kegiatan	105.996.500,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM	-	100.800.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro				80 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro														
			Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan				60 Unit Usaha	2.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi</i>				10 Unit Usaha	1.999.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro														
			<i>Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi</i>				20 Unit Usaha	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				20 Unit Usaha	1.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro														
			Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata				80 Unit Usaha	60.998.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		64.050.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>				60 Orang	35.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		36.750.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
7.	2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						26.001.100,00						-	25.200.000,00	
		[Persentase Pelaku Usaha yang Dikembangkan]	-	-	-	-	-	26.001.100,00	-	-	-	-	-	-	25.200.000,00	-
	2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	<i>Terlaksananya pengembangan jaringan infrastruktur UKM</i>	-			10 kegiatan	26.001.100,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM	-	25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0002	Pengembangan Usaha Mikro														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi				60 Unit Usaha	24.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		25.200.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	2.17.08.2.01.0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi														
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi				3 Unit Usaha	2.000.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	UKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						185.499.800,00							194.775.000,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						185.499.800,00							194.775.000,00	
1.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						10.000.000,00						-	10.500.000,00	
		[Persentase Peningkatan Perusahaan yang Dikeluarkan Izin]	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-	10.500.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Terlaksananya pengawasan dan peningkatan kesadaran usaha dalam mengurus perizinan	-			13 Kecamatan	10.000.000,00			Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha	-	10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.02.2.02.0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang														
			Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang				5 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb an infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengem bangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha		10.500.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN						77.500.000,00						-	81.375.000,00	
		[Persentase Peningkatan Pasar Nagari yang Direvitalisasi]	-	-	-	-	-	77.500.000,00	-	-	-	-	-	-	81.375.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya jumlah pasar yang direvitalisasi	-			6 Unit	77.500.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pasar Rakyat	-	81.375.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				2 Unit	77.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pasar Rakyat		81.375.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
3.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING						58.000.000,00						-	60.900.000,00	
		[Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting]	-	-	-	-	-	58.000.000,00	-	-	-	-	-	-	60.900.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</i>	-			9 Jenis Sembako	25.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Agen dan distributor barang	-	26.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.01.0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat														
			<i>Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i>				12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Agen dan distributor barang		26.250.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	<i>Terlaksananya monitoring harga kebutuhan pokok dan barang penting lainnya</i>	-			4 Kali	33.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Masyarakat	-	34.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>				4 Laporan	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Masyarakat		34.650.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
4.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR						0,00						-	0,00	
		[Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten]	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pameran dan pembinaan yang dilaksanakan	-			0 Kegiatan	0,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.05.2.01.0003	Pameran Dagang Lokal														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal				4 Pelaku Usaha	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha		0,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
5.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN						39.999.800,00						-	42.000.000,00	
		[Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan]	-	-	-	-	-	39.999.800,00	-	-	-	-	-	-	42.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Meningkatnya jumlah pasar yang sudah melaksanakan tertib ukur	-			13 Pasar	39.999.800,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha	-	42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				200 Unit	39.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	Pelaku Usaha		42.000.000,00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU						4.834.101.588,00							57.844.500.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						4.834.101.588,00							57.844.500.000,00	
	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						4.834.101.588,00							57.844.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.049.094.488,00						-	56.864.500.000,00	
		-	-	-	-	-	-	4.049.094.488,00	-	-	-	-	-	-	56.864.500.000,00	-
	2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	25.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	180.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	13.900.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	11.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.337.482.098,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	5.030.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				30 Orang/bulan	3.312.482.098,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		5.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				19 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	50.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		50.000.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	200.356.390,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	277.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	22.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		40.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	22.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		7.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		5.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	104.636.390,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	77.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	682.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		582.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				5 Unit	19.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				8 Unit	58.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	246.988.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	320.500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		500.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				1 Laporan	58.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		70.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	188.488.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		250.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	161.768.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	375.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				20 Unit	138.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		150.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				19 Unit	22.968.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		215.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						350.000.100,00						-	425.000.000,00	
	2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	180.000.100,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	200.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal														
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah				1 Dokumen	30.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.01.0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko														
			Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	-	-			-	170.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	225.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi				1 Daerah	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.	2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						45.007.000,00						-	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	45.007.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	60.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota				5 Dokumen	30.007.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota				3 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		10.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
4.	2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						90.000.000,00						-	145.000.000,00	
	2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	-	-			-	90.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	145.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		20.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				1100 Pelaku Usaha	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik				50 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		25.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.04.2.01.0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko														
			Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha				100 Kegiatan Usaha	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
5.	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						250.000.000,00						-	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	250.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	300.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya														
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya				10 Kegiatan Usaha.	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko				550 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal														
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha				125 Kegiatan Usaha	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		100.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
6.	2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						50.000.000,00						-	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-	-	50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik														
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan				19 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Membangu n ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan "SAKATO S EJAHTERA "	-		50.000.000,00	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
		DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA						10.827.636.698,00							12.647.000.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						9.115.636.698,00							9.347.000.000,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						9.115.636.698,00							9.347.000.000,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.525.636.698,00						-	5.957.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.718.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	72.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	15.718.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		14.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		13.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		9.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	5.201.636.698,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				40 Orang/bulan	5.201.636.698,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		5.200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	14.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	15.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		7.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		8.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	63.090.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	63.090.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		50.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	190.636.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	216.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.914.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	18.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		18.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	5.728.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	5.996.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		6.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	17.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		18.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				1 Laporan	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				1 Laporan	124.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	477.556.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>				1 Unit	401.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				4 Unit	30.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	45.556.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		40.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	173.600.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-	-	182.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		2.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				3 Laporan	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	111.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		120.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	333.400.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	142.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				26 Unit	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		130.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 Unit	14.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	-		12.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		-	-	-	-	-	-	6.525.636.698,00	-	-	-	-	-	-	5.957.000.000,00	-
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	189.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Koto Tuo	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						820.000.000,00						-	560.000.000,00	
		[Persentase Fasilitas Pengembangan Kapasitas Pemuda]	-	-	-	-	-	820.000.000,00	-	-	-	-	-	-	560.000.000,00	-
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-	-			-	620.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-	-	480.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemuda Tingkat Kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda				40 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota														
			Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi				60 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota														
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda				30 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.02.2.02.0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya</i>				1 Organisasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		80.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN						1.720.000.000,00						-	2.680.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.720.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.680.000.000,00	-
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	650.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.01.0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota														
			<i>Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia</i>				1 Unit	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		1.000.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	370.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	850.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				6 Kegiatan	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota														
			Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota				3 Kegiatan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.02.0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga														
			Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-	-			-	260.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	310.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)														
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)				1 Pelatda	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota														
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan				30 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.03.0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota														
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		300.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-	-			-	240.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	220.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi				1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan														
			Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan				1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		100.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		60.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
4.	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN						50.000.000,00						-	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		[Persentase Fasilitas Pengembangan Pramuka]	-	-	-	-	-	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-	-			-	50.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	2.19.04.2.01.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah														
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Non PPD: -	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						1.712.000.000,00							3.300.000.000,00	
	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						1.712.000.000,00							3.300.000.000,00	
1.	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.022.000.000,00						-	2.100.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	1.022.000.000,00	-	-	-	-	-	-	2.100.000.000,00	-
	3.26.02.2.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	-	-			-	200.000.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisata PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-		1.500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	822.000.000,00			-	PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-	-	600.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				6 Lokasi	172.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota														
			0				0 0	650.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-		400.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA						320.000.000,00						-	500.000.000,00	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-	-			-	320.000.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisataa dan ekonomi kreatif	-	-	500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				8 Kegiatan	320.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		500.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF						370.000.000,00						-	700.000.000,00	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-	-			-	300.000.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	550.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI														
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI				30 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		200.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.01.0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata														
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata				800 Orang	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataan PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		350.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.26.05.2.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	-	-			-	70.000.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa n PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-	-	150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
	3.26.05.2.02.0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif</i>				30 Orang	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa n PPD 6 Pen gembangan pariwisata dan ekonomi kreatif	-		150.000.000,00	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN						5.128.564.039,00							8.998.340.621,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						5.128.564.039,00							8.998.340.621,00	
	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						5.063.564.039,00							8.063.340.621,00	
1.	2.23.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.643.564.039,00						-	6.575.340.621,00	
	2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan kinerja perangkat daerah</i>	-			100 %	12.419.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	35.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				4 Dokumen	5.807.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		4.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		4.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		4.800.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.100.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	6.612.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	3.327.952.039,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	3.941.640.621,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				448 Orang/bulan	3.323.752.039,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.919.940.621,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		8.700.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				4 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				13 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		2.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	1.823.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		3.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.823.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	650.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	128.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		10.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		78.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		24.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		11.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	33.100.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	246.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		5.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		6.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		12.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			0				0 0	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		15.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		10.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	14.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		7.500.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	-			0 %	0,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	1.090.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		650.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		220.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	240.350.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	343.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		1.200.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	77.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	162.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		252.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang berkondisi baik	-			100 %	27.270.000,00			-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota	-	783.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	24.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		8.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				5 Unit	2.930.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		25.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		90.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Lima Puluh Kota		500.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						1.355.000.000,00						-	1.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Buku yang tersedia di perpustakaan daerah13 Jumlah perpustakaan yang dikelola di tingkat daerah kabupaten Jumlah Pustakawan/pengelola perpustakaan yang bersertifikat	-			11.071/ 26.624 judul/ eksemplar 26 Perpustakaan 11 orang	495.199.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa	-	490.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan														
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan				26 Perpustakaan	79.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya				26 Perpustakaan	11.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi				40 Layanan	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		45.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				3 Orang	30.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN PENGGUNAANNYA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOBERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		85.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan														
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan				1 Dokumen	37.904.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATOBERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		38.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Persentase Perpustakaan yang Dikelola, Ditata dan Dibina]	-	-	-	-	-	1.355.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000.000,00	-
	2.23.02.2.01.0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan				350 Eksemplar	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		120.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.01.0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				102 Eksemplar	238.816.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PENGEMBANGAN PROGRAM PERPUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		20.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	1.355.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000.000,00	-
	2.23.02.2.01.0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i>				1 Perpustaka an	16.678.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Masyarakat, pelajar dan mahasiswa		17.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		[Persentase Perpustakaan yang Dikelola, Ditata dan Dibina]	-	-	-	-	-	1.355.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000.000,00	-
	2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat</i>	-			11.000 orang 79,67 %	859.801.000,00			Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota	-	910.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya				15 Orang	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial														
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan				13 Perpustak aan	130.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		130.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				1 Perpustakaan	34.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.02.2.02.0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca														
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota				600 Orang	268.617.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		300.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		-	-	-	-	-	-	1.355.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.400.000.000,00	-
	2.23.02.2.02.0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i>				60 Lokus	362.164.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, sekolah, masyarakat di Kab.Lima Puluh Kota		320.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.23.03	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO						65.000.000,00						-	88.000.000,00	
		[Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan]	-	-	-	-	-	65.000.000,00	-	-	-	-	-	-	88.000.000,00	-
	2.23.03.2.01	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dialihmediakan</i>	-			100 %	65.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	88.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno				1 Orang	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN, DAK NON FISIK-DANA BANTUAN PEN GEMBANGAN PROGRAM PER PUSTAKAAN DAERAH	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		36.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan														
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan				30 Eksemplar	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		52.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						65.000.000,00							935.000.000,00	
1.	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						45.138.000,00						-	440.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	45.138.000,00	-	-	-	-	-	-	440.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit pengolah dan unit kearsipan yang dikelola dan ditata	-			6 unit	3.000.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	190.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis														
			Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan				4800 Berkas	1.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		55.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan				980 Berkas	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Laporan	1.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah unit arsip statis daerah yang dikelola	-			2 unit	20.060.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.02.0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis														
			Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis				45 Arsip	20.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Penerapan e-Arsip Terintegrasi	-			1 Instansi	22.078.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	200.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN														
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN				34 Pengguna	20.078.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.02.2.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota				43 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		50.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.	2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						19.862.000,00						-	460.000.000,00	
	2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Unit arsip penetapan usul musnah dan unit arsip musnah	-			0 Unit	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	75.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan				0 Berkas	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun														
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Instansi yang dibina dalam melakukan perlindungan dan penyelamatan arsip</i>	-			8 Instansi	19.862.000,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	195.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana														
			<i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		125.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana				35 Arsip	19.862.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		70.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah unit arsip bernilai perangkat daerah yang digabung dan/atau dibubarkan, dimekarkan yang terselamatkan	-			0 Unit	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota	-	30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				0 Daftar	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	OPD/Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.24.03.2.05	Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	Jumlah kegiatan pencarian arsip statis kabupaten	-			0 Kegiatan	0,00			Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	160.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang														
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang				0 Arsip	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
3.	2.24.04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP						0,00						-	35.000.000,00	
	2.24.04.2.01	Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	Jumlah Regulasi Izin penggunaan arsip yang dikeluarkan	-			0 SOP	0,00			Memperkuat penyelaras an kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
	2.24.04.2.01.0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan				0 SOP	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		35.000.000,00	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
		DINAS PERIKANAN						7.947.166.344,00							6.922.721.534,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						7.947.166.344,00							6.922.721.534,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						7.947.166.344,00							6.922.721.534,00	
1.	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.047.246.480,00						-	4.785.548.534,00	
	3.25.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinergitas Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	-			100 %	55.953.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	43.416.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	15.878.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		11.120.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			0				0 0	40.075.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		32.296.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Serta Penyusunan Laporan OPD	-			100 %	4.194.134.580,00			-	-	Pegawai Dinas Perikanan	-	4.134.117.534,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				39 Orang/bulan	4.194.134.580,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pegawai Dinas Perikanan		4.134.117.534,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Perkantoran	-			12 Bulan	128.813.900,00			-	-	Dinas Perikanan	-	123.264.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.766.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		1.584.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	27.081.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		26.436.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.202.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		2.270.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	18.910.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		12.783.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.286.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		2.355.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		6.778.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	68.987.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		71.058.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunangan Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	231.060.000,00			-	-	Dinas Perikanan	-	232.600.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	2.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		2.270.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	48.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		50.330.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	180.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Dinas Perikanan		180.000.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	437.285.000,00			-	-	-	-	252.151.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				49 Unit	303.025.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		188.733.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				39 Unit	15.460.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.556.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	118.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		61.862.000,00	DINAS PERIKANAN
2.	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						196.976.000,00						-	202.890.000,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pembinaan bagi KUB Terlaksananya Pengadaan Perahu dan Sarana Penangkap Ikanuntuk KUB	-			16 Dokumentasi 12 Unit	71.385.000,00			-	-	-	-	73.530.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap														
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia				12 Unit	71.385.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.530.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Benih dan Pakan untuk Lubuk Larangan Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumber Daya Ikan untuk POKMASWAS Terlaksananya Pembinaan bagi POKMASWAS dan KUB	-			3 Paket 3 Dokumen 24 Dokumentasi	125.591.000,00			-	-	KUB dan Pokmaswas	-	129.360.000,00	DINAS PERIKANAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil														
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya				74 Orang	125.591.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	KUB dan Pokmaswas		129.360.000,00	DINAS PERIKANAN
3.	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						2.269.919.864,00						-	1.797.268.000,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok yang mendapatkan demplot budidaya ikan air tawar beserta Bimtek Jumlah obat-obatan ikan Terlaksananya bantuan sosial budikdamber beserta bimtek Terlaksananya Bimbingan Temu Usaha Kemitraan dan Akses Permodalan dan Bimtek Kelembagaan Terlaksananya Penilaian Kelas kelompok Perikanan dan Lomba kelompok Perikanan Terlaksananya Rakor, training Petugas dan Penyuluh Perikanan dan Capacity Building Terlaksananya Sekolah lapangan perikanan dan Pembenihan Ikan Gurami	-			15 Kelompok 1 Paket 150 KK 13 Kecamatan 13 Kecamatan 3 Kegiatan 13 Kecamatan	2.113.651.064,00			-	-	Kelompok Usaha Perikanan	-	1.713.561.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas				85 Kelompok	672.946.064,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		590.135.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil														
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				32 Kelompok	610.709.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Kelompok Usaha Perikanan		268.530.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				206 Kelompok	829.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG PENDIDIKAN	-	-	Kelompok Usaha Perikanan		854.896.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah pembinaan dan pemantauan penyakit ikan Jumlah sarana dan prasarana Balai Benih Ikan	-			13 Kecamatan 7 Unit	156.268.800,00			-	-	Pokdakan dan Balai Benih Ikan	-	83.707.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				18 Unit	156.268.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Pokdakan dan Balai Benih Ikan		83.707.000,00	DINAS PERIKANAN
4.	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						433.024.000,00						-	137.015.000,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kegiatan Forikan Terlaksananya Lomba FORIKAN Tk. Provinsi Terlaksananya Lomba Masak Serba Ikan Tk Kabupaten, Provinsi dan Nasional Terlaksananya Lomba Mewarnai dan Jingle GEMARIKAN untuk anak PAUD/TK Terlaksananya Pembinaan bagi POKLAHSAR dan Terdatanya Harga Ikan Konsumsi Terlaksananya Rehab Billboard Gemarikan	-			2 Dokumen 1 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 13 Dokumen 280 Meter	433.024.000,00			-	Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Pokhlasar	-	137.015.000,00	DINAS PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko				12 Dokumen	433.024.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Pokhlasar		137.015.000,00	DINAS PERIKANAN
		DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN							17.698.131.611,00						19.358.104.000,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						17.698.131.611,00							19.358.104.000,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						17.698.131.611,00							19.358.104.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						15.546.758.176,00						-	16.073.104.000,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	15.546.758.176,00	-	-	-	-	-	-	16.073.104.000,00	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	140.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	161.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		20.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			-				-	9.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		10.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		12.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Laporan	23.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		85.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		-	-	-	-	-	-	15.546.758.176,00	-	-	-	-	-	-	16.073.104.000,00	-
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	14.384.519.674,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	15.019.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				173 Orang/bulan	14.366.633.312,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		15.000.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	12.403.962,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		13.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	1.854.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		1.900.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				12 Laporan	2.457.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		3.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				2 Dokumen	1.170.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.617.002,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	6.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	2.437.952,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	4.179.050,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.212.500,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	2.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				1 Dokumen	2.212.500,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.180.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	10.699.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian</i>				1 Dokumen	4.940.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.197.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			<i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai</i>				175 Dokumen	5.240.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.502.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	271.200.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	277.549.500,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.078.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		12.681.900,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			0				0 0	10.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		10.815.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			-				-	80.010.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		84.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	24.812.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		26.052.600,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	137.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		136.500.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	24.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	25.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	24.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		25.200.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	459.400.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	439.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.300.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				19 Laporan	146.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		153.300.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				43 Laporan	308.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		280.400.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	248.129.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	130.755.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				140 Unit	150.029.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		25.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				62 Unit	48.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		50.505.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				19 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		55.250.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						338.922.135,00						-	450.000.000,00	
		[Persentase Peningkatan Sarana Pertanian yang Berkualitas]	-	-	-	-	-	338.922.135,00	-	-	-	-	-	-	450.000.000,00	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	238.922.135,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	265.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				1 Laporan	160.307.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH CUKAI HASIL TEBBAKAU (CHT)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		185.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				1 Laporan	78.615.135,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatk an produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	-		80.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		-	-	-	-	-	-	338.922.135,00	-	-	-	-	-	-	450.000.000,00	-
	3.27.02.2.02	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-			-	100.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	185.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman</i>				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		125.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.02.2.02.0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman														
			<i>Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian</i>				0 Varietas Unggul Baru (VUB)	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		60.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						1.232.451.300,00						-	1.450.000.000,00	
		[Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian yang Berkualitas]	-	-	-	-	-	1.232.451.300,00	-	-	-	-	-	-	1.450.000.000,00	-
	3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	-	-			-	632.451.300,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	750.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola				1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		400.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.01.0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian														
			Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian				1 Dokumen	332.451.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DBH SAWIT	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	600.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	700.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara</i>				4 Unit	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		450.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				2 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
4.	3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN						155.000.000,00						-	500.000.000,00	
		[Persentase Fasilitas Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Berkualitas]	-	-	-	-	-	155.000.000,00	-	-	-	-	-	-	500.000.000,00	-
	3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	-	-			-	155.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	500.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan				4 Ha	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		150.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan														
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani				3 Ha	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						25.000.000,00						-	380.000.000,00	
		[Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pertanian]	-	-	-	-	-	25.000.000,00	-	-	-	-	-	-	380.000.000,00	-
	3.27.06.2.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	25.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	380.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		350.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian														
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi				1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		30.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						400.000.000,00						-	505.000.000,00	
		[Peningkatan Kelas Kelompok Tani]	-	-	-	-	-	400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	505.000.000,00	-
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	400.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	505.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>				13 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		55.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>				13 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAK NON FISIK-BANTUAN OPERASIONAL PENYULUH PERTANIAN	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		200.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>				6 Unit	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		250.000.000,00	DINAS TANAMAN PANGAN, HORLTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
		DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN						11.313.929.976,00							12.445.322.974,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						11.313.929.976,00							12.445.322.974,00	
	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN						11.313.929.976,00							12.445.322.974,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.656.399.276,00						-	11.722.269.269,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	10.656.399.276,00	-	-	-	-	-	-	11.722.269.269,00	-
	3.27.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	34.775.100,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	38.252.610,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		2.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		495.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		550.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	550.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		605.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	875.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		962.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	30.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		33.000.110,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		440.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	9.942.274.385,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	10.936.501.824,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				96 Orang/bulan	9.939.324.385,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		10.933.256.824,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>				3 Dokumen	400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		440.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				12 Dokumen	475.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		522.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				12 Dokumen	325.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		357.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12 Laporan	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		330.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		495.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		495.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		605.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.762.241,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	1.938.465,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Dokumen	362.241,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		398.465,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD</i>				1 Laporan	300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		330.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		385.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				1 Laporan	350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		385.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		440.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	51.150.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	56.265.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				100 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai														
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Dokumen	425.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		467.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				4 Orang	350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		385.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		-	-	-	-	-	-	10.656.399.276,00	-	-	-	-	-	-	11.722.269.269,00	-
	3.27.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				12 Orang	375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		412.500,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	10.656.399.276,00	-	-	-	-	-	-	11.722.269.269,00	-
	3.27.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	154.196.500,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	196.451.530,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		495.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	62.052.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		85.396.300,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	15.054.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		22.515.130,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	450.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		495.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	1.440.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		1.584.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	72.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		85.966.100,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	80.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	88.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		55.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan				0 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		33.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	163.902.100,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	181.942.310,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		2.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	36.902.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		40.592.310,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	126.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		138.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	228.338.950,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	222.917.530,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				89 Unit	175.498.950,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		180.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya														
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				11 Unit	32.840.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		19.967.530,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		22.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
2.	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN						436.000.000,00						-	479.600.000,00	
		[Persentase Peningkatan Sarana Peternakan yang Berkualitas]	-	-	-	-	-	436.000.000,00	-	-	-	-	-	-	479.600.000,00	-
	3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	-	-			-	11.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	12.650.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian														
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	235.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	258.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				12 Laporan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		220.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.03.0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar				50 Laporan	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		38.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	-	-			-	9.500.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	10.450.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.04.0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan														
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak				0 Kasus	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	20.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	22.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				1 Dokumen	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan														
			Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan				36 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		7.700.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.05.0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak														
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	-	-			-	160.000.000,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-	-	176.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain				0 Ton	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Non PPD: -	-		4.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Ekor	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.050.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.02.2.06.0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain														
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain				0 Dosis	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan	-		165.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
3.	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN						27.200.000,00						-	29.920.000,00	
		[Persentase Penyediaan Prasarana Pertenakan yang Berkualitas]	-	-	-	-	-	27.200.000,00	-	-	-	-	-	-	29.920.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	-	-			-	19.700.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	21.670.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani														
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				2 Unit	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya														
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara				1 Unit	7.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		8.470.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi</i>				0 Unit	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.050.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	-	-			-	7.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	8.250.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum														
			<i>Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan</i>				1 Ha	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.03.2.04.0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola				1 Ha	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
4.	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER						120.037.700,00						-	132.085.470,00	
		[Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veterin]	-	-	-	-	-	120.037.700,00	-	-	-	-	-	-	132.085.470,00	-
	3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	52.387.800,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	57.670.580,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular														
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali				0 Laporan	3.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.740.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah kader zoonosis				79 Orang	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan				13 Wilayah	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.400.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan														
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				30 Kasus	3.928.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.320.800,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis				0 Dokumen	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		6.600.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota				12 Laporan	30.559.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		33.659.780,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	16.649.900,00			-	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	18.314.890,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM</i>				0 laporan	6.149.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.764.890,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM														
			<i>Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.500.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.02.0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya														
			<i>Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya</i>				0 Laporan	5.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.050.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	-	-			-	6.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	7.150.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium</i>				0 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.300.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.03.0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner														
			<i>Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner</i>				0 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.850.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	-	-			-	44.500.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	48.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan														
			Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				0 Laporan	4.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.950.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan														
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik				0 Unit Usaha	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		44.000.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
5.	3.27.06	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN						28.059.200,00						-	30.865.120,00	
		[Persentase Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Peternakan]	-	-	-	-	-	28.059.200,00	-	-	-	-	-	-	30.865.120,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.06.2.02	Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	-	-			-	26.059.200,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	28.665.120,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan														
			Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan				1 Dokumen	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.850.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan														
			Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi				12 Laporan	20.059.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		22.065.120,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.02.0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi				20 Laporan	2.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.750.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03	Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan	-	-			-	2.000.000,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	2.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.06.2.03.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan														
			Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen				12 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.200.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
6.	3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN						46.233.800,00						-	50.583.115,00	
		[Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyuluhan]	-	-	-	-	-	46.233.800,00	-	-	-	-	-	-	50.583.115,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	-	-			-	46.233.800,00			-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	50.583.115,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				30 Unit	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		9.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa														
			Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya				250 Unit	9.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		10.010.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian				0 Unit	9.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		9.900.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi				0 Unit	9.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		10.120.000,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani														
			Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk				0 Unit	9.683.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		10.653.115,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian				0 Dokumen	250.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an nilai tambah dan produktifita s pertanian, p erkebunan, peternakan dan perikanan Meningkatkan an kemajuan dan keman dirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-		0,00	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
		SEKRETARIAT DAERAH						38.327.341.595,00							40.173.234.519,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						38.327.341.595,00							40.173.234.519,00	
	4.01	SEKRETARIAT DAERAH						38.327.341.595,00							40.173.234.519,00	
1.	4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						28.310.261.895,00						-	28.796.293.964,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	28.310.261.895,00	-	-	-	-	-	-	28.796.293.964,00	-
	4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya dokumen pelaksanaan perangkat daerah	-			100 %	381.050.100,00			-	-	-	-	302.389.290,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	204.188.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		164.953.845,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				4 Dokumen	176.861.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		137.435.445,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN serta penyusunan laporan OPD	-			100 %	16.393.448.559,00			-	-	-	-	12.768.619.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				126 Orang/bulan	16.195.579.059,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.322.828.333,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				120 Dokumen	84.352.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		155.005.988,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.848.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		82.595.993,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				17 Laporan	62.099.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		119.117.408,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	30.569.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		89.072.078,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	26.596.700,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				5 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	26.596.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		-	-	-	-	-	-	28.310.261.895,00	-	-	-	-	-	-	28.796.293.964,00	-
	4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				200 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				80 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	28.310.261.895,00	-	-	-	-	-	-	28.796.293.964,00	-
	4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	1.125.333.700,00			-	-	-	-	1.632.575.604,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	78.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.645.507,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	30.479.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.805.820,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	674.767.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		988.942.500,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	301.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		469.081.777,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				10 Dokumen	39.999.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.100.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan	-			100 %	673.648.000,00			-	-	-	-	3.091.754.200,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				4 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		666.191.137,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				4 Unit	16.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.559.331.900,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				3 Unit	657.648.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		866.231.163,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang pemerintah daerah	-			100 %	3.342.952.900,00			-	-	-	-	1.969.169.462,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		11.025.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	768.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		771.750.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	70.808.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		749.958.536,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	2.499.144.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		436.435.926,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik daerah dan berkondisi baik	-			100 %	3.055.915.900,00			-	-	-	-	3.864.273.526,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	251.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		644.532.525,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				72 Unit	1.101.425.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.061.823.262,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				18 Unit	16.231.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.539.700,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	89.813.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		35.533.575,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	488.441.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.140.753.443,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	216.099.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		218.482.425,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				30 Unit	880.833.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		654.138.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah														
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi				10 Ha	11.223.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.469.988,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase terlakananya administrasi keuangan dan operasional KDH	-			100 %	821.175.336,00			-	-	-	-	935.878.830,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	176.052.436,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		185.501.834,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				20 Paket	195.120.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		182.044.800,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				4 Orang	50.002.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAU YANG DITENTUKAN P ENGGUNAANN YA BIDANG KESEHATAN	-	-	-		105.000.000,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Orang/Bulan	400.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		463.332.196,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Persentase terpenuhinya fasilitasi kerumahtanggan KDH, Wakil KDH dan SEKDA	-			100 %	1.305.199.200,00			-	-	-	-	2.075.501.012,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan				3 Paket	515.557.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		756.680.810,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan				2 Paket	284.621.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		460.799.577,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan				2 Paket	505.021.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		858.020.625,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	OPD yang memiliki dokumen analisis jabatan persentase OPD yang sesuai tugas pokok dan fungsi	-			100 %	152.340.300,00			-	-	-	-	278.070.897,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan				5 Dokumen	28.812.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.277.145,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana				2 Laporan	27.347.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		55.277.145,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi				1 Dokumen	33.255.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		59.178.893,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana				1 Dokumen	38.847.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		63.704.655,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah				2 Dokumen	24.078.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.633.059,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	-			-	1.032.601.200,00			-	-	-	-	1.878.061.343,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan				360 Laporan	789.192.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.599.939.180,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan				360 Laporan	105.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		133.970.288,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan														
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan				360 Laporan	138.404.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		144.151.875,00	SEKRETARIAT DAERAH
2.	4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT						9.413.852.700,00						-	10.567.145.185,00	
		[Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat]	-	-	-	-	-	9.413.852.700,00	-	-	-	-	-	-	10.567.145.185,00	-
	4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Terlaksananya koordinasi Bidang Pemerintahan	-			100 %	163.313.000,00			-	-	-	-	215.823.745,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan				4 Dokumen	30.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		44.755.105,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan				4 Dokumen	45.847.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		58.591.260,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah				6 Dokumen	86.689.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		112.477.380,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase kegiatan terkait dengan kesejahteraan rakyat yang terkoordinasi	-			100 %	8.837.350.100,00			-	-	-	-	9.770.291.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual				12 Dokumen	8.837.350.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.770.291.055,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya koordinasi Bidang Pemerintahan	-			100 %	249.286.000,00			-	-	-	-	345.643.879,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah														
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun				66 Dokumen	89.033.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		128.253.422,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum														
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum				1 Kasus	151.595.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		181.249.405,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum														
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi				66 Dokumen	8.657.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		36.141.052,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase pelaksanaan fasilitasi kerjasama daerah	-			100 %	163.903.600,00			-	-	-	-	235.386.506,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri				16 Dokumen	141.560.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		195.210.855,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama														
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama				2 Laporan	22.343.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.175.651,00	SEKRETARIAT DAERAH
3.	4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN						603.227.000,00						-	809.795.370,00	
		[Persentase Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Bidang Perekonomian]	-	-	-	-	-	603.227.000,00	-	-	-	-	-	-	809.795.370,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase terlaksananya koordinasi dan Fasilitasi bidang perekonomian	-			100 %	140.972.000,00			-	-	-	-	163.279.036,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD				1 Dokumen	24.319.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		42.761.454,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian				1 Laporan	75.743.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		114.292.316,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil														
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil				1 Dokumen	40.909.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.225.266,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase pelaksanaan pembangunan daerah	-			100 %	183.967.000,00			-	-	-	-	243.478.608,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah				1 Dokumen	50.748.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.967.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan				1 Laporan	63.087.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.755.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan				1 Laporan	70.131.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		84.755.679,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang jasa melalui aplikasi SPSE sesuai dengan peraturan perundang-undangan	-			100 %	186.421.000,00			-	-	-	-	276.331.261,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				3 Dokumen	55.690.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		81.334.291,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik														
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik				2 Dokumen	45.391.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.083.720,00	SEKRETARIAT DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				100 Orang	85.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		124.913.250,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	-			100 %	91.867.000,00			-	-	-	-	126.706.465,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja				1 Dokumen	56.202.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		90.021.330,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian				1 Dokumen	35.664.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		13.097.148,00	SEKRETARIAT DAERAH
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		23.587.987,00	SEKRETARIAT DAERAH
		SEKRETARIAT DPRD						32.167.776.925,00							44.856.351.821,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						32.167.776.925,00							44.856.351.821,00	
	4.02	SEKRETARIAT DPRD						32.167.776.925,00							44.856.351.821,00	
1.	4.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.741.708.025,00						-	27.841.001.721,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	21.741.708.025,00	-	-	-	-	-	-	27.841.001.721,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	66.164.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	170.345.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.848.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	4.726.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		28.009.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		25.052.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	18.904.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		35.252.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	4.726.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		21.388.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		12.764.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		12.030.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.826.800.284,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	5.411.169.421,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				31 Orang/bulan	2.908.886.028,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.245.429.321,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	841.950.256,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.042.368.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				4800 Dokumen	47.608.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		71.573.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		13.674.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				3 Dokumen	4.726.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		12.633.800,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				13 Laporan	9.452.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		12.745.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	4.726.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		12.745.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	145.274.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	402.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				1 Paket	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		146.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				8 Orang	15.274.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		76.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				18 Orang	60.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		180.100.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	953.348.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	2.172.657.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	349.804.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.492.915.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	87.133.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		92.944.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				30 Dokumen	10.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		23.525.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	381.679.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		322.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	124.031.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		240.912.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.294.011.900,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	3.161.968.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				3 Unit	1.190.567.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		3.058.559.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				2 Unit	103.444.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		103.409.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	503.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	759.515.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		5.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Laporan	192.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		209.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	306.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		544.815.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	2.531.725.100,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	3.104.701.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				16 Unit	405.017.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		482.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				14 Unit	109.385.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		230.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1.972.530.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		2.081.431.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	44.793.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		310.170.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	-	-			-	12.162.449.441,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	12.052.572.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD				35 Orang/Bulan	11.882.204.641,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		11.680.947.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan				3 Paket	227.744.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		319.125.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD				35 Orang	52.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		52.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	-	-			-	258.934.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	605.773.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				12 Dokumen	9.102.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		9.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD				12 Laporan	10.809.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		13.256.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				12 Laporan	215.462.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		279.385.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD														
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan				2 Paket	23.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		303.632.000,00	SEKRETARIAT DPRD
2.	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						10.426.068.900,00						-	17.015.350.100,00	
		[Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD]	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	-	-			-	1.619.084.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	4.480.464.500,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah				1 Dokumen	3.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.903.400,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				9 Dokumen	1.498.030.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		4.343.857.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD]	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan				12 Dokumen	9.103.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.245.600,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi				3 Dokumen	63.141.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		63.036.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD														
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun				1 Dokumen	44.810.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.422.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	-	-			-	130.647.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	198.732.900,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS				2 Dokumen	11.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.530.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				2 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.530.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD				1 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		32.650.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan				1 Dokumen	27.147.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		30.522.900,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD]	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester				1 Dokumen	19.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		19.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				1 Dokumen	23.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		45.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	-	-			-	72.976.700,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	297.268.700,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum				3 Laporan	41.724.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		129.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur				3 Laporan	3.667.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		14.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat				3 Laporan	4.569.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.080.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian				3 Laporan	4.176.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		11.392.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam				3 Laporan	3.837.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.840.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD]	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				3 Dokumen	4.623.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		4.718.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran				3 Dokumen	6.573.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		55.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				1 Dokumen	3.806.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		11.753.700,00	SEKRETARIAT DPRD

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	-	-			-	1.335.053.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	2.912.244.100,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD				12 Dokumen	513.284.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.152.979.600,00	SEKRETARIAT DPRD
		-	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli				24 Orang	132.353.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		132.354.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		[Persentase Terselenggaranya Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD]	-	-	-	-	-	10.426.068.900,00	-	-	-	-	-	-	17.015.350.100,00	-
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi				8 Orang	229.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		253.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				3 Dokumen	17.717.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		77.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD				1 Dokumen	4.998.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		17.946.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD				3 Dokumen	436.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.278.264.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	-	-			-	789.966.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	1.279.195.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD				12 Laporan	29.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		436.830.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun				12 Dokumen	21.625.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		103.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses														
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses				3 Dokumen	738.381.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		738.385.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	-	-			-	11.371.900,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	62.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD				1 Dokumen	4.996.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		42.640.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD				1 Laporan	6.375.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		20.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07	Pembahasan Kerja Sama Daerah	-	-			-	29.840.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	75.271.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah				1 Dokumen	18.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		59.800.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.07.0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi														
			Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun				12 Dokumen	11.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		15.471.400,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	-	-			-	6.437.128.200,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	7.709.533.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				12 Dokumen	5.454.119.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		6.430.738.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD														
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun				1 Laporan	4.830.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		14.325.000,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah														
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				12 Dokumen	32.539.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		34.473.500,00	SEKRETARIAT DPRD
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				12 Dokumen	945.639.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.229.997.000,00	SEKRETARIAT DPRD
		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						7.503.194.523,00							7.888.794.690,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						7.503.194.523,00							7.888.794.690,00	
	5.01	PERENCANAAN						7.387.288.323,00							7.788.092.773,00	
1.	5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						6.194.279.769,00						-	6.417.717.650,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Sinkronisasi Perencanaan dan Pelaksanaan Kinerja Perangkat Daerah	-			100 %	102.581.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	102.581.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	11.604.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.604.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.599.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.599.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.324.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		2.324.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.581.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		2.581.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	66.942.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		66.942.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	6.729.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		6.729.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	6.194.279.769,00	-	-	-	-	-	-	6.417.717.650,00	-
	5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Keuangan	-			100 %	4.500.798.235,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	4.724.327.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				42 Orang/bulan	4.470.651.235,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		4.694.180.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1 Dokumen	12.741.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.741.576,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	5.802.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		5.802.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Barang Milik Daerah	-			100 %	12.860.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	12.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	12.860.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		12.860.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-			100 %	55.000.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				70 Paket	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		90.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase Tertib Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	-			100 %	381.290.534,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	378.092.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				6 Paket	10.660.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		10.660.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>				2 Paket	11.030.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.030.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	52.700.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		52.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				1 Paket	85.249.134,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		82.051.074,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	11.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		11.400.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	25.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		25.005.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	185.246.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		185.246.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersedian Barang Milik Daerah Sesuai dengan Perencanaan	-			100 %	416.393.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	419.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				5 Unit	147.036.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		150.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				21 Unit	99.941.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	169.416.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		169.500.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	371.947.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	371.947.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	83.947.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		83.947.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	288.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	353.410.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	318.410.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Unit	236.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		236.700.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				3 Unit	51.710.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		51.710.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		30.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
2.	5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH						414.426.276,00						-	500.925.123,00	
	5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	-			85 %	296.647.300,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	326.323.250,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik														
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik				1 Berita Acara	36.869.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		40.555.900,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota														
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota				1 Berita Acara	40.052.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		44.068.200,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan														
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan				790 Usulan	15.620.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		17.182.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)				2 Dokumen	204.106.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Kabupaten Lima Puluh Kota		224.517.150,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Kelengkapan dan Kualitas Dokumen (Data Dukung, Inovasi dan Konsistensi Dok. Perencanaan)	-			85 %	70.144.976,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	117.159.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)				1 Dokumen	23.762.976,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	Kabupaten Lima Puluh Kota		40.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah														
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi				43 Orang	46.382.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		77.159.473,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan pada Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan (Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran, Capaian Kinerja dan Serapan Anggaran)	-			85 %	47.634.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	57.442.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan</i>				1 Laporan	10.045.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		15.045.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah</i>				2 Laporan	37.589.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		42.397.400,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.	5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH						778.582.278,00						-	869.450.000,00	
	5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	<i>Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</i>	-			85 %	348.000.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	383.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)</i>				1 Dokumen	70.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		44.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan</i>				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		22.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan				1 Laporan	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		53.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		55.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		33.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia				1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		110.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia)	-			85 %	168.978.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	198.450.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	92.978.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		97.650.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	76.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.800.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Indeks Kualitas Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	-			85 %	261.604.278,00			-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	288.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	58.302.139,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur				1 Laporan	72.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)				1 Dokumen	58.302.139,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	Kabupaten Lima Puluh Kota		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		64.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan				1 Laporan	72.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		80.000.000,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						115.906.200,00							100.701.917,00	
1.	5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH						115.906.200,00						-	100.701.917,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	-	-			-	63.999.000,00			-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota	-	100.701.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan														
			<i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>				1 Laporan	63.999.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	Kabupaten Lima Puluh Kota		100.701.917,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	-			-	51.907.200,00			-	-	-	-	0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan</i>				1 Dokumen	51.907.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
	5.02	KEUANGAN						200.034.652.450,00							211.210.010.073,00	
1.	5.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						24.203.848.950,00						-	34.340.323.973,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	185.319.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	194.775.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	19.777.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	18.968.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		19.950.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	19.955.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				3 Dokumen	18.484.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		19.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				2 Dokumen	21.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	21.986.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		23.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				1 Dokumen	50.149.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		52.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	20.486.631.462,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	30.698.466.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				6425 Orang/bulan	20.445.631.462,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		30.655.416.173,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>				2 Laporan	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		15.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</i>				1 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		11.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	90.628.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	95.025.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				100 Paket	63.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				105 Orang	13.950.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		14.700.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				95 Orang	13.428.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		14.175.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	397.665.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	418.672.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.458.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		16.291.800,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	9.979.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		10.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		8.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	52.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		54.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	29.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				20 Dokumen	2.220.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		2.331.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	78.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		81.900.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				60 Laporan	204.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		214.200.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	1.406.455.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.347.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				9 Unit	723.805.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		840.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				30 Unit	101.194.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		105.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				7 Unit	281.456.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		87.675.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			0				2 0	300.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	784.224.688,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	661.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	7.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		8.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	156.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		163.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	620.226.888,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		489.300.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	852.925.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	924.210.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				49 Unit	551.075.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		578.760.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				35 Unit	28.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		30.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	273.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		315.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
2.	5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						173.429.183.500,00						-	174.585.161.100,00	
		[Opini BPK]	-	-	-	-	-	173.429.183.500,00	-	-	-	-	-	-	174.585.161.100,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	-	-			-	1.230.501.300,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.227.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS														
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	177.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		178.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun				4 Dokumen	182.800.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		183.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD														
			<i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	79.973.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		78.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>				43 Dokumen	124.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		121.800.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	77.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		76.650.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD														
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi				43 Dokumen	142.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		129.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD				6 Dokumen	170.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		178.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD				6 Dokumen	195.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		204.750.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran														
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran				4 Dokumen	69.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		64.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan				6 Dokumen	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		11.550.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		-	-	-	-	-	-	173.429.183.500,00	-	-	-	-	-	-	174.585.161.100,00	-
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	-	-			-	412.038.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	432.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				12 Dokumen	63.003.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				172 Dokumen	21.997.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		23.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah				12 Dokumen	41.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		44.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya				12 Dokumen	28.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		29.400.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank				2 Dokumen	41.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		44.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)														
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)				18 Laporan	20.993.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas				9 Dokumen	21.005.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		22.050.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait				86 Dokumen	62.981.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		66.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan				8 Dokumen	110.008.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		115.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	-	-			-	501.999.800,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	1.850.100.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban														
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban				12 Dokumen	31.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		33.075.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				4 Laporan	79.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi				65 Laporan	43.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		45.150.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota														
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota				2 Dokumen	78.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		82.425.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.02.2.03.0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD														
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				4 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		84.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah				60 Dokumen	49.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		51.450.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Orang	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.470.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	-			-	170.959.110.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-	-	170.730.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan				79 Laporan	163.359.110.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA DESA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-		162.750.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak				12 Laporan	1.600.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.680.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota				79 Laporan	6.000.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an kemajuan dan keman dirian Nagari "SAKATO MANDIRI"	-		6.300.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	-	-			-	325.534.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	345.011.100,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah				12 Dokumen	188.610.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		198.047.850,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				129 Orang	136.924.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		146.963.250,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
3.	5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						814.613.800,00						-	772.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-			-	814.613.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	772.525.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga														
			Jumlah Standar Harga yang Disusun				1 Dokumen	72.001.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		75.600.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah				2 Dokumen	30.000.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah</i>				2 Dokumen	47.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		49.350.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>				12 Laporan	110.110.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				12 Laporan	25.000.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		26.250.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				12 Laporan	280.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		294.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah				12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		31.500.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah				12 Laporan	26.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		27.825.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	20.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Sarilamak	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		21.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				4 Laporan	64.002.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		69.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah														
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun				2 Laporan	110.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		115.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
4.	5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						1.587.006.200,00						-	1.512.000.000,00	
		[Persentase PAD terhadap Pendapatan]	-	-	-	-	-	1.587.006.200,00	-	-	-	-	-	-	1.512.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	-	-			-	1.587.006.200,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	1.512.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah				9 Dokumen	42.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		45.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah				4 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		145.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah				12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		170.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah				12 Unit	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		375.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah				12 Laporan	82.000.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		86.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah														
			0				0 0	47.000.200,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		50.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)														
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya				11 Obyek Pajak	165.001.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		0,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>				12 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		130.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah														
			<i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>				40 Layanan	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		16.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi				50 Dokumen	90.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		95.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah				150 Dokumen	190.004.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		200.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				8 Dokumen	96.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		100.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		40.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah				10 Laporan	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		60.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						6.122.440.179,00							8.025.000.000,00	
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						6.122.440.179,00							8.025.000.000,00	
	5.03	KEPEGAWAIAN						6.022.440.179,00							7.875.000.000,00	
1.	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.862.440.179,00						-	6.265.000.000,00	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	4.862.440.179,00	-	-	-	-	-	-	6.265.000.000,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	25.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>				8 Laporan	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	-			100 %	3.732.440.179,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				60 Orang/bulan	3.732.440.179,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		5.000.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhi Administrasi BMD BKPSDM	-			100 %	5.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	320.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	445.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		60.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		10.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				200 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	400.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				5 Unit	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>				15 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	105.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	105.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		5.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				72 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Pemenuhan Terhadap Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	-			100 %	275.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM	-	280.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				23 Unit	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	BKPSDM		30.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
2.	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.160.000.000,00						-	1.610.000.000,00	
		[Tingkat Akurasi Data Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN]	-	-	-	-	-	1.160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.610.000.000,00	-
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	290.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja	-	460.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				10000 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		300.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				200 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN														
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi				1 Lembaga	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian				7000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				7000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN dan Kelompok Pencari Kerja		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	450.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	600.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				1500 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		50.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN				400 Dokumen	350.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		500.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	<i>Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian</i>	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	300.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	400.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														
			<i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan</i>				150 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		100.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		-	-	-	-	-	-	1.160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.610.000.000,00	-
	5.03.02.2.03.0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat														
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat</i>				259 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.03.0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan				60 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		[Tingkat Akurasi Data Kepegawaian, Indeks Sistem Merit, Indeks Profesionalitas ASN]	-	-	-	-	-	1.160.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.610.000.000,00	-
	5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit Tingkat Akurasi Data Kepegawaian	-			85 Indeks 325 Indeks 100 %	120.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				7000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa				300 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				7000 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN				50 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai														
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani				50 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		25.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						100.000.000,00							150.000.000,00	
1.	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						100.000.000,00						-	150.000.000,00	
		-	-	-	-	-	-	100.000.000,00	-	-	-	-	-	-	150.000.000,00	-
	5.04.02.2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kenaikan Nilai Indeks Profesionalitas ASN Persentase Kenaikan Nilai Indeks Sistem Merit	-			85 Indeks 325 Indeks	100.000.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	5.04.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				350 Orang	100.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Non PPD: -	ASN		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		INSPEKTORAT						12.439.115.885,00							24.076.666.257,20	
	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						12.439.115.885,00							24.076.666.257,20	
	6.01	INSPEKTORAT DAERAH						12.439.115.885,00							24.076.666.257,20	
1.	6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						10.720.311.741,00						-	17.383.404.677,30	
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	10.720.311.741,00	-	-	-	-	-	-	17.383.404.677,30	-
	6.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	71.561.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	333.832.062,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen Dokumen	21.876.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		79.845.937,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	11.014.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		47.907.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	6.599.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		39.922.968,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	6.392.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		47.907.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	6.466.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		30.417.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		47.907.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	13.214.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		39.922.968,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	8.681.786.366,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	10.149.376.807,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				61 Orang/bulan	8.644.309.366,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		9.774.100.901,25	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				100 Dokumen	5.998.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		87.830.531,25	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	7.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		71.861.343,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	7.988.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		63.876.750,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				1 Dokumen	5.491.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		47.907.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				18 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		47.907.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Dokumen	6.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		55.892.156,25	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	846.450.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	3.555.366.019,80	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				0 Paket	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		142.524.998,70	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				3 Dokumen	26.450.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		27.772.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				61 Orang	615.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		1.820.066.906,70	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				100 Orang	120.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		586.867.641,15	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				60 Orang	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		978.133.973,25	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	496.624.375,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	1.740.641.437,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	11.128.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		119.768.906,25	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				30 Paket	190.109.375,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		199.614.843,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				25 Paket	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		103.799.718,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	31.378.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		127.753.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	25.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		103.799.718,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				5 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		55.892.156,25	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	45.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		199.614.843,75	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	187.704.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		830.397.750,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	40.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	871.521.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		479.075.625,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		287.445.375,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	10.720.311.741,00	-	-	-	-	-	-	17.383.404.677,30	-
	6.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		105.000.000,00	INSPEKTORAT
		[Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintah]	-	-	-	-	-	10.720.311.741,00	-	-	-	-	-	-	17.383.404.677,30	-
	6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	270.720.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	431.168.062,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1800 Laporan	1.020.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		15.969.187,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	34.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		127.753.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	235.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		287.445.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	313.170.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	301.499.287,50	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				26 Unit	217.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		43.915.256,25	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				20 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		42.000.000,00	INSPEKTORAT
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	78.720.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		127.753.500,00	INSPEKTORAT
		-	-	-	-	-	-	10.720.311.741,00	-	-	-	-	-	-	17.383.404.677,30	-
	6.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	6.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		87.830.531,25	INSPEKTORAT
2.	6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN						1.273.804.144,00						-	5.224.096.329,90	
		[Persentase OPD yang Memiliki Nilai Evaluasi AKIP BB]	-	-	-	-	-	1.273.804.144,00	-	-	-	-	-	-	5.224.096.329,90	-
	6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	-	-			-	1.068.804.144,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	4.103.475.954,90	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah				4 Laporan	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		798.459.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				20 Laporan	250.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		798.459.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja				115 Laporan	308.804.144,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		853.746.298,65	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan														
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		55.892.156,25	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa				20 Laporan	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		638.767.500,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal														
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk				4 Kesepakatan	200.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		239.537.812,50	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4 Dokumen	85.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		718.613.437,50	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	-	-			-	205.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-	-	1.120.620.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		287.445.375,00	INSPEKTORAT
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				40 Laporan	175.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	-		833.175.000,00	INSPEKTORAT
3.	6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI						445.000.000,00						-	1.469.165.250,00	
		[Level Kapabilitas APIP]	-	-	-	-	-	445.000.000,00	-	-	-	-	-	-	1.469.165.250,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	-	-			-	170.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	399.229.687,50	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	150.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		207.599.437,50	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun				1 Rekomend asi	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		191.630.250,00	INSPEKTORAT

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	-	-			-	275.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	1.069.935.562,50	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				43 perangkat daerah	125.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		199.614.843,75	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				43 perangkat daerah	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		367.291.312,50	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		215.584.031,25	INSPEKTORAT
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				1 perangkat daerah	25.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		287.445.375,00	INSPEKTORAT
		KECAMATAN GUNUANG OMEH						1.335.833.783,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.322.149.283,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.322.149.283,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.242.574.283,00						-	0,00	
		-	-	-	-	-	-	1.242.574.283,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.291.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.291.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.125.240.283,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				0 Orang/bulan	1.125.240.283,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.693.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	711.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	10.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	2.707.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	37.675.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	64.350.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				0 Unit	64.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						0,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						52.575.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	47.250.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				0 Lembaga Kemasyarakatan	1.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	45.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	5.325.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				2000 Keluarga	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				2000 Keluarga	3.325.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X	NON URUSAN						13.684.500,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						13.684.500,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						13.684.500,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X.XX.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	13.684.500,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	10.684.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Gunuang Omeh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN GUNUANG OMEH
		KECAMATAN BUKIK BARISAN							1.621.415.530,00						1.621.415.530,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.621.415.530,00							1.621.415.530,00	
	7.01	KECAMATAN						1.621.415.530,00							1.621.415.530,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.487.066.530,00						-	1.459.756.815,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.701.000,00			-	-	-	-	12.942.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1.634.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.112.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	365.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	438.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.152.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.368.385.530,00			-	-	-	-	1.317.737.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.359.615.530,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.305.780.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	8.040.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.800.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				3 Laporan	730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.157.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	6.000.000,00			-	-	-	-	9.800.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		9.800.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	38.500.000,00			-	-	-	-	68.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	38.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		68.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	69.480.000,00			-	-	-	-	51.277.815,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	68.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.547.815,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	730.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		730.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						50.044.000,00						-	50.547.815,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	50.044.000,00			-	-	-	-	50.547.815,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				12 Dokumen	50.044.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.547.815,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						57.305.000,00						-	84.110.900,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	52.305.000,00			-	-	-	-	79.110.900,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				5 Lembaga K emasyarakat an	4.305.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.819.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		73.291.900,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				5 Keluarga	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.000.000,00						-	27.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	-	-	-	27.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Bukik Barisan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN BUKIK BARISAN
		KECAMATAN SULIKI						1.840.279.889,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.840.279.889,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						1.840.279.889,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.792.279.889,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.604.579.889,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 orang Orang/bulan	1.604.579.889,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	52.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1Unit Paket	15.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				paket Paket	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				berkas Paket	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1000 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	14.700.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 laporan Laporan	3.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 laporan Laporan	11.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	121.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 unit Unit	45.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				20 unit Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 paket Unit	75.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
2.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						11.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	9.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 lembaga kemasyarak Lembaga Ke masyarakata n	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				4 laporan Laporan	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	2.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				30 keluarga Keluarga	2.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						37.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	37.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				200 orang Orang	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 dokumen Dokumen	33.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN SULIKI
		KECAMATAN GUGUAK						1.716.209.464,00							2.428.365.237,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.716.209.464,00							2.428.365.237,00	
	7.01	KECAMATAN						1.716.209.464,00							2.428.365.237,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.619.188.664,00						-	2.070.765.237,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	6.848.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	10.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	1.745.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i>				2 Dokumen	1.095.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</i>				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.012.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	1.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		2.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.352.735.864,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.826.665.237,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.352.735.864,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.823.665.237,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				2 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	1.200.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				3 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		1.200.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.992.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	15.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				14 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		12.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				14 Dokumen	2.992.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	57.378.300,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	59.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				0 Paket	4.977.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				0 Paket	5.031.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				0 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				0 Paket	5.370.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		6.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Laporan	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	57.241.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	36.759.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				0 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	20.482.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	36.913.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	38.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				0 Laporan	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		3.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				0 Laporan	33.913.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		35.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	97.080.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	69.900.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				0 Unit	68.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		64.900.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				0 Unit	4.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				0 Unit	23.550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		0,00	KECAMATAN GUGUAK
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						20.000.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	10.000.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	10.000.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	9.999.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	9.999.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						25.020.800,00						-	198.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	8.908.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	80.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	8.908.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		80.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	-	-			-	7.070.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	8.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyarakatat an	7.070.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		8.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	9.042.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	110.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	5.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				0 Keluarga	3.043.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				15 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				0 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00						-	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		20.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				0 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.000.000,00						-	53.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	53.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				0 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		13.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				0 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		30.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						20.000.000,00						-	41.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	20.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-	-	41.100.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				5 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		10.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa				0 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.500.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa				0 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		5.600.000,00	KECAMATAN GUGUAK
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				5 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Guguak, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas	-		15.000.000,00	KECAMATAN GUGUAK
		KECAMATAN MUNGKA						1.366.826.872,00							2.346.200.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.364.452.272,00							2.340.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.364.452.272,00							2.340.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.294.644.672,00						-	2.005.500.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	1.096.000,00			-	-	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			-				-	1.096.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				6 Dokumen	0,00	-	-	-	-	-		4.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			-				-	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.126.248.972,00			-	-	-	-	1.503.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			-				-	1.123.271.172,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.500.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	2.977.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	6.500.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	58.949.700,00			-	-	-	-	203.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				36 Paket	1.422.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			-				-	23.568.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		85.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				56 Paket	10.756.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				36 Paket	3.473.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>				48 Laporan	2.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				60 Laporan	17.480.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		62.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	48.500.000,00			-	-	-	-	117.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				28 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				60 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		98.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	53.350.000,00			-	-	-	-	103.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				8 Unit	53.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		95.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				8 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						32.000.000,00						-	81.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	32.000.000,00			-	-	-	-	81.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				24 Laporan	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		27.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				36 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		54.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						13.385.000,00						-	156.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	6.535.000,00			-	-	-	-	108.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				54 Lembaga Kemasyarak atan	3.035.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		8.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				52 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	6.850.000,00			-	-	-	-	48.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				1658 Keluarga	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				1658 Keluarga	3.980.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				1685 Keluarga	2.870.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						5.000.000,00						-	16.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	5.000.000,00			-	-	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				60 Laporan	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		16.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						10.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	10.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia				250 Orang	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				24 Dokumen	5.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		40.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						9.422.600,00						-	32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	9.422.600,00			-	-	-	-	32.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				24 Dokumen	4.407.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				60 Laporan	5.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		14.000.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X	NON URUSAN						2.374.600,00							5.700.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						2.374.600,00							5.700.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.374.600,00						-	5.700.000,00	
	X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.374.600,00			-	-	-	-	4.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.374.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		4.500.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	-	-	-	1.200.000,00	KECAMATAN MUNGKA
	X.XX.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	-	-	-	-		1.200.000,00	KECAMATAN MUNGKA
		KECAMATAN AKABILURU						1.818.614.830,00							2.038.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.818.614.830,00							2.038.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.818.614.830,00							2.038.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.698.742.830,00						-	1.928.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	10.578.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	21.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				6 Dokumen	5.314.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		13.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			-				-	5.264.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.502.961.830,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	1.605.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				15 Orang/bulan	1.498.645.830,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.600.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	4.316.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	4.060.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Laporan	4.060.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	12.486.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	15.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				15 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15 Dokumen	4.986.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		5.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	51.327.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	92.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		20.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				3 Laporan	30.547.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		60.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	83.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		23.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		20.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	21.600.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	23.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	6.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				2 Laporan	14.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	95.730.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	84.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				9 Unit	67.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		65.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				15 Unit	8.180.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		9.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	19.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						13.524.000,00						-	14.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	6.564.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	6.564.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	6.960.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	6.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						28.780.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	15.935.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	16.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakatat an	8.640.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		8.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	7.295.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		8.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	12.845.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				70 Keluarga	8.513.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		13.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				70 Keluarga	4.332.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						63.840.000,00						-	52.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	63.840.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	52.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				1 Orang	35.160.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	28.680.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		45.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						13.728.000,00						-	14.000.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	13.728.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	14.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	6.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
	7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	6.818.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Akabiluru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN AKABILURU
		KECAMATAN PAYAKUMBUH						2.314.464.076,00							2.538.400.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.256.827.076,00							2.504.900.000,00	
	7.01	KECAMATAN						2.256.827.076,00							2.504.900.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.188.290.676,00						-	2.444.400.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.800.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	6.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	2.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Koto Baru Simalanggang	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	2.042.795.076,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	2.201.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			0				0 0	2.042.795.076,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.200.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	11.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	17.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				22 Paket	11.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		2.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	33.035.600,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	36.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				3 Paket	1.422.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				5 Paket	3.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	5.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		7.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.798.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	6.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	13.575.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	61.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		40.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		12.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	7.000.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	10.900.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				10 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		400.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		8.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	91.660.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	109.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				9 Unit	67.750.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		75.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	3.910.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						5.506.200,00						-	5.500.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	3.500.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	2.006.200,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	2.006.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						30.248.500,00						-	11.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	26.748.500,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	7.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakat an	3.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				0 Laporan	23.498.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	3.500.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						2.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	2.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				7 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	-		3.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						28.780.000,00						-	30.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	28.780.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	28.780.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.001.700,00						-	10.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	2.001.700,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	10.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				7 Dokumen	2.001.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa				7 Dokumen	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				7 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		1.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				7 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		2.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X	NON URUSAN						57.637.000,00							33.500.000,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						57.637.000,00							33.500.000,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						57.637.000,00						-	33.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	2.800.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	3.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	2.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.500.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	54.837.000,00			-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				7 Laporan	54.837.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Payakumbuh, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Usaha P erdaganga n Dan Industri Ke cil/Meneng ah Serta Ekonomi Berbasis Digital Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PAYAKUMBUH
		KECAMATAN LUAK						1.876.292.043,00							2.073.113.143,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.876.292.043,00							2.073.113.143,00	
	7.01	KECAMATAN						1.876.292.043,00							2.073.113.143,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.804.053.543,00						-	1.955.113.143,00	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.658.599.543,00			-	-	-	-	1.750.613.143,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				224 Orang/bulan	1.658.599.543,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		1.750.613.143,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	16.510.000,00			-	-	-	-	43.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1.422.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	4.978.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	8.610.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	60.435.000,00			-	-	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	36.759.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	13.468.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.208.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	9.064.000,00			-	-	-	-	24.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.864.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				5 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	59.445.000,00			-	-	-	-	72.500.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	57.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		70.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.245.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN LUAK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						35.118.500,00						-	74.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	20.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	15.118.500,00			-	-	-	-	24.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	15.118.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		24.000.000,00	KECAMATAN LUAK
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						4.865.000,00						-	8.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	1.865.000,00			-	-	-	-	3.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				4 Lembaga Kemasyarakatan	1.865.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		3.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	3.000.000,00			-	-	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				0 Keluarga	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing				20 Keluarga	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN LUAK
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						32.255.000,00						-	36.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	32.255.000,00			-	-	-	-	36.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				30 Orang	4.975.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		6.000.000,00	KECAMATAN LUAK
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.280.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Luak, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		30.000.000,00	KECAMATAN LUAK
		KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN						1.842.689.130,00							1.937.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.842.689.130,00							1.937.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.842.689.130,00							1.937.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.773.689.130,00						-	1.845.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	8.649.540,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi	-	10.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.549.540,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	-			20 Persen	1.588.190.676,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi	-	1.600.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.588.190.676,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Instansi		1.600.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	<i>Nilai AKIP</i>	-			13 orang	0,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Instansi	-	15.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>				14 Paket	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Instansi		15.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	79.390.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Instansi	-	83.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Paket	29.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		30.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				12 Paket	3.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		4.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.140.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		9.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		8.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	29.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		30.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	41.208.914,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi	-	76.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		1.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	4.208.914,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		70.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	-			20 %	56.250.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi	-	60.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				6 Unit	56.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Instansi		60.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						12.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai IKM	-			80 %	0,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Masyarakat	-	5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berpengetahuan, Terampil dan Berdayasaing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Masyarakat		5.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai IKM	-			12 bulan	12.000.000,00			Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat	-	15.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 Laporan	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyangang disabilitas.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	Masyarakat		15.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						18.000.000,00						-	27.500.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah nagari yang berstatus maju	-			20 %	6.000.000,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Lembaga Nagari	-	5.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				8 Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan	Masyarakat dan Lembaga Nagari		5.500.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	12.000.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Masyarakat	-	22.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				50 Keluarga	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				50 Keluarga	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"	Masyarakat		6.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				50 Keluarga	4.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t pembangu nan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas.	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Mewujudka n sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	Masyarakat		10.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						0,00						-	2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai IKM	-			1 Kegiatan	0,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Masyarakat	-	2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				12 Laporan	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Meningkatk an tata kehidupan sosial kema syarakatan berdasarka n falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah Tata Kelola Pemerintahan an yang Baik	Masyarakat		2.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						39.000.000,00						-	43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai IKM	-			8 Nagari	39.000.000,00			Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat	-	43.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				100 Orang	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasn kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Masyarakat		13.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	27.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Lareh Sago Halaban, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta penin- gkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Mewujudkan Tata Kelola Pem- erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	Masyarakat		30.000.000,00	KECAMATAN LAREH SAGO HALABAN
		KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI						1.664.974.065,00							1.782.500.000,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.664.974.065,00							1.782.500.000,00	
	7.01	KECAMATAN						1.664.974.065,00							1.782.500.000,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.604.205.065,00						-	1.727.000.000,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	4.113.700,00			-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-	-	5.350.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.092.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Mewujudkan sumber daya handal, sehat, dan kompetitif	-		1.300.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.278.900,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.350.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	820.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.400.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	921.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.300.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.383.073.065,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-	-	1.471.300.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.381.873.065,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan	-		1.470.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				1 Laporan	1.200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		1.300.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	8.000.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	7.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	43.650.500,00			-	Meningkatk an Pemb ungan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	52.250.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	525.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemb ungan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		750.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			0				0 0	10.145.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		9.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	2.791.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	30.189.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemb ungan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		40.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	47.532.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	65.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	21.725.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		30.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	25.807.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		35.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	43.045.800,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	47.600.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.600.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	35.545.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		40.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	74.790.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	78.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				10 Unit	60.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		65.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Mebel yang Dipelihara				1 Unit	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				10 Unit	3.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		3.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				3 Unit	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemb anun Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						1.996.000,00						-	2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.996.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.02.2.02.0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan				1 Dokumen	1.996.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		2.500.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						31.673.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	26.650.000,00			-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	13.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				12 Lembaga Kemasyarak atan	4.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		6.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	22.400.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuah Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pemban gunan Infra struktur Yang Berkeadilan Dan Berkel anjutan Pembangu nan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	5.023.000,00			-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatk an sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-	-	7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				50 Keluarga	5.023.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		7.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						27.100.000,00						-	33.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	27.100.000,00			-	Meningkatk an Pembangun an Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-	-	33.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	27.100.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Situjuh Limo Nagari, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Pembangun an Infrastruktur Yang Berkeadilan Dan Berkelanjutan Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjut an	-		33.000.000,00	KECAMATAN SITUJUAH LIMO NAGARI
		KECAMATAN HARAU						1.995.198.471,00							2.154.271.500,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.995.198.471,00							2.154.271.500,00	
	7.01	KECAMATAN						1.995.198.471,00							2.154.271.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.921.841.871,00						-	2.065.271.500,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.969.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	9.922.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.453.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.651.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.423.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.610.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1.207.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.305.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1.596.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.794.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1.209.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.501.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen Laporan	1.081.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.061.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.708.298.671,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	1.810.049.500,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				19 Orang/bulan	1.703.038.871,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.803.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	1.446.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.849.500,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.188.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				12 Laporan	1.549.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.200.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1.076.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	1.104.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Laporan	1.104.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	1.744.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	4.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokumen	1.744.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		4.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	72.604.800,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	85.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	2.133.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		3.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	21.442.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		25.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	9.561.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	6.827.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		8.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	4.256.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	28.385.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		35.000.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	0,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		5.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	66.471.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	66.100.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				50 lembar Laporan	500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		600.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 bulan Laporan	8.340.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		9.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan Laporan	57.631.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		56.000.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	63.650.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	83.200.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				8 Unit	61.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA BAGI HASIL (DBH)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		65.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	2.600.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		3.200.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Paket Unit	0,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		15.000.000,00	KECAMATAN HARAU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						2.106.400,00						-	4.000.000,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	691.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	1.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				11 Dokumen	691.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	1.415.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				12 bulan Laporan	1.415.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						13.376.700,00						-	16.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	9.636.700,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	11.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				11 Lembaga Kemasyarakatan	7.960.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		8.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	1.676.700,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	3.740.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	5.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				12 bulan Keluarga	3.740.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		5.000.000,00	KECAMATAN HARAU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.227.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	1.405.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat				11 Laporan	1.405.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	1.822.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia				11 Laporan	1.822.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						44.770.000,00						-	49.500.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	44.770.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	49.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				33 Orang	3.520.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				12 Dokumen	41.250.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN BAGI HASIL	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		45.000.000,00	KECAMATAN HARAU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						9.876.500,00						-	14.500.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	9.876.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	14.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				11 Dokumen	1.580.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				11 Dokumen	1.350.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.000.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				11 Dokumen	1.762.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif				11 Dokumen	1.769.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				11 Laporan	1.791.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
	7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan				11 Laporan	1.624.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		2.500.000,00	KECAMATAN HARAU
		KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU						1.812.772.828,00							2.011.986.099,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						1.812.772.828,00							2.011.986.099,00	
	7.01	KECAMATAN						1.812.772.828,00							2.011.986.099,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						1.741.402.828,00						-	1.933.301.099,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.782.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	12.124.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	1.586.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		4.741.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD														
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1.230.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		2.054.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				6 Laporan	4.966.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		5.329.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.547.320.156,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	1.670.289.691,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				16 Orang/bulan	1.541.082.156,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.662.133.191,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	3.644.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.774.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	2.594.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		3.382.500,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-			-	2.515.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	4.035.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	2.515.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.035.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	10.700.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	13.460.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				16 Paket	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		10.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				16 Dokumen	2.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		3.460.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	75.591.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	107.182.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				10 Paket	550.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		1.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	14.585.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	6.260.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		9.845.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	4.330.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		4.971.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	49.866.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		61.366.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	4.681.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	4.681.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		25.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	30.177.672,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	33.650.408,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				20 Laporan	200.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		250.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	8.700.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		12.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	21.277.672,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		21.400.408,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	62.636.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	67.560.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	60.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		63.500.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	2.586.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		4.060.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						4.150.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	4.150.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	0,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				4 Laporan	4.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Mungka, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		0,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						33.170.000,00						-	43.585.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	28.060.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-	-	35.385.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				6 Lembaga K emasyarakat an	4.410.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		5.385.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				2 Laporan	23.650.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		30.000.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	5.110.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	8.200.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				240 Keluarga	5.110.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-		8.200.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						34.050.000,00						-	35.100.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	34.050.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkatan Pengembangan Wilayah Berwawasan Lingkungan	-	-	35.100.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan</i>				12 Dokumen	34.050.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Pangkalan Koto Baru, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Peningkata n Pengemb angan Wilayah Be rwawasan Lingkungan	-		35.100.000,00	KECAMATAN PANGKALAN KOTO BARU
		KECAMATAN KAPUR IX						2.088.857.730,00							0,00	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						2.088.857.730,00							0,00	
	7.01	KECAMATAN						2.088.857.730,00							0,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						2.002.857.730,00						-	0,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	2.002.857.730,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, panganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu</i>	-			100 %	7.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				2 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
		-	-	-	-	-	-	2.002.857.730,00	-	-	-	-	-	-	0,00	-
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi keuangan Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	-			100 %	1.785.983.730,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				17 Orang/bulan	1.781.983.730,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	-			100 %	1.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang sesuai aturan dan tepat waktu	-			100 %	1.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya administrasi umum Perangkat Daerah	-			100 %	63.500.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	48.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya pengadaan barang milik daerah untuk menunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	-			100 %	30.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	37.300.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	10.500.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	26.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah pada Perangkat Daerah	-			80 %	77.074.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				7 Unit	52.800.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	12.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	12.274.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						22.000.000,00						-	0,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase pelaksanaan koordinasi terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang efektif	-			80 %	2.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	-			80 %	20.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						28.000.000,00						-	0,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	28.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				7 Lembaga K emasyarakat an	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan														
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan				1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
4.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						28.000.000,00						-	0,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah di tingkat kecamatan	-			80 %	28.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
5.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						8.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase terlaksananya fasilitasi, rekomendasi dan koordinas pembinaan serta pengawasan pemerintahan desa di tingkat kecamatan yang efektif	-			80 %	8.000.000,00			-	-	-	-	0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				1 Dokumen	2.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa				1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Kapur IX, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		0,00	KECAMATAN KAPUR IX
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.307.271.206,00							8.989.452.342,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.307.271.206,00							8.989.452.342,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.307.271.206,00							8.989.452.342,00	
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.753.011.982,00						-	3.850.066.927,00	
	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	35.373.300,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	26.641.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	20.153.300,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		13.810.965,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18 Laporan	15.220.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		12.831.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	3.064.225.673,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	3.138.701.273,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				29 Orang/bulan	3.033.184.673,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		3.105.660.273,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				4 Laporan	19.191.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		20.191.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD				16 Laporan	11.850.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		12.850.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	10.000.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		11.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	186.038.509,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	195.428.689,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.066.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		12.100.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	3.366.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		20.725.280,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	35.742.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		36.740.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	13.853.409,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		14.853.409,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	5.010.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		6.010.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				24 Laporan	120.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		105.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	90.859.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	145.670.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	73.518.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		38.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	14.407.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		46.718.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	2.934.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		60.452.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	157.510.500,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	123.710.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	12.510.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		13.510.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				6 Laporan	144.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		109.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-			100 %	209.005.000,00			-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-	-	208.915.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	179.990.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatk an tata kelola pem erintahan yang baik dan bersih "SAKATO B ERINTEGR ITAS"	-		179.900.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	12.015.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		12.015.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	17.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		17.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						831.131.824,00						-	2.067.200.452,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	-			90 %	831.131.824,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	2.067.200.452,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				150 Orang	24.640.124,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		137.313.225,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>				650 Orang	182.234.100,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		241.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				120 Keluarga	22.185.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		44.294.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka														
			Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka				28 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0008	Pembentukan Paskibraka														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paskibraka				28 Orang	592.072.600,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.604.092.977,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						165.855.400,00						-	2.103.066.413,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik	-			90 %	165.855.400,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	2.103.066.413,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				390 Orang	63.090.400,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		569.509.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				150 Orang	93.465.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		1.091.288.303,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				12 Laporan	9.300.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		442.268.610,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						13.939.000,00						-	20.574.750,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas	-			90 %	13.939.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	20.574.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun				10 Dokumen	13.939.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		20.574.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						79.998.000,00						-	215.418.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Meningkatnya Kerukunan Umat beragama dan Pengawasan terhadap aliran atau Paham Keagamaan di Masyarakat	-			85 %	79.998.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	215.418.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				60 Orang	39.998.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Suliki, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		89.418.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				360 Orang	40.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		126.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						463.335.000,00						-	733.125.800,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Meningkatnya Kamtibmas demi terjaganya Stabilitas Nasional di Daerah	-			90 %	463.335.000,00			-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-	-	733.125.800,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				142 Orang	15.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		50.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				360 Orang	90.775.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		209.690.250,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				14 Dokumen	357.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "SAKATO BERINTEGRITAS"	-		473.435.550,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6.747.896.608,00							7.398.171.970,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6.342.554.808,00							6.982.114.863,00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6.342.554.808,00							6.982.114.863,00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.860.589.464,00						-	3.855.232.323,00	
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	3.860.589.464,00	-	-	-	-	-	-	3.855.232.323,00	-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	29.682.000,00			-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa an Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-	-	29.684.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	29.682.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatk an Ekonomi Kreatif Dan Berdaya Saing Kep ariwisataa an Tata Kelola Pemerintah an yang Baik	-		29.684.940,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	3.570.578.964,00			-	-	-	-	3.561.365.723,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Orang/bulan	3.519.074.964,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		3.519.022.723,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	35.520.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		-	-	-	-	-	-	3.860.589.464,00	-	-	-	-	-	-	3.855.232.323,00	-
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				5 Laporan	7.984.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.133.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Persentase Pemenuhan terhadap Penunjang Urusan Pemerintah]	-	-	-	-	-	3.860.589.464,00	-	-	-	-	-	-	3.855.232.323,00	-
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				12 Dokumen	8.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		12.210.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	34.090.000,00			-	-	-	-	30.084.860,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian														
			<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>				12 Dokumen	19.976.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		25.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>				2 Orang	14.114.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.084.860,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	116.428.000,00			-	-	-	-	91.710.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				12 Paket	4.991.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	74.727.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			<i>Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan</i>				5 Paket	31.560.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		31.560.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>				5 Laporan	5.150.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.150.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.153.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>				3 Unit	15.153.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	94.657.500,00			-	-	-	-	92.386.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				5 Unit	94.657.500,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		92.386.800,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						2.481.965.344,00						-	3.126.882.540,00	
		-	-	-	-	-	-	2.481.965.344,00	-	-	-	-	-	-	3.126.882.540,00	-
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	-	-			-	49.988.000,00			-	-	-	-	100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				100 Orang	49.988.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
		[Penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) Kabupaten Lima Puluh Kota]	-	-	-	-	-	2.481.965.344,00	-	-	-	-	-	-	3.126.882.540,00	-
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	-	-			-	1.800.560.344,00			-	-	-	-	2.239.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				2 Kegiatan	49.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		119.850.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya				10 Unit	30.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota				150 Orang	99.965.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				50 Keluarga	29.999.900,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	Meningkatk an Kualitas Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berp engetahuan , Terampil dan Berdaya Saing Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif "SAKATO ANDAL"	-		35.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				50 Orang	55.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		55.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				1 Dokumen	350.001.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		350.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				5 laporan	380.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		480.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana				13 Kawasan	805.594.544,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	-			-	377.000.000,00			-	-	-	-	477.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat				5 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				50 Orang	20.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis				89 Orang	35.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Harau, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		75.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	252.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		252.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kabupaten/Kota				2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	-	-			-	254.417.000,00			-	-	-	-	310.032.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	65.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		100.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)				30 Orang	39.999.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan				5 Kegiatan	149.417.200,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		160.032.540,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X	NON URUSAN						405.341.800,00							416.057.107,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						405.341.800,00							416.057.107,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						405.341.800,00						-	416.057.107,00	
		-	-	-	-	-	-	405.341.800,00	-	-	-	-	-	-	416.057.107,00	-
	X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	19.697.000,00			-	-	-	-	19.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Laporan	19.697.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		19.700.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	140.862.800,00			-	-	-	-	291.107.107,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				5 Paket	41.040.800,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.107.107,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				24 Laporan	99.822.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		250.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	64.266.000,00			-	-	-	-	20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			<i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>				10 Unit	64.266.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		20.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	96.000.000,00			-	-	-	-	78.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>				1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	59.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		41.280.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				5 Laporan	36.000.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		36.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	84.516.000,00			-	-	-	-	6.970.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				2 Unit	9.540.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		5.970.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	74.976.000,00	Kab. Lima Puluh Kota, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-		1.000.000,00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	J U M L A H							1.360.521.574.909,00							1.563.820.538.794,60	

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1 Indikator Kinerja Makro

Indikator Makro merupakan indikator gabungan (komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri dari Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rasio Gini, serta indikator terkait IPM antara lain Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah.

Pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama yang sangat penting untuk menjamin kesinambungan untuk menggerakkan pembangunan di daerah namun demikian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas juga diiringi dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka serta penurunan Tingkat Kemiskinan. Adapun proyeksi indikator kinerja makro Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2027 sebagaimana dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja Makro
Kabupaten Lima Puluh Tahun 2025 - 2027

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO	TARGET KINERJA			
		2025	2026		2027
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1.	Pertumbuhan ekonomi	%	5,35	5,35	5,47
2.	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	51,23	51,23	65,96
3.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,27	72,27	72,66
4.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,35	8,35	8,54
5.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,64	13,64	13,75
6.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,59	73,59	73,93
7.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,19% - 5,88%	5,19% - 5,88%	5,01%- 5,18%
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,71	3,63
9.	Rasio Gini	Rasio	0,207	0,207	0,202

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2025

6.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Daerah menggambarkan keberhasilan kinerja pemerintah daerah terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan yang ditunjukkan oleh akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pengukuran keberhasilan rencana pembangunan tahunan terutama dalam bingkai rencana pembangunan jangka menengah daerah dalam pencapaian Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 tercermin dari capaian indikator kinerja utama yang ditetapkan. Untuk mengukur keberhasilan program pembangunan yang telah ditentukan maka dipilih Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target capaian selama lima tahun ke depan menurut tujuan dan sasaran pada setiap misi yang disajikan, berikut target Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk tahun 2025-2027 dalam tabel berikut:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Daerah Berdasarkan Indikator Tujuan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun 2025 – 2027

No	Misi/Indikator Tujuan	Target			
		2025	2026		2027
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
	Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya “SAKATO BERMARTABAT”				
1	Indeks ABS-SBK	2.1	2.14	2.14	2.18
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	2%	2%	4%
3	Indeks Pembangunan Keluarga	63	63.4	63.4	63.8
	Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “SAKATO BERINTEGRITAS “				
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	3.1	3.12	3.12	3.14
2	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
	Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif “SAKATO ANDAL”				
1	Indeks Pembangunan Manusia	72.27	72.66	72.66	73.05
2	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 61.369.049	Rp. 62.871.993	Rp. 62.871.993	Rp. 64.374.937
	Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan “SAKATO SEJAHTERA “				
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.71	3.63	3.63	3.55
2	Pertumbuhan ekonomi	5.35	5.47	5.47	5.59
3	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	0.91	0.95	0.95	0.99
	Misi 5 : Meningkatkan produk pertanian dan perkebunan yang unggul dan berdaya saing "SAKATO UNGGUL"				
1	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	32.52%	33.24%	33.24%	33.96%
	Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan "SAKATO KUAT"				
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75.8	76.012	76.012	76.224
	Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"				
1	Indeks Desa	-	-	-	-

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2025

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Berdasarkan Indikator Sasaran
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2027

No	Misi/Indikator Sasaran	Target			
		2025	2026		2027
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
Misi 1 : Memantapkan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berbudaya “SAKATO BERMARTABAT”					
1	Indeks ABS SBK	2.1	2.14	2.14	2.18
2	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	0%	2%	2%	4%
3	Indeks Pembangunan Keluarga	63	63.4	63.4	63.8
Misi 2 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih “SAKATO BERINTEGRITAS “					
1	Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	-	-
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.29	3.38	3.38	3.46
3	Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.39	4.39	4.43
4	Indeks Reformasi Hukum	70	73	73	76
5	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%
Misi 3 : Meningkatkan sumber daya manusia yang andal, sehat, produktif dan kompetitif “ SAKATO ANDAL”					
1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8.35	8.54	8.54	8.74
2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	13.64	13.75	13.75	13.86
3	Usia Harapan Hidup (tahun)	73.59	73.93	73.93	74.27
4	Rasio Gini	0.207	0.202	0.202	0.198
5	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 61.369.049	Rp. 62.871.993	Rp. 62.871.993	Rp. 64.374.937
Misi 4 : Membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan “ SAKATO SEJAHTERA “					
1	Proporsi jumlah IKM	3.43%	3.51%	3.51%	3.59%
2	Rasio Kewirausahaan	6.92%	6.92%	6.92%	6.92%
3	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	0.862%	0.953%	0.953%	1,044%
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	3.71	3.63	3.63	3.55
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	39.06	40.978	40.978	42.896
6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	62.55%	62.89%	62.89%	63.23%
7	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	10.23	10.21	10.21	10.19
8	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13.57%	13.84%	13.84%	14.11%
9	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0.19	0.21	0.21	0.23
10	Rasio PDRB Industri Pengolahan	6.63	7.01	7.01	7.39
11	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	1	1.5	1.5	2
12	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) Kabupaten/Kota terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	1.611%	1.507%	1.507%	1.403%
Misi 5 : Meningkatkan pertanian yang unggul dan berdaya saing “SAKATO UNGGUL”					
1	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan(%)	32.52%	33.24%	33.24%	33.96%
Misi 6 : Meningkatkan infrastruktur dasar yang berkelanjutan “SAKATO KUAT”					
1	RT dengan Akses Sanitasi Aman	8.3	9.852	9.852	11.404
2	Akses Rumah Tangga Terhadap	14	15.5	15.5	17

No	Misi/Indikator Sasaran	Target			
		2025	2026		2027
		RPJMD	RPJMD	RKPD	RPJMD
1	2	3	4	5	6
	Sumber Air Minum Perpipaan				
3	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	46.18	48.87	48.87	51.56
4	Indeks tutupan lahan	75.39	75.46	75.46	75.53
5	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	26.74	29.08	29.08	31.42
6	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	13.83%	16.83%	16.83%	19.83%
Misi 7 : Meningkatkan kemajuan dan kemandirian Nagari "SAKATO MANDIRI"					
1	Persentase Desa Mandiri (%)	7.85%	7.93%	7.93%	8.01%

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2025

6.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah khususnya dalam pemenuhan kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan umum dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2025-2029 yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Target Indikator Kinerja Daerah untuk tahun 2025-2027 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 6.4
**Indikator Kinerja Daerah (IKD) Terhadap Capaian
 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2027**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1.	Konsumsi Listrik Per Kapita	kWh/Kapita	339	372	405
2.	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	83,13	83,67	84,21
3.	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	6,11	5,818	5,526
4.	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	m3/detik	0.03	0,04	0,05
5.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	77,56	78,96	80,46
6.	Indeks tutupan lahan	Indeks	75.39	75,46	75,53
7.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	75,8	76,01	76,22
8.	RT dengan Akses Sanitasi Aman	%	8,3	9,85	11,40
9.	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	%	26.74	29,08	31,42
10.	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	%	13,83%	16,83%	19,83%
11.	Indeks Risiko Bencana Daerah	Indeks	119,2	119,19-118,92	118,91-118,64
12.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	75,8	76,01	76,22

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
13.	Jumlah Penduduk	Jiwa	405.714	410.269	414.824
14.	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,12%	1,11%	1,10%
15.	Rasio Penduduk	%	100,70%	100,77%	100,85%
16.	Kepadatan Penduduk	Jiwa/Km2	124	123	121
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.	Laju Pertumbuhan ekonomi	%	5,35	5,47	5,59
2.	Tingkat Kemiskinan (%)	%	5,19% - 5,88%	5,01%- 5,18%	4,83%- 5,00%
3.	PDRB per Kapita ADHB (Rp. Juta)	Rp. Juta	51,23	65,96	80,69
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,71	3,63	3,55
5.	Rasio Gini	Rasio	0,207	0,202	0,198
6.	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	72,27	72,66	73,05
7.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp	Rp61.369.0 49	Rp62.871.9 93	Rp64.374.9 37
8.	Usia Harapan Hidup (tahun)	Tahun	73,59	73,93	74,27
9.	Kesehatan ibu dan anak Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	per 100.000 kelahiran hidup	105	104	103
10.	Prevalansi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	27	26,2	25,4
11.	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	45	53	61
12.	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	89%	89,50%	90,00%
13.	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	%	95%	95,2%	95,4%
14.	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	L: 62,08%;	L: 62,63%	L: 63,18%
15.	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	N: 37,65%	N: 39,13%	N: 40,62%
16.	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,35	8,54	8,74
17.	Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,64	13,75	13,86
18.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9,06	9,14	9,23
19.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	%	63,93%	65,61%	67,29%
20.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	%	22,71%	25,99%	29,27%
21.	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	%	1,03%	2,32%	3,61%
22.	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	0%	2%	4%
23.	Indeks ABS-SBK	Indeks	2,1	2,14	2,18
24.	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	63	63,4	63,8
25.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,49	0,48	0,47
26.	Indeks perlindungan khusus anak	Indeks	81,5	81,6	81,7
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	6,63	7,01	7,39
2.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	0,91	0,95	0,99
3.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (ribu orang)	Ribu orang	1	1,5	2
4.	Rasio PDRB Ekonomi Kreatif (%) terhadap Kabupaten/Kota	%	1,611%	1,507%	1,403%
5.	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	98,21%	98,22%	98,22%
6.	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah(%)	%	3,43%	3,51%	3,59%

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
7.	Rasio Kewirausahaan	%	6,92%	6,92%	6,92%
8.	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	0,862%	0,953%	1,044%
9.	ROA BUMD	%	0.001	0,002	0,003
10.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	39.06	40,98	42,90
11.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	62.55%	62.89%	63.23%
12.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	49.91	53.04	56.17
13.	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (%)	%	32,52%	33,24%	33,96%
14.	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	Juta/orang	68.788.021	70.006.474	71.224.927
15.	Indeks digital masyarakat Indonesia	Indeks	49.75	51.57	53.39
16.	Persentase dan stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	10.23	10.21	10.19
17.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	31.20%	31.35%	31.50%
18.	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	%	13.57%	13.84%	14.11%
19.	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	46,18	48.87	51,56
20.	Persentase Desa Mandiri (%)	%	7,85%	7,93%	8,01%
21.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0.19	0,21	0,23
22.	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	7	9,79	12,58
23.	Nilai Transaksi Saham Nilai Transaksi Saham per Kapita per Kabupaten / Kota (Rupiah)	Rupiah	789.608	951.242	1.112.876
24.	Total Kredit/PDRB	%	10,63	11,52	12,41
25.	Rasio PDRB sektor jasa keuangan	%	1.95	2	2,05
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM				
1.	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	73	76
2.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,29	3.38	3.46
3.	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,35	4,39	4,43
4.	Survey penilaian integritas (SPI KPK)(nilai)	Nilai	71,25 (rentan)	71,25 (rentan)	72,73 (rentan)
5.	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indeks	98.41	98,464	98,518
6.	Persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan	%	100%	100%	100%
7.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai	3,1	3,12	3,14
8.	Angka Kriminalitas (per 100.000)	per 100.000	112	107.4	102.8
9.	Indeks Kinerja Organisasi Masyarakat	Indeks	45	47	49
10.	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	70%	76%	82%
11.	Penyelesaian gangguan Kamtibmas	%	76.73%	77.30%	77.89%
	INDIKATOR KINERJA KUNCI				
I	Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
a.	Urusan Wajib Pendidikan				
1.	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	66,14	70,82	75,49
2.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	88,92	89,33	89,73
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	80,09	80,67	81,24
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan	%	97	97,50	98

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
	pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan				
b.	Urusan Wajib Kesehatan				
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	%	0,03	0,035	0,04
2.	Persentase RS rujukan kabupaten yang terakreditasi	%	100	100	100
3.	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100
4.	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	65	70	75
5.	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	65	70	75
6.	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	77,61	79,33	81,04
7.	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	65	70	75
8.	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	51,35	59,01	66,66
9.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	72,20	76,59	80,99
10.	Persentase penderita hipertensi mendapatkan kesehatan seusai standar	%	60	65	70
11.	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100
12.	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
13.	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	37,38	39,45	41,53
14.	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	67,51	73,12	78,72
c.	Urusan Wajib PUPR				
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	%	44,36	47,36	50,35
2.	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Provinsi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	%	0,00	0,00	0,00
3.	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	11,40	11,94	12,48
4.	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	%	66,64	70,31	73,98
5.	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	89,69	90,75	91,81
6.	Rasio Kepatuhan IMB Kab/Kota	%	100	100	100
7.	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten	%	61,29	62,61	63,93
8.	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	6,6	8,3	9,9
9.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan	%	99,43	99,54	99,65

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
	pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi				
d.	Urusan Wajib Perumahan dan Permukiman				
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kota	%	100	100	100
2.	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	%	0,83	1,66	2,49
3.	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	0,83	1,66	2,49
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	20,98	23,27	25,57
5.	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	0,83	1,66	2,49
e.	Urusan Wajib Trantimum dan Linmas				
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	0	0
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	18	18,5	19
5.	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	0	0	0
6.	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	0	0
f.	Urusan Wajib Sosial				
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	19,04	21,08	23,11
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota/kabupaten	%	100	100	100
II	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
a.	Urusan Wajib Tenaga Kerja				
1.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	1,67	3,34	5,01
2.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,8	5	5,5
3.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	60	65	70
4.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	60	65	70
5.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	9,88	14,93	19,97
b.	Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
1.	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	5,47	6,46	7,45

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2.	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100
3.	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	1,05	0,8	0,55
c.	Urusan Wajib Pangan				
1.	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	%	81,00	81,50	82,00
d.	Urusan Wajib Pertanahan				
1.	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
2.	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	0	0	0
3.	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0	0	0
4.	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	18	18,5	19
e.	Urusan Wajib Lingkungan Hidup				
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	75,8	76,01	76,22
2.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	28,09	31,38	34,66
3.	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	93,75	95	96
f.	Urusan Wajib Adminduk Capil				
1.	Perekaman KTP Elektronik	%	98,95	99,03	99,11
2.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	53,01	58,69	64,37
3.	Kepemilikan akta kelahiran	%	97,3	98,36	99,42
4.	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data Kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	70,00	73,00	76,00
g.	Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				
1.	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	50	50	50
2.	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	54,17	65,00	75,83
h.	Urusan Wajib PP dan KB				
1.	Total Fertility Rate (TFR)	%	2,39	2,42	2,45
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	70,46	71,72	72,98
3.	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	22,78	24,28	25,77
i.	Urusan Wajib Perhubungan				
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	72,5	75	77,5
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota		43,25	44,94	46,41

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
j.	Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika				
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
2.	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100
3.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
k.	Urusan Wajib Koperasi dan UMKM				
1.	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	18,20	21,66	25,11
2.	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	5,35	6,33	7,31
l.	Urusan Wajib Penanaman Modal				
1.	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	37,02	38,61	40,19
m.	Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga				
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,11	0,12	0,13
2.	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	27,32	31,34	35,35
3.	Peningkatan prestasi olahraga	Orang	43	53	64
n.	Urusan Wajib Statistik				
1.	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100
2.	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
o.	Urusan Wajib Persandian				
1.	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	40,74	41,78	42,81
p.	Urusan Wajib Kebudayaan				
1.	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	0	2	4
q.	Urusan Wajib Perpustakaan				
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	81,39	83,11	84,83
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	90,60	91,48	92,36
r.	Urusan Wajib Kearsipan				
1.	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	59,06	64,07	69,07
2.	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan	%	27,05	30,12	33,20

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
	kesejahteraan rakyat				
III	Urusan Pilihan				
a.	Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan				
1.	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kota di (sumber data: one data KKP)	Ton	44.485,19	44.944,45	45.342,28
b.	Urusan Pilihan Pariwisata				
1.	Persentase pertumbuhan jumlah Wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	40,49	42,49	44,49
2.	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	1,00	1,15	1,30
3.	Tingkat hunian akomodasi	%	50,00	55,00	60,00
4.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,23	2,70	3,18
5.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,23	5,57	6,91
c.	Urusan Pilihan Pertanian				
1.	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	1.038,40	1.557,60	2.076,80
2.	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	50,65	51,65	52,65
d.	Urusan Pilihan Energi dan Sumber daya Mineral				
1.	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	%	0	0	0
e.	Urusan Pilihan Perdagangan				
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	79,00	80,00	81,00
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	60,62	65,62	70,62
3.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	13,78	17,95	22,13
f.	Urusan Pilihan Perindustrian				
1.	Pertambahan jumlah Industri kecil dan menengah di provinsi	%	2,89	4,89	6,89
2.	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen
3.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100
4.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi terkait	%	0	0	0
5.	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	%	0	0	0
6.	Tersedianya informasi Industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100
g.	Urusan Pilihan Transmigrasi				
1.	Persentase Luas Kawasan Tranmigrasi yang	%	0	0	25

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
	Berkembang				
2.	Persentase Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	%	80	85	90
IV	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan				
a.	Sekretariat Daerah				
1.	Persentase Terlaksananya Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	%	100	100	100
2.	Persentase terlaksananya koordinasi dan fasilitasi bidang perekonomian	%	100	100	100
b.	Sekretariat DPRD				
1.	Persentase terselenggaranya program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	%	100	0	100
V	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan				
a.	Perencanaan				
1.	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	13,39	13,89	14,39
2.	Rasio PAD	%	8,66	9,40	10,14
3.	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level 3	Level 3	Level 3
5.	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	73,045	74,31	75,575
6.	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP
b.	Manajemen Keuangan				
1.	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	%	0,75	0,73	0,71
2.	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	5,63	5,43	5,23
3.	Manajemen Aset		Ada	Ada	Ada
4.	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	3,66	3,17	2,68
c.	Kepegawaian				
1.	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	75,55	77,05	78,55
2.	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	41,92	42,92	43,92
3.	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	23,7	26,97	30,24
d.	Pendidikan dan Pelatihan				
1.	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi		30	32	35
e.	Penelitian dan Pengembangan				
1.	Persentase Hasil Kelitbangan yang Termanfaatkan dalam Penyusunan Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan	%	8	10	12
VI	Unsur Pengawas				
a.	Inspektorat				
1.	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1		in 83,5	in 84	in 84,5
2.	Tindaklanjut Rekomendasi Inspektorat Tahun Anggaran N-1		eks 85	eks 86	eks 86,5

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
3.	Level Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 3
4.	Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3
VII	Unsur Kewilayahan				
a.	Camat Akabiluru				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	89,50	89,60	89,70
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	72,00	72,10	72,20
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	50	50	55
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	89,50	50	55
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	89,50	50	55
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	50	50	55
b.	Camat Bukit Barisan				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan IKM	Nilai	50	50	55
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	55	50	55
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	65	60	65
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	65	60	65
c.	Camat Guguak				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	65/90	50/90	55/90
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	60	50	55
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	0	50	55
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	60	50	55
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	50	55
d.	Camat Gunuang Omeh				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SAKIP	Nilai	0	0	90
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	Nagari	3 Nagari	3 Nagari	3 Nagari
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	Nagari	0	0	3 Nagari
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	95	95	95
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	Nagari	0	0	3 Nagari
e.	Camat Harau				
1.	- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - SAKIP	Nilai	95	95	95
2.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	70	75	75
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	70	75	75
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	70	75	75
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	70	75	75
f.	Camat Kapur IX				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	90	90.5	91
2.	SAKIP		55	60	65
3.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	50	53	55

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	0	50	53
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	50	53	55
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	50	53	55
g.	Camat Lareh Sago Halaban				
1.	Nilai IKM	Nilai	91	0	91
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	65	0	66
3.	Tingkat Pemberdayaan Msyarakat Nagari	%	65	65	66
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	65
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum di Kecamatan	%	65	65	66
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	65	65	0
h.	Camat Luak				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SAKIP	Nilai	85	85	86
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	85	85	86
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	0	0	86
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	85	85	86
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	0	86
i.	Camat Mungka				
1.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	0	50	55
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	72	73	73
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	70	73	73
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	0	50	55
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	50	55
j	Camat Pangkalan Koto Baru				
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	0	67	68
2.	Nilai Indeks Kepausan Masyarakat (IKM)	Nilai	0	91,30	91,50
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	80	81	82
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	%	0	0	70
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerinttahan Umum tingkat Kecamatan	%	50	60	70
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Nagari	%	0	0	70
k	Camat Payakumbuh				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	80	80	80
2.	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Nilai	70	70	70
3.	Tingkat Pemberdayaan Masyarakat Nagari	%	80	80	80
4.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	0	80	80
5.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	80	80	80

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target Capaian Tahun		
			2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
6.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	80	80	80
l.	Camat Situjuah Limo Nagari				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SAKIP	Nilai	95	80	80
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	100	100	100
3.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	100	80	80
m.	Camat Suliki				
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan SAKIP	Nilai	0	0	55
2.	Tingkat pemberdayaan masyarakat nagari	%	46	50	55
3.	Tingkat Koordinasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan	%	0	0	55
4.	Tingkat Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Tingkat Kecamatan	%	45	50	55
5.	Tingkat Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan nagari	%	0	0	55
VIII	Unsur Pemerintahan Umum				
a.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik				
1.	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	90	90	90
2.	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Politik	%	90	90	91
3.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif	%	90	90	91
4.	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	%	90	90	90
5.	Persentase Konflik Sosial yang diselesaikan	%	85	85	85

Sumber : RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dan Hasil Analisa Bappelitbangda 2025

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 adalah rencana kerja tahunan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025–2029, dimana program dan kegiatan yang dituangkan di dalam RKPD merupakan penggalan dari RPJMD dan Renstra PD untuk tahun 2026. Program dan Kegiatan ini tidak saja merupakan rencana teknokratik dari masing-masing PD tetapi juga diperkaya dengan usulan dan masukan dari masyarakat melalui Musrenbang Nagari, Kecamatan dan Kabupaten serta reses DPRD. Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2026 diharapkan dapat memenuhi amanat RPJMD dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka RKPD Tahun 2026 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menetapkan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026, pedoman bagi perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026, serta pedoman bagi *stakeholder* lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2026.

Berkaitan dengan hal di atas serta untuk menjamin terlaksananya program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan pada tahun 2026 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 sebagai berikut :

1. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati (Kepala Daerah) dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah.
2. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilaksanakan dibawah koordinasi Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing PD.
4. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Lima Puluh Kota berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta fasilitasi terhadap penjabaran RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2026.
5. Seluruh PD dan *stakeholders* dan/atau pelaku pembangunan lainnya berkewajiban melaksanakan program-program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 secara terintegrasi dan dengan mewujudkan sinergitas antar *stakeholder* terkait.
6. RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026.
7. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan, setiap PD berkewajiban melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta jika diperlukan melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan, dan melaporkan hasilnya kepada Bupati melalui Bappelitbangda Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2026 dilakukan secara berkala setiap triwulan dan pada akhir tahun pelaksanaan RKPD terhadap indikator kinerja sasaran yang sudah ditetapkan dengan menggunakan data yang diperoleh dari PD dan lembaga resmi lainnya yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota. Evaluasi RKPD juga dilakukan terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan masing-masing PD dan dilaporkan sesuai dengan format yang diatur dalam peraturan perundangan.

Disamping beberapa kaidah yang dirumuskan diatas, maka untuk kesuksesan pelaksanaan RKPd Kabupaten Lima puluh Kota Tahun 2026, maka diperlukan dukungan dan komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya, termasuk dukungan dari lembaga legislatif, Pemerintah Nagari dan masyarakat, serta seluruh *stakeholders* yang merasa berkepentingan dan memiliki Kabupaten Lima Puluh Kota.

BUPATI LIMA PULUH KOTA,



SAFNI

BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

Jln. Drs. Aziz Haily, MA - Sarilamak

Kode Pos 26271

Telp (0752) 7470700 Fax (0752) 747 0774